



Pemerintah Provinsi Riau

**Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah**

RPJMD

**Provinsi Riau
Tahun 2025 – 2029**

***Riau Berbudaya Melayu, Dinamis,
Ekologis, Agamis dan Maju
(Riau Bedelau)***

Tahun 2025



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

PROVINSI RIAU TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025–2029;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025–2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Riau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Riau.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- (2) RPJMD disusun mempedomani RPJPD dan RPJMN.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Daerah;
 - c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui penyusunan RKPD setiap 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan mempedomani RPJMD.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- (3) Tatacara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);

b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 September 2025

GUBERNUR RIAU,

TTD

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : (7-150/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YAN DHARMADI, SH, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19840326 200903 1 003



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI
RIAU TAHUN 2025 – 2029

I. UMUM

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah (PD) dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Tahun 2025 – 2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dimaksudkan untuk menyampaikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Riau pada Tahun 2025 – 2029 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi Ketentuan Umum, RPJMD, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup serta dokumen RPJMD.

Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah.
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025–2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menelaah kinerja pembangunan Provinsi Riau 5 (lima) tahun terakhir baik berdasarkan analisis gambaran umum kondisi daerah maupun analisis gambaran umum keuangan daerah.
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah provinsi beberapa tahun terakhir dan rumusan permasalahan pembangunan kabupaten/kota.
3. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah terpilih.
4. Menelaah sasaran dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025 – 2045 tahap pertama.
5. Merumuskan tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan daerah serta kerangka pendanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.
6. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR: 7

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xxv
Bab I Pendahuluan	I-1
1.1. Latar Belakang Penyusunan	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.4. Maksud dan Tujuan	I-10
1.5. Sistematika Penulisan	I-11
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah	II-1
2.1.1.1. Luas dan Kondisi Geografis	II-1
2.1.1.2. Posisi dan Peran Strategis Daerah	II-2
2.1.1.3. Luas Tutupan Lahan di Provinsi Riau..	II-4
2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam.....	II-5
2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	
Hidup (DDDTLH).....	II-7
2.1.3.1. DDDTLH Penyedia Air.....	II-7
2.1.3.2. Daya Dukung Pangan.....	II-11
2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian	
Pangan	II-13
2.1.4.1. Indeks Ketahanan Pangan (IKP).....	II-13
2.1.4.2. Prevalensi Ketidacukupan	
Konsumsi Pangan.....	II-15
2.1.4.3. Konsumsi Listrik per Kapita	II-17
2.1.4.4. Akses Rumah Tangga Terhadap	
Konsumsi Air Minum.....	II-19
2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas	II-27
2.1.5.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
(IKLH)	II-27

2.1.5.2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman.....	II-28
2.1.5.3. Persampahan.....	II-32
2.1.5.4. Kerusakan Kawasan Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Riau	II-33
2.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	II-35
2.1.6.1. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	II-35
2.1.6.2. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	II-37
2.1.6.3. Kawasan Rawan Bencana.....	II-38
2.1.6.4. Hotspot dan Luas Lahan Terbakar di Provinsi Riau	II-40
2.1.6.5. Indeks Risiko Bencana (IRB)	II-41
2.1.6.6. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	II-42
2.1.7. Demografi	II-44
2.1.7.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	II-44
2.1.7.2. Komposisi Penduduk	II-46
2.1.7.3. Kepadatan Penduduk	II-51
2.1.7.4. Proyeksi Jumlah Penduduk.....	II-53
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-56
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	II-56
2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	II-56
2.2.1.2. Angka Kemiskinan.....	II-58
2.2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto	II-63
2.2.1.4. PDRB Per Kapita.....	II-72
2.2.1.5. Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK)	II-75
2.2.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	II-76
2.2.1.7. Indeks Gini.....	II-80
2.2.1.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Modal Manusia (IMM)	II-82
2.2.1.9. Nilai Tukar Petani (NTP).....	II-85
2.2.1.10. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	II-87

2.2.1.11. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	II-88
2.2.1.12. Koperasi	II-89
2.2.1.13. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .	II-93
2.2.1.14. Perindustrian.....	II-94
2.2.1.15. Pariwisata.....	II-97
2.2.1.16. Kelautan dan Perikanan	II-101
2.2.1.17. Tanaman Pangan dan Hortikultura	II-107
2.2.1.18. Perkebunan	II-110
2.2.1.19. Perternakan dan Kesehatan hewan	II-112
2.2.1.20. Kehutanan.....	II-119
2.2.2. Kesehatan untuk Semua	II-120
2.2.2.1. Umur Harapan Hidup (UHH)	II-120
2.2.2.2. Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	II-122
2.2.2.3. Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	II-122
2.2.2.4. <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate</i> (mCPR)	II-123
2.2.2.5. <i>Unmet Need</i> (Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi)	II-126
2.2.2.6. <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR) Usia 15- 19 Tahun.....	II-128
2.2.2.7. Indeks Keluarga Sehat (IKS)	II-128
2.2.2.8. Fasilitas dan Rasio Pelayanan Kesehatan.....	II-133
2.2.2.9. Angka Kematian Ibu	II-137
2.2.2.10. Prevalensi Balita Gizi Buruk	II-138
2.2.2.11. Prevalensi Balita Gizi Kurang.....	II-139
2.2.2.12. Prevalensi Stunting Balita	II-140
2.2.2.13. Pengendalian Penyakit Tuberkulosis	II-142
2.2.2.14. Indeks Pembangunan Olahraga.....	II-145
2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata.....	II-146
2.2.3.1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	II-146
2.2.3.2. Harapan Lama Sekolah (HLS)	II-147
2.2.3.3. Angka Literasi/Numerasi.....	II-148
2.2.3.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	II-149

2.2.3.5.	Indeks Literasi Digital.....	II-151
2.2.3.6.	Angka Partisipasi Kasar SD/SMP/SMA Sederajat	II-151
2.2.3.7.	Angka Partisipasi Murni SD/SMP/SMA Sederajat	II-154
2.2.3.8.	Angka Partisipasi Sekolah	II-157
2.2.3.9.	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas dengan Penduduk Usia Sekolah.....	II-159
2.2.3.10.	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	II-162
2.2.4.	Perlindungan Sosial yang Adaptif.....	II-164
2.2.4.1.	Kepemilikan Jaminan Sosial.....	II-164
2.2.4.2.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	II-167
2.2.4.3.	Perlindungan Tenaga Kerja.....	II-170
2.2.4.4.	Penanganan Sosial	II-174
2.2.5.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju.....	II-183
2.2.5.1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB).....	II-183
2.2.5.2.	Indeks Pembangunan Kebudayaan.....	II-184
2.2.5.3.	Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya	II-186
2.2.6.	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	II-190
2.2.6.1.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	II-190
2.2.6.2.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	II-190
2.2.6.3.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	II-192
2.2.6.4.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	II-193
2.2.6.5.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).....	II-194
2.3.	Aspek Daya Saing Daerah	II-195
2.3.1.	Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II-195
2.3.1.1.	Angka Ketergantungan	II-195
2.3.2.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi.....	II-197

2.3.2.1. Rasio Kewirausahaan Daerah.....	II-197
2.3.2.2. Ketenagakerjaan.....	II-197
2.3.2.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	II-201
2.3.2.4. Produktivitas Tenaga Kerja.....	II-204
2.3.2.5. Komposisi Penduduk Bekerja Berdasarkan Karakteristik.....	II-205
2.3.2.6. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal.....	II-208
2.3.2.7. Pekerja Disabilitas.....	II-211
2.3.2.8. Indeks Inovasi Daerah.....	II-212
2.3.2.9. Pemanfaatan Hasil Riset.....	II-213
2.3.2.10. Ekonomi Kreatif.....	II-214
2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau.....	II-216
2.3.3.1. Indeks Ekonomi Hijau.....	II-216
2.3.3.2. Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT)	II-217
2.3.4. Transformasi Digital.....	II-220
2.3.4.1. Indeks Transformasi Digital.....	II-220
2.3.4.2. Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi.....	II-221
2.3.4.3. Low Signal (Sinyal Lemah) dan <i>Blankspot</i>	II-222
2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.....	II-223
2.3.5.1. Investasi PMDN dan PMA.....	II-223
2.3.5.2. Ekspor Bersih Perdagangan.....	II-225
2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.....	II-233
2.3.6.1. Kondisi Kawasan di Provinsi Riau.....	II-233
2.3.6.2. Aksesibilitas Transportasi.....	II-239
2.3.6.3. Infrastruktur Sumber Daya Air.....	II-248
2.3.6.4. Pengaman Pantai di Pulau Terluar.....	II-254
2.3.6.5. Infrastruktur Pengendali Banjir.....	II-255
2.3.6.6. Energi dan Sumber Daya Mineral.....	II-255
2.3.6.7. Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau.....	II-259

2.3.6.8. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan.....	II-262
2.3.6.9. Status Kepemilikan Tempat Tinggal.....	II-263
2.3.6.10. Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	II-265
2.3.6.11. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	II-269
2.3.6.12. Perekonomian Perdesaan.....	II-274
2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro.....	II-289
2.3.7.1. Laju Inflasi	II-289
2.4. Aspek Pelayanan Umum.....	II-290
2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.....	II-290
2.4.1.1. Indeks Reformasi Hukum (IRH)	II-290
2.4.1.2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) /Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI)	II-290
2.4.1.3. Indeks Pelayanan Publik (IPP).....	II-292
2.4.1.4. Survey Penilaian Integritas (SPI)	II-293
2.4.1.5. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	II-294
2.4.1.6. Indeks Profesionalitas (IP) ASN	II-295
2.4.1.7. Nilai survey Indeks BerAKHLAK.....	II-297
2.4.1.8. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.....	II-298
2.4.1.9. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II-299
2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial.....	II-300
2.4.2.1. Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda)	II-300
2.4.2.2. Persentase Capaian Aksi HAM	II-301
2.4.2.3. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	II-303
2.4.2.4. Indeks Rasa Aman	II-304
2.4.2.5. Indeks Ketentraman dan Ketertiban	II-305
2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	II-307
2.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah	II-307

2.4.3.2. Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Riau.....	II-310
2.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan	II-311
2.5. Kondisi Keuangan Daerah	II-325
2.5.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	II-325
2.5.1.1. Pendapatan Daerah	II-329
2.5.1.2. Belanja Daerah.....	II-330
2.5.1.3. Pembiayaan Daerah.....	II-333
2.5.2. Neraca Daerah	II-334
2.5.2.1. Aset Daerah.....	II-338
2.5.2.2. Kewajiban.....	II-338
2.5.2.3. Ekuitas.....	II-338
2.5.3. Rasio Keuangan Pemerintah	II-339
2.5.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	II-341
2.5.4.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	II-341
2.5.4.2. Analisis Pembiayaan Daerah	II-343
2.6. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan	II-347
2.6.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah.....	II-347
2.6.1.1. Proyeksi Pendapatan Daerah	II-347
2.6.1.2. Proyeksi Belanja Daerah.....	II-349
2.6.1.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah.....	II-350
2.6.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	II-353
2.6.2.1. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat.....	II-353
2.6.2.2. Peta Kapasitas Fiskal.....	II-353
2.7. Kebijakan Keuangan Daerah	II-355
2.7.1. Alternatif Pembiayaan Pembangunan	II-355
2.7.2. Kebijakan Belanja Pegawai	II-359
2.7.3. Analisis Bantuan Keuangan.....	II-360
2.8. Permasalahan Pembangunan	II-365
2.8.1. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul dan Sejahtera	II-365
2.8.2. Belum Optimalnya Nilai Tambah Komoditi Unggulan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi....	II-370

2.8.3. Belum Optimalnya Tatakelola Pemerintahan Yang Berintegritas dan Adaptif	II-373
2.8.4. Masih Tingginya Pengaruh Ekonomi Global Dan Regional.....	II-375
2.8.5. Masih Tinggi Ketimpangan Pembangunan Wilayah.....	II-376
2.8.6. Belum Optimalnya Penyediaan, Konektivitas Transportasi dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.....	II-379
2.8.7. Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup.....	II-382
2.8.8. Kurang Pengamalan Budaya Dalam Kehidupan Bermasyarakat	II-384
2.8.9. Belum optimalnya Demokrasi Substansial dan Penanganan Konflik di Masyarakat.....	II-385
2.9. Isu Strategis	II-386
2.9.1. Isu Strategis Global	II-387
2.9.2. Isu Strategis Nasional	II-389
2.9.3. Isu Strategis Regional	II-391
2.9.4. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan (Isu KLHS)	II-394
2.9.5. Rumusan Isu Strategis Provinsi Riau.....	II-398

Bab III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH	III-1
3.1. Visi dan Misi	III-1
3.1.1. Visi	III-1
3.1.2. Misi	III-4
3.2. Tujuan dan Sasaran.....	III-7
3.3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	III-16
3.4. Arah Pembangunan Wilayah	III-86
3.4.1. Arah Pengembangan Provinsi Riau dalam RPJMN Tahun 2025-2029	III-86
3.4.2. Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Riau Pendekatan Wilayah Pengembangan	III-110

3.4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya di Provinsi Riau	III-125
3.4.3.1. Kawasan Lindung.....	III-126
3.4.3.2. Kawasan Budi Daya	III-128
3.5. Pembangunan Rendah Karbon.....	III-130
3.6. Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.....	III-133
3.7. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas	III-137
Bab IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	IV-1
4.1. Program Perangkat Daerah	IV-2
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-65
Bab V PENUTUP	V-1
5.1. Kesimpulan	V-2
5.2. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan	V-5
5.3. Pelaksanaan Pembangunan Daerah	V-5
5.4. Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan.....	V-6
5.5. Pengarusutamaan Pembangunan.....	V-6
5.6. Manajemen Resiko	V-9

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Riau	II-2
Tabel 2.2	Luas Tutupan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2022 ...	II-5
Tabel 2.3	Status DDDTLH Penyedia Air Provinsi Riau	II-8
Tabel 2.4	Telaah Luas dan Sebaran Status Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Air Tumpang Susun Pola Ruang di Provinsi Riau	II-10
Tabel 2.5	Status DDDTLH Penyedia Pangan Provinsi Riau.....	II-12
Tabel 2.6	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024	II-14
Tabel 2.7	Daerah Rentan Pangan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024.....	II-15
Tabel 2.8	<i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i> Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-16
Tabel 2.9	<i>Prevalence of Undernourishment (PoU) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2024</i>	II-17
Tabel 2.10	Konsumsi Listrik Provinsi Riau Tahun 2021-2024	II-18
Tabel 2.11	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Bersih dan Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses terhadap Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024	II-20
Tabel 2.12	Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan di Wilayah Provinsi Riau Tahun 2023.....	II-24
Tabel 2.13	Perjanjian SPAM Regional Durolis	II-25
Tabel 2.14	Data Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Non Jaringan Perpipaan di Wilayah Provinsi Riau Tahun 2023	II-26
Tabel 2.15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-27
Tabel 2.16	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2024	II-29
Tabel 2.17	Kondisi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di Provinsi Riau	II-31

Tabel 2.18	Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan Tahun 2020–2024	II-32
Tabel 2.19	Jumlah Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-33
Tabel 2.20	Kerusakan Kawasan Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-33
Tabel 2.21	Luas Kebun dalam Kawasan Hutan di Provinsi Riau Tahun 2024	II-34
Tabel 2.22	Capaian Emisi GRK Provinsi Riau Tahun 2019-2023*.....	II-35
Tabel 2.23	Capaian Emisi GRK Provinsi Riau Tahun 2019-2023 (Perhitungan Formulasi Baru).....	II-36
Tabel 2.24	Capaian Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Riau terhadap Baseline Tahun 2010-2024	II-38
Tabel 2.25	Kejadian Bencana Hidrometeorologi Tahun 2023-2024	II-39
Tabel 2.26	Rekapitulasi Jumlah Hotspot dan Luas Lahan Terbakar di Provinsi Riau Tahun 2020-2024.....	II-40
Tabel 2.27	Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2020-2024.....	II-42
Tabel 2.28	Nilai Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 - 2024	II-43
Tabel 2.29	Perkembangan Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024	II-44
Tabel 2.30	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio di Provinsi Riau Tahun 2024.....	II-47
Tabel 2.31	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Provinsi Riau Tahun 2020-2024.....	II-51
Tabel 2.32	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024.....	II-52
Tabel 2.33	Total Fertility Rate (TFR) dan Infant Mortality Rate (IMR) Tahun 2025-2030	II-55

Tabel 2.34	Perkembangan Indikator Kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-59
Tabel 2.35	Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023-2024	II-60
Tabel 2.36	Kondisi Kemiskinan Esktreem Provinsi Riau Tahun 2021-2024	II-61
Tabel 2.37	Indikator Kemiskinan Menurut Wilayah Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2024	II-62
Tabel 2.38	Nilai dan Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024.....	II-65
Tabel 2.39	Nilai dan Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024.....	II-66
Tabel 2.40	Kontribusi Pertumbuhan Sektoral dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 (%)	II-67
Tabel 2.41	Kontribusi Pertumbuhan Sektoral dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 (%)	II-68
Tabel 2.42	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Termasuk Minyak Bumi dan Gas Tahun 2020-2024 (Rp. Milyar).....	II-71
Tabel 2.43	PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2020-2024 (Juta Rp)	II-74
Tabel 2.44	Perkembangan Rasio DPK Terhadap PDRB ADHB Provinsi Riau Tahun 2019-2023	II-75
Tabel 2.45	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2024.	II-77
Tabel 2.46	Jumlah Angkatan Kerja, Pencari Kerja dan Penempatan di Kabupaten/Kota Tahun 2024	II-79
Tabel 2.47	Indeks Gini Provinsi Riau Tahun 2020-2024.....	II-81
Tabel 2.48	Indeks Gini Kabupaten-Kota se-Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024	II-82
Tabel 2.49	Perkembangan Komponen Indikator IPM Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-84

Tabel 2.50	IPM Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024	II-85
Tabel 2.51	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-86
Tabel 2.52	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Per Sektor Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-86
Tabel 2.53	Pekerja Miskin dan Rentan (Kuintil 1) yang Bekerja di Sektor Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan di Provinsi Riau Tahun 2020-2024.....	II-87
Tabel 2.54	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2024.	II-89
Tabel 2.55	Perkembangan Koperasi di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024	II-90
Tabel 2.56	Keragaan Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024.....	II-92
Tabel 2.57	Perkembangan UMKM di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024	II-93
Tabel 2.58	Jumlah Usaha/Perusahaan Industri Pengolahan Besar dan Sedang per Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024.....	II-95
Tabel 2.59	Lokasi Kawasan Industri di Provinsi Riau Tahun 2024	II-96
Tabel 2.60	Kondisi SIKM di Provinsi Riau Tahun 2024.....	II-96
Tabel 2.61	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Menurut Pintu Masuk Utama dan Mobile Positioning Data (MPD) Tahun 2020-2024	II-98
Tabel 2.62	Rata-rata Lama Menginap Tamu di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024.....	II-99
Tabel 2.63	Jumlah Objek Wisata Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-100
Tabel 2.64	Rasio Produksi dan Konsumsi Ikan di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024.....	II-101
Tabel 2.65	Rasio Produksi dan Konsumsi Ikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024.....	II-102
Tabel 2.66	Produksi Perikanan Menurut Jenis di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024.....	II-103

Tabel 2.67	Produksi Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024.....	II-105
Tabel 2.68	Produktivitas Hasil Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024	II-106
Tabel 2.69	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024	II-107
Tabel 2.70	Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024.....	II-108
Tabel 2.71	Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayur-Sayuran di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024.....	II-109
Tabel 2.72	Perkembangan Luas Panen dan Produksi Buah-Buahan di Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-110
Tabel 2.73	Perkembangan Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Komoditi Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024.....	II-111
Tabel 2.74	Populasi Ternak dan Produksi Daging di Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-113
Tabel 2.75	Rasio Produksi dan Konsumsi Daging Ruminansia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024	II-114
Tabel 2.76	Rasio Produksi dan Konsumsi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024.....	II-115
Tabel 2.77	Rasio Produksi dan Konsumsi Telur Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2024	II-115
Tabel 2.78	Jumlah Kejadian Penyakit dan Jumlah Kasus Hewan Sakit Tahun 2020-2024	II-117
Tabel 2.79	Kawasan Hutan di Provinsi Riau Berdasarkan SK 903/MenLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 dan SK Nomor SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021PKTL/KUH/PLA.2/10/2021.....	II-120
Tabel 2.80	Rasio Kawasan Lindung terhadap Total Luas Kawasan Hutan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024	II-120

Tabel 2.81	Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Riau Tahun 2020-2023	II-122
Tabel 2.82	Perkembangan Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-125
Tabel 2.83	Indeks Keluarga Sehat Provinsi Riau Tahun 2023 – 2024	II-133
Tabel 2.84	Jumlah Fasilitas dan Rasio Pelayanan Kesehatan di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024	II-134
Tabel 2.85	Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Tahun 2024	II-135
Tabel 2.86	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk Provinsi Riau Tahun 2024	II-136
Tabel 2.87	Perkembangan Jumlah Kematian Ibu Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024	II-137
Tabel 2.88	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024.....	II-138
Tabel 2.89	Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024	II-139
Tabel 2.90	Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2024.	II-140
Tabel 2.91	Perkembangan Prevalensi Stunting Balita Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024	II-142
Tabel 2.92	Perkembangan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Provinsi Riau Tahun 2021-2024	II-145
Tabel 2.93	Perkembangan Angka Literasi, Numerasi Nasional dan Provinsi Riau Tahun 2021-2024	II-149
Tabel 2.94	Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2022-2024	II-150
Tabel 2.95	Perkembangan Capaian Komponen Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Riau Tahun 2022-2024.....	II-150

Tabel 2.96	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-152
Tabel 2.97	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-154
Tabel 2.98	Angka Partisipasi Sekolah Riau dan Indonesia Sesuai Jenjang Pendidikan Tahun 2021-2024 di Provinsi Riau.....	II-158
Tabel 2.99	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas dengan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2023/2024	II-160
Tabel 2.100	Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2021-2024	II-162
Tabel 2.101	Cakupan Jaminan Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2024	II-168
Tabel 2.102	Perkembangan Perlindungan Tenaga Kerja se-Provinsi Riau Tahun 2020-2024.....	II-172
Tabel 2.103	Perkembangan PPKS Provinsi yang Terlayani Tahun 2020-2024	II-175
Tabel 2.104	Jumlah PPKS Kabupaten/Kota Yang terlayani dari Tahun 2024	II-177
Tabel 2.105	Jumlah Perkembangan PSKS Provinsi Riau dari Tahun 2020-2024	II-179
Tabel 2.106	Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial Provinsi Riau Tahun 2021 – 2024	II-181
Tabel 2.107	Perkembangan Jumlah PPKS Berdasarkan Pelayanan Minimum (SPM) Bidang yang Terlayani Sosial Kewenangan Provinsi Tahun 2020-2024	II-182
Tabel 2.108	Perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024	II-183
Tabel 2.109	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2019–2023	II-185
Tabel 2.110	Penetapan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya Provinsi Riau Tahun 2019-2023.....	II-186
Tabel 2.111	Rekapitulasi Data Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2019 - 2023	II-187
Tabel 2.112	Data Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi Tahun 2020 – 2023.....	II-188

Tabel 2.113	Data Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dikembangkan Tahun 2020 – 2023	II-188
Tabel 2.114	Data OPK Yang Dimanfaatkan Tahun 2020 – 2023...	II-189
Tabel 2.115	Indeks Perlindungan Anak Provinsi Riau Tahun 2021-2024	II-190
Tabel 2.116	Capaian Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Provinsi Riau Tahun 2021- 2024	II-186
Tabel 2.117	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-191
Tabel 2.118	Indeks Pembangunan Gender Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-193
Tabel 2.119	Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Riau Tahun 2020-2023.....	II-194
Tabel 2.120	Rasio Ketergantungan Provinsi Riau Tahun 2024	II-196
Tabel 2.121	Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-198
Tabel 2.122	Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2024.	II-200
Tabel 2.123	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-202
Tabel 2.124	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2024.	II-203
Tabel 2.125	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021-2024	II-203
Tabel 2.126	Perkembangan Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Riau Tahun 2020-2024.....	II-204
Tabel 2.127	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Karakteristiknya di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024.....	II-207
Tabel 2.128	Perkembangan Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Tahun 2020-2024	II-209
Tabel 2.129	Jumlah Angkatan Kerja dan Kegiatan Penyandang Disabilitas Sedang dan Berat di Provinsi Riau Tahun 2022	II-212

Tabel 2.130	Indeks Inovasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-213
Tabel 2.131	Pemanfaatan Hasil Riset Daerah Provinsi Riau Tahun 2021-2024	II-214
Tabel 2.132	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Berdasarkan Sub Sektor Di Provinsi Riau Tahun 2020-2024.....	II-215
Tabel 2.133	Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-216
Tabel 2.134	Potensi EBT Riau dan Pemanfaatannya Tahun 2023-2024	II-218
Tabel 2.135	Produksi Hasil Tambang di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024	II-219
Tabel 2.136	Data Low Signal (Sinyal Lemah) dan Blankspot Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022-2024	II-223
Tabel 2.137	Jumlah Investasi PMDN dan PMA di Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-224
Tabel 2.138	Persentase Realisasi Investasi Hilirisasi Provinsi Riau Tahun 2022 – 2024 (Rp).....	II-225
Tabel 2.139	Neraca Perdagangan Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-226
Tabel 2.140	Ekspor Provinsi Riau Golongan Barang HS 2 Digit Tahun 2021 – 2024.....	II-228
Tabel 2.141	Ekspor Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota dan Pelabuhan Muat Tahun 2021 – 2024	II-231
Tabel 2.142	Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Riau	II-233
Tabel 2.143	Status RDTR Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2025	II-236
Tabel 2.144	Panjang Jalan di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota dan Status/Kewenangan Pemerintahan Tahun 2025	II-239
Tabel 2.145	Kondisi Jalan Provinsi di Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-240
Tabel 2.146	Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Maskapai dan Penumpang serta Barang Di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Tahun 2023-2024	II-245

Tabel 2.147	Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Penumpang di Terminal AKAP (Terminal Tipe A Bangkinang, Terminal Tipe A BRPS Pekanbaru, Terminal Tipe A Dumai) Tahun 2023-2024	II-245
Tabel 2.148	Rekapitulasi Laporan Angkutan Laut Tahun 2023-2024	II-246
Tabel 2.149	Penggunaan Lahan Sawah Irigasi di Provinsi Riau Tahun 2023	II-249
Tabel 2.150	Kondisi Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023	II-251
Tabel 2.151	Kondisi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kewenangan Provinsi se- Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023	II-251
Tabel 2.152	Rekapitulasi Pengaman Pantai di Pulau Terluar Provinsi Riau Tahun 2021-2024.....	II-254
Tabel 2.153	Rasio Elektrifikasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024	II-256
Tabel 2.154	Data Rumah Tangga Berlistrik PLN, Belistrik Non PLN dan Tidak Berlistrik se Provinsi Riau Tahun 2023-2024	II-257
Tabel 2.155	Rasio Desa Berlistrik di Provinsi Riau Tahun 2023-2024	II-258
Tabel 2.156	Capaian Bauran Energi Provinsi Riau 2022-2024	II-259
Tabel 2.157	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2024.	II-260
Tabel 2.158	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Data E-RTLH dan Data P3KE (Tertanggal 10 Juni 2024) ...	II-261
Tabel 2.159	Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Provinsi Tahun 2021-2024 (SPM Perumahan)	II-262
Tabel 2.160	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Riau Tahun 2024	II-264

Tabel 2.161	Penetapan Luasan Kawasan Kumuh Berdasarkan SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di 12 Kabupaten/Kota Tahun 2024	II-267
Tabel 2.162	Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024	II-269
Tabel 2.163	Capaian Pembangunan PSU Provinsi Riau Tahun 2021-2024	II-271
Tabel 2.164	Kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Riau	II-273
Tabel 2.165	Perkembangan Indikator Kemiskinan Berdasarkan Wilayah (Perdesaan) Provinsi Riau 2020-2024	II-275
Tabel 2.166	Perkembangan Status Desa Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-27
Tabel 2.167	Perkembangan Status Desa Kabupaten se-Provinsi Riau Tahun 2024	II-277
Tabel 2.168	Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-279
Tabel 2.169	Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) Berdasarkan Komponen Pembentuknya di Provinsi Riau 2020-2024	II-279
Tabel 2.170	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten/Kota Tahun 2024	II-281
Tabel 2.171	Perkembangan BUMDes Aktif Provinsi Riau Berdasarkan Kriteria Tahun 2021-2024.....	II-283
Tabel 2.172	Perkembangan BUMDes Provinsi Riau Berdasarkan Kriteria Tahun 2024.....	II-284
Tabel 2.173	Kondisi BUMDes Bersama Kabupaten se Provinsi Riau Tahun 2024	II-285
Tabel 2.174	Perkembangan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Provinsi Riau Tahun 2024.....	II-286
Tabel 2.175	Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah	II-290
Tabel 2.176	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-291
Tabel 2.177	Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-292

Tabel 2.178	Survey Penilaian Integritas Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021-2024	II-293
Tabel 2.179	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-294
Tabel 2.180	Perkembangan Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Riau Tahun 2021-2024.....	II-296
Tabel 2.181	Perkembangan Survey Nilai Indes BerAKHLAK Provinsi Riau Tahun 2022-2024.....	II-298
Tabel 2.182	Perkembangan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Provinsi Riau Tahun 2021-2024	II-299
Tabel 2.183	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2020-2024.....	II-300
Tabel 2.184	Jumlah Penetapan dan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-301
Tabel 2.185	Capaian Aksi HAM Provinsi Riau Tahun 2023	II-303
Tabel 2.186	Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024	II-304
Tabel 2.187	Indeks Rasa Aman Provinsi Riau Tahun 2014-2020 .	II-305
Tabel 2.188	Capaian Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 dan 2024	II-306
Tabel 2.189	Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau Tahun 2021 - 2024	II-306
Tabel 2.190	Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024	II-308
Tabel 2.191	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau Tahun 2024.....	II-309
Tabel 2.192	Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024	II-311
Tabel 2.193	Capaian Indikator Kinerja Kunci Provinsi Riau Tahun 2021 – 2024.....	II-312
Tabel 2.194	Realisasi APBD Provinsi Riau Tahun 2020-2024 (dalam rupiah).....	II-327
Tabel 2.195	Neraca Daerah Provinsi Riau Tahun 2020-2024 (dalam juta)	II-335
Tabel 2.196	Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Aktivitas	II-340

Tabel 2.197	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Riau Tahun 2020-2024.....	II-342
Tabel 2.198	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Riau Tahun 2019-2024.....	II-343
Tabel 2.199	Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-344
Tabel 2.200	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-345
Tabel 2.201	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-346
Tabel 2.202	Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Provinsi Riau Tahun 2020-2024.....	II-347
Tabel 2.203	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2026-2030	II-351
Tabel 2.204	Proyeksi Kapasitas Fiskal Provinsi Riau 2026 – 2030	II-354
Tabel 2.205	Kesimpulan Isu Strategis Daerah	II-381
Tabel 3.1	Penyelarasan Asta Cita dengan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ..	III-6
Tabel 3.2	Perumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2030	III-11
Tabel 3.3	Penjabaran Pentahapan Pembangunan Tahun 2025-2029 Berdasarkan Misi.....	III-21
Tabel 3.4	Penyelarasan 17 Program Prioritas Presiden dengan 6 Program Prioritas Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ...	III-33
Tabel 3.5	Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat.....	III-38
Tabel 3.6	Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Sehat dan Produktif	III-41
Tabel 3.7	Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender, Kualitas Keluarga, dan Masyarakat Inklusif	III-42
Tabel 3.8	Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Daerah.....	III-44
Tabel 3.9	Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani	III-45

Tabel 3.10	Kegiatan Strategis Pada Sasaran Peningkatan Daya Saing Daerah	III-46
Tabel 3.11	Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata	III-47
Tabel 3.12	Kegiatan Strategis Pada Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.....	III-47
Tabel 3.13	Kegiatan Strategis Pada Sasaran Mengurangi Risiko Bencana Daerah	III-48
Tabel 3.14	Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Layanan Transportasi	III-49
Tabel 3.15	Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas.....	III-49
Tabel 3.16	Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	III-50
Tabel 3.17	Kegiatan Strategis Pada Sasaran Berkurangnya Kesenjangan Antar Masyarakat dan Antar Wilayah...	III-51
Tabel 3.18	Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan, Produktivitas, dan Pendapatan Masyarakat	III-52
Tabel 3.19	Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif.....	III-53
Tabel 3.20	Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Budaya Birokrasi Berakhlak dengan ASN yang Profesional	III-54
Tabel 3.21	Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	III-55
Tabel 3.22	Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi untuk Pembangunan Daerah	III-56
Tabel 3.23	Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Kerjasama Pembangunan	III-56
Tabel 3.24	Kegiatan Strategis Pada Sasaran Menguatnya Nilai-Nilai Budaya Melayu Sebagai Jati Diri Masyarakat Riau dalam Rangka Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau..	III-57

Tabel 3.25	Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Kerukunan Sosial Antar Masyarakat dan Kehidupan Bermasyarakat yang Kondusif, Aman, Nyaman	III-58
Tabel 3.26	Perumusan Program Prioritas RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	III-59
Tabel 3.27	Penyelarasan Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Riau dalam RPJMN dan RPJMD	III-88
Tabel 3.28	Penyelarasan Sasaran Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dalam RPJMN dan RPJMD.....	III-113
Tabel 3.29	Sasaran Pembangunan WP Bernilai.....	III-115
Tabel 3.30	Sasaran Pembangunan WP Pilar Meranti.....	III-119
Tabel 3.31	Sasaran Pembangunan WP Gasing	III-123
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau	IV-3
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026-2030	IV-66
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi Riau ..	IV-69
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Riau.....	IV-92

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Proses Penyusunan dan Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-8
Gambar 2.1 Peta Provinsi Riau	II-1
Gambar 2.2 Wilayah Sungai Provinsi Riau	II-3
Gambar 2.3 Tutupan Lahan Provinsi Riau	II-4
Gambar 2.4 Peta Status DDDTLH Penyedia Air Provinsi Riau	II-8
Gambar 2.5 Peta Status DDDTLH Penyedia Pangan Provinsi Riau Tahun 2019	II-12
Gambar 2.6 Capaian Kondisi Air Minum Layak (Persen dan Jumlah) Berdasarkan Status Kesejahteraan di Provinsi Riau, Tahun 2024	II-22
Gambar 2.7 Capaian Kondisi Sanitasi Layak (Persen dan Jumlah) Berdasarkan Status Kesejahteraan di Provinsi Riau, Tahun 2024	II-29
Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi Provinsi Riau	II-40
Gambar 2.9 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi Provinsi Riau	II-41
Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2024	II-45
Gambar 2.11 Perbandingan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Penduduk Provinsi Riau Tahun 2020 dan 2024	II-49
Gambar 2.12 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2025-2030 (Ribuan Jiwa)	II-53
Gambar 2.13 Proyeksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Riau Tahun 2025-2030	II-54
Gambar 2.14 Trend Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Riau Tahun 2020-2024	II-56
Gambar 2.15 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-57
Gambar 2.16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024	II-58

Gambar 2.17	Target Dan Realisasi Kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2015-2024	II-58
Gambar 2.18	Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Ekstrem Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	II-62
Gambar 2.19	Kontribusi (%) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Utama di Provinsi Riau 2020-2024.....	II-70
Gambar 2.20	Kontribusi (%) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Provinsi Riau 2020-2024....	II-70
Gambar 2.21	Kontribusi PDRB Harga Berlaku dengan Migas Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024	II-72
Gambar 2.22	Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Riau Tahun 2020-2024 (Rp. Juta)	II-73
Gambar 2.23	Persentase Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Riau 2022-2024	II-78
Gambar 2.24	Penduduk Menganggur Terbuka dengan Klasifikasi Keterampilan di Provinsi Riau (Persen dan Jumlah), Tahun 2019-2023	II-78
Gambar 2.25	Indikator Ketenagakerjaan: Aktivitas Bekerja atau Sekolah Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan di Provinsi Riau, Tahun 2024	II-80
Gambar 2.26	IPM Provinsi Riau dan Nasional, 2020-2024	II-83
Gambar 2.27	Perkembangan IPM per Kabupaten/Kota 2024	II-84
Gambar 2.28	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-88
Gambar 2.29	Jumlah Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (Milyar Rupiah) Tahun 2020-2024.....	II-99
Gambar 2.30	Umur Harapan Hidup Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-121
Gambar 2.31	<i>Umur Harapan Hidup per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024.....</i>	II-121
Gambar 2.32	<i>Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) di Provinsi Riau Tahun 2021-2024.....</i>	II-123
Gambar 2.33	<i>Perkembangan Unmet Need di Provinsi Riau Tahun 2020-2024</i>	II-127

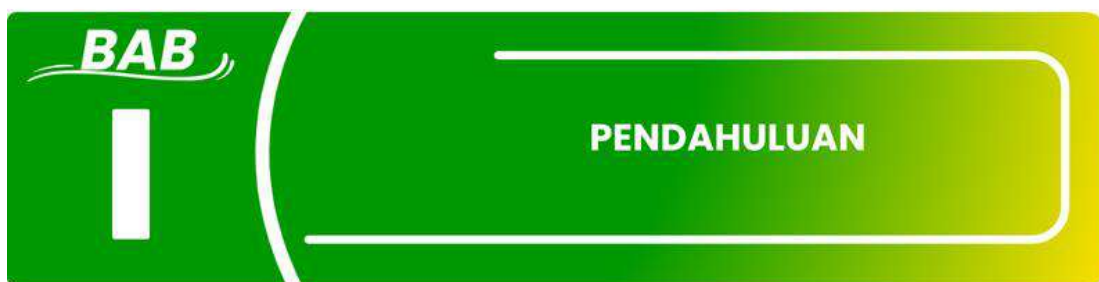
Gambar 2.34	Perkembangan Age Specific Fertility Rate (ASFR) Usia 15-19 Tahun di Provinsi Riau Tahun 2020-2023	II-128
Gambar 2.35	Pendekatan Siklus Hidup untuk mencapai Keluarga Sehat	II-130
Gambar 2.36	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-136
Gambar 2.37	Incidence Rate TBC Provinsi Riau Tahun 2021-2024	II-143
Gambar 2.38	<i>Perkembangan Treatment Coverage TBC Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021-2024 ..</i>	II-144
Gambar 2.39	Perkembangan Treatment Succes Rate TBC Kabupaten/Kotadi Provinsi Riau Tahun 2021 s.d 2024	II-144
Gambar 2.40	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-146
Gambar 2.41	Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024	II-147
Gambar 2.42	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-147
Gambar 2.43	Angka Harapan Lama Sekolah per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024	II-148
Gambar 2.44	Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau Tahun 2024	II-152
Gambar 2.45	Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Nasional Tahun 2024	II-153
Gambar 2.46	Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau Tahun 2024.....	II-155
Gambar 2.47	Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Nasional Tahun 2024.....	II-155
Gambar 2.38	<i>Tingkat Partisipasi Pendidikan Partisipasi Murni APM SMA Berdasarkan Status Kesejahteraan Penduduk (Persentase dan Jumlah Individu) di Provinsi Riau, Tahun 2024.....</i>	II-156
Gambar 2.49	Tingkat Keberlanjutan Sekolah Penduduk Usia 15-24 Tahun di Provinsi Riau, Tahun 2024	II-157

Gambar 2.50	Capaian Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun (Persen dan Jumlah) Berdasarkan Status Kesejahteraan di Provinsi Riau, Tahun 2024	II-159
Gambar 2.51	Kepemilikan Jaminan Sosial Setidaknya Memiliki Satu Jaminan Sosial (Jumlah dan Persentase) di Provinsi Riau, Tahun 2024.....	II-165
Gambar 2.49	Kepemilikan Jaminan Sosial Bantuan PKH (Jumlah dan Persentase) di Provinsi Riau, Tahun 2024	II-166
Gambar 2.49	Evaluasi Pensasaran Program Bantuan Sosial di Provinsi Riau, Tahun 2023	II-167
Gambar 2.54	Perkembangan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-170
Gambar 2.55	Posisi Relatif Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024.....	II-173
Gambar 2.56	Posisi Relatif Tenaga Kerja Rentan Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023.....	II-173
Gambar 2.57	Jumlah PSKS di Kabupaten/Kota Tahun 2024	II-180
Gambar 2.58	Kepemilikan Jaminan Sosial Setidaknya Memiliki Satu Jaminan Sosial (Jumlah dan Persentase) di Provinsi Riau, Tahun 2024.....	II-183
Gambar 2.59	Rasio Kewirausahaan Daerah Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-197
Gambar 2.60	Penduduk Usia Kerja berdasarkan Klasifikasi Keterampilan di Provinsi Riau, Tahun 2019-2023.....	II-208
Gambar 2.61	Posisi Relatif Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kabupaten/Kota Tahun 2024	II-210
Gambar 2.62	Penduduk Usia Kerja berdasarkan Klasifikasi Keterampilan di Provinsi Riau, Tahun 2019-2023.....	II-210
Gambar 2.63	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024	II-213
Gambar 2.64	Sebaran Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Riau.	II-235
Gambar 2.65	Sebaran Kondisi Ruas Jalan Kewenangan Provinsi Riau Tahun 2023.....	II-240
Gambar 2.66	Gerbang Tol Pekanbaru, Gerbang Tol Dumai, dan Gerbang Tol Bathin Solapan	II-242

Gambar 2.67	Kondisi Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, Jalan Tol Duri dan Jalan Tol Bathin Solapan-Dumai	II-242
Gambar 2.68	Kondisi Jembatan Menuju Jambi.....	II-243
Gambar 2.69	Peta Sebaran DI Permukaan dan DIR Kewenangan Provinsi di Kabupaten/Kota Provinsi Riau	II-253
Gambar 2.70	Capaian Kondisi Rumah Layak Huni (Persen dan Jumlah) Berdasarkan Status Kesejahteraan di Provinsi Riau, Tahun 2024	II-262
Gambar 2.71	Posisi relatif Presentase Desa Mandiri Kabupaten Tahun 2024	II-278
Gambar 2.72	Capaian IDM Kabupaten Tahun 2024	II-282
Gambar 2.73	Perkembangan Laju Inflasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-289
Gambar 2.74	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024	II-295
Gambar 2.75	Perkembangan Rata-Rata Aksi HAM Provinsi Riau Tahun 2021-2024	II-302
Gambar 3.1	Visi Provinsi Riau.....	III-1
Gambar 3.2	Pentahapan Pembangunan Tahun 2026-2030	III-18
Gambar 3.3	Arahan Pengembangan Provinsi Riau dalam RPJMN Tahun 2025-2029	III-88
Gambar 3.4	Wilayah Pengembangan (WP) Provinsi Riau.....	III-112
Gambar 3.5	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2025 - 2030	III-114
Gambar 3.6	Peta Wilayah Pengembangan Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Dumai (WP BERNILAI).....	III-116
Gambar 3.7	Peta Wilayah Pengembangan Kampar, Pekanbaru, Pelalawan, Siak, dan Kepulauan Meranti (WP Pilar MERANTI)	III-120
Gambar 3.8	Peta Wilayah Pengembangan Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kuantan Singingi (WP GASING)	III-123



**Riau Rumah Rumpun Melayu,
Merawat Tuah Menjaga Marwah,
Takkan Melayu Hilang di Bumi**



1.1. Latar Belakang Penyusunan

Pembangunan daerah adalah usaha sistematis dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Lebih lanjut, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan daerah yaitu perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, pengertian perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun setelah pelantikan Kepala Daerah pada tanggal 20 Februari 2025 yang memuat visi, misi dan program prioritas kepala daerah. Selain itu juga memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program

pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD memperhatikan Arah Kebijakan Tahap Pertama RPJPD Tahun 2025-2045 dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Selanjutnya dalam RPJMN Tahun 2025-2029 perlu diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 terutama dalam mendukung pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029. Pelaksanaan pembangunan diharapkan tidak hanya sebatas proses atau cara yang selama ini dilakukan, namun disertai dengan berbagai bentuk perbaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan terjalin kolaborasi yang intensif antara Pemerintah Daerah Provinsi Riau dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten/kota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Penyusunan RPJMD Provinsi Riau meliputi 6 (enam) tahapan, yaitu: (a). persiapan penyusunan; (b). penyusunan rancangan awal; (c). penyusunan rancangan; (d). pelaksanaan Musrenbang; (e). perumusan rancangan akhir; dan (f). penetapan.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029, adalah:

- a. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- b. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

- d. Pendekatan atas - bawah dan bawah - atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.
- e. Pendekatan holistik – tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- f. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- g. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi ruang dalam perencanaan.

Mengingat strategis dan pentingnya penyusunan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sebagai tahap awal perwujudan visi RPJPD Provinsi Riau 2025-2045 yaitu **“RIAU MAJU DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU YANG AGAMIS”** dilaksanakan dengan melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terkait dan berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih. Penyusunan RPJMD dilakukan dengan bersinergi dengan berbagai pihak-pihak yang terkait dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dengan memperhatikan penerapan pembangunan berkelanjutan dan hasil dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. KLHS merupakan sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin

dampak negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan, sehingga penyusunan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 memperhatikan dokumen KLHS RPJMD terutama yang berkaitan dengan arah kebijakan, strategi dan program yang mendukung pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nemer 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nemer 72 Tahun 2019 tentang Perubahan alas Peraturan Pemerintah Nemer 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

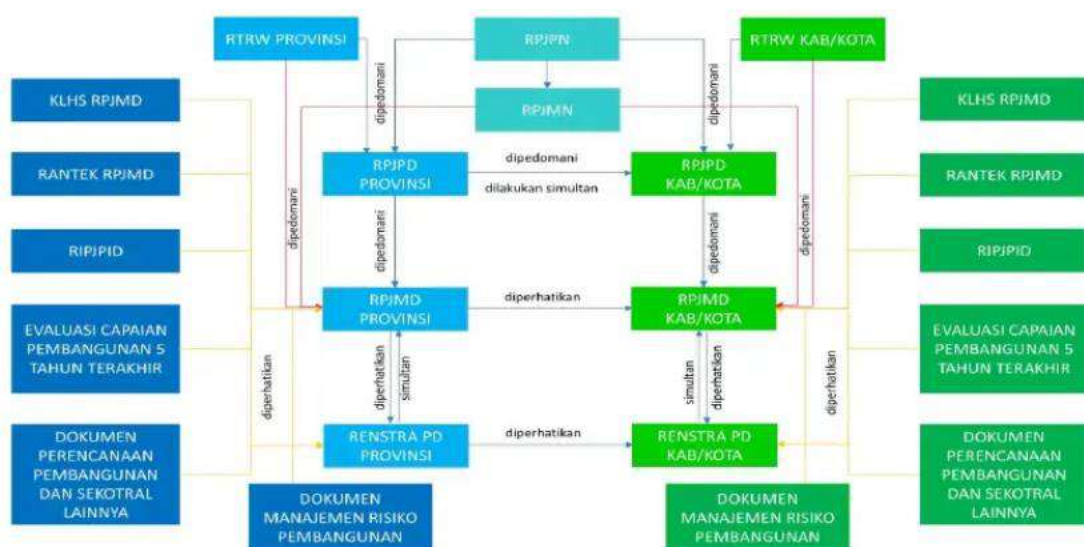
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Riau Tahun 2021 – 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor: 5);
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor: 3);
27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024 – 2053 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor: 4);
28. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau

bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah Kabupaten/Kota, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Tahun 2025-2045, evaluasi kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 juga merupakan acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Hubungan antar dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Riau disajikan dalam gambar dibawah ini.



Gambar 1.1. Proses Penyusunan dan Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam penyusunan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ini mempedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yaitu:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

- RPJMN tahun 2025-2045 menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029;
- Jangka waktu RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sesuai dengan RPJMN Tahun 2025-2029;
- Memperhatikan ruang lingkup penyelarasan dalam hal perumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Indikator Pembangunan.

b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau merupakan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan. Penyusunan RPJMD ini memperhatikan sinkronisasi kebijakan Dokumen Spasial baik dengan RTRW Nasional serta RTRW Provinsi. Ruang lingkup penyesuaian mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Keselarasan tersebut antara lain:

- Tujuan RTRW dengan Visi dan Misi RPJMD;
- Kebijakan dan Strategi RTRW dengan Arah Kebijakan RPJMD;
- Pusat-pusat Kegiatan yang tercantum dalam RTRW terhadap perumusan pengembangan kewilayahan dalam RPJMD.

c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Rencana Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) dalam rangka mewujudkan RPJMD sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS merupakan sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin dampak negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan, sehingga penyusunan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 harus mengacu pada dokumen KLHS terutama yang berkaitan dengan arah kebijakan.

d. Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Rancangan Teknokratik mempunyai peran yang penting dalam rangkaian tahapan penyusunan RPJMD, untuk itu perlu

dipersiapkan dengan baik karena menjadi dasar penyusunan RPJMD. Dokumen tersebut menjadi masukan bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Rancangan Teknokratik RPJMD merupakan dokumen yang mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi guna mendukung penyusunan RPJMD. Rancangan Teknokratik RPJMD ini memberikan rekomendasi kebijakan kepada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam penyusunan Visi, Misi dan Program Prioritas.

e. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) Provinsi Riau

Kebijakan perencanaan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah disusun dengan berbasis bukti, yaitu berlandaskan pada pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang dihasilkan oleh seluruh unsur kelembagaan iptek, sumber daya iptek dan jejaring iptek yang dibangun oleh pemerintah daerah, baik pada lingkup daerah, antar-daerah dan nasional, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah (RIPJPID). RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran IPTEK serta Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas Pembangunan daerah.

Peta Jalan Pelaksanaan Program Riset Dan Inovasi dalam dokumen RIPJPID akan diintegrasikan untuk memperkuat Strategi, Arah Kebijakan Tahunan dan Program Prioritas RPJMD, sehingga menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis bukti.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun guna memberikan arah, kebijakan, dan strategi pembangunan yang terencana dan terukur.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Untuk menerjemahkan visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah ke dalam kebijakan pembangunan yang terukur dan

realistis.

2. Menyelaraskan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah.
RPJMD yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan memperhatikan kebutuhan serta potensi daerah.
3. Menetapkan Prioritas Pembangunan Daerah.
Dokumen RPJMD memuat prioritas pembangunan, sektor unggulan, serta program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menjadi Acuan dalam Penyusunan RKPD.
Dokumen RPJMD menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya yang kemudian menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
5. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan.
Untuk memastikan pembangunan daerah berlangsung secara berkelanjutan, merata, dan inklusif, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
6. Meningkatkan Efektivitas dan Akuntabilitas Pemerintahan.
Dengan perencanaan yang jelas, pemerintah daerah dapat bekerja lebih efektif dan transparan dalam menjalankan program pembangunan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
7. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
RPJMD disusun dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, agar pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

1.5. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sistematika penyusunan RPJMD memuat:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.4. Aspek Pelayanan Umum
- 2.5. Kondisi Keuangan Daerah
- 2.6. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan
- 2.7. Kebijakan Keuangan Daerah
- 2.8. Permasalahan Pembangunan
- 2.9. Isu Strategis

BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 3.1. Visi dan Misi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran
- 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan
- 3.4. Arah Pembangunan Wilayah
- 3.5. Pembangunan Rendah Karbon
- 3.6. Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- 3.7. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas

BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 4.1. Program Perangkat Daerah
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB V. PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan

- 5.3. Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 5.4. Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan
- 5.5. Manajemen Resiko



**Riau Rumah Rumpun Melayu,
Merawat Tuah Menjaga Marwah,
Takkan Melayu Hilang di Bumi**

BAB

II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

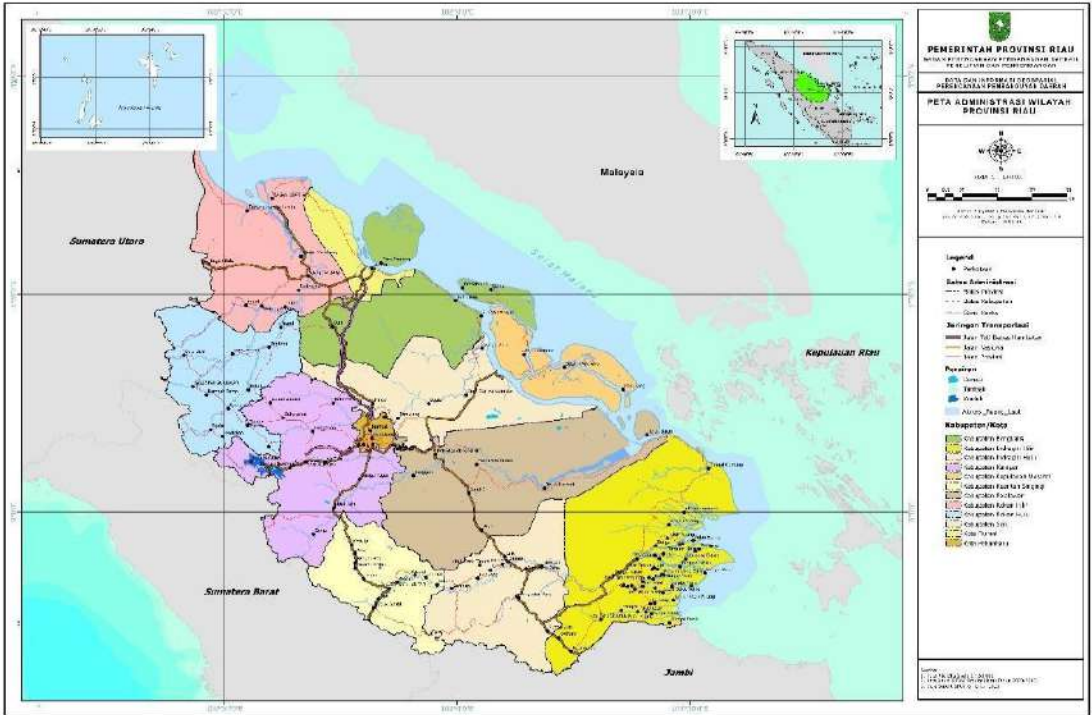
Gambaran umum kondisi daerah menyajikan secara logis refleksi pembangunan, hasil dan analisis kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, hasil evaluasi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dan serta indikator capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Pemerintahan Provinsi Riau beberapa tahun terakhir.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

2.1.1.1 Luas dan Kondisi Geografis

Wilayah Provinsi Riau sebesar 89.900,780 Km² terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan pesisir (termasuk pulau-pulau kecil). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau

Gambar 2.1 Peta Provinsi Riau

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota dengan 172 kecamatan dan 1.591 desa serta 271 kelurahan. Sepuluh kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti. Dua kota adalah Kota Pekanbaru dan Dumai. Luas wilayah yang paling besar di Provinsi Riau adalah Kabupaten Indragiri Hilir seluas 13.518.470 Km², sedangkan wilayah paling kecil adalah Kota Pekanbaru seluas 638.331 Km², luas wilayah secara rinci per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Riau

Kode	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Luas Wilayah (Km ²)
14	Provinsi Riau	Pekanbaru	89.900,780
14.01	Kampar	Bangkinang	10.352,803
14.02	Indragiri Hulu	Rengat	7.871,850
14.03	Bengkalis	Bengkalis	8.604,179
14.04	Indragiri Hilir	Tembilahan	13.518,470
14.05	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	13.256,104
14.06	Rokan Hulu	Pasir Pengaraian	7.658,149
14.07	Rokan Hilir	Bagan Siapi-api	9.068,605
14.08	Siak	Siak Sri Indrapura	7.803,566
14.09	Kuantan Singingi	Teluk Kuantan	5.457,863
14.10	Kepulauan Meranti	Selat Panjang	3.609,397
14.71	Pekanbaru	Pekanbaru	638.331
14.72	Dumai	Dumai	2.061,463

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025

2.1.1.2 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Letak geografis adalah posisi daerah pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain, ditentukan berdasarkan aspek astronomis, geologis, fisiografis dan sosial budaya. Secara geografis Provinsi Riau terletak pada posisi 1°7’39,37” Lintang Selatan 3°12’42,18” Lintang Utara dan antara 100°2’58,99” Bujur Timur hingga 104°0’47,06” Bujur Timur, yang membentang dari lereng bukit barisan hingga Selat Malaka.

Provinsi Riau secara geografis berbatasan dengan Provinsi lain dan Negara Tetangga sebagai berikut:

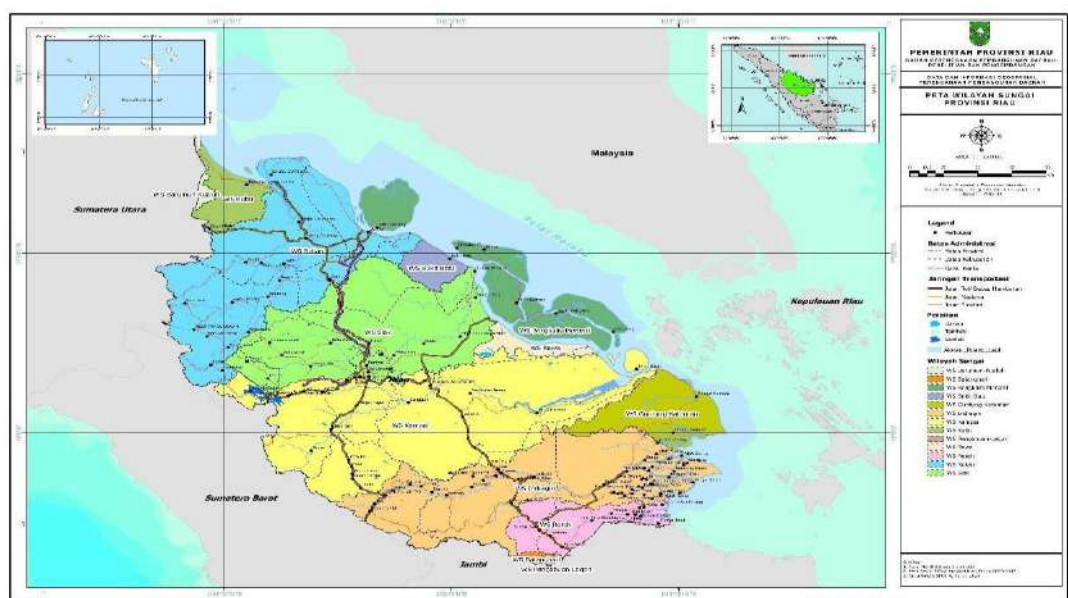
- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sumatera Utara

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Kepulauan Riau
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Riau berada pada posisi strategis yang mempunyai arti penting dalam geopolitik dan perekonomian nasional dan regional. Beberapa keuntungan yang diperoleh berdasarkan letak geografis tersebut adalah berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka, dekat dengan Malaysia, Singapura, selain itu berada di segitiga pertumbuhan ekonomi tiga negara Indonesia, Malaysia dan Thailand.

Provinsi Riau memiliki 15 (lima belas) sungai diantaranya terdapat 4 (empat) sungai besar yang mempunyai peranan penting sebagai prasarana perhubungan masyarakat sekitar bantaran sungai, pariwisata dan perikanan. Sungai-sungai tersebut mengalir mulai dari pegunungan, dataran tinggi, bukit barisan dan bermuara ke Selat Malaka, keempat sungai tersebut adalah:

- Sungai Siak, panjang 345 Km dengan kedalaman 8-12 meter.
- Sungai Rokan, panjang 325 Km dengan kedalaman 6-8 meter.
- Sungai Kampar, panjang 580 Km dengan kedalaman 6 meter.
- Sungai Indragiri, panjang 645 Km dengan kedalaman 6-8 meter.



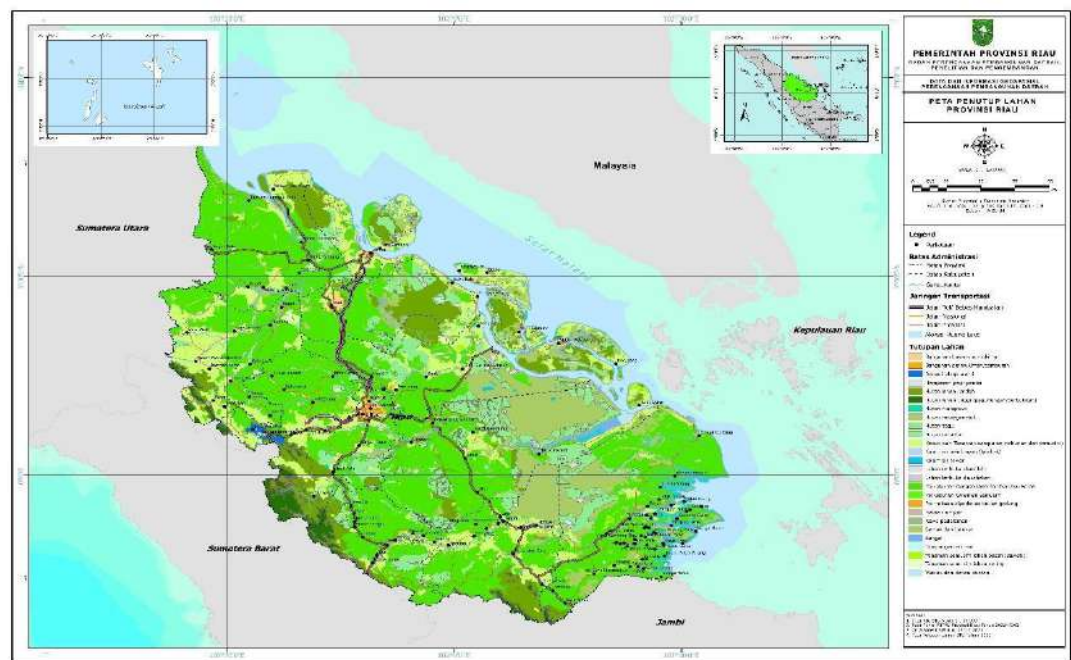
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau

Gambar 2.2 Wilayah Sungai Provinsi Riau

Sungai terpanjang di Provinsi Riau adalah sungai Indragiri dengan panjang 645 kilometer, dan sungai terdalam adalah sungai Siak dengan kedalaman 8–12 meter. Sesuai panjang sungai, sungai Indragiri memiliki luasan *catchment area* terluas yaitu 32.525 Km² diikuti sungai Kampar, sungai Rokan dan sungai Siak. Sungai dengan debit terbesar adalah sungai Indragiri yaitu sebesar 2.760 m³/detik pada kondisi maksimal dan 65 m³/detik pada kondisi minimal.

2.1.1.3 Luas Tutupan Lahan di Provinsi Riau

Kondisi tutupan lahan dapat digunakan untuk memperkirakan besaran potensi pemanfaatan ruang terutama untuk penggunaan sumber-sumber pengembangan sosial ekonomi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan peruntukan ruang. Jenis dan sebaran tutupan lahan di Provinsi Riau tersaji pada gambar di bawah ini.



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau

Gambar 2.3 Tutupan Lahan Provinsi Riau

Berdasarkan hasil pemetaan tematik penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, tutupan lahan di Provinsi Riau terdiri atas 26 jenis, dengan jenis tutupan lahan yang dominan adalah perkebunan dengan tanaman berkayu keras dengan luas 3.852.120 Hektar (42,79 persen), kebun dan tanaman campuran (tahunan dan semusim) (15,81 persen) dan hutan lahan rendah (10,21 persen). Dari kondisi tersebut menandakan bahwa sebagian besar lahan di Provinsi

Riau sudah termanfaatkan, dengan demikian dibutuhkan optimalisasi pemanfaatan lahan untuk mendukung pengembangan wilayah. Jenis tutupan lahan berdasarkan luas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2 Luas Tutupan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2022

Tutupan Lahan	Luas (Hektar)	Persentase
Bangunan bukan-permukiman	13.215	0,15
Bangunan permukiman/campuran	217.148	2,41
Danau/telaga alami	4.900	0,05
Hamparan pasir pantai	537	0,01
Hutan lahan rendah	919.461	10,21
Hutan lahan tinggi (pegunungan/perbukitan)	169.499	1,88
Hutan mangrove	151.928	1,69
Hutan rawa/gambut	725.696	8,06
Hutan sagu	12.968	0,14
Hutan tanaman	808.425	8,98
Kebun dan Tanaman campuran (tahunan dan semusim)	1.423.662	15,81
Kolam air asin/payau (tambak)	840	0,01
Kolam air tawar	1.195	0,01
Lahan terbuka alami lain	148.551	1,65
Lahan terbuka diusahakan	14.578	0,16
Perkebunan dengan tanaman berkayu keras	3.852.120	42,79
Perkebunan tanaman semusim	669	0,01
Permukaan diperkeras bukan gedung	147	0,00
Rataan lumpur	1.127	0,01
Rawa pedalaman	16.822	0,19
Semak dan belukar	347.161	3,86
Sungai	116.454	1,29
Tampungan air lain	11	0,00
Tanaman semusim lahan basah (sawah)	31.603	0,35
Tanaman semusim lahan kering	12.995	0,14
Waduk dan danau buatan	10.369	0,12
Grand Total	9.002.079	100

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Provinsi Riau yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Potensi sumber daya alam di Riau dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama:

A. Sumber Daya Alam Hayati (Biotik)

1. Perkebunan

- Kelapa sawit; Provinsi Riau adalah salah satu produsen utama kelapa sawit di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit mempunyai luas 3,4 juta Hektar yang tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota.

- Karet; tanaman karet juga menjadi komoditas unggulan di Provinsi Riau yang mempunyai luas sebesar 413 ribu Hektar, yang didominasi oleh perkebunan rakyat mencapai 91,28 persen dari total luas lahan perkebunan karet.
- Kopi; perkebunan kopi di Provinsi Riau memiliki potensi baik dari segi produksi maupun kualitas yang mempunyai luas sebesar 4,69 ribu Hektar. Meskipun tidak termasuk dalam provinsi penghasil kopi terbesar di Indonesia, Riau memiliki keunikan tersendiri dalam komoditas kopi, terutama jenis liberika yang khas juga dibudidayakan di beberapa wilayah.

2. Kehutanan

Hutan Riau menyimpan berbagai jenis kayu komersial seperti meranti, ramin dan akasia. Hasil hutan Riau terbesar adalah serat kayu yang memiliki potensi besar dengan luas sebesar 1,60 juta hektar, yang digunakan sebagai bahan baku industri *pulp and paper*.

3. Perikanan dan Kelautan

- Wilayah pesisir Riau memiliki potensi besar dalam perikanan laut, termasuk ikan, udang dan kerang.
- Budidaya perikanan darat juga berkembang di sungai dan danau.

B. Sumber Daya Alam Non-Hayati (Abiotik)

1. Minyak Bumi dan Gas Alam:

- Provinsi Riau adalah salah satu penghasil minyak bumi dan gas terbesar di Indonesia dengan produksi sebesar 187 ribu barrel per hari. Cadangan minyak bumi Provinsi Riau menjadi salah satu penyumbang utama pendapatan daerah.
- Gas Alam merupakan sumber daya alam penting di Riau yang dapat digunakan sebagai bahan bakar dan sumber energi.

2. Batu bara

Batu bara merupakan sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit tenaga listrik dan industri. Terdapat cadangan batu bara di wilayah Riau bagian barat, meskipun tidak sebesar di Sumatera Selatan atau Kalimantan.

3. Gambut dan Lahan Subur

Provinsi Riau memiliki lahan gambut yang terluas di Indonesia dan menyimpan karbon organik daratan yang terbesar, berpotensi untuk pertanian, tetapi juga rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan.

4. Mineral

Beberapa daerah memiliki kandungan pasir kuarsa, batu kapur, dan bahan tambang lainnya, meskipun belum tergarap maksimal.

Sebagian wilayah Provinsi Riau memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat serta perlu dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alamnya.

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)

2.1.3.1 DDDTLH Penyedia Air

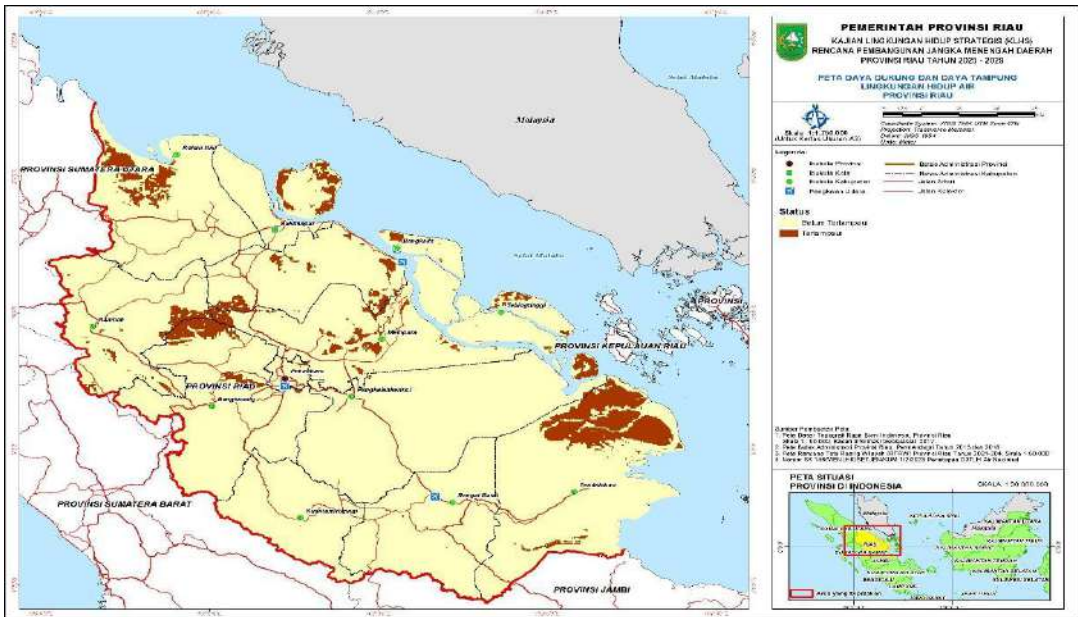
Daya dukung air merupakan kemampuan sumber daya air untuk memenuhi suatu kebutuhan dengan meninjau besarnya ketersediaan air. Daya dukung air dihitung berdasarkan perhitungan kebutuhan air dan ketersediaan air. Kedua variabel tersebut dibandingkan sehingga dapat diketahui air yang tersedia dapat mencukupi untuk berbagai kebutuhan. Kajian daya dukung air dilakukan guna mengetahui potensi kebutuhan dan ketersediaan air.

Status daya dukung dan daya tampung penyedia air berdasarkan lampiran peta nomor SK 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional secara umum dalam kondisi belum terlampaui di lahan seluas 9.608.204,30 Hektar atau 93,61 persen. Artinya, ketersediaan air sebagai bahan baku untuk mencukupi kebutuhan air bersih bagi manusia masih sangat besar, tergantung cara dan metode pemanfaatannya. Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah luasan sekitar 6,39 persen yang merupakan Kawasan dengan DDDTLH Penyedia Air yang telah terlampaui. Rincian status DDDTLH per kabupaten/kota disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Status DDDTLH Penyedia Air Provinsi Riau

No.	Kabupaten/ Kota	Terlampauai		Belum Terlampauai		Total	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%
14.01	Kampar	65.595,78	0,64	967.108,28	9,42	1.032.704,06	10,06
14.02	Indragiri Hulu	256,43	0,00	786.950,77	7,67	787.207,20	7,67
14.03	Bengkalis	103.588,93	1,01	757.666,77	7,38	861.255,70	8,39
14.04	Indragiri Hilir	257.035,99	2,50	1.095.234,92	10,67	1.352.270,91	13,17
14.05	Pelalawan	22.648,19	0,22	1.311.982,96	12,78	1.334.631,14	13,00
14.06	Rokan Hulu	40.621,53	0,40	727.769,61	7,09	768.391,13	7,49
14.07	Rokan Hilir	82.488,34	0,80	824.374,29	8,03	906.862,63	8,84
14.08	Siak	66.080,37	0,64	714.524,19	6,96	780.604,56	7,60
14.09	Kuantan Singingi	854,77	0,01	544.931,53	5,31	545.786,30	5,32
14.10	Kepulauan Meranti	13.916,27	0,14	348.438,28	3,39	362.354,55	3,53
14.71	Pekanbaru	3.073,04	0,03	60.760,05	0,59	63.833,09	0,62
14.72	Dumai	0,03	0,00	206.177,96	2,01	206.177,99	2,01
-	Perairan Pesisir	18,99	0,00	1.262.284,68	12,30	1.262.303,67	12,30
Grand Total		656.178,64	6,39	9.608.204,30	93,61	10.264.382,94	100

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Sk.146/Menlhk/Setjbn/Kum.1/2/2023 Tentang, Penetapan Daya Dukung Dan Daya Tampung Air.



Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Sk.146/Menlhk/Setjbn/Kum.1/2/2023 Tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Gambar 2.4 Peta Status DDDTLH Penyedia Air Provinsi Riau

Mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau Tahun 2023 – 2043, maka distribusi penggunaan atau pemanfaatan air terdistribusi pada pola ruang yang direncanakan. Berdasarkan hasil telaah luas status daya dukung dan daya tampung air dengan pola ruang Provinsi

Riau pada kawasan peruntukan lindung status DDDTLH “belum terlampaui” seluas 955.659,19 Hektar atau 9,25 persen dengan pola ruang terluas adalah kawasan konservasi seluas 618.235,16 Hektar atau 5,99 persen dan diikuti kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya seluas 251.865,95 Hektar atau 2,44 persen dan status DDDTLH “terlampaui” seluas 123.346,15 Hektar atau 1,19 persen dengan pola ruang terluas adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya seluas 107.040,90 Hektar atau 1,04 persen.

Pada kawasan peruntukan budidaya status DDDTLH “belum terlampaui” seluas 5.962.387,66 Hektar atau 57,74 persen dengan pola ruang terluas adalah kawasan hutan produksi seluas 3.825.632,21 Hektar atau 37,05 persen dan diikuti kawasan pertanian seluas 1.726.777,83 Hektar atau 16,72 persen dan status DDDTLH “terlampaui” seluas 1.880.447,45 Hektar atau 18,21 persen dengan pola ruang terluas adalah kawasan pertanian seluas 1.103.959,36 Hektar atau 10,69 persen dan diikuti kawasan hutan produksi seluas 660.820,82 Hektar atau 6,40 persen. Sedangkan wilayah yang “*blank*” terindikasi bahwa lokasi tersebut adalah wilayah perairan laut. Analisis DDDTLH dan Jasa Ekosistem (JE) pada dokumen KLHS RTRW Provinsi Riau Tahun 2023 – 2043 masih berbasis lahan daratan, sehingga kajian lahan yang terintegrasi antara wilayah daratan dan lautan menyebabkan wilayah yang dulunya berupa perairan laut belum memiliki status DDDTLH dan JE sebagaimana wilayah daratannya. Lebih jelasnya luas dan sebaran status DDDTLH Penyedia Air terhadap pola ruang di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 2.4 Telaah Luas dan Sebaran Status Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Air Tumpang Susun Pola Ruang di Provinsi Riau

Pola Ruang	Status DDDT Air						
	Belum Terlampaui		Terlampaui		Blank	Jumlah	
	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(Ha)	(%)
A. KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG	955.659,19	9,25	123.346,15	1,19	260.156,92	1.339.162,26	12,97
Badan Air	61.912,16	0,60	4.262,94	0,04	59.250,09	125.425,19	1,21
Kawasan Cagar Budaya	146,66	0,00	17,13	0,00		163,79	0,00
Kawasan Ekosistem Mangrove	19.845,27	0,19	3.433,84	0,03	1.882,75	25.161,86	0,24
Kawasan Hutan Adat	521,48	0,01	36,66	0,00		558,14	0,01
Kawasan Konservasi	618.235,16	5,99	8.078,34	0,08	23.797,93	650.111,43	6,30
Kawasan Pertanian	2.654,73	0,03	459,40	0,00	1,01	3.115,14	0,03
Kawasan Pencadangan	477,78	0,00	16,94	0,00	163.300,44	163.795,16	1,59
Konservasi di Laut							
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	251.865,95	2,44	107.040,90	1,04	11.924,70	370.831,55	3,59
B. KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA	5.962.387,66	57,74	1.880.447,45	18,21	1.095.108,90	8.937.944,01	86,56
Kawasan Hutan Produksi	3.825.632,21	37,05	660.820,82	6,40	12.642,75	4.499.095,78	43,57
Kawasan Pariwisata	4.933,15	0,05	1.069,95	0,01	934,28	6.937,38	0,07
Kawasan Perikanan		0,00		0,00	1.048.376,59	1.048.376,59	10,15
Kawasan Permukiman	334.798,78	3,24	93.420,47	0,90	267,76	428.487,01	4,15
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	624,29	0,01		0,00		624,29	0,01
Kawasan Pertambangan dan Energi	45.067,90	0,44	14.462,92	0,14	17.399,38	76.930,20	0,75
Kawasan Pertanian	1.726.777,83	16,72	1.103.959,36	10,69	3.835,87	2.834.573,06	27,45
Kawasan Peruntukan Industri	22.967,96	0,22	6.444,40	0,06	100,54	29.512,90	0,29
Kawasan Transportasi	1.585,54	0,02	269,53	0,00	11.551,73	13.406,80	0,13
C. BLANK	30.726,41	0,30	10.488,16	0,10		41.214,57	0,40
Grand Total	6.955.199,17	67,36	2.015.583,06	19,52	1.355.265,82	10.326.048,05	100

Sumber: 1. Peta DDDTLH Jasa Penyediaan Provinsi Riau, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera KLHK, Skala 1:250.000, Tahun 2019
2. Peta RTRW Provinsi Riau Tahun 2023 - 2043

Pemanfaatan air sebagai JLH Penyedia Air – Berdasarkan kajian kebutuhan air domestik (9.969.768 jiwa sampai tahun 2043), kebutuhan lahan pertanian, kebutuhan industri dan kebutuhan

peternakan dapat diestimasi bahwa kebutuhan air di Provinsi Riau per tahun untuk kebutuhan domestik, kegiatan pertanian, kegiatan industri dan kegiatan peternakan, sekitar 75,425 kilo meter kubik per tahun (15,9 milyar + 59,5 milyar + 0,024 milyar meter kubik per tahun). Kebutuhan air ini tentunya akan kurang jika kualitas sumber daya air menurun. Ketersediaan air berdasarkan potensi curah hujan di Provinsi Riau sekitar 65,7 meter kubik per tahun. Hal ini merupakan proyeksi ketersediaan air secara kuantitas, sehingga perlu pertimbangan secara kualitas dalam menentukan ketersediaan air sesuai dengan peruntukannya (KLHS RTRW Provinsi Riau Tahun 2023-2043).

2.1.3.2 Daya Dukung Pangan

Daya dukung penyedia pangan adalah potensi yang dimiliki oleh ekosistem atau lingkungan alami untuk mendukung ketersediaan pangan bagi manusia. Potensi tersebut meliputi sumber daya alami seperti tanah, air, dan iklim yang merupakan karakteristik alami suatu wilayah. Potensi ini dapat berperan dalam mendukung produksi pangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, nilai maksimal dari potensi tersebut bergantung pada cara manusia dalam memanfaatkannya.

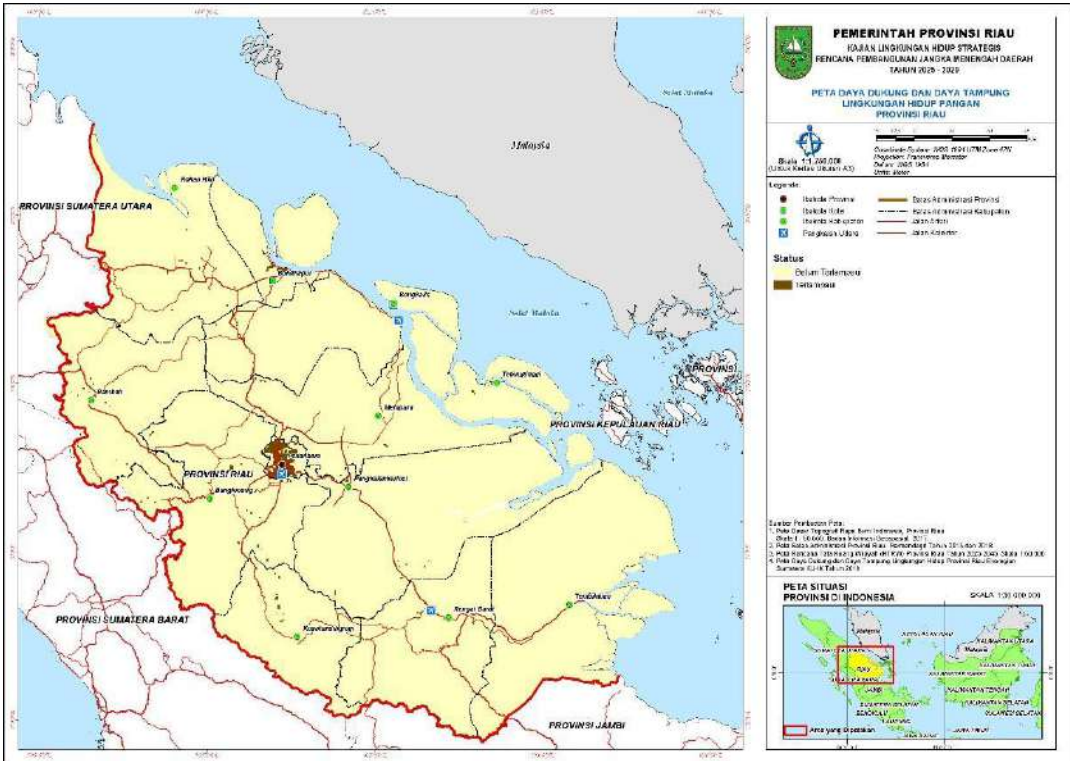
Status daya dukung dan daya tampung penyedia pangan Provinsi Riau berdasarkan Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Riau Ekoregion Sumatera KLHK Tahun 2019 didominasi oleh status Belum Terlampaui, yaitu seluas 8.938.753,10 Hektar atau 99,30 persen dari total luas daerahnya. Produksi pangan atau praktik pertanian yang sedang berlangsung masih berada di bawah batas kapasitas yang dapat ditopang oleh lingkungan atau sistem pertanian, tanpa mengganggu keseimbangan ekologis atau menimbulkan dampak negatif yang signifikan dan ini menunjukkan masih luas lahan yang berpotensi dapat mendukung penyediaan pangan bagi penduduk Provinsi Riau. Namun, ada kecenderungan luasan penyediaan pangan ini telah menuju kondisi telah terlampaui sehingga upaya pengelolaan yang berkelanjutan tetap diperlukan untuk menjaga agar daya dukung dan daya tampung penyediaan pangan tersebut tetap dalam kondisi yang baik di masa

depan. Lebih jelasnya luas status DDDTLH Penyedia Pangan per kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 2.5 Status DDDTLH Penyedia Pangan Provinsi Riau

No.	Kabupaten / Kota	Terlampau		Belum Terlampaui		Total	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%
14.01	Kampar	65.595,78	0,64	967.108,28	9,42	1.032.704,06	10,06
14.02	Indragiri Hulu	256,43	0,00	786.950,77	7,67	787.207,20	7,67
14.03	Bengkalis	103.588,93	1,01	757.666,77	7,38	861.255,70	8,39
14.04	Indragiri Hilir	257.035,99	2,50	1.095.234,92	10,67	1.352.270,91	13,17
14.05	Pelalawan	22.648,19	0,22	1.311.982,96	12,78	1.334.631,14	13,00
14.06	Rokan Hulu	40.621,53	0,40	727.769,61	7,09	768.391,13	7,49
14.07	Rokan Hilir	82.488,34	0,80	824.374,29	8,03	906.862,63	8,84
14.08	Siak	66.080,37	0,64	714.524,19	6,96	780.604,56	7,60
14.09	Kuantan Singingi	854,77	0,01	544.931,53	5,31	545.786,30	5,32
14.10	Kepulauan Meranti	13.916,27	0,14	348.438,28	3,39	362.354,55	3,53
14.71	Pekanbaru	3.073,04	0,03	60.760,05	0,59	63.833,09	0,62
14.72	Dumai	0,03	0,00	206.177,96	2,01	206.177,99	2,01
-	Perairan Pesisir	18,99	0,00	1.262.284,68	12,30	1.262.303,67	12,30
Grand Total		656.178,64	6,39	9.608.204,30	93,61	10.264.382,94	100

Sumber: Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Riau Ekoregion Sumatera KLHK Tahun 2019



Sumber: Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Riau Ekoregion Sumatera KLHK Tahun 2019

Gambar 2.5 Peta Status DDDTLH Penyedia Pangan Provinsi Riau Tahun 2019

2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.4.1 Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Dalam rangka mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan yang mengacu pada definisi ketahanan pangan serta tiga subsistem utama yang membentuk sistem ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menyediakan pangan bagi penduduknya, keterjangkauan pangan, mengukur akses ekonomi dan fisik masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bergizi dan pemanfaatan pangan, menilai tingkat pemanfaatan pangan oleh masyarakat, termasuk faktor kesehatan dan gizi.

Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pengkategorian ketahanan pangan pada tingkat kabupaten, kota dan provinsi didasarkan pada skor IKP, yang dibagi menjadi 6 kategori. yaitu sangat rentan ketika skor IKP < 37,61, rentan ketika skor IKP > 37,61 - 48,27, agak rentan ketika skor IKP 48,27 - 57,11, agak tahan ketika skor IKP 57,11 - 65,96, tahan pangan ketika skor IKP 65,96 - 74,40, dan sangat tahan ketika skor IKP > 74,40. Klasifikasi ini digunakan untuk mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dalam meningkatkan ketahanan pangan, baik melalui peningkatan produksi, aksesibilitas, maupun pemanfaatan pangan yang lebih optimal. Capaian indeks ketahanan pangan kabupaten/kota se-Provinsi Riau disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.6 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024**

Kode	Provinsi/Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
14	Riau	64,12	66,84	67,59	68,68	70,42
14.01	Kampar	55,51	61,78	56,28	57,59	59,69
14.02	Indragiri Hulu	66,58	64,66	57,96	59,35	60,71
14.03	Bengkalis	65,95	61,15	62,61	61,68	65,75
14.04	Indragiri Hilir	67,48	69,15	68,38	69,29	69,30
14.05	Pelalawan	60,51	66,16	69,68	69,49	71,59
14.06	Rokan Hulu	53,24	54,92	54,91	56,76	58,88
14.07	Rokan Hilir	66,63	67,48	66,46	67,45	68,67
14.08	Siak	77,12	76,84	76,87	74,74	77,06
14.09	Kuantan Singingi	67,85	72,64	70,70	68,94	73,80
14.10	Kepulauan Meranti	37,58	38,12	68,06	70,47	71,15
14.71	Pekanbaru	82,85	90,56	86,56	89,81	92,20
14.72	Dumai	68,15	78,64	72,63	78,61	76,30

Sumber : Badan Pangan Nasional

Pada tahun 2020, Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Riau berada pada kategori agak tahan dengan nilai 64,12. Hingga tahun 2024, IKP mengalami peningkatan menjadi 70,42 yang masuk dalam kategori tahan pangan. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya produksi lokal beberapa komoditas strategis, seperti beras, cabai, bawang dan telur. Meskipun produksi lokal belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat, distribusi dari daerah lain serta pengadaan cadangan beras mampu menutupi kekurangan tersebut sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga dan stabil.

Berdasarkan tingkat ketahanan pangan kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2024, terdapat tiga daerah dengan kategori sangat tahan, yaitu Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Kabupaten Siak. Sementara itu, beberapa daerah masih berada dalam kategori agak tahan, yaitu Kabupaten Rokan Hulu (58,88), Kabupaten Kampar (59,69) dan Kabupaten Indragiri Hulu (60,71). Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam menjaga ketersediaan dan meningkatkan produksi lokal pangan.

Wilayah rentan pangan adalah wilayah atau daerah yang memiliki risiko tinggi mengalami kerawanan pangan, yaitu kondisi di mana masyarakatnya tidak dapat mengakses pangan yang cukup, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun keberlanjutan untuk hidup sehat dan produktif. Wilayah sangat Rentan dan Rentan Pangan di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.7 Daerah Rentan Pangan Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024**

Kode	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan				
		2020	2021	2022	2023	2024
14	Riau	106	21	13	13	9
14.01	Kampar	14	5	2	1	1
14.02	Indragiri Hulu	11	-	1	2	-
14.03	Bengkalis	6	2	3	-	-
14.04	Indragiri Hilir	17	7	5	3	4
14.05	Pelalawan	10	2	-	-	-
14.06	Rokan Hulu	8	1	-	2	2
14.07	Rokan Hilir	12	1	1	3	-
14.08	Siak	8	-	-	-	-
14.09	Kuantan Singingi	10	1	-	1	1
14.10	Kepulauan Meranti	8	1	-	1	1
14.71	Pekanbaru	-	-	-	-	-
14.72	Dumai	2	1	1	-	-

Sumber: FSVA Badan Pangan Nasional

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kecamatan rentan pangan di Provinsi Riau selama lima tahun terakhir cenderung terus menurun. Tahun 2020 merupakan kondisi paling kritis dengan jumlah kecamatan rentan pangan sebanyak 106 kecamatan. Hal ini disebabkan pandemi *covid 19*, gangguan distribusi, pembatasan mobilitas, serta penurunan daya beli masyarakat. Di sisi lain, minimnya intervensi pada masa awal pandemi membatasi pemetaan wilayah rentan. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan drastis jumlah kecamatan rentan menjadi 21 kecamatan dan selanjutnya tahun 2022 sebanyak 13 kecamatan yang masuk kategori rentan. Hal ini ditopang oleh pemulihan sistem distribusi pangan, membaiknya akses logistik antar wilayah serta penyaluran bantuan sosial. Kondisi ekonomi masyarakat mulai pulih seiring dilonggarkannya pembatasan, stabilisasi harga pangan pokok, mulai aktifnya program cadangan pangan daerah sehingga daya beli kembali meningkat. Pada tahun 2023, meskipun jumlah kecamatan secara administratif bertambah menjadi 172, jumlah kecamatan rentan tetap 13 dan terus turun menjadi 9 kecamatan pada tahun 2024, Ini menunjukkan kondisi ketahanan pangan mulai stabil.

2.1.4.2 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) merupakan proporsi populasi yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan. Indikator ini diukur

berdasarkan asupan energi yang berada di bawah kebutuhan minimum untuk menjalani hidup yang sehat, aktif, dan produktif. PoU memberikan gambaran mengenai sejauh mana penduduk mampu mengakses dan memanfaatkan pangan yang tersedia. Selain itu, PoU memiliki hubungan yang signifikan dengan Indeks Ketahanan Pangan suatu daerah. Semakin rendah PoU, semakin baik tingkat ketahanan pangan, yang menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk dapat memenuhi kebutuhan gizi mereka dengan baik.

Tabel 2.8 *Prevalence of Undernourishment (PoU) Provinsi Riau Tahun 2020-2024*

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i>	9,16	10,61	15,12	12,33	10,93	7,13

Sumber: Badan Pangan Nasional

Capaian PoU Provinsi Riau dari tahun 2020 hingga 2024 berfluktuatif cenderung menurun dimana tahun 2022 naik signifikan 4,51 persen bila dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2024, PoU di Provinsi Riau telah mencapai 10,93 persen, dan capaian ini lebih baik dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2025 sebesar 11,07 persen. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam ketahanan pangan. Dengan angka tersebut, Provinsi Riau berada pada peringkat ke-12 se-Indonesia dalam hal prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, sedangkan jumlah penduduk di Riau yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 895.700 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang layak bagi seluruh masyarakat di Provinsi Riau.

Jika dilihat secara lebih rinci berdasarkan kabupaten/kota, pertumbuhan angka PoU dalam kurun waktu 2020-2024 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Kabupaten yang mengalami peningkatan pertumbuhan paling besar adalah Siak dan Pelalawan, sedangkan peningkatan terkecil adalah Kabupaten Bengkalis, Rokan Hulu dan Indragiri Hilir. Jika dilihat dari capaian tahun 2024, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dengan angka PoU terbesar, yaitu 13,23 persen sedangkan Kabupaten Rokan Hulu

merupakan daerah dengan angka PoU terkecil, yaitu sebesar 9,27 persen.

Tren PoU di setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut, yang menggambarkan dinamika ketahanan pangan di berbagai wilayah serta efektivitas program pemerintah dalam mengatasi ketidakcukupan konsumsi pangan.

Tabel 2.9 *Prevalence of Undernourishment (PoU) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2024*

Kode	Kabupaten/ Kota	PoU (%)					Rata – rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
14.01	Kampar	9,34	10,52	14,69	12,01	10,75	5,88
14.02	Indragiri Hulu	9,11	10,80	15,22	12,31	11,22	7,88
14.03	Bengkalis	9,45	12,00	15,75	12,77	9,92	4,25
14.04	Indragiri Hilir	13,91	14,10	22,03	17,06	13,23	3,15
14.05	Pelalawan	7,14	9,08	14,42	10,96	10,38	14,17
14.06	Rokan Hulu	9,64	9,78	14,58	9,32	9,27	3,48
14.07	Rokan Hilir	8,24	10,19	15,93	12,62	10,47	10,54
14.08	Siak	7,02	8,75	13,07	10,33	10,75	14,28
14.09	Kuantan Singingi	10,87	9,02	15,80	13,75	11,47	7,15
14.10	Kepulauan Meranti	10,41	14,51	18,81	15,95	12,72	8,39
14.71	Pekanbaru	7,51	10,11	11,81	11,75	10,08	9,18
14.72	Dumai	8,35	9,59	12,58	12,42	11,31	8,95

Sumber: Badan Pangan Nasional

2.1.4.3 Konsumsi Listrik per Kapita

Konsumsi listrik merujuk pada jumlah energi listrik yang digunakan oleh suatu rumah tangga, bisnis, atau industri dalam jangka waktu tertentu. Konsumsi listrik Provinsi Riau mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai tahun 2024 sebesar 13 persen pertahun sedangkan konsumsi listrik per kapita merupakan jumlah energi listrik yang digunakan dibagi dengan jumlah penduduk dalam periode satu tahun. Konsumsi listrik per kapita Provinsi Riau dari tahun 2021 mengalami peningkatan sampai tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12 persen per tahun, dimana konsumsi listrik per kapita Provinsi Riau Tahun 2024 masih dibawah konsumsi listrik nasional tahun 2024 sebesar 1.411 Kwh per kapita.

Tabel 2.10 Konsumsi Listrik Provinsi Riau Tahun 2021-2024

Kode	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Konsumsi Listrik (Kwh)				Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh)				Rata-Rata Pertumbuhann (%)
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Riau	6,115,101,087	7,691,637,991	8,212,556,502.96	8,815,678,563.27	13	941.71	1,162.87	1,202.21	1,310,26	12
14.01	Kampar	743,781,125	766,492,424	813,748,202.01	894,753,767.51	6	867.13	872.79	945.80	999.84	5
14.02	Indragiri Hulu	237,445,621	253,158,043	320,958,328.28	339,319,566.29	13	523.88	545.51	678.85	724.42	11
14.03	Bengkalis	1,311,760,259	2,572,096,001	2,721,213,602.08	2,973,230,110.87	31	2,287.27	4,412.03	4,130.27	5,024.05	30
14.04	Indragiri Hilir	233,499,000	256,238,757	262,655,985.45	280,775,982.22	6	354.85	387.80	377.61	409.95	5
14.05	Pelalawan	176,218,747	196,055,279	213,136,651.96	236,552,542.46	10	441.36	477.03	504.53	570.14	9
14.06	Rokan Hulu	237,863,493	262,627,984	284,643,469.60	322,357,837.42	11	416.61	450.72	496.31	543.15	9
14.07	Rokan Hilir	310,700,029	325,012,373	351,768,804.86	383,456,714.39	7	480.37	493.63	530.93	569.52	6
14.08	Siak	257,550,038	274,964,362	300,351,581.59	324,697,364.56	8	551.87	575.78	625.51	671.14	7
14.09	Kuantan Singingi	171,406,901	181,253,975	190,820,592.99	202,161,637.88	6	504.30	524.08	535.64	578.76	5
14.10	Kepulauan Meranti	92,311,483	92,042,379	98,806,054.84	107,790,130.18	5	440.71	431.05	466.57	504.40	5
14.71	Pekanbaru	1,597,940,874	1,653,768,972	1,759,342,794.19	1,870,833,950.77	5	1,606.64	1,641.39	1,566.16	1,822.18	4
14.72	Dumai	744,623,517	857,927,442	895,110,435.11	879,748,958.71	6	2,302.11	2,585.43	2,854.33	2,641.89	5

Sumber: Perusahaan Listrik Negara

2.1.4.4 Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum

Salah satu kebutuhan hakiki manusia adalah kebutuhan air minum bersih yang dapat dimanfaatkan untuk air minum maupun memasak. Kondisi pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat dilihat dari persentase rumah tangga berdasarkan sumber air minum bersih dan persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air minum layak.

Yang dimaksud dengan sumber air minum bersih adalah sumber air minum yang terdiri atas air kemasan, air isi ulang, leding dan (sumur bor/sumur pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 m. Adapun yang dimaksud dengan Akses air minum layak adalah jika sumber utama air yang digunakan untuk minum berasal dari air leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Termasuk juga ketika sumber air utama yang digunakan oleh rumah tangga berasal dari air kemasan bermerk atau air isi ulang. Sumber air utama yang digunakan untuk mandi, mencuci, dan lain-lain berasal dari leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindungi, mata air terlindung dan air hujan.

**Tabel 2.11 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Bersih dan
Rumah Tangga yang Mempunyai Akses terhadap Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau Tahun 2020-2024**

Kode	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Sumber Air Minum Bersih (%)					Akses Air Minum Layak (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
14	Riau	71,68	71,56	70,15	72,70	81,50	88,25	89,76	90,07	90,47	92,24
14.01	Kampar	71,73	73,85	69,90	75,33	80,65	90,07	90,41	91,37	94,18	96,00
14.02	Indragiri Hulu	76,66	79,78	79,39	83,66	89,28	73,93	64,84	72,86	73,31	77,63
14.03	Bengkalis	67,69	60,40	55,57	63,12	72,88	93,73	93,26	94,20	95,64	95,72
14.04	Indragiri Hilir	30,44	29,11	30,41	26,88	33,49	86,04	89,60	88,76	90,27	94,83
14.05	Pelalawan	85,78	80,33	81,45	86,37	96,12	79,70	83,61	86,09	82,81	83,26
14.06	Rokan Hulu	74,81	77,84	80,30	84,30	96,38	85,32	92,17	91,12	90,75	93,45
14.07	Rokan Hilir	63,73	63,94	63,86	62,72	73,18	81,13	87,52	86,38	86,56	86,82
14.08	Siak	83,11	86,98	85,29	90,10	89,26	92,30	93,13	91,62	93,76	91,79
14.09	Kuantan Singingi	73,49	74,56	68,10	71,06	95,46	88,19	85,78	82,49	83,02	86,73
14.10	Kepulauan Meranti	12,06	7,71	5,54	10,42	12,26	87,78	88,69	94,62	93,37	93,44
14.71	Pekanbaru	94,16	93,86	89,99	92,17	99,65	97,99	98,76	98,57	99,17	99,65
14.72	Dumai	90,70	90,39	94,05	86,90	97,66	91,49	92,86	89,96	89,81	94,82

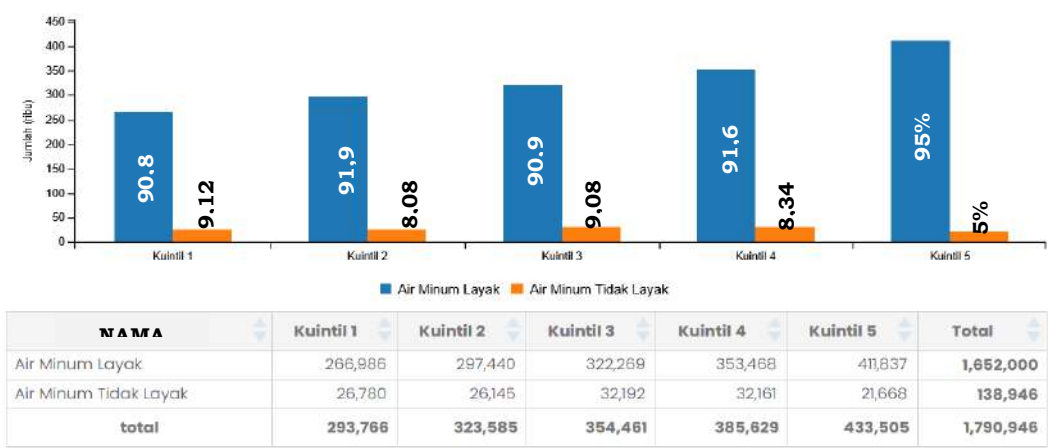
Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Riau

Pada tabel di atas dapat dilihat sampai dengan Tahun 2024 baru 81,50 persen rumah tangga di Provinsi Riau yang mempunyai sumber air minum bersih dan 92,24 persen rumah tangga yang mempunyai akses terhadap sumber air minum layak. Persentase rumah tangga yang mempunyai sumber air minum bersih tahun 2024 meningkat 9,82 persen dari kondisi pada tahun 2020, yang sebesar 71,68 persen. Adapun persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air minum layak pada tahun 2024 meningkat sebesar 3,99 persen dari tahun 2020. Hal ini menunjukkan relatif lambatnya pertumbuhan penyediaan sumber air bersih, dan akses terhadap air minum layak di Provinsi Riau.

Dari 12 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Riau, persentase rumah tangga yang mempunyai sumber air bersih terendah pada periode tahun 2020–2024 adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan kondisi yang menurun sampai dengan tahun 2022, yaitu 12,06 persen pada tahun 2020 dan menjadi 5,54 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2024 terjadi perbaikan, dimana persentase rumah tangga yang memiliki sumber air minum bersih menjadi 12,26 persen. Kabupaten dengan persentase rumah tangga dengan sumber bersih yang paling rendah pada periode tahun 2020 – 2024 berikutnya adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir, dengan persentase masing-masing sebesar 33,49 persen, 72,88 dan 73,18 persen pada tahun 2024.

Upaya penyediaan sumber air minum bersih dilakukan pemerintah dengan pembangunan SPAM perpipaan maupun SPAM non perpipaan. Pembangunan SPAM non perpipaan telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk penyediaan sumur bor di daerah permukiman dan penyediaan air minum berbasis masyarakat di daerah perdesaan. Namun sejauh ini belum tersedia data yang lengkap terkait hal ini SPAM non perpipaan, ditambah lagi dengan berakhirnya Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) pada tahun 2023, menyebabkan tidak tersedia lagi data PAMSIMAS di website Kementerian PUPR.

Kondisi akses penduduk terhadap sumber air berkualitas atau layak atau yang aman diminum bagi masyarakat juga harus dilihat berdasarkan pengelompokan kesejahteraan, terutama pada kuintil 1 (masyarakat miskin dan rentan atau 20 persen orang dengan status kesejahteraan terendah). Hal ini terkait dengan bagaimana kondisi sebaran akses air minum layak bagi seluruh kelompok masyarakat dari status kesejahteraan terendah sampai dengan yang tertinggi. Sebagaimana dapat dilihat dari gambar berikut ini.



Sumber: Sepakat (Susenas) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gambar 2.6 Capaian Kondisi Air Minum Layak (Persen dan Jumlah) Berdasarkan Status Kesejahteraan di Provinsi Riau, Tahun 2024

a) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyediaan Air Minum menerangkan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum adalah suatu kesatuan sarana dan prasarana air minum. Penyelenggaraan SPAM merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikut proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan penyediaan air minum bersih terutama di daerah perkotaan, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah kabupaten/kota telah berupaya membangun Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan. Dari data yang dipublikasi oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Riau, diketahui terdapat 129 Unit SPAM Perpipaan yang dikelola oleh 12 kabupaten/kota, 17 diantaranya tidak berfungsi, 2 unit belum berfungsi, 1 unit

berfungsi tapi belum operasional, dan 2 unit membutuhkan rehabilitasi.

Seluruh SPAM perpipaan yang ada di Provinsi Riau mempunyai total kapasitas sebesar 3.617,55 liter/detik. Kapasitas tersebut setara untuk melayani 289.404 Sambungan Rumah tangga (SR). Namun sampai dengan tahun 2023, masih terdapat *idle capacity* sebesar 1.550,00 liter/detik atau 42,85 persen dari kapasitas terpasang. Adapun jumlah sambungan rumah tangga yang telah terpasang baru mencapai 99.339 sambungan rumah tangga atau 34,35 persen dari kapasitas layanan. Waktu produksi rata-rata seluruh SPAM adalah 13,89 jam/hari, sedangkan jam distribusi 12,83 jam/hari dari target seharusnya 24 jam per hari. Tingkat kehilangan air rata-rata dari seluruh SPAM yang ada lebih kurang 32,62 persen. Data terkait SPAM yang ada di Provinsi Riau pada tahun 2023 merupakan data terakhir yang dirilis oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12 Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan di Wilayah Provinsi Riau Tahun 2023

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah SPAM (Unit)	Jumlah SPAM Belum/ Tidak Berfungsi	Kapasitas (Liter/Detik)			Idle Capacity		Jam Operasi (Jam/ Hari)		% NRW (Kehilangan Air)	Pelayanan Unit SR
				IPA Terpasang	Produksi	Distribusi	(Liter/ Detik)	%	Produksi	Distribusi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.01	Kampar	14	-	307,05	174,15	148,00	132,90	43,28	10,11	10,11	18,19	10.538
14.02	Indragiri Hulu	15	-	375,00	276,60	272,72	98,40	26,24	13,44	13,44	37,98	15.238
14.03	Bengkalis	6	1	347,50	134,69	129,37	212,81	61,24	14,00	12,17	27,17	13.293
14.04	Indragiri Hilir	22	7	380,00	163,61	158,05	216,89	57,08	9,47	9,33	53,90	11.642
14.05	Pelalawan	12	-	92,50	56,50	56,00	36,00	38,92	10,33	10,08	20-30	3.396
14.06	Rokan Hulu	16	3	420,00	298,00	231,00	122,00	29,05	6,00	5,92	25,50	5.428
14.07	Rokan Hilir	5	5	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
14.08	Siak	14	-	375,00	230,00	200,50	145,00	38,67	11,43	9,21	30,70	12.472
14.09	Kuantan Singingi	9	1	140,00	10,00	110,00	30,00	21,43	9,00	8,33	36,00	4.792
14.10	Kepulauan Meranti	8	2	58,50	47,50	30,00	11,00	18,80	8,00	2,00	28,57	2.063
14.71	Pekanbaru	2	-	580	277	225	303	52,24	24,00	24,00	66,00	13.455
14.72	Dumai	6	-	442,00	300,00	90,00	142,00	32,13	24,00	22,50	34,80	7.022
	Jumlah	129	19	3.617,55	2.068,05	1.950,64	1.550,00	42,85	13,89	12,83	32,62	99.339

Sumber : Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau, (diolah)

Di Provinsi Riau juga terdapat 2 SPAM Regional, yaitu SPAM Regional Durolis dan SPAM Regional Pekan Kampar, yang keduanya belum berfungsi secara optimal. SPAM Durolis dengan kapasitas 400 liter/detik mengalirkan air curah untuk 3 kabupaten/kota, dengan target layanan 32.000 SR, sedangkan SPAM Regional Pekan – Kampar dengan target wilayah layanan di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar sebesar 3.200 SR mempunyai kapasitas produksi 40 liter/detik. Perjanjian layanan SPAM Durolis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13 Perjanjian SPAM Regional Durolis

No	Kabupaten/Kota	SPAM	Kapasitas Distribusi (liter/detik)	Target Sambungan Rumah Tangga (SR)
1	Dumai	SPAM Durolis - Kota Dumai	150	12.000
2	Rokan Hilir	1. SPAM Durolis Tanjung Melawan 2. SPAM Durolis Bangko Pusako 3. SPAM Durolis Rimba Melintang	100	8.000
3	Bengkalis	SPAM Durolis Mandau	150	12.000

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Sampai dengan tahun 2024, SPAM Regional Durolis yang telah beroperasi adalah SPAM Durolis – Kota Dumai, dengan Sambungan Rumah Tangga yang dilayani lebih kurang 2.900 SR atau 24,17 persen dari target Sambungan Rumah Tangga yang dijanjikan. Untuk Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis, sampai tahun 2024 belum berfungsi.

SPAM Pekan Kampar merupakan SPAM yang dibangun untuk penyediaan air minum bagi sarana-sarana olahraga PON XVIII Tahun 2012. Sampai saat ini rumah tangga yang terlayani baru di wilayah Kabupaten Kampar yang berbatasan dengan Kota Pekanbaru, dengan jumlah 119 SR atau 3,72 persen dari kapasitas layanan sebesar 3.200 SR.

b) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Non Jaringan Perpipaan

Untuk meningkatkan pelayanan air minum di wilayah perdesaan, Pemerintah berupaya menyediakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) non jaringan perpipaan, berupa SPAM yang pengelolaannya diserahkan kepada kelompok masyarakat dan sumur bor yang berfungsi sebagai *hydrant* umum. Pembangunan SPAM non jaringan di wilayah Provinsi Riau, terutama di wilayah pesisir tidak mudah, karena terbatasnya kualitas air permukaan, dan air sumur dangkal, demikian juga dengan upaya memanfaatkan sumur air dalam. Pada saat dilakukan pemboran untuk memperoleh air sumur dalam, kualitas air yang ditemukan cenderung mengandung ferum yang tinggi, atau jumlah air yang terbatas, akibatnya setelah pemanfaatan dalam jangka pendek sumber air tidak lagi tersedia. Data jumlah Kepala Keluarga atau Rumah Tangga yang telah mendapat layanan SPAM non jaringan perpipaan di wilayah Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14 Data Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Non Jaringan Perpipaan di Wilayah Provinsi Riau Tahun 2023

Kode	Kabupaten/Kota	Layanan Spam Non Jaringan Perpipaan (KK)				
		PAMSIMAS	SPAM Permukiman		Sumur Bor / Hydrant Umum	Jumlah
			Tahun 2022	Tahun 2023		
1	2	3	4	5	6	7
14.01	Kampar	13.162	74	157	-	13.393
14.02	Indragiri Hulu	9.655	45	-	-	9.700
14.03	Bengkalis	5.498	45	95	-	5.638
14.04	Indragiri Hilir	9.550	78	92	7.469	17.189
14.05	Pelalawan	5.325	23	-	-	5.348
14.06	Rokan Hulu	8.669	48	190	-	8.907
14.07	Rokan Hilir	3.149	52	60	-	3.261
14.08	Siak	5.336	39	-	-	5.375
14.09	Kuantan Singingi	6.916	35	-	-	6.951
14.10	Kepulauan Meranti	7.240	39	75	-	7.354
14.71	Pekanbaru	1.280		51	-	1.331
14.72	Dumai	391	23	55	-	469
Jumlah		76.171	501	775	7.469	84.916

Sumber : Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Riau dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, diolah

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diukur melalui indikator udara, air, tutupan lahan dan air laut. Penggolongan IKLH dimulai dari nilai ≥ 90 tergolong sangat baik, nilai 70 - 90 tergolong baik, nilai 50 - 70 tergolong sedang, nilai 25 - 50 tergolong buruk, nilai 0 - 25 tergolong predikat sangat buruk.

Untuk indikator Indeks Kualitas Air dipantau dari kualitas lingkungan baku mutu air sungai Provinsi Riau dengan sasaran industri yang membuang air limbah ke badan air dari empat sungai besar di Provinsi Riau, yaitu Sungai Indragiri, Sungai Rokan, Sungai Siak, dan Sungai Kampar sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Riau
Tahun 2020-2024

Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
Kualitas Udara (IKU)	90,42	90,13	90,69	90,89	89,66
Kualitas Air (IKA)	50,23	52,25	53,88	50,84	52,69
Kualitas Lahan (IKL)	41,24	50,22	50,00	51,69	51,25
Kualitas Air Laut (IKAL)	77,58	77,73	83,95	74,39	77,47
IKLH	69,41	70,72	72,10	70,42	70,77

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Berdasarkan tabel di atas IKLH Provinsi Riau berfluktuatif, dimana pada tahun 2020 IKLH Provinsi Riau sebesar 69,41 poin pada kategori sedang dan mengalami peningkatan hingga tahun 2022 dengan kategori baik (72,10 poin), namun mengalami penurunan pada tahun 2023 yang disebabkan perubahan metode perhitungan. Nilai maksimal indeks kualitas air yang sebelumnya 70 poin dengan metodologi baru menjadi 100 poin dan tidak membandingkan kelas air. Indeks kualitas udara terdapat penambahan parameter PM 2,5 selain NOx, SOx dan PM 10. Sedangkan indeks kualitas lahan dengan metodologi baru

memasukkan variabel kanal, kebakaran, tinggi muka air tanah dan mengakomodir 23 kelas tutupan lahan.

Kondisi lahan gambut dan pasang surut mempengaruhi hasil pemantauan indeks kualitas air yang pada akhirnya juga mempengaruhi kualitas air laut. Oleh sebab itu, perlu peningkatan upaya pengendalian pencemaran air terutama dari sisi pengawasan dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan terhadap pembuangan limbah ke badan air. Capaian indikator kualitas udara pada tahun 2024 sebesar 89,66 poin dengan kategori baik, dipengaruhi oleh berkurangnya kejadian kebakaran hutan dan lahan sebagai penyumbang terbesar kualitas udara. Capaian indeks kualitas lahan pada tahun 2024 sebesar 51,25 poin berada pada kategori sedang.

2.1.5.2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

a) Akses Terhadap Sanitasi Layak

Pengolahan limbah domestik merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal untuk bidang pekerjaan umum yang merupakan pelayanan dasar. Salah satu indikator kinerja dalam pembangunan pengolahan limbah domestik adalah akses sanitasi layak. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik.

Pada tahun 2024 persentase rumah tangga di Provinsi Riau yang mempunyai akses sanitasi layak mencapai 86,32 persen, kondisi ini meningkat sebesar 6,28 persen dari tahun 2020 sebesar 80,04 persen. Dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, pada tahun 2024 terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak paling rendah di Provinsi Riau berada di wilayah pesisir Provinsi Riau yaitu Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 60,86 persen, Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 61,31 persen, dan Kabupaten Rokan Hilir sebesar 80,76 persen. Mengingat air limbah domestik merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal, perlu diupayakan peningkatan akses sanitasi layak di Provinsi Riau,

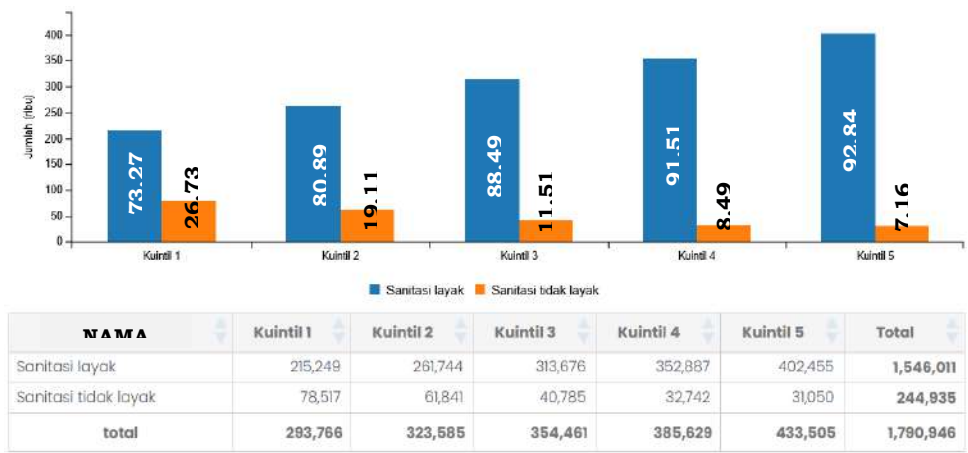
terutama di 3 (tiga) kabupaten yang kondisinya paling rendah di Provinsi Riau. Data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.16 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2024

Kode	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
14	Riau	80,04	83,99	83,64	84,06	86,32
14.01	Kampar	89,47	89,62	82,97	86,40	87,82
14.02	Indragiri Hulu	84,16	82,82	84,63	85,43	86,09
14.03	Bengkalis	89,67	90,34	86,99	91,11	92,63
14.04	Indragiri Hilir	59,33	49,64	56,32	57,13	60,86
14.05	Pelalawan	89,18	81,13	83,77	85,30	85,70
14.06	Rokan Hulu	81,44	88,85	90,10	89,49	90,64
14.07	Rokan Hilir	74,75	73,94	81,15	79,71	80,76
14.08	Siak	90,51	95,41	93,51	91,15	93,32
14.09	Kuantan Singingi	82,81	87,98	86,98	85,36	86,86
14.10	Kepulauan Meranti	57,43	55,98	57,03	57,67	61,31
14.71	Pekanbaru	96,73	96,28	96,65	95,13	96,46
14.72	Dumai	95,38	97,03	91,44	95,50	97,98

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Kondisi penduduk terhadap akses sanitasi layak bagi masyarakat juga harus dilihat berdasarkan pengelompokan kesejahteraan, sebagaimana pengelompokan pada kuintil 1 (masyarakat miskin dan rentan atau 20 persen orang dengan status kesejahteraan terendah). Sebagaimana dapat dilihat dari gambar berikut ini.



Sumber: Sepakat (Susenas) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gambar 2.7 Capaian Kondisi Sanitasi Layak (Persen dan Jumlah) Berdasarkan Status Kesejahteraan di Provinsi Riau, Tahun 2024

b) Akses Terhadap Sanitasi Aman

Salah satu indikator pembangunan untuk pengolahan limbah domestik adalah persentase rumah tangga yang mempunyai akses sanitasi aman. Akses sanitasi aman menurut Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan bidang Perumahan Rakyat Pasal 6 Poin 5, yaitu fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh rumah tangga, yang terhubung dengan *septic tank* dan disedot rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan sambungan rumah tangga yang terkoneksi ke Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Sampai dengan tahun 2023, telah dibangun 8 unit IPLT di 8 kabupaten/kota, namun 4 unit belum berfungsi dan 1 unit, yaitu di Kota Pekanbaru tidak berfungsi. Belum berfungsinya IPLT, umumnya terkait dengan kelembagaan, yaitu belum terbentuknya unit pengelola dan regulasi terkait pengelolaan IPLT. Dari 2 IPLT yang berfungsi, sampai dengan tahun 2024 jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 556 rumah tangga atau 1,10 persen dari rumah tangga perkotaan Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT Kabupaten Siak sebesar 462 rumah tangga atau 0,61 persen dari rumah tangga perkotaan yang ada di Kabupaten Siak. Berdasarkan jumlah layanan dari kedua IPLT tersebut, jumlah rumah tangga yang mempunyai akses sanitasi aman di Provinsi Riau pada tahun 2024 adalah sebesar 1.018 rumah tangga atau 0,104 persen. Data terkait IPLT yang telah ada di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17 Kondisi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di Provinsi Riau

Kode	Kabupaten/Kota	Nama IPLT	Lokasi Kecamatan/ Distrik	Kapasitas (Debit) IPLT	Kapasitas Terpakai	Target KK Terlayani	Opsi Teknologi Iplt	Fungsionalisasi	Armada
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.01	Kampar	IPLT Kabupaten Kampar	Bangkinang	10 M3/hari	0 M3/hari	46.367	Solid Separation Chamber (SSC)	Belum Berfungsi	1 Unit Truk Tinja Tahun 2020 (APBN) Kapasitas 4M3
14.02	Indragiri Hulu	IPLT Kabupaten Indragiri Hulu	Rengat Barat	10 M3/hari	8 M3/hari	800	Solid Separation Chamber (SSC)	Berfungsi	1 Unit Truk Tinja Tahun 2016 (APBN) Kapasitas 5M3 1 Unit Truk Tinja Tahun 2016 (APBD) Kapasitas Truk Tinja 3M3 1 Unit Motor Tinja Tahun 2018 (APBD)
14.03	Bengkalis	IPLT Kota Duri	Bathin Selopan	5 M3/hari	0 M3/hari	2.700	Solid Separation Chamber (SSC)	Belum Berfungsi	Belum mempunya armada truk tinja
14.06	Rokan Hulu	IPLT Kabupaten Rokan Hulu	Rambah	10 M3/hari	0 M3/hari	60.376	Solid Separation Chamber (SSC)	Belum Berfungsi	1 Unit Truk Tinja Tahun 2020 (APBN) Kapasitas 4M3
14.08	Siak	IPLT Kecamatan Tualang	Tualang	10 M3/hari	8 M3/hari	3.500	Solid Separation Chamber (SSC)	Berfungsi	1 Unit Truk Tinja Tahun 2016 (APBD) Kapasitas 4M3
14.09	Kuantan Singingi	IPLT Kabupaten Kuantan Singingi	Sentajo Raya	15 M3/hari	2 M3/hari	3.600	Solid Separation Chamber (SSC)	Berfungsi	1 Unit Truk Tinja Kapasitas 4m3 tahun 2007 (APBD)
14.71	Pekanbaru	IPLT Muara Fajar (Optimalisasi)	Rumbai	40 M3/hari	0 M3/hari	100	Tangki Imhoff	Tidak Berfungsi	1 Unit Truk Tinja, 2005 (APBN), sudah beralih fungsi menjadi armada penyiram tanaman
14.72	Dumai	IPLT Kota Dumai	Dumai Selatan	10 M3/hari	0 M3/hari	58.332	Solid Separation Chamber (SSC)	Belum Berfungsi	1 Unit Truk Tinja Tahun 2020 (APBN) Kapasitas 4M3

Sumber : Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Riau

2.1.5.3 Persampahan

Persentase cakupan area pelayanan persampahan di Provinsi Riau tahun 2020 sampai dengan 2024 relatif tetap yaitu 49,59 persen. Dimana pelayanan persampahan terendah adalah 10 persen yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir dan 100 persen di Kota Pekanbaru. Untuk kabupaten/kota yang cakupan pelayanannya masih rendah perlu program peningkatan kinerja dinas terkait dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah. Capaian pengelolaan sampah baik penanganan maupun pengurangan sampah di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 masih belum bisa mengikuti capaian nasional. Hal ini karena masih kurangnya sarana prasarana, anggaran pengelolaan sampah dan kepedulian masyarakat terhadap sampahnya. Disamping itu, timbulan sampah akan selalu meningkat sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Persentase cakupan area pelayanan persampahan Provinsi Riau tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.18 Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan Tahun 2020–2024

Kode	Provinsi/ Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
14	Riau	49,59	49,59	49,59	49,59	49,59
14.01	Kampar	17,63	30,00	30,00	33,33	33,33
14.02	Indragiri Hulu	56,02	42,86	42,86	42,86	42,86
14.03	Bengkalis	68,12	90,90	90,90	90,91	90,91
14.04	Indragiri Hilir	21,99	10,00	10,00	10,00	10,00
14.05	Pelalawan	29,40	41,70	41,70	41,67	41,67
14.06	Rokan Hulu	19,15	25,00	25,00	25,00	25,00
14.07	Rokan Hilir	29,66	33,30	33,30	33,33	33,33
14.08	Siak	73,53	78,57	78,57	78,57	78,57
14.09	Kuantan Singingi	37,01	60,00	60,00	60,00	60,00
14.10	Kepulauan Meranti	15,00	15,00	15,00	22,22	22,22
14.71	Pekanbaru	67,77	100	100	100	100
14.72	Dumai	90,32	83,10	83,10	57,14	57,14

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Jumlah timbulan sampah Provinsi Riau (data dari 10 kabupaten/kota) pada tahun 2024 sebesar 1.139.752,06 ton, dimana upaya pengurangan sampah sebesar 63.563,76 ton, penanganan sampah sebesar 504.029,89 ton dan timbulan sampah terolah sebesar 1.793,14 ton. Perhitungan sampah sangat dipengaruhi ketaatan kabupaten/kota dalam pelaporan capaian kebijakan strategi daerah persampahan. Timbulan sampah tertinggi berada di Kota Pekanbaru sedangkan terendah berada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Jumlah timbulan sampah terolah

di fasilitas pengelolaan sampah Provinsi Riau tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.19 Jumlah Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No	Rincian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbunan Sampah	2.892.076,5	2.955.442,78	1.342.018	1.051.298,13	1.139.752,06
2	Pengurangan Sampah	129.041,38	197.931,1	111.092,3	90.898,22	63.563,76
3	Penanganan Sampah	690.007,95	510.597,27	524.900	464.561,28	504.029,89
4	Timbunan Sampah Terolah	819.049,33	708.528,37	635.992,3	555.459,5	1.793,14
Keterangan		Data 9 kab/kota	Data 11 kab/kota	Data 12 kab/kota	Data 12 kab/kota	Data 10 kab/kota

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.1.5.4 Kerusakan Kawasan Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Riau

Kerusakan kawasan hutan merupakan salah satu isu lingkungan yang paling mendesak di wilayah Riau. Hutan yang dulunya menjadi penyangga kehidupan, penyimpan karbon, pengatur air dan rumah bagi keanekaragaman hayati, kini menghadapi tekanan yang sangat besar akibat alih fungsi lahan, pembukaan hutan secara ilegal dan praktik pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terjadi penurunan kerusakan Kawasan hutan di Provinsi Riau dalam tujuh tahun terakhir sebesar 68 persen. Perkembangan kerusakan kawasan hutan dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Provinsi Riau tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.20 Kerusakan Kawasan Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No	Keterangan	Tahun				
		2020*	2021*	2022**	2023**	2024**
1	Kerusakan Kawasan Hutan dan Lahan	701.607	701.607	221.828	221.828	221.828
	a. Sangat Kritis	261.139	261.139	191.877	191.877	191.877
	b. Agak Kritis	-	-	-	-	-
	c. Kritis	440.468	440.468	29,951	29,951	29,951
2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	2.196,54	8.547	3.055,50	1.775,20	2.793,91

Sumber: BPS Provinsi Riau

Ket. * : Berdasarkan data tahun 2018 karena rilis per tiga tahun sekali
** : Berdasarkan data tahun 2021 karena rilis per tiga tahun sekali

Berdasarkan tabel di atas, kerusakan kawasan hutan di Provinsi Riau berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) relatif tetap pada tahun 2020-2024. Namun dengan adanya perubahan formulasi perhitungan yang telah

ditetapkan oleh KLHK, luas kerusakan kawasan hutan dan lahan pada tahun 2022 menjadi 221.828 Hektar, dimana 86,50 persen merupakan kategori sangat kritis. Tingginya kategori kerusakan sangat kritis ini memerlukan upaya rehabilitasi kolaboratif dan masif dari berbagai pihak terkait. Dalam lima tahun terakhir, rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Provinsi Riau menunjukkan angka yang berfluktuasi dan cenderung meningkat, namun belum dapat menyelesaikan kerusakan kawasan hutan dan lahan secara menyeluruh di Provinsi Riau.

Selanjutnya kebun dalam kawasan hutan merupakan isu yang sangat krusial di Provinsi Riau, karena hal ini menjadi kendala dalam program peningkatan produksi dan prduktivitas pertanian di Provinsi Riau dan menyebabkan kerugian negara dari sisi hilangnya pendapatan sektor perkebunan. Total luas kebun dalam kawasan hutan di Provinsi Riau sebesar 1,9 juta hektar, dimana luasan terbesar kebun dalam kawasan hutan berada pada hutan produksi konversi sebesar 36 persen dan hutan produksi sebesar 31 persen. Kebun dalam kawasan hutan terluas berada di Kabupaten Rokan Hilir sebesar 396.125,16 hektar, Bengkalis sebesar 233.604,84 hektar dan Indragiri Hulu sebesar 227.455,09 hektar. Luas kebun dalam kawasan hutan berdasarkan fungsi pada kabupaten/kota se- Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.21 Luas Kebun dalam Kawasan Hutan di Provinsi Riau Tahun 2024

Kode	Provinsi/ Kabupaten / Kota	Fungsi Kawasan Hutan (Hektar)					Jumlah
		Hutan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi	Hutan Produksi Konversi	
14	Riau	95.190,39	75.525,82	453.118,27	588.821,55	689.102,47	1.901.759,58
14.01	Kampar	3.698,28	2.219,28	31.892,05	60.533,89	77.918,75	176.262,25
14.02	Indragiri Hulu	393,98	7.375,76	45.252,34	40.971,71	133.461,30	227.455,09
14.03	Bengkalis	25.796,57	-	60.793,58	107.806,85	39.207,83	233.604,84
14.04	Indragiri Hilir	174,57	416,43	43.696,34	3.656,09	89.657,25	139.600,67
14.05	Pelalawan	59.609,98	10,6	54.217,98	52.820,06	36.714,93	203.373,55
14.06	Rokan Hulu	-	26.179,19	35.347,71	24.419,99	79.646,31	165.593,21
14.07	Rokan Hilir	-	8.955,95	120.479,11	139.612,42	127.077,68	396.125,16
14.08	Siak	1.737,02	-	4.388,96	72.909,07	5.587,68	84.622,73
14.09	Kuantan Singingi	270,64	22.264,03	28.699,05	15.933,76	50.073,14	117.240,63
14.10	Kepulauan Meranti	-	46,89	4.325,65	478,93	3.288,44	8.140,99
14.71	Pekanbaru	22,89	-	449,06	1.206,35	946,15	2.624,46
14.72	Dumai	3.479,49	-	2.939,53	59.733,36	19.638,92	85.791,29

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Berdasarkan data tabel di atas kebun dalam kawasan hutan sebesar 1.9 juta hektar merupakan data awal inventarisasi kebun dalam kawasan hutan dan belum ada perubahan hingga saat ini.

Penyelesaian kebun dalam kawasan hutan ini merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak terkait. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga menjadi solusi dengan tidak menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari.

2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.6.1 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Inventarisasi GRK sangat penting dalam upaya mengurangi emisi GRK. Dengan memahami sumber dan jumlah emisi yang dihasilkan, Pemerintah dapat mengidentifikasi sektor yang menjadi kontributor terbesar dalam masalah perubahan iklim dengan mengembangkan strategi mitigasi yang tepat. Tingkat emisi GRK Provinsi Riau saat ini belum merepresentasikan kondisi keseluruhan Provinsi Riau karena hanya dihitung berdasarkan sektor yang dipantau.

Penyusunan inventarisasi GRK bertujuan untuk menyediakan informasi secara berkala mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Di samping itu juga memberikan informasi pencapaian penurunan emisi GRK provinsi terhadap nasional. Inventarisasi GRK dilakukan pada (n-2) yang meliputi empat sektor yakni kehutanan dan penggunaan lahan, pengadaan dan penggunaan energi, proses dan produk industri, pertanian, serta pengelolaan limbah. Selanjutnya profil emisi GRK Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22 Capaian Emisi GRK Provinsi Riau Tahun 2019-2023

Emisi GRK Sektor	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Energi	51.066,71	20.567,7112	20.259,19	19.951,25	19.731,78
IPPU	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
Pertanian	2.234,31	2.269,08	2.235,04	2.201,06	2.176,84
Kehutanan	231.803,93	154.585,81	152.267,02	149.952,56	148.303,08
Limbah	6.410,20	6.054,53	5.963,71	5.873,06	5.808,46
Jumlah	291.515,18	183.477,25	180.725,07	177.978,04	176.020,27

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Tabel 2.23 Capaian Emisi GRK Provinsi Riau Tahun 2019-2023
(Perhitungan Formulasi Baru)

Emisi GRK Sektor	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Energi	50.862,94	44.762,13	45.492,36	45.263,44	39.877,15
IPPU	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12
Pertanian	2.093,48	2.224,02	2.008,68	2.004,13	1.954,29
Kehutanan	270.661,69	234.011,36	236.349,81	267.359,51	237.395,19
Limbah	6.113,89	5.903,57	5.955,81	5.911,46	5.928,26
Jumlah	329.732,13	286.901,19	289.806,77	320.538,66	285.155,01

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Perhitungan emisi gas rumah kaca sampai dengan tahun 2023 masih menggunakan formulasi lama. Selanjutnya terjadi perubahan formulasi perhitungan emisi gas rumah kaca setelah tahun 2023, dimana sudah memperhitungkan faktor koreksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Faktor koreksi tersebut meliputi antara lain:

1. Pemisahan parameter luas kebakaran pada lahan mineral dan lahan gambut menjadi 23 kelas lahan yaitu (hutan lahan primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, perkebunan, semak belukar, semak belukar rawa, savana/padang rumput, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, sawah, tambak, permukiman, permukiman transmigrasi, lahan terbuka, pertambangan, tubuh air, rawa, bandara/pelabuhan dan awan);
2. Perubahan metode dengan menggunakan *Universal Transverse Mercator (UTM)* sehingga mengakibatkan perbedaan luasan tutupan lahan pada areal gambut yang sebelumnya 3.517.096 hektar menjadi 4.964.910,06 hektar;
3. Terjadi penggantian GWP (*global warning position*) pada tahun 2022 dari AR2 (laporan ke 2 IPCC) ke AR5 (laporan ke 5 IPCC) di sistem *sign smart* dan beberapa parameter faktor emisi.

Namun demikian, untuk menjaga konsistensi data, perhitungan emisi GRK tahun 2019-2023 tetap menggunakan formulasi lama sesuai perhitungan target RPJMD Provinsi Riau pada periododesasi tersebut. Berdasarkan data pada tabel di atas, terjadi penurunan sebesar 39,62 persen dalam lima tahun terakhir

jika menggunakan formulasi lama. Namun dengan formulasi baru, penurunan emisi GRK menjadi sebesar 13,52 persen, dengan kontribusi terbesar dari sektor kehutanan sebesar 83,25 persen dan sektor energi sebesar 13,98 persen. Emisi GRK sektor kehutanan disumbang dari kategori perubahan komposisi gambut. Sedangkan sektor energi disumbangkan dari kategori perkantoran dan pemukiman. Selanjutnya untuk kategori kunci penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca pada tahun 2023 dari sektor kehutanan dengan kategori komposisi gambut, kebakaran di lahan gambut, emisi pengelolaan tanah, perubahan penggunaan lahan pertanian. Dengan diketahuinya kategori kunci tersebut, maka dapat menjadi panduan dalam melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan memperhatikan subsektor yang menjadi prioritas utama dalam penurunan emisi GRK Provinsi Riau.

2.1.6.2 Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Intensitas emisi GRK didapat dari perbandingan nilai emisi aktual pada tahun tertentu dengan output aktivitas ekonomi suatu negara pada tahun yang sama. Emisi aktual yang dimaksud adalah banyaknya emisi yang dihasilkan setelah adanya intervensi aksi dan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK), yang didapat dari pengurangan antara baseline emisi dengan potensi penurunan emisi pada tahun tersebut. Sedangkan output aktivitas ekonomi negara menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) konstan tahun 2010.

Capaian Intensitas emisi GRK Provinsi didapat dari angka/nilai penurunan emisi GRK tahun tertentu dibagi Produk Domestik Regional Bruto tahun yang sama. Persentase penurunan intensitas emisi GRK didapat dari data capaian intensitas emisi GRK provinsi pada tahun tertentu dibandingkan dengan data Intensitas Emisi GRK baseline (tahun *initial* 2010). Capaian penurunan intensitas emisi GRK Provinsi Riau tahun 2010 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.24 Capaian Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Riau terhadap Baseline Tahun 2010-2024

Tahun	Penurunan Emisi Tahunan (%)	Penurunan Emisi Kumulatif (%)	Penurunan Intensitas Emisi Terhadap Baseline (%)
2010	0,00	0,00	0,00
2011	5,90	2,94	9,20
2012	9,67	5,15	18,07
2013	13,40	7,15	25,18
2014	17,10	9,09	30,06
2015	20,69	11,00	32,76
2016	24,20	12,84	38,26
2017	27,63	14,61	43,57
2018	31,12	16,39	47,30
2019	34,59	18,17	51,14
2020	37,98	19,90	54,02
2021	36,53	21,21	55,39
2022	38,28	22,46	58,44
2023	44,01	23,94	63,37
2024	46,95	25,39	66,90

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Berdasarkan tabel, capaian penurunan emisi GRK tahunan Provinsi Riau dalam dua puluh tahun terakhir sebesar 46,95 persen, sedangkan secara kumulatif capaian penurunan emisi GRK sebesar 25,39 persen. Penurunan emisi GRK Provinsi Riau terbesar disumbang dari sektor *Forest and Other Land Use* (FOLU) sebesar 25,78 persen, lahan gambut sebesar 29,02 persen, pertanian sebesar 19,79 persen, peternakan sebesar 21,58 persen. Selanjutnya persentase penurunan intensitas emisi GRK terhadap baseline tahun 2024 sebesar 66,90 persen.

2.1.6.3 Kawasan Rawan Bencana

Pemerintah daerah terus didorong untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana. Hal tersebut diwujudkan dalam integrasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dengan rencana pembangunan daerah, sehingga ketangguhan atau resiliensi masyarakat diharapkan dapat terwujud, baik pada pra, saat dan pascabencana.

Dilihat dari aspek klimatogis, topografi, geografis dan geologis Provinsi Riau memiliki kerentanan wilayah yang cukup tinggi terhadap bencana. Secara umum, bencana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu bencana alam dan bencana non alam. Bencana alam meliputi

bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, dan gerakan tanah), bencana akibat kondisi gerakan tanah), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan). Bencana non-alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, kebakaran, dan pencemaran lingkungan.

Kejadian bencana hidrometeorologi di wilayah Provinsi Riau tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, tercatat banjir 734 kejadian, longsor/abrasi 41 kejadian, angin puting beliung 24 kejadian. Sedangkan kebakaran hutan mengalami penurunan jumlah titik api sebanyak 2.774 titik, namun luas lahan terbakar meningkat dengan luas yang terbakar 2.504,91 hektar.

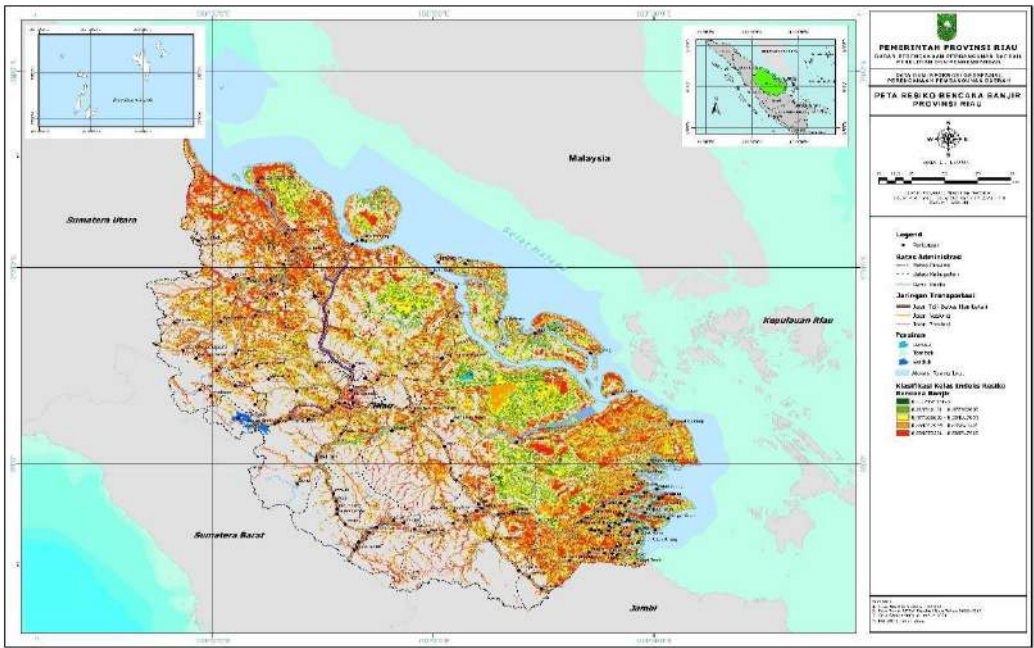
Kondisi bencana hidrometeorologi di Provinsi Riau pada tahun 2023-2024 terdiri dari banjir, longsor/abrasi dan angin puting beliung. Untuk beberapa kejadian sepanjang tahun 2023-2024 dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25 Kejadian Bencana Hidrometeorologi Tahun 2023-2024

Kode	Kabupaten/Kota	2023			2024		
		Banjir	Longsor /Abrasi	Angin Puting Beliung	Banjir	Longsor /Abrasi	Angin Puting Beliung
14.01	Kampar	24	5	5	28	8	5
14.02	Indragiri Hulu	20	1	-	121	1	0
14.03	Bengkalis	12	1	-	3	3	0
14.04	Indragiri Hilir	6	2	4	19	4	2
14.05	Pelalawan	19	-	-	35	0	0
14.06	Rokan Hulu	60	-	2	57	6	7
14.07	Rokan Hilir	47	-	-	58	6	0
14.08	Siak	1	1	1	4	0	0
14.09	Kuansing	185	4	2	353	13	4
14.10	Kepulauan Meranti	8	-	1	8	0	5
14.71	Pekanbaru	20	1	4	45	0	0
14.72	Dumai	4	-	-	3	0	1
Total		406	15	19	734	41	24

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

Dari tabel di atas, bencana hidrometeorologi yang banyak terjadi adalah bencana banjir, yang meningkat secara signifikan di tahun 2024, tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Riau. Daerah yang selalu mengalami bencana banjir yang cukup besar setiap tahunnya antara lain di Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti dan Kuantan Singingi.



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi Provinsi Riau

2.1.6.4 Hotspot dan Luas Lahan Terbakar di Provinsi Riau

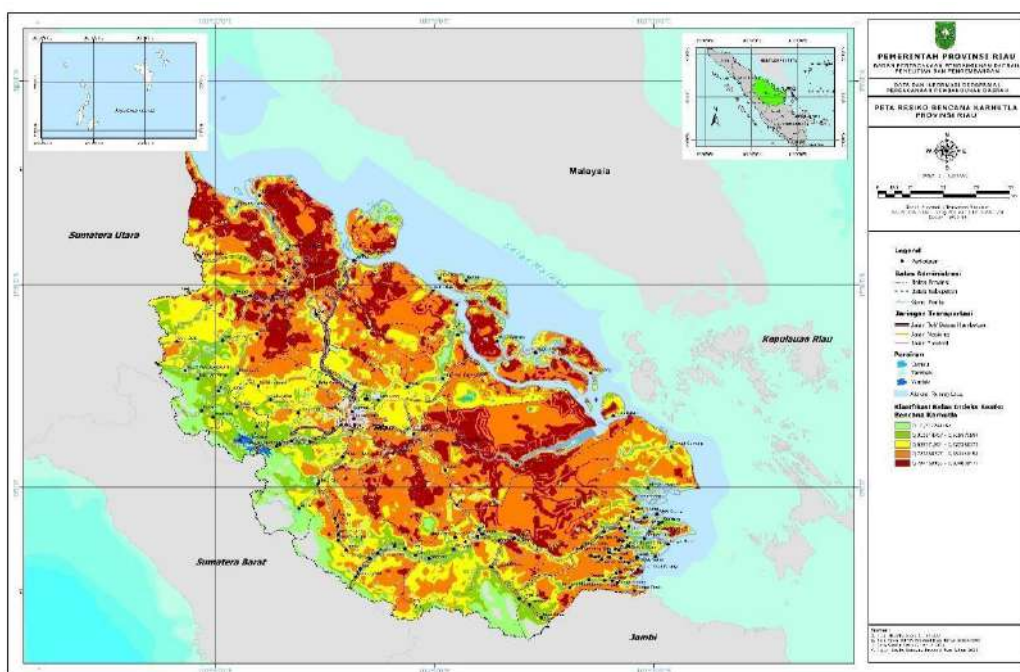
Disamping rentan terhadap bencana banjir di musim hujan, Provinsi Riau juga rentan terhadap bencana kekeringan di musim kemarau, yang akhirnya menyebabkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Dari hasil pantauan Satelit NOAA sepanjang tahun 2024 terpantau hotspot di Provinsi Riau sebanyak 2.774 titik api dengan luas terbakar 2.504,91 Hektar, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.26 Rekapitulasi Jumlah *Hotspot* dan Luas Lahan Terbakar di Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah <i>Hotspot</i> (titik)	Luas Lahan Terbakar (Ha)
2020	2.732	1.603,95
2021	2.780	1.486,52
2022	1.652	1.247,48
2023	3.342	2.432,70
2024	2.774	2.504,91

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau
Hotspot: Satelit Lapan.

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa data pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 tercatat sebanyak 3.342 hotspot, yang merupakan tertinggi sepanjang lima tahun terakhir.



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Gambar 2.9 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi Provinsi Riau

2.1.6.5 Indeks Risiko Bencana (IRB)

Gambaran kebencanaan ditunjukkan dari indikator Indeks Risiko Bencana, yang dari tahun ke tahun IRB Riau terus membaik. Nilai Indeks Risiko Bencana di Riau untuk tahun 2024 termasuk kategori sedang yakni 137,69 (BNPB, 2024), ditandai dengan kondisi belum adanya kabupaten/kota dengan kategori IRB rendah, sehingga Riau dinyatakan sebagai wilayah yang rentan bencana. Pemerintah dan berbagai instansi terkait telah berupaya untuk mengurangi risiko bencana di Riau melalui program mitigasi bencana dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Indeks Risiko Bencana disusun berdasarkan tiga komponen, yaitu bahaya, kerentanan dan kapasitas. Dari ketiga komponen tersebut, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, maka indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan melalui peningkatan tingkat kapasitas.

Perkembangan Indeks Risiko Bencana kabupaten/kota secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

**Tabel 2.27 Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota
Se Provinsi Riau Tahun 2020-2024**

Kode	Provinsi/ Kabupaten /Kota	Tahun					Kelas Resiko
		2020	2021	2022	2023	2024	
14	Riau	147,27	142,41	141,26	137,75	137,69	Sedang
14.01	Kampar	155,20	139,93	148,53	136,81	141,74	Sedang
14.02	Indragiri Hulu	132,40	132,40	127,24	122,06	124,65	Sedang
14.03	Bengkalis	156,40	140,37	128,86	134,65	137,73	Sedang
14.04	Indragiri Hilir	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	Tinggi
14.05	Pelalawan	156,40	156,40	156,40	151,41	152,91	Tinggi
14.06	Rokan Hulu	155,20	155,20	155,20	155,20	155,20	Tinggi
14.07	Rokan Hilir	167,20	167,20	167,20	153,75	156,90	Tinggi
14.08	Siak	156,40	156,40	156,40	120,90	111,82	Sedang
14.09	Kuantan Singingi	131,20	131,20	131,20	131,20	131,20	Sedang
14.10	Kepulauan Meranti	147,60	147,60	147,60	146,91	147,12	Tinggi
14.71	Pekanbaru	131,20	130,37	130,98	125,07	125,67	Sedang
14.72	Dumai	108,40	108,40	108,40	106,60	98,91	Sedang

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia

Upaya pengurangan risiko bencana terutama bahaya dengan kelas risiko tinggi di Provinsi Riau dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas daerah dapat ditingkatkan dengan ketahanan daerah. Ketahanan daerah dapat ditingkatkan dengan program pemerintah daerah yang berbasis pada pengurangan risiko bencana.

2.1.6.6 Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Tren penurunan Indeks Risiko Bencana sejalan dengan meningkatnya kapasitas daerah Provinsi Riau dalam penanggulangan bencana yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah. IKD merupakan ukuran kapasitas penanggulangan bencana pada suatu wilayah administratif. Terbitnya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. IKD bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kesiapan suatu daerah

dalam menghadapi bencana, baik dari segi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun sistem peringatan dini.

IKD dihitung berdasarkan 7 (tujuh) prioritas, yakni: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Nilai Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau sampai dengan tahun 2024 ini secara umum tetap berasal dari 7 (tujuh) indeks prioritas di atas, artinya Provinsi Riau telah dapat mempertahankan kondisi yang menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana ini dari tahun sebelumnya. Provinsi Riau terus berupaya fokus pada prioritas ini untuk peningkatan di tahun mendatang.

Hasil perhitungan Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau untuk Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.28 Nilai Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau
Tahun 2023 - 2024**

No	Prioritas	Indeks Prioritas	
		2023	2024
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,87	0,88
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,90	0,90
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,74	0,76
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,93	0,53
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,30	0,37
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,43	0,52
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,70	0,66
Indeks Ketahanan Daerah		0,38	0,57

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Secara umum terdapat peningkatan pada beberapa prioritas yaitu perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengembangan sistem informasi, diklat dan dan logistik, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, serta perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. Nilai IKD ini diharapkan dapat terus meningkat sehingga dengan meningkatnya nilai IKD akan menurunkan Indeks Risiko Bencana di Provinsi Riau.

2.1.7 Demografi

Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

2.1.7.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Riau terus mengalami pertambahan setiap tahunnya. Sensus Penduduk 2020 mencatat penduduk Riau pada tahun 2020 sebanyak 6,39 juta jiwa. Berdasarkan hasil sensus penduduk 1971 hingga sensus penduduk 2020, laju pertumbuhan penduduk Riau selalu berada diatas laju pertumbuhan penduduk nasional. Secara nasional jumlah penduduk Riau berkontribusi 2,37 persen setelah Lampung (3,33 persen) dan Sumatera Selatan (3,13 persen) di Sumatera. Perkembangan dan penyebaran penduduk Provinsi Riau menurut kabupaten/kota dalam kurun waktu tahun 2020-2024 ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel 2.29 Perkembangan Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024

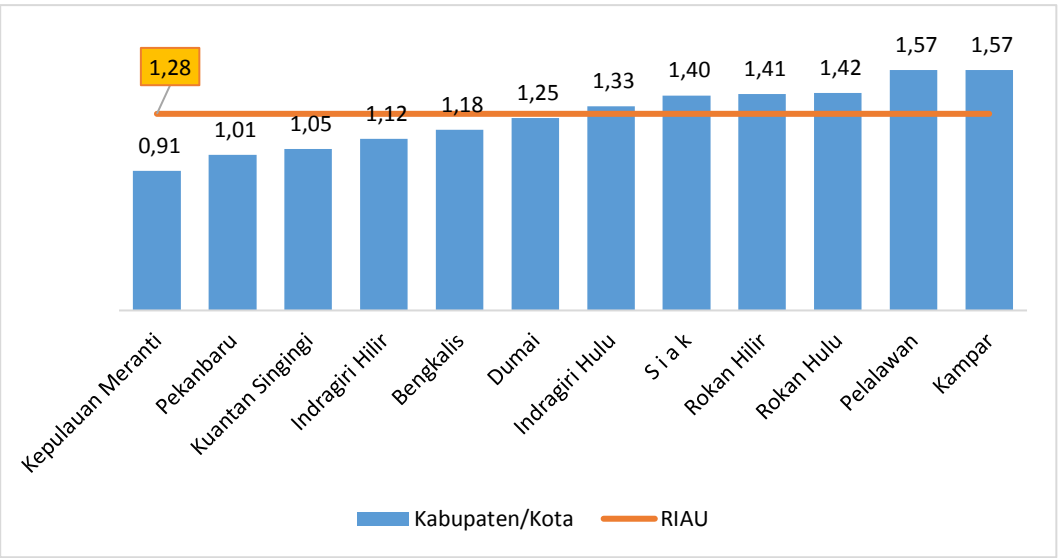
Kode	Provinsi/ Kabupaten /Kota	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
14	Riau	6.376.095	6.466.763	6.555.746	6.642.874	6.728.053	1,35
14.01	Kampar	838.149	852.633	866.942	881.028	894.848	1,65
14.02	Indragiri Hulu	443.146	449.596	455.958	462.220	468.366	1,39
14.03	Bengkalis	562.280	570.155	577.700	584.916	591.800	1,29
14.04	Indragiri Hilir	653.207	661.449	669.482	677.290	684.860	1,19
14.05	Pelalawan	388.681	395.404	402.040	408.543	414.943	1,65
14.06	Rokan Hulu	559.614	568.268	576.766	585.183	593.486	1,48
14.07	Rokan Hilir	635.433	645.005	654.522	663.956	673.323	1,46
14.08	Siak	456.574	463.472	470.309	477.064	483.754	1,46
14.09	Kuantan Singingi	334.090	338.024	341.874	345.610	349.251	1,12
14.10	Kepulauan Meranti	205.760	207.802	209.817	211.791	213.720	0,95
14.71	Pekanbaru	983.182	994.582	1.005.658	1.016.366	1.026.671	1,09
14.72	Dumai	315.979	320.373	324.678	328.907	333.031	1,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020, penduduk Riau tahun 2024 berjumlah 6.728.053 orang terdiri dari laki-laki 3.437.155 orang dan perempuan 3.290.898 orang. Perkembangan jumlah penduduk Riau selama periode 2020-2024 mengalami kenaikan sejumlah 351.980 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 1,35 persen.

Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau yang mempunyai penduduk terbanyak di Provinsi Riau, sebaliknya Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit. Pada periode 2020 hingga 2024, rata-rata pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kabupaten Pelalawan dan Kampar sebesar 1,65 persen yang disebabkan adanya peningkatan kelahiran bayi. Pada Kabupaten Kepulauan Meranti terjadi penurunan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 0,95 persen yang merupakan terendah di Provinsi Riau.

Pertumbuhan penduduk pada setiap kabupaten/kota Provinsi Riau tergolong tinggi. Laju pertumbuhan penduduk terbesar didorong oleh faktor migrasi, sedangkan pertambahan dari faktor kelahiran relatif kecil (sekitar 1,5 persen per tahun). Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,28 persen lihat gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

Tingginya pertumbuhan penduduk Provinsi Riau, mengindikasikan bahwa kontribusi tertinggi dalam pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau dikarenakan tingginya migrasi dari luar provinsi yang datang dengan berbagai alasan dan tujuan, antara lain migrasi karena pendidikan, bencana alam dan mencari pekerjaan terutama berasal dari provinsi tetangga. Oleh karena itu, upaya pengendalian jumlah penduduk migrasi perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari pertambahan penduduk yang tinggi adalah berupa pertambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, berkembangnya upaya potensi sumberdaya yang ada di daerah, menarik investasi baru, dan berkembangnya suatu wilayah/kawasan sehingga terjadinya pemekaran wilayah. Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya penduduk miskin, meningkatnya jumlah pengangguran, terjadinya degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya jika tidak ada upaya program penanganan yang secara sistematis dan terstruktur.

2.1.7.2 Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokan atau kriteria tertentu menurut karakteristik-karakteristik yang sama. Pengelompokan tersebut dapat berdasarkan menurut umur dan jenis kelamin, lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Pada tabel dibawah ini merupakan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

Tabel 2.30 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio di Provinsi Riau Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Ribu)		Total	Persentase (%)	Rasio Laki-laki dan Perempuan
	Laki-laki	Perempuan			
0-4	301.638	289.062	590.700	8,78	104,35
5-9	310.401	295.956	606.357	9,01	104,88
10-14	304.779	289.635	594.414	8,83	105,23
15-19	292.957	274.542	567.499	8,43	106,71
20-24	287.365	272.727	560.092	8,32	105,37
25-29	284.528	274.507	559.035	8,31	103,65
30-34	276.062	267.599	543.661	8,08	103,16
35-39	265.890	259.926	525.816	7,82	102,29
40-44	248.612	241.906	490.518	7,29	102,77
45-49	229.955	220.780	450.735	6,70	104,16
50-54	196.415	186.885	383.300	5,70	105,10
55-59	157.616	147.784	305.400	4,54	106,65
60-64	119.844	112.238	232.082	3,45	106,78
65-69	81.094	76.337	157.431	2,34	106,23
70-74	48.704	47.003	95.707	1,42	103,62
75+	31.295	34.011	65.306	0,97	92,01
Total	3.437.155	3.290.898	6.728.053	100,00	104,44

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Penduduk Provinsi Riau tahun 2024 didominasi kelompok umur 5-9 tahun (9,01 persen), diikuti kelompok umur 10-14 tahun (8,83 persen) dan kelompok umur lainnya kurang dari 8,7 persen. Jika dilihat dari kelompok umur sekolah mulai dari TK hingga sekolah menengah atas atau kisaran umur 5-19 tahun menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu sebanyak 1.768.270 jiwa atau 26,28 persen dari total penduduk pada tahun 2024. Dengan tingginya usia sekolah maka penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan harus dipersiapkan.

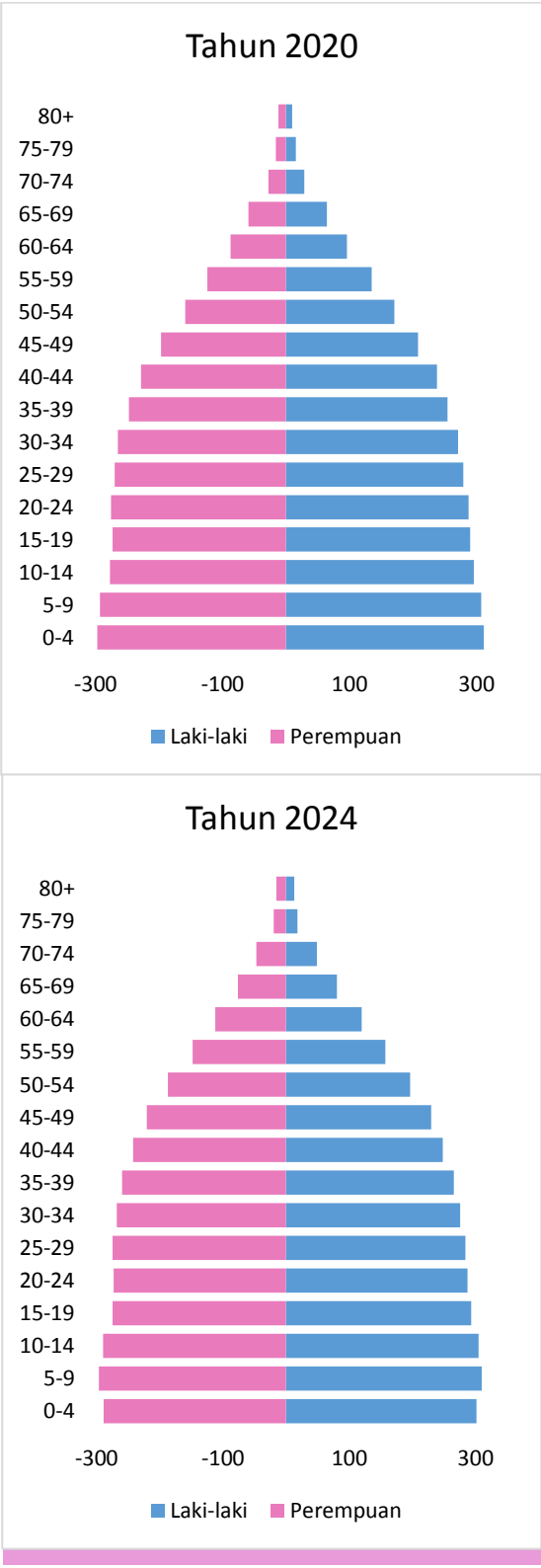
Penduduk usia 0-4 tahun merupakan kelompok umur ketiga terbanyak sehingga wajar kiranya kelompok umur ini harus menjadi perhatian yang serius dalam upaya mewujudkan Riau Maju dan Berkelanjutan berlandaskan Budaya Melayu yang Agamis pada tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045. Untuk itu upaya peningkatan sumberdaya manusia sejak dini melalui program percepatan pencegahan dan penurunan stunting perlu dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif dari para pihak.

Adapun penduduk usia 15-64 tahun sejumlah 4.618.138 jiwa

atau sebesar 68,64 persen dari total penduduk Riau. Struktur komposisi penduduk ini menciptakan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan jika dikelola dengan baik. Hal ini diperkuat dengan adanya bonus demografi, dimana bonus demografi Provinsi Riau memiliki masa yang cukup panjang yakni sampai dengan tahun 2040. Untuk itu perlu upaya penguatan kontribusi Angkatan kerja ini dalam hal menggerakkan perekonomian melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan kerja melalui pendidikan formal maupun non formal.

Untuk penduduk yang berumur antara 65 hingga di atas 75 tahun sebanyak 318.444 jiwa atau 4,73 persen dan penambahan kelompok umur ini menunjukkan terjadinya perbaikan dari aspek kesehatan masyarakat sejalan dengan usia harapan hidup masyarakat Riau yang terus mengalami peningkatan. Namun hal ini harus menjadi perhatian karena kelompok umur ini merupakan kelompok usia yang rentan akan perubahan kondisi dan situasi yang disebabkan ada perubahan kondisi fisik, sosial dan psikologis yang pada akhirnya akan mengakibatkan adanya resiko sosial. Untuk itu perlu upaya yang komprehensif agar kelompok umur ini tidak mengalami resiko sosial dengan peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan kualitas keluarga, perlindungan sosial dan upaya lainnya.

Jika dilihat dari jenis kelamin, Penduduk usia 0 hingga 74 tahun didominasi oleh laki-laki dimana rasio antara laki-laki dan perempuan berkisar 102,29 hingga 106,77 yang artinya terdapat 102 hingga 106 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Sedangkan rasio penduduk 75 tahun keatas hanya berkisar 86,04 hingga 96,70 yang artinya penduduk perempuan lanjut usia lebih banyak dibandingkan laki-laki lanjut usia.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar 2.11 Perbandingan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Penduduk Provinsi Riau Tahun 2020 dan 2024

Komposisi umur penduduk Provinsi Riau dapat digambarkan dalam piramida penduduk pada gambar diatas. Terdapat perubahan komposisi jumlah penduduk dari tahun 2020 ke tahun 2024. Dimana pada tahun 2020 jumlah penduduk didominasi oleh usia 0-4 tahun sedangkan pada model piramida penduduk Provinsi

Riau mempunyai dasar lebar dan puncak yang mengerucut. Bentuk semacam ini terdapat pada daerah-daerah dengan tingkat kelahiran yang masih tinggi dan angka kematian sudah mulai menurun walaupun masih tergolong tinggi. Karakteristik yang dimiliki piramida penduduk semacam ini yaitu umur median rendah dan angka beban tanggungan pada usia muda tinggi. Piramida penduduk Provinsi Riau mempunyai ciri di mana jumlah usia produktif, khususnya dewasa memiliki tanggungan besar terhadap jumlah manula dan usia muda yang cukup banyak. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif.

Penduduk Provinsi Riau yang bekerja menurut mata pencarian bertujuan memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja minimal 1 jam secara terus menerus dalam seminggu. Dalam hal ini yakni tahun 2020-2024 menggunakan komposisi penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan klasifikasi lapangan usaha mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam 17 kategori lapangan usaha.

Sektor pertanian masih mendominasi pada perekonomian Riau, hal ini berdampak pada banyaknya penduduk Riau yang berusaha dan bekerja pada sektor pertanian. Penduduk Riau yang bekerja di usia 15 tahun ke atas sebesar 36,15 persen pada tahun 2024 dimana penduduk yang bekerja masih banyak dengan tingkat pendidikan SMA/SMK/Sederajat dengan status buruh/karyawan/pegawai. Namun jika dilihat pada rata-rata pertumbuhan per tahun diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja tertinggi ada pada sektor Jasa Persewaan Bangunan/Real Estate sebesar 31,86 persen yang meningkat signifikan pada tahun 2024. Kemudian diikuti sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah sebesar 14,09 persen serta Pengadaan Listrik Air dan Gas sebesar 12,31 persen. Banyaknya tenaga kerja yang terserap di kategori Jasa Persewaan Bangunan/*Real Estate* perlu menjadi perhatian pemerintah daerah

Provinsi Riau dalam mengambil kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat Riau.

Tabel 2.31 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	Persentase (%)					Ratarata Pertumbuha n (±/%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39,17	38,59	39,96	38,20	36,15	-1,93
2	Pertambangan dan Penggalian	1,12	1,12	1,10	1,43	1,55	9,15
3	Industri Pengolahan	7,61	8,18	7,26	7,89	8,12	1,96
4	Pengadaan Listrik Air dan Gas	0,18	0,21	0,21	0,19	0,27	12,31
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	0,33	0,30	0,59	0,51	0,42	14,09
6	Konstruksi	4,78	4,93	5,21	5,97	5,27	2,92
7	Perdagangan Besar dan Eceran	17,50	18,61	17,94	17,43	18,16	1,02
8	Transportasi dan Pergudangan	3,55	3,40	2,94	3,43	3,43	-0,27
9	Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	6,20	5,92	5,67	6,91	7,20	4,33
10	Informasi dan Komunikasi	0,71	0,51	0,59	0,84	0,60	0,33
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,01	0,85	0,98	0,90	0,80	-4,96
12	Jasa Persewaan Bangunan/Real Estate	0,16	0,19	0,30	0,17	0,33	31,86
13	Jasa Perusahaan	1,38	1,29	1,86	1,62	1,96	11,44
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	4,34	4,43	4,10	3,90	4,38	0,51
15	Jasa Pendidikan	5,78	6,22	6,05	5,52	6,03	1,34
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,63	1,78	1,72	1,44	1,66	1,21
17	Jasa Lainnya	4,55	3,47	3,53	3,66	3,69	-4,38

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Riau, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Riau Agustus 2025

2.1.7.3 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di kabupaten/kota sangat terkait terhadap pembangunan suatu daerah. Penduduk yang terdistribusi tidak merata dan terpusat di wilayah-wilayah tertentu akan menimbulkan permasalahan kepadatan jika wilayah tersebut relatif kecil menampung peningkatan jumlah penduduk.

Kepadatan penduduk di Provinsi Riau tahun 2024 mencapai 74,65 jiwa per km² meningkat 0,95 jiwa per km² dibandingkan tahun 2023 sebesar 73,70 jiwa per km². Kepadatan penduduk Provinsi Riau termasuk kategori penduduk sangat jarang yang mana dapat berdampak pada ketersediaan pangan, kebutuhan lahan

tempat tinggal, ketersediaan air bersih, faktor lingkungan, dan sebagainya.

Tabel 2.32 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

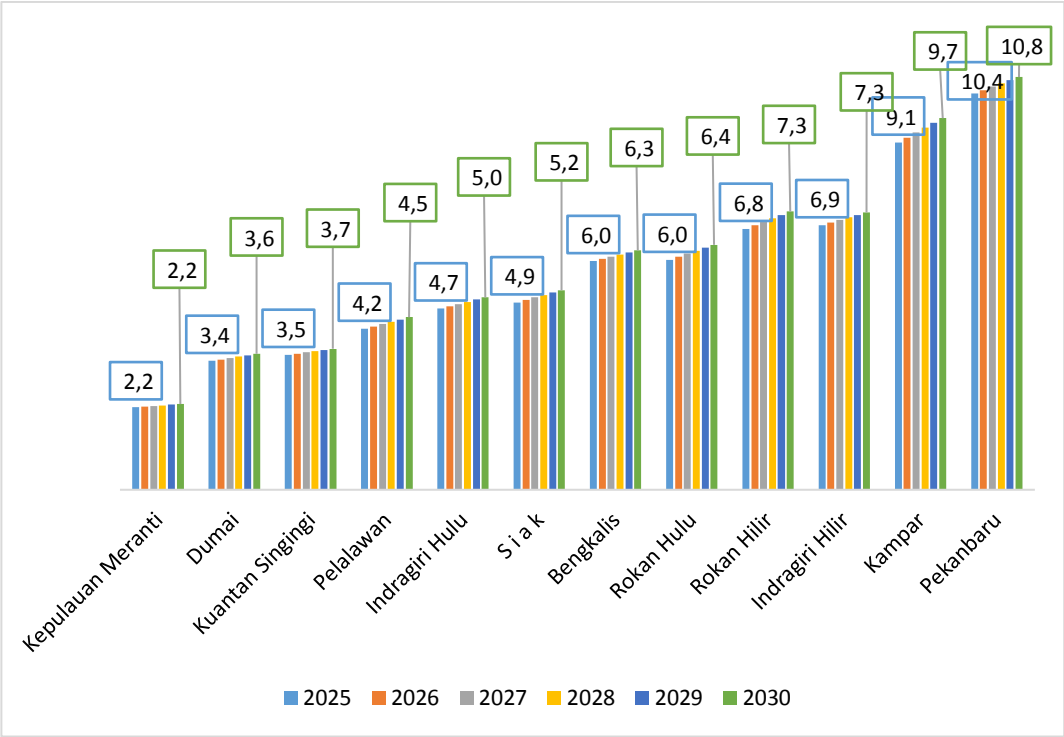
Kode	Provinsi Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Uraian		
			Jumlah (Jiwa)	Share terhadap Provinsi (%)	Kepadatan Penduduk (Jw/Km ²)
14	Riau	90.128,76	6.728.053	100,00	74,65
14.01	Kampar	10.897,22	894.848	12,09	82,12
14.02	Indragiri Hulu	7.978,17	468.366	8,85	58,71
14.03	Bengkalis	8.520,44	591.800	9,45	69,46
14.04	Indragiri Hilir	13.465,89	684.860	14,94	50,86
14.05	Pelalawan	13.020,19	414.943	14,45	31,87
14.06	Rokan Hulu	7.527,43	593.486	8,35	78,84
14.07	Rokan Hilir	9.154,72	673.323	10,16	73,55
14.08	Siak	7.843,97	483.754	8,70	61,67
14.09	Kuantan Singingi	5.272,74	349.251	5,85	66,24
14.10	Kep.Meranti	3.636,79	213.720	4,04	58,77
14.71	Pekanbaru	633,40	1.026.671	0,70	1.620,89
14.72	Dumai	2.177,79	333.031	2,42	152,92

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, Data olahan

Kepadatan penduduk terbesar di Provinsi Riau terdapat di Kota Pekanbaru sebanyak 1.620,89 jiwa/km² yang mana jauh diatas kabupaten/kota lainnya. Kecilnya luas wilayah Kota Pekanbaru menjadi penyebab tingginya kepadatan di kota tersebut. Selain itu, banyaknya kesempatan kerja di Kota Pekanbaru berdampak pada meningkatnya arus urbanisasi. Sedangkan kepadatan penduduk paling sedikit berada di Kabupaten Pelalawan yaitu sebanyak 31,87 jiwa/km². Kepadatan penduduk per wilayah akan memberikan pengaruh terhadap permintaan lahan baik untuk penggunaan perumahan maupun untuk sektor pertanian dan lainnya sehingga akan memicu terjadinya peningkatan harga lahan dan perlunya penyediaan sarana dan prasarana pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Kondisi penduduk yang padat juga akan mengakibatkan terjadinya persoalan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan dan antar wilayah.

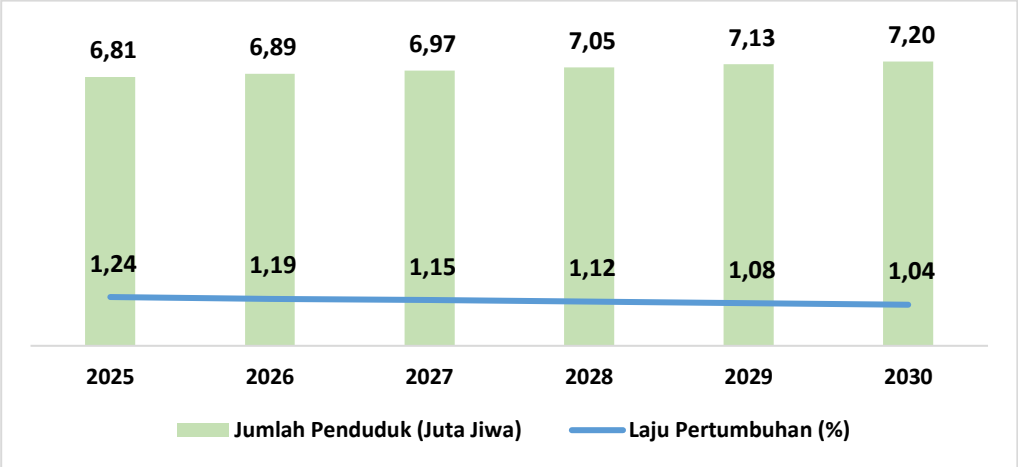
2.1.7.4 Proyeksi Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Provinsi Riau diperkirakan terus bertambah dari 6,8 juta jiwa pada tahun 2025 hingga mencapai 7,2 juta jiwa pada tahun 2030. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten terbaru yang dibentuk dari pemekaran wilayah Kabupaten Bengkalis sehingga memiliki jumlah penduduk paling sedikit dibandingkan kabupaten/kota lainnya yakni sebesar 2,16 ribu jiwa pada tahun 2025 dan diperkirakan naik menjadi 2,24 ribu jiwa pada tahun 2030. Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau sehingga memiliki jumlah penduduk terbanyak hingga mencapai 10,4 ribu jiwa pada tahun 2025 dan terus naik pada tahun 2030 sebesar 10,8 ribu jiwa. Meskipun demikian, laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau diperkirakan terus melambat dari 1,24 persen pada tahun 2025 dan menurun 1,04 persen pada tahun 2030.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar 2.12 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2025-2030 (Ribu Jiwa)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar 2.13 Proyeksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Riau Tahun 2025-2030

Jumlah penduduk yang besar tersebut dapat dipertahankan dengan menjaga tingkat fertilitas (*Total Fertility Rate*/TFR) dijaga konstan setelah mencapai 2 (dua) anak lahir hidup untuk wanita subur. TFR tahun 2025 di Provinsi Riau diperkirakan mencapai 2,18 anak lahir hidup untuk wanita subur dan sedikit mengalami penurunan menjadi 2,12 pada tahun 2030. Selain itu, angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate*/IMR) juga perlu terus diturunkan.

Diperkirakan 5 (lima) tahun ke depan kondisi kesehatan masyarakat di Provinsi Riau terus membaik. Rata-rata target *TFR* pada kabupaten/kota pada angka 2 (dua), yang artinya bahwa anak lahir hidup untuk wanita subur sebanyak 2 (dua) orang jiwa per tahun dan diharapkan terus menurun setiap tahunnya. Begitu juga dengan angka IMR kabupaten/kota diharapkan dapat terus menurun lima tahun yang akan datang. Rata-rata IMR kabupaten/kota ditargetkan sebesar 13 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup sebelum mencapai usia 1 tahun. Namun di Kabupaten Kepulauan Meranti angka IMR masih tinggi yakni 19 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Sehingga program pemerintah harus berfokus pada kesehatan masyarakat di daerah-daerah pesisir dan terluar baik sarana maupun prasarana serta tenaga kesehatan.

Tabel 2.33 Proyeksi Total Fertility Rate (TFR) dan Infant Mortality Rate (IMR) Tahun 2025-2030

Kode	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	TFR						IMR					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
14	Riau	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	13,57	13,14	12,72	12,32	11,93	11,18
14.01	Kampar	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	2,14	14,81	14,33	13,86	13,41	12,97	12,14
14.02	Indragiri Hulu	2,14	2,13	2,12	2,11	2,11	2,09	16,2	15,72	15,26	14,80	14,37	13,53
14.03	Bengkalis	2,45	2,43	2,42	2,40	2,39	2,36	13,89	13,40	12,94	12,48	12,05	11,22
14.04	Indragiri Hilir	2,14	2,13	2,12	2,11	2,11	2,09	16,67	16,19	15,73	15,28	14,85	14,01
14.05	Pelalawan	2,16	2,15	2,14	2,13	2,13	2,11	12,18	11,84	11,51	11,20	10,88	10,29
14.06	Rokan Hulu	2,14	2,13	2,12	2,11	2,10	2,08	10,32	10,12	9,91	9,72	9,52	9,15
14.07	Rokan Hilir	2,21	2,20	2,19	2,18	2,17	2,15	14,92	14,46	14,02	13,59	13,17	12,38
14.08	Siak	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	2,14	15,04	14,56	14,10	13,65	13,21	12,38
14.09	Kuantan Singingi	2,16	2,15	2,14	2,13	2,13	2,11	15,32	14,80	14,30	13,82	13,35	12,46
14.10	Kepulauan Meranti	2,13	2,12	2,12	2,11	2,10	2,09	21,55	21,24	20,93	20,63	20,33	19,75
14.71	Pekanbaru	2,04	2,04	2,03	2,03	2,03	2,02	9,79	9,64	9,48	9,33	9,19	8,90
14.72	Dumai	2,11	2,10	2,09	2,08	2,08	2,06	10,86	10,61	10,38	10,14	9,91	9,47

Sumber : Hasil Long Form SP 2020 – BPS Provinsi Riau dan Diolah

Saat ini, program pengendalian penduduk dan keluarga berencana masih berorientasi pada pengurangan jumlah anak. Pemerintah Provinsi Riau harus beralih dan berorientasi pada pengendalian jumlah penduduk sesuai dengan karakter dari keluarga, komunitas, wilayah, dan kelompok masyarakat. Penduduk dengan jumlah yang seimbang dan kualitas yang baik tentunya menjadi modal dasar bagi pembangunan ke depan.

Pengendalian kuantitas penduduk berimplikasi pada perubahan struktur penduduk di masa depan, antara lain (1) terus bertambahnya jumlah penduduk produktif hingga tahun 2030 (2) penurunan usia muda yang lebih lambat (3) serta peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) yang berdampak pada peningkatan proporsi penduduk lanjut usia.

Selain pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan penduduk yang seimbang. Penduduk tumbuh seimbang bertujuan untuk memelihara kesinambungan antara jumlah penduduk usia produktif dengan kemampuan keuangan daerah. Provinsi Riau diperkirakan mengalami bonus demografi pada tahun 2025 hingga tahun 2030. Dalam memanfaatkan bonus demografi ini diperlukan strategi guna memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar, diantaranya (1) membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini dengan pendekatan siklus hidup (2) menciptakan lapangan kerja yang berkualitas untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja (3) meningkatkan produktivitas tenaga kerja (4) meningkatkan

partisipasi kerja perempuan (5) menguatkan literasi keuangan dan investasi.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

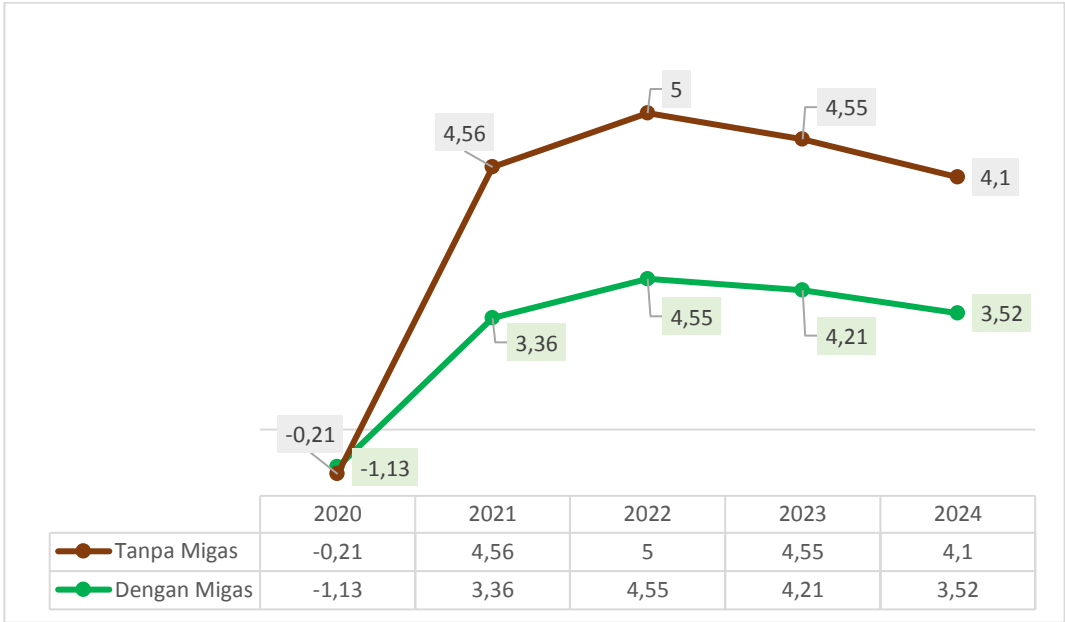
Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Provinsi Riau sangat berfluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024. Tahun 2024 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03 persen dan lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau masih dibawah pertumbuhan nasional, sementara itu perekonomian Provinsi Riau berkontribusi sebesar 5,10 persen terhadap perekonomian nasional sehingga Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 pada tahun 2024 di Indonesia atau terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar 2.14 Trend Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Riau Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar di bawah, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dengan Migas Tahun 2024 tumbuh positif namun melambat dibanding Tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau ini meningkat pada semua lapangan usaha, sumber pertumbuhan tertinggi berada pada sektor industri pengolahan; pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian. Sedangkan pada sisi pengeluaran peningkatan terjadi pada konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto.



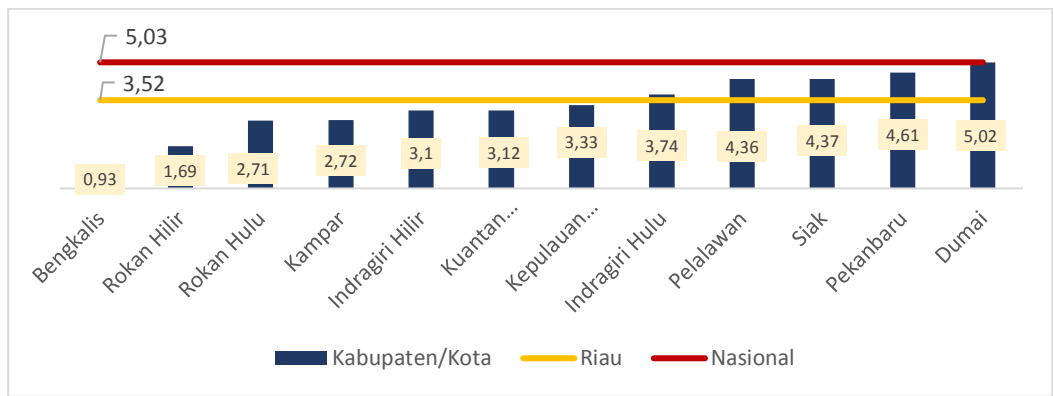
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar 2.15 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Apabila melihat kondisi per tahun, terjadi fluktuasi yang cukup besar dalam laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, khususnya pada tahun 2020. Hal ini berkaitan dengan fluktuasi produksi barang dan jasa di daerah ini terutama migas yang mengalami penurunan harga hingga 70 persen dan kondisi tersebut menyebabkan tidak berjalannya investasi pada sektor migas sementara 14 sektor lainnya juga mengalami penurunan akibat pembatasan aktivitas pergerakan manusia akibat Pandemi Covid-19. Tetapi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tahun 2020 masih ditunjang oleh delapan sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2022 peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan tidak terlepas dari upaya penanggulangan pandemi sehingga sektor yang berpengaruh langsung terhadap pergerakan manusia dapat meningkat, selain itu peningkatan nilai pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tahun 2022 disebabkan oleh kenaikan harga migas, kenaikan transportasi dan pergudangan serta peningkatan listrik dan gas juga mempengaruhi kenaikan pertumbuhan ekonomi Riau. Meningkatnya investasi Riau dan juga besarnya konsumsi rumah tangga berpengaruh signifikan pada pertumbuhan Riau.

Sementara itu jika ditinjau pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/kota tahun 2024 tergolong positif dibanding tahun

sebelumnya dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kota Dumai sebesar 5,02 persen dan terendah Kabupaten Bengkalis sebesar 0,93 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
Gambar 2.16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024

2.2.1.2 Angka Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya dan berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan. Koordinasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga diperlukan untuk mendukung sinergi dan harmonisasi kebijakan kemiskinan. Pemerintah Provinsi Riau telah berhasil menurunkan kemiskinan dalam satu dekade terakhir, dimana penurunan yang terjadi sejak tahun 2015 – 2024 dengan rata – rata penurunan 0.285, namun penurunan yang terjadi belum mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hal ini dapat dilihat dari gambar berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Kondisi Maret Tahun 2024
Gambar 2.17 Target Dan Realisasi Kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2015-2024

Perkembangan indikator kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.34 Perkembangan Indikator Kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator Kemiskinan				
	Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)	Indek Keparahan Kemiskinan	Indek Kedalaman Kemiskinan
2020	483.390	6,82	544.057	0,28	1,14
2021	500.810	7,12	565.937	0,24	1,06
2022	485.030	6,78	605.912	0,27	1,10
2023	485.660	6,68	658,611	0,24	1,00
2024	492.250	6,67	740,222	0,21	0,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Permasalahan kemiskinan tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*-P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*-P2). Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan lebih menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Provinsi Riau Tahun 2024, yakni sebesar 0,97 mengalami penurunan dibandingkan pada Tahun 2023 dan 2022. Hal ini berarti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan cenderung mendekati garis kemiskinan. Untuk indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*-P2) juga mengalami penurunan yaitu sebesar 0,24 pada tahun 2023 menjadi 0,21 pada tahun 2024, turun sebesar 0,03.

Persoalan penanggulangan kemiskinan selain harus mampu mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan sebaiknya harus bisa juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta ketimpangannya antara kota dan pedesaan. Sejalan dengan perkembangan capaian penurunan indikator kemiskinan Provinsi Riau sangat dipengaruhi oleh capaian penurunan kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Riau. Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-

rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan juga kebutuhan pokok bukan makanan.

Nilai garis kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2024 sebesar Rp. 697.296,- per kapita/bulan. Pada tabel di bawah menunjukkan bahwa garis kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 755.572,- per kapita/bulan dan terendah terdapat di Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp. 545.799,- per kapita/bulan. Terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan angka garis kemiskinan diatas Provinsi Riau yaitu Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hulu, Bengkalis dan Pekanbaru. Sementara kabupaten/kota lainnya dibawah rata-rata garis kemiskinan Provinsi Riau. Garis kemiskinan digunakan sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosial ekonomi, seperti program peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan. Berikut disajikan data indikator kemiskinan kabupaten/kota Provinsi Riau tahun 2023-2024.

Tabel 2.35 Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023-2024

Kode	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Indikator Kemiskinan									
		Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)		Persentase Penduduk Miskin (%)		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
14	Riau	485,66	492,25	6,68	6,67	1,00	0,97	0,24	0,21	658.611	697.296
14.01	Kampar	63,84	63,74	7,04	6,92	0,72	0,91	0,14	0,19	547.696	590.444
14.02	Indragiri Hulu	27,40	27,53	6,06	6,02	1,14	0,61	0,33	0,09	626.671	660.349
14.03	Bengkalis	36,10	36,56	6,31	6,36	1,03	0,72	0,23	0,12	713.826	755.572
14.04	Indragiri Hilir	40,86	41,05	5,64	5,66	0,68	0,84	0,13	0,22	597.122	629.570
14.05	Pelalawan	45,30	49,20	8,15	8,49	1,05	1,12	0,28	0,21	689.786	729.977
14.06	Rokan Hulu	74,38	75,89	9,72	9,62	1,54	0,96	0,38	0,18	647.599	699.018
14.07	Rokan Hilir	53,04	53,49	7,07	7,01	1,22	0,85	0,29	0,19	511.610	545.799
14.08	Siak	26,99	26,72	5,23	5,08	0,66	0,56	0,14	0,08	558.867	595.659
14.09	Kuantan Singingi	26,10	25,56	8,07	7,89	1,17	0,91	0,25	0,20	693.493	736.050
14.10	Kepulauan Meranti	43,82	44,34	22,98	23,15	3,86	3,59	1,06	0,88	623.576	661.863
14.71	Pekanbaru	37,67	38,17	3,16	3,15	0,38	0,34	0,09	0,06	712.000	749.522
14.72	Dumai	10,15	10,02	3,21	3,14	0,36	0,20	0,06	0,03	601.348	631.652

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

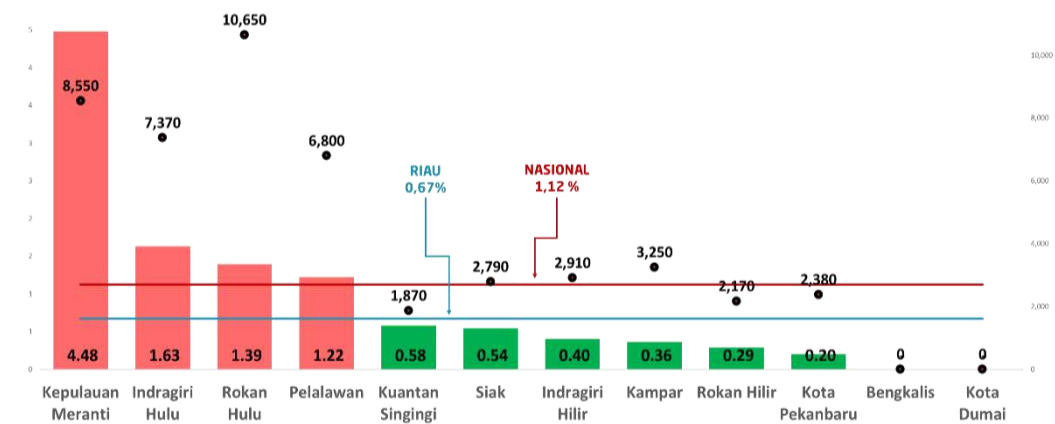
Di dalam masyarakat miskin tersebut terdapat masyarakat dengan kondisi miskin ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah kemiskinan yang diukur menggunakan “*absolute poverty measure*” yang konsisten antar negara dan antar waktu. Miskin ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yaitu setara dengan US\$ 1,9 PPP per hari (*World Bank*). Jika dikonversi ke dalam Rupiah pada tahun 2024 setara dengan Rp. 11.571,21,- per kapita per hari atau Rp. 351.957,40,- per kapita per bulan. Tingkat Kemiskinan Ekstrem Nasional tahun 2024 adalah sebesar 1,26 persen dan Provinsi Riau 0,43 persen. Dari garis kemiskinan ekstrem tersebut, tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau pada Maret 2023 sebesar 0,67 (48.783 jiwa), turun menjadi 0,43 persen (31.308 jiwa) pada tahun 2024.

**Tabel 2.36 Kondisi Kemiskinan Eskترم Provinsi Riau
Tahun 2021-2024**

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Jiwa)	78.630	100.330	48.783	31.308
Persentase Penduduk Miskin Eskترم (%)	1,12	1,40	0,67	0,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Berdasarkan kondisi posisi relatif angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau tahun 2023 yakni terdapat empat kabupaten dengan capaian persentase kemiskinan ekstrem di atas capaian Provinsi dan Nasional yakni Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Rokan Hulu dan Pelalawan. Empat Kabupaten memiliki capaian angka kemiskinan ekstrem di bawah nasional, namun masih di atas capaian Provinsi yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Kuantan Singingi. Jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi adalah Kabupaten Kampar, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Indragiri Hulu dan Kepulauan Meranti. Posisi relatif capaian persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem kabupaten/kota di Provinsi Riau pada tahun 2024 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik dan kondisi Posisi relatif capaian persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem pada tiap kabupaten/kota sebagaimana tergambar pada grafik berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar 2.18 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Ekstrem Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kolaborasi dan integrasi program dan kegiatan dari berbagai sektor dan urusan serta intervensi yang tepat sasaran sangat menentukan dalam keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam strategi pengurangan beban, pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kantong kemiskinan. Terdapat 5 (lima) urusan yang menjadi determinan utama yang harus menjadi perhatian yaitu Urusan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Ketahanan Pangan dan Ketenagakerjaan yang harus diupayakan dalam pelaksanaan intervensi penanggulangan kemiskinan yang inklusif.

Tabel 2.37 Indikator Kemiskinan Menurut Wilayah Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2024

Wilayah	Indikator Kemiskinan				
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
Perkotaan	200,91	6,76	0,99	0,21	740.222
Perdesaan	291,34	6,61	0,97	0,21	669.374

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan sebagaimana tabel di atas persentase penduduk miskin perkotaan sebesar 6,76 persen lebih tinggi dari penduduk miskin perdesaan sebesar 6,61 persen, namun secara jumlah penduduk miskin perdesaan sebanyak 291,34 ribu jiwa, lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin perkotaan yang berjumlah 200,91 ribu jiwa. Indeks Kedalaman Kemiskinan P1 perkotaan 0,99 lebih besar dibandingkan dengan perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih

sulitnya penduduk miskin di perkotaan untuk keluar dari jurang kemiskinan dibandingkan penduduk miskin di pedesaan. Sementara itu nilai Indeks Keparahen Kemiskinan P2 baik Perkotaan dan Pedesaan memiliki pola yang sama yaitu sebesar 0,21. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan masih perlu terus dilakukan dengan memperkuat wilayah pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan khususnya pedesaan wilayah pesisir yang memiliki keterbatasan akses.

Selain itu, upaya penanggulangan kemiskinan juga harus mempertimbangkan kolaborasi dari urusan dan dimensi yang menjadi faktor determinan dalam mempengaruhi peningkatan dan ataupun penurunan kemiskinan, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan dan infrastruktur. Intervensi terhadap faktor determinan dan bagaimana pola integrasi dan kolaborasinya yang dilakukan akan mempengaruhi efektivitas penanggulangan kemiskinan.

2.2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun. PDRB pendekatan produksi menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam satu tahun.

Nilai PDRB harga berlaku pada setiap sektor produksi tahun 2024 di Provinsi Riau rata-rata mengalami kenaikan begitu juga dengan nilai PDRB harga konstan. Adapun sektor nilai PDRB harga konstan yang memberikan nilai produksi barang dan jasa tertinggi pada tahun 2020 adalah sektor industri pengolahan senilai Rp. 156,07 triliun dan meningkat menjadi Rp. 182,86 triliun pada tahun 2024 dengan pertumbuhan 4,04 persen per tahun. Sedangkan sektor yang memberikan nilai terendah adalah sektor jasa perusahaan dengan nilai sebesar Rp. 0,02 triliun pada tahun 2020 kemudian naik menjadi menjadi Rp 0,03 triliun pada tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 12,50 persen per tahun.

Untuk menjaga kestabilan pertumbuhan nilai PDRB dapat dilakukan dengan membangun semua sektor dengan baik terutama dengan memperdalam struktur sektor sehingga menghasilkan nilai

tambah yang semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya perkembangan nilai dan pertumbuhan PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan menurut lapangan usaha Provinsi Riau dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.38 Nilai dan Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024

Kategori PDRB	PDRB ADHB Lapangan Usaha Tahunan (Triliun Rupiah)					Rata-Rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	194,66	225,49	253,08	269,94	301,63	11,62
B. Pertambangan dan Penggalian	129,02	165,08	225,12	203,01	205,76	13,96
C. Industri Pengolahan	207,30	235,38	270,31	282,79	312,82	10,91
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,63	0,66	0,78	0,83	0,89	9,15
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,09	0,09	0,1	0,11	8,40
F. Konstruksi	70,55	75,52	84,97	99,42	106,66	10,96
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	74,93	83,00	97,08	105,30	114,29	11,18
H. Transportasi dan Pergudangan	5,30	5,67	7,34	8,54	9,50	16,01
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,33	3,98	4,52	4,82	5,50	13,46
J. Informasi dan Komunikasi	6,42	6,92	7,53	8,19	8,84	8,33
K. Jasa Keuangan dan Asurans	7,17	7,95	9,14	9,69	9,92	8,56
L. Real Estate	7,03	7,32	7,99	8,53	9,03	6,47
M,N. Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	6,25
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,38	11,56	12,38	13,22	14,53	6,34
P. Jasa Pendidikan	4,41	4,59	4,83	5,08	5,40	5,20
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosia	1,94	2,19	2,29	2,51	2,71	8,76
R, S, T, U. Jasa lainnya	3,41	3,58	4,11	4,44	4,85	9,26
Jumlah	727,60	839,00	991,62	1.026,47	1.112,48	11,35

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Tabel 2.39 Nilai dan Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024

Kategori PDRB	PDRB ADHK Lapangan Usaha Tahunan (Triliun Rupiah)					Rata-Rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	135,12	140,72	144,69	149,36	152,70	3,11
B. Pertambangan dan Penggalan	80,19	77,69	78,74	80,73	81,02	0,28
C. Industri Pengolahan	156,07	162,44	170,12	176,29	182,86	4,04
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,37	0,39	0,44	0,45	0,48	6,79
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	3,57
F. Konstruksi	41,49	42,63	44,66	48,76	51,94	5,80
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	42,61	46,85	52,43	55,64	59,00	8,51
H. Transportasi dan Pergudangan	3,20	3,35	3,97	4,30	4,58	9,50
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,84	2,16	2,40	2,50	2,77	10,87
J. Informasi dan Komunikasi	5,32	5,70	6,09	6,56	7,06	7,33
K. Jasa Keuangan dan Asurans	4,78	5,03	5,28	5,49	5,56	3,86
L. Real Estate	4,70	4,84	5,11	5,31	5,51	4,06
M,N. Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	12,50
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,31	8,37	8,88	9,35	10,24	5,41
P. Jasa Pendidikan	2,59	2,67	2,78	2,88	3,01	3,83
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,18	1,32	1,35	1,45	1,54	6,94
R, S, T, U. Jasa lainnya	2,12	2,22	2,50	2,66	2,86	7,81
Jumlah	490,00	506,47	529,53	551,83	571,23	3,91

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Tabel 2.40 Kontribusi Pertumbuhan Sektoral dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 (%)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,75	26,88	25,52	26,30	27,11
B	Pertambangan dan Penggalian	17,73	19,68	22,70	19,78	18,50
C	Industri Pengolahan	28,49	28,05	27,26	27,55	28,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	9,70	9,00	8,57	9,69	9,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,30	9,89	9,79	10,26	10,27
H	Transportasi dan Pergudangan	0,73	0,68	0,74	0,83	0,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,46	0,47	0,46	0,47	0,49
J	Informasi dan Komunikasi	0,88	0,82	0,76	0,80	0,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,99	0,95	0,92	0,94	0,89
L	Real Estate	0,97	0,87	0,81	0,83	0,81
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,56	1,38	1,25	1,29	1,31
P	Jasa Pendidikan	0,61	0,55	0,49	0,49	0,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,27	0,26	0,23	0,24	0,24
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,47	0,43	0,41	0,43	0,44
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Tabel 2.41 Kontribusi Pertumbuhan Sektoral dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 (%)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,58	27,78	27,32	27,07	26,73
B	Pertambangan dan Penggalian	16,37	15,34	14,87	14,63	14,18
C	Industri Pengolahan	31,85	32,07	32,13	31,95	32,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	8,47	8,42	8,43	8,84	9,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,70	9,25	9,90	10,08	10,33
H	Transportasi dan Pergudangan	0,65	0,66	0,75	0,78	0,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,38	0,43	0,45	0,45	0,48
J	Informasi dan Komunikasi	1,09	1,13	1,15	1,19	1,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,98	0,99	1,00	1,00	0,97
L	Real Estate	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,70	1,65	1,68	1,70	1,79
P	Jasa Pendidikan	0,53	0,53	0,52	0,52	0,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,24	0,26	0,26	0,26	0,27
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,43	0,44	0,47	0,48	0,50
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

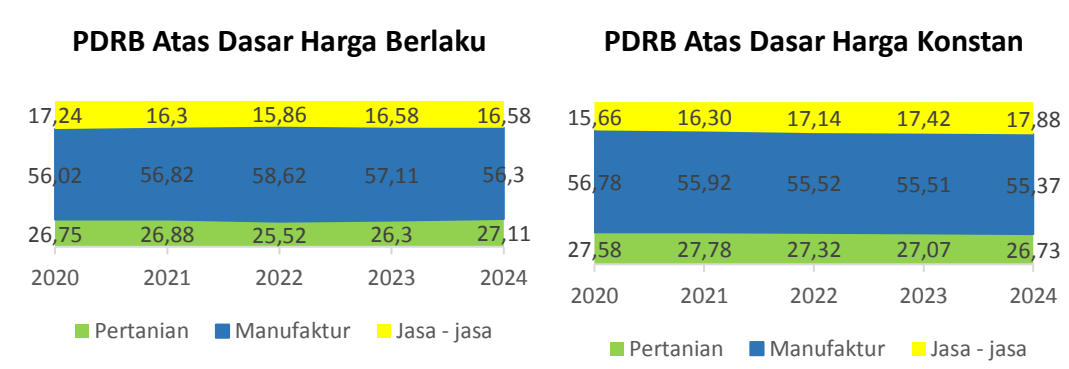
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa lapangan usaha yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap produksi barang dan jasa pada PDRB ADHB dengan migas pada tahun 2023 adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 27,55 persen namun, pada tahun 2024 sektor Industri Pengolahan meningkat menjadi 28,12 persen. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa lapangan usaha yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap produksi barang dan jasa PDRB ADHK dengan migas pada tahun 2023 adalah industri pengolahan sebesar 31,95 persen, namun pada tahun 2024 industri pengolahan ini meningkat menjadi 32,01 persen.

Dilihat dari kontribusi terbesar pada PDRB diketahui bahwa manufaktur memiliki kontribusi yang sangat besar dalam ekonomi Provinsi Riau. Berdasarkan *International Standard Industrial Classification* (ISIC), manufaktur ini merupakan gabungan dari beberapa sektor yakni Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, serta Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi.

Dalam memperkuat perekonomian Provinsi Riau diperlukan adanya transformasi ekonomi yang merupakan titik kunci untuk meningkatkan produktivitas dengan mengubah struktur perekonomian dari produktivitas rendah ke produktivitas tinggi. Transformasi ini menjadikan sektor jasa lebih banyak dibandingkan sektor industri. Provinsi Riau masih didominasi oleh sektor manufaktur/industri sedangkan sektor jasa belum terlalu berkembang di Provinsi Riau. Untuk menjadikan Provinsi Riau daerah maju diperlukan penguasaan teknologi, modal dan skill serta menciptakan lebih banyak *entrepreneur* selain itu diperlukan juga kebijakan pemerintah dalam mengubah perekonomian lebih baik.

Berdasarkan gambar di bawah menunjukkan bahwa kontribusi PDRB dengan migas ADHB dan ADHK untuk tiga lapangan usaha utama dari tahun 2020 hingga 2024. Kontribusi lapangan usaha pertanian pada PDRB ADHB tahun 2020 sebesar 26,75 persen kemudian Tahun 2024 meningkat menjadi 27,11 persen. Kontribusi PDRB ADHK lapangan usaha pertanian mengalami penurunan dari 27,58 persen pada tahun 2020

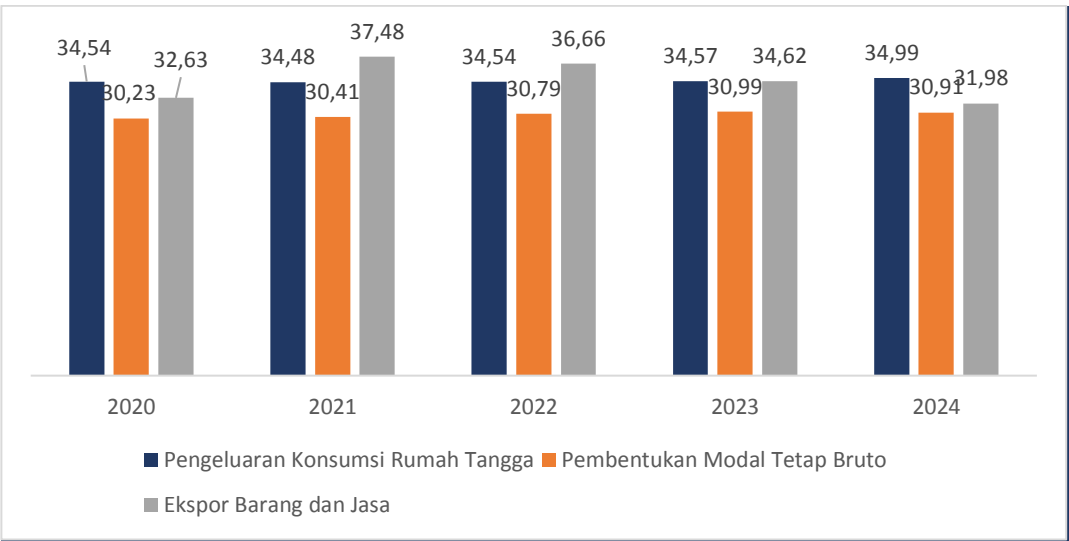
kemudian Tahun 2024 menjadi 26,73 persen. Peningkatan tersebut masih dapat dilakukan jika lapangan usaha pertanian dan manufaktur menjadi pendukung utama lapangan usaha jasa-jasa. Secara umum ketiga lapangan usaha utama tersebut akan meningkatkan lapangan usaha lainnya.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar 2.19 Kontribusi (%) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Utama di Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Perekonomian Riau juga ditopang oleh peningkatan permintaan domestik terutama konsumsi rumah tangga dan tetap terjaganya kinerja ekspor. Terjaganya permintaan domestik serta eksternal terhadap komoditas ekspor utama Riau antara lain CPO, *pulp* dan kertas, serta minyak bumi dapat menjadi stimulus peningkatan daya beli masyarakat serta investasi oleh sektor swasta. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi terbesar PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan menurut pengeluaran berikut ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar 2.20 Kontribusi (%) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Provinsi Riau 2020-2024

Pada tahun 2020-2024 pengeluaran konsumsi rumah tangga masih mendominasi komponen PDRB. Sedangkan pada tahun 2021-2022 ekspor luar negeri lebih mendominasi. Kenaikan ekspor luar negeri dua tahun terakhir ini disebabkan naiknya ekspor nonmigas terutama ekspor pertanian dan industri pengolahan dengan golongan barang ekspor terbesar yakni lemak dan minyak hewan/nabati, berbagai produk kimia, kertas dan karton, serta bubur kayu (*pulp*). Tiongkok, India, dan Malaysia merupakan negara tujuan ekspor utama di Riau. Komoditas utama yang diekspor ke Tiongkok adalah minyak kelapa sawit dan fraksinya, *pulp* kayu kimia, serta berbagai produk kimia. Komoditas utama yang diekspor ke India adalah minyak sawit mentah, fraksi cair dari minyak sawit, minyak sawit olahan, dan lain-lain. Ke negara Malaysia, Riau mengekspor bahan bakar minyak, asam lemak monokarboksilat industri, minyak sawit olahan dan lain-lain.

Sebaran rata-rata pertumbuhan per tahun PDRB harga konstan pada kabupaten/kota di Provinsi Riau menunjukkan Kota Dumai memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 30,73 persen per tahun. Sedangkan pertumbuhan terendah terdapat pada Kabupaten Bengkalis sebesar 1,70 persen. Pada tahun 2024 nilai PDRB tertinggi yakni Kota Pekanbaru sebesar Rp. 86.024,52 Milyar dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 78.699,63 Milyar.

Tabel 2.42 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Termasuk Minyak Bumi dan Gas Tahun 2020-2024 (Rp. Milyar)

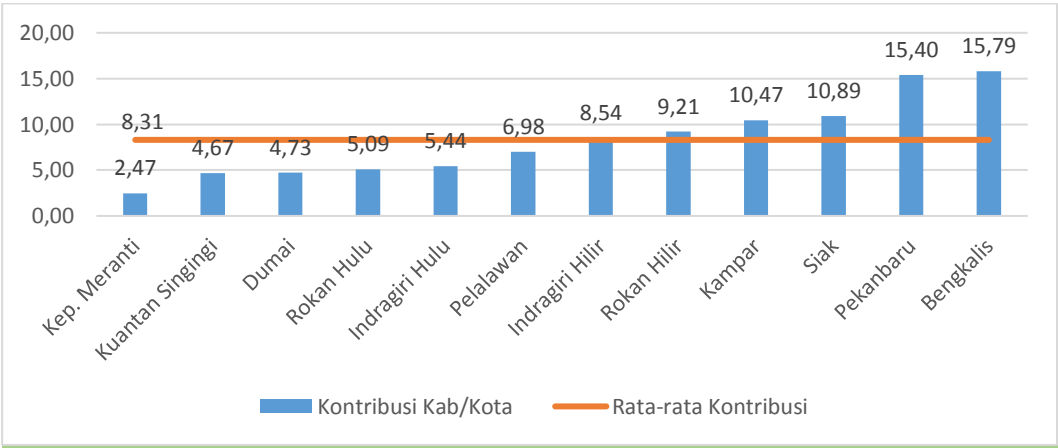
Kode	Kabupaten / Kota	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
14	Riau	489.984,31	506.457,71	529.532,98	515.828,49	571.233,59	14,22
14.01	Kampar	51.420,90	53.196,38	55.765,14	58.116,51	59.695,10	11,32
14.02	Indragiri Hulu	29.829,87	31.176,54	32.543,67	33.971,01	35.243,19	16,58
14.03	Bengkalis	73.856,50	74.229,74	75.878,58	77.977,09	78.699,63	1,70
14.04	Indragiri Hilir	44.926,18	46.921,26	49.468,27	50.985,02	52.563,59	13,35
14.05	Pelalawan	35.110,42	36.538,81	38.141,09	39.930,86	41.670,21	19,09
14.06	Rokan Hulu	25.482,41	26.752,47	28.093,64	29.250,58	30.042,44	12,74
14.07	Rokan Hilir	45.992,10	46.761,28	47.961,77	49.319,96	50.153,11	3,98
14.08	Siak	53.311,85	54.543,29	56.605,99	59.070,04	61.651,50	15,21
14.09	Kuantan Singingi	23.843,43	24.689,51	25.913,73	26.667,59	27.498,98	11,86
14.10	Kepulauan Meranti	12.683,87	13.008,81	13.421,78	14.067,69	14.536,18	11,71
14.71	Pekanbaru	69.000,14	72.919,08	77.539,10	82.235,28	86.024,52	27,76
14.72	Dumai	24.597,99	26.068,58	27.725,87	29.402,61	30.877,16	30,73

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Perkembangan PDRB HK terjadi akibat perubahan harga produksi atau indikator produksi. Perubahan ini menyebabkan sumbangan nilai tambah setiap sektor terhadap PDRB juga akan mengalami perubahan. Jika perkembangan setiap sektor tidak proporsional, misalnya beberapa sektor tertentu berkembang lebih cepat dibandingkan dengan sektor lainnya, maka dalam jangka panjang akan terjadi perubahan secara nyata sumbangan di setiap sektor yang dikenal sebagai perubahan struktur ekonomi.

Perkembangan PDRB terjadi akibat perubahan harga produksi atau indikator produksi. Perubahan ini menyebabkan sumbangan nilai tambah setiap sektor terhadap PDRB juga akan mengalami perubahan. Jika perkembangan setiap sektor tidak proporsional, misalnya beberapa sektor tertentu berkembang lebih cepat dibandingkan dengan sektor lainnya, maka dalam jangka panjang akan terjadi perubahan secara nyata (*significant*) sumbangan di setiap sektor, perubahan ini dikenal sebagai perubahan struktur ekonomi.

Pada Gambar di bawah juga menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB ADHB pada tahun 2024 adalah Kota Bengkalis sebesar 15,79 persen dan terendah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 2,47 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

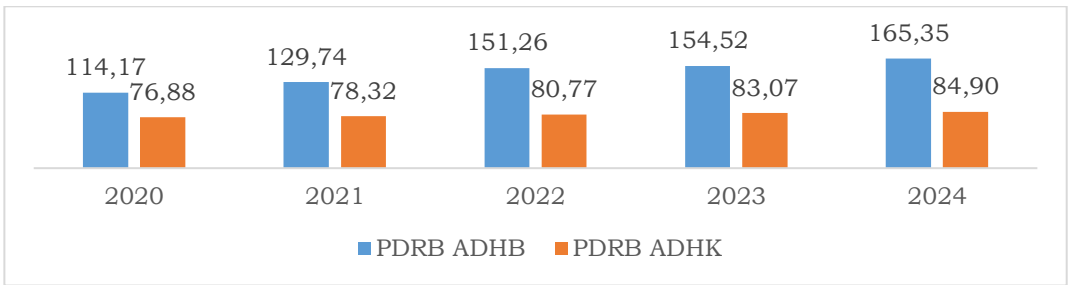
Gambar 2.21 Kontribusi PDRB Harga Berlaku dengan Migas Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024

2.2.1.4 PDRB Per Kapita

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang akan meningkatkan PDRB per kapita penduduk suatu negara dalam

jangka panjang. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat dari besarnya kenaikan PDRB per kapita penduduk. Struktur perekonomian Provinsi Riau telah bergeser sejak tahun 2014 dari sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor industri pengolahan.

Pergeseran kontribusi tersebut mempengaruhi penurunan nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian, namun tidak mempengaruhi terhadap nilai PDRB ADHB dan ADHK yang tetap mengalami kenaikan hal yang sama juga terhadap PDRB ADHB dan ADHK per kapita penduduk Provinsi Riau. PDRB ADHB per kapita meningkat dari tahun 2020-2024 yaitu Rp. 114,166 juta per kapita tahun 2020 kemudian meningkat menjadi Rp. 165,349 juta per kapita tahun 2024. Sementara PDRB ADHK per kapita per tahun selama periode 2020-2024, naik dari Rp. 76,884 juta tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 84,903 juta per kapita tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Gambar di bawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
Gambar 2.22 Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Riau Tahun 2020-2024 (Rp. Juta)

Periode Tahun 2020-2024, PDRB ADHK per kapita kabupaten/kota yang menunjukkan rata-rata pertumbuhan tertinggi terjadi di Kota Pekanbaru sebesar 4,49 persen per tahun sedangkan terendah terjadi di Kabupaten Bengkalis sebesar 0,39 persen per tahun. Periode yang sama, PDRB ADHB per kapita dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Kampar sebesar 10,73 persen dan terendah terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 7,77 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum perkembangan PRDB per kapita Provinsi Riau mengalami kenaikan, sehingga dapat diindikasikan bahwa tingkat pembangunan dan kemakmuran di Provinsi Riau mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.43 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2020-2024 (Juta Rp)

Kode	Kabupaten / Kota	Tahun										Pertumbuhan/tahun (%)	
		2020		2021		2022		2023		2024			
		ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB
14	RIAU	76,884	114,166	78,319	129,740	80,773	151,258	83,070	154,522	84,903	165,349	2,51	9,85
14.01	Kampar	61,399	87,171	62,387	101,398	64,323	119,442	65,964	121,368	66,709	130,105	2,10	10,73
14.02	Indragiri Hulu	67,417	95,932	69,179	106,177	71,374	118,837	73,495	122,197	75,247	129,125	2,79	7,77
14.03	Bengkalis	130,949	203,159	130,192	244,869	131,345	304,608	133,313	288,307	132,983	296,914	0,39	10,64
14.04	Indragiri Hilir	68,639	99,283	70,981	110,896	73,813	124,221	75,277	129,259	76,750	138,692	2,84	8,77
14.05	Pelalawan	90,559	130,721	92,408	145,720	94,868	163,051	97,739	172,617	100,423	187,220	2,62	9,42
14.06	Rokan Hulu	45,563	64,525	47,074	74,221	48,709	86,021	49,985	89,128	50,620	95,447	2,67	10,41
14.07	Rokan Hilir	72,386	106,888	72,442	124,189	73,277	146,800	74,281	142,690	74,485	152,220	0,72	9,57
14.08	Siak	116,937	168,914	117,684	193,401	120,359	227,499	123,819	230,416	127,443	250,380	2,18	10,52
14.09	Kuantan Singingi	71,430	100,868	73,212	114,654	75,828	131,363	77,160	137,873	78,737	148,877	2,47	10,29
14.10	Kepulauan Meranti	61,753	87,957	62,601	101,505	63,968	118,657	66,422	120,914	68,015	128,527	2,45	10,12
14.71	Pekanbaru	70,300	117,663	73,014	127,214	77,102	143,745	80,911	157,384	83,789	166,856	4,49	9,15
14.72	Dumai	78,049	115,223	81,368	124,686	85,394	138,761	89,394	149,082	92,715	158,147	4,40	8,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

2.2.1.5 Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK)

Rasio Dana Pihak Ketiga terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting dalam ekonomi regional yang menggambarkan tingkat intermediasi keuangan di suatu wilayah. Rasio ini menunjukkan seberapa besar total dana yang dihimpun dari masyarakat oleh perbankan (DPK) dibandingkan dengan nilai total output ekonomi wilayah tersebut (PDRB). DPK merupakan total dana yang dihimpun oleh bank dari pihak ketiga, yaitu masyarakat, dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. PDRB merupakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam hal ini Provinsi Riau dalam periode 2019-2023. Rasio tinggi (>50%) menunjukkan bahwa sektor perbankan berhasil menghimpun dana dalam jumlah besar dari masyarakat, yang mungkin mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem perbankan serta potensi besar untuk pembiayaan investasi. Berikut disajikan rasio DPK terhadap PDRB Provinsi Riau tahun 2019-2023.

Tabel 2.44 Perkembangan Rasio DPK Terhadap PDRB ADHB Provinsi Riau Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan/ Tahun (%)
1	PDRB ADHB Provinsi Riau	(Rp. Milyar)	760.248	727.599	839.002	991.615	1.026.472	8,18
2	DPK (Giro, Deposito & Tabungan)	(Rp. Milyar)	82.444	91.595	109.525	116.633	119.701	9,95
3	DPK/PDRB	(%)	10,84	12,59	13,05	11,76	11,66	2,26

Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Rasio DPK terhadap PDRB ADHB Provinsi Riau selama tahun 2019-2023 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan tren penurunan dengan pertumbuhan sebesar 2,26 persen per tahun atau naik dari 10,84 persen tahun 2019 menjadi 11,66 persen tahun 2023, pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 13,05 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa rasio DPK terhadap PDRB ADHB masih masuk dalam kategori rendah karena kurang dari 50 persen. Rasio rendah tersebut mengindikasikan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat relatif kecil dibandingkan dengan total output ekonomi wilayah tersebut, yang bisa menjadi indikasi tingkat inklusi keuangan yang rendah atau

preferensi masyarakat untuk menyimpan dana di luar sistem perbankan.

Rasio DPK terhadap PDRB dapat digunakan dalam pengambilan Kebijakan Ekonomi yaitu membantu pembuat kebijakan dalam mengidentifikasi kebutuhan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan perbaikan sistem perbankan. Dalam perencanaan pembangunan rasio ini dapat digunakan dalam merencanakan alokasi sumber daya untuk pembangunan ekonomi yang lebih baik. Secara keseluruhan, rasio DPK terhadap PDRB adalah alat yang penting dalam analisis ekonomi regional dan perencanaan kebijakan untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional.

2.2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan orang maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Pada tabel di bawah dapat dilihat pada tahun 2024 bahwa Kabupaten Bengkalis mendominasi tingginya angka pengangguran sebesar 5,88 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 1,86 persen. Penduduk yang bekerja di Kabupaten Bengkalis didominasi oleh penduduk dengan latar pendidikan SMA/MA/SMLB/Paket C dan tingkat SD/MI/SDLB/Paket A.

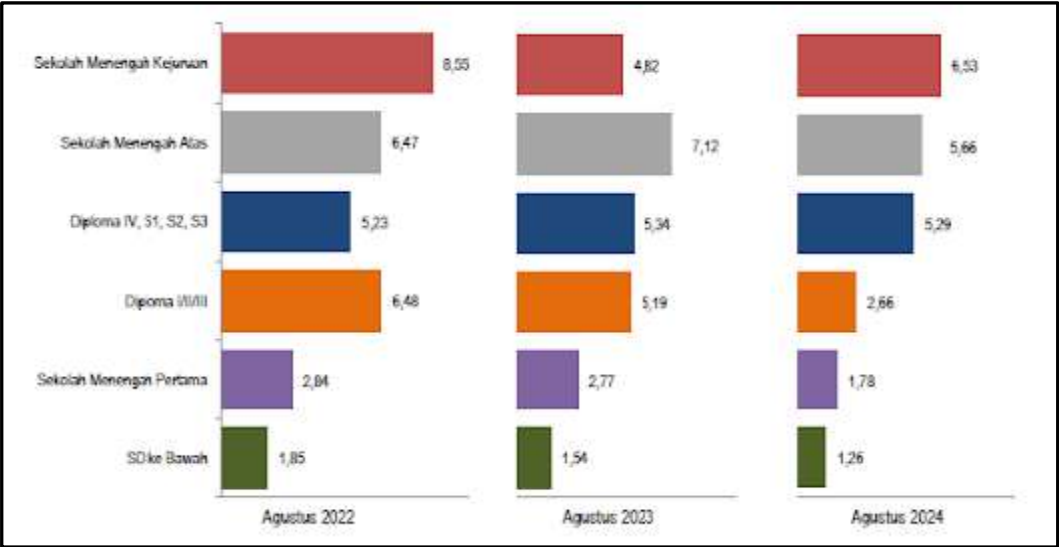
Tabel 2.45 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Kode	Provinsi/ Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
14	Riau	5,76	6,32	4,42	4,23	3,70
14.01	Kampar	6,15	4,27	3,62	3,38	3,67
14.02	Indragiri Hulu	4,91	3,32	2,53	2,47	2,55
14.03	Bengkalis	9,31	6,63	7,18	7,09	5,88
14.04	Indragiri Hilir	4,35	2,66	1,50	1,71	1,86
14.05	Pelalawan	5,99	2,34	2,73	2,26	2,13
14.06	Rokan Hulu	4,42	2,25	3,62	3,45	2,73
14.07	Rokan Hilir	4,80	3,25	4,55	4,42	4,31
14.08	Siak	5,80	4,34	6,11	5,82	4,53
14.09	Kuantan Singingi	5,21	2,06	2,66	2,49	2,48
14.10	Kepulauan Meranti	7,94	4,43	5,50	5,17	4,51
14.71	Pekanbaru	8,56	8,29	6,40	6,20	4,63
14.72	Dumai	8,19	6,29	5,38	5,15	4,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Pada tahun 2024, tingkat pengangguran di Provinsi Riau sebesar 3,70 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat 3 orang yang masuk kategori pengangguran. Dimana terdapat perubahan estimasi data oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan estimasi populasi penduduk berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2015) dan tidak lagi menggunakan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Pencapaian tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau jauh lebih rendah dibandingkan dengan nasional sebesar 4,91 persen di tahun 2024.

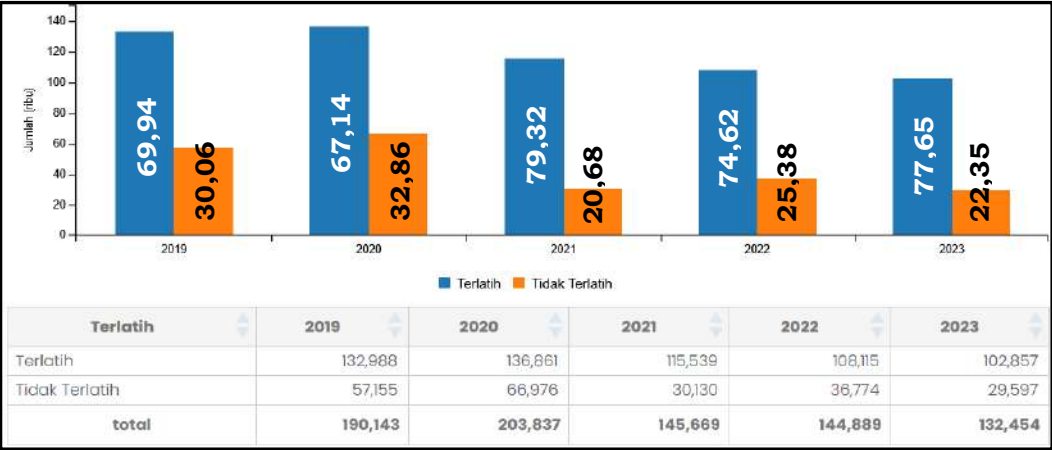
Meskipun data TPT di Provinsi Riau lebih baik dibandingkan dengan data nasional, namun daya saing tenaga kerja di Provinsi Riau masih menghadapi permasalahan. Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan TPT di tingkat pendidikan SMK merupakan yang paling tinggi sebesar 6,53 persen dan terendah adalah tingkat pendidikan SD sebesar 1,26 persen. Tingkat pendidikan SMK mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 1,71 persen sementara TPT pada tingkat pendidikan lainnya mengalami penurunan dengan penurunan terbesar pada tingkat pendidikan Diploma I/II/III sebesar 2,53 persen, SMA sebesar 1,46 persen dan SMP sebesar 0,99 persen. TPT berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar 2.23 Persentase Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Riau Tahun 2022-2024

Sementara itu, jika dilihat dari klasifikasi keterampilan penduduk menganggur terbuka di Provinsi Riau pada tahun 2023 yang merupakan data terakhir, masih terdapat sebanyak 29.597 orang (22,35 persen) belum terlatih dengan keterampilan yang spesifik. Oleh karena itu kedepan, perlu dikembangkan program pelatihan tematik yang lebih variatif baik jenis maupun lingkup sektor-nya yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Pembangunan sentra pelatihan ketrampilan tenaga kerja juga perlu dikembangkan untuk mempercepat peningkatan ketrampilan dan daya saing tenaga kerja di Provinsi Riau. Gambaran spesifik mengenai tenaga yang telah terlatih dari tahun ke tahun dapat dijelaskan dalam gambar berikut.



Sumber: Sepakat (Sakernas) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gambar 2.24 Penduduk Menganggur Terbuka dengan Klasifikasi Keterampilan di Provinsi Riau (Persen dan Jumlah) Tahun 2019-2023

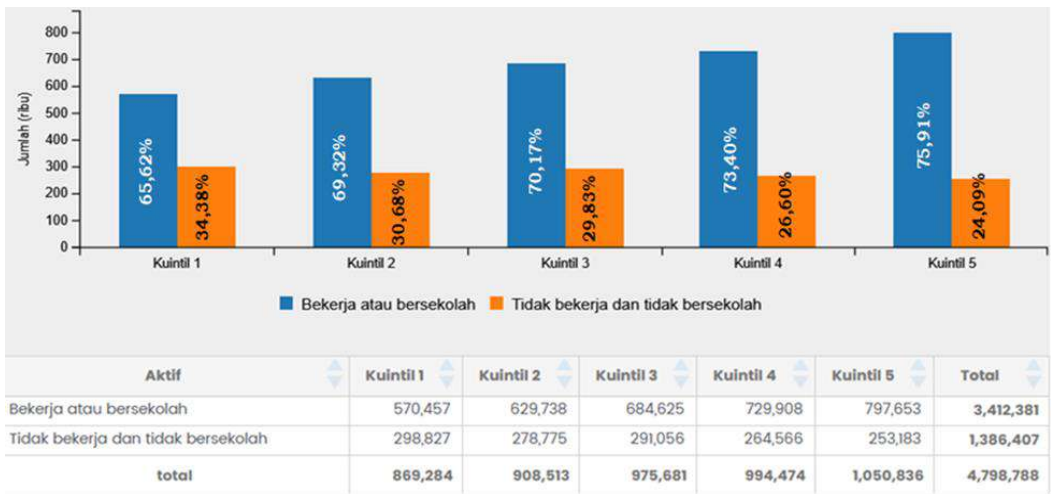
Upaya Pemerintah Provinsi Riau mengurangi pengangguran dengan pelaksanaan berbagai pelatihan untuk menjadikan pencari kerja lebih mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat memacunya dalam memiliki usaha sendiri dan penempatan tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja dan kompetensi pekerja. Selain itu, pemerintah berupaya mengembangkan sektor informal dan juga meningkatkan investasi guna menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

Tabel 2.46 Jumlah Angkatan Kerja, Pencari Kerja dan Penempatan di Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kode	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Bekerja (Orang)	Pengangguran (Orang)	Angkatan Kerja (Orang)	Pencari Kerja (Orang)	Penempatan (Orang)
14	Riau	3.159.367	121.361	3.134.788	7.338	2.908
14.01	Kampar	399.421	15.220	382.551	1.111	451
14.02	Indragiri Hulu	218.956	5.735	228.240	496	21
14.03	Bengkalis	264.884	16.561	262.657	1.882	588
14.04	Indragiri Hilir	344.448	6.530	307.740	566	471
14.05	Pelalawan	194.619	4.238	198.890	426	55
14.06	Rokan Hulu	291.157	8.184	287.231	1.172	105
14.07	Rokan Hilir	309.120	13.909	318.395	90	9
14.08	Siak	226.719	10.749	227.808	484	31
14.09	Kuantan Singingi	166.768	4.240	164.669	182	55
14.10	Kepulauan Meranti	105.346	4.977	105.089	74	51
14.71	Pekanbaru	486.834	23.635	494.728	750	1.052
14.72	Dumai	151.095	7.383	156.790	105	19

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang berusia 15 tahun keatas. Kondisi tersebut dengan menggunakan indikator penduduk bekerja atau bersekolah melalui data Sakernas BPS. Aktivitas bekerja atau sekolah adalah dua hal yang sangat penting dan saling berkaitan. Bekerja memberikan penghasilan dan pengalaman, sementara sekolah membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan. Keduanya berperan penting dalam pengembangan diri dan kemajuan masyarakat.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar 2.25 Indikator Ketenagakerjaan: Aktivitas Bekerja atau Sekolah Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan di Provinsi Riau, Tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas, penduduk usia kerja diatas 15 tahun yang berada pada Kuintil 1 (miskin dan rentan) terdapat 65,62 persen bekerja atau bersekolah dan 34,38 persen tidak bekerja dan tidak bersekolah. Hal ini harus menjadi perhatian serius dalam penanggulangan kemiskinan dari dimensi ketenagakerjaan dan pendidikan.

2.2.1.7 Indeks Gini

Di negara-negara berkembang, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi akan bias bila hanya dilihat dari besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk, tetapi perlu juga dilihat dari pemerataan pendapatan, Distribusi pendapatan dapat diukur menggunakan indeks gini yang merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/ kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Untuk negara-negara sedang berkembang, distribusi pendapatan sangat tidak merata jika angka indeks gini terletak antara 0,5 sampai dengan 0,7. Distribusi pendapatan dengan ketidakmerataan sedang jika angka indeks gini terletak antara 0,36 sampai dengan 0,49. Distribusi pendapatan relatif merata jika angka indeks gini antara 0,20 sampai 0,35.

Selama periode 2020-2024, angka Indeks Gini Provinsi Riau berkisar antara 0,307-0,324 dengan tren menurun sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah. Angka Indeks Gini ini memberi

arti bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Riau berada pada kategori pendapatan relatif merata. Klasifikasi kategori merata menjadi catatan perbaikan pendapatan di Provinsi Riau dan perlu perhatian dalam pembangunan Provinsi Riau ke depan agar dapat dipertahankan. Artinya pembangunan yang dijalankan selama periode tersebut dapat memperbaiki ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan kedepan yang mengarah pada pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat bawah, baik yang berada di perkotaan maupun di perdesaan harus menjadi prioritas sehingga pendapatan masyarakat bawah dapat meningkat dan mampu mengurangi perbedaan tingkat pendapatan antara kelompok masyarakat tersebut.

**Tabel 2.47 Indeks Gini Provinsi Riau
Tahun 2020-2024**

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Gini	0,329	0,326	0,326	0,324	0,307
Penurunan per tahun	0,001	0,003	0,000	0,002	0,017

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Pencapaian indeks gini Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 0,307 sudah termasuk kategori relatif merata dengan penurunan pertahunnya sebesar 0,017 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini merupakan penurunan paling besar bila dibandingkan enam tahun terakhir. Perbaikan kondisi pemerataan pendapatan di Provinsi Riau tidak terlepas dari besaran anggaran pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan di perdesaan serta pola pembangunan (*self services development*). Dibandingkan dengan Indeks Gini Nasional, Provinsi Riau memiliki angka yang lebih rendah, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan secara nasional lebih tinggi dibanding Provinsi Riau.

Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat pencapaian indeks gini kabupaten/kota se-Provinsi Riau Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, keseluruhan kabupaten/kota mengalami *trend fluktuatif* yang menunjukkan bahwa angka indeks gini ini

menyatakan distribusi pendapatan di kabupaten/kota se-Provinsi Riau berada pada kategori pendapatan relatif merata.

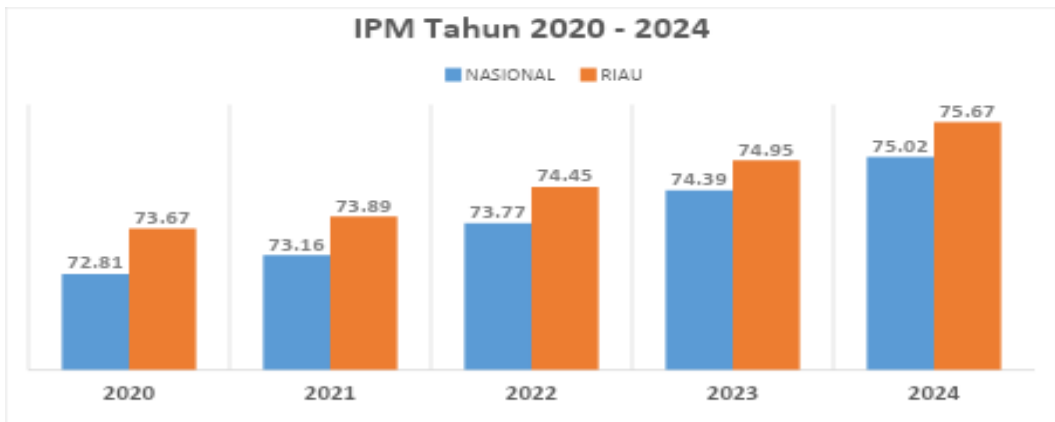
**Tabel 2.48 Indeks Gini Kabupaten-Kota se-Provinsi Riau
Tahun 2020 - 2024**

Kode	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
14.01	Kampar	0,306	0,281	0,311	0,302	0,254
14.02	Indragiri Hulu	0,276	0,305	0,268	0,282	0,295
14.03	Bengkalis	0,280	0,273	0,265	0,296	0,279
14.04	Indragiri Hilir	0,310	0,297	0,296	0,279	0,305
14.05	Pelalawan	0,325	0,294	0,282	0,267	0,280
14.06	Rokan Hulu	0,314	0,296	0,268	0,259	0,272
14.07	Rokan Hilir	0,281	0,257	0,285	0,316	0,272
14.08	Siak	0,279	0,295	0,290	0,325	0,271
14.09	Kuantan Singingi	0,291	0,264	0,281	0,264	0,262
14.10	Kepulauan Meranti	0,271	0,278	0,266	0,282	0,270
14.71	Pekanbaru	0,345	0,391	0,397	0,392	0,353
14.72	Dumai	0,360	0,345	0,324	0,307	0,328

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

**2.2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Modal
Manusia (IMM)**

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, dapat diartikan bahwa pembangunan kualitas hidup masyarakat Provinsi Riau juga mengalami peningkatan. Analisis kinerja terhadap IPM dilakukan dengan memperhatikan indikator pembentuk IPM antara lain angka harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita riil oleh karena itu upaya percepatan peningkatan IPM harus dilakukan melalui optimalisasi program terkait dengan indikator pembentuk IPM yaitu angka harapan hidup melalui kegiatan perbaikan kesehatan masyarakat, angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah melalui kegiatan perbaikan pendidikan masyarakat dan pengeluaran per kapita riil melalui kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar 2.26 IPM Provinsi Riau dan Nasional, 2020-2024

IPM Provinsi Riau terus mengalami peningkatan, pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan IPM nasional, IPM Provinsi Riau lebih tinggi 0,65 poin. IPM Provinsi Riau termasuk wilayah dengan kategori IPM yang tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Provinsi Riau menempati peringkat ke sepuluh dari 38 provinsi serta peringkat keempat di pulau Sumatera.

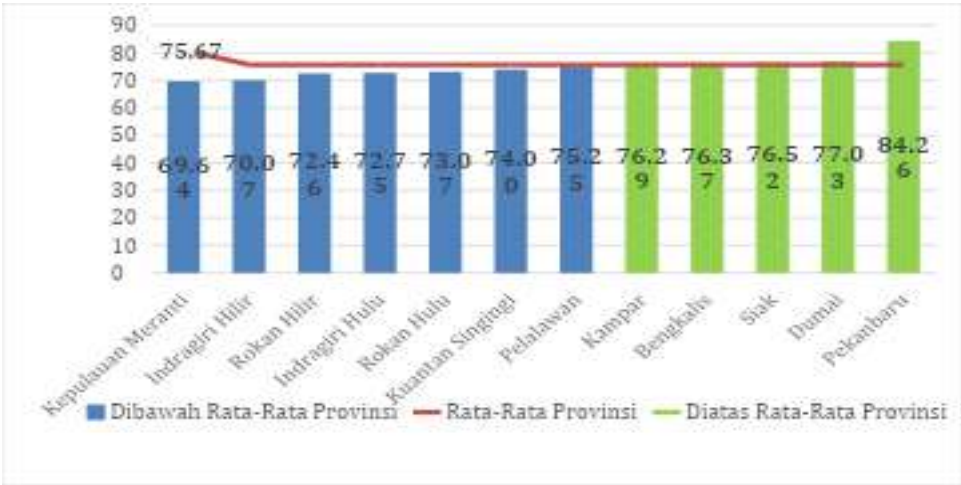
Dari komponen IPM juga dapat diketahui peningkatan pada masing-masing komponennya. Umur harapan hidup mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 0,98 persen, harapan lama sekolah tumbuh sebesar 0,41 persen, rata-rata lama sekolah sebesar 0,78 persen per tahun dan pengeluaran per kapita mengalami pertumbuhan sebesar 2,67 persen dari tahun 2020-2024. Oleh karena itu program perbaikan kesehatan masyarakat, peningkatan rata-rata lama sekolah dan peningkatan pendapatan per kapita harus menjadi prioritas utama dalam rangka peningkatan nilai IPM karena hanya tumbuh sebesar 1,00 persen per tahun. Salah satu faktor pendukung peningkatan IPM adalah dengan terjadinya perbaikan kinerja ekonomi Riau dan terus menguatnya perekonomian yang berdampak positif terhadap komponen pengeluaran per kapita. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya angka pengangguran dan juga angka kemiskinan di Provinsi Riau.

Tabel 2.49 Perkembangan Komponen Indikator IPM Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
UHH (Tahun)	71,60	71,67	73,95	74,18	74,41	0,98
HLS (Tahun)	13,20	13,28	13,29	13,30	13,42	0,41
RLS (Tahun)	9,14	9,19	9,22	9,32	9,43	0,78
PP (Rp, 000)	10.675	10.738	11.158	11.448	11.857	2,67
IPM	72,71	72,94	74,45	74,95	75,67	1,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang memiliki IPM lebih tinggi dari IPM Provinsi Riau, yakni Pekanbaru, Dumai, Siak, Bengkalis dan Kampar sebagaimana ditunjukkan pada gambar dan tabel di bawah. Sedangkan IPM paling rendah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti diikuti Indragiri Hilir, yang masih dibawah 70 poin. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesenjangan yang cukup tinggi, maka kebijakan dan program yang terkait dengan peningkatan IPM lebih diprioritaskan pada kedua kabupaten yang memiliki IPM terendah.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar 2.27 Perkembangan IPM per Kabupaten/Kota 2024

Tabel 2.50 IPM Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024

Kode	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Indikator IPM				IPM
		Umur Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata- Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Rp. 000)	
	Nasional	74,15	13,21	8,85	12.341	75,02
14	Riau	74,41	13,42	9,43	11.857	75,67
14.01	Kampar	74,61	13,61	9,58	12.034	76,29
14.02	Indragiri Hulu	73,63	12,60	8,43	11.333	72,75
14.03	Bengkalis	74,21	13,44	9,74	12.321	76,37
14.04	Indragiri Hilir	72,39	12,21	7,32	11.050	70,07
14.05	Pelalawan	74,63	12,91	8,96	12.575	75,25
14.06	Rokan Hulu	73,67	12,94	8,94	10.586	73,07
14.07	Rokan Hilir	73,87	12,89	8,53	10.447	72,46
14.08	Siak	73,98	12,89	9,92	13.080	76,52
14.09	Kuantan Singingi	72,96	13,38	9,14	11.182	74,00
14.10	Kepulauan Meranti	72,25	12,87	8,12	8.988	69,64
14.71	Pekanbaru	75,89	15,84	11,96	15.212	84,26
14.72	Dumai	73,50	13,35	10,29	12.847	77,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Mulai tahun 2025 untuk pengukuran keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia digunakan indikator Indeks Modal Manusia (IMM) yang mengukur potensi produktivitas sumber daya manusia dari anak yang lahir hari ini, saat ia berusia 18 tahun dengan tolok ukur pendidikan yang lengkap dan kesehatan prima. Angka IMM merefleksikan potensi kontribusi SDM terhadap pertumbuhan ekonomi di masa datang dan diharapkan mampu meningkatkan resiliensi individu, mobilitas dan kohesi sosial serta mengurangi kesenjangan antar penduduk.

2.2.1.9 Nilai Tukar Petani (NTP)

Pada tahun 2024, Nilai Tukar Petani Provinsi Riau mencapai 173.22 poin, mengalami kenaikan signifikan sebesar 20,29 poin dibandingkan dengan NTP tahun 2023 yang tercatat 152,93 poin. Peningkatan ini mencerminkan daya beli petani yang semakin membaik, dimana harga yang diterima petani meningkat lebih cepat dibandingkan dengan harga yang dibayarkan untuk kebutuhan konsumsi dan produksi. Salah satu faktor yang turut mempengaruhi kenaikan NTP ini adalah peningkatan indeks harga konsumsi rumah tangga petani, yang naik 0,26 persen. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya harga pada tujuh kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga, dengan kelompok makanan,

minuman, dan tembakau mencatat kenaikan indeks konsumen perdesaan tertinggi.

Perkembangan NTP Provinsi Riau menunjukkan tren positif, menggambarkan kondisi usaha tani yang semakin menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir, yang tetap berada di atas angka 100. Hal ini menandakan bahwa petani masih memiliki *surplus* dalam kegiatan usahanya, untuk memastikan keberlanjutan tren diperlukan strategi yang tepat, termasuk dalam mengantisipasi berbagai tantangan eksternal seperti fluktuasi harga pasar, perubahan iklim, ketersediaan sarana dan prasarana produksi serta kebijakan pemerintah lainnya pada sektor pertanian. Perkembangan NTP Provinsi Riau Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.51 Perkembangan Nilai Tukar Petani
Provinsi Riau Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks yang diterima petani (lt)	124,78	149,01	162,29	176,89	204,48
2	Indeks yang dibayar petani (lb)	105,05	107,42	112,55	115,67	118,04
3	NTP	118,77	138,68	144,28	152,94	173,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Nilai Tukar Petani per sektor yang diambil dari rata-rata dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun berkenaan. Pada tahun 2024, NTP tertinggi di Provinsi Riau berada pada sektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 189,23 yang naik cukup signifikan dari tahun sebelumnya, dengan di dominasi komoditas kelapa sawit. Selanjutnya, data secara rinci per sektor dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.52 Perkembangan Nilai Tukar Petani Per Sektor
Provinsi Riau Tahun 2020-2024**

No	Uraian Sektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tanaman Pangan	93,57	91,08	90,10	93,84	95,84
2	Holtikultura	95,57	94,00	99,30	100,39	103,83
3	Tanaman Perkebunan Rakyat	123,71	147,79	154,40	164,79	189,23
4	Peternakan	97,79	99,69	99,60	95,64	94,94
5	Perikanan	98,27	102,20	103,13	104,28	103,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Dilihat dari status tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Riau terdapat 20 persen terbawah adalah pekerja pada sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan masih selalu mendominasi. Hal ini perlu menjadi perhatian, terutama desain program yang berhubungan pada sektor tersebut mesti lebih difokuskan, agar lebih tepat sasaran dan membawa dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pekerja miskin dan rentan yang bekerja disektor pertanian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.53 Pekerja Miskin dan Rentan (Kuintil 1) yang Bekerja di Sektor Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan di Provinsi Riau
Tahun 2020-2024**

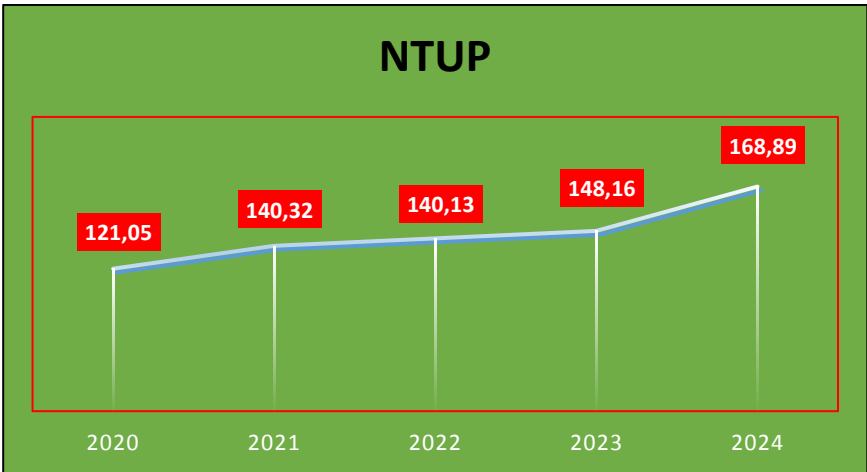
No	Pekerja Sektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan (Kuintil 1)	54,56	49,5	52,3	45,55	49,53

Sumber: Sepakat (Susenas) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2.2.1.10 Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)

Nilai Tukar Usaha Petani adalah indikator yang mengukur tingkat kesejahteraan petani berdasarkan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani untuk produksi dan penambahan barang modal (IbBPPBM). Melalui NTUP dapat diketahui apakah peningkatan biaya produksi masih dapat dikompensasi dengan kenaikan pendapatan petani dari hasil produksinya. Jika NTUP>100, artinya pendapatan petani lebih besar dibandingkan biaya produksi, sehingga usaha pertanian masih menguntungkan. Sebaliknya, jika NTUP<100, maka biaya produksi lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima, hal ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi bagi petani. Dengan kata lain, NTUP mencerminkan daya tukar (*terms of trade*) antara produk pertanian dengan biaya produksi, sekaligus menggambarkan profitabilitas usaha pertanian di suatu daerah. Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam merumuskan kebijakan pertanian, terutama dalam menilai efektivitas program subsidi, harga jual hasil pertanian, serta kestabilan harga input produksi bagi petani.

Berdasarkan data Nilai Tukar Usaha Petani Provinsi Riau dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat tren peningkatan yang signifikan, yang menunjukkan bahwa pendapatan petani meningkat lebih cepat dibandingkan dengan biaya produksi dan barang modal. Peningkatan paling mencolok terjadi pada 2024, NTUP melonjak dari 148,16 pada 2023 menjadi 168,89, mencerminkan perubahan besar dalam keseimbangan antara harga hasil pertanian dan biaya produksi. Secara keseluruhan, tren positif NTUP Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan kondisi usaha tani yang semakin menguntungkan, mengingat NTUP yang terus berada di atas 100. Namun, untuk memastikan keberlanjutan tren ini, diperlukan strategi yang tepat, terutama dalam mengantisipasi tantangan eksternal seperti fluktuasi harga pasar dan perubahan lingkungan. NTUP Provinsi Riau Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar 2.28 Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Provinsi Riau Tahun 2020-2024

2.2.1.11 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan mencerminkan tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat Riau. Semakin beragam pola konsumsi masyarakat, semakin baik pula status gizi dan kesehatannya, pada akhirnya dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk. Penilaian skor PPH dikategorikan ke dalam empat tingkat, yaitu: Sangat rendah (<55 persen), Rendah (55-69 persen), Cukup (70-84 persen), Baik (≥85 persen). Skor PPH Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.54 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Kode	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
14	Riau	85,50	84,10	89,40	88,90	88,14
14.01	Kampar	86,10	86,20	91,90	90,40	84,80
14.02	Indragiri Hulu	87,00	84,20	82,70	92,70	85,58
14.03	Bengkalis	82,50	83,00	88,30	89,70	90,30
14.04	Indragiri Hilir	85,00	81,00	81,90	85,30	86,32
14.05	Pelalawan	86,00	84,60	92,10	90,70	90,87
14.06	Rokan Hulu	90,50	81,90	88,80	91,80	90,98
14.07	Rokan Hilir	86,00	85,20	92,70	81,40	86,88
14.08	Siak	90,50	85,40	91,80	93,80	90,41
14.09	Kuantan Singingi	84,90	84,10	90,70	89,40	89,38
14.10	Kep. Meranti	80,00	77,70	81,30	86,00	83,60
14.71	Pekanbaru	85,00	81,80	85,60	83,10	82,66
14.72	Dumai	82,50	82,90	88,60	87,90	83,70

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Berdasarkan tabel di atas, skor Pola Pangan Harapan di Provinsi Riau mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, skor PPH tercatat sebesar 85,50 dengan kategori baik, sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi 88,14 yang juga masuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan masyarakat Riau semakin beragam dan lebih mendekati pola konsumsi yang seimbang sesuai dengan rekomendasi gizi. Perhitungan skor PPH dari tahun 2020-2024 menggunakan pendekatan skor PPH Konsumsi. Selanjutnya mulai tahun 2025, skor PPH menggunakan pendekatan rata-rata skor PPH Konsumsi dan skor PPH Ketersediaan. Oleh karena itu perhitungan proyeksi target skor PPH tahun 2025-2030 menggunakan pendekatan tersebut.

2.2.1.12 Koperasi

Koperasi adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Untuk melihat aktivitas koperasi dapat dilihat dari koperasi aktif, yaitu koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Perkembangan koperasi di Provinsi Riau dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.55 Perkembangan Koperasi di Provinsi Riau
Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Koperasi	5.385	5.630	5.871	6.013	6,201	3.59
Koperasi Aktif	3.130	3.248	3.186	3.220	3,363	1.84
Koperasi Tidak Aktif	2.255	2.382	2.685	2.793	2,838	6.00
Anggota	246.072	313.939	308.159	341.622	340,083	9.04
Modal Sendiri (Rp. Juta)	1.249.202,63	1.558.690,60	2.162.747	2.586.908	2,250,752	17.54
Modal Luar (Rp. Juta)	1.464.123,39	1.779.978,99	2.444.446	3.007.038	2,934,230	19.87
Volume Usaha (Rp. Juta)	1.882.987,75	1.931.247,89	2.119.578	3.281.778	4,148,536	23.39
Sisa Hasil Usaha (SHU) (Rp. Juta)	114.635,42	157.600,61	256.579	323.014	239,081	25.05

Sumber : Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah koperasi dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,59 persen per tahun dengan perkembangan koperasi aktif juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,84 persen per tahun, dengan jumlah koperasi aktif yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) sebanyak 888 koperasi atau 27,87 persen (sumber: Kementerian Koperasi) yang menjalankan manajemen perkoperasian sesuai dengan aturan yang berlaku. Disamping itu masih terdapat koperasi dengan status tidak aktif dengan pertumbuhan 5 tahun terakhir sebesar 6 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian karena rata-rata pertumbuhan koperasi tidak aktif jauh lebih besar daripada rata-rata pertumbuhan koperasi aktif. Modal sendiri rata-rata pertumbuhan sebesar 17,54 persen per tahun, rendahnya pertumbuhan ini disebabkan oleh penurunan signifikan terjadi pada tahun 2020 dampak dari pandemi covid-19, namun hingga tahun 2023 sudah semakin membaik dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2024. Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) berfluktuatif dengan persentase peningkatan per tahun sebesar 25,05 persen. Melihat perkembangan koperasi di Provinsi Riau saat ini dan potensi sumber daya alam yang mendukung aktivitas perkoperasian, maka untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat pada kelompok komoditi unggulan Provinsi Riau menjadi tantangan dan potensi sendiri untuk ditingkatkan.

Pertumbuhan koperasi yang ada di Provinsi Riau dapat dilihat sebarannya berdasarkan kabupaten/kota, dimana jumlah anggota, modal, volume usaha dan Sisa Hasil Usaha per tahun disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.56 Keragaan Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

Kabupaten /Kota	Kinerja Koperasi						
	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	Anggota	Modal Sendiri	Modal Luar	Volume Usaha	SHU
Kuantan Singingi	250	135	29,555	151,518,595,072	230,957,998,826	187,397,241,872	11,061,094,344
Indragiri Hulu	315	180	31,861	213,967,162,065	304,854,377,455	62,683,911,322	6,938,282,089
Indragiri Hilir	405	269	6,895	143,249,861,697	23,563,349,275	1,666,737,916,971	20,010,900,203
Pelalawan	288	200	29,843	122,189,650,177	351,595,987,153	140,126,055,487	15,338,220,379
Siak	390	228	25,619	384,983,723,508	91,203,721,389	401,964,740,156	24,160,792,349
Kampar	623	377	68,306	384,062,254,061	76,276,758,402	568,527,318,073	27,111,485,459
Rokan Hulu	374	212	20,565	115,418,108,357	220,044,827,951	171,655,551,709	11,335,796,304
Bengkalis	1,052	374	29,293	112,661,011,865	368,195,065,566	42,406,719,786	9,151,759,763
Rokan Hilir	512	422	37,520	116,056,218,518	259,733,613,009	319,745,082,940	17,170,471,274
Kepulauan Meranti	311	85	682	2,025,062,956	729,255,501	6,724,837,498	825,482,961
Pekanbaru	1,342	650	50,302	420,284,974,433	975,914,327,217	334,324,875,030	78,749,971,153
Dumai	339	231	9,642	84,335,397,443	31,161,100,411	246,241,820,122	17,226,996,046
Binaan Provinsi	282	233	64,581	332,389,129,449	125,614,189,534	240,379,498,531	54,326,519,484
Binaan Nasional	139	136	3	9,611,275,748	6,128,610,540	14,014,688,591	1,211,041,162
Jumlah	6,622	3,732	404,667	2,592,752,425,349	3,065,973,182,229	4,402,930,258,088	294,618,812,970

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau

Kabupaten/Kota dengan jumlah koperasi terbanyak di Provinsi Riau terdapat di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 1.342 koperasi, diikuti oleh Kabupaten Bengkalis sebanyak 1.052 koperasi dan Kabupaten kampar sebanyak 623 koperasi sedangkan koperasi aktif terbanyak adalah di Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kampar. Volume usaha terbesar yang menandakan besarnya aktivitas koperasi terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir, Kampar dan Siak dengan jumlah koperasi aktif masing-masing sebanyak 269.377.228 koperasi.

2.2.1.13 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah diklasifikasikan tersendiri berdasarkan modal usaha sesuai dengan Pasal 35 (ayat 3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, dimana usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorang yang memiliki modal usaha sampai dengan 1 milyar, sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki modal usaha 1 milyar sampai 5 milyar. Selanjutnya usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki modal usaha 5 milyar sampai 10 milyar. Perkembangan UMKM di Provinsi Riau disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.57
Perkembangan UMKM di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024

No	Investasi	Perkembangan					Rata-rata pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Usaha Mikro	133.684	137.128	277.869	278.342	304.544	11,60
2	Usaha Kecil	3.257	2.565	5.891	5.909	509	221,89
3	Usaha Menengah	132	560	701	702	72	121,43

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau

Perkembangan UMKM di Provinsi Riau dalam 5 tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi pada usaha kecil sebesar 221,89 persen, usaha menengah 121,43 persen dan usaha mikro 11,60 persen. Jika dibandingkan dengan perkembangan UMKM 2 tahun terakhir untuk usaha mikro kecil mengalami peningkatan sedangkan usaha kecil dan usaha menengah mengalami penurunan,

Sedangkan terhadap usaha yang telah difasilitasi legalitas usahanya melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau diantaranya sertifikasi halal sebanyak 27 unit usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 419 unit usaha dan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sebanyak 152 unit usaha. Legalitas usaha ini dibutuhkan oleh UKM untuk bermitra dengan pengusaha menengah dan besar.

2.2.1.14 Perindustrian

Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan kawasan industri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015. Selanjutnya industri pengolahan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (*assembling*). Perkembangan industri di Provinsi Riau, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.58 Jumlah Usaha/Perusahaan Industri Pengolahan Besar dan Sedang per Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024

Kode	Kabupaten /Kota	Jumlah Usaha/Industri Pengolahan Besar dan Sedang					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
14.01	Kampar	68	62	60	62	74	2,66
14.02	Indragiri Hulu	23	23	25	26	25	2,21
14.03	Bengkalis	15	15	15	18	18	5,00
14.04	Indragiri Hilir	20	20	21	22	22	2,44
14.05	Pelalawan	34	34	35	41	40	4,41
14.06	Rokan Hulu	36	36	35	36	35	-0,68
14.07	Rokan Hilir	32	32	31	33	33	0,83
14.08	Siak	24	24	24	26	27	3,05
14.09	Kuantan Singingi	21	21	21	22	20	-1,08
14.10	Kepulauan Meranti	26	25	26	29	26	0,34
14.71	Pekanbaru	25	37	38	48	44	17,17
14.72	Dumai	36	26	28	29	32	-1,55
Jumlah		360	355	359	389	396	2,48

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Pada tahun 2020 jumlah usaha/perusahaan industri pengolahan besar dan sedang di Provinsi Riau sebanyak 360 perusahaan mengalami kenaikan sebesar 9,09 persen pada tahun 2024 atau sebesar 396 perusahaan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,48 persen. Dari perkembangan jumlah perusahaan tersebut, Kota Pekanbaru memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi sebesar 17,17 persen yang mengindikasikan kota Pekanbaru sebagai salah satu tujuan investasi besar dan menengah dengan iklim investasi yang kondusif. Sedangkan tingkat pertumbuhan terendah adalah Kota Dumai dengan rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir sebesar -1,55 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat Kota Dumai sebagai Kota industri. Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan sektor industri, dilakukan melalui pengembangan perwilayahan industri yang diimplementasikan melalui Pengembangan Kawasan Industri (KI) dan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKM). Beberapa Kawasan Industri telah beroperasi, dan untuk kedepannya sebagian dalam tahap pengusulan/perencanaan oleh kabupaten/kota seperti rencana pembangunan Kawasan Baruk Bakul/Bukit Bandar di Kabupaten Bengkalis, Kawasan Pulau Burung di Kabupaten Indragiri Hilir, Kawasan Pulau Rangsang di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kawasan Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis. Adapun Kawasan Industri yang sudah

beroperasi di Provinsi Riau hingga tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.59 Lokasi Kawasan Industri di Provinsi Riau Tahun 2024

No	Wilayah Industri	Luas (ha)	Lokasi	Keterangan
1	Kawasan Industri Dumai - Pelitung - Lubuk Gaung - Dock Yard - Pelindo (BK)	1.050 Ha	Kota Dumai	Sudah memiliki Pengelola Pengelola : PT. Kawasan Industri Dumai
2	Kawasan Industri Tanjung Buton	600 Ha	Kab. Siak	Sudah memiliki Pengelola; Pengelola PT. Kawasan Industri Tanjung Buton
3	Kawasan Industri Tenayan Raya	266 Ha	Kota Pekanbaru	Sudah memiliki Pengelola; Pengelola PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru
4	Kawasan Industri Peputra Maha Raya	189 Ha	Kab Kampar	Sudah memiliki Pengelola; Pengelola PT. Peputra Maha Raya
5	Kawasan Industri Gerindo Investa International	105 Ha	Kab Kampar	Sudah memiliki Pengelola; Pengelola PT. Gerindo Investa International

Sumber: Sistim Industri Nasional (SIINas)

Selain usaha/perusahaan industri pengolahan besar dan sedang (yang difasilitasi pengembangannya melalui Kawasan Industri), pembangunan industri daerah harus memperhatikan industri kecil dan menengah melalui fasilitasi pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM). Beberapa SIKM telah berkembang di Provinsi Riau berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.60 Kondisi SIKM di Provinsi Riau Tahun 2024

No	Nama	Lokasi	Jumlah IKM	Investasi	Keterangan
1	SIKM Sagu Terpadu	Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti	16 IKM	40.000.000.000	Beroperasi
2	SIKM Pengolahan Kopi Liberika	Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti	12 IKM	35.000.000.000	Beroperasi
3	SIKM Pandai Besi Rumbio Jaya Steel (Pandai Besi)	Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar	6 KUB	-	Beroperasi
4	SIKM Nenas	Desa Sukajadi, Kabupaten Inhu	30 IKM	11.600.000.000	Beroperasi
5	SIKM Nenas	Kabupaten Siak	-	47.000.000.000	Tahap Pengusulan DAK
6	SIKM Pandai Besi	Kabupaten Rohul	30 IKM	11.000.000.000	Kajian Masterplan/ Business Plan

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pengembangan SIKM tetap menjadi prioritas di Provinsi Riau, dimana tahapan yang harus dilakukan adalah penyusunan *FS, Master Plan dan Business Plan, DED* sesuai yang di atur pada Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014. SIKM untuk kedepannya akan difokuskan kepada pengolahan pada sektor Perkebunan seperti kelapa, kelapa sawit, sagu, karet dan pandai besi. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengembangan SIKM diawali dengan perencanaan yang matang untuk melihat potensi dan prospek industri yang akan dikembangkan.

2.2.1.15 Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata, yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam, tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, di tempat yang dikunjungi, yang dihitung berdasarkan 4 (empat) pintu masuk utama ke Provinsi Riau dan melalui *Mobile Positioning Data (MPD)*. MPD merupakan pengumpulan data lokasi berdasarkan layanan yang ada pada telepon seluler dengan melihat catatan transaksi dan pergerakan atau mobilitas dari tamu asing yang melalui pos-pos lintas batas (Kabupaten Bengkalis) dan belum dicatat oleh pihak imigrasi yang mana data tersebut diproses dan disimpan dalam suatu sistem. Perkembangan wisatawan mancanegara dan Nusantara yang datang ke Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.61 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Menurut Pintu Masuk Utama dan *Mobile Positioning Data* (MPD) Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun (Jiwa)					Rata-rata Pertumbuhan (%)*
		2020	2021	2022	2023	2024	
A	Wisatawan Mancanegara						
1	Berdasarkan MPD	54.062	44.237	209.165	352.942	360.918	35,50
2	Pintu Masuk Utama	13.771	109	23.798	49.921	67.837	72,83
	- Dumai	6.165	8	18.080	15.019	12.953	-15,34
	- Pekanbaru	6.797	101	3.985	27.621	37.093	313,71
	- Bengkalis	809	0	1.733	5.818	12.101	171,86
	- Selat Panjang	0	0	0	1.463	5.690	144,46
B	Wisatawan Nusantara	2.384.032	4.736.018	8.534.835	11.246.862	11.546.634	17,22

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Riau
*rata-rata pertumbuhan dihitung dari tahun 2022 - 2024

Jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Riau hingga tahun 2024, baik wisatawan mancanegara maupun nusantara mengalami tren peningkatan yang cukup tinggi setelah sempat menurun pada masa pandemi *covid-19* baik yang dihitung melalui MPD maupun pintu masuk utama. Pada tahun 2024 merupakan peningkatan tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan jumlah kunjungan tahun 2022 terjadi karena pemerintah kembali membuka pelabuhan internasional Dumai - Malaka dan mulai membuka pintu masuk bandara Sultan Syarif Kasim II yang selama 2 tahun terakhir tidak beroperasi karena pandemi *covid-19*. Kunjungan wisatawan mancanegara yang melalui Pelabuhan internasional Dumai terjadi penurunan mulai tahun 2023 hal ini dikarenakan adanya peralihan kunjungan dari jalur laut ke udara dimana biaya nya relative lebih terjangkau.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berdasarkan perhitungan *Mobile Positioning Data* (MPD) meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 35,50 persen. Sedangkan melalui pintu masuk utama juga mengalami peningkatan dengan rata – rata pertumbuhan 72,83 persen. Hal ini disebabkan karena sudah banyaknya event wisata yang ada di Provinsi Riau seperti pacu jalur, bakar tongkang, cian cui dan wisata religi.

Sementara itu, kunjungan wisatawan nusantara mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar

17,22 persen, angka ini menunjukkan bahwa wisatawan domestik masih menjadi tulang punggung utama sektor pariwisata Provinsi Riau dan hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong pemulihan ekonomi serta menggalakkan wisata dalam negeri.

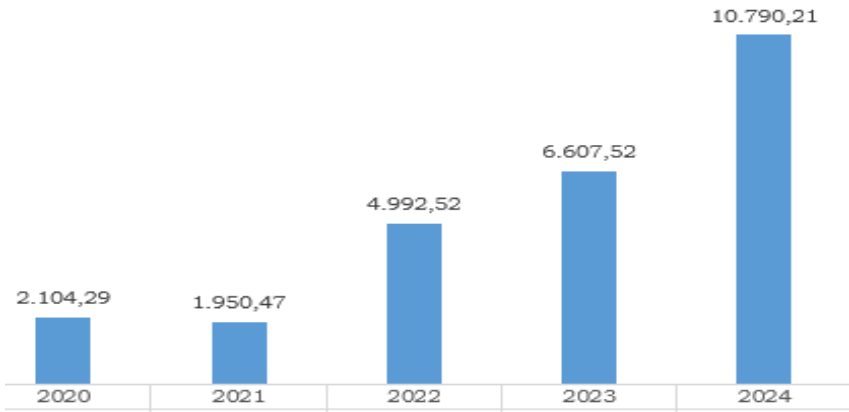
Tabel 2.62 Rata-rata Lama Menginap Tamu di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024

No	Rata-Rata Lama Menginap	Tahun (Hari)					Rata-Rata Pertumbuhan per tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tamu Asing	4,13	4,34	3,63	3,04	2,49	-11,41
2	Tamu Domestik	1,75	1,59	1,37	1,2	1,27	-7,19

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Meskipun terjadi peningkatan kunjungan wisatawan, rata-rata lama tinggal wisatawan di Provinsi Riau menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Rata-rata lama menginap tamu asing maupun domestik yakni mengalami penurunan sebesar -11,41 persen per tahun, sedangkan tamu domestik terjadi penurunan rata-rata lama menginap sebesar -7,19 persen. Penurunan ini menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, atraksi wisata, aksesibilitas, fasilitas dan produk wisata. Untuk meningkatkan rata-rata lama tinggal dibutuhkan pengembangan destinasi dan event pariwisata yang menumbuhkan minat dan kenyamanan wisatawan di Provinsi Riau.

Pada gambar berikut disajikan jumlah pengeluaran wisatawan Mancanegara di Provinsi Riau tahun 2020 - 2024 :



Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Gambar 2.29 Jumlah Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (Milyar Rupiah) Tahun 2020-2024

Dari sisi ekonomi, jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara dari tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan tren positif. Pada tahun 2020, jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara tercatat Rp. 2,10 Triliun. Angka ini mengalami sedikit penurunan di tahun 2021 menjadi Rp. 1,95 Triliun, diakibatkan dampak pandemi *covid-19*. Namun, mulai terjadi peningkatan pada tahun 2022 hingga 2024 dengan peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2024, pengeluaran wisatawan mancanegara mencapai Rp. 10,79 Triliun. Secara rata-rata, pengeluaran wisatawan mancanegara tumbuh sebesar 61,08 persen per tahun. Hal ini disebabkan karena dibuka kembali destinasi wisata dan event pariwisata yang berskala nasional dan internasional.

Tabel 2.63 Jumlah Objek Wisata Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Kode	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata pertumbuhan per tahun
14	Riau	415	524	529	525	529	6,81
14.01	Kampar	83	65	75	78	75	-1,54
14.02	Indragiri Hulu	28	54	59	43	59	28,05
14.03	Bengkalis	50	60	59	49	59	5,60
14.04	Indragiri Hilir	4	34	36	8	36	255,56
14.05	Pelalawan	14	27	26	9	26	47,22
14.06	Rokan Hulu	42	50	51	87	51	12,06
14.07	Rokan Hilir	17	24	24	16	24	14,46
14.08	Siak	51	72	51	78	51	7,58
14.09	Kuantan Singingi	82	70	70	112	70	1,97
14.10	Kepulauan Meranti	20	18	19	24	19	0,26
14.71	Pekanbaru	11	29	34	12	34	70,57
14.72	Dumai	13	21	25	9	25	45,44

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Provinsi Riau memiliki berbagai objek wisata yang menarik yang memadukan keindahan alam, budaya dan Sejarah, sehingga menjadi destinasi wisata yang patut dikunjungi. Potensi wisata yang ada berupa wisata alam, budaya, dan buatan yang melimpah, namun hingga saat ini belum sepenuhnya dikenal secara luas baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu, diperlukan strategi pengembangan yang komprehensif dan kolaboratif. Salah satunya melalui pendekatan *pentahelix* pariwisata yang melibatkan akademisi, dunia usaha, pemerintah, komunitas, dan media. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem

pariwisata dan ekonomi kreatif di Riau, mendorong promosi yang lebih masif, menciptakan inovasi produk wisata, serta meningkatkan kualitas layanan destinasi menuju pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Jumlah objek wisata di Provinsi Riau di dominasi oleh wisata alam sebesar 46,88 persen dari total jenis wisata budaya dan buatan. Objek wisata ini terus bertambah dari 415 objek wisata pada tahun 2020 menjadi 529 objek wisata pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,81 persen. Kabupaten yang memiliki jumlah objek wisata terbanyak adalah Kabupaten Kampar dengan total 75 objek wisata (39 alam, 13 budaya dan 23 buatan), yang berkontribusi sekitar 14,18 persen dari total objek wisata se-Provinsi Riau. Selain Kabupaten Kampar, Kuansing, Indragiri Hulu, Bengkalis juga termasuk daerah dengan jumlah objek wisata yang cukup besar.

2.2.1.16 Kelautan dan Perikanan

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah di Sumatera yang memiliki potensi sumberdaya perikanan yang besar yang menjadi sumber perekonomian bagi masyarakatnya. Secara umum Provinsi Riau memiliki aktivitas kegiatan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya air tawar, serta budidaya perikanan laut dan payau.

Tabel 2.64 Rasio Produksi dan Konsumsi Ikan di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun					Rata-rata pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Produksi (Ton)	234.126,93	244.789,84	259.629,13	262.029,12	253.246,20	2,04
Konsumsi (Ton)	289.524,26	294.087,41	290.952,15	333.339,03	314.267,36	2,34
Perimbangan (Ton)	-55.397,33	-49.297,50	-31.323,02	-44.201,65	-61.021,16	7,92
Rasio	0,81	0,83	0,89	0,78	0,81	0,30

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Bila dilihat dari perkembangan produksi perikanan Provinsi Riau sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya namun pertumbuhan rata-rata dalam lima tahun hanya sebesar 2,04 persen dengan produksi sebesar 253.246,20 ton pada tahun 2024, sedangkan rata-rata

pertumbuhan kebutuhan konsumsi sebesar 2,34 persen dengan konsumsi sebesar 314.267,36 ton, sehingga terjadi defisit sebesar 61.021,16 ton. Bila dilihat kemampuan produksi lokal terhadap pemenuhan kebutuhan ikan di Provinsi Riau masih belum mencukupi. Namun untuk memenuhi kekurangan kebutuhan konsumsi ini didatangkan dari provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Sumatera Utara. Adapun rasio produksi dan konsumsi ikan di setiap kabupaten/kota se-Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.65 Rasio Produksi dan Konsumsi Ikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

Kode	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Indikator				
		Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)	Perimbangan (Ton)	Rasio	AKI
14	Riau	253.246,21	218.998,13	34.248,09	1,16	32,55
14.01	Kampar	68.590,46	24.581,47	44.008,99	2,79	27,47
14.02	Indragiri Hulu	12.941,14	12.641,20	299,94	1,02	26,99
14.03	Bengkalis	11.744,72	23.364,26	-11.619,54	0,50	39,48
14.04	Indragiri Hilir	45.616,99	22.470,26	23.146,73	2,03	32,81
14.05	Pelalawan	11.142,52	13.398,51	-2.255,99	0,83	32,29
14.06	Rokan Hulu	9.355,93	18.095,39	-8.739,46	0,52	30,49
14.07	Rokan Hilir	67.470,53	26.151,87	41.318,66	2,58	38,84
14.08	Siak	3.395,11	16.500,85	-13.105,74	0,21	34,11
14.09	Kuantan Singingi	7.632,61	11.424,00	-3.791,39	0,67	32,71
14.10	Kepulauan Meranti	3.672,95	7.749,49	-4.076,54	0,47	36,26
14.71	Pekanbaru	9.888,90	31.354,53	-21.465,63	0,32	30,54
14.72	Dumai	1.794,35	11.716,03	-9.921,68	0,15	35,18

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Dilihat dari tabel diatas beberapa kabupaten sudah mampu bahkan surplus dalam memenuhi kebutuhan ikan dari produksi lokal yaitu Kabupaten Kampar, Rokan Hilir dan Indragiri Hilir sedangkan kabupaten yang kurang kebutuhan ikan dari produksi lokal adalah Kota Pekanbaru. Bila dilihat dari angka konsumsi ikan Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 32,55 kg/kapita/tahun, angka ini dibawah Nasional sebesar 62,5 kg/kapita/tahun. Beberapa faktor yang menjadi penyebab tingkat konsumsi ikan Provinsi Riau lebih rendah dibanding angka nasional antara lain, pendapatan, pengetahuan tentang gizi ikan, ketersediaan ikan, harga ikan, preferensi/selera dan juga faktor lingkungan seperti suhu dan kualitas air.

Produksi ikan di Provinsi Riau diperoleh dari berbagai jenis usaha antara lain usaha perikanan tangkap di laut, perikanan tangkap di perairan umum daratan (sungai, waduk, rawa, genangan air dan danau), budidaya di tambak, kolam, keramba, budidaya jaring apung tawar, tancap tawar, jaring apung di laut serta budidaya di laut. Jumlah produksi dari tahun 2020 sampai dengan 2024 menurut jenis usaha dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.66 Produksi Perikanan Menurut Jenis di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024

Jenis Usaha Perikanan	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Perikanan Tangkap di Laut	111.533,62	113.825,37	114.612,25	112.078,20	105.459,18	-1,34
Perikanan Tangkap di Perairan Umum	23.439,14	24.398,79	24.697,38	23.695,24	20.316,39	-3,25
Budidaya di Tambak	2.237,22	3.655,39	7.863,35	6.939,97	10.647,46	55,05
Budidaya di Kolam	74.263,51	78.397,62	81.449,54	85.412,38	85.268,12	3,54
Budidaya di Keramba	7.444,31	8.023,76	11.974,75	13.033,47	14.264,61	18,83
Budidaya Jaring Apung Tawar	7.510,69	9.190,94	11.101,67	11.337,51	9.179,63	6,56
Budidaya Jaring Tancap Tawar	65,98	92,18	97,84	83,59	91,13	10,08
Budidaya Jaring Apung di Laut	38,16	55,09	115,45	198,30	202,43	56,94
Budidaya Laut	7.594,30	7.662,81	7.716,90	7.728,32	7.817,25	0,73
Jumlah	234.126,93	245.301,95	259.629,13	260.506,98	253.246,20	20,04

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Dari data tabel di atas dapat dilihat rata-rata pertumbuhan per tahun untuk perikanan tangkap di laut sebesar -1,34 persen dan perairan umum menurun sebesar 3,25 persen. Produksi tertinggi untuk perikanan tangkap di laut terjadi pada tahun 2022 sebesar 114.612,25 Ton, namun pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan produksi yang diakibatkan adanya pemutakhiran data yang menghasilkan data angka riil jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) dan armada selain itu akibat jumlah trip per hari melaut nelayan berkurang, sehingga berkurangnya aktivitas penangkapan yang tercermin dari penurunan trip melaut.

Rata-rata produksi untuk Jenis Usaha Perikanan Budidaya Jaring Apung Tawar dari tahun 2020 hingga 2024 sebesar 6,56 persen dan Jaring Tancap Tawar sebesar 10,08 persen. Untuk budidaya tambak sebesar 55,05 persen, budidaya kolam sebesar 3,54 persen dan budidaya keramba sebesar 18,83 persen. Produksi perikanan budidaya ini masih belum mencukupi kebutuhan terhadap ikan di Provinsi Riau, hal ini disebabkan karena kapasitas usaha yang dijalankan pembudidaya masih dalam skala kecil, tingginya biaya produksi sebagai akibat dari tingginya harga pakan pabrikan, kurangnya benih bermutu serta keterbatasan sarana dan prasarana usaha budidaya.

Selanjutnya, untuk produksi Jenis Usaha Budidaya Jaring Apung Laut mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan 56,94 persen dari tahun 2020 hingga 2024, begitu juga untuk usaha budidaya laut persentase rata-rata pertumbuhan mencapai 0,73 persen dengan tren pertumbuhan yang positif pada dua komoditas utama yakni kakap putih dan kerang darah. Pertumbuhan yang signifikan pada komoditas kakap putih dengan sistem jaring apung laut menandakan adanya potensi besar pengembangan lebih lanjut pada sektor usaha ini.

Tabel 2.67 Produksi Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

Kode	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Jenis Usaha Perikanan										Kontribusi (%)
		Perikanan Tangkap di Laut	Perairan Tangkap di Perairan Umum	Budidaya di Tambak	Budi daya di Kolam	Budidaya di Keramba	Budidaya Jaring Apung di Perairan Umum	Keramba Jaring Tancap di Perairan Umum	Budidaya Jaring Apung di Laut	Budidaya Laut	Jumlah	
14	Riau	105.459,18	20.316,39	10.647,46	85.268,12	14.199,46	9.382,06	156,28	-	7.817,25	253.246,20	100
14.01	Kampar	-	2.370,23	-	46.038,68	12.533,39	7.648,15	-	-	-	68.590,45	27,08
14.02	Indragiri Hulu	-	6.086,45	-	5.971,22	883,47	-	-	-	-	12.941,14	5,11
14.03	Bengkalis	5.483,50	593,91	5.573,86	93,44	-	-	-	-	-	11.744,71	4,64
14.04	Indragiri Hilir	39.187,97	1.293,47	4.664,25	466,27	-	5,03	-	-	-	45.616,99	18,01
14.05	Pelalawan	2.561,14	3.136,88	5,40	3.419,60	782,60	1.236,90	-	-	-	11.142,52	4,40
14.06	Rokan Hulu	-	2.005,90	-	7.152,11	-	197,92	-	-	-	9.355,93	3,69
14.07	Rokan Hilir	52.471,83	3.099,90	-	4.011,19	-	70,36	-	-	7.817,25	67.470,53	26,64
14.08	Siak	938,49	1.141,73	348,33	909,91	-	15,92	40,73	-	-	3.395,11	1,34
14.09	Kuantan Singingi	-	488,77	-	7.078,70	-	-	65,14	-	-	7.632,61	3,01
14.10	Kepulauan Meranti	3.314,34	-	1,10	155,08	-	202,43	-	-	-	3.672,95	1,45
14.71	Pekanbaru	-	99,15	-	9.784,40	-	5,35	-	-	-	9.888,90	3,90
14.72	Dumai	1.501,91	-	54,52	187,52	-	-	50,41	-	-	1.794,36	0,71

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Berdasarkan tabel di atas, terdapat tiga kabupaten yaitu Kampar, Rokan Hilir dan Indragiri Hilir dengan produksi perikanan terbesar. Untuk Kabupaten Kampar kontribusi dari usaha pada sektor perikanan sebesar 27.08 persen, Rokan Hilir sebesar 26.64 persen dan Indragiri Hilir 18.01 persen. Untuk tiga kabupaten ini penyumbang angka produksi perikanan terbesar hampir pada setiap tahunnya.

Adapun produktivitas hasil produksi perikanan tangkap baik dari tangkap laut, pelabuhan dan perairan umum daratan di setiap kabupaten/kota se-Provinsi Riau pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.68 Produktivitas Hasil Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

Kode	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
14	Riau	125.775,57	0,06
14.01	Kampar	2.370,23	0,13
14.02	Indragiri Hulu	6.086,45	1,15
14.03	Bengkalis	6.077,41	0,01
14.04	Indragiri Hilir	40.481,44	0,09
14.05	Pelalawan	5.698,02	0,05
14.06	Rokan Hulu	2.005,90	0,36
14.07	Rokan Hilir	55.571,73	102,36
14.08	Siak	2.080,22	0,23
14.09	Kuantan Singingi	488,77	0,11
14.10	Kepulauan Meranti	3.314,34	0,01
14.71	Pekanbaru	99,15	0,13
14.72	Dumai	1.501,91	4,04

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Berdasarkan tabel diatas, Kabupaten Rokan Hilir dan Indragiri Hilir memiliki jumlah produksi terbesar yaitu 55.571,73 ton dan 40.481,44 ton. Sedangkan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki jumlah produksi terkecil yaitu 99,15 ton dan 488,77 ton.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara/daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Tabel 2.69 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Riau	3,13	3,03	2,61	2,68	2,55

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Provinsi Riau dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB pada tahun 2024 sebesar 2,55 persen. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 3,13 persen.

2.2.1.17 Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tanaman pangan adalah jenis tanaman yang menghasilkan bahan makanan utama bagi manusia. Tanaman ini umumnya dikonsumsi sebagai sumber utama karbohidrat, protein dan serat yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Contoh tanaman pangan meliputi serealialia (padi, jagung), kacang-kacangan (kedelai, kacang tanah, kacang hijau), serta umbi-umbian (singkong, ubi jalar). Sementara itu, tanaman hortikultura adalah kelompok tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan produk dengan nilai ekonomi tinggi, seperti buah-buahan, sayuran, tanaman obat, dan tanaman hias. Budidaya tanaman hortikultura biasanya dilakukan di kebun, lahan pekarangan, atau dalam skala lebih besar seperti perkebunan hortikultura. Tanaman hortikultura umumnya lebih mudah rusak dibandingkan tanaman pangan dan memerlukan teknik budidaya serta penanganan pasca panen yang lebih intensif untuk menjaga kualitas dan daya tahannya. Perbedaan utama antara tanaman pangan dan hortikultura terletak pada tujuan budidayanya, skala produksi, serta cara pengolahan dan penyimpanannya.

Kondisi perkembangan tanaman pangan dan hortikutura di Provinsi Riau dapat dilihat dari perkembangan luas panen beberapa komoditas utama tanaman pangan dan hortikutura, seperti padi, jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan dan beberapa jenis sayuran. Berikut ini disajikan data luas panen, produksi dan

produktivitas komoditas tanaman pangan dan palawija disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.70 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024

Komoditas	Tahun					Rata-rata pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
	Luas Panen (ha)					
1. Padi Sawah	71.632,36	53.062,40	51.054	52.913	56.422	-4,86
2. Padi Ladang	12.857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
3. Jagung	9.591,40	6.530	2.797	2.330,68	2.713,06	-22,34
4. Ubi Kayu	3.741,90	3.427,60	2.320	2.270,84	2.019,64	-13,47
5. Kacang Tanah	502,90	585,40	456	405,38	361,60	-6,90
6. Ubi Jalar	354	363,10	323	295,99	273,47	-6,11
7. Kacang Kedelai	1.823	666,10	296	448,06	180,55	-31,84
8. Kacang Hijau	159,10	151,00	60	80,37	80,45	-7,83
	Produksi (ton)					
1. Padi Sawah	269.344	217.458,90	213.557	205.973	222.056	-4,20
2. Padi Ladang	43.021	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
3. Jagung	30.884	22.987,30	9.845	8.984,60	9.369,14	-21,80
4. Ubi Kayu	108.953	108.474	73.424,70	58.469,54	54.376,08	-15,03
5. Kacang Tanah	480,77	649,70	504,70	587,09	490,10	3,16
6. Ubi Jalar	4.602	7.168,80	6.373,20	6.434,22	5.890,51	9,30
7. Kacang Kedelai	1.827	390	325	634,93	267,38	-14,46
8. Kacang Hijau	111,37	104	50	83,42	83,59	2,13
	Produktivitas (Kw/ha)					
1. Padi Sawah	37,60	40,98	41,83	38,93	39,36	1,31
2. Padi Ladang	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
3. Jagung	32,20	3,17	3,76	38,55	34,53	210,82
4. Ubi Kayu	291,17	30,05	31,61	257,48	269,24	158,66
5. Kacang Tanah	9,56	1	1,14	14,48	13,55	272,05
6. Ubi Jalar	130	13,92	19,79	217,38	215,40	237,60
7. Kacang Kedelai	10,02	0,84	1,09	14,17	14,81	285,67
8. Kacang Hijau	7,00	0,73	0,83	10,38	10,39	268,71

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Kondisi perkembangan tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Riau dapat dilihat dari komoditas utama seperti padi sawah, dimana rata-rata pertumbuhan luas panen 5 tahun terakhir adalah -4,86 persen, penurunan ini sejalan dengan penurunan produksi padi sebesar -4,20 persen dengan pertumbuhan produktivitas 1,31 persen. Hal ini menandakan bahwa produksi padi sebagai bahan pokok (beras) semakin berkurang terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat. Beberapa faktor penyebab terjadinya penurunan luas panen antara lain adanya anomali iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan. Menurunnya luas panen tanaman pangan berdampak terhadap penurunan produksi.

Selanjutnya sayuran yang dikembangkan di Provinsi Riau meliputi sayuran daun (bayam, kangkung dan aneka sawi), sayuran

buah (cabe, cabe rawit, terung, kacang panjang, gambas, mentimun dan pare) dan penanaman sayuran umbi yaitu bawang merah. Pengembangan bawang merah ini awalnya karena campur tangan pemerintah untuk memberikan bantuan berupa bibit dan pupuk kepada kelompok tani. Perkembangan luas panen sayur-sayuran di Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.71 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayur-Sayuran di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024

Komoditas	Tahun					Pertumbuhan Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
	Luas Panen (ha)					
1. Cabe	3.375	2.874	2.815	2.317,24	2.376,38	-8,01
2. Bawang Merah	63	67	34	73,76	44	8,42
2. Ketimun	1.597	1.368	1.317	1.270,83	1.154,19	-7,69
3. Terong	1.202	1.048	878	855,19	830,89	-8,62
4. Kacang Panjang	2.005	1.685	1.515	1.387	1.287,30	-10,42
5. Bayam	2.195	2.367	2.615	2.630,33	2.548,46	3,95
6. Kangkung	2.293	2.492	2.699	2.801,24	2.687,26	4,18
7. Petsai dan Sawi	499	514	640	688,69	745,12	10,83
8. Labu	22	27	31	28,60	20,50	0,37
9. Sayuran Lainnya	18.317,19	30.938,16	712,31	26.280,01	3.505,68	868,49
Jumlah	31.568,19	43.380,16	13.256,31	38.332,89	15.199,78	24,20
	Produksi (ton)					
1. Cabe	26.915	20.791	20.534	13.213,54	15.332,35	-10,90
2. Bawang merah	263	329	195	322,74	245,515	6,49
2. Ketimun	17.284,79	16.808	15.547	14.149,16	11.191,90	-10,04
3. Terong	10.735,83	10.168	9.195	7.367,90	6.974,02	-10,02
4. Kacang Panjang	9.671,03	9.163	8.962	8.213,39	9.038,97	-1,44
5. Bayam	8.981,81	8.378	10.586	10.094,03	9.301,27	1,78
6. Kangkung	10.420,31	10.646	12.498	13.463,63	12.178,13	4,44
7. Petsai dan Sawi	1.406,16	1.673	2.249	3.061,69	3.370,77	24,91
8. Labu	22,05	577	426	100,15	112,05	606,50
9. Sayuran Lainnya	22.160,91	12.598,80	2.796,33	7.857,22	23.920,95	66,12
Jumlah	107.861	91.132	82.988	77.843	91.666	-3,22
	Produktivitas (ton/ha)					
1. Cabe	7,97	7,23	7,29	5,70	6,45	-4,28
2. Bawang Merah	4,17	4,91	5,71	4,38	5,58	9,54
2. Ketimun	10,83	12,28	11,80	11,13	9,70	-2,26
3. Terong	8,93	9,70	10,47	8,62	8,39	-0,94
4. Kacang Panjang	4,82	5,43	5,91	5,92	7,02	10,06
5. Bayam	4,09	3,53	4,04	3,84	3,65	-2,29
6. Kangkung	4,54	4,27	4,63	4,81	4,53	0,14
7. Petsai dan Sawi	2,82	3,25	3,51	4,45	4,52	12,90
8. Labu	0,99	21,37	13,74	3,50	5,47	501,16
9. Sayuran Lainnya	1,21	0,41	3,93	0,30	6,82	718,35
Jumlah	50,37	72,38	71,03	52,65	62,14	8,49

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Komoditi sayuran dengan produksi yang mengalami pertumbuhan positif adalah bawang merah, bayam, kangkung,

petsai dan sawi dan labu, namun demikian produksi sayuran Provinsi Riau belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Potensi tanaman buah-buahan cukup tinggi dengan dukungan kondisi lahan. Komoditas manggis Tembilahan sudah dikukuhkan oleh Kementrian Pertanian menjadi Manggis Ratu Tembilahan. Selain itu juga durian Omeh Kampar, Jeruk Kuok dan Rokan Hulu, Nenas Kampar, Siak dan Dumai serta Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir (sesuai jenis dan varietas daerahnya).

Tabel 2.72 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Buah-Buahan di Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Komoditas	Tahun					Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
	Luas Panen					
Pisang	659.576	958.586	1.013.116	1.007.416	693.480	4,82
Durian	98.901	202.807	157.384	216.367	185.379	26,45
Duku	68.446	82.174	33.543	73.051	70.661	18,85
Mangga	119.768	176.108	123.501	140.718	120.843	4,25
Jeruk	435.957	560.919	410.929	389.351	252.499	-9,62
Rambutan	176.311	292.550	217.345	222.257	230.146	11,51
Pepaya	191.978	262.778	210.486	192.750	186.898	1,38
Nenas	53.158.424	52.801.596	57.339.473	62.087.281	87.274.828	14,19
Jambu	156.762	173.289	183.729	189.355	178.857	3,52
Buah Lainnya	410.450	551.375	497.175	551.932	606.171	11,34
Jumlah	55.476.573	56.062.182	60.186.681	65.070.478	89.799.762	13,63
	Produksi (ton)					
Pisang	37.457,00	48.901,00	55.207,00	27.766,32	44.935,20	13,89
Durian	15.168,00	30.114,00	30.039,00	22.659,72	25.663,16	21,74
Duku	10.303,00	7.595,00	3.970,00	3.475,43	7.945,07	10,53
Mangga	18.946,00	19.737,00	15.241,00	14.092,61	12.400,17	-9,54
Jeruk	151.626,00	60.352,00	49.727,00	22.707,91	23.186,24	-32,51
Rambutan	21.973,00	40.510,00	26.866,00	17.013,53	18.131,99	5,15
Pepaya	21.016,00	22.470,00	24.403,00	18.546,80	14.386,22	-7,73
Nenas	214.277,00	354.878,00	261.769,00	379.024,96	355.181,98	19,47
Jambu	21.774,00	19.274,00	20.862,00	15.285,51	16.252,19	8,90
Buah Lainnya	68.811,00	68.698,00	68.668,00	41.201,41	52.855,37	-2,98
Jumlah	581.351,00	672.529,00	556.752,00	699.343,80	570.937,58	1,43

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dalam kurun 5 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan produksi komoditi buah-buahan sebesar 1,43 persen. Peningkatan yang tertinggi pada komoditi durian sebesar 21,74 persen dan yang terkecil jeruk sebesar -32,51 persen.

2.2.1.18 Perkebunan

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang

dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Pembangunan perkebunan memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Riau. Komoditi utama Perkebunan Provinsi Riau terdiri dari kelapa sawit, kelapa, sagu, kopi dan karet. Perkembangan Luas lahan, produksi dan produktivitas disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.73 Perkembangan Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Komoditi Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024

Komoditas	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Luas Lahan (Ha)						
1. Kelapa Sawit	2.695.680	2.710.014	2.902.608	3.401.607	3.409.500	6,27
2. Kelapa	426.580	420.740	442.299	440.477	440.742	0,85
3. Karet	511.952	479.781	342.247	420.771	413.163	-3,45
4. Pinang	22.150	22.521	22.829	22.599	22.583	0,49
5. Kakao	3.662	3.732	3.611	3.468	3.418	-1,68
6. Gambir	2.070	1.887	1.672	1.672	1.672	-5,06
7. Kopi	4.213	4.382	4.280	4.328	4.698	2,84
8. Enau	297	85	85	79	79	-19,61
9. Sagu	64.580	64.375	76.597	78.721	66.786	1,57
Jumlah	3.731.183	3.707.513	3.796.228	4.373.272	4.362.624	4,18
Produksi (ton)						
1. Kelapa Sawit	8.305.837	7.846.071	7.737.099	9.222.465	9.403.232	3,56
2. Kelapa	396.170	392.433	417.460	411.229	384.429	-0,64
3. Karet	443.104	409.920	323.639	327.229	352.182	-4,95
4. Pinang	12.192	12.295	11.257	11.166	11.403	-1,57
5. Kakao	967	992	992	845	844	-3,09
6. Gambir	1.169	1.293	1.293	1.203	1.202	0,89
7. Kopi	2.423	2.417	1.865	1.795	1.842	-6,06
8. Enau	23	24	24	14	14	-9,33
9. Sagu	262.549	265.754	133.637	287.629	287.085	16,64
Jumlah	9.424.434	8.931.197	8.627.266	10.263.575	10.442.232	3,02
Produktivitas (ton/ha)						
1. Kelapa Sawit	3.543	3.721	3.526	3.248	3.201	-2,39
2. Kelapa	1.192	1.203	1.205	1.329	1.331	2,88
3. Karet	1.242	1.231	1.299	1.405	1.440	3,82
4. Pinang	860	862	781	790	801	-1,65
5. Kakao	452	453	457	454	458	0,33
6. Gambir	684	837	855	795	943	9,03
7. Kopi	1.173	1.185	904	993	1.015	-2,66
8. Enau	1.740	1.878	1.878	1.430	1.431	-3,96
9. Sagu	6.316	6.345	2.920	6.436	6.415	16,64

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Rata-rata pertumbuhan produksi kelapa sawit dalam lima tahun terakhir sebesar 3,56 persen, peningkatan produksi ini disebabkan oleh semakin meningkatnya luas lahan, namun rata-

rata pertumbuhan produktivitas sawit masih -2,39 persen, rata-rata pertumbuhan produktivitas yang mengalami penurunan paling signifikan adalah enau yaitu -3,96 persen. Pada tahun 2023 perhitungan luas lahan kelapa sawit bertambah dengan data tutupan lahan dibanding tahun 2022, diikuti oleh kenaikan produksi pada komoditas kelapa sawit.

Perkembangan luas lahan kelapa Provinsi Riau dalam lima tahun terakhir berfluktuatif cenderung menurun. Permasalahan yang dihadapi antara lain laju tanaman tua rusak (TTR) yang tidak sebanding dengan pelaksanaan peremajaan kelapa. Selain itu terjadinya degradasi areal kelapa mencapai 30 persen selama periode 2002-2020, adanya perkebunan kelapa dalam kawasan hutan, seperti perkebunan kelapa rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir berada pada kawasan hutan sebesar 32,76 persen, ancaman abrasi dan intrusi air laut pada areal perkebunan kelapa rakyat di pesisir pantai Pulau Sumatera sehingga merusak trio tata air (Tanggul – Tali Air (saluran) – Pintu Klep) serta kemampuan daerah untuk rehabilitasi masih terbatas.

2.2.1.19 Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jumlah populasi dan produksi komoditas peternakan berfluktuasi dari tahun 2020 sampai 2024, namun bila dilihat rata-rata pertumbuhan populasi mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif 4,99 persen. Rata-rata pertumbuhan populasi yang negatif terjadi karena pada tahun 2023 populasi ternak turun sangat signifikan. Jika dibandingkan data populasi tahun 2022 dengan data hasil sensus tahun 2023 Ternak Sapi turun 15 persen dan Kerbau 45 persen, Domba 76 persen, ayam kampung 73 persen dan Itik 52 persen, hanya pada komoditas Ayam Broiler yang populasi meningkat.

Penurunan populasi ternak ruminansia tahun 2023 terjadi karena pada tahun 2022 terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyebabkan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut Dan Kuku Berbasis Kewilayahan dan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1088/VII/2022

tentang Status Keadaan Darurat Bencana Akibat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Provinsi Riau yang membatasi hewan dan produk hewan keluar/masuk dari provinsi lain. Sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan daging Provinsi Riau lebih banyak mendatangkan ternak untuk dipotong dari provinsi lain. Ternak yang ada di Riau hanya sebagian kecil yang dipotong sekitar 20 persen dari pemenuhan kebutuhan daging, selebihnya pemenuhan daging berasal dari ternak yang didatangkan dari provinsi lain. Namun dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut, ternak dari luar provinsi sangat susah masuk sehingga untuk memenuhi kebutuhan daging, ternak lokal milik masyarakat di Riau banyak dijual dan dipotong sehingga populasi ternak tahun 2023 di Riau menjadi jauh berkurang.

Sedangkan untuk produksi daging semua komoditas rata-rata pertumbuhannya positif sebesar 14,10 persen. Rata-rata pertumbuhan produksi daging yang terbesar adalah pada pertumbuhan produksi Domba 37,79 persen, Kambing 31,35 persen dan Sapi 15,39 persen. Perkembangan populasi ternak dan produksi daging Provinsi Riau Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.74 Populasi Ternak dan Produksi Daging di Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No	Ternak	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1		Populasi (Ekor)					
	Sapi	204.433	209.661	210.784	178.360	186.502	-1,93
	Kerbau	29.309	31.991	27.499	14.938	20.740	-2,93
	Kambing	235.858	252.432	236.228	152.196	155.248	-8,24
	Domba	27.640	31.084	35.058	8.153	8.615	-11,46
	Ayam Broiler	29.631.354	45.490.839	54.706.154	57.396.720	58.544.654	20,17
	Ayam Kampung	6.284.335	6.882.281	6.426.495	1.725.419	1.741.689	-17,33
	Itik	232.517	218.142	209.016	98.476	108.598	-13,24
2		Produksi (Ton)					
	Sapi	8.737,30	8.948,70	10.759,38	14.256,47	15.166,61	15,39
	Kerbau	1.631,06	1.978,72	2.135,77	1.978,72	1.575,06	0,37
	Kambing	578,58	741,4	1.232,93	1.617,15	1.613,87	31,35
	Domba	19,88	15,58	33,33	46,13	55,56	37,79
	Ayam Broiler	44.915,11	52.242,14	61.214,93	52.242,14	61.676,33	9,22
	Ayam Kampung	2.869,21	1.481,14	2.353,33	1.481,14	2.017,61	2,42
	Itik	176,66	144,92	158,92	175	187	2,17

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Tabel 2.75 Rasio Produksi dan Konsumsi Daging Ruminansia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

Kode	Provinsi/Kabupaten /Kota	Indikator*			
		Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)	Perimbangan (Ton)	Rasio
14	Riau	20.369	28.931	-8.561	0,70
14.01	Kampar	3.136	3.848	-711	0,82
14.02	Indragiri Hulu	642	2.014	-1.371	0,32
14.03	Bengkalis	870	2.545	-1.674	0,34
14.04	Indragiri Hilir	1.089	2.945	-1.855	0,37
14.05	Pelalawan	1.013	1.784	-771	0,57
14.06	Rokan Hulu	1.636	2.552	-915	0,64
14.07	Rokan Hilir	507	2.895	-2.388	0,18
14.08	Siak	2.815	2.080	735	1,35
14.09	Kuantan Singingi	628	1.502	-874	0,42
14.10	Kepulauan Meranti	103	919	-816	0,11
14.71	Pekanbaru	7.321	4.415	2.907	1,66
14.72	Dumai	604	1.432	-828	0,42

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
*Angka Sementara

Produksi daging ruminansia Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 20.369 ton, sementara konsumsi sebesar 28.931 ton, sehingga rasio produksi dan konsumsi daging ruminansia sebesar 0,70 persen. Dengan pola konsumsi daging ruminansia tahun 2024 sebesar 4,3 kg/kap/tahun, pemenuhan kebutuhan daging dari produksi daerah hanya bisa terpenuhi 70 persen. Dari 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau, hanya Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak yang surplus daging.

Sedangkan pemenuhan kebutuhan daging unggas dengan pola konsumsi tahun 2024 sebanyak 11,1 kg/kap/tahun, maka pemenuhan kebutuhan daging unggas sebesar 86 persen. Untuk telur dengan pola konsumsi tahun 2024 sebanyak 8 kg/kap/tahun, maka pemenuhan kebutuhan dari produksi lokal baru sebesar 10 persen. Rasio produksi unggas dan telur per kabupaten/kota se-Provinsi Riau Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.76 Rasio Produksi dan Konsumsi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

Kode	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Indikator*			
		Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)	Perimbangan (Ton)	Rasio
14	Provinsi Riau	64.245	74.681	-10.436	0,86
14.01	Kampar	9.702	9.933	-230	0,98
14.02	Indragiri Hulu	5.008	5.199	-191	0,96
14.03	Bengkalis	1.544	6.569	-5.025	0,24
14.04	Indragiri Hilir	3.065	7.602	-4.536	0,40
14.05	Pelalawan	6.783	4.606	2.177	1,47
14.06	Rokan Hulu	7.607	6.588	1.019	1,15
14.07	Rokan Hilir	937	7.474	-6.537	0,13
14.08	Siak	3.667	5.370	-1.702	0,68
14.09	Kuantan Singingi	7.618	3.877	3.742	1,97
14.10	Kepulauan Meranti	176	2.372	-2.196	0,07
14.71	Pekanbaru	15.378	11.396	3.983	1,35
14.72	Dumai	2.756	3.697	-941	0,75

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
*Angka Sementara

Rasio produksi dan konsumsi unggas Provinsi Riau Tahun 2024 sebesar 0,86 persen, dimana kabupaten/kota yang mengalami surplus daging unggas adalah Kuantan Singingi, Pelalawan dan Pekanbaru, sedangkan kabupaten yang masih kekurangan yaitu Kepulauan Meranti, Rokan Hilir dan Bengkalis. Selanjutnya rasio produksi dan konsumsi telur Provinsi Riau Tahun 2024 sebesar 0,10 persen, dimana seluruh kabupaten/kota mengalami defisit telur. Sehingga penting untuk menjaga ketersediaan pangan tidak hanya dari sisi produksi akan tetapi stock pangan dengan menjaga kelancaran distribusi logistik dari provinsi tetangga.

Tabel 2.77 Rasio Produksi dan Konsumsi Telur Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2024

Kode	Kabupaten/ Kota	Indikator*			
		Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)	Perimbangan (Ton)	Rasio
14	Provinsi Riau	5.548	53.824	-48.276	0,10
14.01	Kampar	936	7.159	-6.222	0,13
14.02	Indragiri Hulu	494	3.747	-3.253	0,13
14.03	Bengkalis	477	4.734	-4.257	0,10
14.04	Indragiri Hilir	408	5.479	-5.071	0,07
14.05	Pelalawan	323	3.320	-2.997	0,10
14.06	Rokan Hulu	577	4.748	-4.171	0,12
14.07	Rokan Hilir	645	5.387	-4.741	0,12
14.08	Siak	600	3.870	-3.270	0,16
14.09	Kuantan Singingi	281	2.794	-2.513	0,10
14.10	Kep. Meranti	384	1.710	-1.326	0,22
14.71	Pekanbaru	320	8.213	-7.893	0,04
14.72	Dumai	103	2.664	-2.562	0,04

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Selanjutnya, upaya peningkatan produksi ternak tidak terlepas dari sisi kesehatan hewan ternak. tabel berikut menunjukkan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di Provinsi Riau dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

Tabel 2.78 Jumlah Kejadian Penyakit dan Jumlah Kasus Hewan Sakit Tahun 2020-2024

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kejadian Penyakit dan Jumlah Kasus Hewan Sakit									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Kejadian	Kasus	Kejadian	Kasus	Kejadian	Kasus	Kejadian	Kasus	Kejadian	Kasus
1	PPR	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-
2	PMK	-	-	-	-	746	5228	126	485	71	519
3	LSD	2	7	-	-	351	732	35	89	23	49
4	ASF	3	94	1	12	-	-	6	407	2	120
5	CSF	3	41	-	-	-	-	1	18	-	-
6	IBR	4	13	-	-	1	1	3	8	-	-
7	Br	3	9	2	2	-	-	16	16	6	6
8	JD	34	103	49	115	28	60	27	106	37	97
9	Ra	180	180	309	316	263	263	754	26	42	42
10	SE	-	-	-	-	13	434	50	1025	17	303
11	TB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sal	-	-	-	-	5	6	9	13	-	-
13	Lep	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-
14	AI	-	-	-	-	-	-	12	2261	-	-
15	Surra	10	26	12	17	10	11	6	12	7	8
Jumlah		240	474	374	463	1419	6737	1046	4472	205	1144

Sumber : Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS)

Keterangan :

PPR : *Pes de Pestis Ruminants*

PMK : Penyakit Mulut dan Kuku

LSD : *Lumpy Skin Disease*

ASF : *African Swine Fever*

CSF : *Clasical Swine Fever / Hog Cholera*

IBR : *Infectious Bovine Rhinotracheitis*

Br : *Brucellosis*

JD : *Jembrana*

Ra : *Rabies*

QF : *Q Fever*

SE : *Septicaemia Epizootica*

TB : *Tuberculosis*

SAL : *Salmonellosis*

LEP : *Leptospirosis*

AI : *Avian Influenza*

Surra : *Trypanosomiasis*

HEL : *Helminthiasis / Kecacingan*

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 121/KPTS/PK.320/M/03/2023, tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis, maka telah ditetapkan 21 jenis penyakit hewan strategis yaitu Anthrax, Rabies, Salmonellosis, Brucellosis, Avian Influenza, Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, Septicaemia Epizootica, Infectious Bovine Rhinotracheitis, Leptospirosis, Jembrana, Surra, Hog Cholera, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), African Swine Fever (ASF), Bovine Viral Diarrhea, Zoonotic Coronavirus, Zoonotic Tuberculosis, dan 3 penyakit yang belum ada BSE, RVF dan PPR. Diantara penyakit tersebut sebanyak 14 Jenis penyakit telah dilaporkan di Provinsi Riau seperti tertera di tabel.

Pada tahun 2024 telah dilaporkan 205 laporan kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis, dengan jumlah hewan kasus sebanyak 1.144 ekor. Jumlah ini menurun cukup signifikan dibandingkan tahun 2023 yaitu dengan 1.046 laporan kejadian dengan 4.472 ekor hewan kasus, atau menurun sebanyak 74% dari total kasus tahun 2023. Hal ini disebabkan antara tahun 2022 dan 2023 Provinsi Riau dilanda wabah penyakit PMK, LSD dan serta munculnya *oubreak* penyakit endemik seperti SE, *Avian Influenza* dan ASF (*re-emerging disease*) di beberapa kabupaten kota pada pertengahan Januari hingga awal Juni, menyebabkan tingginya laporan kejadian dan kasus PHMS pada tahun tersebut.

Kenaikan kasus penyakit pada tahun 2024 terjadi pada penyakit PMK sebesar 7 persen dan penyakit rabies sebesar 62 persen. Sedangkan penyakit lainnya umumnya terjadi penurunan kasus yang sangat signifikan seperti LSD yang turun hingga 45 persen, ASF turun hingga 71 persen, *Brucellosis* turun 63 persen, SE turun 70 persen, Surra turun 33 persen dan *Helminthiasis* turun sebesar 78 persen, sementara jembrana turun sebesar 8 persen. Penurunan kasus ini tidak terlepas dari program vaksinasi, pengobatan pemberian multivitamin yang dilakukan secara berkesinambungan oleh petugas lapangan yang di support baik oleh Pemerintah Pusat, Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan di kabupaten/kota.

2.2.1.20 Kehutanan

Berdasarkan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, fungsi pokok hutan dibagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan saat ini cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu hutan harus dipertahankan secara optimal dengan menjaga daya dukung secara lestari dan dikelola secara berkelanjutan.

Luas kawasan hutan Provinsi Riau berdasarkan SK 903/MenLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 sebesar 5.406.992,00 hektar. Kawasan Hutan produksi tetap (HP) merupakan yang terluas yaitu sebesar $\pm 2.339.578,00$ hektar atau 26,05 persen dari total luas kawasan hutan. Selanjutnya Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas $\pm 1.185.433,00$ hektar atau 13,20 persen, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas $\pm 1.017.318,00$ hektar atau 11,33 persen, Hutan Konservasi seluas $\pm 630.753,00$ hektar atau seluas 7,02 persen dan Hutan Lindung seluas $\pm 233.910,00$ hektar atau 2,60 persen dari total luas kawasan hutan.

Dalam perjalanannya terdapat perubahan tata batas hutan sehingga luas kawasan hutan Provinsi Riau diperbaharui dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 sebesar $\pm 5.353.985$ hektar. Kawasan Hutan produksi tetap (HP) merupakan yang terluas yaitu sebesar $\pm 2.330.867,00$ hektar atau 25,95 persen dari total luas kawasan hutan. Selanjutnya Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas $\pm 1.149.471,00$ hektar atau 12,80 persen, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas $\pm 1.013.201,00$ hektar atau 11,28 persen, Hutan Konservasi seluas $\pm 630.640,00$ hektar atau seluas 7,02 persen dan Hutan Lindung seluas $\pm 229.806,00$ hektar atau 2,56 persen dari total luas kawasan hutan. Hingga saat ini belum ada perubahan terkait Luas Kawasan Hutan Provinsi Riau, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.79 Kawasan Hutan di Provinsi Riau Berdasarkan SK 903/MenLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 dan SK Nomor SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

No	Fungsi Kawasan	SK.903/2016		SK.6612/2021	
		Luas	(%)	Luas	(%)
1	Hutan Konservasi	630.753	7,02	630.640	7,02
2	Hutan Lindung	233.910	2,60	229.806	2,56
3	Hutan Produksi Terbatas	1.017.318	11,33	1.013.201	11,28
4	Hutan Produksi Tetap	2.339.578	26,05	2.330.867	25,95
5	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	1.185.433	13,20	1.149.471	12,80
	Jumlah KH	5.406.992	60,21	5.353.985	59,62
6	Areal Penggunaan Lain	3.477.770	38,72	3.530.777	39,31
7	Perairan	96.067	1,07	96.067	1,07
	Jumlah Non KH	3.573.837	39,79	3.626.844	40,38
	Jumah Daratan	8.980.829	100	8.980.829	100

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rasio kawasan lindung terhadap total kawasan hutan di Provinsi Riau ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana pada tahun 2020 rasio kawasan lindung terhadap kawasan hutan sebesar 15,99 persen dan penetapan kawasan hutan tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 16,07 persen. Peningkatan rasio kawasan lindung ini tidak diikuti dengan peningkatan luas hutan lindung dan luas hutan konservasi, hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah kawasan hutan di Provinsi Riau sebagai pembagi rasio kawasan lindung. Perkembangan luas kawasan lindung disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.80 Rasio Kawasan Lindung terhadap Total Luas Kawasan Hutan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Kawasan Lindung (Ha)			Kawasan Hutan (Ha)	Rasio Kawasan Lindung terhadap Kawasan Hutan (%)
		Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Jumlah		
1	2020	233.910,00	630.753,00	864.663,00	5.406.992,00	15,99
2	2021	229.806,00	630.640,00	860.446,00	5.353.985,00	16,07
3	2022	229.806,00	630.640,00	860.446,00	5.353.985,00	16,07
4	2023	229.806,00	630.640,00	860.446,00	5.353.985,00	16,07
5	2024	229.806,00	630.640,00	860.446,00	5.353.985,00	16,07

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

2.2.2 Kesehatan untuk Semua

2.2.2.1 Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur harapan hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk umumnya dan derajat

kesehatan pada khususnya. Perkembangan umur harapan hidup tahun 2020-2024 di Provinsi Riau terus meningkat dari 71,6 tahun menjadi 74,41 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,98 persen per tahun. Pada tahun 2024, pencapaian umur harapan hidup (74,41 tahun) di Provinsi Riau lebih tinggi dari umur harapan hidup Nasional (74,15 tahun). Oleh karena itu, program dan kegiatan kesehatan yang terkait untuk meningkatkan umur harapan sudah memberikan dampak terhadap peningkatan UHH di Provinsi Riau, untuk tahun mendatang program dan kegiatan terkait masih tetap dilaksanakan. Pada tingkat kabupaten/kota terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota yang memiliki UHH diatas UHH Provinsi Riau pada tahun 2024, yakni Kota Pekanbaru (75,89 tahun), Kabupaten Pelalawan (74,63 tahun) dan Kabupaten Kampar (74,61 tahun). Hal ini dapat dilihat banyaknya pelayanan kesehatan yang terpusat di Kota Pekanbaru sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Terdapat 3 kabupaten/kota yang perlu mendapatkan prioritas utama dalam peningkatan UHH dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar 2.30 Umur Harapan Hidup Provinsi Riau Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar 2.31 Umur Harapan Hidup per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024

2.2.2.2 Indeks Kualitas Keluarga (IKK)

Indeks Kualitas Keluarga merupakan indeks yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan keluarga dan selanjutnya mempersiapkan penyusunan intervensi kebijakan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. IKK merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan kualitas keluarga di Indonesia dan menjadi tolak ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan kualitas keluarga di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penghitungan IKK dimulai pada Tahun 2020 dilakukan atas Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. Perkembangan Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.81 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Riau
Tahun 2020-2023

Provinsi	Tahun				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	
Riau	71,36	74,36	77,07	77,39	2,75
Nasional	70,93	73,43	76,08	77,00	2,78

Sumber: Kementerian PPPA

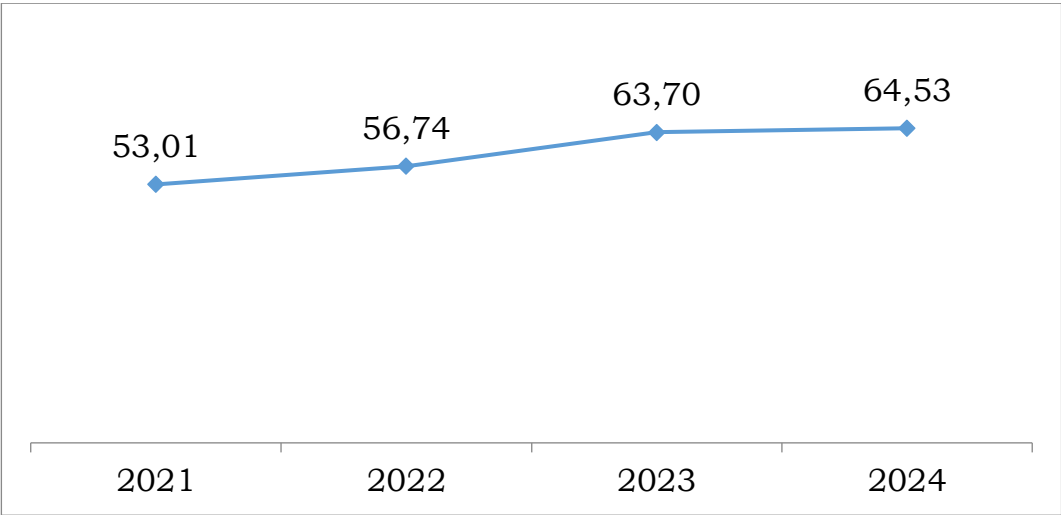
Capaian IKK Provinsi Riau dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,75 persen, namun capaian IKK provinsi Riau ini masih dibawah rata-rata pertumbuhan Nasional sebesar 2,78 persen.

2.2.2.3 Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga atau IBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga Tingkat Partisipasi Kerja Perempuan untuk semua wilayah di Indonesia. Dimensi Ketentraman adalah kondisi keluarga yang didalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga. Dimensi Kemandirian adalah kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain. Adapun dimensi kebahagiaan adalah kondisi keluarga yang

didalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasikan diri (Hurlock: 2014, seligmen :2002, chaplin :2008)

Indeks Pembangunan Keluarga atau IBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga rentan, berkembang atau berkualitas. Nilai Indeks Pembangunan Keluarga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut a) kurang baik (rentan) nilainya di bawah 40; b) cukup baik (berkembang) nilainya antara 40-70; c) baik (berkualitas di atas 70).



Sumber: Pendataan Keluarga BKKBN 2021-2024

Gambar 2.32 Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) di Provinsi Riau Tahun 2021-2024

Pada gambar di atas diketahui bahwa capaian IBangga di Provinsi Riau dari tahun 2021 sampai dengan 2024 terus mengalami peningkatan sebesar 11,52 poin atau 17,85 persen. Ini berarti capaian IBangga di Provinsi Riau sudah mencapai tahap cukup baik (berkembang). Upaya peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dilakukan melalui berbagai program lintas sektoral yang fokus pada ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga, seperti sosialisasi, koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, penyediaan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan keluarga.

2.2.2.4 Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju

pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu serta meningkatkan kesehatan reproduksi. Salah satu Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan instansi pembina program KB yang berkomitmen meningkatkan cakupan akseptor KB, terutama untuk kepesertaan KB Modern. Metode Kontrasepsi Modern terdiri dari *Intrauterine Device* (IUD), implant, Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP), pil, suntik juga kondom. Dengan cakupan kepesertaan KB yang terus meningkat diharapkan laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan, angka kematian ibu dan bayi diturunkan sehingga Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) dapat diwujudkan.

Prevalensi Kontrasepsi Modern atau *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) adalah proporsi wanita kawin usia 15-19 tahun Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern saat pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk menunda, mengatur jarak kelahiran atau membatasi jumlah kelahiran dibandingkan dengan jumlah seluruh PUS. Provinsi Riau telah melakukan berbagai strategi dalam upaya-upaya meningkatkan capaian mCPR, yaitu dengan memperluas jaringan kemitraan atau jaringan pelayanan KB hingga ke pelosok desa wilayah terpencil dan perbatasan, mengoptimalkan KB pasca persalinan dan pasca keguguran, memberikan pelayanan KB gratis, melakukan pembinaan ke kelompok-kelompok kegiatan (Poktan) untuk meningkatkan kesetaraan ber-KB, mempermudah akses dan cakupan pelayanan KB.

Tabel 2.82 Perkembangan *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Kode	Provinsi/Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
14	Riau	66,89	71,29	51,39	63,48	64,30
14.01	Kampar	62,76	80,97	50,69	60,91	58,80
14.02	Indragiri Hulu	69,89	69,02	58,41	73,37	67,10
14.03	Bengkalis	68,25	69,92	43,86	63,45	78,30
14.04	Indragiri Hilir	64,10	64,74	56,31	64,85	63,70
14.05	Pelalawan	60,24	71,49	56,21	66,21	68,20
14.06	Rokan Hulu	74,33	74,87	50,17	57,95	59,20
14.07	Rokan Hilir	76,51	73,24	46,31	53,14	63,20
14.08	Siak	64,26	68,04	53,34	63,54	58,20
14.09	Kuantan Singingi	74,31	78,76	62,30	69,23	71,80
14.10	Kepulauan Meranti	69,25	70,44	50,74	62,53	67,70
14.71	Pekanbaru	61,31	65,05	46,89	66,37	61,30
14.72	Dumai	75,51	75,12	53,83	65,72	68,40

Sumber : Pendataan Keluarga BKKBN Provinsi Riau (diolah)

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian mCPR di Provinsi Riau mengalami fluktuatif. Tahun 2020 capaian mCPR Provinsi Riau sebesar 66,89 persen pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 71,29 persen kemudian turun secara signifikan menjadi 51,39 persen pada tahun 2022 dan kemudian naik lagi menjadi 63,48 persen pada tahun 2023, selanjutnya meningkat lagi tahun 2024 menjadi 64,30 persen.

Terjadinya penurunan yang signifikan pada tahun 2021 ke tahun 2022 disebabkan sumber data yang digunakan dalam penghitungan mCPR di Provinsi Riau. Jika pada tahun sebelum tahun 2022 penghitungan mCPR di Provinsi Riau menggunakan cakupan data dari statistik rutin atau yang sering disebut data R/R di mana data ini adalah hasil rekapan pelayanan KB dari lini lapangan secara manual maka tahun 2022 sumber data bermigrasi dengan menggunakan data mCPR bersumber dari aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dimana data ini bersifat *realtime* dan bisa di perbaharui kapan saja. Jadi penurunan data terutama pada tahun 2021 ke tahun 2022 tersebut lebih disebabkan belum semua hasil pelayanan KB masuk ke dalam aplikasi Sistem Informasi Keluarga karena masih merupakan aplikasi yang baru.

Mengacu pada capaian mCPR Provinsi Riau pada tabel di atas di mana pada tahun 2024 capaiannya adalah sebesar 64,30 persen atau setara dengan sekitar 64 dari 100 pasangan usia subur telah menggunakan alat kontrasepsi modern untuk perencanaan kehamilan, mengakhiri kehamilan atau mengatur jarak kehamilan. Lebih dari separuh Pasangan Usia Subur (PUS) di Provinsi Riau yang telah menggunakan metode kontrasepsi modern untuk perencanaan kehamilan, mengakhiri kehamilan atau mengatur jarak kehamilan memberi bukti bahwa program KB saat ini sudah banyak diterima masyarakat.

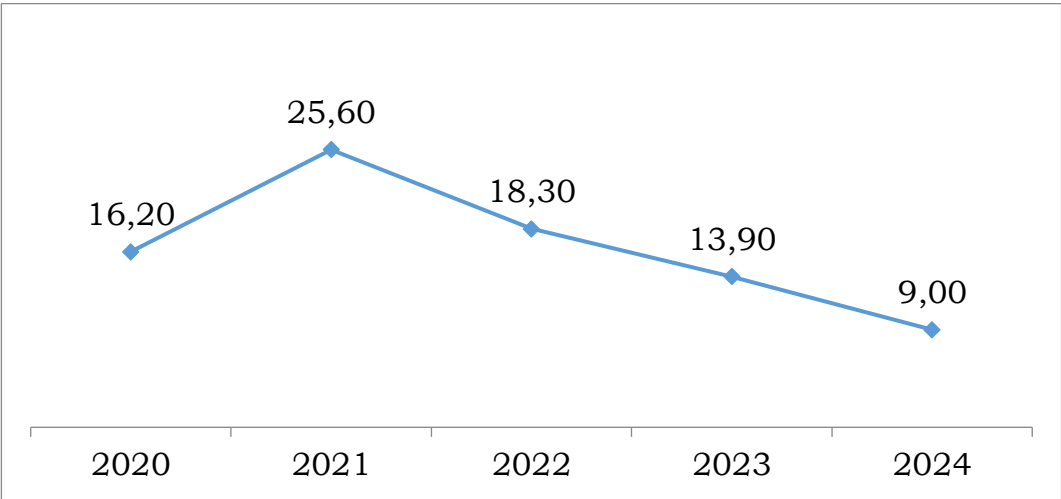
Berdasarkan tabel di atas juga diketahui bahwa pada tahun 2024 masih terdapat 5 (lima) kabupaten di Provinsi Riau dengan capaian rendah yaitu capaian mCPR di bawah rata-rata capaian Provinsi. Kelima kabupaten tersebut adalah Kabupaten Siak dengan capaian 58.20, Kabupaten Kampar dengan capaian sebesar 58.80 persen, Kabupaten Rokan Hulu dengan capaian sebesar 59.20 persen, Kota Pekanbaru dengan capaian sebesar 61.30 persen dan Kabupaten Rokan Hilir dengan capaian sebesar 63,20 persen. Masih rendahnya mCPR di 5 (lima) kabupaten tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keterbatasan akses ke tempat pelayanan KB, pengetahuan yang masih rendah mengenai manfaat KB, kondisi geografis, ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang terbatas, SDM serta sarana dan prasarana yang kurang hingga ke faktor budaya dan agama.

Adapun seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan minim resiko efek samping terhadap kesehatan pemakaian dan memberikan kenyamanan bagi penggunaanya.

2.2.2.5 *Unmet Need* (Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi)

Unmet Need atau permintaan KB tetapi tidak terpenuhi didefinisikan sebagai Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin menjarangkan kehamilan atau membatasi kelahiran tetapi tidak

memakai kontrasepsi. Para ibu yang mengalami *Unmet Need* beresiko mengalami kehamilan yang tidak diinginkan yang dikhawatirkan pada rendahnya kepedulian akan perawatan kehamilan dan perawatan bayi yang dilahirkan dan tumbuh kembang anak. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) tipe yakni kehamilan yang belum waktunya (*mistimed*) dan kehamilan yang tidak diinginkan sama sekali (*unwanted*). Baik kejadian *Unmet Need* maupun kejadian yang tidak diinginkan mengindikasikan kegagalan perencanaan kehamilan dan tentunya ini menjadi perhatian serius bagi para pengelola program.



Sumber data: LAKIP Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2020-2024
Gambar 2.33 Perkembangan *Unmet Need* di Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Dari data pada gambar tersebut di atas diketahui bahwa angka *Unmet Need* di Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 angka *Unmet Need* di Provinsi Riau sebesar 16,20 persen kemudian naik menjadi 25,60 persen pada tahun 2021, namun turun lagi menjadi 18,30 persen pada tahun 2022 dan kemudian turun lagi menjadi 13,90 persen pada tahun 2023, selanjutnya pada tahun 2024 turun lagi menjadi 9,00 persen.

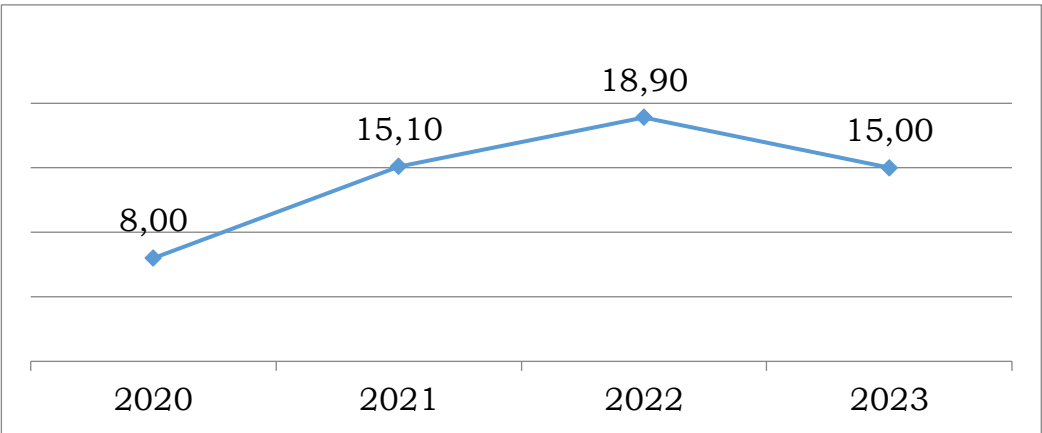
Meningkatnya angka *Unmet Need* pada tahun 2022 disebabkan oleh pandemi *covid-19* dimana mengakibatkan pelayanan KB terhambat karena harus melaksanakan *social distancing*, kebijakan *work from home*, dan juga ketakutan atau kekhawatiran (*panic bullying*) baik pada pemberi pelayanan maupun yang akan dilayani mengenai untuk datang ke fasilitas

kesehatan. Hal ini mengakibatkan makin meningkatkan angka *Unmet Need* di Provinsi Riau.

Upaya menurunkan angka *Unmet Need* yang tepat sasaran melalui pemenuhan permintaan KB yang berkualitas akan menghindarkan kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak tepat waktu (*mistimed*). Selain untuk menjaga kesehatan ibu dan menghindari terjadinya kematian ibu hamil, secara makro penurunan *Unmet Need* berdampak pada penurunan *Total Fertility Rate*.

2.2.2.6 Age Specific Fertility Rate (ASFR) Usia 15-19 Tahun

Angka Kelahiran Menurut Umur adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1.000 wanita pada kelompok umur tertentu. Kegunaan indikator ASFR merupakan dasar untuk mengembangkan proyeksi penduduk, mengetahui jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di masa yang akan datang. Manfaat lain adalah untuk mengetahui jumlah kelahiran menurut kelompok umur tertentu sehingga diketahui apakah kelahiran pada kelompok umur tertentu tersebut beresiko atau tidak. Khusus untuk ASFR usia 15-19 tahun juga dapat dimanfaatkan untuk melihat keberhasilan program pendewasaan usia perkawinan dan juga untuk mengetahui mengenai kesehatan reproduksi remaja khususnya perempuan usia di bawah 20 tahun.



Sumber: LAKIP Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2020-2023
Gambar 2.34 Perkembangan Age Specific Fertility Rate (ASFR) Usia 15-19 Tahun di Provinsi Riau Tahun 2020-2023

Pada gambar di atas diketahui bahwa angka *Age Spesific Fertility Rate* 15-19 tahun di Provinsi Riau kurun waktu 2020-2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 angka ASFR usia 15-19

tahun adalah sebesar 8 (delapan) kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun. Angka kemudian naik menjadi 15,1 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun pada tahun 2021 kemudian naik lagi menjadi 18,9 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun pada tahun 2022. Sementara itu pada tahun 2023 angkanya menurun lagi menjadi 15 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun. Meningkatnya angka ASFR 15-19 tahun pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 kemungkinan diakibatkan oleh pandemi *covid-19* yang dapat mengakibatkan akses perempuan terhadap pendidikan menjadi terbatas atau meningkatnya angka putus sekolah, perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada menurunnya pendapat per kapita keluarga sehingga hal ini berdampak pada meningkatnya kejadian pernikahan dini pada usia remaja.

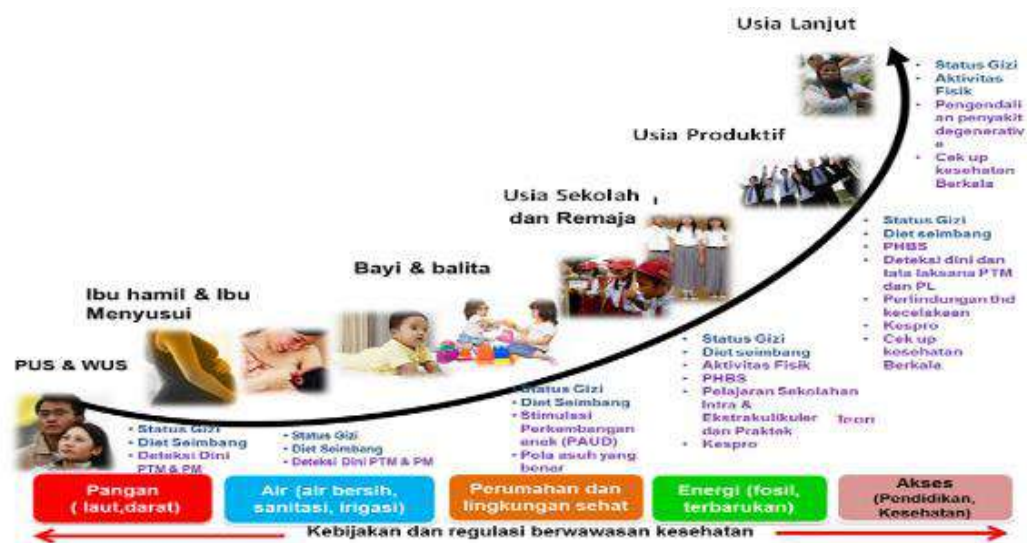
Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka ASFR usia 15-19 tahun antara lain meningkatkan perluasan akses pendidikan kepada kaum perempuan, meningkatkan sosialisasi dan pemahaman kepada generasi muda mengenai pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan juga meningkatkan kesadaran orang tua atau keluarga untuk tidak mengawinkan anaknya pada usia di bawah 19 tahun.

2.2.2.7 Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Keluarga adalah suatu lembaga yang merupakan satuan (unit) terkecil dari masyarakat, terdiri atas ayah, ibu dan anak. Keluarga yang seperti ini disebut rumah tangga atau keluarga inti, sedangkan keluarga yang anggotanya mencakup juga kakek dan atau nenek atau individu lain yang memiliki hubungan darah, bahkan juga tidak memiliki hubungan darah (misalnya pembantu rumah tangga), disebut keluarga luas (*extended family*). Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, maka derajat kesehatan rumah tangga atau keluarga menentukan derajat kesehatan masyarakatnya.

Derajat kesehatan keluarga sangat ditentukan oleh Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dari keluarga tersebut. Untuk mencapai keluarga yang sehat harus menggunakan pendekatan siklus hidup sebagaimana gambar di bawah. Peningkatan dan

pengembangan peran desa dan kelurahan dalam pembudayaan PHBS adalah memberdayakan keluarga agar mampu mempraktikkan PHBS. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.



Gambar 2.35 Pendekatan Siklus Hidup untuk mencapai Keluarga Sehat

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) adalah sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sehat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dengan melakukan kunjungan keluarga dan melakukan intervensi sesuai permasalahan kesehatan yang dihadapi keluarga dan masyarakat, yang diukur melalui indikator keluarga sehat.

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan kedua belas indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1 yang dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yakni keluarga sehat bila nilai IKS > 0.8, keluarga pra sehat bila nilai IKS 0.5 < 0.8 dan keluarga tidak sehat bila nilai IKS < 0.5. Adapun 12 indikator pembentuk Indeks keluarga sehat yakni:

1. Keluarga mengikuti program KB, dimana tidak sekedar membatasi jumlah anak tapi juga meningkatkan kesehatan ibu

dan anak, terkait ASI, kecukupan pemenuhan gizi yang berkualitas, maupun pola asuh.

2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai didukung oleh tenaga kesehatan yang kompeten sehingga ibu dan bayi bisa mendapatkan penanganan segera jika terjadi komplikasi. Selain itu, bayi juga akan mendapat IMD (Inisiasi Menyusu Dini) yang baik untuk pertumbuhannya.
3. Bayi mendapat imunisasi dasar yang lengkap, berfungsi untuk melindungi anak dari penyakit berbahaya seperti polio, difteri, hepatitis B, hingga meningitis.
4. Bayi mendapat ASI eksklusif, diberikan hingga anak berusia dua tahun. Pemberian ASI menunjang tumbuh kembang yang optimal. Bayi yang diberi ASI pun tidak mudah sakit. Sebab, ASI merupakan sumber makanan terbaik untuk bayi. Proses pemberian ASI juga baik untuk membangun hubungan emosional antara ibu dan anak.
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, sehingga dapat dipantau perkembangannya, dan jika tidak sesuai dengan grafik pertumbuhan dapat segera dilakukan perbaikan.
6. Penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar, apabila tidak segera mendapat pengobatan, pasien bukan hanya membahayakan dirinya, tapi juga anggota keluarga yang lain. Oleh karenanya, jika ada anggota keluarga yang menunjukkan gejala TBC, segera dilakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan.
7. Penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan, hipertensi atau tekanan darah rendah adalah penyakit berbahaya yang sering disepelekan karena tidak bergejala. Padahal, dampaknya bisa fatal. Pencegahan hipertensi bisa dilakukan dengan metode CERDIK: cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stress.
8. Penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapat pengobatan. Gangguan jiwa dapat menurunkan kualitas hidup seseorang. Bila ada anggota keluarga yang memiliki tanda-

tanda gangguan jiwa, seperti perubahan emosi atau perilaku, dampingi dan ajak dia untuk berobat guna mendapatkan penanganan yang tepat.

9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok, Dalam satu barang rokok, terdapat sekitar 4.000 zat kimia beracun. Dampaknya bahkan tidak hanya merugikan orang yang merokok (perokok aktif), tapi juga orang-orang di sekitarnya (perokok pasif). Untuk itu, sebaiknya kebiasaan merokok dikurangi atau dihentikan.
10. Keluarga mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), seluruh anggota keluarga mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan.
11. Keluarga memiliki akses ke sarana air bersih, dengan sumber air harus selalu dijaga kebersihannya dan dilengkapi saluran pembuangan air, dimana tempat penyimpanan air juga harus bebas kotoran dan lumut. Letak sumber air harus berjauhan dengan jamban dan pembuangan sampah (minimal 10 meter).
12. Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih, dengan buang air kecil dan besar di jamban, sumber air dan tanah pun tidak tercemar. Ini akan menghindarkan keluarga dari penyakit diare, kolera, disentri, tifus, hingga infeksi saluran pencernaan.

Nilai IKS ini juga bisa menunjukkan nilai tiap-tiap indikator yang terdapat dalam 12 indikator tersebut. Intervensi dapat didasarkan pada nilai IKS per indikator, dapat juga berdasarkan IKS wilayah. Intervensi berdasarkan nilai IKS per indikator didasarkan dan disesuaikan dengan standar pada masing-masing program sesuai dengan indikator tersebut, misalnya nilai IKS untuk indikator penderita hipertensi mendapatkan pengobatan sesuai standar, maka intervensinya disesuaikan dengan pedoman penanggulangan penyakit tidak menular dan sesuai dengan panduan praktik klinik di masing-masing tingkat fasilitas pelayanan kesehatan.

Tabel 2.83 Indeks Keluarga Sehat Provinsi Riau Tahun 2023 – 2024

Kode	Provinsi/Kabupaten/ Kota	2023	2024
14	Riau	0.192	0.193
14.01	Kampar	0.354	0.358
14.02	Indragiri Hulu	0.172	0.174
14.03	Bengkalis	0.125	0.127
14.04	Indragiri Hilir	0.072	0.073
14.05	Pelalawan	0.206	0.206
14.06	Rokan Hulu	0.192	0.192
14.07	Rokan Hilir	0.090	0.090
14.08	Siak	0.135	0.136
14.09	Kuantan Singingi	0.105	0.105
14.10	Kepulauan Meranti	0.107	0.108
14.71	Pekanbaru	0.298	0.298
14.72	Dumai	0.194	0.194

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Indeks keluarga sehat (IKS) Provinsi Riau Tahun 2023 sebesar 0.192 poin dan hanya meningkat 0,001 poin pada tahun 2024 menjadi 0.193, dimana Provinsi maupun kabupaten/kota se- Provinsi Riau masuk dalam kategori keluarga tidak sehat. Melihat indikator dengan capaian persentase yang sangat rendah secara konsisten di kabupaten/kota dapat menjadi penyebab utama rendahnya IKS yakni:

- Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar (Indikator 6)
- Penderita Hipertensi yang berobat teratur (Indikator 7)
- Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan (Indikator 8)
- Keluarga mengikuti program KB (Indikator 1)
- Keluarga sudah menjadi anggota JKN (Indikator 10)
- Anggota keluarga tidak ada yang merokok (Indikator 9)

2.2.2.8 Fasilitas dan Rasio Pelayanan Kesehatan

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar, artinya wajib diselenggarakan oleh semua level pemerintah daerah baik provinsi, maupun kabupaten/kota. Bentuk pelayanan dasar urusan kesehatan meliputi upaya kesehatan, sumber daya kesehatan dan pengelolaan kesehatan.

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dengan indikatornya adalah semakin baiknya rasio antara sarana dan prasarana dengan jumlah penduduk. Adapun perkembangan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan rasio pelayanan kesehatan di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.84 Jumlah Fasilitas dan Rasio Pelayanan Kesehatan di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	6.394.087	6.493.603	7.181.300	6.642.874	6.728.058
2	Jumlah Balita (jiwa)	748.154	640.238	640.001	641.043	590.700
3	Posyandu (unit)	5.569	5.707	5.701	5.667	5.686
4	Puskesmas	228	234	238	239	241
5	Puskesmas Pembantu	1.033	1.059	1.116	1.069	996*
6	Rumah Sakit	74	74	76	79	82
7	Tempat Tidur Rumah Sakit	6.847	7.960	8.144	9.205	8673
8	Rasio Puskesmas (per 30.000 penduduk)	0,96	0,99	0,99	1,08	0,93
9	Rasio Tempat Tidur RS (per 1000 penduduk)	0,96	1,13	1,15	1,39	1,28

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Riau
*Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Dari tabel di atas, jumlah posyandu di Provinsi Riau selama lima tahun terakhir (2020-2024) mengalami peningkatan, namun perlu penguatan pelayanan Posyandu 6 SPM kedepannya. Dari sisi fasilitas kesehatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan, baik dari sisi jumlah puskesmas dan Rumah Sakit maupun dari sisi rasio per penduduk. Rasio tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk mengalami peningkatan, namun jumlah tempat tidur rumah sakit tidak seimbang dengan pertambahan penduduk.

Pada tahun 2024 terdapat penurunan jumlah tempat tidur rumah sakit dari 9.205 tempat tidur pada tahun 2023 menjadi 8.673 tempat tidur pada tahun 2024. Hal ini terjadi karena berlakunya kebijakan Kelas Rawat Inap Standar berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK.02.02/1/1811/2022 tentang Petunjuk Teknis Kesiapan Sarana Prasarana Rumah Sakit Dalam Penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional.

Kualitas pelayanan kesehatan digambarkan dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) yang sudah memenuhi standar layanan kesehatan atau terakreditasi.

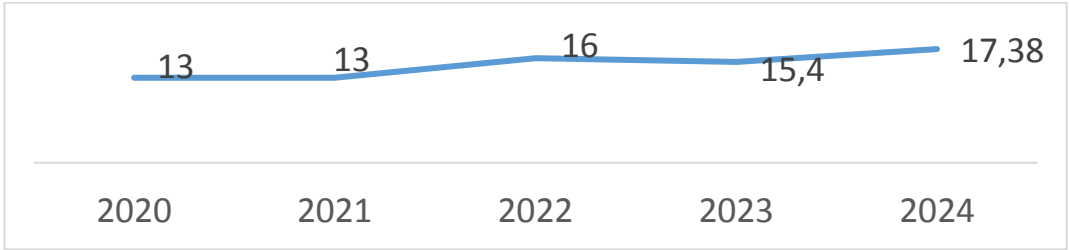
Kode	Kabupaten/ Kota	Rumah Sakit			Puskesmas		
		Jumlah Rumah Sakit (RS)	RS Terakreditasi	%	Jumlah Puskesmas	Puskesmas Terakreditasi	%
14.01	Kampar	8	8	100	31	31	100
14.02	Indragiri Hulu	4	4	100	20	20	100
14.03	Bengkalis	6	6	100	20	19	95
14.04	Indragiri Hilir	5	4	80	30	30	100
14.05	Pelalawan	4	4	100	14	14	100
14.06	Rokan Hulu	6	5	83,3	23	22	95,65
14.07	Rokan Hilir	6	6	100	21	21	100
14.08	Siak	3	3	100	16	15	93,75
14.09	Kuantan Singingi	2	2	100	25	25	100
14.10	Kepulauan Meranti	1	1	100	10	10	100
14.71	Pekanbaru	31	31	100	21	21	100
14.72	Dumai	6	6	100	10	10	100
Jumlah		82	80	97,56	241	238	99

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2025

Dari tabel di atas, pada tahun 2024 sudah 80 rumah sakit dari 82 rumah sakit di Provinsi Riau yang sudah terakreditasi atau sebesar 97,56 persen. Masih terdapat masing-masing 1 rumah sakit di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu atau sebesar 2,44 persen rumah sakit yang belum terakreditasi. Untuk akreditasi puskesmas sudah 238 puskesmas dari 241 puskesmas yang sudah terakreditasi, masih terdapat sebanyak 3 puskesmas yang belum terakreditasi, masing-masing 1 puskesmas di Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis.

Rasio Dokter Spesialis di Provinsi Riau

Rasio tenaga dokter spesialis di Provinsi Riau pada tahun 2024 adalah sebesar 17,38 per 100.000 penduduk meningkat bila dibandingkan tahun 2023 adalah 15,4 per 100.000 penduduk. ini artinya pada tahun 2023 ini di Provinsi Riau untuk 100.000 penduduk dilayani oleh 17,38 orang dokter spesialis. Rasio dokter spesialis tahun 2024 ini merupakan rasio tertinggi selama lima tahun terakhir (2020-2024). Dan selama 5 tahun ini juga rasio tenaga dokter spesialis sudah mencapai target ketersediaan dokter spesialis di Provinsi Riau (11 per 100.000 penduduk).



Gambar 2.36 Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Untuk penyebaran tenaga dokter spesialis di Provinsi Riau tahun 2024, ada 3 (tiga) kabupaten/kota yang telah mencapai target rasio dokter spesialis (11 per 100.000 penduduk), tenaga dokter spesialis terbanyak ditemui di Kota Pekanbaru (62,1 per 100.000 penduduk) meningkat pada tahun 2023 (55 per 100.000 penduduk). Selanjutnya Kota Dumai (21,9 per 100.000 penduduk) dan diikuti Kabupaten Bengkalis dengan rasio tenaga dokter spesialis 14,9 per 100.000 penduduk.

Meskipun rasio dokter spesialis ini secara provinsi telah melampaui target, namun permasalahannya pada penyebarannya dokter spesialis yang belum merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau. Penempatan dokter spesialis masih terfokus di Ibukota provinsi saja yakni di Kota Pekanbaru, rasio dokter spesialis di Kota Pekanbaru ini sangat jauh dibandingkan dengan rasio dokter spesialis di kabupaten/kota lainnya.

Tabel 2.86 Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk Provinsi Riau Tahun 2024

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Dokter Spesialis
14	Riau	17,38
14.01	Kampar	6,3
14.02	Indragiri Hulu	5,6
14.03	Bengkalis	14,9
14.04	Indragiri Hilir	6,0
14.05	Pelalawan	13,3
14.06	Rokan Hulu	9,6
14.07	Rokan Hilir	8,5
14.08	Siak	7,2
14.09	Kuantan Singingi	7,7
14.10	Kep. Meranti	7,5
14.71	Pekanbaru	62,1
14.72	Dumai	21,9

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Riau

2.2.2.9 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu didefinisikan sebagai jumlah kematian maternal selama periode waktu tertentu per 100.000 kelahiran hidup pada waktu yang sama. Menurut Kementerian Kesehatan, kematian maternal adalah kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilan atau penanganannya dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan hasil *Long Form* SP 2020 BPS Provinsi Riau, AKI di Provinsi Riau adalah 158 (BPS, 2023). Hal ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2018) sebesar 305. Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Riau tahun 2024, jumlah kematian ibu yang dilaporkan pada tahun 2024 sebanyak 107 kasus menurun dibandingkan tahun 2023 sebanyak 122 kasus kematian ibu. Perkembangan Jumlah Kematian Ibu Kabupaten/Kota di Provinsi Riau secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.87 Perkembangan Jumlah Kematian Ibu Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024

Kode	Provinsi/Kabupaten /Kota	Tahun (Jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
14	Riau	129	180	114	122	107
14.01	Kampar	11	7	20	11	5
14.02	Indragiri Hulu	10	12	16	12	13
14.03	Bengkalis	21	20	10	15	7
14.04	Indragiri Hilir	10	17	8	15	5
14.05	Pelalawan	8	8	6	7	17
14.06	Rokan Hulu	7	14	6	3	20
14.07	Rokan Hilir	14	18	11	9	4
14.08	Siak	9	22	7	15	2
14.09	Kuantan Singingi	14	11	10	8	8
14.10	Kepulauan Meranti	8	7	10	5	5
14.71	Pekanbaru	14	22	5	13	14
14.72	Dumai	3	22	5	9	7

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Berdasarkan tabel di atas jumlah kematian ibu di Provinsi Riau Tahun 2024 berjumlah 107 jiwa dengan jumlah kelahiran hidupnya sebanyak 109.336 jiwa sehingga angka kematian ibu sebesar 97,86. Penyebab kematian ibu selama 5 tahun terakhir masih didominasi karena pendarahan dan hipertensi, kecuali pada

tahun 2021 disebabkan karena pandemi *covid-19*. Jika dilihat jumlah kematian ibu per kabupaten/kota, di Kabupaten Pelalawan dan Rokan Hulu mengalami peningkatan cukup tinggi. Sedangkan kabupaten yang mengalami penurunan yang signifikan di Kabupaten Siak dan Kabupaten Indragiri Hilir. Penurunan kasus kematian ibu karena adanya peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu selama masa kehamilan, persalinan dan masa nifas. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan untuk ibu hamil adalah mendapatkan minimal 6 kali pelayanan antenatal (K1 sampai K6). Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.88 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024**

Kode	Provinsi/Kabupaten/ Kota	K1 (%)	K4 (%)	K6 (%)	Persalinan di Faskes
14	RIAU	91,50	81,10	77,40	84,80
14.01	Kampar	91,60	87,80	85,10	84,80
14.02	Indragiri Hulu	77,20	83,70	77,30	78,80
14.03	Bengkalis	99,50	94,00	85,20	86,90
14.04	Indragiri Hilir	74,80	57,60	40,70	51,70
14.05	Pelalawan	97,50	95,70	94,50	95,40
14.06	Rokan Hulu	92,90	88,10	78,10	87,60
14.07	Rokan Hilir	96,30	39,70	49,90	52,00
14.08	Siak	84,80	74,50	73,60	62,60
14.09	Kuantan Singingi	79,40	74,00	70,80	70,90
14.10	Kepulauan Meranti	63,30	61,70	60,70	61,30
14.71	Pekanbaru	89,90	88,10	86,90	87,00
14.72	Dumai	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau

2.2.2.10 Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi yang dilihat dari tingkat berat badan pada anak, berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) <-3 standar deviasi dan atau ditemukan tanda-tanda klinis *marasmus*, *kwashiorkor* dan *marasmus-kwashiorkor*. Kekurangan gizi, terutama pada anak usia dini akan berdampak pada tumbuh kembang anak, rendahnya kemampuan kognitif dan kecerdasan anak. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan upaya perbaikan kesehatan balita kedepan. Sesuai rekomendasi *World Health Organization* (WHO), perbaikan status gizi balita gizi buruk

dilakukan dengan memperbaiki asupan zat gizi makro dan mikro dengan pemberian suplemen dan makanan formula sebagai makanan terapi secara bertahap, pengobatan penyakit penyerta dan penatalaksanaan gizi buruk yang dilakukan secara rawat inap maupun rawat jalan bagi balita tanpa komplikasi. Persentase balita gizi buruk di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.89 Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024

Kode	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Persentase Balita Gizi Buruk				
		2020	2021	2022	2023	2024
14	Riau	0,88	0,63	0,40	0,30	0,16
14.01	Kampar	1,24	0,33	0,10	0,20	0,05
14.02	Indragiri Hulu	0,90	0,47	0,30	0,50	0,24
14.03	Bengkalis	1,93	2,28	2,60	1,40	0,86
14.04	Indragiri Hilir	0,49	0,13	0,40	0,10	0,10
14.05	Pelalawan	0,43	0,25	0,10	0,30	0,04
14.06	Rokan Hulu	0,53	0,14	0,20	0,70	0,13
14.07	Rokan Hilir	0,81	0,63	0,10	0,30	0,18
14.08	Siak	1,10	1,44	0,10	0,60	0,21
14.09	Kuantan Singingi	0,71	0,60	0,30	0,30	0,19
14.10	Kepulauan Meranti	1,90	1,10	0,10	0,40	0,33
14.71	Kota Pekanbaru	0,58	0,20	0,10	0,10	0,06
14.72	Dumai	0,03	0,01	0,10	0,10	0,09

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Persentase gizi buruk pada kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di atas, dimana Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti dan Rokan Hilir merupakan daerah terjadinya kasus balita gizi buruk diatas rata-rata gizi buruk Provinsi Riau Tahun 2024.

2.2.2.11 Prevalensi Balita Gizi Kurang

Penyebab gizi kurang pada anak balita adalah karena tidak mendapatkan asupan gizi yang sesuai usianya. Jika masalah kekurangan gizi ini tidak segera diatasi, maka anak-anak akan mengalami masalah gizi buruk. Persentase gizi kurang di Provinsi Riau selama tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang semakin menurun. Persentase gizi kurang di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.90 Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Kurang
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2024**

Kode	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Persentase Balita Gizi Kurang				
		2020	2021	2022	2023	2024
14	Riau	3,5	3,41	2,3	2,4	2,24
14.01	Kampar	4,53	3,74	1,1	1,8	1,73
14.02	Indragiri Hulu	4,18	3,69	3,4	3,5	3,39
14.03	Bengkalis	5,31	6,04	7,4	5,6	4,92
14.04	Indragiri Hilir	2,17	1,58	2,5	2,9	2,38
14.05	Pelalawan	1,26	1,14	2,1	0,9	0,35
14.06	Rokan Hulu	2,5	2,27	2,2	2,9	1,63
14.07	Rokan Hilir	3,62	2,37	2,1	1,6	1,31
14.08	Siak	5,76	6,55	6,3	5,0	3,99
14.09	Kuantan Singingi	4,3	4,49	4,4	2,6	4,88
14.10	Kepulauan Meranti	6,28	5,95	0	3,8	3,59
14.71	Pekanbaru	1,73	2,28	0,6	1,3	1,43
14.72	Dumai	0,32	0,25	0,7	0,5	1,12

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Menurunnya prevalensi gizi kurang ini tidak bisa dilepaskan dari upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki status kurang gizi pada anak seperti penambahan gizi dalam asupan makanan. Namun demikian, besaran angka kasus balita gizi kurang masih cukup signifikan dan memerlukan penanganan khusus ke depannya. Data di atas memperlihatkan terdapat 5 (lima) kabupaten yang angka prevalensi gizi kurang di atas rata-rata Provinsi yaitu Kabupaten Bengkalis, Kuantan Singingi, Siak, Kepulauan Meranti dan Indragiri Hulu, hal ini perlu mendapat perhatian khusus.

2.2.2.12 Prevalensi Stunting Balita

Salah satu kondisi kesehatan yang berdampak jangka panjang pada bayi dan balita adalah *stunting*, disamping itu buruknya tingkat kesehatan sejak usia dini akan berakibat pada peningkatan kecenderungan penyakit tidak menular pada masa dewasa. Malnutrisi, dengan berbagai bentuknya yang berakibat terganggunya pertumbuhan perkembangan anak.

Pada tahun 2016, secara global sekitar 23 persen anak-anak di bawah lima tahun mengalami *stunting*. *Stunting* mengacu pada kondisi anak yang terlalu pendek untuk anak seusianya. Kondisi ini menggambarkan kekurangan gizi kronis yang terjadi karena buruknya kualitas nutrisi sejak di dalam kandungan, di masa anak-

anak, dan/atau disebabkan infeksi atau penyakit. *Stunting* begitu menjadi perhatian karena efek jangka panjangnya yang menyebabkan anak tidak dapat mencapai kapasitas penuh dari pertumbuhan, cenderung memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah serta lebih rawan terserang penyakit. Di masa depan hal tersebut akan mempengaruhi produktivitas kerja dan kemampuan bekerja yang dapat berakibat pada rendahnya pendapatan rumah tangga secara mikro dan perkembangan ekonomi nasional secara makro, yang nantinya akan mempengaruhi Indonesia Emas 2045.

Penanganan *stunting* telah menjadi target prioritas baik secara Global dan di Indonesia termasuk di Provinsi Riau. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 - 2024, penurunan prevalensi *stunting* pada balita telah menjadi salah satu program prioritas dengan target sebesar 14 persen di tahun 2024. Pencapaian target tersebut membutuhkan kerja keras oleh Pemerintah dan berbagai pihak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* telah ditetapkan sebagai panduan dalam strategi nasional percepatan penurunan *stunting*. Hal ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Melalui aksi konvergensi, penurunan prevalensi *stunting* cukup signifikan dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2013-2023. Namun hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 prevalensi *stunting* pada balita di Provinsi Riau meningkat menjadi 20,10 persen atau sebesar 6,5 persen dibandingkan tahun 2023 dengan prevalensi sebesar 13,60 persen. Peningkatan ini secara keseluruhan kabupaten/kota mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi meningkatnya prevalensi *stunting* di Provinsi Riau diantaranya dapat diindikasikan dari masih rendahnya cakupan layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada kelompok sasaran ibu hamil, ibu nifas dan anak dibawah 2 tahun (Baduta), remaja putri dan calon pengantin serta masih buruknya pola asuh di lingkungan keluarga.

Tabel 2.91 Perkembangan Prevalensi Stunting Balita Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024

Kode	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2019*	2021**	2022**	2023*	2024**
14	Riau	23,95	22,30	17,00	13,60	20,10
14.01	Kampar	23,07	25,70	14,50	7,60	16,20
14.02	Indragiri Hulu	29,67	23,60	16,70	12,70	20,00
14.03	Bengkalis	21,07	21,90	8,40	17,90	12,50
14.04	Indragiri Hilir	27,43	28,40	28,50	18,80	25,00
14.05	Pelalawan	22,97	21,20	11,20	10,10	16,80
14.06	Rokan Hulu	24,37	25,80	22,00	15,90	21,40
14.07	Rokan Hilir	28,87	29,70	14,70	16,60	24,50
14.08	Siak	27,43	19,00	22,00	10,40	16,20
14.09	Kuantan Singingi	29,55	22,40	17,80	23,00	23,10
14.10	Kepulauan Meranti	25,10	23,30	17,50	19,60	18,00
14.71	Pekanbaru	18,58	11,40	16,80	8,70	14,50
14.72	Dumai	11,59	23,00	12,80	14,90	16,90

Sumber: *) Hasil Riskesdas dan Survey Kesehatan Indonesia (**) Survey Status Gizi Indonesia
NA = Data belum dipublikasi

2.2.2.13 Pengendalian Penyakit *Tuberculosis* (TBC)

Indonesia merupakan negara peringkat ke-2 penderita TBC tertinggi di dunia setelah India dengan proporsi kasus baru sebesar 13 persen dibandingkan seluruh kasus di dunia. Secara global, diperkirakan 10,6 juta orang menderita TBC pada tahun 2021. (WHO, *Global Tuberculosis Report*, 2022). Sekitar 75 persen penderita TBC merupakan usia produktif (15-50) tahun.

Di Provinsi Riau jumlah orang terduga *Tuberculosis* sampai dengan tahun 2024 mencapai 127.295 orang, sedangkan cakupan orang terduga tersebut yang mendapat pelayanan kesehatan mencapai 82 persen. Kota Pekanbaru merupakan wilayah dengan jumlah kasus terduga paling tinggi yaitu 30.915 orang, mengingat Kota Pekanbaru merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Riau.

Penderita penyakit TBC per 100.000 penduduk (*Incidence Rate*) di Provinsi Riau per kabupaten/kota sebagaimana gambar di bawah berikut:

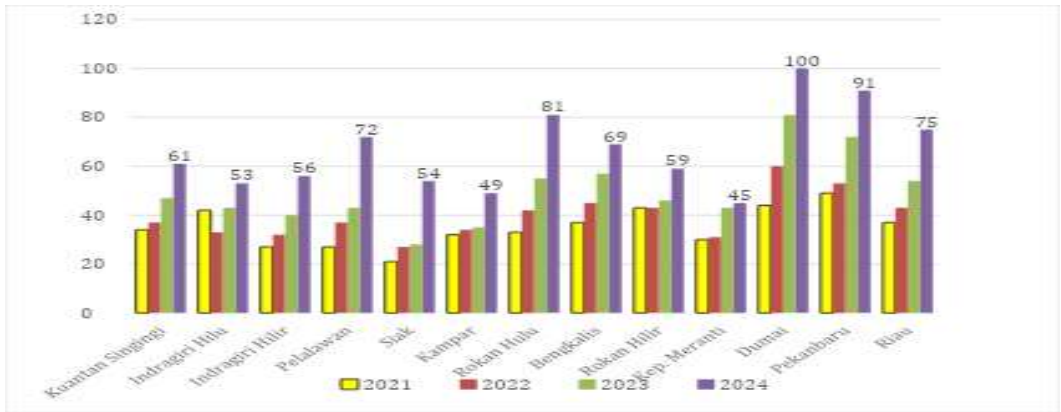


Sumber: Sistem Informasi Tuberkulosis, Kementerian Kesehatan

Gambar 2.37 Incidence Rate TBC Provinsi Riau Tahun 2021-2024

Grafik di atas menunjukkan capaian *Incidence Rate* TBC dari tahun 2021-2024 terjadi peningkatan, capaian ini masih jauh dari target nasional yang harus mencapai 65 per 100.000 penduduk. Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (*Treatment Coverage/TC*) adalah jumlah kasus TBC yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu dibagi dengan perkiraan jumlah insiden kasus TBC pada tahun yang sama dan dinyatakan dalam persentase. *Treatment Coverage* menggambarkan seberapa banyak kasus Tuberkulosis yang terjangkau oleh program. *Treatment Coverage* di Provinsi Riau pada tahun 2022 baru mencapai 41 persen, jika dibandingkan dengan rata-rata *Treatment Coverage* pengobatan Tuberkulosis di Indonesia, Provinsi Riau masih dibawah capaian nasional yaitu 74,7 persen (Profil Kesehatan Indonesia, 2024).

Berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PM.01.01/C.III/4405/2023 tanggal 25 Mei 2024 tentang Pemberitahuan Perubahan Definisi Indikator Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis dinyatakan bahwa defenisi operasional Penemuan Kasus TBC atau dikenal dengan istilah *Treatment Coverage* TBC versi revisi adalah jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan diantara perkiraan kasus tuberkulosis. Indikator ini dihitung dari jumlah kasus TBC yang ditemukan dan dilaporkan berdasarkan laporan TB.06 (*numerator*) diantara jumlah perkiraan kasus (*denominator*).



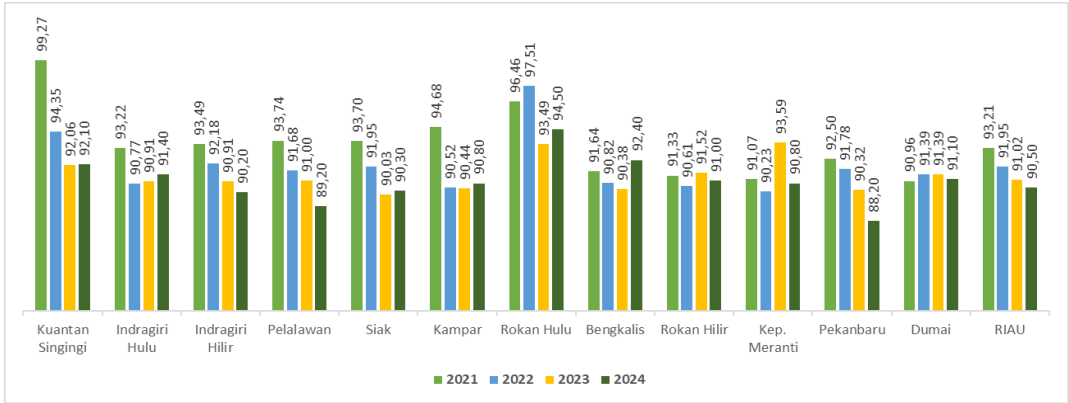
Sumber: Sistem Informasi Tuberkulosis, Kementerian Kesehatan

Gambar 2.38 Perkembangan *Treatment Coverage* TBC Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021-2024

Grafik di atas menjelaskan bahwa, penemuan kasus TBC ternotifikasi dari tahun 2021–2024 sudah mengalami peningkatan yang cukup baik tetapi di tahun 2021–2022 penemuannya tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan, dimana target penemuannya harus mencapai 95 persen. Masih rendahnya capaian penemuan kasus TB di Provinsi Riau, dikarenakan adanya keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di tingkat puskesmas dan tata kelola program belum optimal serta belum semua penemuan kasus TBC di laporkan.

Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan TBC

Dalam meningkatkan keberhasilan pengobatan TBC, pemerintah melakukan upaya dimulai dari *skrining* dan *tracking* intervensi pengobatan. Di beberapa daerah juga telah melakukan kunjungan langsung dengan *skrining mobile*. Berikut capaian *Treatment Success Rate* TBC di Provinsi Riau Tahun 2021 s.d 2024:



Sumber: Kementerian Kesehatan

Gambar 2.39 Perkembangan *Treatment Succes Rate* TBC Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021 s.d 2024

Treatment Success Rate TBC (TSR) merupakan seluruh kasus TBC yang ditemukan dan diobati. Dari tahun 2021-2024, capaian TSR Provinsi Riau tahun 2024 berada di atas target yaitu sebesar 90,50 persen dari target yang sudah ditentukan oleh nasional (90 persen).

2.2.2.14 Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

Pembangunan olahraga adalah suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik, memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, rohani maupun sosial, secara paripurna. Pembangunan olahraga diukur melalui Indeks Pembangunan Olahraga yang menyajikan data dan informasi keolahragaan yang terdiri dari 9 dimensi meliputi dimensi (1) Sumber Daya Manusia (2) Ruang Terbuka Publik (3) Literasi Fisik (4) Tingkat Partisipasi Olahraga (5) Tingkat Kebugaran (6) Kesehatan dan Kesejahteraan Psikis (7) Resiliensi dan modal sosial (8) Capaian olahraga prestasi dan (9) Ekonomi olahraga. Adapun perkembangan pengukuran IPO Provinsi Riau selama tahun 2021 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.92 Perkembangan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Provinsi Riau Tahun 2021-2024

No.	IPO / Dimensi	2021	2022	2023	2024
1	NASIONAL	0.408	0.376	0.327	0.334
2	RIAU	0.431	0.355	0.387	0.369
2.1.	Sumber Daya Manusia	0.030	0.042	0.070	0.069
2.2.	Ruang Terbuka Olahraga	0,398	0.321	0.624	0.375
2.3.	Literasi Fisik pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	0,581	0.595	0.595	0.605
2.4.	Tingkat Partisipasi Olahraga	0.435	0.356	0.244	0.356
2.5.	Tingkat Kebugaran	0.214	0.159	0.172	0.194
2.6.	Kesehatan dan Kesejahteraan Psikis	0.411	0.411	0.420	0.410
2.7.	Resiliensi dan Modal Sosial	0.538	0.543	0.522	0.530
2.8.	Capaian Olahraga Prestasi	0.651	0.220	0.222	0.125
2.9.	Ekonomi Olahraga	0.610	0.551	0.611	0.654

Sumber: Laporan Indeks Pembangunan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga

Perkembangan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Provinsi Riau pada tahun 2021-2024 mengalami tren yang berfluktuatif.

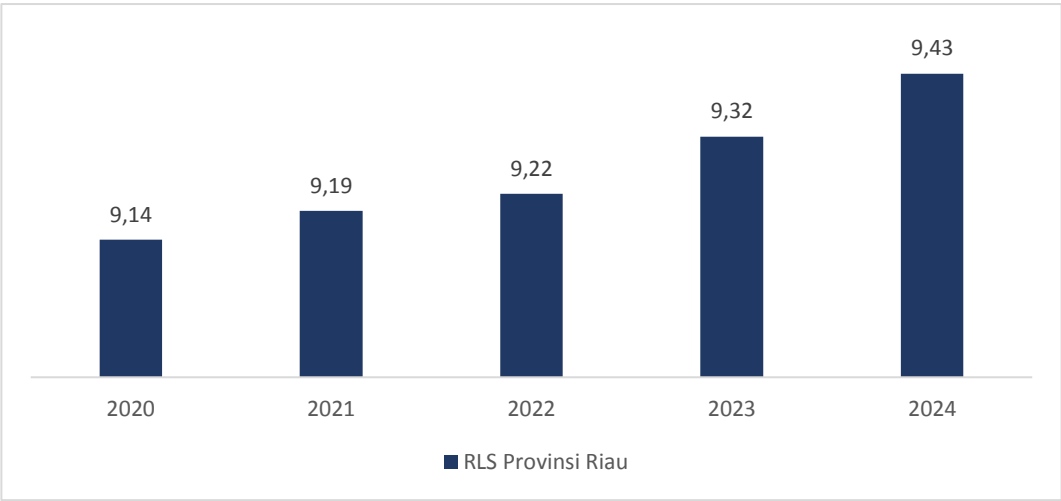
Pada tahun 2024, IPO Provinsi Riau lebih tinggi dari IPO Nasional. Capaian Dimensi yang tinggi berada pada dimensi ekonomi olahraga sebesar 0,654 dan capaian terendah pada dimensi Sumber Daya Manusia sebesar 0,069.

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

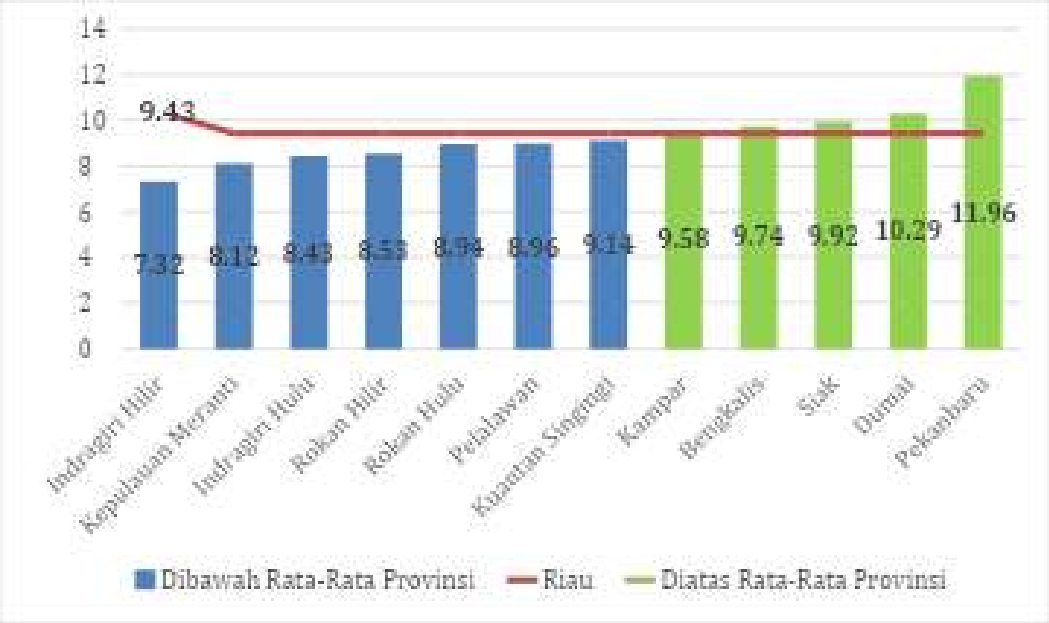
2.2.3.1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2020-2024 Provinsi Riau sebagaimana gambar di bawah, memiliki tren meningkat dengan pencapaian angka rata-rata lama sekolah Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 9,43 yang menunjukkan pencapaian wajib belajar 9 tahun. Namun upaya peningkatan angka rata-rata lama sekolah tetap menjadi prioritas pembangunan sumberdaya manusia di Provinsi Riau dalam mewujudkan program peningkatan wajib belajar 13 tahun.

Disamping itu terdapat ketimpangan pembangunan pendidikan tahun 2024 di beberapa kabupaten/kota yang perlu mendapatkan prioritas utama dalam peningkatan RLS karena berada di bawah rata-rata RLS Provinsi Riau yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan dan Kuantan Singingi. Secara lengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah berikut ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
Gambar 2.40 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Riau Tahun 2020-2024

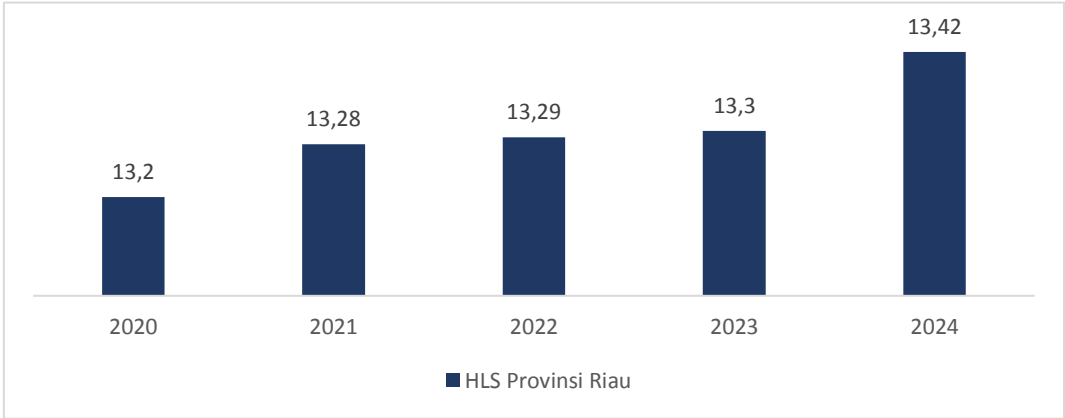


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar 2.41 Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024

2.2.3.2 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Perkembangan harapan lama sekolah tahun 2020-2024 Provinsi Riau memiliki tren meningkat, naik sebesar 0,22 tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024 atau sebesar 1,6 persen. Pencapaian harapan lama sekolah Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 13,42 tahun sudah menunjukkan di atas pencapaian wajib belajar 9 tahun.

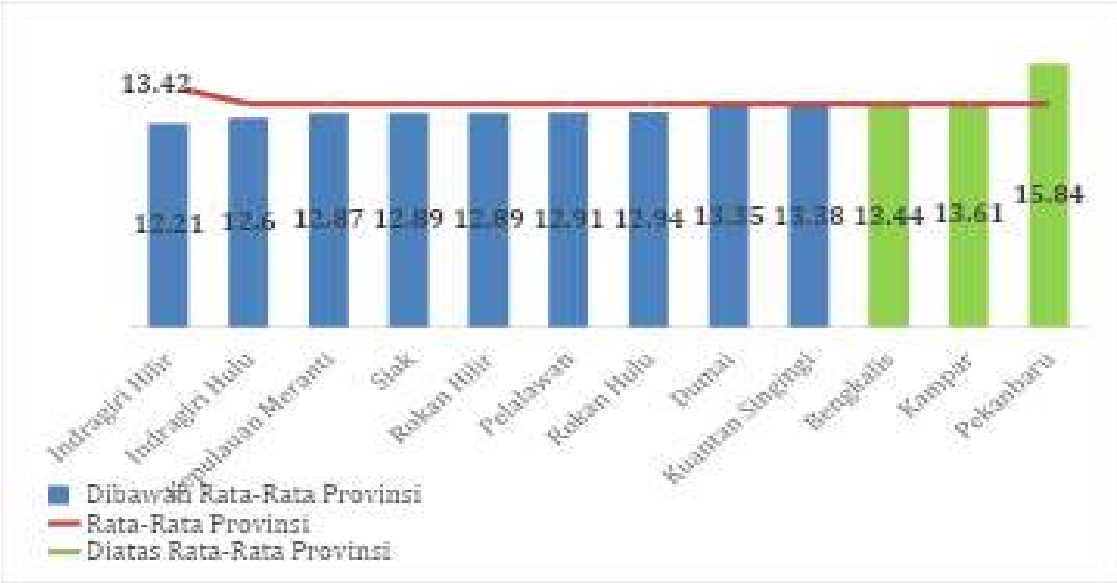


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar 2.42 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar di bawah ini, harapan lama sekolah di Provinsi Riau menunjukkan pembangunan pendidikan yang tidak merata, terutama di 9 (Sembilan) kabupaten/kota yaitu Kabupaten

Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Siak, Rokan Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Kota Dumai dan Kuantan Singingi.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar 2.43 Angka Harapan Lama Sekolah per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024

2.2.3.3 Angka Literasi dan Numerasi

Untuk mempresentasikan kualitas pendidikan dalam hal mutu pendidikan digunakan hasil asesmen nasional yang menilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survey karakter dan survey lingkungan belajar dalam *platform* lapor pendidikan yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Output* dari lapor pendidikan berupa capaian literasi, numerasi, survey karakter dan survey lingkungan belajar.

Perkembangan capaian kemampuan literasi dan numerasi Provinsi Riau tahun 2021-2024 menunjukkan tren meningkat dibandingkan dengan capaian nasional. Namun Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan siswa berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat - alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari hari pada berbagai jenis kompleks yang relevan. Berikut ini disajikan angka literasi dan numerasi Provinsi Riau selama tahun 2021 sampai dengan 2024.

Tabel 2.93 Perkembangan Angka Literasi, Numerasi Nasional dan Provinsi Riau Tahun 2021-2024

Kelompok Indikator	2021		2022		2023		2024	
	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi
Kemampuan Literasi								
SMA	62,78	62,84	62,95	63,27	68,38	69,23	71,99	73,30
SMK	60,11	60,71	59,06	60,41	64,40	65,94	67,30	68,45
SMALB	59,11	57,63	55,40	57,48	59,60	64,80	68,33	71,71
SMPLB	60,97	67,68	60,81	69,58	62,74	65,96	71,31	76,62
SDLB	55,88	57,43	58,21	57,09	61,39	69,45	65,59	72,09
Kemampuan Numerasi								
SMA	50,67	50,47	53,20	52,89	58,18	58,64	61,29	61,66
SMK	49,45	49,64	50,60	50,94	55,10	55,81	57,60	57,88
SMALB	49,86	58,30	51,37	54,86	55,44	59,56	63,38	64,31
SMPLB	55,38	55,38	56,04	60,26	61,03	65,75	66,53	73,61
SLB	45,85	48,15	48,54	52,70	54,40	58,90	63,13	66,49

Sumber: Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan

Perkembangan capaian kemampuan literasi dan numerasi Provinsi Riau tahun 2021-2024 menunjukkan tren meningkat, capaian ini lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional. Namun Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika menyelesaikan masalah sehari-hari melalui penerapan konsep matematika dalam konteks masalah kehidupan nyata, bukan hanya di dalam kelas, untuk melatih kemampuan bernalar dan memecahkan masalah secara mandiri dan percaya diri di berbagai situasi kompleks.

2.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan literasi masyarakat, terutama melalui upaya pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Perkembangan IPLM Provinsi Riau Tahun 2022- 2024 mengalami fluktuatif, dimana capaian IPLM Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 69,24 dengan kategori sedang (50-79,9) sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.94 Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2022-2024

Kode	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Tahun		
		2022	2023	2024
14	Riau	70,98	66,88	69,24
14.01	Kampar	79,71	56,70	78,30
14.02	Indragiri Hulu	62,67	60,88	66,05
14.03	Bengkalis	63,04	53,86	38,62
14.04	Indragiri Hilir	66,00	48,99	46,32
14.05	Pelalawan	76,51	66,96	64,87
14.06	Rokan Hulu	66,07	52,69	32,99
14.07	Rokan Hilir	65,05	50,36	22,13
14.08	Siak	59,69	70,06	69,31
14.09	Kuantan Singingi	75,23	64,77	71,14
14.10	Kepulauan Meranti	77,25	63,19	67,62
14.71	Pekanbaru	98,67	70,77	74,90
14.72	Dumai	61,87	68,42	70,00

Sumber: Perpustakaan Nasional

Capaian IPLM kabupaten/kota pada tahun 2024 yang berada dibawah capaian IPLM Provinsi Riau dengan kategori sangat rendah (0-29,9) yaitu Kabupaten Rokan Hilir dan daerah yang masuk kategori rendah (30-49,9) yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Bengkalis dan Indragiri Hilir dan ini perlu upaya pemerintah untuk meningkatkan IPLM.

Tabel 2.95 Perkembangan Capaian Komponen Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Riau Tahun 2022-2024

No	Unsur IPLM	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM 1)	0,0017	0,3518	0,3503
2	Ketercukupan koleksi (UPLM 2)	1,6199	0,2753	0,4176
3	Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM 3)	0,0029	1,0000	1,0000
4	Tingkat kunjungan masyarakat per-hari (UPLM 4)	0,4520	0,0543	0,0787
5	Jumlah perpustakaan ber-SNP (UPLM 5)	1,8885	1,0000	1,0000
6	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi (UPLM 6)	0,3232	1,0000	1,0000
7	Anggota perpustakaan (UPLM 7)	0,6804	1,0000	1,0000

Sumber: Perpustakaan Nasional

Provinsi Riau masih perlu mendorong unsur pembangunan literasi masyarakat terutama pada pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi dan tingkat kunjungan masyarakat per hari.

2.2.3.5 Indeks Literasi Digital

Literasi digital sangat penting dalam era digital saat ini karena Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan efektif untuk mencari, menganalisis, mengevaluasi dan menyebarkan informasi. Pengukuran dilakukan menggunakan empat pilar, yaitu kecakapan digital (*digital skills*), etika digital (*digital ethics*), keamanan digital (*digital safety*), dan budaya digital (*digital culture*).

Indeks Literasi Digital Provinsi Riau pada tahun 2023 yang bersumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia adalah sebesar 3,43 poin. Adapun keempat faktor pembentuk digital Provinsi Riau adalah (1) *Digital skills* atau indikator kecakapan digital 3,75 poin. Pilar ini mengukur kecakapan pengguna internet dalam menggunakan komputer atau gawai, mengunggah/mengunduh data, mengecek ulang informasi dari internet, dan sebagainya. (2) Digital budaya atau indikator budaya digital 3,76 poin. Pilar ini mengukur kebiasaan pengguna internet seperti mencantumkan nama penulis/pengunggah asli saat melakukan reposting dan sebagainya. (3) *Digital Ethics* atau indikator etika digital 2,82 poin. Pilar ini mengukur kepekaan pengguna internet dalam mengunggah konten tanpa izin, berkomentar kasar di media sosial, menghargai privasi di media sosial, dan sebagainya. (4) *Digital Safety* atau indikator keamanan 3,48 poin. Pilar ini mengukur kemampuan pengguna internet dalam mengidentifikasi dan menghapus *spam/malware/virus* di komputer atau gawai pribadi, kebiasaan mencadangkan data, perlindungan data pribadi.

2.2.3.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA

Angka Partisipasi Kasar adalah proporsi anak sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Tujuan pengukuran APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan

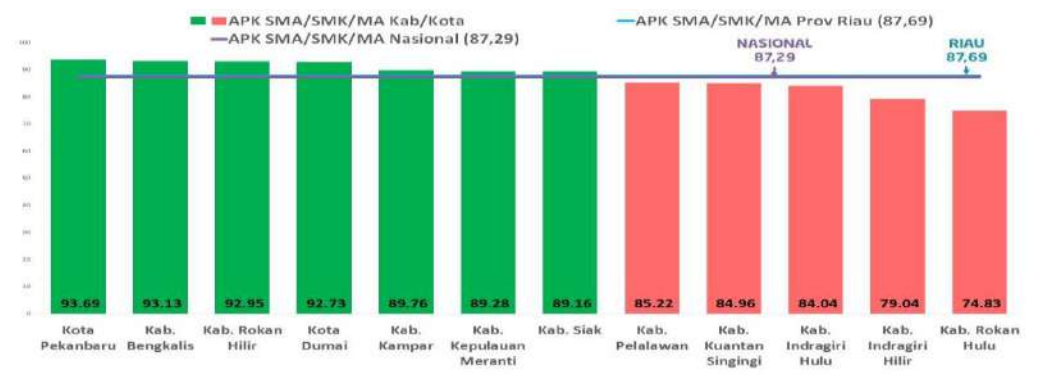
di suatu wilayah/negara. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah disuatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Perkembangan APK tingkat pendidikan SMA/SMK/MA Provinsi Riau seperti tabel berikut:

Tabel 2.96 Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Kode	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA				
		2020	2021	2022	2023	2024
	NASIONAL	92.56	92.80	92.11	92.51	87,29
14	RIAU	84.61	84.11	84.85	85.12	87,69
14.01	Kampar	81.46	79.51	81.37	81.01	89.76
14.02	Indragiri Hulu	87.05	85.29	84.22	80.98	84.04
14.03	Bengkalis	79.38	77.45	78.69	81.14	93.13
14.04	Indragiri Hilir	65.10	63.42	65.01	67.08	79.04
14.05	Pelalawan	95.38	93.93	95.28	93.69	85.22
14.06	Rokan Hulu	79.27	81.19	80.64	80.94	74.83
14.07	Rokan Hilir	87.04	85.86	86.78	85.88	92.94
14.08	Siak	85.84	87.24	85.84	79.37	89.16
14.09	Kuantan Singingi	82.44	80.65	81.67	85.52	84.96
14.10	Kepulauan Meranti	80.26	78.80	80.54	84.79	89.28
14.71	Pekanbaru	95.98	97.47	98.86	101.25	93.69
14.72	Dumai	103.30	101.11	99.51	84.60	92.73

Sumber: Badan Pusat Statistik (Susenas)

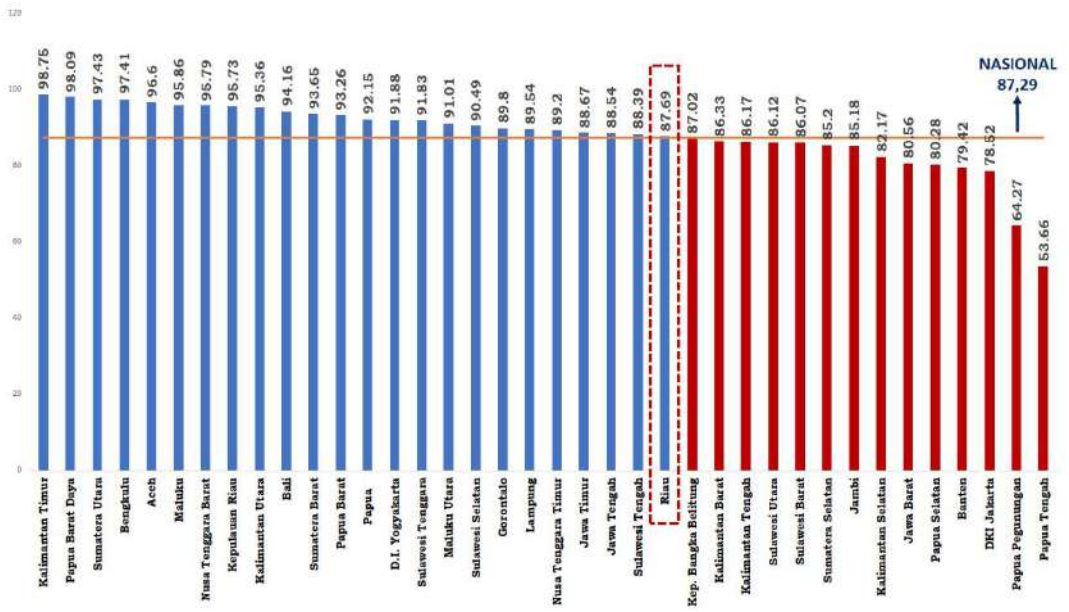
Selama kurun waktu 2020-2024 Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK Provinsi Riau cenderung mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2020 APK SMA/MA/SMK Provinsi Riau sebesar 84,61 persen, tahun 2021 sebesar 84,11 persen tahun 2022 sebesar84,85 persen dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 85,12 persen dan pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan menjadi 87,69 persen. Capaian APK SMA/MA/SMK Provinsi Riau tahun 2024 lebih tinggi dari capaian rata-rata nasional yaitu capaian provinsi sebesar 87,69 persen dan capaian nasional sebesar 87,29 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Susenas)

Gambar 2.44 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau Tahun 2024

Berdasarkan grafik posisi relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA se Provinsi Riau Tahun 2024 sebesar 87,69 persen, di atas capaian Nasional yang sebesar 87,29 persen. Untuk sebaran APK SMA/SMK/MA se Provinsi Riau kabupaten/kota, terdapat 5 kabupaten yang dibawah APK Provinsi/Nasional yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi dan Pelalawan. Sedangkan 7 (tujuh) kabupaten/kota diatas APK Provinsi/Nasional yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kepulauan Meranti dan Siak.



Sumber: BPS (Susenas) Tahun 2025

Gambar 2.45 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Nasional Tahun 2024

Berdasarkan posisi relative Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Nasional Tahun 2024, Provinsi Riau berada pada posisi ke 15 (lima belas) dari bawah di tingkat Nasional, dengan angka APK sebesar 87,69. Angka APK ini masih berada diatas angka APK Nasional sebesar 87,29. Walaupun demikian posisi partisipasi anak SMA/SMK/MA yang bersekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah di Provinsi Riau masih rendah.

2.2.3.7 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA

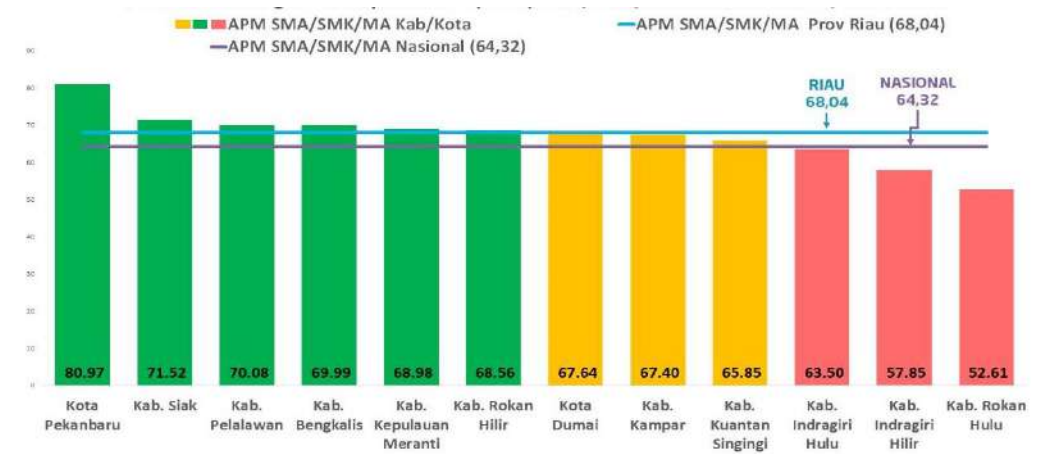
Angka Partisipasi Murni adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Perkembangan APM SMA/SMK/MA Provinsi Riau tahun 2020 sampai dengan 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.97 Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Kode	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA				
		2020	2021	2022	2023	2024
	NASIONAL	62.36	61.65	61.97	62.53	64.32
14	RIAU	64.01	64.00	63.87	64.81	68.04
14.01	Kampar	60.49	60.89	61.35	64.35	67.40
14.02	Indragiri Hulu	59.83	58.85	58.82	59.63	63.50
14.03	Bengkalis	66.98	67.05	67.22	65.32	69.99
14.04	Indragiri Hilir	51.73	51.61	51.75	53.75	57.85
14.05	Pelalawan	59.17	59.71	60.36	67.83	70.08
14.06	Rokan Hulu	68.49	68.51	65.37	54.92	52.61
14.07	Rokan Hilir	57.71	57.80	57.76	63.44	68.56
14.08	Siak	71.88	71.93	71.94	70.13	71.52
14.09	Kuantan Singingi	64.87	64.34	63.87	64.66	65.85
14.10	Kepulauan Meranti	70.03	70.39	70.09	68.42	68.98
14.71	Pekanbaru	71.92	72.28	72.61	74.63	80.97
14.72	Dumai	71.14	70.77	69.58	64.83	67.64

Sumber: Badan Pusat Statistik

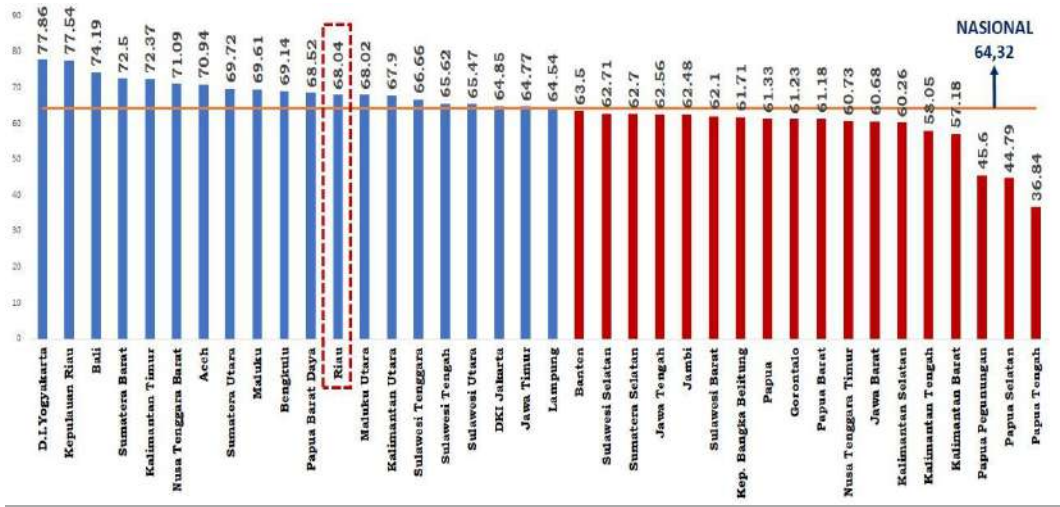
Selama kurun waktu 2020-2024 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Provinsi Riau mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 2020 (APM) SMA/MA Provinsi Riau sebesar 64,01 persen, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 64,00 persen, tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 63,87 persen, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 64,81 persen, dan tahun 2024 naik menjadi 68,04 persen. Capaian APM SMA/MA Provinsi Riau tahun 2024 lebih tinggi dari capaian rata-rata nasional yaitu capaian provinsi sebesar 68,04 persen dan capaian nasional sebesar 64,32 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.46 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau Tahun 2024

Berdasarkan grafik posisi relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA se Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 68,04 persen diatas capaian Nasional yang sebesar 64,32 persen. Untuk sebaran APM SMA/MA kabupaten/kota, terdapat 5 (lima) kabupaten yang dibawah APM Provinsi yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Kampar dan Kota Dumai. Sedangkan 7 (tujuh) kabupaten/kota di atas APM Provinsi/Nasional yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Pelalawan, Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Kota Dumai.



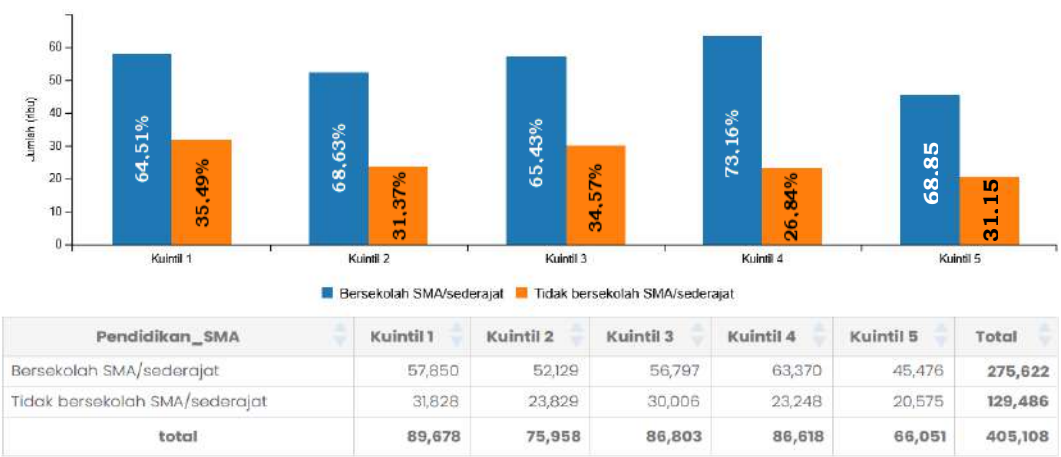
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar 2.47 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Nasional Tahun 2024

Berdasarkan posisi relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA tahun 2024 Provinsi Riau berada pada posisi ke 12 (dua belas) di tingkat Nasional, dengan angka APM sebesar 68.04, berada

diatas posisi Nasional sebesar yang sebesar 64,32. Dalam hal ini menunjukkan bahwa partisipasi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA yang bersekolah dengan usia sekolah di Provinsi Riau cukup tinggi.

Angka Partisipasi Murni Miskin Provinsi Riau juga masih menghadapi tantangan yang berat untuk sektor Pendidikan, terutama untuk meningkatkan akses layanan pendidikan dasar bagi penduduk miskin maupun upaya untuk menjamin kesinambungan terhadap akses layanan pendidikan. Hal ini tergambar dari hasil analisis data yang terdeskripsi dalam gambar berikut:



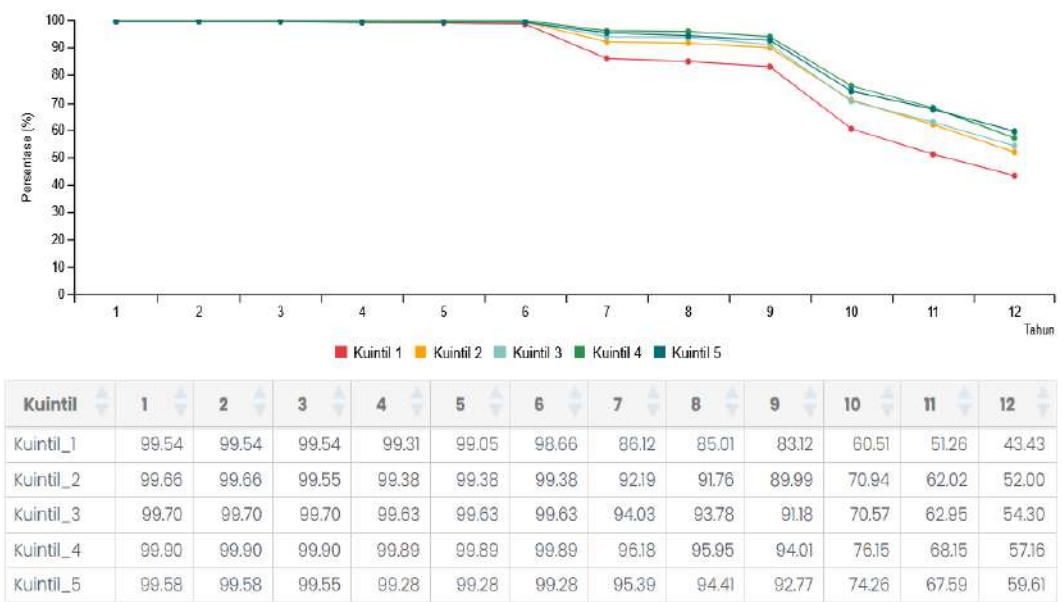
Sumber: Bappenas

Gambar 2.48 Tingkat Partisipasi Pendidikan Partisipasi Murni APM SMA Berdasarkan Status Kesejahteraan Penduduk (Persentase dan Jumlah Individu) di Provinsi Riau, Tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas, hambatan akses pendidikan tidak hanya pada penduduk kuintil 1 yang miskin dan rentan, namun juga pada kelompok penduduk kaya, namun demikian hambatan untuk kelompok kaya hampir sama dibandingkan dengan kelompok penduduk miskin dimana terdapat 35,49 persen lebih penduduk miskin yang tidak bersekolah di SMA/ sederajat sedangkan kelompok penduduk kaya di kuintil 5 terdapat 31,15 persen penduduk kaya yang tidak bersekolah di SMA/ sederajat.

Konsisten dengan data diatas, untuk kesinambungan lanjutan pendidikan juga menunjukan bahwa pada rumah tangga miskin akses terhadap kesinambungan pendidikan juga lebih rendah dibandingkan dengan kelompok rumah tangga yang kaya.

Kondisi ini merupakan faktor yang menyebabkan rendahnya angka harapan lama sekolah dan juga rata-rata tingkat pendidikan penduduk di Provinsi Riau. Tingkat keberlanjutan sekolah disajikan dalam bentuk persentase tahun belajar yang sudah diselesaikan oleh penduduk yang bersekolah lagi. Tahun belajar bersifat *exhaustive*, artinya penduduk yang sudah menamatkan 6 tahun belajar akan dihitung sudah menamatkan 1 sampai 5 tahun belajar juga. Tingkat keberlanjutan sekolah disajikan dalam bentuk kurva yang menunjukkan pada tahun belajar berapa tingkat partisipasi sekolah menurun secara signifikan yang menandakan momentum terjadinya putus sekolah. Sesuai dengan tahun belajar masing-masing jenjang pendidikan, transisi SD ke SMP ditandai dengan tahun belajar 6 ke 7, dan transisi dari SMP ke SMA ditandai dengan tahun belajar 9 ke 10. Hal ini tergambar dalam gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Gambar 2.49 Tingkat Keberlanjutan Sekolah Penduduk Usia 15-24 Tahun di Provinsi Riau, Tahun 2024

2.2.3.8 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Partisipasi pendidikan di Provinsi Riau yang menggambarkan kualitas pendidikan dalam hal pemerataan pendidikan ditunjukkan dari angka partisipasi sekolah. Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Riau tahun 2021-2024 pada berbagai jenjang pendidikan menunjukkan tren perkembangan yang meningkat.

**Tabel 2.98 Angka Partisipasi Sekolah Riau dan Indonesia
Sesuai Jenjang Pendidikan Tahun 2021-2024 di Provinsi Riau**

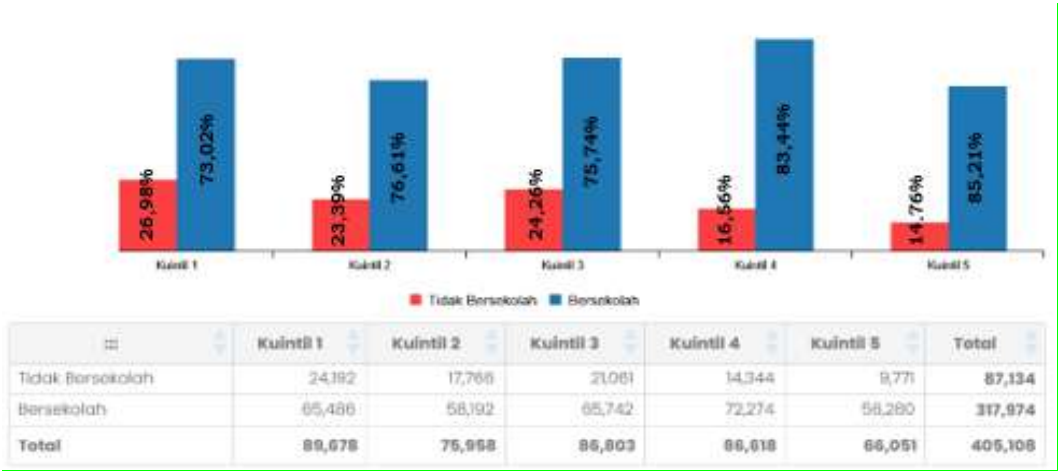
Angka Partisipasi Sekolah (Usia)		Riau	Indonesia
07- 12	2021	99,65	99,19
	2022	99,61	99,10
	2023	95,65	99,16
	2024	99,67	99,19
13-15	2021	95,66	95,99
	2022	95,72	95,92
	2023	95,89	96,10
	2024	95,94	96,17
16-18	2021	77,81	73,09
	2022	77,32	73,15
	2023	78,15	73,42
	2024	78,49	73,42
19-24	2021	28,79	26,01
	2022	28,65	25,99
	2023	30,07	26,85
	2024	31,34	29,01

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Riau tahun 2024, untuk usia 7-12 tahun berada pada angka 99,67, yang menunjukkan lebih baik dari nasional yang sebesar 99,19. APS untuk usia 13-15 tahun berada pada angka 95,94 yang menunjukkan kurang baik dari angka Nasional yang sebesar 96,17. Serta untuk APS Provinsi Riau usia 16-18 tahun pada tahun 2024 sebesar 78,49, lebih baik dari Nasional yang sebesar 73,42. Dan untuk APS usia 19-24 tahun pada tahun 2024 Provinsi Riau sebesar 31,34 lebih baik dari Nasional yang sebesar 29,01.

Terjadinya penurunan pada setiap usia jenjang sekolah dapat diartikan bahwa Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Riau usia 16-18 tahun pada anak tamatan SMP banyak yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA. Demikian juga dengan usia 19-24 tahun banyak anak tamatan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena (1) Akses ke sekolah yang sulit terutama di daerah pesisir dan terpencil, yang sulit dijangkau, membuat siswa kesulitan untuk datang ke sekolah dengan tepat waktu atau bahkan terhambat untuk melanjutkan pendidikan. (2) Anak-anak di beberapa daerah terpencil seringkali terpaksa membantu orang tua mereka bekerja di kebun kelapa sawit atau ladang, yang

mengurangi waktu mereka untuk belajar atau bersekolah. (3) Masih adanya budaya pernikahan dini.



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gambar 2.50 Capaian Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun (Persen dan Jumlah) Berdasarkan Status Kesejahteraan di Provinsi Riau, Tahun 2024

Angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun berdasarkan status kesejahteraan penduduk khususnya di Kuintil 1 terdapat 26,98 persen yang tidak bersekolah, namun hal ini juga terjadi pada penduduk dengan status kesejahteraan tertinggi yaitu di Kuintil 5 sebesar 14,76 persen. Berdasarkan data tersebut diatas perlu dilakukan peningkatan kualitas pendataan anak yang tidak sekolah dan penguatan pola asuh pendidikan keluarga agar tingkat partisipasi sekolah dapat ditingkatkan.

2.2.3.9 Rasio Ketersediaan Ruang Kelas dengan Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan ruang kelas dengan penduduk usia sekolah adalah indikator penting untuk menilai seberapa baik sistem pendidikan suatu daerah dalam menyediakan fasilitas untuk mendukung jumlah siswa yang ada. Di Provinsi Riau, seperti halnya di banyak daerah lainnya, rasio ini dapat memberikan gambaran tentang kapasitas sekolah dalam mengakomodasi jumlah siswa yang terdaftar dan apakah ada kekurangan fasilitas atau over kapasitas di sekolah-sekolah.

Tabel 2.99 Rasio Ketersediaan Ruang Kelas dengan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2023/2024

Kode	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Usia 7-12 Tahun			Usia 13-15 Tahun			Usia 16-18 Tahun		
		Jumlah Penduduk	Jumlah Ruang Kelas	Rasio	Jumlah Penduduk	Jumlah Ruang Kelas	Rasio	Jumlah Penduduk	Jumlah Ruang Kelas	Rasio
14	Riau	817.930	34.857	23.47	402.260	11.316	35.55	377.887	6.210	60.85
14.01	Kampar	10.4207	4.579	22.76	54.373	1.369	39.72	47.301	785	60.26
14.02	Indragiri Hulu	58.269	2.731	21.34	27.729	835	33.21	23.292	371	62.78
14.03	Bengkalis	76.612	3.420	22.40	38.517	1.193	32.29	37.856	728	52.00
14.04	Indragiri Hilir	82.818	3.620	22.88	39.898	928	42.99	41.310	499	82.79
14.05	Pelalawan	56.179	2.406	23.35	22.054	730	30.21	19.851	353	56.24
14.06	Rokan Hulu	73.549	3.196	23.01	34.927	1.017	34.34	28.742	423	67.95
14.07	Rokan Hilir	87.154	3.577	24.37	42.948	1.088	39.47	45.783	727	62.98
14.08	Siak	59.393	2.623	22.64	31.682	991	31.97	26.107	542	48.17
14.09	Kuantan Singingi	39.467	2.102	18.78	20.424	691	29.56	16.803	305	55.09
14.10	Kepulauan Meranti	21.644	1.279	16.92	11.187	307	36.44	10.978	238	46.13
14.71	Pekanbaru	120.802	3.881	31.13	61.336	1.684	36.42	62.932	1.021	61.64
14.72	Dumai	37.836	1.443	26.22	17.185	483	35.58	16.932	218	77.67

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Data memperlihatkan bahwa di Provinsi Riau rasio ketersediaan sekolah untuk tingkat SD/MI pada tahun 2023/2024 adalah 23,47 dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 ditetapkan SPM untuk SD/MI paling banyak 28 orang dan paling sedikit 20 orang. Ini berarti bahwa pada tingkat Provinsi Riau rasio ketersediaan sekolah sudah baik karena masih dibawah standar pelayanan minimum yang ditetapkan. Dilihat sebarannya pada kabupaten/kota di Provinsi Riau, terdapat Kota Pekanbaru yang melebihi standar pelayanan minimum. Hal ini disebabkan tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dengan pertambahan ruangan kelas untuk SD. Oleh sebab itu dalam upaya untuk mensukseskan wajib belajar 12 tahun kebijakan terhadap kota tersebut adalah penambahan ruangan kelas atau menambah sekolah baru untuk memenuhi SPM yang telah ditetapkan.

Selanjutnya ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah SLTP di Provinsi Riau tahun 2023/2024 sebesar 35,55. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 ditetapkan SPM paling sedikit 20 dan paling banyak 32. Keadaan ini memperlihatkan bahwa rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah belum memenuhi SPM yang sudah ditetapkan. Bila dilihat dari sebaran kabupaten/kota hampir semua belum memenuhi SPM yang sudah ditetapkan kecuali Kabupaten Kuantan Singingi yang memenuhi SPM yaitu 29 siswa. Untuk memenuhi SPM berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut kebijakan yang harus dilakukan adalah menambah ruangan kelas dalam rangka untuk mencapai target wajib belajar 9 tahun.

Kemudian pada tingkat SLTA, ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah SLTA di Provinsi Riau pada tahun 2023 sebesar 60,85 sedangkan SPM SMA/MA/SMK yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017 adalah sebesar 15 orang paling sedikit dan 36 orang paling banyak. Keadaan ini menggambarkan ketersediaan sekolah SLTA di Provinsi Riau saat ini masih jauh dari SPM yang sudah ditetapkan. Dilihat dari sebarannya, semua kabupaten/kota

melebihi SPM. Jika Pemerintah Provinsi Riau melakukan kebijakan wajib belajar 12 tahun dengan asumsi penduduk usia sekolah 16-18 semuanya sekolah, maka untuk mencapai SPM diperlukan penambahan ruang kelas.

2.2.3.10 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan untuk daerah Provinsi terdiri atas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Indikator SPM Pendidikan Menengah adalah jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah, rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional. Sesuai surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 1422/MDM.A/PR.07.05/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang indikator kinerja urusan pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota agar dapat digunakan sebagai acuan perencanaan di daerah mendorong perencanaan yang lebih berkualitas dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan di Indonesia. Capaian SPM Bidang Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2021-2004 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.100 Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2021-2024

No	Kelompok Indikator	Indikator	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
I	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16-18 Tahun					
1.		Jumlah anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	77,81	77,32	78,15	78,49
II	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas					

No	Kelompok Indikator	Indikator	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
2.		Jumlah anak usia 4-18 tahun disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	23,98	20,35	56,76	56,75
III	Kemampuan Literasi					
3.		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	62,84	63,27	69,23	73,30
4.		Rerata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	60,71	60,41	65,94	68,45
5.		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	57,63	57,48	64,80	71,71
6.		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	67,68	69,58	65,96	73,61
7.		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	57,43	57,09	69,45	72,09
IV	Kemampuan Numerasi					
8.		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	50,47	52,89	58,64	61,66
9.		Rerata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	49,64	50,94	55,81	57,88
10.		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	58,30	54,86	59,56	66,49
11.		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	55,38	60,26	65,75	73,61
12.		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	48,15	52,70	58,90	64,31

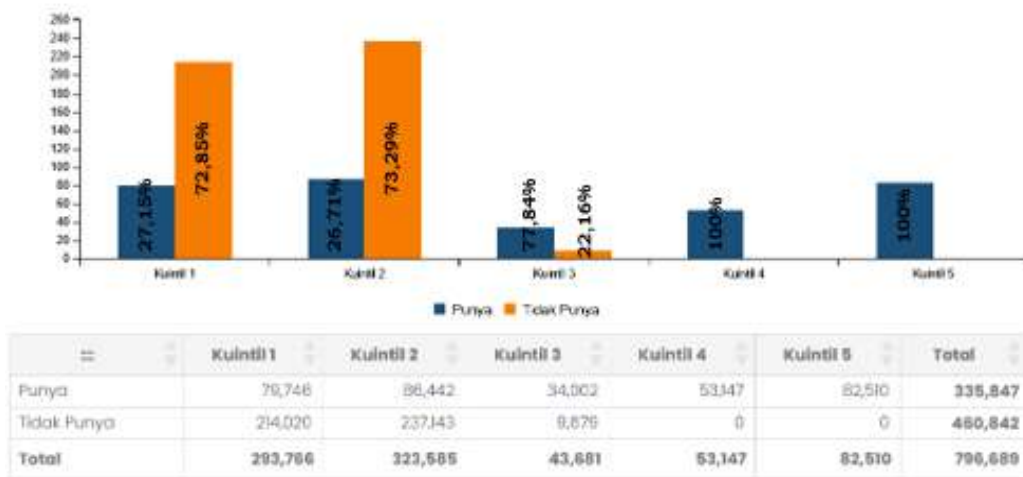
Sumber : Kemendikbudristek dan Kemendikdasmen

Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimum urusan Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2024 rata-rata meningkat dibandingkan pada tahun 2023. Hal ini bisa dilihat dari masing-masing capaian indikatornya. Untuk capaian 2021 dan 2022 sesuai dengan surat Kemendikbudristek terdapat penyesuaian (*adjusted*) perhitungan capaian masing masing indikator sehingga terjadi penyesuaian kembali perhitungan capaian.

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.2.4.1 Kepemilikan Jaminan Sosial

Dalam upaya menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi masyarakat, maka pemerintah memberikan jaminan sosial agar masyarakat mendapatkan perlindungan baik secara formal maupun non formal dari dampak resiko sosial seperti kesakitan, kecelakaan kerja, usia lanjut, pensiun dan kematian. Program perlindungan sosial tersebut dilaksanakan secara reguler dan terpadu agar tepat sasaran. Dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau yang menjadi prioritas utama adalah masyarakat miskin yang berada pada tingkat kesejahteraan yang terendah terutama bagi masyarakat di kelompok kesejahteraan terendah (kuintil 1 atau 20 persen terendah). Tabulasi kepemilikan salah satu dari Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, atau Kartu Keluarga Sejahtera dalam rumah tangga, atau setidaknya dimiliki oleh salah satu anggota keluarga pada tahun 2024 dapat dilihat dari data capaian berikut:



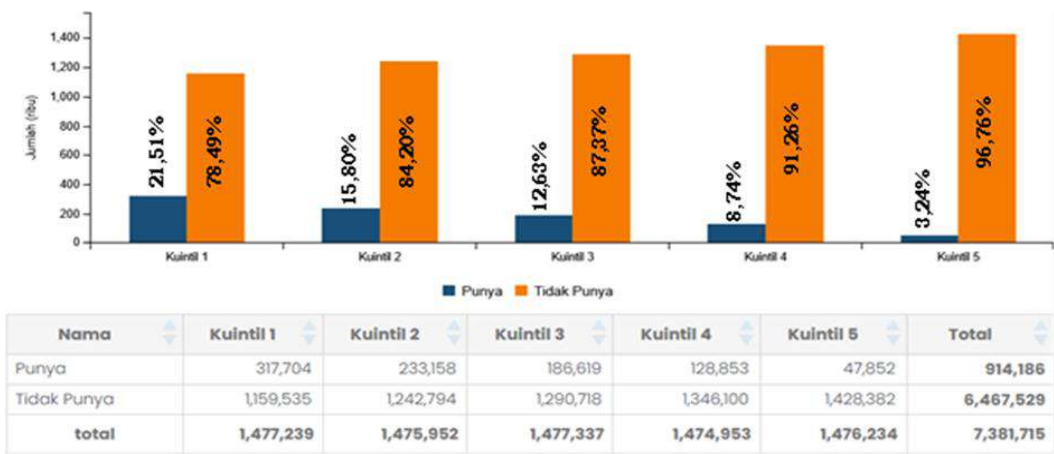
Sumber: Sepakat (Sakernas) Bappenas 2024

Gambar 2.51 Kepemilikan Jaminan Sosial Setidaknya Memiliki Satu Jaminan Sosial (Jumlah dan Persentase) di Provinsi Riau, Tahun 2024

Efektivitas program pengentasan kemiskinan khususnya jaminan sosial sangat bergantung pada tingkat ketepatan sasaran program. Ketidaktepatan sasaran bantuan kemiskinan menjadi isu krusial di Indonesia, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti data yang tidak akurat, kurangnya sosialisasi, keterpaduan program pada satu sasaran dan lemahnya pengawasan. Dampaknya bisa berupa ketidakadilan, konflik sosial, dan penurunan kepercayaan terhadap pemerintah. Perbaikan data, peningkatan transparansi, dan pengawasan yang lebih baik menjadi solusi. Ketepatan sasaran bantuan untuk pengentasan kemiskinan mengacu pada seberapa baik program bantuan sosial mencapai individu atau keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Ini adalah masalah penting karena bantuan yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, kesenjangan sosial, dan memperlambat capaian penurunan angka kemiskinan.

Salah satu program yang dilaksanakan secara nasional di setiap daerah adalah Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga

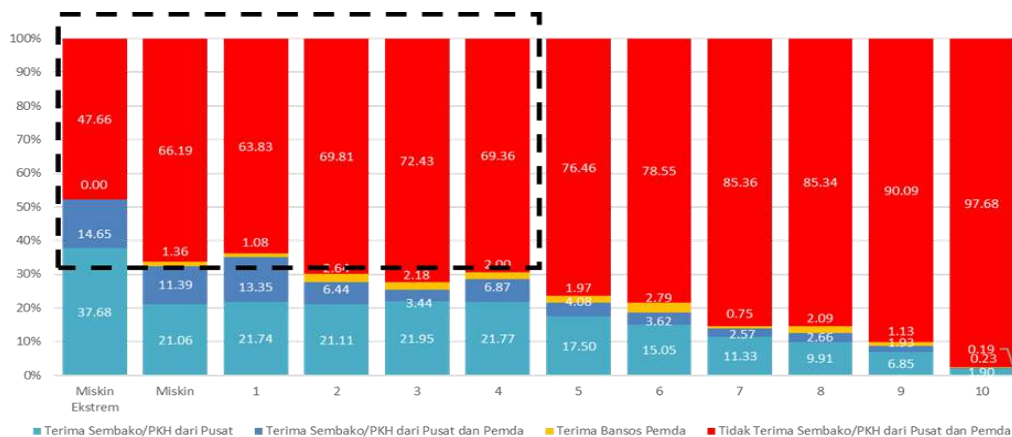
penerima manfaat PKH. PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat. Berdasarkan pemeringkatan status kesejahteraan secara nasional, bahwa masyarakat miskin dan rentan berada pada Desil 1 sampai dengan Desil 4. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2024, penerima PKH tersebar sampai dengan Kuintil 5 (Desil 9-10), ini menandakan bahwa masih terdapat penerima PKH yang tidak tepat sasaran. Berikut gambaran kondisi sebaran penerima PKH berdasarkan kuintil.



Sumber: Sepakat (Susenas) Bappenas, 2024

Gambar 2.52 Kepemilikan Jaminan Sosial Bantuan PKH (Jumlah dan Persentase) di Provinsi Riau, Tahun 2024

Jika dilihat berdasarkan hasil olahan data Susenas BPS tahun 2023 yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Pengentasan kemiskinan (TNP2K), program bantuan sosial daerah sebenarnya sudah mensasar 12,75 persen penduduk miskin. Namun, masih terdapat tumpang tindih penerima bantuan yaitu dari pusat dengan daerah yang tidak komplementer. Sementara itu masih banyak penduduk di Desil 1-4 yang belum mendapatkan bantuan sosial.



Sumber: Susenas BPS 2023, diolah TNP2K

Gambar 2.53 Evaluasi Pensasaran Program Bantuan Sosial di Provinsi Riau, Tahun 2023

Dari gambar di atas, dapat diperhatikan bahwa dari 62,34 persen rumah tangga miskin ekstrem yang menerima semua program Sembako/PKH dan Bantuan Sosial pada tahun 2023, 37,68 persen diantaranya menerima bantuan sosial pusat dan 14,65 persen diantaranya menerima dari kedua sumber (pusat dan daerah). Dari 33,81 persen rumah tangga tergolong miskin yang menerima program semua Sembako/PKH pada tahun 2023, sekitar 21,06 persen yang menerima Bantuan Sosial dari pusat, dan 1,36 persen yang menerima hanya bantuan sosial dari daerah. Sedangkan 11,39 persen diantaranya menerima dari kedua sumber bantuan. Dari realitas tersebut maka dapat disimpulkan program yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat, perlu koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan teknis di daerah agar anggaran yang telah diberikan dapat bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan sehingga secara efektif dan efisien dapat menurunkan angka kemiskinan di daerah.

2.2.4.2 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Dasar hukum untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). JKN adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar

peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian (SJSN) yang diselenggarakan dengan mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (*mandatory*). Program JKN merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

Manfaat program JKN diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), pengobatan (*kuratif*), dan pemulihan (*rehabilitatif*) termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (*managed care*). Program JKN diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial, dan prinsip ekuitas, yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terkait dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Prinsip ini diwujudkan dengan pembayaran iuran sebesar persentase tertentu dari upah bagi yang memiliki penghasilan dan Pemerintah membayarkan iuran bagi mereka yang tidak mampu (*fakir miskin*).

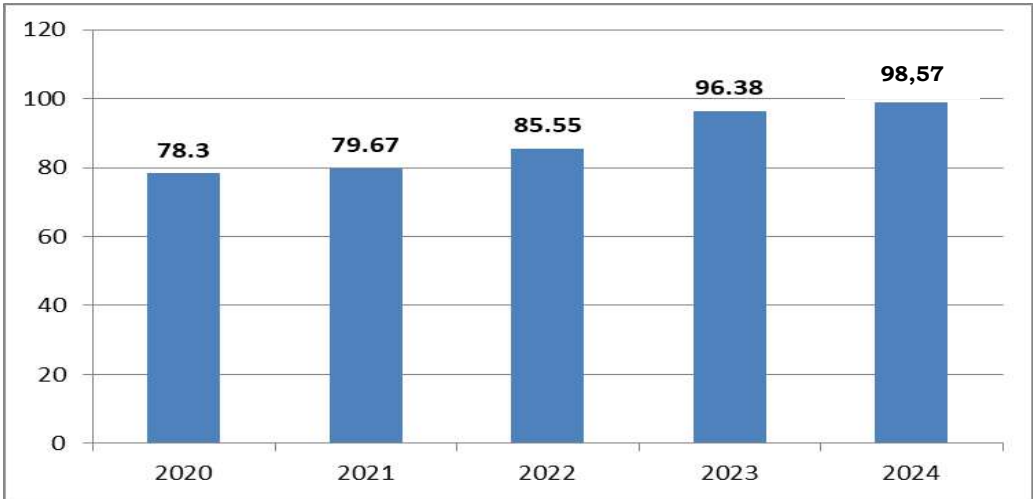
Kepesertaan jaminan Kesehatan secara umum dibagi menjadi dua yaitu peserta yang merupakan penduduk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non PBI. Peserta PBI merupakan penduduk miskin dan kurang mampu yang dibayarkan iurannya melalui APBN dan APBD. Sedangkan untuk peserta Non PBI merupakan penduduk dengan segmen pembiayaan mandiri atau Bukan Pekerja (BP), segmen penduduk Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Bukan Penerima Upah (PBPU).

Tabel 2.101 Cakupan Jaminan Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2024

Kantor Cabang	Jumlah Penduduk Semester I 2024	PBI JK	PBPU/BP Pemda	PPU BU	PPU PN	PBPU Mandiri	BP	Total Terdaftar JKN	%	Belum JKN	Keterangan
KC Pekanbaru	3.517.245	1.050.547	667.465	816.397	277.304	608.104	61.626	3.481.443	98,98	35.802	UHC
Pelalawan	434.590	129.891	86.133	135.322	25.185	49.623	1.798	427.952	98,47	6.638	UHC
Rokan Hulu	597.685	263.790	89.974	91.651	38.160	78.079	7.547	569.201	98,19	10.484	UHC
Kampar	876.767	334.663	149.404	168.442	57.159	147.791	16.561	873.990	99,68	2.777	UHC
Siak	487.673	130.155	120.237	128.364	44.886	58.967	3.717	486.326	99,72	1.347	UHC
Pekanbaru	1.138.530	192.078	221.717	292.618	111.914	273.644	32.003	1.123.974	98,72	14.556	UHC
KC Dumai	1.903.719	741.967	523.343	317.012	117.177	170.723	17.811	1.888.033	99,18	15.686	UHC
Rokan Hilir	670.692	292.893	160.903	88.030	34.350	77.143	5.766	659.085	98,72	11.607	UHC
Bengkalis	671.725	196.283	212.660	140.128	43.825	67.657	6.357	666.910	99,28	4.815	UHC
Kep Meranti	211.913	151.910	32.463	11.745	13.407	4.186	1.458	215.169	101,54	3.256	UHC
Dumai	349.389	100.881	117.317	77.109	25.595	21.737	4.320	346.869	99,28	2.520	UHC
KC Rengat	1.548.067	647.318	383.159	226.930	105.320	133.110	18.242	1.514.079	97,80	33.988	UHC
Indragiri Hilir	705.041	310.289	182.004	95.705	38.293	51.038	5.632	682.961	96,87	22.080	UHC
Indragiri Hulu	482.445	175.370	115.678	84.595	35.712	52.477	7.072	470.904	97,61	11.541	UHC
Kuantan Singingi	360.581	161.659	85.477	46.630	31.315	29.595	5.538	360.214	99,90	367	UHC
Total	6.969.031	2.439.832	1.573.967	1.360.339	499.801	911.937	97.679	6.883.55	98,77	85.476	UHC

Sumber: BPJ Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2025

Pada gambar di atas, terlihat bahwa beban pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan nasional baik itu berupa PBI-JK maupun PBI-PEMDA masih sangat besar yakni mencapai 4.013.799 jiwa (58,3 persen), dimana penduduk miskin dan rentan yang diidentifikasi berada pada Kuintil 1 dan 2 di Provinsi Riau berdasarkan data Susenas BPS tahun 2024 sebanyak 2.953.191 jiwa. Sementara, jumlah penduduk miskin Provinsi Riau per September 2024 sebanyak 473,04 Ribu Jiwa, sehingga perlu adanya upaya perbaikan untuk peninjauan kembali kepesertaan jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah dan pengalihan ke jaminan kesehatan yang sifatnya mandiri bagi masyarakat yang tidak masuk kategori miskin.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Gambar 2.54 Perkembangan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Pada gambar di atas, kepesertaan jaminan Kesehatan tahun 2024 di Provinsi Riau telah mencapai 6.869.613 jiwa dengan cakupan sebesar 98,57 persen, melampaui target cakupan kepesertaan *Universal Health Coverage* (UHC) nasional yaitu 95 persen. Ketercapaian ini karena adanya komitmen pemerintah provinsi melalui skema *budget sharing* pembiayaan PBI dengan kabupaten kota.

2.2.4.3 Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja/buruh dan menjamin kesempatan, serta menghindarkan dari perlakuan diskriminasi atas dasar

apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Perlindungan tenaga kerja merupakan jaminan wajib bagi tiap pekerja yang bekerja untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan hidupnya selama bekerja.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) adalah program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun. Jamsostek pun juga berupaya menjamin jika terjadi risiko kehilangan pekerjaan yang dikarenakan pemutusan hubungan kerja.

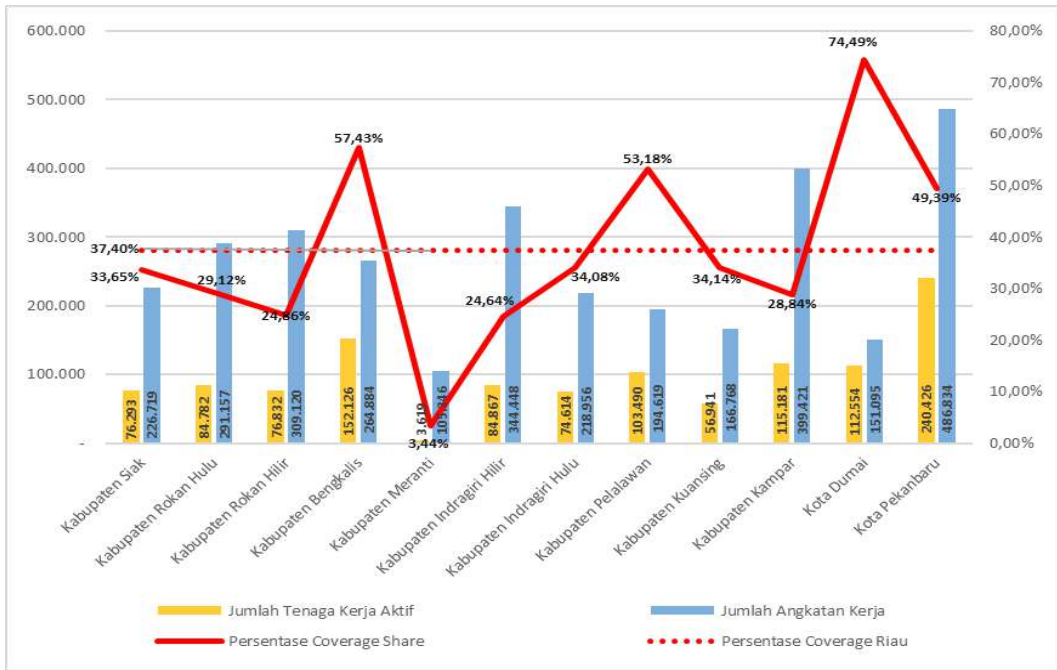
Pemberian perlindungan pekerja harus diberikan sejak usia produktif bekerja dan mudah diakses bagi seluruh pekerja Indonesia, terlepas apakah mereka bekerja di sektor formal maupun informal. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus dirancang sedemikian rupa untuk adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi global, yang mempengaruhi ekosistem industri dan ketidakpastian pasar dan secara langsung berpengaruh kepada keberlangsungan hubungan kerja. Persentase perlindungan terhadap tenaga kerja Provinsi Riau dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dari 35,70 persen pada tahun 2020 menjadi 37,40 persen pada tahun 2024. Namun dari tahun 2023 ke 2024 mengalami penurunan sebesar 0,77 persen ini disebabkan karena peningkatan angkatan kerja, dimana angkatan kerja pada tahun 2024 sebesar 3.159.367 jiwa atau meningkat sebanyak 157.033 jiwa. Berikut ini jumlah perkembangan perlindungan tenaga kerja Provinsi Riau dari tahun 2020-2024.

**Tabel 2.102 Perkembangan Perlindungan Tenaga Kerja
se-Provinsi Riau Tahun 2020-2024**

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Tenaga Kerja Terlindungi (a) (jiwa)	1.079.091	892.526	1.051.128	1.145.963	1.181.725
Jumlah Penduduk yang Bekerja (b) (jiwa)	3.022.988	3.148.947	3.168.929	3.002.334	3.159.367
Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	.226.825	3.294.616	3.313.818	3.134.788	3.280.728
Persentase Pekerja Terlindungi (persen)	35,70	28,34	33.17	38,17	37,40

Sumber: Riau Dalam Angka dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbar Riau Tahun 2025,diolah

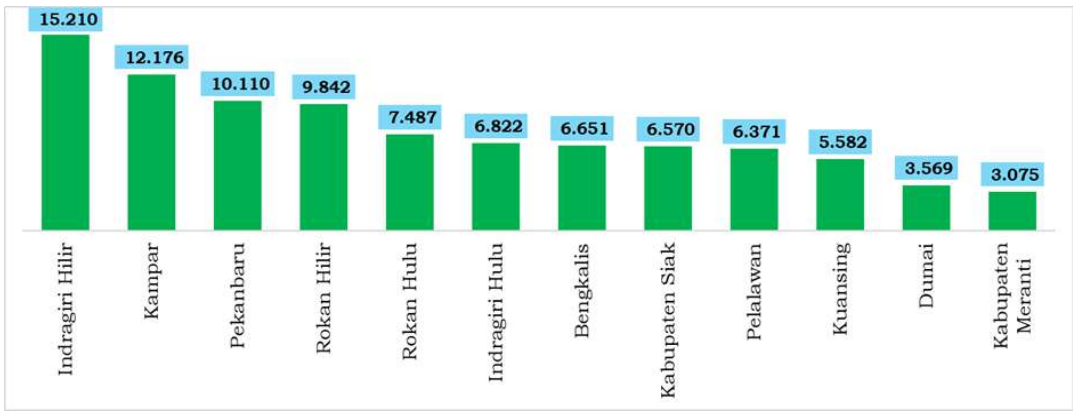
Berdasarkan perlindungan tenaga kerja kabupaten/kota tahun 2024 terdapat 6 kabupaten masih dibawah capaian rata rata Provinsi Riau yaitu Kabupaten Kuansing, Siak, Rokan Hulu, Kampar, Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti. Kota Dumai merupakan kota dengan persentase perlindungan tertinggi sebesar 74,49 persen atau sebanyak 112,6 Ribu Jiwa yang dilindungi dari 151,16 Ribu Jiwa Angkatan Kerja yang ada. Kabupaten Kep Meranti merupakan kabupaten dengan tingkat persentase perlindungan terendah sebesar 3,43 persen atau sebanyak 3,6 Ribu Jiwa yang dilindungi dari 105,35 Ribu Jiwa Angkatan Kerja yang ada. Dari perbandingan dengan Jumlah Angkatan Kerja terbanyak yang terlindungi kota Pekanbaru merupakan kota dengan perlindungan terbanyak sebesar 240,4 Ribu Jiwa dari Jumlah Angkatan Kerja 486,83 Ribu Jiwa Angkatan Kerja yang ada. Kondisi perlindungan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber Data : BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah SumbarRiau 2025

Gambar 2.55 Posisi Relatif Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024

Pekerja rentan adalah pekerja bukan penerima upah atau pekerja sektor informal yang kondisi kerjanya jauh dari nilai standar, memiliki resiko kerja yang tinggi, serta berpenghasilan sangat minim. Jumlah pekerja rentan Provinsi Riau tahun 2023 dengan tingkat kesejahteraan desil 1 sebanyak 62.699 Kepala Keluarga atau 93.465 Jiwa. Dengan kriteria laki laki 51.974 Kepala Keluarga dan perempuan 10.721 Kepala Keluarga. Kondisi pekerja rentan kabupaten/kota Provinsi Riau tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber: Data Regsosek

Gambar 2.56 Posisi Relatif Tenaga Kerja Rentan Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023

2.2.4.4 Penanganan Sosial

Penanganan sosial diperlukan oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan dasar wajib untuk dilayani. Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial Lanjutan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, standar pelayanan pada SPM Bidang Sosial di daerah provinsi, Pemerintah Provinsi bertanggungjawab dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi setiap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial khususnya disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan anak terlantar di dalam panti.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlayani Provinsi Riau pada mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuatif dan cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2024 sebesar 2.016.080 jiwa, dimana angka tersebut tergolong tinggi, Untuk jumlah PPKS yang terlayani seharusnya semakin lama angkanya menurun hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adanya pendatang imigran miskin yang masuk ke Provinsi Riau serta adanya kasus luar biasa seperti wabah *Covid 19* yang terjadi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, hal tersebut yang menyebabkan tingginya angka PPKS di Provinsi Riau. Dari sejumlah PPKS ini ada yang diberikan layanan di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial dan di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial. Pelayanan di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial khususnya untuk rehabilitasi sosial dasar sesuai kewenangannya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan untuk diluar Lembaga Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Di samping perlunya penyediaan panti untuk pemerlu pelayanan sosial tertentu, kehadiran Pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi pemerlu pelayanan sosial lainnya perlu terus dioptimalkan. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah

pemerlu pelayanan sosial dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dapat dilihat terdapat beberapa PPKS yang angkanya sangat tinggi terdiri dari Fakir miskin sebesar 1.907.359, lanjut usia terlantar 32.253, anak terlantar 35.047, korban bencana alam 17.728, penyandang disabilitas 7.659, anak balita terlantar 6.190, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 2.665, anak dengan kedisabilitasan 1.970 dan komunitas adat terpencil 1.198. Oleh karena itu dalam rangka melakukan pelayanan dan untuk memperkecil angka PPKS yang maka perlu dilakukan peningkatan layanan dan perlindungan terhadap PPKS yang angka masih tinggi serta menyiapkan sarana prasarana layanan yang sesuai standar dengan kriteria PPKS yang ada.

Jumlah PPKS yang terbesar terlihat dari jenis PPKS Fakir Miskin. Data Fakir Miskin yang ada di Provinsi Riau merupakan data yang bersumber dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sedangkan Jumlah PPKS yang tertangani dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.103 Perkembangan PPKS Provinsi yang Terlayani Tahun 2020-2024

No	Jenis PPKS	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak Berhadapan Hukum (Anak Nakal)	297	297	456	330	330
2	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	154	154	91	99	99
3	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	58	58	80	22	22
4	Keluarga Rentan (Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	37	49	49
5	Korban Tindak Kekerasan	9	9	63	55	55
6	Korban Trafficking	29	29	1	13	13
7	Kelompok Minoritas	8	8	20	5	5
8	Anak Jalanan	142	142	125	43	43
9	Pengemis	153	153	132	145	145
10	Gelandangan	263	263	186	250	250
11	Pemulung	160	160	6	352	352
12	Bekas BWBLP	91	91	15	380	380
13	Orang Dengan HIV/AIDS (OD HA)	555	555	158	892	892

No	Jenis PPKS	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
14	Korban Penyalahgunaan NAPZA	83	83	90	418	418
15	Korban Bencana Sosial	817	2419	1156	579	579
16	Tuna Susila	211	211	43	104	104
17	Komunitas Adat Terpencil	5.914	5.914	20.775	1.198	1.198
18	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	1.477	1.477	1.001	1.970	1.970
19	Anak Balita Terlantar	14	14	32	6.190	6.190
20	Penyandang Disabilitas (Cacat)	3.018	3.018	268	382	7.659
21	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	0	0	43	2.665	2.665
22	Korban Bencana Alam	4.520	27.458	32.933	17.728	17.728
23	Anak Terlantar	751	751	4977	35.047	35.047
24	Lanjut Usia Terlantar	33.895	33.895	5.710	32.253	32.253
25	Fakir Miskin	1.344.150	1.344.150	2.075.684	1.907.359	1.907.359
26	Anak Korban Tindak Kekerasan (KTK)/Diperlakukan salah	0	0	78	275	275
	Total Populasi PPKS Yang Terlayani	1.404.466	1.428,852	2.155.167	2.016.080	2.0160.080

Sumber: Dinas Sosial Provins Riau Tahun 2025

Peran kabupaten/kota dalam pelayanan PPKS juga sangat diperlukan karena terkait kewenangannya dalam melayani orang diluar panti dan memverifikasi orang yang membutuhkan pelayanan rehabilitasi dasar di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial yang merupakan kewenangan Provinsi. Adapun kabupaten/kota terlebih dahulu melakukan layanan di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada yang merupakan salah satu bentuk perlindungan yang di berikan Pemerintah Daerah kabupaten kepada PPKS yang ada. Adapun kabupaten yang tertinggi jumlah PPKS nya adalah kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 349.169 jiwa dan kabupaten yang terendah jumlah PPKS nya adalah kabupaten Pelalawan sebanyak 9.945 jiwa, Kondisi jumlah PPKS kabupaten/kota tahun 2024 dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Tabel 2.104 Jumlah PPKS Kabupaten/Kota Yang terlayani dari Tahun 2024

NO	Jenis PPKS	Kabupaten/Kota											
		Kampar	Indragiri Hulu	Bengkalis	Indragiri Hilir	Pelalawan	Rokan Hulu	Rokan Hilir	Siak	Kuantan Singingi	Kepulauan Meranti	Pekanbaru	Dumai
1	Anak Berhadapan Hukum (Anak Nakal)	38	26	23	13	60	7	14	70	1	10	48	20
2	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0	1	5	8	0	67	0	2	1	14	1	0
3	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0	0	1	0	20	0	0	0	0	0	1	0
4	Keluarga Rentan (Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	2	0
5	Korban Tindak Kekerasan	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	3	0
6	Korban Trafficking	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	7	1
7	Kelompok Minoritas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
8	Anak Jalanan	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	31	0
9	Pengemis	15	0	2	18	0	0	0	0	0	0	100	10
10	Gelandangan	15	0	5	10	0	0	30	0	2	23	100	65
11	Pemulung	0	12	5	5	0	4	0	0	0	0	326	0
12	Bekas BWBLP	140	0	40	0	0	0	0	0	0	0	200	0
13	Orang Dengan HIV/AIDS (OD HA)	0	0	0	190	173	6	0	21	0	0	2	500
14	Korban Penyalahgunaan NAPZA	244	0	3	16	1	0	0	5	0	0	149	0
15	Korban Bencana Sosial	14	51	222	30	0	29	0	171	0	7	0	55
16	Tuna Susila	0	0	17	20	0	0	0	7	0	0	60	0
17	Komunitas Adat Terpencil	0	0	149	123	50	0	0	235	0	641	0	0
18	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	258	126	15	0	0	477	0	277	0	10	672	135
19	Anak Balita Terlantar	0	0	3	0	0	1	0	6.168	1	0	17	0
20	Penyandang Disabilitas (Cacat)	2.163	186	98	506	500	1.709	0	1.430	218	52	503	294

NO	Jenis PPKS	Kabupaten/Kota											
		Kampar	Indragiri Hulu	Bengkalis	Indragiri Hilir	Pelalawan	Rokan Hulu	Rokan Hilir	Siak	Kuantan Singingi	Kepulauan Meranti	Pekanbaru	Dumai
21	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	1.685	0	0	0	200	0	0	0	44	0	736	0
22	Korban Bencana Alam	1.821	5.376	1.772	412	1.849	4.480	0	229	1.639	9	98	43
23	Anak Terlantar	13	377	10	6	0	0	50	34.290	10	0	283	8
24	Lanjut Usia Terlantar	596	13.843	27	3	5	4.146	400	10.840	391	382	19	1.601
25	Fakir Miskin	271.050	148.715	195.324	347.784	7.085	212.313	305.202	2.072	29.148	147.230	162.754	78.682
26	Anak Korban Tindak Kekerasan KTK) / Diperlakukan salah	19	6	3	23	0	59	0	45	34	1	49	36
Jumlah		278.071	168.719	197.781	349.169	9.945	223.350	305.696	55.865	31.489	148.379	166.166	81.450

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau

Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada setiap PSKS, maka sangat dibutuhkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam pelayanan kesejahteraan sosial PSKS berperan melalui penguatan kapasitas dan motivasional dengan melaksanakan kegiatan pelatihan motivasional, pelatihan pengenalan dan pemahaman masalah kesejahteraan sosial, penyediaan sarana operasional kinerja, pemberian bantuan sarana prasarana organisasi PSKS. Jumlah PSKS sebagai berikut:

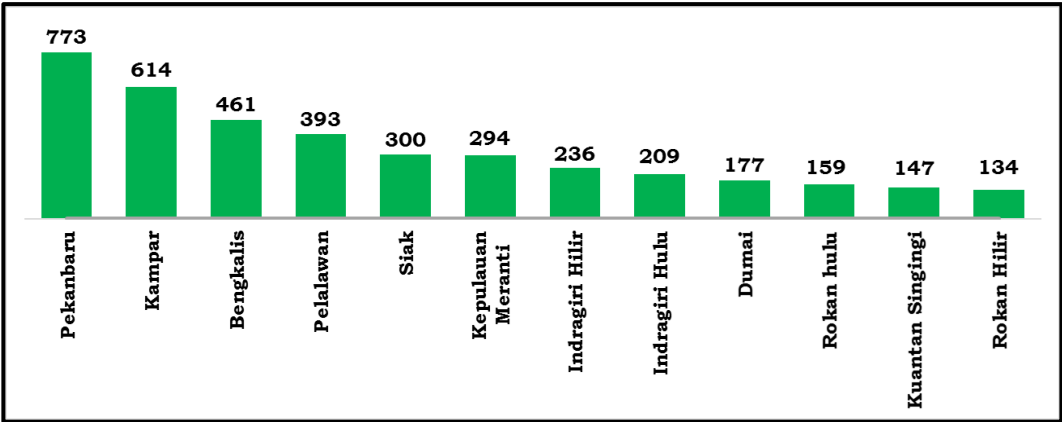
Tabel 2.105 Jumlah Perkembangan PSKS Provinsi Riau dari Tahun 2020-2024

Jenis PPKS	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Perorangan	4.080	4.080	3.591	3.591	3.591
Pekerja Sosial Profesional (PKH, Peksos, PKSA)	770	770	690	690	690
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	1207	1207	1009	1009	1009
Taruna Siaga Bencana (Tagana)	602	602	572	572	572
Karang Taruna (KT)	927	927	882	882	882
Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	294	294	160	160	160
Penyuluh Sosial	109	109	127	127	127
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	171	171	151	151	151
Pekerja Sosial Profesional (PKH, Peksos, PKSA)	0	0	0	0	0
1. Keluarga	31	31	31	31	30
Keluarga Poineer	30	30	30	30	30
<i>Family Care Unit</i> (FCU)	1	1	1	1	0
2. Lembaga	295	295	276	276	276
Dunia Usaha	50	50	0	0	0
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	198	198	223	223	223
Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga berbasis Masyarakat (HKS KBM)	37	37	24	24	24
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10	10	29	29	29
Total Jumlah PSKS yang ada	4.406	4.406	3.898	3.898	3.897

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau

Sebaran PSKS yang ada terdapat di kabupaten/kota dalam upaya melakukan untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSKS terbanyak terdapat di Kota Pekanbaru dengan jumlah 773 orang

dan paling sedikit terdapat di Kabupaten Rokan Hilir dengan jumlah 134 orang. Kondisi jumlah PSKS di kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025

Gambar 2.57 Jumlah PSKS di Kabupaten/Kota Tahun 2024

Dasar hukum bidang sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota. Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM Provinsi Riau untuk bidang sosial tahun 2021 dan tahun 2022 mengacu pada target nasional yaitu 100 persen. Secara rinci capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Riau tahun 2021 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.106 Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)
Bidang Sosial Provinsi Riau Tahun 2021 – 2024**

No	Jenis SPM Sosial	Indikator	Capaian				Capaian Terhadap Kondisi Sarana dan Prasarana
			2021	2022	2023	2024	2024
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti	100	100	100	100	60
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	100	100	100	100	70
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti	100	100	100	100	70
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-	100	100	100	40
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	100	100	100	100	70

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Riau

Untuk mendukung pelayanan dasar sosial yang menjadi kewenangan Provinsi sangat dibutuhkan ketersediaan sarana prasarana yang memadai dan peningkatan layanan kesejahteraan sosial di dalam panti sesuai dengan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di dalam panti. Oleh sebab itu sebagai bagian dari pelayanan dasar, pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk menyediakan, memberikan dan melakukan pembinaan sarana pelayanan tersebut.

Sarana pelayanan sosial cukup banyak ditemukan di tengah masyarakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Sarana pelayanan sosial dapat berupa lembaga, kelompok, dan juga perorangan yang memiliki

tujuan untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat khususnya bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dengan adanya sarana pelayanan sosial ini dirasakan sangat membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada PPKS, karena program dan kegiatan dari pemerintah saja memang belum cukup untuk dapat menampung dan memberikan pelayanan kepada seluruh PPKS yang ada.

Jumlah PPKS yang di rehab Lembaga Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Swasta di Provinsi Riau mengalami peningkatan yaitu di tahun 2024 sebesar 3.604 jiwa. Dan ini merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal yang ada. Berikut perkembangan kondisi jumlah PPKS khususnya disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan anak terlantar di dalam panti yang merupakan Standar Minimal Pelayanan kewenangan Provinsi yang terlayani.

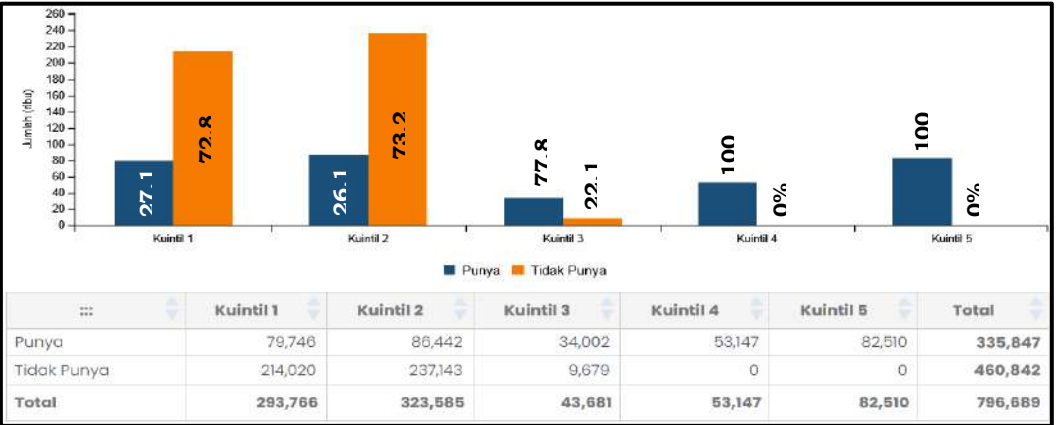
Tabel 2.107 Perkembangan Jumlah PPKS Berdasarkan Pelayanan Minimum (SPM) Bidang yang Terlayani Sosial Kewenangan Provinsi Tahun 2020-2024

Jenis SPM Sosial	2020	2021	2022	2023	2024
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	105	194	199	204	199
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	591	3.710	3.875	4.020	3.309
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	80	80	90	90	83
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	20	0	20	40	13
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi					
JUMLAH	796	3.984	4.184	4.354	3.604

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Riau

Selanjutnya, yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana program bantuan yang telah dilaksanakan secara reguler dapat dilakukan lebih teliti agar lebih tepat sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dari sebaran penerima bantuan atau jaminan sosial terutama bagi masyarakat di kelompok kesejahteraan terendah (kuintil 1 atau 20 persen terendah). Tabulasi kepemilikan salah satu dari Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, atau Kartu Keluarga

Sejahtera dalam rumah tangga, atau setidaknya dimiliki oleh salah satu anggota keluarga. Sebagaimana dapat dilihat dari data capaian berikut:



Sumber: Sepakat (Sakernas) Bappenas 2023
Gambar 2.58 Kepemilikan Jaminan Sosial Setidaknya Memiliki Satu Jaminan Sosial (Jumlah dan Persentase) di Provinsi Riau Tahun 2024

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama bertujuan untuk mengukur tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama di Indonesia. Kerukunan merupakan salah satu pilar penting dalam memelihara persatuan rakyat dan bangsa Indonesia. Indeks Kerukunan Umat Beragama terdiri dari tiga indikator yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Secara rinci perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.108 Perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kerukunan Umat Beragama	69,26	66,67	74,32	71,60	84,23
- Indeks Dimensi Kesetaraan	68,30	69,20	75,32	77,61	84,92
- Indeks Dimensi Kerja Sama	71,18	70,00	73,65	75,59	84,38
- Indeks Dimensi Toleransi	68,30	60,80	70,39	74,46	72,50
Peringkat Nasional	31	31	16	31	2

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Riau tahun 2024 mengalami kenaikan yang sangat signifikan di 5 (lima) tahun terakhir yakni sebesar 84,23 dengan status kondisi rukun, hal ini dikarenakan 2 (dua) dimensi mengalami kenaikan, yang meliputi dimensi kesetaraan tahun 2023 sebesar 77,61 naik di tahun 2024 sebesar 84,92 dan dimensi kerjasama tahun 2023 sebesar 75,59 naik di tahun 2024 sebesar 84,38. Sehingga Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Riau tahun 2024 berada diatas rata – rata nasional, dengan nilai yang mengalami kenaikan signifikan tersebut maka secara peringkat Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Riau tahun 2024 juga mengalami kenaikan yakni mendapatkan peringkat 2 secara nasional setelah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk kedepannya Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan bagian dari komponen Indeks Harmoni dimana Indeks Dimensi Kesetaraan, Kerjasama, dan Toleransi menjadi variabel pada komponen indikator Harmoni Relegius.

2.2.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Peran kebudayaan dalam pembangunan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Salah satu *instrument* yang memberikan gambaran kemajuan kebudayaan adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan yang memberikan gambaran kemajuan Pembangunan kebudayaan suatu daerah. IPK dibentuk melalui tujuh dimensi yang terdiri dari ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Adapun perkembangan IPK Provinsi Riau sebagai berikut:

**Tabel 2.109 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2019–2023**

No	Dimensi	Bobot Dimensi	Nilai				
			2019	2020	2021	2022	2023
D1	Ekonomi Budaya	0.10	48.32	42.45	26.35	39.34	30.73
D2	Pendidikan	0.20	77.23	75.29	74.27	76.22	78.03
D3	Ketahanan Sosial Budaya	0.20	75.41	75.64	70.07	73.88	75.30
D4	Warisan Budaya	0.25	45.91	48.00	47.47	51.75	53.02
D5	Ekspresi Budaya	0.10	36.13	36.05	22.31	25.39	26.54
D6	Budaya Literasi	0.10	61.90	65.25	56.39	61.92	63.46
D7	Gender	0.05	60.24	58.82	59.20	57.91	60.03
IPK Provinsi Riau			59.65	59.50	54.20	58.52	58.99
IPK Nasional			55.91	54.65	51.90	55.13	57.13

Sumber : Kemendikbudristek RI

Pada tahun 2020 Pandemi *Covid 19*, skor IPK Riau cenderung stabil meskipun sedikit mengalami penurunan sebesar 0,25 poin. Peringkatnya meningkat ke posisi 4. Namun, pada tahun 2021 skor IPK Riau menurun cukup tajam, yakni sebesar 5,3 poin menjadi 54,20. Pada tahun ini peringkatnya turun ke posisi 8. Hampir seluruh dimensi pembentuknya menurun, kecuali Dimensi Gender. Dimensi yang mengalami penurunan terbesar, yaitu Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, dan Dimensi Budaya Literasi.

Memasuki periode Pasca Pandemi, skor IPK Riau mengalami perbaikan. Skor IPK berhasil meningkat dari tahun 2021 sebesar 54,20 menjadi 58,99 pada tahun 2023, diiringi dengan meningkatnya seluruh dimensi pembentuk. Dimensi yang mengalami peningkatan paling besar, yaitu Dimensi Budaya Literasi skor 56,39 pada tahun 2021 menjadi 63,46 pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 7,07 poin, sedangkan Dimensi yang mengalami peningkatan paling kecil yaitu Dimensi Gender dengan skor pada tahun 2021 sebesar 59,20 menjadi 60,03 pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 0,83 poin.

2.2.5.3 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya pemajuan kebudayaan telah mengusulkan dan menetapkan warisan budaya baik secara nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya perlindungan status Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sebagai bagian dari kebudayaan Melayu Riau. Adapun jumlah penetapan WBTB dan Cagar Budaya selama kurun waktu tersebut serta perbandingan persentasinya terhadap jumlah OPK yang ada, lebih jelas disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.110 Penetapan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya Provinsi Riau Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	OPK Non Bendawi	1.822 OPK				
	Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	6	10	5	8	2
	Persentase	0,33	0,55	0,27	0,44	0,11
2	OPK Bendawi	1.988 OPK				
	Penetapan Cagar Budaya	19	-	-	25	12
	Persentase	0,96	-	-	1,26	0,60

Sumber: Data olahan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Penetapan WBTB dan Cagar Budaya di Provinsi Riau bila dibandingkan dari jumlah OPK yang telah tercatat masih sangat rendah. Perlu strategi dan kebijakan yang tepat untuk dapat mendorong pengusulan dan penetapan WBTB dan Cagar Budaya. Upaya dokumentasi dan pengkajian OPK non bendawi serta pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya, merupakan langkah konkret dalam menggesa pengusulan dan penetapan WBTB dan Cagar Budaya di 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyatakan bahwa Pemajuan Kebudayaan Provinsi berpedoman pada Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Riau telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 856/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018, dimana secara ringkas data OPK berdasarkan PPKD dan perkembangannya sampai dengan tahun

2023 yang merupakan data terakhir disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.111 Rekapitulasi Data Objek Pemajuan Kebudayaan
Tahun 2019 - 2023**

No	Obyek Pemajuan Kebudayaan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tradisi Lisan	158	160	305	240	429
2	Manuskrip	41	43	73	94	94
3	Adat Istiadat	65	65	146	191	212
4	Ritus	273	273	385	431	431
5	Pengetahuan Tradisional	385	385	844	995	996
6	Teknologi Tradisional	189	189	403	506	507
7	Seni	370	370	538	588	600
8	Bahasa	74	74	74	128	128
9	Permainan Rakyat	219	219	255	273	283
10	Olahraga Tradisional	44	44	68	86	88
11	Cagar Budaya/Warisan Budaya Bendawi	1.482	1.988	1.988	2.424	2.489
Jumlah		3.300	3.810	5.079	6.136	6.257

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Unsur pemajuan kebudayaan terklasifikasi ke dalam 10 (sepuluh) Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan ditambah 1 (satu) obyek berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Secara keseluruhan upaya pemajuan kebudayaan meliputi 11 OPK yang terdiri atas (1) tradisi lisan, (2) manuskrip, (3) adat istiadat, (4) ritus, (5) pengetahuan tradisional, (6) teknologi tradisional, (7) kesenian, (8) bahasa, (9) permainan rakyat, (10) olahraga tradisional, dan (11) cagar budaya. Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 3.300 Obyek menjadi 6.257 Obyek pada tahun 2023. Objek Pemajuan Kebudayaan yang jumlahnya sangat besar pada tahun 2023 yaitu Cagar Budaya/Warisan Budaya Bendawi sebesar 2.489 Objek, Pengetahuan Tradisional sebesar 996 Obyek, dan Seni sebesar 600 Objek. Terkait ruang lingkup Pemajuan Kebudayaan meliputi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan yang disajikan sebagai berikut. Untuk lebih jelas disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.112 Data Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi Tahun 2020 – 2023

No	OPK	Pelindungan				Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	
1	Tradisi Lisan	112	119	122	125	0,037
2	Manuskrip	30	32	33	34	0,043
3	Adat Istiadat	46	48	50	51	0,035
4	Ritus	191	202	208	214	0,025
5	Pengetahuan Tradisional	270	285	293	302	0,038
6	Teknologi Tradisional	132	140	144	148	0,039
7	Seni	259	274	282	290	0,038
8	Bahasa	52	55	56	58	0,037
9	Permainan Rakyat	153	162	167	172	0,040
10	Olahraga Tradisional	31	33	34	34	0,048
11	Cagar Budaya/warisan budaya bendawi	1.392	1.474	1.515	1.557	0,038
Jumlah		2.667	2.824	2.904	3.038	0,047

Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Berdasarkan tabel di atas Data OPK yang dilindungi dari tahun 2020 sampai tahun 2023 terjadi peningkatan dari 2.667 obyek menjadi 3.038 obyek atau penambahan sebesar 371 obyek. Dari data OPK tahun 2023 sebesar 6.257 obyek, Dimana OPK yang dilindungi sebesar 3.038 obyek atau sebesar 48,55 persen. Rata-rata pertumbuhan OPK yang dilindungi pada periode 2020 sampai dengan 2023 adalah sebesar 0,047 persen, dengan rata- rata obyek yang paling besar adalah objek olahraga tradisional dengan rata-rata pertumbuhan 0,048 persen.

Tabel 2.113 Data Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dikembangkan Tahun 2020 – 2023

No	OPK	Pengembangan				Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	
1	Tradisi Lisan	3	6	10	13	0,66
2	Manuskrip	1	2	3	3	0,75
3	Adat Istiadat	1	3	4	5	0,86
4	Ritus	5	11	16	22	0,68
5	Pengetahuan Tradisional	8	16	23	31	0,60
6	Teknologi Tradisional	4	8	11	15	0,58
7	Seni	7	15	22	30	0,66
8	Bahasa	1	3	4	6	0,94
9	Permainan Rakyat	4	9	13	18	0,69
10	Olahraga Tradisional	1	2	3	4	0,61
11	Cagar Budaya/warisan budaya bendawi	40	80	119	95	0,43
Jumlah		76	153	229	242	0,52

Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Berdasarkan tabel di atas Data OPK yang dikembangkan dari tahun 2020 sampai tahun 2023 terjadi peningkatan dari 76 obyek menjadi 242 obyek atau penambahan sebesar 166 objek. Dari data OPK tahun 2023 sebesar 6257 obyek, dimana OPK yang dikembangkan sebesar 242 obyek atau sebesar 3,86 persen. Rata-rata pertumbuhan OPK yang dikembangkan pada periode 2020 sampai dengan 2023 adalah sebesar 0,52 persen, dengan rata-rata objek yang paling besar adalah obyek bahasa dengan rata-rata pertumbuhan 0,94 persen.

Tabel 2.114 Data OPK Yang Dimanfaatkan Tahun 2020 – 2023

No	OPK	Pemanfaatan				Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	
1	Tradisi Lisan	3	5	6	8	0,40
2	Manuskrip	1	1	2	2	1,00
3	Adat Istiadat	1	2	3	4	0,61
4	Ritus	5	8	11	15	0,45
5	Pengetahuan Tradisional	8	12	16	20	0,36
6	Teknologi Tradisional	4	6	8	11	0,30
7	Seni	7	11	15	20	0,42
8	Bahasa	1	2	3	5	0,72
9	Permainan Rakyat	4	7	9	12	0,46
10	Olahraga Tradisional	1	1	2	3	0,75
11	Cagar Budaya/warisan budaya bendawi	40	60	80	100	0,36
	Jumlah	76	115	153	200	0,38

Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Berdasarkan tabel di atas Data OPK yang telah dimanfaatkan dari tahun 2020 sampai tahun 2023 terjadi peningkatan dari 76 obyek menjadi 200 obyek atau penambahan sebesar 124 obyek. Dari data OPK tahun 2023 sebesar 6.257 obyek, Dimana OPK yang dimanfaatkan sebesar 200 obyek atau sebesar 3, 19 persen. Rata-rata pertumbuhan OPK yang dimanfaatkan pada periode 2020 sampai dengan 2023 adalah sebesar 0,38 persen, dengan rata-rata obyek yang paling besar adalah obyek manuskrip dengan rata-rata pertumbuhan 1 persen.

Provinsi Riau dalam upaya pemajuan kebudayaan tidak hanya menitikberatkan pada upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan OPK, juga dalam hal pembinaan OPK. Terkait upaya pembinaan OPK yang menjadi sasaran dari upaya ini adalah

sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan, termasuk lembaga pengelola sarana prasana kebudayaan yang merupakan subyek atau pelaku/penggiat/pemerhati kebudayaan.

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak adalah Indikator yang menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak. IPA disusun berdasarkan 5 klaster hak anak, yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan perlindungan khusus. Perkembangan Indeks Perlindungan Anak Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.115 Indeks Perlindungan Anak Provinsi Riau
Tahun 2021-2024**

Provinsi	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Riau	64,26	66,93	69,10	71,50

Sumber: Kementerian PPPA

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Perlindungan Anak Provinsi Riau dari tahun 2021-2024 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 3,62 persen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).

2.2.6.2 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)

IPKK merupakan indeks yang mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. IPKK diperoleh dengan menghitung nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu 3(tiga) dimensi kesejahteraan, dimensi

ketahanan, dan dimensi partisipasi, dengan indikator sebagai berikut:

- 1. Dimensi Kesejahteraan (3 indikator):
 - a. Persentase rumah tangga yang di dalamnya terdapat anggota rumah tangga yang tahun lalu pernah mengalami tidak dapat menyantap makanan sehat dan bergizi karena kurangnya uang atau sumber daya
 - b. Tinggal dalam rumah layak huni
 - c. Tidak ada Anggota Rumah Tangga yang sakit
- 2. Dimensi Ketahanan (5 indikator):
 - a. Persentase rumah tangga yang di dalamnya terdapat anggota rumah tangga yang memiliki tabungan di lembaga keuangan
 - b. Persentase rumah tangga yang di dalamnya terdapat anggota rumah tangga yang memiliki asuransi kesehatan
 - c. Persentase rumah tangga yang di dalamnya terdapat anggota rumah tangga yang pernah menggunakan internet 3 bulan yang lalu
 - d. Tidak terdapat konflik antar anggota keluarga
 - e. Interaksi antar anggota keluarga
- 3. Dimensi Partisipasi (3 indikator):
 - a. Ikut kegiatan sosial
 - b. Persentase Rumah Tangga yang di dalamnya terdapat anggota rumah tangga dengan status pengusaha dibantu buruh tetap/dibayar
 - c. Persentase rumah tangga yang memiliki pengeluaran transfer setahun terakhir

Tabel 2.116 Capaian Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Provinsi Riau Tahun 2021- 2024

Provinsi	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)			
	2021	2022	2023	2024
Riau	70,38	71,58	78,12	79,69

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nilai IPKK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat atau semakin baik. Capaian IPKK Provinsi Riau selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan peningkatan.

2.2.6.3 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender untuk mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan (pendidikan dan keterwakilan politik), dan partisipasi dalam pasar tenaga kerja. Semakin tinggi nilai IKG, semakin besar ketimpangan gender dalam suatu daerah. Perkembangan indeks ketimpangan gender Provinsi Riau dari tahun 2020-2023 mengalami penurunan namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 0,01 poin menjadi sebesar 0,47. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat gap kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan di Provinsi Riau. Penurunan IKG Riau tahun 2024 dipengaruhi oleh menurunnya keterwakilan legislative perempuan, sedangkan indikator lainnya mengalami perbaikan.

Pada tahun 2024, ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kota Pekanbaru, diikuti oleh Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis. Sebanyak sepuluh kabupaten/kota mengalami penurunan ketimpangan gender. Kota Dumai mengalami penurunan ketimpangan gender paling tinggi. Penurunan ketimpangan gender di Kota Dumai terutama didorong oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi. Proporsi perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan menurun sebesar 0,034 poin dan proporsi perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia <20 tahun menurun sebesar 0,047 poin. Kesimpulannya, dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, terdapat lima kabupaten/kota yang capaian IKG nya lebih baik dibandingkan capaian Provinsi Riau yang mencapai 0,47 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan masih adanya disparitas ketimpangan gender antar kabupaten/kota di Riau. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) kabupaten/kota se-Provinsi Riau Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.117 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No.	Provinsi/Kabupaten /Kota	2020	2021	2022	2023	2024
14	Riau	0,50	0,48	0,47	0,46	0,47
14.01	Kampar	0,53	0,50	0,53	0,49	0,49
14.02	Indragiri Hulu	0,64	0,62	0,62	0,57	0,58
14.03	Bengkalis	0,49	0,48	0,45	0,49	0,40
14.04	Indragiri Hilir	0,59	0,59	0,58	0,57	0,53
14.05	Pelalawan	0,63	0,63	0,64	0,59	0,59
14.06	Rokan Hulu	0,60	0,55	0,59	0,56	0,50
14.07	Rokan Hilir	0,57	0,55	0,52	0,53	0,51
14.08	Siak	0,60	0,54	0,54	0,54	0,52
14.09	Kuantan Singingi	0,61	0,60	0,58	0,54	0,45
14.10	Kepulauan Meranti	0,49	0,48	0,50	0,49	0,46
14.71	Kota Pekanbaru	0,23	0,29	0,15	0,13	0,22
14.72	Kota Dumai	0,31	0,41	0,46	0,41	0,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

2.2.6.4 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran laki-laki dan perempuan. Untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi/advokasi pendidikan dan latihan bagi kaum perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor.

Keberhasilan pembangunan perempuan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender. IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender atau yang difokuskan kepada perempuan. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.118 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Riau
Tahun 2020-2024**

Kode	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender				
		2020	2021	2022	2023	2024
14	Riau	88,14	88,38	88,71	88,98	89,32
14.01	Kampar	89,52	89,79	89,81	89,87	90,18
14.02	Indragiri Hulu	86,94	86,69	86,73	87,07	87,41
14.03	Bengkalis	90,07	90,10	90,11	89,94	89,91
14.04	Indragiri Hilir	82,34	82,37	82,74	83,20	83,70
14.05	Pelalawan	88,06	88,73	88,94	89,37	89,44
14.06	Rokan Hulu	81,88	82,12	82,44	82,72	83,05
14.07	Rokan Hilir	84,91	84,65	85,13	85,38	85,81
14.08	Siak	88,62	88,69	88,79	88,93	89,03
14.09	Kuantan Singingi	90,16	90,06	90,48	90,47	90,69
14.10	Kepulauan Meranti	86,30	86,45	86,97	87,35	87,44
14.71	Kota Pekanbaru	93,01	93,27	93,63	93,89	94,04
14.72	Kota Dumai	90,66	90,72	90,74	90,92	91,35

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

2.2.6.5 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Jumlah penduduk Provinsi Riau pada akhir tahun 2023 adalah 6.861.237 jiwa. Sementara total jumlah pemuda di Bumi Lancang Kuning adalah sebesar 24,03 persen atau sebesar 1.646.696 jiwa. Perkembangan IPP Provinsi Riau tahun 2023 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan capaian IPP pada tahun 2022 lalu. Pada tahun 2023 IPP Provinsi Riau senilai 60,43 dan pada tahun 2022 hanya menyentuh angka 55,27, angka IPP Provinsi Riau naik 5 poin dibandingkan tahun 2022 namun angka ini lebih rendah dibandingkan IPP Nasional yaitu 60,59.

**Tabel 2.119 Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Provinsi Riau Tahun 2020-2023**

No.	IPP / Domain	2020	2021	2022	2023
1	NASIONAL	58.45	57.91	58.76	60.59
2	RIAU	49.64	56.46	55.27	60.43
2.1.	Pendidikan dan Pelatihan	65.25	63.44	65.28	67.87
2.2.	Kesehatan	43.33	72.72	49.06	59.84
2.3.	Ketenagakerjaan Layak	60.77	62.70	62.39	69.34
2.4.	Partisipasi dan Kepemimpinan	9.57	17.46	41.47	41.62
2.5.	Inklusivitas dan Gender	69.49	66.08	57.76	63.23

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pada tabel Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Riau di atas pada tahun 2020-2023 dapat dilihat bahwa ke 5 domain pembentuk IPP yaitu domain Pendidikan dan Pelatihan mengalami

kenaikan setiap tahunnya, domain kesehatan mengalami fluktuatif, domain ketenagakerjaan layak mengalami kenaikan tiap tahunnya sedangkan domain partisipasi dan kepemimpinan mengalami kenaikan yang sedikit, sedangkan domain Inklusivitas dan gender mengalami fluktuatif.

Untuk tahun 2023, Domain Pembentuk IPP tiga terendah berada di Domain Partisipasi dan Kepemimpinan, domain Kesehatan dan domain inklusivitas dan kesetaraan gender. Pada domain Partisipasi dan Kepemimpinan yang rendah pada indikator pemuda aktif mengikuti organisasi dan Pemuda yang menduduki posisi manajerial. Pada domain Kesehatan yang rendah pada indikator pemuda yang berolahraga dan remaja yang hamil. Pada domain inklusivitas dan kesetaraan gender yang rendah pada indikator pemuda disabilitas yang bekerja.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.1.1 Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan Provinsi Riau tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Rasio ketergantungan Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 45,58 persen, ini berarti bahwa untuk setiap 100 orang usia kerja, ada sekitar 45 orang yang berada dalam kelompok usia bergantung (baik usia muda maupun usia tua). Rasio ini memberikan gambaran tentang beban ekonomi yang harus ditanggung oleh

penduduk usia kerja untuk mendukung mereka yang tidak aktif secara ekonomi. Hampir setengah dari populasi usia kerja harus menanggung beban dari mereka yang tidak aktif secara ekonomi. Ini dapat mencerminkan tingkat ketergantungan yang moderat, di mana penduduk usia kerja memiliki tanggung jawab untuk mendukung populasi yang lebih muda dan lebih tua.

Tabel 2.120 Rasio Ketergantungan Provinsi Riau Tahun 2024

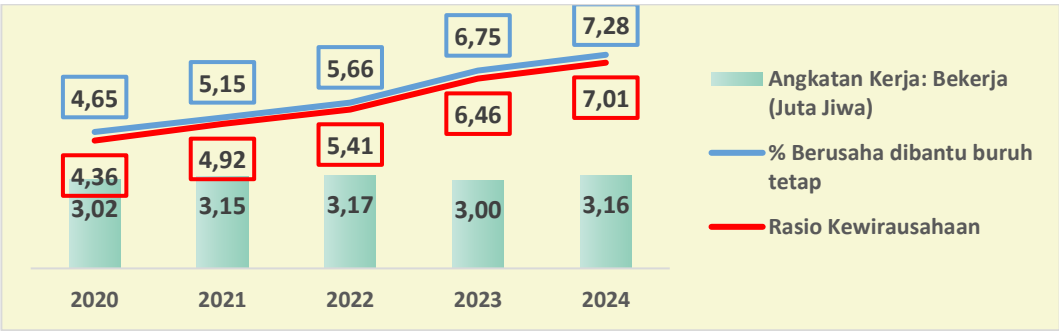
Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Distribusi
0 – 4	298.185	286.162	584.347	8,58
5 – 9	310.291	295.671	605.962	8,90
10 – 14	306.665	292.192	598.857	8,79
15 – 19	294.504	276.265	570.769	8,38
20 – 24	287.372	272.035	559.407	8,21
25 – 29	285.108	274.810	559.918	8,22
30 – 34	277.119	268.259	545.378	8,01
35 – 39	268.178	261.998	530.176	7,78
40 – 44	250.919	244.864	495.783	7,28
45 – 49	233.989	225.494	459.483	6,75
50 – 54	202.444	193.674	396.118	5,82
55 – 59	163.362	154.227	317.589	4,66
60 – 64	125.608	118.484	244.092	3,58
65-69	85.542	81.188	166.730	2,45
70-74	53.215	51.763	104.978	1,54
75+	34.205	37.366	71.571	1,05
Jumlah Penduduk	3.776.706	3.334.452	7.111.158	100
Usia Produktif	388.603	2.290.110	4.678.713	68,69
Usia Belum Produktif	915.141	874.025	1.789.166	26,27
Usia Tidak Produktif	172.962	170.317	343.279	5,04
Usia Non Produktif (BP+TP)	1.088.103	1.044.342	2.132.445	31,31
Persentase Usia Produktif	68,70	68,68	68,69	
Persentase Usia Belum Produktif	26,32	26,21	26,27	
Persentase Usia Tidak Produktif	4,97	5,11	5,04	
Rasio Ketergantungan	45,55	45,60	45,58	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1 Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Dengan peningkatan rasio kewirausahaan, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan dan program yang efektif untuk mendukung pengembangan kewirausahaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau

Gambar 2.59 Rasio Kewirausahaan Daerah Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Meningkatnya rasio kewirausahaan di Provinsi Riau dari 4,36 pada tahun 2020 menjadi 7,01 pada 2024. Hal ini didukung oleh meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dan dibantu oleh buruh tetap serta meningkatnya keterampilan dan pengetahuan dalam berwirausaha. Dukungan dari buruh tetap membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung bagi pengusaha. Dengan adanya tenaga kerja yang terampil dan loyal, pengusaha dapat lebih fokus pada pertumbuhan dan inovasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasio kewirausahaan.

2.3.2.2 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan selalu terkait dengan kependudukan. Salah satu contoh adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya penyediaan (*supply*) tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran dan setengah pengangguran. Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Riau digambarkan sebagai berikut. Penduduk Usia Kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas.

Penduduk usia kerja Provinsi Riau tahun 2024 sebanyak 4.946.203 orang, naik sebanyak 82.464 orang dibandingkan tahun 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu sebanyak 3.280.728 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 1.665.475 orang. Komposisi angkatan kerja Provinsi Riau tahun 2024 terdiri dari 3.159.367 orang penduduk yang bekerja dan 121.360 orang pengangguran. Apabila dibandingkan tahun 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 145.940 orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 157,04 ribu orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 11.093 orang. Penduduk Bekerja pada tahun 2024 terdiri dari pekerja penuh sebanyak 2.001.590, pekerja paruh waktu 869.510 orang dan setengah pengangguran 288.270 orang.

**Tabel 2.121 Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Riau
Tahun 2020-2024**

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Tahun					Perubahan Agustus 2023-2024
	2020	2021	2022	2023	2024	
Penduduk Usia Kerja (PUK)	4.946.105	5.066.687	5.189.243	4.863.739	4.946.203	82.464
Angkatan Kerja	3.226.825	3.294.616	3.313.818	3.134.788	3.280.728	145.940
1. Bekerja	3.022.988	3.148.947	3.168.929	3.002.334	3.159.367	157.033
a.Pekerja Penuh	1.802.540	1.898.990	2.015.620	1.953.790	2.001.590	47.800
b.Pekerja Paruh Waktu	861.580	936.460	918.190	807.520	869.510	61.990
c.Setengah Pengangguran	358.870	313.470	235.120	241.030	288.270	47.240
2. Pengangguran	203.837	145.669	144.899	132.454	121.360	(11.093)
Bukan Angkatan Kerja	1.719.280	1.772.071	1.875.425	1.728.951	1.665.475	(63.476)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Kondisi ketenagakerjaan kabupaten/kota se Provinsi Riau tahun 2024 dimana Penduduk Usia Kerja terbanyak di Kota Pekanbaru 759.592 orang, Kabupaten Kampar 650.098 orang dan Kabupaten Indragiri Hilir 514.719 orang. Sedangkan terendah di Kabupaten Kepulauan Meranti 161.404 orang. Penduduk yang bekerja terbanyak di Kota Pekanbaru 486.834 orang, Kabupaten Kampar 399.421 orang dan Kabupaten Indragiri Hilir 344.448 orang. Sedangkan terendah di Kabupaten Kepulauan Meranti 105.346 orang. Pengangguran terbanyak di Kota Pekanbaru 23.635 orang, Kabupaten Bengkalis 16.561 orang dan Kabupaten Kampar

15.220 orang. Sedangkan terendah di Kabupaten Pelalawan 4.238 orang.

Bukan Angkatan kerja yang terdiri dari penduduk usia kerja yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi (orang tua, pensiun, pengasuh, dll) terbanyak di Kota Pekanbaru 249.123 orang, Kabupaten Kampar 235.457 orang dan Kabupaten Rokan Hilir 169.571 orang. Sedangkan terendah di Kabupaten Siak 11.612 orang.

Penduduk usia kerja semua kabupaten/kota mengalami peningkatan yang menunjukkan banyak potensi sumber daya manusia produktif yang ada di setiap kabupaten/kota. Penduduk usia kerja yang ada bisa dimanfaatkan optimal jika mereka bermutu. Karena itu, pembangunan kesehatan, pendidikan dan keluarga akan berperan penting mewujudkan sumber daya manusia berkualitas. Namun, kondisi ketiga aspek tersebut saat ini sangat menantang.

Untuk penduduk bekerja Kabupaten Indragiri Hulu mengalami penurunan sebanyak 3.549 orang sementara di semua kabupaten/kota lainnya mengalami peningkatan, dengan peningkatan penduduk yang bekerja menunjukkan bahwa penempatan dan peluang untuk penciptaan lapangan pekerjaan terbuka luas bagi penduduk usia kerja yang ada.

Kondisi pengangguran di setiap kabupaten/kota terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang mengalami peningkatan pengangguran yang ada yaitu: Kabupaten Kuansing, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kampar dan Kota Dumai. Namun dengan meningkatnya pengangguran yang ada di beberapa kabupaten/kota hal ini juga diimbangi dengan peningkatan penduduk bekerja, kecuali Kabupaten Indragiri Hulu dari penduduk berkerja berkurang pengangguran bertambah.

Jumlah bukan angkatan kerja di beberapa kabupaten/kota mengalami peningkatan diantaranya Kabupaten Indragiri Hilir, Pelalawan, Kampar, Rokan Hilir dan Kota Dumai. Peningkatan bukan angkatan kerja yang ada di beberapa kabupaten terdiri dari penduduk usia kerja yang masih bersekolah, mengurus rumah

tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi (orang tua, pensiun, pengasuh, dll) harus mempersiapkan kebijakan dan program bagi mereka yang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja yang ada. Program perlindungan sosial dan kesehatan bagi mereka yang usia 65 tahun keatas, orang-orang disabilitas, ibu rumah tangga, pensiunan dan program pendidikan bagi anak yang masih bersekolah ataupun program lainnya. Kondisi perkembangan ketenagakerjaan kabupaten/kota tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.122 Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Kode	Status Keadaan Ketenagakerjaan	Tahun (Jiwa)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
14.01	Kampar						
	Penduduk Usia Kerja	609.256	624.081	639.171	641.491	650.098	1,64
	Angkatan Kerja	388.609	393.561	392.478	382.551	414.641	1,71
	Bekerja	364.698	376.764	378.259	369.628	399.421	2,37
	Pengangguran	23.911	16.797	14.219	12.923	15.220	-9,11
	Bukan Angkatan Kerja	314.534	320.685	326.899	337.825	344.332	2,29
14.02	Indragiri Hulu						
	Penduduk Usia Kerja	314.534	320.685	326.899	337.825	344.332	2,29
	Angkatan Kerja	215.215	219.518	215.694	228.240	224.691	1,13
	Bekerja	204.644	212.227	210.244	222.608	218.956	1,75
	Pengangguran	10.571	7.291	5.450	5.632	5.735	-12,78
	Bukan Angkatan Kerja	99.319	101.167	111.205	109.585	119.641	4,88
14.03	Bengkalis						
	Penduduk Usia Kerja	398.947	404.383	409.844	425.312	431.131	1,96
	Angkatan Kerja	263.323	269.957	253.988	262.657	281.445	1,79
	Bekerja	238.805	252.047	235.761	244.037	264.884	2,78
	Pengangguran	24.518	17.910	18.227	18.620	16.561	-8,52
	Bukan Angkatan Kerja	135.624	134.426	155.856	162.655	149.686	2,86
14.04	Indragiri Hilir						
	Penduduk Usia Kerja	524.894	530.339	535.666	506.830	514.719	-0,45
	Angkatan Kerja	363.066	363.588	342.643	307.740	350.978	-0,44
	Bekerja	347.284	353.903	337.502	302.469	344.448	0,19
	Pengangguran	15.782	9.685	5.141	5.271	6.530	-14,78
	Bukan Angkatan Kerja	161.828	166.751	193.023	199.090	163.741	1,05
14.05	Siak						
	Penduduk Usia Kerja	337.642	347.199	356.196	346.627	353.588	1,19
	Angkatan Kerja	211.971	224.609	234.574	227.808	237.468	2,94
	Bekerja	199.679	214.864	220.236	214.555	226.719	3,30
	Pengangguran	12.292	9.745	14.338	13.253	10.749	-0,01
	Bukan Angkatan Kerja	125.671	122.590	121.622	118.819	116.120	-1,95
14.05	Pelalawan						
	Penduduk Usia Kerja	348.602	364.973	383.378	288.942	295.241	-3,18
	Angkatan Kerja	237.999	252.480	246.526	198.890	198.857	-3,90
	Bekerja	223.040	246.565	239.805	194.393	194.619	-2,75

Kode	Status Keadaan Ketenagakerjaan	Tahun (Jiwa)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Pengangguran	14.959	5.915	6.721	4.497	4.238	-21,42
	Bukan Angkatan Kerja	110.603	112.493	136.852	90.052	96.384	-0,95
14.06	Rokan Hulu						
	Penduduk Usia Kerja	483.657	503.518	523.976	430.436	439.351	-1,90
	Angkatan Kerja	315.633	334.833	335.761	287.231	299.341	-0,97
	Bekerja	301.675	327.296	323.597	277.332	291.157	-0,49
	Pengangguran	13.958	7.537	12.164	9.899	8.184	-5,14
	Bukan Angkatan Kerja	168.024	168.685	188.215	143.205	140.010	-3,54
14.07	Rokan Hilir						
	Penduduk Usia Kerja	486.521	499.768	513.348	482.491	492.600	0,38
	Angkatan Kerja	275.100	303.561	331.204	318.395	323.029	4,26
	Bekerja	261.895	293.710	316.131	304.322	309.120	4,41
	Pengangguran	13.205	9.851	15.073	14.073	13.909	4,95
	Bukan Angkatan Kerja	211.421	196.207	182.144	164.096	169.571	-5,23
14.08	Siak						
	Penduduk Usia Kerja	337.642	347.199	356.196	346.627	353.588	1,19
	Angkatan Kerja	211.971	224.609	234.574	227.808	237.468	2,94
	Bekerja	199.679	214.864	220.236	214.555	226.719	3,30
	Pengangguran	12.292	9.745	14.338	13.253	10.749	-0,01
	Bukan Angkatan Kerja	125.671	122.590	121.622	118.819	116.120	-1,95
14.09	Kuantan Singingi						
	Penduduk Usia Kerja	235.520	238.030	240.091	257.510	257.289	2,28
	Angkatan Kerja	160.807	159.530	150.475	164.669	167.192	1,12
	Bekerja	152.431	156.239	146.477	160.561	166.768	2,43
	Pengangguran	8.376	3.291	3.998	4.108	424	-31,54
	Bukan Angkatan Kerja	74.713	78.500	89.616	92.841	90.097	4,97
14.10	Kepulauan Meranti						
	Penduduk Usia Kerja	137.816	136.063	141.607	159.810	161.404	4,16
	Angkatan Kerja	94.114	88.003	91.823	105.089	110.323	4,32
	Bekerja	86.639	87.597	86.775	99.652	105.346	5,18
	Pengangguran	7.475	406	5.048	5.437	4.977	262,01
	Bukan Angkatan Kerja	43.702	48.060	49.784	54.721	51.081	4,21
14.71	Pekanbaru						
	Penduduk Usia Kerja	851.169	871.441	892.176	749.142	759.592	-2,47
	Angkatan Kerja	555.138	536.857	570.146	494.728	510.469	-1,78
	Bekerja	507.617	492.354	533.633	464.067	486.834	-0,69
	Pengangguran	47.521	44.503	36.513	30.661	23.635	-15,81
	Bukan Angkatan Kerja	296.031	334.584	322.030	254.414	249.123	-3,45
14.72	Dumai						
	Penduduk Usia Kerja	218.283	222.553	226.891	96.212	243.042	24,73
	Angkatan Kerja	146.586	144.465	148.506	15.679	158.478	205,67
	Bekerja	134.581	135.381	140.509	14.871	151.095	207,75
	Pengangguran	12.005	9.084	7.997	808	7.383	171,89
	Bukan Angkatan Kerja	71.697	78.088	78.385	80.533	84.564	4,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Untuk mengukur TPAK adalah dengan membandingkan penduduk usia kerja dengan angkatan kerja pada tahun yang sama. Di Provinsi Riau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja laki-laki lebih besar bila dibanding perempuan dengan perbandingan 2:1, dan perkembangannya meningkat setiap tahun. Secara rinci perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Riau dari tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.123 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	4.946.110	5.066.690	5.189.240	4.863.740	4.946.200
Angkatan Kerja (Jiwa)	3.226.830	3.294.616	3.313.820	3.134.790	3.280.730
TPAK Laki-Laki (%)	83,25	82,15	83,59	83,77	84,80
TPAK Perempuan (%)	46,40	47,14	43,28	44,27	47,05
TPAK (%)	65,24	65,03	63,86	64,45	66,33

Sumber: BPS Provinsi Riau

Provinsi Riau pada tahun 2020 memiliki jumlah angkatan kerja 3.226.830 orang meningkat menjadi 3.280.730 orang pada tahun 2024. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2024 mengalami kenaikan 1,88 poin yaitu sebesar 66,33 persen, jika di bandingkan dengan tahun 2023 sebesar 64,45 persen.

Sedangkan jumlah penduduk usia kerja juga meningkat dari 4.946.110 pada tahun 2020 menjadi 4.946.200 pada tahun 2024. TPAK Provinsi Riau ditinjau berdasarkan jenis kelamin, cenderung lebih tinggi pada laki-laki. Pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 84,80 persen sedangkan TPAK perempuan sebesar 47,05 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPAK laki-laki meningkat

sebesar 1,03 persen poin dan TPAK perempuan meningkat 2,78 persen poin.

Perkembangan TPAK kabupaten/kota di Provinsi Riau selama tahun 2020 sampai dengan 2024 terlihat pada tabel di bawah berikut:

Tabel 2.124 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Kode	Kabupaten/ Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
14.01	Kampar	63,78	63,06	61,40	59,63	63,78
14.02	Indragiri Hulu	68,42	68,45	65,98	67,56	65,25
14.03	Bengkalis	66,00	66,76	61,97	61,76	65,28
14.04	Indragiri Hilir	69,17	68,56	63,97	60,72	68,19
14.05	Pelalawan	68,21	69,18	64,30	68,83	67,35
14.06	Rokan Hulu	65,26	66,50	64,08	66,73	68,13
14.07	Rokan Hilir	56,54	60,74	64,52	65,99	65,58
14.08	Siak	62,78	64,69	65,86	65,72	67,16
14.09	Kuantan Singingi	68,28	67,02	62,67	63,95	65,49
14.10	Kepulauan Meranti	68,29	65,60	64,84	65,76	68,35
14.71	Pekanbaru	65,22	61,61	63,91	66,04	67,20
14.72	Dumai	67,15	64,91	65,45	66,07	65,21

Sumber: BPS Provinsi Riau

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/kota tahun 2024 terdapat 4 kabupaten yang tingkat partisipasinya di bawah rata-rata Provinsi yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Bengkalis, Indragiri Hulu, Kampar dan Kota Dumai.

Tabel 2.125 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021-2024

Kode	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin (%)							
		Laki-Laki				Perempuan			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
14.01	Kampar	83,13	82,19	81,83	83,06	42,20	39,82	36,42	43,57
14.02	Indragiri Hulu	83,70	85,46	85,43	85,03	52,51	45,63	48,74	44,48
14.03	Bengkalis	83,32	82,04	82,13	85,06	49,48	41,07	40,41	44,56
14.04	Indragiri Hilir	85,40	86,03	82,19	85,80	50,85	40,79	37,61	49,29
14.05	Pelalawan	86,90	87,77	89,76	88,40	50,22	39,35	46,50	44,74
14.06	Rokan Hulu	85,13	84,93	88,48	88,42	46,94	42,22	44,06	47,03
14.07	Rokan Hilir	83,10	84,36	86,64	85,85	37,35	43,79	44,29	44,31
14.08	Siak	83,99	88,01	86,86	86,21	44,19	42,40	43,19	46,91
14.09	Kuantan Singingi	82,24	83,04	82,17	85,13	51,34	41,64	45,24	45,37
14.10	Kepulauan Meranti	79,46	81,14	82,54	83,36	51,20	47,93	47,58	52,09
14.71	Pekanbaru	74,30	78,59	78,66	80,58	48,54	48,81	53,50	53,92
14.72	Dumai	79,60	84,42	84,99	84,75	49,55	45,64	46,19	44,80

Sumber: BPS Provinsi Riau

2.3.2.4 Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Tingginya produktivitas menunjukkan efesiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Produktivitas tenaga kerja Provinsi Riau menunjukan penurunan pada dari tahun 2023 ke 2024 sebesar 1,65 persen. Namun di beberapa sektor terdapat peningkatan. Beberapa sektor yang meningkat pertumbuhannya diantaranya Informasi dan Komunikasi sebesar 42,82 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 18,64 persen, Konstruksi sebesar 14,60 persen. Perkembangan dan laju pertumbuhan produtivitas tenaga kerja Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.126 Perkembangan Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Kategori PDRB	PDRB/Penduduk Yang Bekerja (Juta Rupiah)					Laju Pertumbuhan Produktivitas
	2020	2021	2022	2023	2024	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.411	11.579	11.427	13.022	13.370	2,67
B. Pertambangan dan Penggalian	237.174	219.680	225.202	187.653	165.448	(11,83)
C. Industri Pengolahan	67.795	63.059	73.937	74.423	71.278	(4,23)
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6.766	5.706	6.600	7.932	5.609	(29,29)
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	672	750	394	510	605	18,64
F. Konstruksi	28.721	27.484	27.073	27.219	31.194	14,60
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.053	7.993	9.221	10.629	10.284	(3,25)
H. Transportasi dan Pergudangan	2.988	3.128	4.255	4.179	4.228	1,16
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	982	13.419	1.334	1.205	1.216	0,89
J. Informasi dan Komunikasi	24.892	3.062	32.837	26.068	37.232	42,82
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	15.689	18.779	17.048	20.327	22.010	8,28
L. Real Estate	94.089	82.962	53.229	102.539	52.866	(48,44)
M, N. Jasa Perusahaan	54	57	44	57	48	(14,82)
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.336	6.002	6.825	7.986	7.399	(7,36)
P. Jasa Pendidikan	1.480	1.364	1.449	1.738	1.579	(9,15)
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.403	2.358	2.485	3.348	2.940	(12,19)
R, S, T, U. Jasa lainnya	1.546	2.028	2.241	2.423	2.453	1,24

Kategori PDRB	PDRB/Penduduk Yang Bekerja (Juta Rupiah)					Laju Pertumbuhan Produktivitas
	2020	2021	2022	2023	2024	
PDRB ADHK	16.209	16.084	16.710	18.830	18.077	(1,65)

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau (Data diolah)

2.3.2.5 Komposisi Penduduk Bekerja Berdasarkan Karakteristik

Penduduk Provinsi Riau yang bekerja menurut mata pencarian bertujuan memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja minimal 1 jam secara terus menerus dalam seminggu. Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Provinsi Riau adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu sebesar 36,15 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,16 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 8,12 persen. Dibandingkan dengan tahun 2023 lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor 0,73 persen, Pendidikan 0,51 persen dna Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0,48 persen. Namun pada lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja paling banyak di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan justru mengalami penurunan sebesar (-2,05) persen dari tahun 2023. Untuk rata rata pertumbuhan pertahun lapangan perkerjaan real estate mengalami pertumbuhan yang paling tinggi sebesar 31,86 persen.

Pada Agustus 2024, penduduk bekerja di Provinsi Riau paling banyak berstatus buruh/ karyawan/pegawai, yaitu sebesar 42,66 persen, sementara yang paling sedikit berstatus pekerja bebas non pertanian, yaitu sebesar 2,45 persen. Dibandingkan Agustus 2023, status pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah buruh/karyawan/pegawai sebesar 1,54 persen poin. Sementara itu, untuk status pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar terdapat pada status berusaha sendiri sebesar 1,35 persen poin. Rata rata pertumbuhan terbanyak ada pada status pekerjaan

utama Berusaha dibantu buruh tetap/tidak dibayar sebesar 11,94 persen

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2024, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,581 juta orang (50,07 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1,577 juta orang (49,93 persen). Dibandingkan Agustus 2023, persentase penduduk bekerja pada kegiatan informal mengalami penurunan sebesar 2,06 persen poin

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2024, penduduk bekerja di Provinsi Riau masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 29,53 persen dan Sekolah Menengah Atas sebesar 29,09 persen. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 masing-masing sebesar 2,44 persen dan 12,42 persen.

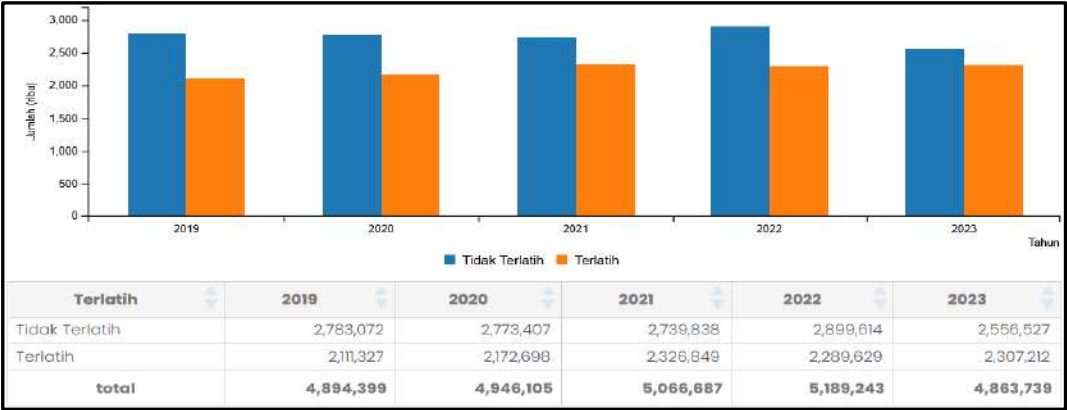
Dibandingkan dengan Agustus 2023, penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas, Diploma I/II/III, dan Diploma IV, S1, S2, S3 mengalami peningkatan masing-masing 1,01 persen poin, 0,08 persen poin, dan 1,47 persen poin. Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,65 persen poin, 0,84 persen poin dan 1,07 persen poin. Rata rata pertumbuhan terbanyak pada penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas sebesar 5,50 persen. Berikut tabel persentase penduduk yang berkerja berdasarkan karakteristiknya.

Tabel 2.127 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Karakteristiknya di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024

No	Lapangan Usaha	Persentase (%)					Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Lapangan Kerja Utama						
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39,17	38,59	39,96	38,20	36,15	-1,93
2	Pertambangan dan Penggalian	1,12	1,12	1,10	1,43	1,55	9,15
3	Industri Pengolahan	7,61	8,18	7,26	7,89	8,12	1,96
4	Pengadaan Listrik Air dan Gas	0,18	0,21	0,21	0,19	0,27	12,31
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	0,33	0,30	0,59	0,51	0,42	14,09
6	Bangunan	4,78	4,93	5,21	5,97	5,27	2,92
7	Perdagangan Besar dan Eceran	17,50	18,61	17,94	17,43	18,16	1,02
8	Transportasi dan Pergudangan	3,55	3,40	2,94	3,43	3,43	-0,27
9	Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	6,20	5,92	5,67	6,91	7,20	4,33
10	Informasi dan Komunikasi	0,71	0,51	0,59	0,84	0,60	0,33
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,01	0,85	0,98	0,90	0,80	-4,96
12	Jasa Persewaan Bangunan/Real Estate	0,16	0,19	0,30	0,17	0,33	31,86
13	Jasa Perusahaan	1,38	1,29	1,86	1,62	1,96	11,44
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	4,34	4,43	4,10	3,90	4,38	0,51
15	Jasa Pendidikan	5,78	6,22	6,05	5,52	6,03	1,34
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,63	1,78	1,72	1,44	1,66	1,21
17	Jasa Lainnya	4,55	3,47	3,53	3,66	3,69	-4,38
	Status Pekerjaan Utama						
1	Berusaha Sendiri	20,68	20,15	21,90	22,93	21,58	1,23
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak bayar	11,20	10,65	10,92	9,68	9,79	-3,15
3	Berusaha dibantu buruh tetap/tidak dibayar	4,65	5,15	5,66	6,75	7,28	11,94
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	39,38	40,28	40,32	41,12	42,66	2,03
5	Pekerja Bebas di Pertanian	7,95	8,37	7,37	6,40	5,32	-9,18
6	Pekerja Bebas di nonPertanian	3,70	3,84	3,26	2,85	2,45	-9,48
7	Pekerja keluarga/tidak dibayar	12,43	11,56	10,56	10,27	10,92	-3,02
	Kegiatan Formal/Informal						
1	Formal	44,03	45,43	45,98	47,87	49,93	3,02
2	Informal	55,97	54,57	54,02	52,13	50,07	-2,74
	Pendidikan Tertinggi yang di tamatkan						
1	SD ke Bawah	32,99	32,31	34,08	30,18	29,53	-2,55
2	Sekolah Menengah Pertama	19,77	18,86	17,69	18,05	17,21	-3,36
3	Sekolah Menengah Atas	23,53	23,79	25,86	28,08	29,09	5,50
4	Sekolah Menengah Kejuruan	10,07	11,02	9,13	10,38	9,31	-1,08
5	Diploma I/II/III	3,21	2,84	2,62	2,36	2,44	-6,45
6	Diploma IV/S1,S2,S3	10,42	11,18	10,61	10,95	12,42	4,71

Sumber: BPS Provinsi Riau

Meskipun data TPT di Provinsi Riau lebih baik dibandingkan dengan data di tingkat nasional, namun daya saing tenaga kerja di Provinsi Riau masih memiliki permasalahan. Berdasarkan data terakhir SAKERNAS 2023, menunjukkan fakta bahwa Angkatan kerja di Provinsi Riau dominan pendidikannya di bawah SD sebesar 30,18 persen, 18,05 persen tamat SMP dan sebanyak 47,44 persen penduduk usia kerja yang telah terlatih. Sisanya sebanyak 52,56 persen penduduk usia kerja di Provinsi Riau belum terlatih dengan keterampilan yang spesifik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan program pelatihan tematik yang lebih variatif baik jenis maupun lingkup sektor-nya yang disesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Pembangunan sentra pelatihan keterampilan tenaga kerja juga perlu dikembangkan.



Sumber: Sepakat (Sakernas) Bappenas

Gambar 2.60 Penduduk Usia Kerja berdasarkan Klasifikasi Keterampilan di Provinsi Riau, Tahun 2019-2023

2.3.2.6 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja. Pekerjaan formal memberikan pekerja jaminan terhadap pendapatan dan kestabilan kerja serta manfaat lain seperti jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, cuti, dan pensiun. Semakin tinggi nilai persentasenya, semakin mencerminkan perkembangan positif dalam pasar kerja karena dapat mendukung kemajuan sosial dan ekonomi di suatu negara. Jumlah pekerja di sektor formal sebanyak 1.437.184 jiwa pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 1.577.601 jiwa pada tahun 2024. Dari total tenaga kerja di sektor formal yang

ada proporsi penciptaan lapangan kerja formal sebanyak 49,93 persen dari total 3.159.367 jiwa penduduk yang bekerja.

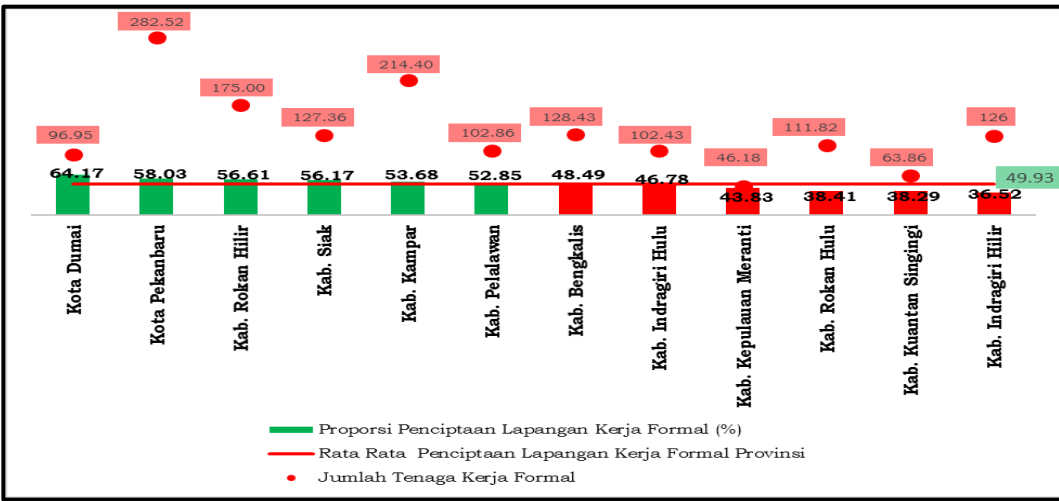
Kondisi proporsi lapangan kerja formal Provinsi Riau dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.128 Perkembangan Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Jumlah Pekerja Disektor Formal (Jiwa)	1.330.927	1.430.516	1.457.102	1.437.184	1.577.601
Jumlah Tenaga Lerja/Penduduk Yang Bekerja (Jiwa)	3.022.988	3.148.947	3.168.929	3.002.334	3.159.367
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	44,03	45,43	45,98	47,87	49,93

Sumber: BPS Provinsi Riau

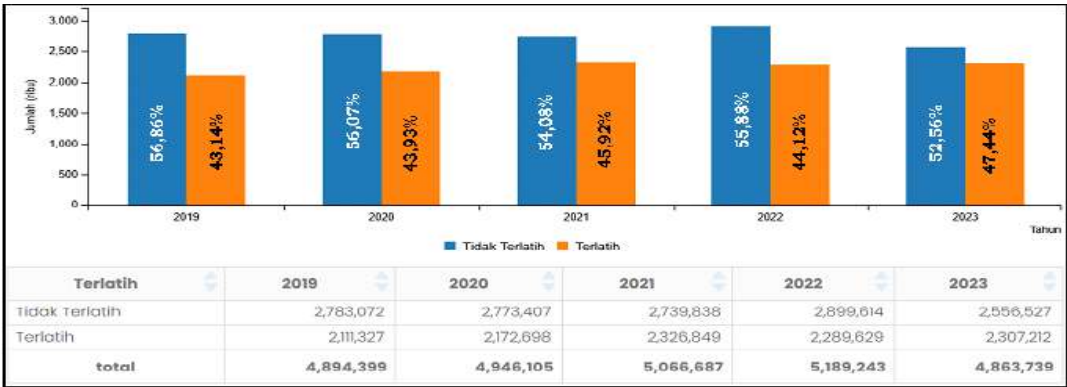
Proporsi penciptaan lapangan kerja formal kabupaten/kota terdapat 6 kabupaten yang rata-rata persentase di bawah provinsi yaitu Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Kuantan Singingi dan Indragiri Hilir. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal tertinggi pada Kota Dumai sebesar 64,17 persen dan terendah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 36,52 persen. Untuk jumlah tenaga kerja formal terbanyak di Kota Pekanbaru sebanyak 282,52 ribu jiwa, dan paling sedikit di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 46,18 ribu jiwa. Kondisi proporsi penciptaan lapangan kerja formal kabupaten/kota tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, data olahan

Gambar 2.61 Posisi Relatif Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kabupaten/Kota Tahun 2024

Meskipun TPT di Provinsi Riau lebih baik dibandingkan dengan nasional, namun daya saing tenaga kerja di Provinsi Riau masih memiliki permasalahan. Berdasarkan data terakhir SAKERNAS 2023, menunjukkan fakta bahwa angkatan kerja di Provinsi Riau dominan pendidikannya di bawah SD sebesar 30,18 persen, 18,05 persen tamat SMP dan sebanyak 47,44 persen penduduk usia kerja yang telah terlatih. Sisanya sebanyak 52,56 persen penduduk usia kerja di Provinsi Riau belum terlatih dengan keterampilan yang spesifik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan program pelatihan tematik yang lebih variatif baik jenis maupun lingkup sektor-nya yang disesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Pembangunan sentra pelatihan keterampilan tenaga kerja juga perlu dikembangkan.



Sumber Data : Sepakat (Sakernas) Bappenas

Gambar 2.62 Penduduk Usia Kerja berdasarkan Klasifikasi Keterampilan di Provinsi Riau, Tahun 2019-2023

2.3.2.7 Pekerja Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Lebih dari satu milyar orang atau 15 persen penduduk dunia adalah penyandang disabilitas dan 70 persen adalah penduduk usia kerja. Undang – Undang tersebut juga mengamanatkan (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Daerah wajib

mempekerjakan paling sedikit 2 persen pekerja dengan disabilitas dari total pegawai, dan (2) Perusahaan Swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen pekerja dengan disabilitas dari total pekerja di Perusahaan. Selanjutnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan arahan pekerja disabilitas diperlakukan tanpa diskriminasi serta memperoleh upah yang sama.

Tingginya penyandang disabilitas yang termasuk bukan angkatan kerja karena memilih untuk melakukan kegiatan lainnya atau berumah tangga, perlu menjadi perhatian pemerintah karena ternyata masih ada penyandang disabilitas yang belum diserap oleh pasar kerja. Perlu dilakukan kebijakan khusus yang berpihak pada penyandang disabilitas sekaligus menciptakan dunia kerja dan kondisi kerja yang ramah penyandang disabilitas. Program-program wirausaha mandiri juga perlu dipermudah agar bisa diakses atau dimasuki oleh penyandang disabilitas. Berikut jumlah penyandang disabilitas yang bekerja dan tidak bekerja tahun 2022 yang merupakan data terakhir yang dirilis.

Tabel 2.129 Jumlah Angkatan Kerja dan Kegiatan Penyandang Disabilitas Sedang dan Berat di Provinsi Riau Tahun 2022

Kode	Kabupaten / Kota	Penyandang Disabilitas (Jiwa)		
		Bekerja	Tidak Bekerja	Jumlah
14	Provinsi Riau	22.450	32.188	54.639
14.01	Kampar	3.211	4.740	7.951
14.02	Indragiri Hulu	1.622	2.324	3.946
14.03	Bengkalis	1.648	2.629	4.277
14.04	Indragiri Hilir	4.166	5.545	9.711
14.05	Pelalawan	926	1.125	2.051
14.06	Rokan Hulu	2.272	2.635	4.908
14.07	Rokan Hilir	1.817	2.723	4.540
14.08	Siak	1.400	1.682	3.082
14.09	Kuantan Singingi	1.403	1.988	3.391
14.10	Kep. Meranti	931	1.671	2.602
14.71	Pekanbaru	1.975	3.539	5.514
14.72	Dumai	1.079	1.587	2.666

Sumber: Registrasi Sosial Ekonomi Bappenas

2.3.2.8 Indeks Inovasi Daerah (IID)

Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inovasi Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktek-praktek inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2018 yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kemajuan daerah dalam penerapan hasil riset dan inovasi di daerah. IID merupakan 1 dari 4 pengukuran kinerja pemerintah daerah, selain Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).

Perhitungan indeks inovasi daerah mengalami kenaikan nilai setiap tahun. Pada tahun 2023 Nilai Indeks Inovasi Provinsi Riau sebesar 53,52 dengan kategori Inovatif dan pada tahun 2024 secara peringkat Provinsi Riau mengalami penurunan namun secara nilai dan kategori mengalami kenaikan menjadi 53,63 dengan kategori Inovatif.

Tabel 2.130 Indeks Inovasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Indeks Inovasi (Nilai)	3078 (Total Score)	38,82	50,94	53,52	53,63
2	Kategori	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
3	Peringkat	15	26	16	15	18

Sumber: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri

Perhitungan indeks inovasi daerah kabupaten/kota pada tahun 2024 terdapat 4 kabupaten dan 2 kota yang ada diatas nilai provinsi yaitu Kota Pekanbaru 68,34 Sangat Inovatif, Kabupaten Pelalawan 65,70 Sangat Inovatif, Kabupaten Indragiri Hilir 62,46 Sangat Inovatif, Kabupaten Kampar 58,05 Inovatif, Kabupaten Siak 56,87 Inovatif dan Kota Dumai 54,79 Inovatif. Kota Pekanbaru merupakan kota dengan Indeks Inovasi tertinggi dengan nilai kategori Sangat Inovatif dan terendah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nilai kategori Kurang Inovatif. Secara rinci Indeks Inovasi Daerah kabupaten kota di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri

Gambar 2.63 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024

2.3.2.9 Pemanfaatan Hasil Riset

Riset bertujuan untuk mengidentifikasi potensi daerah dalam pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi. Dengan menggunakan metode survei dan analisis data, riset diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Riset- riset yang dilakukan sudah banyak dimanfaatkan untuk

pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Pemanfaatan hasil riset mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 70 persen dan pada tahun 2024 sebesar 75 persen. Dengan meningkatnya pemanfaatan hasil riset yang ada diharapkan pemanfaatannya dapat mendukung Pembangunan Provinsi Riau dan meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah. Adapun perkembangan pemanfaatan hasil riset di Provinsi Riau dari tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.131 Pemanfaatan Hasil Riset Daerah Provinsi Riau
Tahun 2021-2024**

No	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset Daerah (%)	72	65	70	75

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau

2.3.2.10 Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berbasis pada kreativitas, inovasi dan nilai intelektual, ekonomi kreatif mampu menciptakan nilai tambah baru yang tidak hanya memperkuat daya saing produk lokal, tetapi juga mendorong sinergi antar sektor seperti pariwisata, perdagangan, industry dan UMKM. Di Indonesia, terdapat 17 subsektor ekonomi kreatif yang berkembang. Untuk menjaring ekonomi kreatif dilakukan melalui BISMA (*BEKRAF Information System in Mobile Application*). Adapun jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif di Provinsi Riau tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.132 Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Berdasarkan Sub Sektor Di Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No	Sub Sektor	Jumlah Pelaku Usaha				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengembangan Permainan	2	3	3	4	60
2	Arsitektur	15	17	19	19	63
3	Desain Interior	23	25	28	28	71
4	Musik	131	133	136	136	235
5	Seni Rupa	4	6	6	6	84
6	Desain Produk	9	10	12	12	82
7	Fashion	155	157	160	163	202
8	Kuliner	783	786	789	798	1.171
9	Film, Animasi dan Video	25	27	30	32	115
10	Fotografi	61	64	67	65	170
11	Desain Komunikasi Visual	3	5	5	5	58
12	Televisi dan Radio	50	52	54	54	77
13	Kriya	225	228	231	241	345
14	Periklanan	45	47	49	51	53
15	Seni Pertunjukan	83	86	89	89	212
16	Penerbitan	20	21	24	24	51
17	Aplikasi	8	9	10	10	73
Jumlah Pelaku Usaha		1.642	1.676	1.726	1.737	3.122

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Perkembangan sektor ekonomi kreatif dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif mengalami peningkatan signifikan dari 1.642 pelaku pada tahun 2020 menjadi 3.122 pelaku pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap potensi ekonomi berbasis ide dan kreativitas sebagai alternatif sumber pendapatan yang berdaya saing.

Subsektor kuliner menjadi penyumbang jumlah pelaku usaha terbesar, yakni mencapai 1.171 pelaku pada tahun 2024. Disusul subsektor kriya, musik, fashion dan seni pertunjukan. Berkembangnya sektor kuliner di Provinsi Riau sejalan dengan gaya hidup saat ini yang memerlukan wadah untuk berkomunikasi dan sosialisasi ditempat fasilitas umum yang dilengkapi dengan kuliner yang cukup mumpuni dan menjadi daya tarik masyarakat. Selain itu, sejumlah subsektor berbasis teknologi dan digital seperti film, animasi, aplikasi, serta desain komunikasi visual juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, seiring dengan berkembangnya ekosistem digital di kalangan generasi muda kreatif Riau.

Perkembangan subsektor-sektor tersebut tidak hanya berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, melalui penyediaan atraksi seni, produk khas daerah, serta konten kreatif yang menarik wisatawan. Di sisi lain, ekonomi kreatif juga memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor UMKM, karena sebagian besar pelaku usaha ekonomi kreatif berada dalam skala mikro dan kecil dengan jangkauan pasar lokal hingga nasional.

Sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kreatif di daerah, telah tersedia sarana pengembangan seperti Riau *Creative Hub* (RCH), yang berfungsi sebagai ruang kerja bersama, pusat pembinaan dan inkubasi, serta wadah kolaborasi lintas pelaku dan subsektor kreatif. Fasilitas ini mendukung aktivitas pertumbuhan ekosistem kreatif melalui pelatihan, fasilitasi jejaring usaha, serta promosi produk dan jasa kreatif. Saat ini, RCH telah mengembangkan fasilitasi untuk seluruh 17 subsektor ekonomi kreatif, sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem kreatif yang terintegrasi. Namun demikian, terdapat beberapa subsektor yang belum maksimal dalam pembinaannya, yaitu arsitektur, desain interior, televisi dan radio, serta penerbitan, yang dihadapkan pada keterbatasan fasilitas pendukung dan infrastruktur teknis.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau

2.3.3.1 Indeks Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai “tulang punggung”. Strategi ekonomi hijau ini diharapkan dapat membantu Indonesia menjadi salah satu negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Dalam implementasinya, ekonomi hijau diharapkan dapat mendukung promosi investasi hijau, penyediaan modal dan infrastruktur berkelanjutan serta lapangan kerja dan keterampilan yang layak untuk mencapai keseimbangan antara kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan serta pertumbuhan ekonomi. Indeks Ekonomi Hijau nasional ini terdiri dari 16 (enam belas) indikator di

bawah 3 (tiga) pilar, yaitu pilar lingkungan, ekonomi dan sosial. Perkembangan indeks ekonomi hijau Provinsi Riau disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.133 Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ekonomi Hijau (poin)	50,03	51,77	59,61	59,72	58,04

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Riau tahun 2020-2024 berfluktuatif, dimana terjadi peningkatan sebesar 16,01 persen dalam 5 tahun terakhir. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 2,8 persen dari tahun 2023. Skor pilar ekonomi dan pilar sosial menjadi kontributor terbesar indeks ekonomi hijau Provinsi Riau tahun 2024. Beberapa parameter yang sudah sangat baik (skor 100) diantaranya adalah tingkat pengangguran terbuka, produktivitas perikanan budidaya dan produktivitas tenaga kerja sektor industri. Selanjutnya, parameter yang berada pada kategori (0-50) antara lain: produktivitas kelapa sawit, PDRB per kapita, penurunan emisi GRK kumulatif dari *baseline*, luas tutupan hutan dari luas daratan dan kualitas air permukaan parameter BOD.

2.3.3.2 Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT)

Pemerintah Provinsi Riau berupaya mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengembangan EBT dengan menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Riau yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 22 April 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 – 2050.

Pemerintah Provinsi Riau berupaya mendorong pemanfaatan EBT dan efisiensi energi melalui, yaitu 1) kemitraan dengan perusahaan energi swasta dalam pengembangan proyek energi terbarukan; 2) mendorong investasi swasta dengan memberikan insentif dan fasilitasi; 3) sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan industri tentang pentingnya efisiensi energi tentang praktik-praktik efisien, penggunaan teknologi hemat energi, dan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh melalui efisiensi energi; dan 4) kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mendukung kebijakan

dan regulasi yang mendukung pengembangan energi terbarukan di tingkat nasional dan daerah.

**Tabel 2.134 Potensi EBT Riau dan Pemanfaatannya
Tahun 2023-2024**

No	Jenis Pemanfaatan	Potensi (MW)	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Kapasitas (MW)	Persentase Pemanfaatan dari Potensi (%)	Kapasitas (MW)	Persentase Pemanfaatan dari Potensi (%)
1	PLTS	1.700,00	40,78	2,40	45,69	2,69
2	PLTBm	2.142,37	558,43	26,07	643,13	30,02
3	PLTBg	4.354,55	27,93	0,64	43,93	1,01
4	PLTMH	894,00	0,28	12,78	0,28	12,78
5	PLTA		114,00		114,00	
6	PLTP	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PLTSa	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		9.115,92	741,41	8,13	847,03	9,29

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau

Potensi EBT di Provinsi Riau sebesar 9.115,92 MW, pada tahun 2024 yang baru termanfaatkan hanya sebesar 9,29 persen atau sebesar 847,03 MW, persentase pemanfaatan EBT ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2023 yang hanya 8,13 persen atau sebesar 741,41 MW. Potensi EBT terbesar bersumberkan dari kelapa sawit berupa biogas sebesar 4.354,55 MW dan biomassa sebesar 2.142,37 MW dan diikuti energi surya sebesar 1.700 MW.

Provinsi Riau memiliki potensi/cadangan bahan tambang sebagai sumber energi primer yang banyak, yaitu minyak bumi, gas bumi, batubara, bitumin dan gambut. Cadangan minyak bumi di Provinsi Riau diperkirakan sebesar 4,27 MMSTB (*million metric stock tanks barrels*) yang terdapat Kabupaten Bengkalis, Siak, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Pelalawan dan Indragiri Hulu. Potensi/cadangan gas bumi sebesar 7,75 triliun *standart cubic feet* (TSCF) terdapat di Kabupaten Pelalawan, Siak, Bengkalis dan Kota Pekanbaru. Potensi/cadangan batubara sebesar 2,37 milyar ton berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hulu dan Kampar. Potensi/cadangan bitumin (*oil shale*) sebesar 52,8 juta ton berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Potensi/cadangan gambut sebesar 12,88 milyar ton berada di Kabupaten Siak, Bengkalis dan Indragiri Hilir.

**Tabel 2.135 Produksi Hasil Tambang di Provinsi Riau
Tahun 2020 – 2024**

Jenis Tambang	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan per Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Minyak Bumi (Barrel)	52.823.408,97	66.157.529,65	66.134.034,68	67.939.776,08	65.545.336,62	6,10
Gas Bumi (MMBTU)	21.987.128,47	29.381.352,43	31.078.620,04	29.331.159,61	27.990.500,31	7,30
Batubara	1.918.034,86	2.224.927,33	2.823.670,66	2.902.510,45	2.643.526,00	9,20

Sumber: BPS, Riau Dalam Angka Tahun 2018 – 2024 dan Dinas ESDM Provinsi Riau

Selain pertambangan minyak bumi, gas dan batubara Provinsi Riau juga memiliki potensi pertambangan logam dan batuan. Potensi Logam di Provinsi Riau terdiri dari mangan, timah dan emas yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hulu dan Kampar. Sedangkan potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan terdiri dari batu gamping, bentonit, granit, kaolin, lempung, pasir kuarsa, sirtu dan andesit yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan dan Siak.

Kondisi pertambangan di Provinsi Riau berdasarkan temuan di lapangan tentang keberadaan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, serta data dinas teknis di daerah dan kegiatan penertiban yang dilakukan oleh kabupaten/kota, bahwa saat ini masih banyak terdapat aktivitas PETI. Persentase pertambangan tanpa izin dihitung dengan rumus luas penambangan liar yang ditertibkan dibagi dengan luas PETI tahun sebelumnya.

Temuan di lapangan merupakan spot-spot PETI, diasumsikan setiap spot memiliki luas 1 hingga 2 ha. Data Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dijadikan perkiraan akan adanya kegiatan PETI. Data untuk Kabupaten Kuantan Singingi dihitung oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dengan asumsi memiliki luasan hingga daerah yang terpengaruh kegiatan PETI. Untuk Kabupaten Kepulauan Meranti dan Rokan Hilir tidak tersedia data PETI. Persentase pertambangan tanpa izin bisa dihitung untuk yang memiliki data dan dilakukan penertiban. Mungkin terjadi suatu daerah memiliki PETI tetapi tidak dilakukan penertiban atau tidak ada informasi mengenai penertiban yang

dilaporkan ke Pemda setempat, sehingga persentasenya tidak dapat dihitung.

2.3.4 Transformasi Digital

2.3.4.1 Indeks Transformasi Digital

Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) disusun untuk memenuhi kebutuhan pengukuran perkembangan transformasi digital di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam menyusun perencanaan nasional ke depan yang sinergis akan memerlukan acuan ukuran yang bisa dimonitor bersama. Dalam hal ini, Indeks TDN merupakan konsep holistik yang menyajikan data dari berbagai aspek perkembangan digital, antara lain infrastruktur, pemerintah, ekonomi dan masyarakat digital.

Kondisi pembangunan digital di Provinsi Riau menunjukkan kondisi yang semakin baik. Pada tahun 2022, Provinsi Riau masuk ke dalam provinsi dengan posisi klasifikasi B (Baik) dengan skor Indeks TDN 51,01. Posisi ini meningkat signifikan dibandingkan Indeks TDN tahun 2018, yaitu berada pada klasifikasi C (Cukup) dengan skor Indeks TDN sebesar 46,04.

Sebagian besar pilar di Provinsi Riau pada tahun 2022 masuk ke dalam klasifikasi B. Pilar pemerintah menunjukkan kinerja paling baik dan mencapai skor 58,84. Capaian ini juga tergambar dari perolehan *e-government index* dan *online service index* yang sudah menunjukkan hasil yang baik dan berada di atas rata-rata nasional. Selain itu, tingkat kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah daerah yang ada seperti website maupun aplikasi menunjukkan hasil yang positif. Pilar selanjutnya yang memperoleh hasil yang cukup baik adalah pilar jaringan dan infrastruktur. Kominfo tahun 2022 terlihat bahwa sudah 74,91 persen wilayah sudah tercakup layanan seluler 4G. Tingkat penetrasi internet juga mencapai 75,6 persen, menandakan bahwa infrastruktur jaringan yang ada saat ini sudah dimanfaatkan dengan cukup baik oleh masyarakat. Berdasarkan data Kemenkominfo tahun 2024, cakupan 4G di Provinsi Riau berkisar 91,83 persen dengan rincian 72,25 persen (1.349 dari 1.867) desa/kelurahan di Provinsi Riau masih termasuk dalam daerah sinyal lemah/blankspot. Lebih lanjut berdasarkan data dari Kemenkes, 94,54 persen (225 unit)

puskesmas di Provinsi Riau sudah terfasilitasi akses internet, dan pada layanan pendidikan berdasarkan data dari Kemendikdasmen sebanyak 79,34 persen (4.647 dari 5.857) sekolah sudah terfasilitasi akses internet.

Pilar dengan skor yang relatif rendah di Provinsi Riau untuk tahun 2022 adalah pilar bisnis yakni dengan skor 31,82 dan masuk kategori C. Masih rendahnya tingkat transformasi digital di pilar bisnis dikarenakan beberapa hal, antara lain pemanfaatan berbagai alat atau perangkat digital oleh para pelaku bisnis masih dalam tingkatan rendah. Pemanfaatan perangkat dan teknologi digital seperti pemanfaatan *e-commerce*, pembayaran digital, *mobile web stores*, dan sosial media seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendukung berjalannya proses bisnis para pelaku usaha. Lebih lanjut, di dalam indikator pengembangan lingkungan startup terlihat hasil yang kurang baik dan berada di bawah rata-rata nasional.

Selanjutnya untuk pilar masyarakat. Provinsi Riau memperoleh skor 50,94 dan masuk dalam kategori B. Meskipun dukungan terhadap literasi digital dan kemampuan digital masyarakat sudah memperlihatkan hasil yang cukup baik, tetapi jumlah talenta digital masih kurang di Provinsi Riau, masih belum banyak masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam bidang digital.

2.3.4.2 Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IPTIK)

Indeks pembangunan teknologi, informasi, dan komunikasi adalah suatu ukuran standar yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di suatu wilayah, serta kesenjangan digital yang ada. Penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga daerah (provinsi, kabupaten, desa/kelurahan), diwajibkan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam semua lini sistem pelayanannya. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan untuk kepentingan pelayanan publik, Pelayanan secara digital menjadi solusi tepat guna dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.

IPTIK terdiri dari 3 (tiga) subindeks, yaitu (1) subindeks Akses dan Infrastruktur TIK didefinisikan sebagai sumber energi yang dapat menyediakan fasilitas terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi; (2) subindeks Pengguna TIK yang terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu persentase individu yang menggunakan internet, pelanggan *fixed broadband* internet per 100 penduduk, dan pelanggan *mobile broadband* internet aktif per 100 penduduk; dan (3) subindeks Keahlian TIK terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar sekunder (SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat) serta angka partisipasi kasar tersier (D1 sampai dengan S1). IPTIK dikategorikan menjadi kategori tinggi (7,51-10,00), sedang (5,01-7,50), rendah (2,51-5,00), dan sangat rendah (0-2,50).

Capaian IPTIK Provinsi Riau tahun 2022 sebesar 6,02 meningkat menjadi 6,07 pada tahun 2023 dengan kategori sedang. Dan ini merupakan data rilis terakhir dari Badan Pusat Statistik. Peningkatan nilai IPTIK Provinsi Riau didukung oleh subindeks keahlian yang meningkat sebesar 0,02 poin dari nilai 6,27 pada tahun 2022 menjadi 6,29 pada tahun 2023. Dan juga didukung oleh subindeks pengguna yang meningkat sebesar 0,12 poin dari nilai 5,84 pada tahun 2022 menjadi 5,96 pada tahun 2023.

2.3.4.3 Low Signal (Sinyal Lemah) dan *Blankspot*

Kebutuhan jaringan komunikasi di Provinsi Riau berdasarkan pada kebutuhan internet yang dilakukan oleh provider dibawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Digital. Data kelurahan yang belum sepenuhnya mempunyai akses terhadap internet dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.136 Data *Low Signal* (Sinyal Lemah) dan *Blankspot* Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022-2024

Kode	Kab/Kota	Jumlah Kelurahan/ Desa	Data Low Signal dan Blankspot					
			2022		2023		2024	
			Kelurahan/ Desa	%	Kelurahan/ Desa	%	Kelurahan/ Desa	%
14.01	Kampar	250	49	19,6	47	18,8	12	4,8
14.02	Indragiri Hulu	194	38	19,59	39	20,1	39	20,1
14.03	Bengkalis	155	52	33,55	27	17,42	24	15,48
14.04	Indragiri Hilir	236	50	21,19	101	42,8	127	53,81
14.05	Pelalawan	118	30	25,42	26	22,03	25	21,19
14.06	Rokan Hulu	145	22	15,17	22	15,17	25	17,24
14.07	Rokan Hilir	184	41	22,28	35	19,02	47	25,54
14.08	Siak	131	27	20,61	17	12,98	11	8,4
14.09	Kuantan Singingi	229	25	10,92	27	11,79	30	13,1
14.10	Kep. Meranti	101	31	30,69	34	33,66	38	37,62
14.71	Pekanbaru	83	16	19,28	3	3,61	2	2,41
14.72	Dumai	36	17	47,22	4	11,11	2	5,56
	Jumlah	1.862	398	23,79	382	19,04	382	18,77

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kabupaten/kota dengan persentase tertinggi kelurahan/desa yang masih mempunyai data *low signal* dan *blankspot* pada tahun 2024 adalah Kabupaten Indragiri Hilir (53,81 persen) dengan 127 kelurahan/desa, Kabupaten Meranti (37,62 persen) dan Kabupaten Rokan Hilir (25,54 persen).

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.3.5.1 Investasi PMDN dan PMA

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Untuk melihat perkembangan investasi di Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.137 Jumlah Investasi PMDN dan PMA di Provinsi Riau
Tahun 2020-2024

No	Investasi	Perkembangan					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	PMDN						
	Proyek (Unit)	3.617	5.526	4.793	7.788	16.418	53,20
	Nilai (Rp. Milyar)	34.117,80	24.997,7	43.061,13	48.243,30	61.097,55	21,05
	Penyerapan TK	91.010	40.003	45.003	50.830	72.532	3,02
2	PMA						
	Proyek (Unit)	903	809	731	880	2.083	34,26
	Nilai (US\$. Juta)	1.077,99	1.921,41	2.748,69	2.042,26	1.813	21,10
	Penyerapan TK	32.178	21.385	5.918	14.395	24.757	27,34

Sumber: Buku Statistik Investasi DPMPTSP Provinsi Riau

Nilai investasi Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 88,29 Triliun (PMDN dan PMA), menempatkan Provinsi Riau dengan realisasi investasi tertinggi nomor 6 secara nasional dengan sektor usaha penyumbang investasi terbesar adalah sektor kehutanan (34,60 persen, Industri makanan (22,76 persen) dan Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan (16,71 persen) selebihnya sektor industri kertas dan percetakan serta industri kimia dan farmasi. Realisasi investasi yang tercatat melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) juga didominasi dari perluasan proyek yang sudah ada, bukan berasal dari proyek investasi baru yang berorientasi hilirisasi produk, hal ini juga menjadi penyebab kurangnya penyerapan tenaga kerja dan tidak berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.

Terhadap nilai investasi PMDN Provinsi Riau dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 21,05 persen per tahun dengan jumlah proyek tumbuh sebesar 53,20 persen pertahun dan penyerapan tenaga kerja rata-rata tumbuh sebesar 3,02 persen per tahun. Peningkatan jumlah proyek dan nilai investasi pertahun tidak diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, hal ini mengindikasikan bahwa investasi yang dilakukan sudah menggunakan teknologi tinggi sehingga sedikit menggunakan tenaga kerja.

Sedangkan Rata-rata peningkatan nilai investasi PMA Provinsi Riau dalam 5 tahun terakhir sebesar 21,10 persen, dengan rata-rata peningkatan jumlah proyek sebesar 34,26 persen dan rata-rata peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 27,34

persen. Investasi PMA berbanding terbalik dengan investasi PMDN, dimana rata-rata penyerapan tenaga kerja lebih tinggi dari pada peningkatan jumlah proyek dan nilai investasi.

Sementara potensi hilirisasi komoditi strategis yang bersumber dari kekayaan sumberdaya alam Provinsi Riau belum dimanfaatkan secara optimal. Persentase Realisasi Investasi Hilirisasi Provinsi Riau Tahun 2022 – 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.138 Persentase Realisasi Investasi Hilirisasi Provinsi Riau Tahun 2022 – 2024 (Rp)

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Realisasi Investasi PMA + PMDN (Rp)	82.504.976.395.000	78.468.880.440.000	88.297.728.875.509
2	Realisasi Investasi Hilirisasi (Rp)	31.369.466.725.000	24.657.263.140.000	27.076.819.658.818
3	Persentase (%)	38,02	31,42	30,67

Sumber : DPMPSTSP Provinsi Riau

Realisasi investasi hilirisasi yang tercatat bersumber dari hilirisasi disektor Pertanian (CPO/Oleochemical) dan Kehutanan (Pulp and Paper). Realisasi investasi hilirisasi PMA/PMDN pada tahun 2024 masih sebesar 30,67 persen dari total realisasi investasi PMA/PMDN di Provinsi Riau. Tren realisasi investasi hilirisasi juga menunjukkan penurunan dari 38,02 persen pada tahun 2022 menjadi 30,67 persen pada tahun 2024, meskipun nilai investasi mengalami peningkatan sebesar Rp. 2,42 Trilyun dari tahun 2023 hingga 2024.

2.3.5.2 Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain. Biasanya proses ekspor dimulai dari adanya penawaran dari suatu pihak yang disertai dengan persetujuan dari pihak lain melalui *sales contract process*, dalam hal ini adalah pihak Eksportir dan Importir. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain.

Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara.

Rata-rata pertumbuhan ekspor bersih perdagangan periode 2020-2024 tumbuh sebesar 9,42 persen per tahun, ini mengindikasikan bahwa kinerja penanaman modal di Provinsi Riau berkontribusi terhadap peningkatan ekspor dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Selain itu indikator perdagangan juga dapat dilihat melalui perkembangan neraca perdagangan Provinsi Riau, untuk lebih jelas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.139 Neraca Perdagangan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Uraian	Nilai Ekspor dan Impor (Juta US\$)					Rata-rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Total Perdagangan	15.081,80	21.592,20	25.576,20	21.292,70	20.074,00	9,79
Migas	694,20	1.849,50	1.783,10	1.989,20	1.845,00	41,79
Non Migas	14.387,50	19.742,70	23.793,00	19.303,50	18.229,00	8,33
Ekspor	13.763,80	19.969,90	22.596,00	18.956,80	18.115,00	9,42
Migas	573,20	1.730,40	1.528,50	1.758,40	1.654,00	49,83
Non Migas	13.190,60	18.239,50	21.067,40	17.198,40	16.461,00	7,78
Impor	1.318,00	1.622,30	2.980,20	2.335,90	1.959,00	17,26
Migas	121,10	119,10	254,60	230,80	191,00	21,38
Non Migas	1.196,90	1.503,20	2.725,60	2.105,10	1.768,00	17,03
Neraca Perdagangan	12.445,90	18.347,60	19.615,80	16.620,90	16,16	(15,21)
Migas	452,10	1.611,20	1.274,00	1.527,60	1,46	38,86
Non Migas	11.993,80	16.736,30	18.341,80	15.093,30	14,69	(17,12)

Sumber: Kementerian Perdagangan RI

Total nilai Perdagangan berfluktuatif selama 5 tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan 14,89 persen, dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar 25,576,2 (juta US). Tahun 2024 nilai ekspor non migas mendominasi terhadap perdagangan Provinsi Riau yaitu sebesar 16,461 juta USD, namun mengalami penurunan dibanding dua tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan ekspor CPO sebagai komoditi yang mendominasi ekspor akibat dampak geopolitik.

Pada tahun 2024, nilai ekspor Riau berdasarkan harga *Free on Board* (FOB) mencapai US\$ 18,12 miliar, mengalami penurunan sebesar 3,97 persen dibanding nilai ekspor tahun 2023 dengan nilai ekspor sebesar US\$ 18,87 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya nilai ekspor migas dan nonmigas. Pada tahun 2024, nilai ekspor non migas turun sebesar 4,24 persen atau sebesar US\$ 0,73 miliar, dari US\$ 17,19 miliar pada tahun 2023 menjadi US\$ 16,46

miliar pada tahun 2024. Begitu pula dengan nilai ekspor migas Riau yang mengalami penurunan sebesar 1,23 persen, dari US\$ 1,67 miliar pada tahun 2023 menjadi US\$ 1,65 miliar pada tahun 2024. Ekspor Riau menurut golongan barang utama (HS 2 digit) terbesar antara lain terjadi pada Lemak & Minyak Hewan/Nabati US\$ 8,65 miliar (dengan kontribusi sebesar 47,72 persen), Kertas dan Karton US\$ 2,07 miliar (11,43 persen), Bubur Kayu (Pulp) US\$ 2,02 miliar (11,14 persen), Berbagai Produk Kimia US\$ 1,80 miliar (9,91 persen), Bahan Bakar Mineral yang berasal dari sektor migas US\$ 1,65 miliar (9,13 persen), Ampas dan Sisa Industri Makanan US\$ 531,46 juta (2,93 persen), dan Bahan Kimia Organik US\$ 425,90 juta (2,35 persen).

Nilai ekspor migas Riau mengalami penurunan pada tahun 2024. Nilai ekspor migas turun sebesar 1,23 persen dari US\$ 1,67 miliar pada tahun 2023 menjadi US\$ 1,65 miliar pada tahun 2024. Namun, volume ekspor migas meningkat dari 2.692.951,08 ribu kg pada tahun 2023 menjadi 2.778.810,32 ribu kg pada tahun 2024. Peningkatan terbesar terjadi pada minyak mentah (hasil tambang), dengan volume naik dari 616.477,03 ribu kg menjadi 2.054.150,72 ribu kg dan nilai naik dari US\$ 370,40 juta menjadi US\$ 1.224,08 juta. Sejalan dengan nilai ekspor migas, nilai ekspor nonmigas juga mengalami penurunan. Nilai ekspor nonmigas turun sebesar 4,24 persen dari US\$ 17,19 miliar pada tahun 2023 menjadi US\$ 16,46 miliar pada tahun 2024. Volume ekspor nonmigas juga menurun dari 25.258.277,62 ribu kg pada tahun 2023 menjadi 22.987.044,44 ribu kg pada tahun 2024. Berdasarkan golongan barang, penurunan nilai ekspor terbesar terjadi pada hasil minyak (industri migas) dengan nilai ekspor turun dari US\$ 1,30 juta pada tahun 2023 menjadi US\$ 0,43 juta atau turun sebesar 67,02 persen pada tahun 2024. Perkembangan ekspor Provinsi Riau golongan barang HS 2 digit tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.140 Ekspor Provinsi Riau Golongan Barang HS 2 Digit Tahun 2021 – 2024

Golongan Barang	2021		2022		2023		2024	
	Volume	Nilai	Volume	Nilai	Volume	Nilai	Volume	Nilai
	(ribu Kg)	(Ribu US\$)	(ribu Kg)	(Ribu US\$)	(ribu Kg)	(Ribu US\$)	(ribu Kg)	(Ribu US\$)
Migas	3.408.013,90	1.730.375,99	1.845.535,22	1.528.536,48	2.692.951,08	1.674.987,63	2.778.810,32	1.654.389,71
Minyak Mentah	2.537.958,00	1.144.179,52	142.490,00	108.308,30	616.477,03	370.403,90	2.054.150,72	1.224.076,92
Bahan Bakar Mineral (27)	2.537.958,00	1.144.179,52	142.490,00	108.308,30	616.477,03	370.403,90	2.054.150,72	1.224.076,92
Hasil Minyak	870.055,90	586.196,47	1.703.045,22	1.420.228,18	2.076.474,05	1.304.583,73	724.659,60	430.312,79
Bahan Bakar Mineral (27)	870.055,90	586.196,47	1.703.045,22	1.420.228,18	2.076.474,05	1.304.583,73	724.659,60	430.312,79
Non Migas	22.525.729,31	18.232.736,17	23.676.810,43	20.954.579,29	25.258.277,62	17.191.506,88	22.987.044,44	16.462.580,14
Hasil Pertanian	1.769.666,21	205.455,06	2.188.876,45	259.029,40	2.599.594,68	325.579,95	2.342.573,08	291.344,03
Bahan-bahan Nabati (14)	1.525.515,08	148.339,69	1.949.208,62	204.940,77	2.343.756,05	272.265,37	2.086.328,39	226.228,15
Buah-buahan (08)	232.847,23	51.645,25	255.974,56	65.730,48	240.756,05	42.040,86	239.705,63	54.396,93
Ikan dan Udang (03)	6.424,15	3.511,96	8.705,86	7.343,60	9.902,16	9.653,16	12.052,08	9.800,34
Sayuran (07)	3.926,52	1.465,59	7.799,65	750,9	3.025,39	182,44	2.750,54	180,40
Biji-bijian Berminyak (12)	8,7	318,06	316,06	540,93	475,41	1.141,12	43,16	419,31
Kopi, Teh, Rempah-rempahan (09)	319,69	86,68	284,82	289,48	755,77	174,63	368,18	30,38
Susu, Mentega, Telur (04)	57,45	46,22	33,87	31,26	20,13	26,06	16,35	159,45
Lak, Getah dan Damar (13)	212,4	26,51	169,13	19,25	213,3	7,26	239,75	22,12

Golongan Barang	2021		2022		2023		2024	
	Volume	Nilai	Volume	Nilai	Volume	Nilai	Volume	Nilai
	(ribu Kg)	(Ribu US\$)	(ribu Kg)	(Ribu US\$)	(ribu Kg)	(Ribu US\$)	(ribu Kg)	(Ribu US\$)
Pohon Hidup, dan Bunga Potong (13)	355	15,11	321	51,01	690,7	89,02	1.069,00	106,95
Non Migas	23.545.863,88	13.236.995,62	23.676.810,43	20.954.579,29	25.258.277,62	17.191.506,88	22.987.044,44	16.462.580,14
Hasil Industri	21.818.811,55	13.034.943,90	21.487.933,98	20.695.549,89	22.401.761,93	16.854.972,50	20.466.035,36	16.165.625,23
Lemak & Minyak Hewan/Nabati (15)	12.601.588,38	8.315.591,01	11.068.941,93	12.236.798,87	11.066.875,13	9.460.844,16	9.438.060	8.643.647.280
Berbagai Produk Kimia (38)	1.367.850,77	951.092,26	2.066.162,84	2.668.325,87	1.865.947,70	1.677.116,22	1.792.325	1.795.915.289
Bubur Kayu (Pulp) (47)	2.877.950,99	1.189.738,65	3.088.474,08	1.952.492,53	3.775.223,48	1.945.377,36	3.599.721,88	2.069.947.572
Kertas dan Karton (48)	2.561.941,21	1.629.836,64	2.429.490,46	2.028.787,55	2.567.958,02	2.118.861,87	2.836.905	2.017.671.312
Bahan Kimia Organik (29)	355.540,76	254.827,72	430.06,54	550.833,62	431.088,05	304.407,62	518.006	425.899.935
Ampas dan Sisa Industri Makanan (23)	1.661.525,62	220.059,64	1.987.326,77	628.976,21	2.257.479,46	739.052,82	1.770.022	531.462.418
Serat Stapel Buatan (55)	134.489,60	138.399,03	160.458,43	268.267,87	163.186,06	240.601,32	196.062	290.802.789
Berbagai Makanan Olahan (21)	111.160,12	168.175,26	126.367,67	203.990,84	130.559,96	191.229,98	146.961	222.783.858
Tembakau (24)	1.900,52	69.895,39	2.888,72	83.300,62	3.715,47	88.028,77	3.743	80.043.092
Kayu, Barang dari Kayu (44)	42.325,85	16.491,08	36.066,12	16.982,40	42.254,47	15.124,96	44.291	13.572.781

Golongan Barang	2021		2022		2023		2024	
	Volume	Nilai	Volume	Nilai	Volume	Nilai	Volume	Nilai
	(ribu Kg)	(Ribu US\$)	(ribu Kg)	(Ribu US\$)	(ribu Kg)	(Ribu US\$)	(ribu Kg)	(Ribu US\$)
Buah-buahan (08)	31.842,95	19.919,09	29.711,64	18.784,47	31.366,38	19.315,00	272.813	77.247.880
Minuman (22)	10.644,71	9.029,55	6.543,23	5.090,79	6.551,47	5.069,09	6.434,04	5.202,68
Hasil Penggilingan (11)	11.260,99	10.627,86	13.190,70	8.326,62	11.231,72	13.748,05	8.029	11.398.609
Olahan dari Buah-buahan/Sayuran (20)	7.332,31	7.155,93	11.843,79	17.977,04	12.568,83	21.348,65	11.782	24.224.373
Bahan Kimia Anorganik (28)	27.471,00	1.413,81	24.423,00	1.961,88	27.993,50	1.423,72	43.159,00	2.745,21
Hasil Industri Lainnya	1.434,82	3.299,34	912,58	2.768,9	7.762,24	13.422,91	11.147,30	5.557,53
Hasil Tambang	246.935,74	14.926,53	240.673,77	13.955,97	256.921,01	10.954,43	178.436,00	5.610,88
Riau	25.373.018,67	13.810.161,14	25.522.345,65	22.483.115,77	27.951.228,70	18.866.494,51	25.765.854,76	18.116.969,85

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Tabel 2.141 Ekspor Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota dan Pelabuhan Muat Tahun 2021 – 2024

Kabupaten/Kota Pelabuhan Muat	2021		2022		2023		2024	
	Volume	Nilai	Volume	Nilai	Volume	Nilai	Volume	Nilai
	(ribu Kg)	(Ribu US\$)	(ribu Kg)	(Ribu US\$)	(ribu Kg)	(Ribu US\$)	(ribu Kg)	(Ribu US\$)
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7
Indragiri Hulu	30.001,46	2.071,01	131.072,78	56.527,31	162.868,31	79.886,14	104.879	38.818.256
Rengat	30.001,46	2.071,01	131.072,78	56.527,31	162.868,31	79.886,14	104.879	38.818.256
Indragiri Hilir	465.77,78	345.453,86	476.989,52	367.851,98	684.826,00	326.513,68	633.837	362.797.037
Sungai Guntung	259.469,80	276.475,29	249.111,74	276.250,81	276.574,20	267.553,14	282.565	305.205.703
Kuala Gaung	104.761,71	23.662,87	111.206,49	22.948,38	111.707,51	20.326,53	110.134	25.763.680
Kuala Enok	62.285,36	33.761,79	81.653,60	60.594,66	276.652,05	34.117,28	216.870	24.737.222
Tembilahan	37.767,75	8.196,61	34.824,07	7.670,30	19.892,21	4.516,64	24.268	7.090.432
Pulau Kijang	1.495,15	3.357,31	193,62	387,83	0,03	0,1	0	0
Siak Sri Indrapura	5.333.772,29	3.084.149,68	5.560.097,26	3.795.384,80	6.450.780,90	3.897.037,28	7.804.334	4.591.922.237
Buatan	2.936.489,99	1.795.776,70	3.100.499,45	2.138.958,47	2.814.973,07	1.702.210,02	1.788.653	1.175.443.709
Perawang	1.641.869,67	1.151.446,89	1.539.033,76	1.356.135,45	2.083.419,43	1.706.357,31	2.616.695	1.819.116.569
Siak Sri Indrapura	612.231,63	65.231,96	778.074,05	191.982,58	866.295,22	120.848,13	855.399	118.618.803
Lalang Terminal, ST	143.181,00	71.694,12	142.490,00	108.308,30	193.541,00	113.945,37	267.725	155.611.764
Futong Terminal	-	-	-	-	492.552,17	253.676,44	2.275.862	1.323.131.392
	-	-						
Bengkalis	1.592.248,34	862.188,45	1.598.321,64	1.117.113,61	1.951.844,96	1.142.197,20	1.032.126	603.790.368
Sungai Pakning	1.583.907,14	860.721,14	1.588.527,53	1.112.053,26	1.864.426,90	1.099.770,65	1.022.297	596.931.479
Tanjung Medang	6.208,17	900,2	5.321,82	728,55	4.502,67	1.026,16	4.812	1.048.795

Kabupaten/Kota Pelabuhan Muat	2021		2022		2023		2024	
	Volume	Nilai	Volume	Nilai	Volume	Nilai	Volume	Nilai
	(ribu Kg)	(Ribu US\$)	(ribu Kg)	(Ribu US\$)	(ribu Kg)	(Ribu US\$)	(ribu Kg)	(Ribu US\$)
Bengkalis	2.133,02	567,1	4.472,29	4.331,80	82.896,32	41.286,07	5.017	5.810.094
Tanjung Kedabu	0	0	0	0	19,07	114,33	0	0
Rokan Hilir	3.052,64	2.099,21	3.483,20	1.897,07	59.746,14	13.245,13	4.019	1.992.482
Panipahan	2.809,91	1.908,17	2.145,05	1.000,50	17.772,18	10.980,55	2.432	1.188.037
Bagan Siapi api	242,73	191,04	1.338,15	896,57	41.973,96	2.264,58	1.587	804.445
Kepulauan Meranti	37.132,97	7.118,65	35.968,26	7.893,10	45.549,00	10.204,80	45.535	11.203.097
Selat Panjang	37.132,97	7.118,65	35.968,26	7.893,10	45.549,00	10.204,80	45.535	11.203.097
Pekanbaru	37.774,27	6.252,95	8.913,56	9.423,62	306.979,04	161.437,76	7.503	2.624.553
Pekanbaru (Rumbai)	33.452,93	2.845,69	-	-	877,44	548,34	3.583	310.849
Pekanbaru	4.321,34	3.407,26	8.896,45	7.687,64	320	55,72	3.916	2.313.704
Simpang Tiga (U)	-	-	17,11	1.735,98	305,781,60	160.833,71	4	267 365
	-	-						
Dumai	18.460.981,47	15.653.778,35	17.707.499,45	17.127.024,28	18.287.589,36	13.235.972.52	16.127.428	12.501.670.292
Dumai	18.460.981,47	15.653.778,35	17.707.499,45	17.127.024,28	18.287.589,36	13.235.972.52	16.127.428	12.501.670.292
Jumlah	25.933.743,21	19.963.112,16	25.522.345,65	22.483.115,77	27.951.228,70	18.866.494,51	25.759.661	18.114.818.322

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Dilihat dari sebaran ekspor menurut kabupaten/kota tahun 2024, Kota Dumai masih mendominasi dengan nilai ekspor sebesar US\$ 12,50 miliar (69,01 persen) dari total nilai ekspor Provinsi Riau, disusul Kabupaten Siak Sri Indrapura sebesar US\$ 4,59 miliar (25,35 persen), Kabupaten Bengkalis US\$ 0.60 miliar (3,33 persen), dan lima kabupaten/kota lainnya sebesar US\$ 0,41 miliar (2,30 persen).

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.3.6.1 Kondisi Kawasan di Provinsi Riau

a) Kawasan Perkotaan

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan yang menjadi lingkungan hidup masyarakat kota, dengan struktur sosial dan tingkat kepadatan yang relatif tinggi. Penduduknya tidak lagi bekerja dengan mengelola sumber daya alam secara langsung tetapi di bidang industri dan jasa. Kota menjadi pusat pengembangan kebudayaan, ekonomi (perdagangan dan bisnis pelayanan), politik, administrasi pemerintahan, komunikasi dan militer. Ruang atau teritori bagi masyarakat kota berarti sebagai wilayah pemukiman dan wilayah bisnis.

Dalam rencana struktur ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, terdapat Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Riau yang berfungsi menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) serta Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

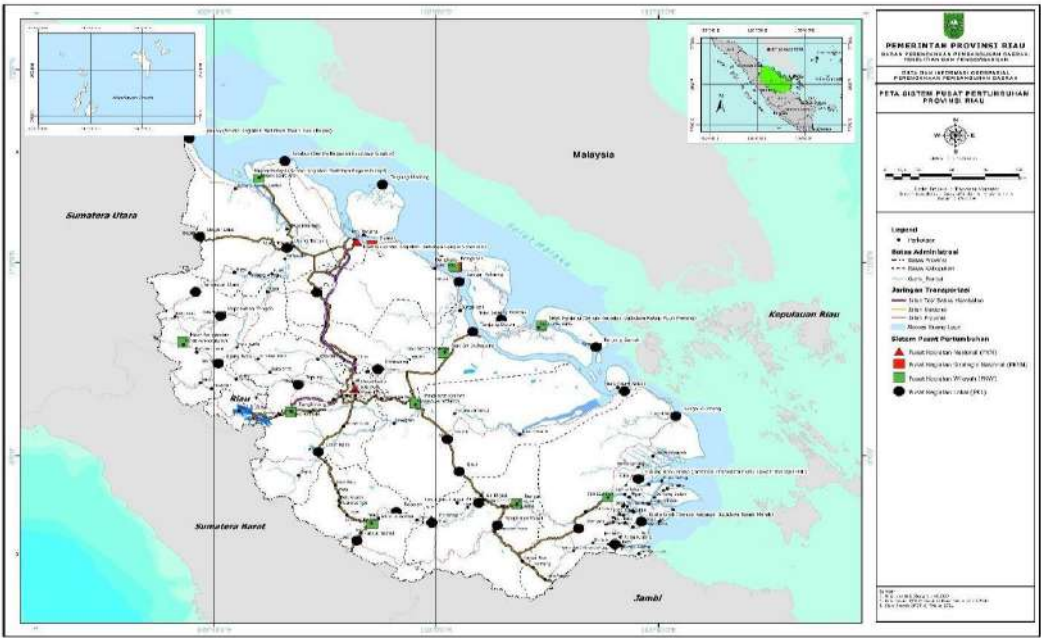
Tabel 2.142 Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Riau

PKN	PKW	PKSN	PKL
1. Kota Pekanbaru	1. Bangkinang	1. Kabupaten Bengkalis	1. Tapung di Kabupaten Kampar
2. Kota Dumai	2. Rengat	2. Kota Dumai	2. Lipat Kain di Kabupaten Kampar
	3. Bengkalis		3. Air Molek di Kabupaten Indragiri Hulu
	4. Tembilahan		4. Peranap di
	5. Pangkalan Kerinci		
	6. Pasir Pangaraian		

PKN	PKW	PKSN	PKL
	7. Bagan Siapiapi		Kabupaten Indragiri Hulu
	8. Siak Sri Indrapura	5.	Pangkalan Kasai di Kabupaten Indragiri Hulu
	9. Teluk Kuantan	6.	Sungai Pakning di Kabupaten Bengkalis
		7.	Duri di Kabupaten Bengkalis
		8.	Tanjung Medang di Kabupaten Bengkalis
		9.	Kuala Enok di Kabupaten Indragiri Hilir
		10.	Sungai Guntung di Kabupaten Indragiri Hilir
		11.	Kempas di Kabupaten Indragiri Hilir
		12.	Pulau Kijang di Kabupaten Indragiri Hilir
		13.	Gaung Anak Serka di Kabupaten Indragiri Hilir
		14.	Sorek di Kabupaten Pelalawan
		15.	Ukui di Kabupaten Pelalawan
		16.	Sokoi di Kabupaten Pelalawan
		17.	Ujung Batu di Kabupaten Rokan Hulu
		18.	Kepenuhan Tengah di Kabupaten Rokan Hulu
		19.	Tambusai Utara di Kabupaten Rokan Hulu
		20.	Ujung Tanjung di Kabupaten Rokan Hilir
		21.	Sinaboi di Kabupaten Rokan Hilir
		22.	Bagan Batu di Kabupaten Rokan Hilir
		23.	Panipahan di Kabupaten Rokan Hilir
		24.	Tanjung Buton di Kabupaten Siak
		25.	Perawang di Kabupaten Siak
		26.	Baserah di Kabupaten Kuantan Singingi
		27.	Lubuk Jambi di Kabupaten Kuantan Singingi
		28.	Selat Panjang di Kabupaten

PKN	PKW	PKSN	PKL
			Kepulauan Meranti
			29. Tanjung Samak di Kabupaten Kepulauan Meranti
			30. Merbau di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sumber : RTRW Provinsi Riau



Sumber : RTRW Provinsi Riau

Gambar 2.64 Sebaran Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Riau

b) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menetapkan bahwa setiap RTRW kabupaten/kota harus menentukan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTR-nya. Pertimbangan penetapan kawasan yang akan disusun RDTR harus merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota yang mempunyai ciri perkotaan atau akan direncanakan menjadi kawasan perkotaan.

Status penyusunan RDTR di Provinsi Riau telah menunjukkan progres yang positif dalam penyusunan RDTR kabupaten/kota, hingga saat ini telah terbit sebanyak 9 Peraturan Kepala Daerah yang mengatur RDTR di sejumlah wilayah di Provinsi Riau, dan sebanyak 29 rancangan RDTR sedang tahap penyusunan.

Tabel 2.143 Status RDTR Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2025

Kode	Kabupaten/Kota	No	Nama RDTR	Tahun Penyusunan	Sumber Pendanaan	Persub	Status Perkada	Keterangan
14.01	Kampar	a.	RDTR Bangkinang Kota	2019	APBD	-	-	Proses Bimte dengan Kementerian ATR/BPN
		b.	RDTR Tambang	2019	APBD	-	-	Proses Bimte dengan Kementerian ATR/BPN
		c.	RDTR Kawasan Perkotaan Siak Hulu	2021	APBN	√	Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 Tahun 2022	
14.02	Indragiri Hulu	a.	RDTR PKW Rengat	2024	APBN	-	-	Linsek (22 Januari 2025)
		b.	RDTR PKL Air Molek	2024	APBN	-	-	Linsek (22 Januari 2025)
14.03	Bengkalis	a.	RDTR BWP Rapat dan Sekitarnya	2019	APBN	√	Peraturan Bupati Bengkalis No. 15 Tahun 2023	
		b.	RDTR Perkotaan Duri	2022	APBD	√	-	Proses pengajuan harmonisasi ke Kanwilukumham dan Biro Hukum Provinsi
		c.	RDTR Perkotaan Bengkalis	2024	APBD	-	-	Sudah terbit Persetujuan Penggunaan IGD
14.04	Indragiri Hilir	a.	RDTR BWP Perkotaan Tembilahan	2019	APBN	√	-	Proses Penerbitan Permen ATR/BPN tentang RDTR
		b.	RDTR Perkotaan Sungai Guntung	2024	APBD	-	-	Penyusunan Materi Teknis
14.05	Pelalawan	a.	RDTR Kawasan Perkotaan Langgam	2019	APBN	√	Peraturan Bupati Pelalawan No. 44 Tahun 2021	
		b.	RDTR Kawasan Perkotaan Sorek	2022	APBD	-	-	Sudah terbit Persetujuan Penggunaan IGD
		c.	RDTR Kawasan Perkotaan Pangkalan Kerinci	2023	APBD	-	-	Proses perbaikan pasca Pra Linsek (17 Desember 2024), menunggu jadwal Linsek
		d.	RDTR Kawasan Perkotaan Ukui	2024	APBD	-	-	Sudah terbit Persetujuan Penggunaan IGD
14.06	Rokan Hulu	a.	RDTR Kawasan PKW Pasir Pangaraian	2018	APBD	-	-	-

Kode	Kabupaten/Kota	No	Nama RDTR	Tahun Penyusunan	Sumber Pendanaan	Persub	Status Perkada	Keterangan
		b.	RDTR Kawasan PKL Ujung Batu	2023	APBD	-	-	Proses Validasi KLHS
14.07	Rokan Hilir	a.	RDTR Perkotaan Bagansiapi-api	2024	APBD	-	-	Proses Asistensi Sumber Data Peta Dasar
		b.	RDTR Kawasan Perkotaan Ujung Tanjung	2024	APBD	-	-	Proses Rekomendasi Peta Dasar
14.08	Siak	a.	RDTR Kawasan Perkotaan Siak Sri Indrapura	2019	APBN	√	Peraturan Bupati Siak No. 52 Tahun 2021	
		b.	RDTR Wilayah Perencanaan Kawasan Sekitar Kawasan Industri Tanjung Buton	2021	APBN	√	Peraturan Bupati Siak No. 73 Tahun 2022	
		c.	RDTR Kawasan Perkotaan Perawang	2023	APBN	√	Peraturan Bupati Siak No. 12 Tahun 2024	
		d.	Revisi RDTR Kawsaan Perkotaan Siak Sri Indrapura	2024	APBD	-		Rekomendasi revisi dari Kementerian ATR/BPN (23 Juli 2024)
14.09	Kuantan Singingi	a.	RDTR Kawasan Perkotaan Taluk Kuantan	2019	APBD	-	-	Updating Peta Dasar dan Peta Rencana
		b.	RDTR Kawasan Perkotaan Lubuk Jambi	2023	APBD	-	-	Materi Teknis
		c.	RDTR Kawasan Perkotaan Baserah	2024	APBD	-	-	Proses Asistensi Peta Dasar
14.10	Kepulauan Meranti	a.	RDTR Kawasan Perkotaan Selat Panjang	2022	APBD	√	Peraturan Bupati Selat Panjang Nomor 1 Tahun 2025	Lintas Sektor (2 September 2024)
		b.	RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung Samak	2024	APBD	-	-	KP II (24 September 2024)

Kode	Kabupaten/Kota	No	Nama RDTR	Tahun Penyusunan	Sumber Pendanaan	Persub	Status Perkada	Keterangan
		c.	RDTR Kawasan Perkotaan Teluk Belitung	2024	APBN	-	-	Harmonisasi Kanwilukumham tgl 7 Februari 2025, kendala belum mendapatkan ttd kesepakatan dengan Kantah Kab Kepulauan Meranti
14.71	Pekanbaru	a.	RDTR Kecamatan Marpoyan Damai	2018	APBD	-	-	Harmonisasi di bagian Hukum Setda Kota
		b.	RDTR Kecamatan Sekitar KI Tenayan (Sebagian Kecamatan Rumbai Timur)	2021	APBN	-	-	Updating data Dokumen Materi Teknis dan Ranperkada
		c.	RDTR Kecamatan Bina Widya dan Kecamatan Tuah Madani	2017	APBD	-	-	Updating data Dokumen Materi Teknis dan Ranperkada
		d.	RDTR Kecamatan Tenayan Raya	2020	APBD	-	-	Updating data Dokumen Materi Teknis dan Ranperkada
		e.	RDTR Kecamatan Kulim	2021	APBD	-	-	Updating data Dokumen Materi Teknis dan Ranperkada
14.72	Dumai	a.	RDTR Kawasan Perkotaan dan Industri Kota Dumai	2019	APBN	√	Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2021	
		b.	RDTR BWP Medang Kampai	2020	APBN	√	Peraturan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2021	
		c.	RDTR Koridor Kota Dumai	2023	APBD	√	-	Sudah Persetujuan Substansi, dalam proses penetapan Perkada
		d.	RDTR Sungai Sembilan Tahap 2	2024	APBD	-	-	Sudah selesai penyusunan, proses pengajuan Persetujuan Substansi

Sumber : Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

2.3.6.2 Aksesibilitas Transportasi

a) Kondisi Jalan Provinsi

Peran dan fungsi jalan adalah sebagai sarana penghubung antar daerah. Infrastruktur jalan penting dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di suatu daerah dikarenakan perannya dalam memperlancar distribusi barang dan jasa, serta orang/penumpang. Terdapat pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan untuk memastikan fungsi pelayanan dapat berjalan dengan baik.

Total panjang jalan di Provinsi Riau adalah sepanjang 24.629,27 km, terbagi pada 3 (tiga) status sesuai dengan kewenangannya, yakni sebagai berikut:

- 1. Kewenangan Nasional sepanjang 1.254,12 km;
- 2. Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau sepanjang 2.897,46 km (Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS. 560/VI/2025 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Ruas Jalan Provinsi di Provinsi Riau tanggal 16 Juni 2025);
- 3. Kewenangan Pemerintah kabupaten/kota sepanjang 20.477,69 km.

Tabel 2.144 Panjang Jalan di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota dan Status/Kewenangan Pemerintahan Tahun 2025

Kode	Kabupaten/ Kota	Tahun 2025 (Km)			
		Nasional	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah
14.01	Kampar	161,11	394,62	2.073,10	2.628,83
14.02	Indragiri Hulu	105,38	241,63	1.593,61	1.940,62
14.03	Bengkalis	103,12	157,95	1.257,11	1.518,18
14.04	Indragiri Hilir	149,77	454,30	1.190,59	1.794,66
14.05	Pelalawan	128,53	218,17	1.985,80	2,332,50
14.06	Rokan Hulu	-	431,55	2.140,36	2.571,91
14.07	Rokan Hilir	206,00	242,19	1.961,53	2.409,72
14.08	Siak	144,97	120,70	2.880,19	3.145,86
14.09	Kuantan Singingi	121,42	196,25	1.989,85	2.307,52
14.10	Kepulauan Meranti	156,49	156,30	929,42	1.085,91
14.71	Pekanbaru	75,04	161,57	1.277,90	1.514,51
14.72	Dumai	58,79	122,04	1.198,24	1.379,07
Jumlah		1.254,12	2.897,46	20.477,69	24.629,27

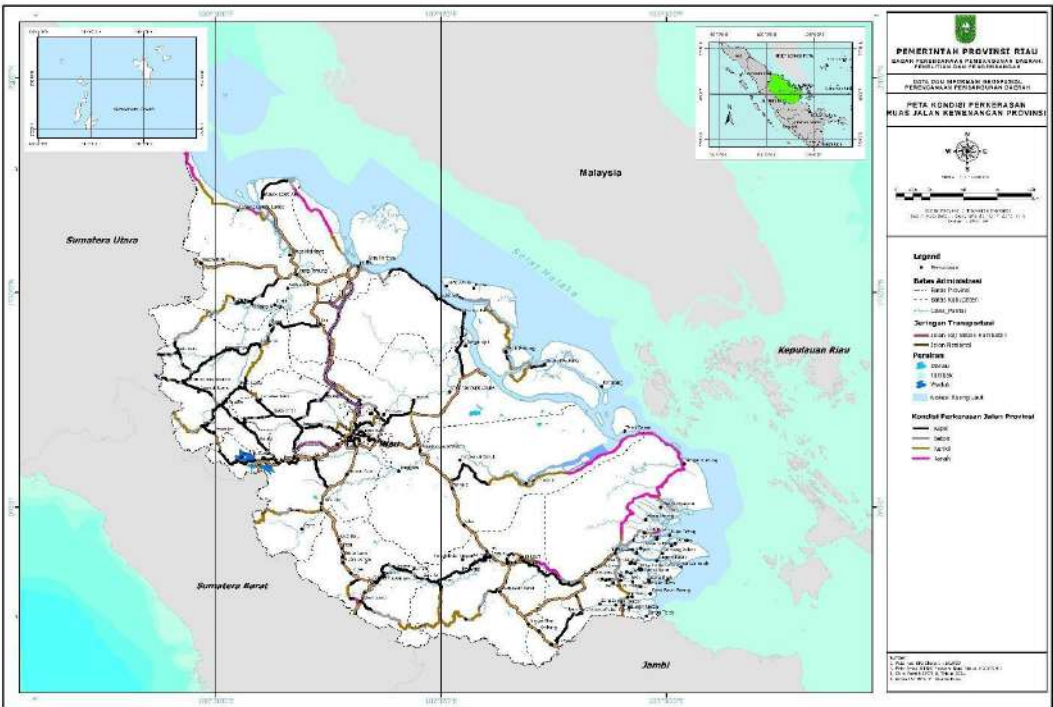
*Data belum termasuk jalan tol
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Kondisi jalan dapat dikelompokkan menjadi kondisi mantap dan kondisi tidak mantap. Kondisi mantap merupakan kondisi jalan dengan kategori baik dan sedang, sedangkan kondisi tidak mantap adalah dengan kategori rusak ringan dan rusak berat. Kondisi ini perlu diketahui untuk dapat mengidentifikasi kualitas jalan dan penetapan strategis dalam pemenuhan target sebagaimana yang ditetapkan nasional.

**Tabel 2.145 Kondisi Jalan Provinsi di Provinsi Riau
Tahun 2020-2024**

No	Kondisi Jalan	Jalan Provinsi									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Panjang (km)	(%)	Panjang (km)	(%)	Panjang (km)	(%)	Panjang (km)	(%)	Panjang (km)	(%)
	Mantap	1.773,17	63,33	1.763,18	62,97	1.818,15	64,94	1.795,19	66,64	1.841,32	68,35
1	Baik	1.514,07	54,08	1.474,68	52,67	1.447,80	51,71	1.486,37	55,18	1.659,58	61,61
2	Sedang	259,10	9,25	292,40	10,44	370,36	13,23	308,82	11,46	181,74	6,74
	Tidak Mantap	1.026,64	36,67	1.036,63	37,03	981,66	35,06	898,69	33,36	852,55	31,65
1	Rusak Ringan	70,52	2,52	589,67	21,06	60,59	2,16	17,49	0,65	38,92	1,45
2	Rusak Berat	956,12	34,15	443,06	15,82	921,07	32,90	881,20	32,71	813,63	30,20
	Total	2.799,81	100	2.799,81	100	2.799,81	100	2.693,88	100	2.693,88	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2025



Sumber : Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS. 7464/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023

**Gambar 2.65 Sebaran Kondisi Ruas Jalan Kewenangan Provinsi Riau
Tahun 2023**

Panjang jalan Provinsi Riau telah mengalami perubahan panjang yang semula 2.693,88 km menjadi 2.897,46 km berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 560/VI/2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 7464/X/2023 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut statusnya sebagai Ruas Jalan Provinsi di Provinsi Riau tanggal 16 Juni 2025. Untuk kondisi tingkat kemantapan jalan Provinsi Riau masih menggunakan data terakhir tahun 2024, dimana kondisi jalan mantap pada jalan kewenangan provinsi sepanjang 1.841,32 km atau 68,35 persen dari panjang keseluruhan. Adapun kondisi jalan tidak mantap pada tahun 2024 sepanjang 852,55 km atau 31,65 persen. Masih rendahnya kondisi jalan mantap di Provinsi Riau dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat mencapai 31,65 persen salah satunya oleh disebabkan Kendaraan *Over Dimension Over Load* (ODOL) memberikan dampak negatif terhadap kerusakan jalan. Beban berlebih yang dibawa oleh kendaraan ODOL menyebabkan jalan lebih cepat rusak, seperti permukaan jalan menjadi bergelombang, berlubang, atau retak. Kerusakan ini memerlukan biaya perbaikan yang tinggi dan dapat mengganggu kelancaran lalu lintas serta meningkatkan risiko kecelakaan. Hasil pendataan kendaraan yang diduga termasuk dalam kategori ODOL yang dilakukan Kepolisian Daerah Provinsi Riau hingga akhir Juni 2025 tercatat lebih dari 4.500 unit kendaraan di Riau yang masuk dalam daftar indikasi pelanggaran dimensi dan muatan.

Kondisi jalan tidak mantap ini memerlukan perhatian serius, mengingat kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus barang dan jasa yang mendorong stabilitas dan mengurangi disparitas harga antar daerah, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

b) Akses Transportasi

Provinsi Riau memiliki aksesibilitas darat, sungai, laut dan udara yang menghubungkan Provinsi Riau dengan wilayah luar sekitar provinsi. Aksesibilitas darat dihubungkan dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalan bebas hambatan serta terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Salah satu jaringan jalan bebas

hambatan yang telah operasional adalah Jalan Tol Pekanbaru – Dumai. Jalan Tol Pekanbaru – Dumai merupakan bagian dari Jalan Tol Trans-Sumatera sepanjang 2.878 km yang membentang dari Lampung hingga Aceh. Jalan Tol Pekanbaru – Dumai akan meningkatkan konektivitas antara Ibu Kota Provinsi Riau dengan Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dengan industri perminyakan dan agribisnis yang maju, serta kawasan industri dan perkebunan lainnya. Jalan Tol Pekanbaru – Dumai juga memperpendek jarak tempuh Kota Pekanbaru – Dumai, dari sebelumnya 200 km jika melewati jalan nasional, menjadi 131 km jika ditempuh melalui jalan tol ini.

Tol Pekanbaru – Dumai memiliki enam seksi ruas. Di antaranya, seksi I Pekanbaru – Minas (9,5 km), Seksi II Minas – Petapahan (24,1 km), seksi III Petapahan - Kandis Utara (16,9 km). Lalu seksi IV Kandis Utara – Duri Selatan (27,23 km), seksi V Duri Selatan – Duri Utara (27,23 km), dan Seksi VI Duri Utara – Dumai (24,65 km). Nantinya, Jalan Tol Trans Sumatera akan menyambungkan Aceh hingga Lampung sepanjang 2.765 kilometer. Tol ini juga akan tersambung dengan kota lain yakni Padang dan Bengkulu.



Gambar 2.66 Gerbang Tol Pekanbaru, Gerbang Tol Dumai, dan Gerbang Tol Bathin Solapan



Gambar 2.67 Kondisi Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, Jalan Tol Duri dan Jalan Tol Bathin Solapan-Dumai



Gambar 2.68 Kondisi Jembatan Menuju Jambi

Saat ini, proses pembangunan jalan tol Pekanbaru – Padang, yaitu seksi Pekanbaru - Bangkinang telah selesai dan operasional, sedangkan seksi Bangkinang - Pangkalan masih dalam proses pembangunan dikarenakan ruas yang tuntas terbangun hanya pada seksi Bangkinang – Tanjung Alai (24,7 km). Perkembangan pembangunan ruas jalan tol tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan aksesibilitas darat di Provinsi Riau dengan wilayah di sekitar Provinsi Riau, khususnya akses antara Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat.

Aksesibilitas darat di Provinsi Riau juga dilayani oleh empat hub/simpul transportasi jalan (terminal) kelas A yang melayani pergerakan regional Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari dan menuju Provinsi Riau. Sementara, transportasi sungai dan penyeberangan merupakan sarana penghubung jaringan prasarana jalan yang terputus akibat adanya hambatan berupa sungai untuk menghubungkan dua wilayah daratan/pulau yang berseberangan. Transportasi sungai di Provinsi Riau banyak digunakan untuk perhubungan antar kecamatan dan antardesa yang sifatnya pergerakan lokal. Aksesibilitas laut menuju Provinsi Riau didukung oleh pelabuhan dengan berbagai tipe yang tersebar di berbagai lokasi. Provinsi Riau memiliki jaringan transportasi laut berupa pelabuhan yaitu pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan regional. Aksesibilitas udara menuju dan dari Provinsi Riau dilayani oleh prasarana bandar udara (bandara) yang dapat melayani pergerakan penumpang dan barang, baik domestik maupun internasional, yakni Bandara Sultan Syarif

Kasim II yang terletak di Kota Pekanbaru, serta juga terdapat beberapa bandara lainnya dengan hirarki yang berbeda. Tujuh bandar udara yang ada di Provinsi Riau yang sebagian belum beroperasi secara memadai, yaitu Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru, Japura di Rengat, Tuanku Tambusai di Pasir Pangaraian, Pinang Kampai di Dumai, Bukit Batu di Sei Pakning, Sultan Syarif Haroen Setia Negara di Pangkalan Kerinci, dan Tempuling di Indragiri Hilir. Bandara Sultan Syarif Kasim II melayani lebih dari 99 persen penerbangan domestik dan internasional. Pelayanan transportasi udara perlu diantisipasi melalui peningkatan kapasitas pelayanan bandar udara, pembangunan bandar udara baru, peningkatan keselamatan penerbangan, dan integrasi dengan sistem moda transportasi darat, laut, sungai dan penyeberangan. Untuk itu diperlukan pembangunan bandar udara baru pengganti Bandara Sultan Syarif Kasim II yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Primer; Peningkatan fungsi Bandara Pinang Kampai - Dumai sebagai Pusat Penyebaran Tersier yang dapat ditingkatkan melayani penerbangan internasional untuk mendukung peran Kota Dumai sebagai Kawasan industri; dan perlu dilakukan peningkatan pelayanan Bandara Japura di Rengat, Tuanku Tambusai di Pasir Pangaraian, Bukit Batu di Sei Pakning, Sultan Syarif Haroen Setia Negara di Pelalawan, dan Tempuling di Indragiri Hilir. Jumlah kedatangan dan keberangkatan maskapai baik internasional maupun domestik serta arus penumpang dan barang melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Selain itu, aksesibilitas di dalam wilayah Provinsi Riau yang menghubungkan kabupaten/kota didominasi oleh aksesibilitas darat berupa jaringan jalan dan terminal, yang dilengkapi oleh ketersediaan pelabuhan penyeberangan antar kabupaten dalam provinsi dan dalam kabupaten. Namun, pelayanan transportasi penyeberangan belum berfungsi secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya antrian panjang masyarakat yang ingin menyeberang di kedua sisi pada waktu-waktu tertentu, khususnya yang menggunakan kendaraan roda empat maupun lebih.

Keterpaduan aksesibilitas adalah konektivitas yang dibangun untuk memadukan aksesibilitas menuju dan di dalam wilayah Provinsi Riau. Keterpaduan aksesibilitas juga perlu dibangun antara aksesibilitas udara, laut dan darat.

Tabel 2.146 Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Maskapai dan Penumpang serta Barang Di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Tahun 2023-2024

No	Jenis			Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pesawat (Unit)	Internasional	Kedatangan	1.613	1.822
			Keberangkatan	1.603	1.860
		Domestik	Kedatangan	9.967	9.517
			Keberangkatan	9.978	9.516
2	Penumpang (Orang)	Internasional	Kedatangan	168.285	236.155
			Keberangkatan	173.503	240.977
		Domestik	Kedatangan	1.201.962	1.243.550
			Keberangkatan	1.209.794	1.259.714
3	Barang (Ton)	Internasional	Bongkar	1.974	2.490
			Muat	1.284	1.705
		Domestik	Bongkar	21.159	23.721
			Muat	14.437	15429

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Tabel 2.147 Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Penumpang di Terminal AKAP (Terminal Tipe A Bangkinang, Terminal Tipe A BRPS Pekanbaru, Terminal Tipe A Dumai) Tahun 2023-2024

No	Jenis			AKAP Tahun 2023	AKDP Tahun 2023	AKAP Tahun 2024	AKDP Tahun 2024
1	Terminal Tipe A BRPS Pekanbaru	Kendaraan (Unit)	Kedatangan	54.180	17.919	43.404	18.963
			Keberangkatan	53.189	17.006	42.559	17.611
		Penumpang (Orang)	Kedatangan	220.998	156.902	204.999	199.194
			Keberangkatan	779.290	159.653	651.012	214.916
2	Terminal Tipe A Bangkinang	Kendaraan (Unit)	Kedatangan	25.583	1.527	15.040	1.488
			Keberangkatan	25.566	1.737	15.030	1.489
		Penumpang (Orang)	Kedatangan	244.273	7.226	134.409	7.620
			Keberangkatan	244.026	8.757	134.285	7.856
3	Terminal Tipe A Kota Dumai	Kendaraan (Unit)	Kedatangan	4.008	4.189	4.570	7.370
			Keberangkatan	4.601	4.356	4.479	7.442
		Penumpang (Orang)	Kedatangan	75.429	75.908	75.699	135.116
			Keberangkatan	66.597	93.349	60.100	135.179

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Tabel 2.148 Rekapitulasi Laporan Angkutan Laut Tahun 2023-2024

No	Nama KSOP/UPP	Kunjungan Kapal (Call)	Gt	Angkutan Dalam Negeri Tahun 2023				Angkutan Luar Negeri Tahun 2023				Ket
				Bongkar (Ton/M3)	Muat (Ton/M3)	Penumpang Turun	Penumpang Naik	Import (Ton/M3)	Export (Ton/M3)	Penumpang Turun	Penumpang Naik	
1.	Bengkalis	4.343	773.120	314.915,044	20.482,270	47.478	38.927	3.320	4.927	76.693	83.906	
2.	Tembilahan	4.592	705.862	455.022	932.564	38.336	44.831	-	18.573	-	-	
3.	Tanjung Buton	19.577	15.398.860	9.735.520	3.950.386	152.424	156.500	2.244.215	4.741.639	-	-	
4.	Pekanbaru	10.667	9.491.473	12.455.171	2.754.758	43.693	50.935	1.453.131	-	-	-	
5.	Selat Panjang	19.991	2.298.234	771.709	851.004	218.168	262.746	2.014	34.454	23.047	27.475	
6.	Dumai	9.571	44.300.356	9.469.249	10.525.919	86.280	90.132	1.851.369	18.168.054	90.685	136.314	
7.	Bagan Siapiapi	1.739	42.331	2.408,90	2.761,50	28.388	27.545	-	-	-	-	
8.	Kuala Enok	2.557	518.656	401.740,375	63.785,039	3.478	3.439	-	316.300,845	-	-	
9.	Kuala Cinaku	936	1.795.673	430	2.368.687	-	-	-	140.505	-	-	
10	Kuala Gaung	6.385	980.372	58.237	1.574.371	3.293	4.952	-	111.012	-	-	
11	Sungai Guntung	11.101	1.268.912	1.611.963	1.135.711	63.646	64.337	12.204	59.499	-	-	
12	Tanjung Medang	2.200	393.571	33.342,300	712.662	22.656	11.915	-	10.267,250	-	-	
13	Panipahan	1.189	39.554	8.691	1.687	35.369	34.274	-	2.798	-	-	
	Jumlah	94.848	78.006.974	35.318.398,319	24.894.777,309	743.209	790.533	5.566.253	23.608.028,805	190.425	247.695	

No	Nama KSOP/UPP	Kunjungan Kapal (Call)	Gt	Angkutan Dalam Negeri Tahun 2023				Angkutan Luar Negeri Tahun 2024				Ket.
				Bongkar (Ton/M3)	Muat (Ton/M3)	Penumpang Turun	Penumpang Naik	Import (Ton/M3)	Export (Ton/M3)	Penumpang Turun	Penumpang Naik	
1.	Bengkalis	4.422	768.040	282.731,560	19.858,100	45.576	38.090	3.040	6.210,300	69.756	71.931	
2.	Tembilahan	5.815	806.207	562.188	911.761	41.736	50.470	-	22.070	-	-	
3.	Tanjung Buton	10.811	15.678.130	9.932.827	3.660.448	123.429	142.994	2.723.115	5.043.026	-	-	
4.	Pekanbaru	11.240	11.297.228	16.524.652	1.858.952	28.344	26.462	2.222.385	3.808.063	-	-	
5.	Selat Panjang	25.474	2.734.828	611.263	832.702	306.608	322.502	1.890	29.622	39.218	41.466	
6.	Dumai	9.030	43.921.493	8.875.609	11.584.219	106.221	128.019	2.705.710	16.164.475	86.435	115.543	
7.	Bagan Siapiapi	1.681	112.696	8.077	179.154	29.669	29.992	-	-	-	-	
8.	Kuala Enok	2.306	478.634	327.478,996	107.378,341	3.038	3.673	-	209.726,573	-	-	
9.	Kuala Cinaku	2.000	1.616.738	-	1.576.348	-	-	-	90.312	-	-	
10	Kuala Gaung	7.751	800.630	127.874	953.360	2.124	2.073	-	107.480	-	-	
11	Sungai Guntung	8.117	856.845	545.333	391.776	43.883	50.342	29.791	136.282	-	-	
12	Tanjung Medang	1.621	298.382	11.711,019	491.903,180	18.586	9.307	-	2.845,695	-	-	
13	Panipahan	802	26.758	4.854	1.162	23.976	24.544	-	2.040	-	-	
	Jumlah	91.070	79.396.609	37.814.598,575	22.569.021,621	773.190	828.468	7.685.931	25.622.152,568	195.409	228.940	

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Untuk jumlah keberangkatan dan kedatangan kapal angkutan dalam dan luar negeri, jumlah dan arus penumpang tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel diatas yang merupakan data penumpang yang menggunakan layanan penyeberangan pada 13 pelabuhan penyeberangan yang ada di Provinsi Riau, dimana untuk jumlah total kunjungan pada tahun 2024 adalah sebanyak 91.070 kunjungan, jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan jumlah total kunjungan pada tahun 2023 sebanyak 94.848 kali kunjungan.

Pelayanan transportasi penyeberangan belum berfungsi secara optimal pada saat tertentu dimana terdapatnya antrian panjang masyarakat yang ingin menyeberang di kedua sisi pada waktu-waktu tertentu, khususnya yang menggunakan kendaraan roda empat maupun lebih, kondisi ini bersifat *temporary*, dengan pola pelayanan *system booking* tiket yang mulai diterapkan pada layanan penyeberangan tertentu dapat mengurangi penumpukan penumpang yang akan menggunakan layanan penyeberangan. Pemesanan tiket secara online mengurangi tingkat penumpukan penumpang,

2.3.6.3 Infrastruktur Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air merupakan upaya yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terkoordinasi dan berbasis Wilayah Sungai. Aspek yang diintervensi antara lain terkait dengan irigasi pertanian, pengaman tebing sungai dan pantai, serta pengendalian banjir.

Irigasi adalah usaha penyediaan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa. Luas lahan sawah yang teraliri irigasi di Provinsi Riau, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.149 Penggunaan Lahan Sawah Irigasi di Provinsi Riau
Tahun 2023

Kode	Kabupaten /Kota	Realisasi Dalam Satu Tahun (Ha)					Jumlah	Luas Lahan SK BPN/ ATR 2019
		Ditanami Padi			Tidak ditanami padi			
		Satu Kali	Dua Kali	≥ Tiga Kali	Ditanami tanaman lainnya	tidak ditanami apapun		
14.01	Kampar	1,428.00	1,283.00	54.00	225.00	1,155.00	4,145.00	3,220.40
14.02	Indragiri Hulu	875.00	173.00	-	379.00	1,297.00	2,724.00	2,667.30
14.03	Bengkalis	1,353.64	1,290.50	-	-	348.28	2,992.42	2,992.40
14.04	Indragiri Hilir	8,119.50	4,347.80	566.60	110.00	4,262.30	17,406.20	19,020.50
14.05	Pelalawan	4,344.00	675.50	-	778.50	1,951.00	7,749.00	6,718.20
14.06	Rokan Hulu	118.20	1,198.20	-	8.00	505.00	1,829.40	1,683.60
14.07	Rokan Hilir	7,886.00	1,808.00	-	1,638.00	2,440.00	13,772.00	12,185.60
14.08	Siak	326.00	3,220.00	467.00	553.00	250.00	4,816.00	4,331.70
14.09	Kuantan Singingi	4,685.40	429.40	15.00	137.80	976.40	6,244.00	6,212.60
14.10	Kepulauan Meranti	2,308.00	60.00	-	126.00	1,044.00	3,538.00	3,436.20
14.71	Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	3.30
14.72	Dumai	178.00	55.00	-	15.00	-	248.00	217.40
Tahun 2023		31,621.74	14,540.40	1,102.60	3,970.30	14,228.98	65,464.02	62,689.20
Tahun 2020		45,975.40	17,275.30	374.00	2,459.00	6,069.20	72,152.90	62,689.20

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwasanya penggunaan lahan sawah irigasi Provinsi Riau telah mengalami penurunan, yakni dari 72.152,90 Hektar tahun 2020 menjadi 65.464,02 Hektar pada tahun 2023. Meskipun demikian, luas ini masih mengakomodir total luas lahan sawah berkelanjutan sebagaimana ditetapkan dalam SK Menteri BPN/ATR Tahun 2019 yakni 62.689,20 Hektar. Kondisi ini akan semakin menurun jika sarana prasarana irigasi tidak dipelihara untuk berfungsi dengan baik.

a) Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah irigasi dimana kriteria pembagian tanggungjawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata luasan jaringan irigasi meliputi:

- a. Kewenangan pemerintah, yakni pada Daerah Irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha;
- b. Kewenangan provinsi, yakni Daerah Drigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha; dan
- c. Kewenangan pemerintah kab/kota, yakni Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha.

Luas daerah daratan rendah/rawa yang potensi untuk prasarana pengairan Provinsi Riau adalah seluas 426.325 Ha. Agar lahan tersebut dapat difungsikan, diperlukan suatu program peningkatan/Rehabilitasi dan operasi pemeliharaan yang berkelanjutan. Sedangkan luas lahan rawa yang masih tersedia (reklamasi) yang masih dapat dikembangkan adalah seluas 289.836 Ha. Dengan adanya penanganan lahan irigasi dan rawa dimaksudkan, maka akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Provinsi Riau.

Daerah irigasi kewenangan Provinsi Riau sebanyak 8 daerah irigasi permukaan dan 50 daerah irigasi rawa. Total luas daerah irigasi permukaan kewenangan provinsi yaitu 10.035 ha serta luas daerah irigasi rawa kewenangan Provinsi Riau yaitu 106.936 ha. Daerah irigasi permukaan kewenangan Provinsi Riau terdapat di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Rokan Hulu. Dimana ada 6 daerah irigasi di Kabupaten Kampar, 1 daerah irigasi di Kabupaten Kuantan Singingi serta 1 daerah irigasi di Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan Daerah Irigasi Rawa kewenangan Provinsi Riau terdapat 6 Kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Siak. Dimana ada 6 daerah irigasi rawa di Kabupaten Kepulauan Meranti, 3 daerah irigasi rawa di Kabupaten Bengkalis, 3 daerah irigasi rawa di Kabupaten Indragiri Hulu, 31 daerah irigasi rawa di Kabupaten Indragiri Hilir, 6 daerah irigasi rawa di Kabupaten Rokan Hilir, dan 1 daerah irigasi rawa di Kabupaten Siak.

Tabel 2.150 Kondisi Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

No.	Nama Daerah Irigasi		Luas Baku (Ha)	Luas Fungsional (Ha)	Total Panjang Saluran (Primer ; Tersier ; Sekunder) (m)	Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%)	Penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Tahun IKS
						Jumlah		
Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi			116.971	13.677	2.432.663			
Daerah Irigasi Permukaan			10.035	5.040	169.916			
Kabupaten Kampar			6.588	1.901	96.279			
1	D.I	Bancah Labi Sei Silam	1.063	195	26.028	49,50	Jelek	2023
2	D.I	Muara Jalai Sei Tanang Sawah	1.065	250	7.485	52,29	Jelek	2023
3	D.I	Ranah Singkuang Sei Sirah Penyesawan	1.203	130	16.009	22,38	Jelek	2023
4	D.I	Sei Paku	1.123		15.091	21,85	Jelek	2021
5	D.I	Sei Tibun Petapahan	1.105	486	14.856	25,26	Jelek	2023
6	D.I	Uwai Pangoan	1.029	840	16.810	30,28	Jelek	2023
Kabupaten Kuantan Singingi			1.293	1.093	25.849			
7	D.I	Seberang Gunung Paing	1.293	1.093	25.849	25,16	Jelek	2021
Kabupaten Rokan Hulu			2.154	2.046	47.788			
8	D.I	Kaiti Samo	2.154	2.046	47.788	28,97	Jelek	2019

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Dapat kita lihat pada tabel diatas bahwa daerah irigasi permukaan kewenangan Provinsi Riau yang paling luas yaitu Daerah Irigasi Kaiti Samo di Kabupaten Rokan Hulu. Apabila dilihat berdasarkan kondisi eksisting kinerja Daerah Irigasi Permukaan kewenangan Provinsi dapat disimpulkan bahwa seluruhnya dalam kondisi jelek.

b) Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kewenangan Provinsi

Daerah Irigasi Rawa kewenangan Provinsi Riau yang paling luas yaitu daerah irigasi rawa Tanjung Lajau dengan luas 2.918 Ha di Kabupaten Indragiri Hilir. Kondisi eksisting kinerja Daerah Irigasi Rawa kewenangan Provinsi Riau sebagian besar dalam kondisi sedang dan rusak.

Tabel 2.151 Kondisi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kewenangan Provinsi se- Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

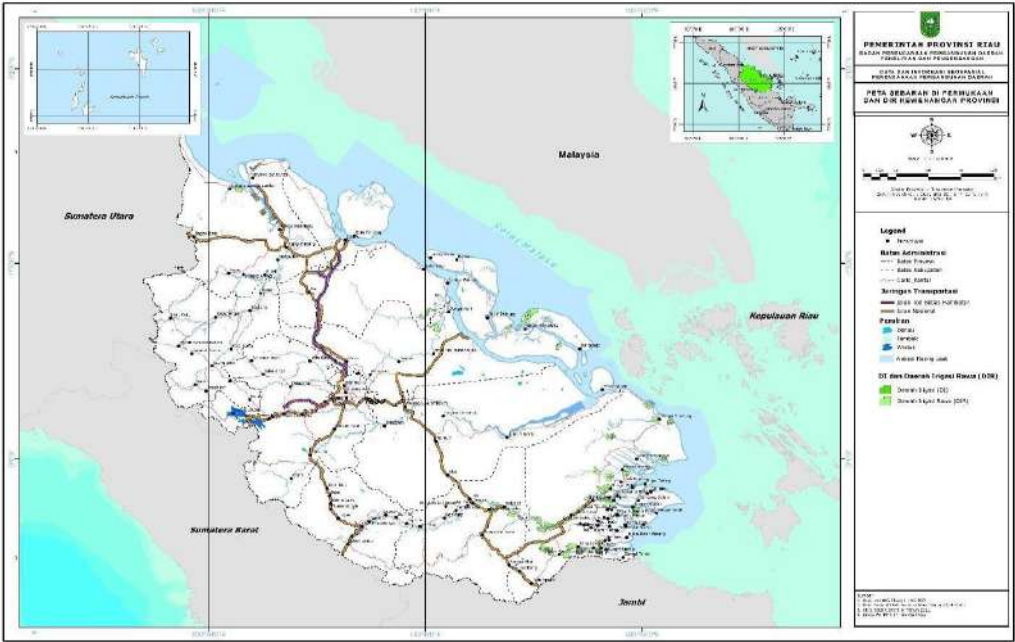
No.	Nama Daerah Irigasi		Luas Baku (Ha)	Luas Fungsional (Ha)	Total Panjang Saluran (Primer; Tersier; Sekunder) (m)	Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%)	Penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Tahun IKS
						Jumlah		
						Nilai Maks 100%		
Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi			116.971	13.677	2.432.663			
Daerah Irigasi Rawa			106.936	8.637	2.262.747			
Kabupaten Bengkalis			4.493	1.365	116.203			
1	D.I.R.	Siak Kecil A',B',C'	1.341	62	23.080	21,03	Jelek	2021

No.	Nama Daerah Irigasi		Luas Baku (Ha)	Luas Fungsional (Ha)	Total Panjang Saluran (Primer; Tersier; Sekunder) (m)	Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%)	Penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Tahun IKS
						Jumlah Nilai Maks 100%		
2	D.I.R.	Siak Kecil A,B,C,D	1.262	388	26.455	22,92	Jelek	2021
3	D.I.R.	Siak Kecil E,F,H,I,J,K	1.890	914	66.668	21,51	Jelek	2021
Kabupaten Indragiri Hilir			68.868	5.125	1.180.580			
4	D.I.R.	Belantaraya	2.100	-	40.890	40,99	Jelek	2022
5	D.I.R.	Belaras	2.670	-	44.893	45,30	Jelek	2022
6	D.I.R.	Benteng/Pesanggrahan	1.794	610	33.672	40,56	Jelek	2022
7	D.I.R.	Kampung Baru	1.200	-	29.790	48,57	Jelek	2022
8	D.I.R.	Kempas	2.900	157	44.580	53,79	Jelek	2022
9	D.I.R.	Kotabaru Reteh	2.769	462	76.669	53,14	Jelek	2022
10	D.I.R.	Kuala Cinaku II/Harapan & Bayas Jaya	2.892	373	36.925	50,41	Jelek	2022
11	D.I.R.	Kuala Lemang	2.873	483	25.817	34,03	Jelek	2022
12	D.I.R.	Mumpa	1.454	161	20.954	39,92	Jelek	2022
13	D.I.R.	Pebenaan	2.891	411	44.043	45,06	Jelek	2022
14	D.I.R.	Pekan Arba	1.243	45	14.957	36,17	Jelek	2022
15	D.I.R.	Pulau Burung	2.500	-	20.509	46,28	Jelek	2022
16	D.I.R.	Pulau Kecil	1.900	427	61.824	42,52	Jelek	2022
17	D.I.R.	Pulau Kijang	2.706	140	40.948	47,86	Jelek	2022
18	D.I.R.	Pulau Palas	2.032	191	30.400	38,74	Jelek	2022
19	D.I.R.	Reteh Lokal (Sei Gantang)	1.207	320	44.001	45,07	Jelek	2022
20	D.I.R.	Sanglar	2.908	641	89.378	36,81	Jelek	2022
21	D.I.R.	Sei Piring / Tasik Raya	2.792	4	27.582	34,15	Jelek	2022
22	D.I.R.	Sei Salak	2.073	157	54.180	34,02	Jelek	2022
23	D.I.R.	Sei Dusun	2.097	89	37.275	35,13	Jelek	2022
24	D.I.R.	Sei Perak	1.007	56	17.348	36,63	Jelek	2022
25	D.I.R.	Sei Piyai	1.905	5	31.710	41,25	Jelek	2022
26	D.I.R.	Sei Teritip	1.750	-	32.077	39,22	Jelek	2022
27	D.I.R.	Simpang Kateman	2.240	-	23.070	46,77	Jelek	2022
28	D.I.R.	Tanjung Lajau	2.918	-	44.632	30,98	Jelek	2022
29	D.I.R.	Teluk Dalam	2.054	-	33.234	43,91	Jelek	2022
30	D.I.R.	Teluk Kelasa	2.784	222	49.528	42,05	Jelek	2022
31	D.I.R.	Teluk Kiambang	2.054	170	34.721	44,09	Jelek	2022
32	D.I.R.	Teluk Sungka	2.769	-	45.317	31,34	Jelek	2022
33	D.I.R.	Terusan Kempas	2.703	-	27.052	43,05	Jelek	2022
34	D.I.R.	Togaraja	1.683	-	22.604	31,44	Jelek	2022
Kabupaten Indragiri Hulu			7.202	340	208.148			
34	D.I.R.	Dagang	2.902	120	69.132	18,05	Jelek	2021
36	D.I.R.	Kuala Mulya / Rawa Sekip	2.793	140	46.983	18,82	Jelek	2023
37	D.I.R.	Rengat	1.507	80	92.033	15,02	Jelek	2021
Kabupaten Kepulauan Meranti			10.495	879	119.276			
38	D.I.R.	Anak Setatah	1.235	118	9.404	52,39	Jelek	2022
39	D.I.R.	Centai / Semukut	1.010	77	3.060	38,02	Jelek	2022
40	D.I.R.	Kedabu Rapat	2.400	172	18.156	55,24	Kurang	2023
41	D.I.R.	Melai	2.900	323	67.724	20,33	Jelek	2023
42	D.I.R.	Sei Cina	1.450	183	10.885	31,06	Jelek	2023
43	D.I.R.	Sei Tohor	1.500	7	10.047	53,74	Jelek	2022
Kabupaten Rokan Hilir			13.008	728	547.614			

No.	Nama Daerah Irigasi		Luas Baku (Ha)	Luas Fungsional (Ha)	Total Panjang Saluran (Primer; Tersier; Sekunder) (m)	Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%)	Penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Tahun IKSI
						Jumlah Nilai Maks 100%		
44	D.I.R.	Lenggadai Mukti Jaya (N.4)	1.750	96	36.469	26,51	Jelek	2021
45	D.I.R.	Padamaran (N.17, N.18)	2.082	146	100.122	13,05	Jelek	2021
46	D.I.R.	Parit Aman	2.015	164	84.625	23,85	Jelek	2021
47	D.I.R.	Pekaitan	2.500	66	64.869	25,69	Jelek	2021
48	D.I.R.	Teluk Bano II (N.15, N.16)	1.876	188	215.865	22,94	Jelek	2021
49	D.I.R.	Teluk Pulau	2.785	68	45.664	15,32	Jelek	2023
Kabupaten Siak			2.870	200	90.926			
50	D.I.R.	Siak Kiri Pake A (Langkat Permai, Jati Baru dan Dayang Suri)	2.870	200	90.926	22,59	Jelek	2023
TOTAL					2.432.663	35,40	Jelek	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Provinsi Riau

Dapat kita lihat pada tabel di atas bahwa daerah irigasi rawa kewenangan Provinsi Riau yang paling luas tersebar di pesisir Riau, yakni Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Apabila dilihat berdasarkan kondisi eksisting kinerja Daerah Irigasi Rawa kewenangan Provinsi dapat disimpulkan bahwa secara umum terkategori dalam kondisi jelek.



Sumber : Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau) Diolah kembali
Gambar 2.69 Peta Sebaran DI Permukaan dan DIR Kewenangan Provinsi di Kabupaten/Kota Provinsi Riau

2.3.6.4 Pengaman Pantai di Pulau Terluar

Terjadinya abrasi yang ada di Provinsi Riau saat ini sudah cukup memprihatinkan, mengingat panjangnya garis Pantai Provinsi Riau sementara tutupan vegetasi di pesisir sudah mengalami degradasi. Tingginya tingkat abrasi di wilayah pesisir dengan panjang abrasi pantai di 3 pulau terluar (Rupat, Bengkalis, dan Rangsang) ialah 287,15 km, dengan tingkat kekritisannya tinggi sepanjang 167,22 km. Berikut adalah kondisi penanganan pengaman pantai di pulau terluar Provinsi Riau sampai tahun 2024.

Tabel 2.152 Rekapitulasi Pengaman Pantai di Pulau Terluar Provinsi Riau Tahun 2021-2024

Uraian Kegiatan	Kabupaten	Panjang Abrasi Pantai (Km)	Lokasi	Penanganan Abrasi Tahun				Total Penanganan (Km)	Sisa Penanganan (Km)
				2021	2022	2023	2024		
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Bengkalis	95,17	Pulau Rupat	Pantai Tanjung Lapin Kec. Rupat Utara (62,2 m)	Pantai Ketapang Pulau Rupat (7 m)	Pantai Ketapang Pulau Rupat (86 m)	Pantai Ketapang, Desa Sungai Cingam, Kecamatan Rupat Kab. Bengkalis 95,78 m	0,26	94,91
		95,34	Pulau Bengkalis		Pantai Sekodi (33,85 m)	Pantai Sekodi (185,19 m)	0	0,22	94,90
	Kepulauan Meranti	96,64	Pulau Rangsang			Pantai Pulau Rangsang Kec. Rangsang Barat (470,33 m)	Pantai Desa Mekong Kec. Tebing Tinggi 201,3 m Desa Permai Kec. Rangsang Barat 268,3 m Desa Bantar, Kecamatan Rangsang Barat 303,1 m	1,24	95,4

Sumber: Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa penanganan abrasi secara struktural melalui pembangunan *seawall* dan bangunan pengaman pantai lainnya masih sangat terbatas. Oleh sebab itu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau saat ini terus berupaya mendapatkan bantuan Pemerintah untuk mengatasi abrasi.

2.3.6.5 Infrastruktur Pengendali Banjir

Banjir di kawasan perkotaan terutama di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai telah menjadi permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan dalam beberapa tahun ini. Banjir disebabkan karena tidak berfungsinya drainase dan sungai di perkotaan untuk mengalirkan air. Hal ini tidak terlepas dari faktor kurangnya pemeliharaan dan pembangunan drainase serta minimnya normalisasi sungai di perkotaan, yang berawal dari padatnya aktivitas perkotaan dan buruknya perilaku masyarakat dalam penanganan sampah.

Berdasarkan data dari Kajian *Masterplan* Kota Pekanbaru Tahun 2020, jumlah titik lokasi banjir di Pekanbaru berjumlah 121 titik dengan total luas wilayah banjir 294,4 ha dengan jumlah kejadian banjir 128 kejadian yang terjadi pada 12 Sub DAS yang meliputi 14 kecamatan. Rata-rata ketinggian banjir adalah 0,3 sampai 0,5 m. Adapun kejadian banjir di Kota Dumai pada tahun 2023 terjadi pada 13 titik yang berada di 10 Kelurahan dan 4 Kecamatan, dengan total luas wilayah terkena banjir adalah 271,37 ha. Banjir di Kota Dumai terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan banjir ROB.

Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2024 telah melakukan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan kegiatan pengendalian banjir di Provinsi Riau.

2.3.6.6 Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor listrik di Provinsi Riau secara umum menunjukkan perkembangan yang positif. Dalam mengukur ketersediaan listrik di kabupaten/kota digunakan pendekatan rasio elektrifikasi. Perhitungan rasio elektrifikasi di Provinsi Riau ini dilakukan dengan memperhitungkan rumah tangga yang penerangannya bersumber dari PLN, yakni jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik dibagi dengan jumlah rumah tangga yang ada.

Tabel 2.153 Rasio Elektrifikasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024

Kode	Kabupaten/ Kota	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
14	Provinsi Riau	92,34	92,54	92,896	94,98	95,19	0,77
14.01	Kampar	94,71	94,71	94,73	99,66	99,68	1,31
14.02	Indragiri Hulu	96,22	96,22	94,35	90,47	90,78	-1,43
14.03	Bengkalis	89,21	91,65	93,73	90,62	90,99	0,52
14.04	Indragiri Hilir	75,87	77,40	77,06	97,87	97,98	7,17
14.05	Pelalawan	84,95	85,47	99,98	83,14	83,89	0,41
14.06	Rokan Hulu	88,14	88,27	88,34	91,41	91,93	1,07
14.07	Rokan Hilir	89,53	90,05	89,85	86,95	87,47	-0,57
14.08	Siak	95,34	95,34	95,34	99,99	99,99	1,22
14.09	Kuantan Singingi	94,04	94,04	94,04	99,57	99,58	1,47
14.10	Kepulauan Meranti	77,96	80,34	62,06	88,13	88,35	5,64
14.71	Pekanbaru	100,00	100,00	100,00	99,99	99,99	0,00
14.72	Dumai	100,00	99,60	99,99	99,99	99,99	0,00

Sumber: PLN dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

Secara keseluruhan selama periode 2020-2024, rasio elektrifikasi Provinsi Riau mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,77 persen per tahun, dengan wilayah pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 7,17 persen dan Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 5,64 persen per tahun dan terendah di Kabupaten Indragiri Hulu dengan rata-rata pertumbuhan -1,43 persen per tahun. Pertumbuhan yang rendah di wilayah tersebut disebabkan oleh rasio pertumbuhan jumlah rumah tangga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pembangunan energi listrik. Disamping itu kondisi geografis wilayah Riau sebagai daerah kepulauan dan pesisir merupakan anugerah sekaligus tantangan dalam membangun infrastruktur energi (listrik, BBM, LPG, Gas Bumi) dalam rangka memenuhi kebutuhan energi secara handal dan merata di seluruh wilayah kabupaten/kota sehingga masih banyak daerah kabupaten/kota yang dapat dikatakan relatif terisolir yang artinya masih banyak masyarakat kurang terakses infrastruktur jalan yang memadai. Hal ini akan mempengaruhi percepatan pencapaian pembangunan infrastruktur kelistrikan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pencapaian rasio elektrifikasi.

Tabel 2.154 Data Rumah Tangga Berlistrik PLN, Belistrikr Non PLN dan Tidak Berlistrik se Provinsi Riau Tahun 2023-2024

Kode	Kabupaten/ Kota	Tahun 2023					Tahun 2024				
		Jumlah RT	Jumlah Pelangan RT PLN	Jumlah Pelangan RT Non PLN	Jumlah RT Belistrikr PLN dan Non PLN	Jumlah RT Tidak Belistrikr	Jumlah RT	Jumlah Pelangan RT PLN	Jumlah Pelangan RT Non PLN	Jumlah RT Belistrikr PLN dan Non PLN	Jumlah RT Tidak Belistrikr
14	Provinsi Riau	2.048.513	1.945.714	102.648	2.048.362	151	2.135.698	2.032.898	102.648	2.135.546	152
14.01	Kampar	288.813	287.831	964	288.795	18	302.440	301.458	964	302.422	18
14.02	Indragiri Hulu	139.641	126.340	13.290	139.630	11	144.234	130.933	13.290	144.223	11
14.03	Bengkalis	200.896	182.046	18.835	200.881	15	209.246	190.396	18.835	209.231	15
14.04	Indragiri Hilir	183.806	179.898	3.890	183.788	18	193.464	189.556	3.890	193.446	18
14.05	Pelalawan	109.306	90.872	18.420	109.292	14	114.426	95.992	18.420	114.412	14
14.06	Rokan Hulu	157.934	144.371	13.555	157.926	8	168.025	154.461	13.555	168.016	9
14.07	Rokan Hilir	203.949	177.334	26.598	203.932	17	212.468	185.853	26.598	212.451	17
14.08	Siak	124.021	124.012	-	124.012	9	129.251	129.242	-	129.242	9
14.09	Kuantan Singingi	94.042	93.633	401	94.034	8	96.392	95.983	401	96.384	8
14.10	Kepulauan Meranti	56.396	49.698	6.695	56.393	3	57.488	50.790	6.695	57.485	3
14.71	Dumai	97.284	97.276	-	97.276	8	101.397	101.389	-	101.389	8
14.72	Pekanbaru	392.425	392.403	-	392.403	22	406.867	406.845	-	406.845	22

Sumber: PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Berdasarkan data rumah tangga berlistrik terlihat rumah tangga yang berlistrik non PLN sebesar 102.648 (4,80 persen) sehingga rasio elektrifikasi Provinsi Riau PLN dan non PLN adalah sebesar 99,99 persen. Namun perlu diketahui bahwa listrik non PLN hampir semuanya bersifat “kurang andal”, yang umumnya berupa sumber dari energi surya yang umur *battery* penyimpan powernya terbatas, atau PLTD bantuan pemerintah/swadaya masyarakat yang jam operasionalnya hanya sekitar 4 sampai 6 jam per hari. Untuk itu perlu dilakukan intervensi kepada listrik non PLN agar tercapai listrik yang handal bagi masyarakat. Selain itu masih terdapat 152 rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan kelistrikan sama sekali pada tahun 2024.

**Tabel 2.155 Rasio Desa Berlistrik di Provinsi Riau
Tahun 2023-2024**

Kode	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan	Berlistrik PLN	Belum Berlistrik PLN	RD PLN	
					2023	2024
14.01	Kampar	250	250	-	100	100
14.02	Indragiri Hulu	194	194	-	100	100
14.03	Bengkalis	155	155	-	100	100
14.04	Indragiri Hilir	236	236	-	100	100
14.05	Pelalawan	118	118	-	100	100
14.06	Rokan Hulu	145	145	-	100	100
14.07	Rokan Hilir	184	184	-	100	100
14.08	Siak	131	131	-	100	100
14.09	Kuantan Singingi	229	229	-	100	100
14.10	Kep. Meranti	101	101	-	100	100
14.71	Dumai	36	36	-	100	100
14.72	Pekanbaru	83	83	-	100	100
	Total	1.862	1.862	-	100	100

Sumber: PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Untuk melihat pemerataan pembangunan sarana kelistrikan dapat dilihat dari pencapaian Rasio Desa Berlistrik (RDB). Rasio Desa Berlistrik Provinsi Riau pada akhir tahun 2023-2024 adalah sebesar 100 persen walaupun belum merata hingga ke dusun-dusun. Kedepannya diharapkan semua dusun telah teraliri listrik. Peningkatan rasio elektrifikasi ini akan berdampak kepada konsumsi listrik masyarakat Provinsi Riau.

Konsumsi listrik yang semakin meningkat di Provinsi Riau tentu saja membutuhkan ketersediaan energi dalam jumlah yang cukup, tidak terputus dan terjangkau bagi masyarakat. Pemenuhan konsumsi energi ini memperhatikan aspek lingkungan dan penggunaan berbagai sumber energi baik yang berbahan fosil maupun energi baru terbarukan. Untuk penggunaan energi baru terbarukan Provinsi Riau menargetkan sebesar 31,22 persen pada tahun 2025 dan 46,63 persen pada tahun 2050 (RUED Provinsi Riau 2021-2050).

Tabel 2.156 Capaian Bauran Energi Provinsi Riau 2022-2024

No	Tahun	Penggunaan Energi (%)			
		Minyak Bumi	Gas Bumi	Batubara	Bauran Energi
1	2022	26,98	16,10	27,58	29,34
2	2023	28,93	15,04	29,90	26,13
3	2024	27,95	15,65	28,37	28,02

Sumber Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

Capaian bauran energi Provinsi Riau pada tahun 2023 menurun dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan ini disebabkan karena adanya peningkatan data pemanfaatan energi yang bersumberkan minyak bumi dan batubara. Adapun capaian bauran energi pada 2024 terjadi peningkatan signifikan sebesar 1,89 persen menjadi 28,02 persen dan masih perlu upaya untuk penambahan EBT. Provinsi Riau memiliki potensi Energi Baru Terbarukan yang cukup besar yang terdiri dari laut, biomassa, biogas, surya, angin, panas bumi dan sampah.

2.3.6.7 Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

Keberhasilan penanganan Rumah Tidak Layak Huni ditandai dengan tingginya angka capaian pada indikator "Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau". Indikator ini merupakan indikator yang telah ditetapkan secara Nasional, dengan perhitungan angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Angka ini diperoleh dengan memperhatikan pemenuhan 4 kriteria yaitu : Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita; Memiliki akses terhadap air minum layak; Memiliki akses terhadap sanitasi layak; dan Ketahanan bangunan dengan harga yang terjangkau oleh seluruh

lapisan masyarakat, baik untuk dimiliki sendiri maupun untuk disewa. Pada tabel berikut ini akan disajikan data Capaian Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau tahun 2020-2024.

Tabel 2.157 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Kode	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
14	Provinsi Riau	68,44	70,63	69,43	71,53	74,80	2,27
14.01	Kampar	72,89	75,03	69,69	73,80	79,82	2,47
14.02	Indragiri Hulu	60,74	54,71	57,67	61,83	66,06	2,38
14.03	Bengkalis	80,49	78,99	77,66	81,43	81,76	0,43
14.04	Indragiri Hilir	46,71	38,82	39,58	46,93	53,58	4,45
14.05	Pelalawan	68,13	66,71	62,01	67,64	67,59	-0,03
14.06	Rokan Hulu	63,33	77,76	75,92	74,40	81,89	7,12
14.07	Rokan Hilir	53,61	62,07	62,94	62,78	64,38	4,87
14.08	Siak	66,26	72,76	78,25	75,19	73,63	2,84
14.09	Kuantan Singingi	72,35	74,71	68,53	68,96	72,84	0,31
14.10	Kepulauan Meranti	51,60	48,77	48,95	52,22	54,28	1,38
14.71	Pekanbaru	86,88	89,70	90,25	90,17	90,70	1,09
14.72	Dumai	82,31	84,76	75,63	81,30	86,16	1,42

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2025 (diolah)

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian terendah untuk indikator ini kebanyakan berada pada kabupaten yang terletak di daerah pesisir seperti Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Rokan Hilir. Capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau Provinsi Riau cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, capaian tahun 2024 naik sebesar 3,27 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024. Jika melihat capaian tahun 2024 yaitu sebesar 74,80 persen, maka capaian persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Provinsi Riau masih terdapat sebanyak 25,20 persen, persentase ini masih dalam kategori tinggi.

Seiring dengan itu, kita juga dapat melihat data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) per tanggal 10 Juni 2024 yang merujuk pada 4 kriteria pembentuk indikator di atas, yaitu masih terdapatnya 59.554 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di 12 kabupaten/kota, dimana kabupaten dengan jumlah RTLH tertinggi adalah Kabupaten Siak dengan jumlah RTLH sebanyak 12.198 unit. Sedangkan menurut data E-

RTLH (10 Juni 2024), maka masih terdapat 76.464 unit Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) dimana kabupaten dengan jumlah RTLH tertinggi adalah Kabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah RTLH sebanyak 11.064 unit. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni pada dasarnya juga mendapatkan dukungan dari *stakeholder* lainnya di luar pemerintah seperti Basnaz dan CSR, namun hal tersebut tidak terdata secara *time series*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

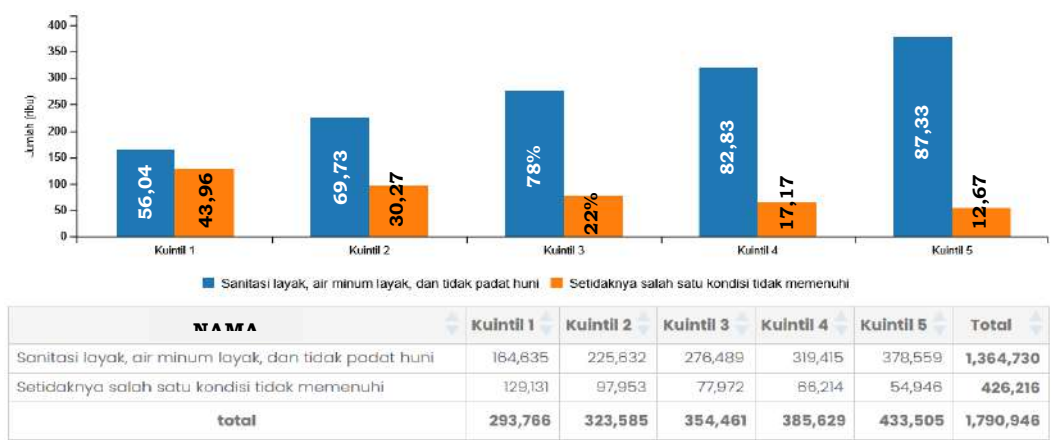
Tabel 2.158 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Data E-RTLH dan Data P3KE (Tertanggal 10 Juni 2024)

Kode	Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH	
		Data E-RTLH	Data P3KE
14	Provinsi Riau	76.464	59.554
14.01	Kampar	8.188	5.616
14.02	Indragiri Hulu	733	3.717
14.03	Bengkalis	8.922	5.046
14.04	Indragiri Hilir	8.094	11.064
14.05	Pelalawan	2.167	3.776
14.06	Rokan Hulu	9.581	6.112
14.07	Rokan Hilir	9.008	7.108
14.08	Siak	12.198	1.175
14.09	Kuantan Singingi	167	3.977
14.10	Kepulauan Meranti	7.189	9.616
14.71	Pekanbaru	9.779	1.776
14.72	Dumai	438	571

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum (E-RLTH) dan Data P3KE (diolah)

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Karena dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Kondisi infrastruktur rumah layak huni juga mesti diperhatikan bagi masyarakat berdasarkan pengelompokan kesejahteraan, sebagaimana pengelompokan pada kuintil 1 (masyarakat miskin dan rentan atau 20% orang dengan status kesejahteraan terendah). Sebagaimana dapat dilihat dari gambar berikut ini.



Sumber: Sepakat (Susenas) Bappenas

Gambar 2.70 Capaian Kondisi Rumah Layak Huni (Persen dan Jumlah) Berdasarkan Status Kesejahteraan di Provinsi Riau Tahun 2024

2.3.6.8 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan

Pada dasarnya urusan perumahan memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana (banjir bandang/rob, angin putting beliung, gempa bumi/longsor, tsunami, kebakaran hutan/alam karena cuaca ekstrim, gunung meletus) dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah (sepadan rel kereta api, daerah sempadan sungai (DAS), daerah SUTET, kolong jembatan, permukiman kumuh/ilegal, daerah rawan bencana). Dari tahun 2021 sampai dengan 2024, Provinsi Riau telah melaksanakan SPM Perumahan dengan capaian sebagai berikut.

Tabel 2.159 Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Provinsi Tahun 2021-2024 (SPM Perumahan)

No	Tahun	Status SPM	Lokasi	Unit	Keterangan
1	2021	- Korban Bencana	Kel. Tanjung Baru Kec. Tanah Merah, Kab. Inhil	10	Longsor
			Kel. Enok Kec. Tanah Merah, Kab. Inhil	10	Longsor
			Kel. Bangko Kec. Bagan Kunak, Kab. Rohil	5	Kebakaran
		- Relokasi	Desa Gobah Kec. Tambang, Kab. Kampar	21	Pembangunan Turap
2	2022	- Korban Bencana	Kab. Indragiri Hilir	11	Longsor

No	Tahun	Status SPM	Lokasi	Unit	Keterangan
		- Relokasi	Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru	3	Pelebaran Jalan Provinsi
3	2023	- Korban Bencana	Desa Simpang 3, Kec. Enok, Kab. Inhil	20	Abrasi Sungai
			Desa Sungai Bela, Kec. Kuindra, Kab. Inhil	8	Abrasi Sungai
			Kepenghuluan Jumrah, Kab. Rohil	25	Abrasi Sungai
			Desa Teluk Pulau Hulu, Kab. Rohil	29	Abrasi Sungai
			Tenayan Raya, Kota Pekanbaru	1	Longsor
		- Relokasi	Tidak ada Rumah Relokasi Program Pemerintah TA 2023	0	-
4	2024	- Korban Bencana	Desa Pujud Selatan, Kab. Rohil	35	Kebakaran
		- Relokasi	Tidak ada Rumah Relokasi Program Pemerintah TA 2024	0	-
Total		Korban Bencana		154	Longsor, Kebakaran, Abrasi
		Relokasi		24	Pembangunan Turap, Pelebaran Jalan Provinsi

Sumber : Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pembangunan RLH untuk korban bencana dari tahun 2021 sampai dengan 2024 telah dibangun sebanyak 154 unit yang berlokasi pada Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan pembangunan RLH untuk korban relokasi proyek provinsi dari tahun 2021 sampai dengan 2024 telah dibangun sebanyak 24 unit yang berlokasi di Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

2.3.6.9 Status Kepemilikan Tempat Tinggal

Persentase rumah berdasarkan status kepemilikan tempat tinggal yang milik sendiri di Provinsi Riau dari tahun 2020 hingga tahun 2024 rata-rata mengalami peningkatan, sedangkan status rumah kontrak/sewa mengalami penurunan. Secara rinci data kepemilikan rumah per kabupaten/kota se- Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.160 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Riau Tahun 2024

Kode	Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal														
		Milik Sendiri					Kontrak/Sewa					Lainnya				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
14	Provinsi Riau	69,78	72,52	76,52	77,56	78,46	13,61	11,82	10,12	8,31	7,98	16,61	15,66	13,36	14,13	13,56
14.01	Kampar	67,75	73,49	80,81	80,41	80,17	9,59	7,70	4,77	4,76	3,97	22,66	18,81	14,42	14,83	15,86
14.02	Indragiri Hulu	80,42	76,52	86,61	85,05	86,37	6,57	6,22	3,52	3,24	4,16	13,01	17,27	9,88	11,71	9,47
14.03	Bengkalis	78,67	75,76	77,06	79,68	81,97	13,18	10,13	10,06	8,18	8,10	8,14	14,11	12,88	12,14	9,93
14.04	Indragiri Hilir	83,00	82,73	86,98	89,47	89,77	4,66	3,66	3,20	1,84	2,03	12,34	13,61	9,81	8,69	8,20
14.05	Pelalawan	57,44	69,16	66,15	70,02	72,99	13,18	12,45	10,52	6,74	7,53	29,37	18,38	23,33	23,24	19,48
14.06	Rokan Hulu	72,51	73,87	79,93	81,22	81,45	5,94	9,01	5,98	6,23	6,17	21,55	17,11	14,09	12,55	12,38
14.07	Rokan Hilir	76,71	78,86	80,70	79,95	81,46	6,77	4,73	4,99	5,04	4,08	16,53	16,41	14,31	15,01	14,46
14.08	Siak	69,07	75,01	78,37	77,53	79,46	9,46	12,07	8,92	6,50	5,69	21,47	12,92	12,71	15,97	14,85
14.09	Kuantan Singingi	81,19	82,72	88,56	86,47	90,12	5,74	6,86	2,47	3,18	3,52	13,07	10,43	8,97	10,35	6,36
14.10	Kepulauan Meranti	89,89	88,55	89,13	90,21	91,88	3,36	3,50	2,51	1,87	1,62	6,75	7,95	8,36	7,92	6,50
14.71	Pekanbaru	51,26	54,71	58,84	59,66	60,09	35,35	28,20	28,26	23,73	21,84	13,38	17,09	12,89	16,61	18,07
14.72	Dumai	58,56	65,31	67,52	71,12	72,73	28,52	22,75	18,75	14,84	13,23	12,92	11,94	13,73	14,04	14,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Persentase rumah tangga dengan status penguasaan bangunan tempat tinggal di Provinsi Riau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berkembang secara fluktuatif. Pada tahun 2024 status penguasaan bangunan tempat tinggal milik sendiri capaiannya sebesar 78,46 persen. Angka capaian ini masih kecil, karena masih terdapat 21,54 persen rumah tangga yang status penguasaan bangunan tempat tinggalnya bukan milik sendiri.

2.3.6.10 Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi

Kekumuhan suatu kawasan ditandai pada 7 aspek diantaranya yaitu: Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan dan Proteksi Kebakaran. Berdasarkan SK Kumuh yang telah ditetapkan oleh 12 Bupati/Walikota yang ada di Provinsi Riau, diketahui bahwa adanya 3 kategori luas kawasan yang harus ditangani yaitu: Kawasan Kumuh dengan luas 0-10 hektar yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota, Kawasan Kumuh dengan luas 10-15 hektar yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi serta Kawasan Kumuh dengan luas diatas 15 hektar yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat. Namun pada Surat Keputusan (SK) yang telah ditetapkan tersebut tidak satupun SK yang menampilkan kondisi kekumuhan tiap kawasan dan pola penanganan berdasarkan 7 kriteria yang telah disebutkan.

Berdasarkan SK Awal yang menjadi data dasar di tahun 2020 (penggalan 5 tahun terakhir periode RPJPD 2005-2025), diketahui bahwa luasan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau seluas 249,27 hektar, luasan tersebutlah yang menjadi pedoman dalam melakukan intervensi penanganan kawasan kumuh. Mulai dari tahun 2017-2024 telah dicapai penanganan kawasan kumuh seluas 108,37 hektar sehingga sisa luasan kawasan kumuh yang harus dituntaskan seluas 140,90 hektar. Seiring berjalannya waktu, masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota mengupdate data luasan kawasan kumuhnya yang mengakibatkan bertambahnya luas kawasan kumuh kewenangan Provinsi menjadi 428,73 hektar. Untuk menertibkan hal tersebut, pada tanggal 1 April 2024 telah dikeluarkan Berita

Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau yang menetapkan hasil verifikasi luasan permukiman kumuh pada 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Luasan hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar pembuatan SK Kumuh tahun 2024 pada 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau dan SK Kumuh Tahun 2024 yang telah terbit akan menjadi pedoman dalam intervensi penanganan kawasan kumuh kewenangan provinsi pada priode RPJMD Tahun 2025-2029. Untuk lebih jelasnya, data Luasan Kawasan Kumuh berdasarkan SK tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.161 Penetapan Luasan Kawasan Kumuh Berdasarkan SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di 12 Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota (Nomor SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh)	Luas Kawasan				Jumlah Kawasan			
		< 10 Hektar	10-15 Hektar	> 15 Hektar	Total	< 10 Hektar	10-15 Hektar	> 15 Hektar	Total
1	Kabupaten Kuantan Singingi - SK Nomor : Kpts.296/VIII/2024 - Tanggal : 07 Agustus 2024	31,46	31,65	138,35	201,46	5	3	4	12
2	Kabupaten Indragiri Hulu - SK Nomor : Kpts.336/VIII/2024 - Tanggal : 26 Agustus 2024	10,13	11,83	77,69	99,65	2	1	4	7
3	Kabupaten Indragiri Hilir - SK Nomor : Kpts.629/X/HK-2024 - Tanggal : 03 Oktober 2024	9,39	58,12	88,70	156,20	3	5	4	12
4	Kabupaten Pelalawan - SK Nomor : Kpts.000,7/BAPPEDA/2024/811 - Tanggal : 13 September 2024	23,97	10,38	19,28	53,63	4	1	1	6
5	Kabupaten Siak - SK Nomor : 100.3.3.2/941.a/HK/KPTS/2024 - Tanggal : 23 September 2024	0,00	10,27	101,75	112,02	0	1	3	4
6	Kabupaten Kampar - SK Nomor : 522/PERKIM/VII/2024 - Tanggal : 24 Juli 2024	29,35	27,25	75,04	131,64	4	2	3	9
7	Kabupaten Rokan Hulu - SK Nomor : 100.3.3.2/BAPPEDA/650/2024 - Tanggal : 17 Juli 2024	40,72	56,01	62,36	159,09	10	5	2	17
8	Kabupaten Bengkalis - SK Nomor : 528/KPTS/VIII/2024 - Tanggal : 15 Agustus 2024	62,44	11,49	32,06	105,99	11	1	2	14
9	Kabupaten Rokan Hilir - SK Nomor : 472/PERKIM/2024 - Tanggal : 27 Juni 2024	46,06	28,49	46,35	120,90	6	2	2	10

No	Kabupaten/Kota (Nomor SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh)	Luas Kawasan				Jumlah Kawasan			
		< 10 Hektar	10-15 Hektar	> 15 Hektar	Total	< 10 Hektar	10-15 Hektar	> 15 Hektar	Total
10	Kabupaten Kepulauan Meranti - SK Nomor : 345/HK/KPTS/XII/2024 - Tanggal : 02 Desember 2025	67,09	12,26	53,78	133,13	16	1	3	20
11	Kota Pekanbaru - SK Nomor : 519 Tahun 2024 - Tanggal : 08 Juli 2024	53,75	63,06	61,21	178,02	11	5	2	18
12	Kota Dumai - SK Nomor : 050.13/576/2024 - Tanggal : 07 Mei 2024	13,59	10,76	140,97	165,32	2	1	6	9
Total		387,95	331,57	897,54	1617,05	74	28	36	138

Sumber : SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada 12 Kabupaten/Kota, 2024

Setelah terbitnya SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2024 pada 12 kabupaten/kota, diketahui bahwa besaran luasan kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi seluas 331,57 hektar. Luasan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan luasan kumuh kewenangan Provinsi sebelum dilakukan verifikasi oleh BPPW.

2.3.6.11 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi

Dari tabel dibawah ini diketahui bahwa terdapat 3 kabupaten yang tidak di intervensi penanganan kawasan kumuhnya oleh Pemerintah Provinsi Riau pada periode RPJMD Tahun 2019-2024 dikarenakan pada kabupaten tersebut tidak terdapat kawasan kumuh dengan luasan 10-15 hektar. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel 2.162 Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024

Kode	Kabupaten/ Kota	Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Ha)	Capaian Luas Kawasan Kumuh Tertangani (Ha)	Capaian Penurunan Luas Kawasan Kumuh (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.01	Kampar				
14.02	Indragiri Hulu	Sekip Hulu	13,58	10,99	2,52
		Kampung Dagang	14,89	14,89	0
		Air Molek 1	13,68	1,72	11,96
14.03	Bengkalis	Perkotaan Bengkalis- Cik Mas Ayu	11,23	6,13	5,10
		Perkotaan Duri - Batang Serosa	13,11	-	13,11
		Permukiman Nelayan Tanjung Medang	11,81	2,93	8,88
14.04	Indragiri Hilir	Pulau Kijang	13,09	13,09	0
		Teluk Pinang	11,85	4,24	7,61
14.05	Pelalawan				
14.06	Rokan Hulu	Dusun 1	11,87	2,40	9,47
		Tulang Gajah	10,22	-	10,22
		Petakur Bawah	10,96	10,96	0

Kode	Kabupaten/ Kota	Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Ha)	Capaian Luas Kawasan Kumuh Tertangani (Ha)	Capaian Penurunan Luas Kawasan Kumuh (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.07	Rokan Hilir				
14.08	Siak	Kampung Tualang	12,04	12,04	0
14.09	Kuantan Singingi	Sawah Taluk	11,30	11,30	0
14.10	Kepulauan Meranti	Kawasan Kota Lama Selat Panjang	11,80	0,24	11,56
		Kawasan Kota Lama Selat Panjang I	14,80	-	14,80
		Kawasan Kota Lama Selat Panjang II	13,20	0,75	12,45
14.71	Pekanbaru	Rumbai Pesisir	14,60	1,5	13,10
		Lembah Damai	13,00	13,00	0
14.72	Dumai	Pangkalan Sesai	11,30	1,28	10,02
		Dumai Selatan	10,94	0,91	10,03
Jumlah Total		20 Kawasan	249,27	108,37	140,90

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Untuk periode RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 diketahui bahwa Provinsi Riau memiliki kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi seluas 249,27 hektar berdasarkan SK Kumuh kabupaten/kota (SK tersebut belum menampilkan kondisi kekumuhan tiap kawasan dan pola penanganan berdasarkan 7 aspek). Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 telah dilakukan penanganan seluas 108,37 hektar, sehingga sisa luasan kumuh yang belum ditangani sebesar 140,90 hektar.

Masih banyaknya luasan kawasan kumuh yang harus dituntaskan diakibatkan oleh pencegahan dan pengentasan kawasan kumuh belum dilakukan secara terpadu. Artinya setelah dilakukan penanganan, kekumuhan kawasan tersebut akan muncul di tahun-tahun berikutnya karena penanganannya tidak meliputi 7 aspek, hanya menangani sebahagian kecil saja. Selain itu, pembagian anggaran untuk penanganan kawasan kumuh

masih berdasarkan asas sama rata antar kabupaten/kota, sehingga penanganan tidak dapat dilakukan secara tuntas serta pola penanganan kawasan kumuh masih diseragamkan untuk seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, belum berdasarkan tingkat kekumuhannya. Untuk Periode RPJMD Tahun 2025-2029, penanganan kawasan kumuh kewenangan provinsi akan diintervensi berdasarkan tingkat kekumuhannya.

Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, kegiatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) hanya melaksanakan pembangunan jalan lingkungan di kawasan permukiman pada 12 kabupaten/kota, secara berturut-turut dengan panjang sebesar 11.031 meter (2018), 9.162 meter (2019) dan 2.375 meter (2020). Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, program ini telah mencapai realisasi dengan 3 katgori yaitu : Pembangunan jalan lingkungan (meter), Pembangunan drainase lingkungan (meter) dan Pemasangan Sambungan Rumah SPAM (SR), dengan data capaian sebagai berikut.

Tabel 2.163 Capaian Pembangunan PSU Provinsi Riau Tahun 2021-2024

No.	Tahun	Capaian Pembagunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Provinsi Riau		
		Pembangunan Jalan Lingkungan (Meter)	Pembangunan Drainase Lingkungan (Meter)	Sambungan Rumah SPAM (SR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2021	51.109,53	15.633,15	2.475
2.	2022	134.774,00	31.118,00	502
3.	2023	166.401,00	47.482,00	772
4.	2024	269.473,00	20.293,00	307
Total		621.757,53	114.526,15	4.056

Sumber : Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Untuk periode RPJMD Tahun 2025-2029, pembangunan PSU akan diarahkan ke kawasan kumuh sebagai dukungan dalam penanganan kawasan kumuh secara terpadu. Berdasarkan hasil rekap dari SK Kumuh 12 Kabupaten/Kota Tahun 2024, untuk penuntasan kawasan kumuh yang mnjadi kewenangan Provinsi, dibutuhkan penanganan PSU di kawasan kumuh dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Jalan lingkungan
 - Jaringan jalan rusak sepanjang 33.693,71 meter

- Kebutuhan jalan baru sepanjang 5.739,70 meter
- 2. Drainase
 - Kebutuhan drainase baru sepanjang 60.574,75 meter
 - Drainase yang konstruksi tidak sesuai kualitas sepanjang 34.208,87 meter
- 3. Bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis sebanyak 1.349 unit
- 4. Air minum
 - Tidak terlayani akses aman air minum sebanyak 2.117 KK
 - Tidak terpenuhi kebutuhan air minum sebanyak 3.082 KK
- 5. Air limbah, KK yang tidak memenuhi akses air limbah sebanyak 874 KK
- 6. Persampahan, KK yang tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPA/TPS sebanyak 6.081 KK.

Untuk lebih jelasnya, rincian kebutuhan PSU pada 12 kabupaten/kota berdasarkan SK Kumuh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.164 Kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Riau

Kode	Kabupaten/Kota	Jalan Lingkungan		Drainase		Bangunan	Air Minum		Air Limbah	Persampahan
		Jaringan Jalan Rusak (m)	Kebutuhan Jalan Baru (m)	Kebutuhan Drainase Baru (m)	Drainase Yang Kontruksi Tidak Sesuai Kualitas (m)	Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit)	Tidak Terlayani Akses Aman Air Minum (KK)	Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum (KK)	KK Tidak Memiliki Akses Air Limbah (KK)	KK Tidak Terlayani Pengangkutan Sampah Ke TPA/TPS (KK)
14.01	Kampar	2.311,00	-	6.372,00	350,00	108	131	343	-	193
14.02	Indragiri Hulu	515,00	-	212,00	112,00	24	-	-	-	109
14.03	Bengkalis	250,05	239,25	413,50	20,00	106	194	58	22	273
14.04	Indragiri Hilir	8.200,00	1.543,00	20.129,00	1.957,00	600	494	732	624	1.836
14.05	Pelalawan	411,66	294,45	2.558,55	-	7	-	-	-	143
14.06	Rokan Hulu	6.900,00	1.720,00	6.650,00	3.477,00	196	411	236	41	698
14.07	Rokan Hilir	4.755,00	900,00	4.100,00	2.600,00	114	88	10	13	532
14.08	Siak	73,00	125,00	565,00	211,00	9	137	40	12	124
14.09	Kuantan Singingi	2.678,00	-	6.350,00	23.100,00	90	259	249	110	188
14.10	Kepulauan Meranti	-	-	392,70	102,77	3	-	106		329
14.71	Pekanbaru	6.030,00	883,00	11.632,00	2.279,10	80	309	1161	43	1.509
14.72	Dumai	1.570,00	35,00	1.200,00	-	12	94	147	9	147
Total		33.693,71	5.739,70	60.574,75	34.208,87	1.349	2.117	3.082	874	6.081

Sumber : Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

2.3.6.12 Perekonomian Perdesaan

Pemerintahan desa memiliki peran yang penting dalam mensejahterakan desa. Sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat Pemerintahan Desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan, memberikan Pelayanan Publik dan mengembangkan wilayahnya secara berkelanjutan. Pemerintahan Desa terdiri dari Aparatur Desa dan Perangkat Desa. Dalam pelaksanaan pembangunan di desa, kedua unsur ini harus saling berkolaborasi dan bersinergi.

Pembangunan desa itu sendiri bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Berdasarkan data kemiskinan bila dilihat dari tempat tinggal, wilayah perdesaan menjadi paling banyak dihuni penduduk miskin. Pada tahun 2024, penduduk miskin di perdesaan mencapai 6,52 persen atau sekitar 289,76 ribu penduduk. Persentase penduduk miskin di perdesaan menurun sekitar 0,13 persen atau sekitar 6 ribu penduduk bila dibandingkan dengan tahun 2023.

Untuk mengukur tingkat kemiskinan diperlukan batas/garis kemiskinan, dimana mencerminkan pengeluaran minimum pokok hidup selama sebulan baik dari makanan dan non makanan. Garis kemiskinan di desa meningkat sebesar Rp40.727 dari semula Rp632.704 pada tahun 2023 menjadi Rp673.431 pada tahun 2024. Untuk Indeks Kedalaman P1 mengalami penurunan sebesar 0,14 persen ini menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin desa dengan garis kemiskinan semakin membaik. Namun pada Indeks Keparahan P2 mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin desa, terdapat perbedaan pengeluaran yang semakin besar diantar penduduk miskin. Sementara dari angka gini rasio yang ada mengalami penurunan sebesar 0,18 poin hal ini menunjukkan semakin berkurangnya ketimpangan pendapatan masyarakat di perdesaan. Gambaran

kondisi indikator kemiskinan di perdesaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.165 Perkembangan Indikator Kemiskinan Berdasarkan Wilayah (Perdesaan) Provinsi Riau 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase Penduduk Miskin (PO)	7,47	7,19	7,07	6,65 *	6,52
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	312,76	305,67	305,17	289,16*	289,76
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	528.735	564.900	623.910	632.704*	673.431
Garis Kemiskinan Makanan (Rp/Kapita/Bulan)	396.647	423.953	468.911	475.721*	505.622
Garis Kemiskinan Non Makanan (Rp/Kapita/Bulan)	132.088	140.947	154.999	159.983*	167.809
Indeks Kedalaman (P1)	1,53	1,08	0,98	1	0,86
Indekes Keparahan (P2)	0,54	0,26	0,19	0,23	0,25
Gini Rasio	0,321	0,327	0,323	0,324	0,306

Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun 2025
* Data Maret 2023

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa, yang meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya penguatan kapasitas masyarakat. Oleh sebab penguatan kelembagaan masyarakat penting dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa inilah yang akan menjadi tumpuan utama terjadinya proses peningkatan partisipasi yang berkualitas, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan, atau secara umum dapat disebut sebagai peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa itu sendiri.

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian desa, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia mengembangkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang didedikasikan untuk memperkuat pencapaian sasaran

pembangunan prioritas nasional sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu mengurangi jumlah Desa Tertinggal sebanyak 10.000 desa, sehingga sampai tahun 2024 diperkirakan jumlah desa tertinggal sebanyak 3.232 desa dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sekitar 10.559 desa pada tahun 2024. Untuk Provinsi Riau, sejak tahun 2023 sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, namun demikian perlu ada upaya untuk meningkatkan desa berkembang menjadi desa maju dan desa mandiri.

Untuk status Desa Berkembang pada tahun 2020 sebanyak 944 desa dan tahun 2021 mengalami pengurangan menjadi 911 desa, dan untuk tahun 2022 berkurang lagi jumlah Desa Berkembang menjadi 801 desa. Hingga tahun 2024, Desa Berkembang mengalami pengurangan yang cukup banyak yaitu menjadi 214 desa, karena desa tersebut naik statusnya menjadi desa maju dan desa mandiri. Untuk status Desa Maju mengalami penambahan setiap tahunnya, pada tahun 2020 status Desa Maju sebanyak 287 desa, tahun 2021 sebanyak 364 desa, dan ditahun 2022 mengalami penambahan yang signifikan menjadi 520 desa dan untuk tahun 2024 mengalami penambahan lagi yaitu sebanyak 524 Desa Maju. Untuk status Desa Mandiri pada tahun 2020 yaitu 61 desa, namun pada tahun 2021 mengalami penambahan menjadi 101 desa. Pada 2022 jumlah Desa Mandiri menjadi 159 desa sedangkan untuk tahun 2024 jumlah Desa Mandiri mengalami penambahan yang cukup menggembirakan yaitu menjadi 853 desa, ini merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan bagi Provinsi Riau.

Selengkapnya mengenai klasifikasi desa hasil pengukuran IDM Provinsi Riau dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat merujuk pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.166 Perkembangan Status Desa Provinsi Riau 2020-2024

Status Desa	2020	2021	2022	2023	2024
Sangat Tertinggal	35 Desa	28 Desa	24 Desa	-	-
Tertinggal	264 Desa	187 Desa	87 Desa	-	-
Berkembang	944 Desa	911 Desa	801 Desa	406 Desa	214 Desa
Maju	287 Desa	364 Desa	520 Desa	585 Desa	524 Desa
Mandiri	61 Desa	101 Desa	159 Desa	600 Desa	853 Desa
Total Desa	1.591 Desa	1.591 Desa	1.591 Desa	1.591 Desa	1.591 Desa
Presentase Desa Mandiri	3,83	6,34	9,99	37,71	53,61

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Admindukcapil Provinsi Riau

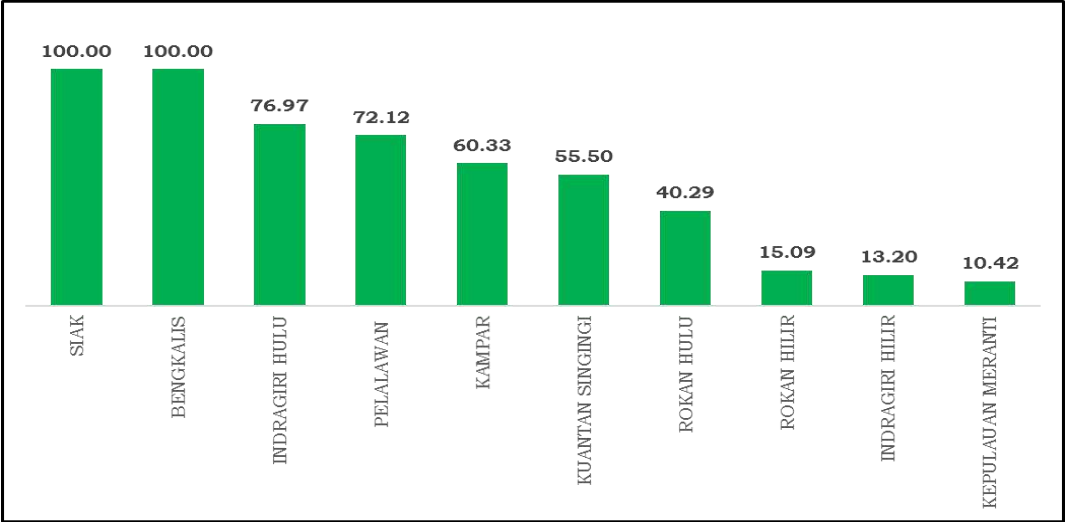
Perkembangan status desa di kabupaten terdapat 2 kabupaten yang semua desanya sudah berstatus mandiri yaitu Kabupaten Siak dan Bengkalis. Kabupaten se-Provinsi Riau tidak ada lagi status Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal. Namun masih terdapat Desa Berkembang. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten dengan jumlah Desa Berkembang terbanyak sejumlah 54 desa, Kabupaten Indragiri Hilir 47 desa, dan Kabupaten Rokan Hilir 40 desa.

Tabel 2.167 Perkembangan Status Desa Kabupaten se-Provinsi Riau Tahun 2024

Kode	Kabupaten	Klasifikasi Desa				
		Jumlah Desa	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju
14.01	Kampar	242	-	-	34	62
14.02	Indragiri Hulu	178	-	-	2	39
14.03	Bengkalis	136	-	-	-	-
14.04	Indragiri Hilir	197	-	-	47	124
14.05	Pelalawan	104	-	-	-	29
14.06	Rokan Hulu	139	-	-	18	65
14.07	Rokan Hilir	159	-	-	40	95
14.08	Siak	122	-	-	-	-
14.09	Kuantan Singingi	218	-	-	19	78
14.10	Kepulauan Meranti	96	-	-	54	32
	Total	1.591	-	-	214	524

Sumber: Kementerian Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Admindukcapil Provinsi Riau

Berdasarkan perkembangan presentase desa mandiri kabupaten, Kabupaten Siak dan Bengkalis dengan presentase tertinggi sebesar 100 persen dan terendah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 10,42 persen.



Sumber: Kementerian Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Admindukcapil Provinsi Riau

Gambar 2.71 Posisi relatif Presentase Desa Mandiri Kabupaten Tahun 2024

Indeks Desa Membangun terdiri dari tiga indeks yang mempengaruhi capaian Indeks Pembangunan Desa tersebut, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), dimana penilaiannya dilakukan dengan skoring terhadap indikator yang mempengaruhinya. Terdapat 31 indikator dengan 19 indikator Indeks Ketahanan Sosial, 11 Indikator Indeks Ketahanan Sosial dan 1 indikator Indeks Ketahanan Sosial. Validasi inputan data IDM berperan penting dalam penetapan lokus pelaksanaan pembangunan. Data IDM dan ketiga indeks yang mempengaruhi IDM dapat menjadi pedoman dalam penetapan Sasaran dan target program dan kegiatan pada masing – masing urusan. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita pada poin ke 6 yaitu “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”.

Perkembangan IDM Provinsi Riau terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2023 nilai IDM Provinsi Riau 0,7707 poin dengan status Maju meningkat 0,0395 poin menjadi 0,8102 poin pada tahun 2024.

Tabel 2.168 Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM)
Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Komponen Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Sosial	0,7670	0,7788	0,7974	0,8146	0,8370
Indeks Ketahanan Ekonomi	0,5698	0,5858	0,6150	0,7052	0,7348
Indeks Ketahanan Lingkungan	0,6548	0,6732	0,7039	0,7971	0,8610
Nilai IDM	0.6588 Berkembang	0.6746 Berkembang	0.7012 Berkembang	0.7707 Maju	0.8102 Maju
Peringkat	13	14	17	7	3

Sumber: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Dari indikator yang ada dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan IDM dan juga status desa yang ada di Provinsi Riau, namun sejumlah desa yang sudah berstatus mandiri masih terdapat beberapa komponen dalam mendukung capaian indikator IKS, IKE dan IKL yang harus ditingkatkan. Berdasarkan data dari inputan IDM masih banyak terdapat desa belum terpenuhi kebutuhan pelayan dasar seperti pendidikan, kesehatan, permukiman, sosial, keterbukaan wilayah dan juga desa yang tidak memiliki pusat perdagangan dan lembaga ekonomi serta kesipan dalam menghadapi bencana. Hal ini menjadi perhatian pemerintah dalam pembangun desa kedepan untuk bisa mewujudkan desa yang benar benar mandiri baik dari pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa dan pengembangan potensi ekonomi lokal sisi ekonomi. Beberapa data mendukung capaian indikator IKS, IKE dan IKL dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.169 Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM)
Berdasarkan Komponen Pembentuknya di Provinsi Riau 2020-2024

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
	Indeks Ketahanan Sosial				
1	Jumlah Desa dengan Jarak ke Sarana Kesehatan > 3Km	85	91	86	96
2	Jumlah warga yang terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan/ Jaminan Kesehatan Nasional/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)	1.205.467	1.390.892	1.655.645	1.853.146
3	Jumlah Kecukupan Ketersediaan Tenaga	108	101	243	262

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
	Kesehatan (1 Bidan, 1 Dokter dan 5 Tenaga Nakes Lainnya)				
4	Desa dengan Posyandu Aktif	798	830	876	888
5	Jumlah desa dengan Jarak ke Sekolah SD > 3 KM	90	82	75	72
6	Jumlah desa dengan Jarak ke Sekolah SMP > 3 KM	47	87	82	101
7	Jumlah Desa dengan Jarak ke Sekolah SMA > 3 KM	632	470	477	175
8	Jumlah anak usia SD yang putus atau tidak sekolah di Desa	6134	0	8071	8420
9	Jumlah anak usia SMP yang putus atau tidak sekolah	5297	0	791	798
10	Jumlah anak Penyandang Disabilitas Bersekolah	93	92	139	142
11	Jumlah anak Penyandang Disabilitas Tidak Bersekolah	194	137	194	187
12	Ketersediaan PAUD	2577	2308	2332	2358
13	Ketersediaan PKBM	437	1025	1123	1554
14	Ketersedian Taman Bacaan	626	1364	834	1170
15	Jumlah Desa Dengan PPKS (Anak Jalanan, Terlantar, Tindak Kekerasan, Lanjut Usia, Migran, Gelandang dan PSK)	193	168	173	147
16	Jumlah Penyandang Disabilitas di Desa	402	327	300	315
17	Jumlah Ketersedian SLB di Desa	219	25	62	64
18	Jumlah Desa yang terdapat Jalan yang bisa di Akses Roda 4	1365	1390	1403	1397
19	Jumlah Desa dengan status jalan baik	711	736	694	799
	Indeks Ketahanan Ekonomi				
20	Jumlah Desa Tidak Ada Lembaga Ekonomi	40	31	10	9
21	Jumlah Desa Terdapat Pasar Desa	291	315	372	536
22	Jumlah Industri di Desa	22408	22939	25299	51249
23	Jumlah KK Di Desa Dengan Rumah Kondisi	369841	412968	442822	468487

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
	Baik				
24	Jumlah Desa Dengan Air Ledeng	157	186	184	248
25	Jumlah Desa Dengan Masyarakat Tidak Mempunyai Jamban	41	34	23	19
26	Jumlah KK Di Desa Tidak Mempunyai Jamban	48013	41971	36947	33531
27	Jumlah Desa Listrik Non PLN dan Tidak Ada Listirk	534	510	427	447
28	Jumlah KK di Desa Listrik Non PLN dan Tidak Ada Listirk	124233	88545	61766	52504
29	Jumlah KK di Desa Listrik PLN	1032276	1039942	988062	1013626
30	Jumlah Desa Tidak Ada Akses Sinyal	30	30	25	27
	Indeks Ketahanan Lingkungan				
31	Jumlah Desa Dengan Fasilitas Bencana	12	12	46	123

Sumber: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

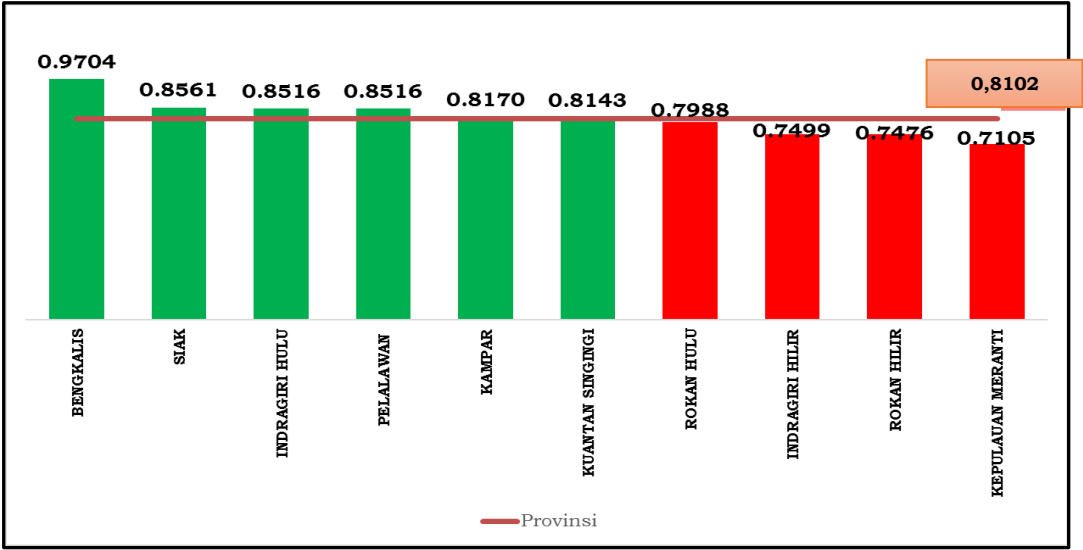
Indeks Desa Mandiri kabupaten sudah berstatus maju dan mandiri. Namun terdapat 3 kabupaten dengan nilai Indeks Ketahanan Ekonomi masih berstatus berkembang yaitu Kabupaten Indragiri Hilir 0,6003 poin, Kampar 0,6919 poin dan Kepulauan Meranti 0,5948 poin. Komponen pembentuk indikator IDM kabupaten tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.170 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kode	Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Sosial	Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks Ketahanan Lingkungan	Indeks Desa Mandiri	Status
14.01	Kampar	0,8309	0,6919	0,9284	0,8170	Mandiri
14.02	Indragiri Hulu	0,8525	0,8144	0,8888	0,8516	Mandiri
14.03	Bengkalis	0,9051	0,8578	0,9593	0,9704	Mandiri
14.04	Indragiri Hilir	0,7862	0,6003	0,8633	0,7499	Maju
14.05	Pelalawan	0,8494	0,7649	0,9404	0,8516	Mandiri
14.06	Rokan Hulu	0,8331	0,7398	0,8235	0,7988	Maju
14.07	Rokan Hilir	0,8147	0,7258	0,7023	0,7476	Maju
14.08	Siak	0,8331	0,7895	0,8956	0,8561	Mandiri
14.09	Kuantan Singingi	0,8081	0,7686	0,8664	0,8143	Maju
14.10	Kepulauan Meranti	0,7938	0,5948	0,7431	0,7105	Maju

Sumber: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Admindakapil Provinsi Riau

Dari 10 Kabupaten terdapat 4 Kabupaten dengan nilai IDM masih di bawah rata rata Provinsi yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, dan Kep. Meranti. Kabupaten dengan IDM nilai tertinggi kabupaten Bengkalis dengan nilai 0,9704 poin dan terendah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nilai 0,7105 poin. Posisi relatif IDM kabupaten dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Kementerian Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Admindukcapil Provinsi Riau

Gambar 2.72 Capaian IDM Kabupaten Tahun 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan pendayagunaan semua potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.

BUMDes merupakan suatu lembaga/badan perekonomian yang berbadan hukum yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa yang dikelola secara ekonomis, mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Dengan pengelolaan BUMDes ini,

diharapkan desa mendapatkan keuntungan dan selanjutnya dapat memperkuat pendapatan asli daerah. Sebanyak 1.591 BUMDes di Provinsi Riau yang tersebar di masing-masing kabupaten.

Perkembangan Bumdes di Provinsi Riau menunjukkan perkembangan yang positif. Dimana pada tahun 2024 terdapat 351 Bumdes dengan kategori maju meningkat sebanyak 36 Bumdes dari tahun 2023. Namun juga terdapat 413 Bumdes Dasar/Perintis yang tidak aktif lagi sehingga dari total 1.591 Bumdes yang sudah terbentuk dari tahun 2021 tinggal 1.178 Bumdes pada tahun 2024 yang masih aktif. Perkembangan Bumdes di Provinsi Riau dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.171 Perkembangan BUMDes Aktif Provinsi Riau Berdasarkan Kriteria Tahun 2021-2024

Klasifikasi BUMDes	2021	2022	2023	2024
Dasar/Perinis	561	420	407	416
Tumbuh/Pemula	442	628	530	95
Berkembang	386	290	339	316
Maju	202	253	315	351
Total Bumdes	1.591	1.591	1.591	1.178
Presentase BUMDes Maju	13	16	20	30

Sumber: Kementerian Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Admindukcapil Provinsi Riau Tahun 2025

Perkembangan BUMDes aktif kabupaten/kota pada tahun 2024 sebanyak 1.178. Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten dengan jumlah BUMDes klasifikasi maju terbanyak dengan jumlah 120 BUMDes. Kabupaten Rokan Hilir dengan jumlah BUMDes klasifikasi maju paling sedikit dengan jumlah 2 BUMDes. Sementara masih terdapat BUMDes dengan klasifikasi dasar/perintis kabupaten dengan jumlah klasifikasi BUMDes dasar/perintis terbanyak yaitu Kabupaten Kuantan Singingi 104 BUMDes, Kampar 74 BUMDes, Indragiri Hulu 65 BUMDes, dan Indragiri Hilir 50 BUMDes. Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten yang tidak ada lagi mempunyai BUMDes dengan klasifikasi dasar/perintis. Selain itu terdapat BUMDes yang sudah tidak aktif lagi di beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu 43 BUMDes, Indragiri Hilir 97 BUMDes, Pelalawan 16 BUMDes, Rokan Hulu 27 BUMDes, Rokan Hilir 111 BUMDes, Siak 10 BUMDes, Kuansing 69 BUMDes dan Kepulauan Meranti 40 BUMDes. Kondisi BUMDes kabupaten/kota tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.172 Perkembangan BUMDes Provinsi Riau
Berdasarkan Kriteria Tahun 2024**

Kode	Kabupaten/ Kota	Jumlah BUMDes	BUMDes tidak aktif	Klasifikasi BUMDes			
				Dasar /Perintis	Tumbuh /Pemula	Berkembang	Maju
14.01	Kampar	242	-	74	20	100	48
14.02	Indragiri Hulu	178	43	65	12	46	12
14.03	Bengkalis	136	-	-	1	15	120
14.04	Indragiri Hilir	197	97	50	8	36	6
14.05	Pelalawan	104	16	12	8	36	32
14.06	Rokan Hulu	139	27	20	6	31	55
14.07	Rokan Hilir	159	111	36	1	9	2
14.08	Siak	122	10	17	21	14	60
14.09	Kuantan Singingi	218	69	104	16	17	12
14.10	Kepulauan Meranti	96	40	38	2	12	4

Sumber: Kementerian Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Admindakapil Provinsi Riau

Untuk mensinergikan, mensinkronkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan, maka desa-desa yang memiliki karakteristik ekonomi pertanian desa yang sama pada suatu hamparan dapat dibentuk BUMDes bersama, dimana BUMDes bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dari 10 kabupaten yang ada di Provinsi Riau sudah 9 kabupaten yang telah melakukan pengembangan BUMDes dengan membentuk BUMDes Bersama. Dari 54 BUMDes Bersama yang ada terdapat 6 BUMDes Bersama Maju, 30 BUMDes Bersama Berkembang, 3 BUMDes Bersama Tumbuh/Pemula dan 14 BUMDes Bersama Dasar/Perintis. Adapun kondisi BUMDes Bersama di Provinsi Riau sebagai berikut:

Tabel 2.173 Kondisi BUMDes Bersama Kabupaten se Provinsi Riau Tahun 2024

Kode	Kabupaten / Kota	Jumlah BUMDes Bersama	Klasifikasi Bumdes Bersama			
			Dasar /Perintis	Tumbuh /Pemula	Berkembang	Maju
14.01	Kampar	8	2	-	6	-
14.02	Indragiri Hulu	14	2	-	10	2
14.03	Bengkalis	8	1	1	5	1
14.04	Indragiri Hilir	8	5	1	2	-
14.05	Pelalawan	6	1		3	2
14.06	Rokan Hulu	6	2	1	3	-
14.07	Rokan Hilir	1	1	-	-	-
14.08	Siak	1	-	-	-	1
14.09	Kuantan Singingi	-	-	-	-	-
14.10	Kep. Meranti	1	-	-	1	-
Total Bumdes Bersama		54	14	3	30	6

Sumber: Kementerian Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Admindakapil Provinsi Riau

Dalam menjalankan amanat dari Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemerintah Provinsi Riau bersama dengan pemerintah kabupaten se Provinsi Riau memiliki atensi untuk mengembangkan kawasan perdesaan sejalan dengan pengelolaan potensi desa melalui BUMDes Bersama. Perkembangan penetapan kawasan perdesaan di 10 kabupaten, hanya 4 kabupaten yang sudah pada tahapan penetapan dan perencanaan yaitu Kabupaten Bengkalis, Kampar, Kepulauan Meranti dan Kampar, sedangkan masih terdapat 6 Kabupaten yang masih pada tahapan pengusulan kawasan perdesaan Adapun perkembangan pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Riau sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.174 Perkembangan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Provisi Riau Tahun 2024

Kabupaten	Perkembangan Capaian Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Pedesaan			
	Pengusulan Kawasan Pedesaan	Penetapan dan Perencanaan Kawasan Pedesaan	Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Pedesaan
Kampar	Pengusulan Kawasan di Kecamatan XIII Koto Kampar terdiri dari : Desa Tanjung Alai, Desa Pulau Gadang Desa Koto Mesjid di Kecamatan XIII Koto Kampar.	Penetapan Kawasan Pedesaan dengan karakteristik Potensi Pariwisata, lingkup Desa Tanjung Alai, Pulau Gadang dan Koto Mesjid di Kecamatan XIIIKoto Kampar. (Peraturan Bupati Kampar nomor 46 Tahun 2022, Tanggal 15 Desember 2022)		
Kepulauan Meranti	Pengusulan Kawasan Di Kecamatan Merbau, terdiri dari : Desa Bagan Melibur Desa Mekar Sari Desa Mayang Sari Desa Sungai Anak kamal Desa Lukit	Penetapan Kawasan Agrominapolitan Berbasis Ekosistem Gambut dan Mangrove di Kecamatan Merbau. Desa Bagan Melibur Desa Mekar Sari Desa Mayang Sari Desa Sungai Anak kamal Desa Lukit (Peraturan Bupati Kepulaua Meranti Nomor : 49/HK/KPTS/V/2022)		
Siak	Lokasi Kawasan Perkampungan Agrowisata berbasis Ekosistem Gambut, meliputi : Kampung Temusai, Kampung Suak Merambai, Kampung Dayang Suri, Kampung Langsung permai, Kampung Bunga Raya, Kampung Kemuning Muda, Kampung jai baru, Kampung Jaya Pura, Kampung	Lokasi Kawasan Perkampungan Agrowisata Berbasis Ekosistem Gambut di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak ditetapkan sebagai Lokasi Pembangunan Kawasan Perkampungan. (Keputusan Bupati Siak nomor		

Kabupaten	Perkembangan Capaian Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan			
	Pengusulan Kawasan Perdesaan	Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan	Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
	Tuah Indrapura dan Kampung Buatan Lestari. Kecamatan: Bunga Raya	373/hk/kpts/2019)		
Bengkalis	Kecamatan Bengkalis terdiri dari 19 (Sembilan belas) Desa, antara lain : Desa Sekodi, Desa Palkun, Desa Kelemantan, Desa Kelemantan Barat, Desa Sungai Batang, Desa Ketam Putih,Desa Pematang Duku timur, Desa Pematang Duku, Desa Penampi, Desa Kelebuk, Desa Damai, Desa Temeran, Desa Penebal, Desa Kuala Alam, Desa Sungai Alam, Desa Air Putih, Desa Senggoro, Desa Wonosari, Desa Pedekik. Nama Usulan Kawasan : Kawasan Perdesaan Agrominapolitan Bengkalis Terbilang. 1. Sentra Pengembangan Ekonomi Mangrove Kawasan Ekowisata mangrove Pengolahan Hasil Perikanan Pusa rehabilitas dan Pembibitan Mangrove 2. Sentra Pengolahan Hasil Pertanian Pengolahan Hasil Pertanian nenas	1. Penetapan kawasan Perdesaan Agrominapolitan Di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. (Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 810/KPTS/XII/2022) 2.Penetapan Kawasan Perdesaan Agrosilvopastura Bumi Terpadu Kecamatan Siak Kecil, Kabupate Bengkalis. (Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 09/KPTS/XII/2022)		

Kabupaten	Perkembangan Capaian Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan			
	Pengusulan Kawasan Perdesaan	Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan	Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
	Pengolahan hasil Pertanian sagu Pengolahan hasil limbah pertanian 3. Sentra Budidaya Pertanian Budidaya Pertanian Nenas Budidaya Pertanian Sagu Kecamatan siak kecil terdiri dari 6 (enam) desa antara lain : 1.Desasumber jaya 2.Desa tanjung damai 3.Desa Sungai Linau 4.Desa Bandar Jaya 5.Desa Sadar Jaya 6.Desa Muara Dua Nama kawasan : Kawasan Perdesaan Bandar Agro Siak kecil 1. Desasumber Jaya menjadi pusat pengolahan produk turunan daging sapi 2. Desa Tanjung Damai menjadi pusat produksi pakan modern untuk memenuhi kebutuhan ternak sapi. 3. Desa Sungai Limau menjadi pusat Peternakan sapi dengan potensi awal luas lahan 200 Ha dan masih bisa ditambah sesuai kebutuhan (lahan Pemda) Desa Bandar 4. Desa Bandar Jaya berperan			

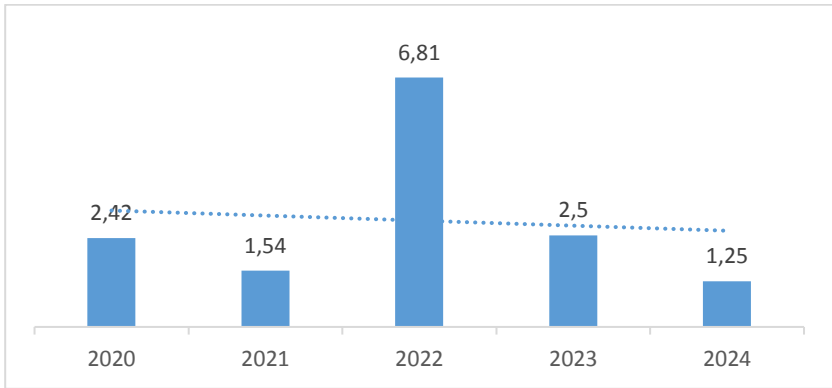
Kabupaten	Perkembangan Capaian Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan			
	Pengusulan Kawasan Perdesaan	Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan	Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
	dalam Pengolahan limbah menjadi pupuk Organik yang bernilai komersial tinggi. 5. Desa Sadar jaya menjadi pusat dari semua bisnis kawasan 6. Desa Muara Dua berperan pusat rumah potong sapi.			

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Admindukcapil Provinsi Riau

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

2.3.7.1 Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu tertentu dan umumnya 1 tahun. Berdasarkan keparahan, inflasi dikategorikan (i) inflasi ringan: di bawah 10 persen setahun; (ii) inflasi sedang: antara 10 – 30 persen setahun; (iii) inflasi berat: antara 30 – 100 persen setahun; dan (iv) hiperinflasi: di atas 100 persen setahun.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar 2.73 Perkembangan Laju Inflasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Gambar diatas terlihat bahwa selama periode 2020-2024 tren inflasi di Provinsi Riau cenderung meningkat dari 2,42 persen tahun 2020 menjadi 6,81 persen tahun 2022. Peningkatan inflasi ini

terjadi karena kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran kecuali kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan. Kontribusi terbesar yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah transportasi, dimana disebabkan oleh kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak. Namun pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan menjadi 2,50 persen dan 1,25 persen.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Indeks Reformasi Hukum merupakan alat untuk mengukur tingkat pelaksanaan reformasi hukum di berbagai instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas reformasi hukum dan mewujudkan birokrasi yang kapabel. Capaian indeks reformasi hukum pemerintah daerah Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.175 Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah
Provinsi Riau Tahun 2023-2024**

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Tahun 2023	Tahun 2024
14	Riau	55,93	87,50
14.01	Kampar	44,87	87,32
14.02	Indragiri Hulu	43,64	76,56
14.03	Bengkalis	44,82	76,48
14.04	Indragiri Hilir	44,74	87,32
14.05	Pelalawan	43,78	76,10
14.06	Rokan Hulu	56,32	87,88
14.07	Rokan Hilir	54,78	87,20
14.08	Siak	54,08	86,50
14.09	Kuantan Singingi	54,81	96,80
14.10	Kepulauan Meranti	55,68	57,84
14.71	Pekanbaru	56,59	86,40
14.72	Dumai	45,94	86,44

Sumber : Kementerian Hukum dan HAM dan Biro Hukum Setda Provinsi Riau

2.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI)

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dilakukan melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan

pemerintahan daerah. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya dalam mempertahankan maupun meningkatkan indikator layanan bidang urusan komunikasi dan informatika dengan indikator pengukuran Kinerja adalah Indeks SPBE. Dasar pengukuran Indeks SPBE adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terdiri dari 4 domain, 8 aspek dan 47 indikator. Perkembangan indeks SPBE di Provinsi Riau dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.176 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	SPBE	Indeks	3,51	2,55	3,00	3,01	3,75

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dari tabel dapat dilihat bahwa capaian SPBE tahun 2021 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 dikarenakan adanya perbedaan metode penghitungan. Capaian dari tahun 2021 sampai dengan 2021 sampai dengan 2024 terus mengalami peningkatan, dimana tahun 2024 naik sebesar 1,20 poin jika dibanding dari tahun 2021. Hal ini menunjukkan Pemerintah Provinsi Riau terus berkomitmen dalam peningkatan SPBE. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan pada aspek kebijakan internal tata kelola SPBE, aspek perencanaan strategis SPBE, aspek penyelenggara SPBE, aspek penerapan manajemen SPBE, aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, aspek layanan publik berbasis elektronik. Secara keseluruhan 4 domain mengalami peningkatan namun perlu ditingkatkan lagi untuk tahun berikutnya.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029, khususnya pemanfaatan transformasi digital sebagai salah satu strategi pengarusutamaan pembangunan diukur dengan Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi). Maka mulai tahun 2026 pengukuran kinerja Indeks SPBE dirubah menjadi Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi). Target peran Indeks Pemerintahan Digital sebagai pengungkit pembangunan tahun 2025 - 2029,

secara umum meliputi 1) mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu, 2) menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi, 3) mewujudkan administrasi pemerintahan berbasis teknologi, seperti sistem pengadaan, sistem layanan aparatur negara, sistem kearsipan, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, 4) modernisasi teknologi sistem penerimaan negara, serta 5) transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan (layanan siklus hidup).

2.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta inovasi. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Provinsi Riau dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi terhadap 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.177 Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No	Unit Lokus Evaluasi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,28 (A-)	4,64 (A)	4,53 (A)		
2	UPT. Samsat Pekanbaru Kota	3,15 (C)	2,72 (C)	2,88 (C)		
3	UPT. Pengelola Pendapatan Simpanan Tiga				4,45 (A-)	4,30 (A-)
4	Dinas Sosial				4,10 (A-)	3,79 (B)
5	RSUD Arifin Achmad				3,66 (B)	4,28 (A-)
Indeks Pelayanan Publik		3,61 (B)	3,68 (B)	3,62 (B)	4,04 (A-)	4,12 (A-)

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) mengalami peningkatan dalam rentang waktu tahun 2022 – 2024.

2.4.1.4 Survey Penilaian Integritas (SPI)

Selain Kinerja integritas Provinsi Riau digambarkan dari perilaku individu terhadap aktivitas sehari-hari dalam menjalankan kewajiban baik sebagai pengambil kebijakan maupun pelaksana yang ada, kinerja integritas Provinsi Riau juga digambarkan secara organisasi dengan penilaian oleh KPK melalui Survey Penilaian Integritas, ini merupakan upaya yang dilakukan oleh KPK untuk meningkatkan integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Survei ini menyasar pegawai pemerintahan, pengguna layanan publik, serta para ahli dan pakar, dengan tujuan untuk memetakan celah korupsi yang terjadi di kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah (K/L/PD). Hasil dari survei ini akan digunakan sebagai bahan rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi.

Tujuan dari pelaksanaan survey penilaian integritas ini adalah meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistim anti-korupsi yang mana hasil survey tersebut akan menjadi rekomendasi perbaikan sistem pencegahan korupsi. Indikator pengukuran survey penilaian integritas ini adalah 8 Menu *Monitoring Center for Prevention* (MCP), sosialisasi/kampanye, Stranas PK, reformasi birokrasi, zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani dan audit persen tindaklanjut hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan. Perkembangan survey penilaian integritas pemerintah Provinsi Riau dari tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.178 Survey Penilaian Integritas Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	SPI	Poin	66,10	64,16	68,81	62,83

Sumber: Inspektorat Provinsi Riau

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Survey Penilaian Integritas Pemerintah Provinsi Riau dari tahun 2021 hingga tahun 2024 berfluktuatif. Dimana pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,98 poin. Faktor yang mempengaruhi turunnya nilai SPI antara lain kurangnya transparansi keterbukaan dan ketersediaan informasi, adanya praktik korupsi dan

penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan yang tidak efektif.

2.4.1.5 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

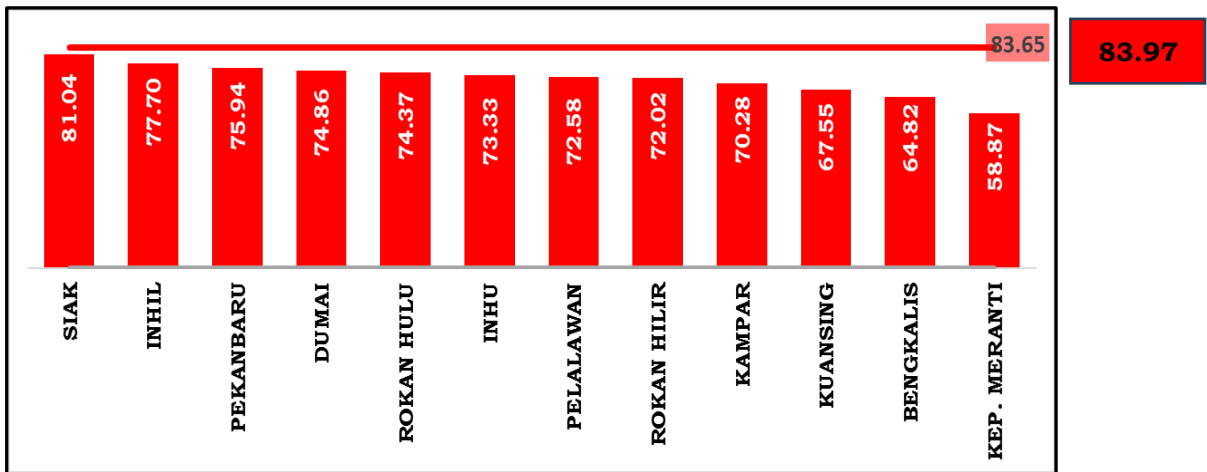
Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk mengubah sistem penyelenggaraan pemerintah agar lebih efektif dan efisien yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan menciptakan birokrasi yang profesional, bersih dan bebas KKN. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau, disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.179 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau
Tahun 2020-2024**

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	67.11 (B)	67.45 (B)	67.63 (B)	74.63 (BB)	83.97 (A)

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau dari tahun 2020 sampai tahun 2024 menunjukkan peningkatan, dimana tahun 2020 dengan nilai 67,11 kategori (B) dan pada tahun 2024 dengan nilai 83,97 kategori (A). Indeks Reformasi Birokrasi adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan reformasi birokrasi di instansi pemerintah, dengan fokus pada aspek kelembagaan, tata Kelola dan SDM aparat. Peningkatan ini menunjukkan bentuk usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi sehingga menciptakan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.



Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Gambar 2.74 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024

Indeks Reformasi Birokrasi kabupaten/kota tahun 2024 masih dibawah rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau. Indeks Reformasi Birokrasi tertinggi di Kabupaten Siak dengan nilai 81,04 poin kategori (A) dan terendah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nilai 58,87 kategori (CC).

2.4.1.6 Indeks Profesionalitas (IP) ASN

Pengukuran indeks profesionalitas ASN bertujuan untuk mengetahui standar profesionalitas, melihat kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya dan akhirnya menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas.

Pemahaman akan Indeks Profesionalitas ASN oleh para pegawai dan pejabat suatu instansi diharapkan mendukung pembenahan kinerja ASN di sebuah unit organisasi guna memenuhi harapan masyarakat. Kualitas kepemimpinan ASN di berbagai tingkatan level, terutamanya, merupakan bagian dari kualitas sumber daya manusia yang dianggap sebagai faktor penting penentu arah dan tujuan organisasi. Pemanfaatan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bagi masyarakat dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Berikut ini disajikan tabel Indeks Nilai IP ASN Provinsi Riau Tahun 2021-2024:

Tabel 2.180 Perkembangan Indeks Profesionalitas ASN
Provinsi Riau Tahun 2021-2024

Kode	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Kriteria	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
14	Riau	Kualifikasi (25)	14,12	21,61	21,92	21,96
		Kompetensi (40)	8,72	17,06	26,01	25,38
		Kinerja (30)	24,56	24,66	25,02	24,28
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	52,40	68,33	77,96	76,62
14.01	Kampar	Kualifikasi (25)	13,15	21,36	20,36	20,49
		Kompetensi (40)	13,5	11,22	26,83	24,21
		Kinerja (30)	22,83	17,02	23,98	20,83
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	54,48	54,6	76,18	70,53
14.02	Indragiri Hulu	Kualifikasi (25)	12,14	21,14	20,66	20,80
		Kompetensi (40)	8,73	9,73	23,87	28,68
		Kinerja (30)	24,4	24,16	21,48	26,70
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	50,2	60,03	71,01	81,18
14.03	Bengkalis	Kualifikasi (25)	12,46	21,23	21,09	21,03
		Kompetensi (40)	8,79	8,39	25,55	26,81
		Kinerja (30)	24,76	6,6	24,2	25,35
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	51	41,22	75,84	78,19
14.04	Indragiri Hilir	Kualifikasi (25)	12,79	21,16	20,53	20,66
		Kompetensi (40)	14,64	14,73	24,8	26,97
		Kinerja (30)	24,63	23,42	22,22	23,93
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	57,06	64,31	72,56	76,56
14.05	Pelalawan	Kualifikasi (25)	13,6	21,22	20,94	20,96
		Kompetensi (40)	9,87	12,07	25,83	26,95
		Kinerja (30)	24,98	24,88	23,43	23,80
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	53,36	63,17	75,2	76,71
14.06	Rokan Hulu	Kualifikasi (25)	12,55	21,04	20,66	20,64
		Kompetensi (40)	9,87	9,64	23,87	26,03
		Kinerja (30)	17,96	6,83	21,48	23,96
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	45,38	42,51	71,01	75,63
14.07	Rokan Hilir	Kualifikasi (25)	12,54	21,16	20,98	20,92
		Kompetensi (40)	8,99	9,65	25,11	23,87
		Kinerja (30)	23,93	18,84	23,69	21,53
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	50,46	54,65	74,78	71,32
14.08	Siak	Kualifikasi (25)	13,09	20,76	21,25	21,06
		Kompetensi (40)	9,3	9,51	24,79	25,96
		Kinerja (30)	24,42	5,12	23,66	24,44
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	51,81	39,39	74,71	76,46
14.09	Kuantan Singingi	Kualifikasi (25)	12,6	21,18	20,26	20,40
		Kompetensi (40)	9,61	10,07	25,41	25,73
		Kinerja (30)	15,22	9,99	22,39	23,66

Kode	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Kriteria	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	42,43	46,24	73,06	74,79
14.10	Kepulauan Meranti	Kualifikasi (25)	12,36	21,12	21,00	20,98
		Kompetensi (40)	9,06	6,98	25,37	26,34
		Kinerja (30)	22,94	12,41	24,75	25,45
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	49,36	45,51	76,12	77,77
		14.71	Pekanbaru	Kualifikasi (25)	13,41	21,21
Kompetensi (40)	16,6			29,08	25,68	25,52
Kinerja (30)	23,69			23,09	24,17	23,87
Disiplin (5)	5			5	5	5
Total Nilai IP	58,69			58,69	76,09	75,74
14.72	Dumai			Kualifikasi (25)	13,38	21,33
		Kompetensi (40)	10,15	11,25	27,9	27,58
		Kinerja (30)	24,93	24,55	25,36	25,43
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	53,45	62,13	79,59	79,37
		TOTAL	Kualifikasi (25)	13	21	20,94
Kompetensi (40)	10,58		12,26	25,46	26,15	
Kinerja (30)	23,02		17,04	23,53	24,09	
Disiplin (5)	5		5	5	5	
Total Nilai IP	51,54		53,91	74,93	76,22	

Sumber: Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia

Perkembangan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Provinsi Riau dalam 4 tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan 2024 telah menunjukkan perkembangan membaik dari kategori sangat rendah (51,54) menjadi sedang (76,22), Terdapat 4 dimensi pembentuk IP ASN, dari ke 4 dimensi tersebut dimensi kompetensi mengalami peningkatan yang paling besar mulai dari tahun 2021 sebesar 10,58 poin, tahun 2022 sebesar 12,26 poin, tahun 2023 sebesar 25,46 poin, dan tahun 2024 sebesar 26,15 poin,

2.4.1.7 Nilai survey Indeks BerAKHLAK

Nilai-nilai dasar atau yang dikenal sebagai *Core Values* ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif dan diluncurkan dengan tujuan menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN di Indonesia. Dimana Indeks BerAKHLAK yang ada merupakan indikator yang digunakan untuk memonitor dan mentransmisikan implementasi budaya kerja ASN sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Sehingga dengan *Core Values* ASN “BerAKHLAK” yang

ada diharapkan ASN yang ada bisa mengimplementasikan budaya kerja yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif dalam mewujudkan ASN yang Profesional dan Tata kelola Pemerintahan yang baik. Adapun perkembangan nilai survey Indeks BerAKHLAK Provinsi Riau dari tahun 2023 sebesar 59,9 poin meningkat pada tahun 2024 sebesar 69,4 poin dengan kriteria kategori cukup sehat. Perkembangan nilai survey Indeks BerAKHLAK Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.181 Perkembangan Survey Nilai Indeks BerAKHLAK Provinsi Riau Tahun 2022-2024

INDIKATOR	TAHUN		
	2022	2023	2024
Nilai survey Indeks BerAKHLAK	58,3	59,9	69,4

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau

2.4.1.8 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Pemerintah Provinsi Riau, maka perlu diselenggarakan survey pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia publik. Caranya dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan cara merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan

perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara,

Hasil nilai SKM yang ada didapat dari nilai rata rata SKM yang dilakukan oleh masing masing perangkat daerah dan dilaporkan kepada Biro Organisasi. Perkembangan hasil nilai SKM yang ada sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami penurunan dimana pada tahun 2021 terdapat 3 (tiga) Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan dengan nilai rata rata 86,1, tahun 2022 terdapat 3 (tiga) Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan dengan nilai rata rata 89,93, tahun 2023 terdapat 8 (delapan) Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan dengan nilai rata rata 88,43 dan pada tahun 2024 terdapat 15 (lima belas) Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan,dengan nilai rata rata 86,32. Penurunan nilai SKM yang ada dikarenakan peningkatan terhadap penyampaian pelaporan dari Perangkat Daerah yang ada, dimana diharapkan semua Perangkat Daerah untuk bisa sudah menyampaikan laporan SKM sebagai gambaran penilaia kepuasan dari masyarakat terhadap kinerja dari Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Adapun perkembangan nilai SKM yang ada dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.182 Perkembangan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Provinsi Riau Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun							
	2021		2022		2023		2024	
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	86,1	3 OPD	89,3	3 OPD	88,43	8 OPD	86,32	15 OPD

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Riau

2.4.1.9 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah sejak tahun 2022 diukur

dengan 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Adapun Capain kinerja Provinsi Riau dalam bentuk Nilai SAKIP disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.183 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Komponen	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perencanaan Kinerja	22,61	22,86	23,25	23,78	23,80
Pengukuran Kinerja	14,15	14,41	20,51	20,91	20,91
Pelaporan Kinerja	11,08	11,22	10,31	10,60	10,67
Evaluasi Internal	6,90	7,05	15,10	15,22	15,84
Capaian Kinerja	13,08	13,13	-	-	-
Nilai Sakip (Predikat)	67,82	68,67	69,17	70,51	71,22
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	BB	BB

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Riau mulai tahun 2023 mengalami peningkatan predikat BB atau Sangat Baik dan tahun 2024 mencapai 71,22 poin. Hal ini menunjukkan bahwa Implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.4.2.1 Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila. Secara fungsi, untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di daerah untuk menaati dan mematuhi, meskipun masih ada sebagian pihak yang tidak tunduk dan patuh terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, peraturan

perundang-undangan mengamanatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan langkah-langkah penegakan, Jumlah peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.184 Jumlah Penetapan dan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penetapan Perda	42	4	6	3	3
2	Jumlah Penegakan Perda	6	6	7	8	16

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

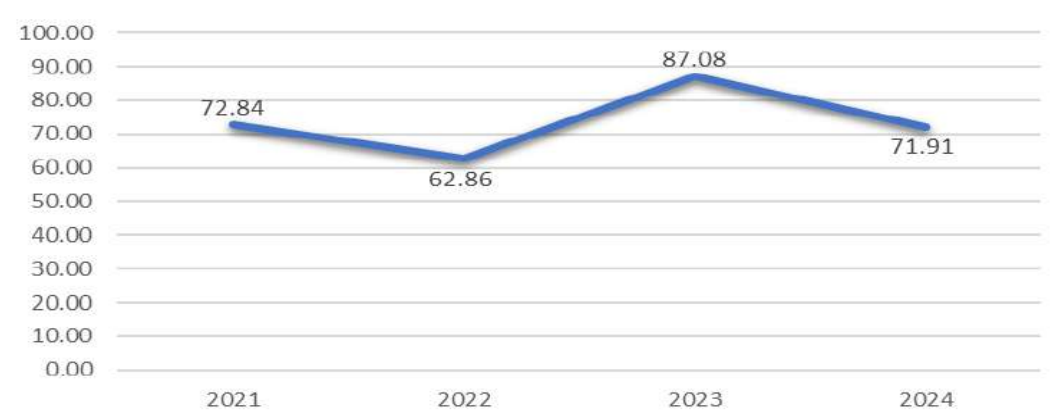
Penegakan Perda Provinsi Riau yang mengandung sanksi hukum dan/atau administrasi yang harus ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dalam kurun waktu 2020-2024 telah melaksanakan penegakan sebanyak 16 Peraturan Daerah, Salah satu contoh peraturan yang ditegakkan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang memiliki dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau.

2.4.2.2 Persentase Capaian Aksi HAM

Komitmen Negara Republik Indonesia dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia tersebut telah dilakukan secara konsisten dan terukur, di antaranya melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) yang telah dimulai sejak tahun 1998 (Keputusan Presiden Nomor: 129/1998). Tujuan mendasar dari rencana aksi hak asasi manusia adalah untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di suatu wilayah. Hal ini dilakukan dengan menempatkan perbaikan hak asasi manusia dalam konteks kebijakan publik sehingga pemerintah dan masyarakat dapat mendukung perbaikan hak asasi manusia sebagai tujuan praktis melalui penyusunan program untuk memastikan tercapainya tujuan dari RANHAM itu sendiri, dengan melibatkan semua sektor pemerintahan dan masyarakat yang relevan, dan mengalokasikan

sumber daya yang cukup. HAM sebagai mandat Konstitusional, menunjukkan pengakuan negara atas HAM dan memandatkan negara untuk menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia. Penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah (pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). RANHAM memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap kelompok sasaran perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.

Capaian Aksi HAM Provinsi Riau Tahun 2021-2024 memiliki tren yang fluktuatif, dimana capaian tahun 2022 (62,86) mengalami penurunan sebesar 9,98 dibandingkan dengan tahun 2021 (72,84). Pada rentang 4 tahun Aksi HAM dimaksud capaian tertinggi rata-rata Aksi HAM provinsi Riau terjadi pada tahun 2023 dengan nilai rata-rata sebesar 87,08 sebagaimana gambar di bawah ini.



Sumber: Kemenkum HAM RI

Gambar 2.75 Perkembangan Rata-Rata Aksi HAM Provinsi Riau Tahun 2021-2024

Berikut ini disampaikan capaian aksi RANHAM Pemerintah Daerah Riau tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.185 Capaian Aksi HAM Provinsi Riau Tahun 2023

PEMERINTAH DAERAH	NILAI CAPAIAN AKSI 1	NILAI CAPAIAN AKSI 2	NILAI CAPAIAN AKSI 3	NILAI CAPAIAN AKSI 4	NILAI CAPAIAN AKSI 5	NILAI CAPAIAN AKSI 6	NILAI CAPAIAN AKSI 7
KAMPAR	66.7	85	100	86.7	100	100	KABUPATEN/KOTA AKSI 1-6
INDRAGIRI HULU	53.3	50	68.3	61.7	50	26.7	
BENGKALIS	100	85	90	98.3	96.7	76.7	
INDRAGIRI HILIR	75	90	85	100	100	63.3	
PELALAWAN	60	75	96.7	98.3	95	33.3	
ROKAN HULU	48.3	88.3	75	98.3	93.3	33.3	
ROKAN HILIR	60	88.3	71.7	98.3	90	33.3	
SIAK	100	95	81.7	100	100	98.3	
KUANTAN SINGINGI	75	83.3	98.3	100	100	76.7	
KEPULAUAN MERANTI	61.7	71.7	80	100	100	100	
PEKANBARU	73.3	71.7	55	100	100	78.3	
DUMAI	60	80	100	85	100	100	
PROVINSI RIAU	70	45	65	46.67	90	96.67	90

Sumber: Kemenkum HAM RI Tahun 2024

2.4.2.3 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia merupakan ukuran untuk memotret kualitas perilaku demokrasi pemerintah dan masyarakat di sebuah wilayah, IDI diharapkan dapat menjadi ukuran demokrasi yang sesuai dengan falsafah Pancasila sehingga arah pembangunan tidak menyimpang dari politik Indonesia ideologi bangsa, Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah, Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan suatu hal yang mudah, Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat, Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri merumuskan pengukuran IDI,

IDI diukur khusus untuk Indonesia sehingga cara pengukurannya berbeda dengan indeks-indeks lain yang unit analisisnya negara, IDI 2009–2020 telah menjadi rujukan pembangunan politik nasional dan daerah, IDI memiliki keunggulan berupa data dan informasi yang detail karena yang dikumpulkan adalah kasus dan data riil, Sejak tahun 2021 perhitungan IDI menggunakan metoda baru tetap menggunakan triangulasi, yakni

mengombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain, Aspek yang dinilai dengan metoda baru yaitu : Aspek 1, Kebebasan dengan 7 indikator; Aspek 2, Kesetaraan dengan 7 indikator; Aspek 3, Kapasitas Lembaga Demokrasi dengan 8 indikator,

Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut Provinsi Riau dari tahun 2020 hingga 2024 berkisar dengan kategori sedang memiliki nilai berkisar antara 60-80, Capaian IDI Provinsi Riau tahun 2024 mengalami kenaikan 1,51 poin bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023, Hal ini disebabkan karena naiknya penilaian pada aspek kebebasan dan kapasitas lembaga demokrasi, Secara rinci perkembangan IDI Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.186 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia
Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau	76,86	75,66	73,64	75,55	77,06
Kebebasan	86,08	-	-	-	-
Hak-hak Politik	65,40	-	-	-	-
Lembaga Demokrasi	83,48	-	-	-	-
Kebebasan	-	88,40	84,46	79,39	82,71
Kesetaraan	-	75,88	70,53	80,13	74,82
Kapasitas Lembaga Demokrasi	-	62,83	66,69	66,30	74,17
Peringkat Nasional	11	19	29	26	24

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

2.4.2.4 Indeks Rasa Aman

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, rasa aman adalah rasa yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan, Konsep ini sering digunakan dalam psikologi untuk menggambarkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan seseorang dalam situasi tertentu, Indeks rasa aman adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah wilayah

atau komunitas, Beberapa dimensi pengukuran indeks rasa aman dapat dilihat melalui: (a) dimensi perlindungan dan pemanfaatan kebhinekaan; (b) dimensi pemenuhan kesejahteraan sosial; (c) dimensi keamanan dan kekerasan, Untuk proporsi penduduk Provinsi Riau Tahun 2014 – 2020 yang merasa aman di area tempat tinggalnya dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.187 Indeks Rasa Aman Provinsi Riau Tahun 2014-2020

2014	2017	2020
69,66	51,15	64,80

Sumber : BPS Provinsi Riau, Susenas Modul Hansos, 2020

Pada periode tahun 2020 merupakan data rilis terakhir dapat diketahui bahwa secara umum, persepsi rasa aman di banyak daerah termasuk Provinsi Riau mengalami penurunan rasa aman, Tingkat proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian ini selaras dengan indeks kriminalitas, Turunnya persentase warga yang merasa aman saat berjalan sendiri termasuk di Provinsi Riau dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi dari media massa yang meunculkan asosiasi dengan kejadian-kejadian sebelumnya;
- b. Meningkatnya kejahatan di tempat umum yang sifatnya menyerang;
- c. Pengalaman masa lalu yang mempengaruhi persepsi di masa kini

2.4.2.5 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) merupakan ukuran kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan mengukur tiga dimensi, tujuh sub-dimensi, dan 38 indikator untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil menjaga keamanan, kedamaian, keteraturan, dan ketertiban dalam masyarakat, Adapun capaian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tahun 2023 dan 2024 sebagaimana tabel berikut,

**Tabel 2.188 Capaian Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tahun 2023 dan 2024**

No	Indikator Kinerja	Capaian	
		2023	2024
1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100

Sumber : Satpol Pamong Praja Provinsi Riau

Indeks Ketentraman dan Ketertiban terkait dengan Standar Pelayanan Minimum Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), Dasar hukum Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Secara rinci capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau Tahun 2021 s,d Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

**Tabel 2.189 Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Provinsi Riau
Tahun 2021 - 2024**

No	Jenis SPM Trantibumlinmas	Indikator	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Provinsi	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Provinsi	100	100	100	100

Sumber : Satpol Pamong Praja Provinsi Riau Tahun

Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimum Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 telah mencapai hasil yang maksimal,

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

Pembangunan daerah dilakukan dengan salah satu tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah, Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah, Pembangunan daerah dilakukan dengan salah satu tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah, Dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mengukur pencapaian seluruh aktivitas di daerah dalam memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dengan mengoptimalkan ekosisten, potensi dan berbagai hasil iptek dan inovasi untuk menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan,
- b. Menjadi pendorong kepada seluruh stakeholder terutama para pelaku inovasi (seluruh lembaga, daerah, dunia usaha dan masyarakat) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi dalam rangka meningkatkan tingkat daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan,
- c. Sebagai upaya untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia;
- d. Menjadikan dasar dalam perumusan, penetapan, evaluasi dan monitoring kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah,
- e. Menjadi alat dalam proses harmonisasi berbagai kebijakan dan program pembangunan baik pada level nasional dan daerah,

Kerangka pengukuran Indeks Daya Saing Daerah mengacu kepada *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019 (WEF, 2019), yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi, Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12

pilar daya saing seperti pada gambar di bawah ini, Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing, Indikator-indikator ini diklasterisasi berdasarkan dimensi tertentu, yang sifatnya hanya sebagai kerangka konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks, Tingkat daya saing dibagi dalam 4 kategori yakni : rendah (0 – 0,125), sedang (1,26 -2,50), tinggi (2,51 – 3,75) dan sangat tinggi (3,75 – 5,00), Indeks daya saing daerah ini merefleksikan tingkat produktivitas daerah dari segala sector (BRIN, 2024), Indeks daya saing daerah Provinsi Riau pada tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 3,82% setiap tahunnya, namun sedikit masih di bawah rata-rata nasional, tetapi terjadi peningkatan kategori kategori sedang pada tahun 2020,

Tabel 2.190 Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024

Tahun	Nilai	Kategori
2020	2,2399	Sedang
2021	2,9890	Tinggi
2022	3,16	Tinggi
2023	3,25	Tinggi
2024	3,35	Tinggi

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional

Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2024 tertinggi diperoleh Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kota Dumai, sedangkan capaian yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, Berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2024, Riau memiliki keunggulan dalam pilar Ukuran Pasar, Stabilitas Ekonomi Makro, Adopsi TIK, dan Keterampilan Digital, Namun, masih diperlukan peningkatan pada pilar Pasar Produk, Sistem Keuangan, dan Kapabilitas Inovasi, Secara rinci capaian Indeks Daya Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 pada dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.191 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2024

Kode	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Lingkungan Pendukung				Sdm		Pasar				Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
		Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
	Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
14	Riau	4,30	3,02	3,68	4,40	3,94	4,00	1,07	2,90	2,11	4,86	3,29	2,59	3,35
14,01	Kuantan Singingi	4,47	3,28	4,28	3,75	3,83	3,95	2,77	3,16	1,78	4,73	3,60	1,77	3,45
14,02	Indragiri Hulu	4,61	3,40	4,18	3,83	3,68	4,23	1,90	2,73	1,02	4,54	3,73	1,84	3,31
14,03	Indragiri Hilir	4,46	2,42	4,03	3,77	3,81	4,05	3,85	2,72	1,67	4,65	4,65	1,57	3,47
14,04	Pelalawan	4,45	3,03	4,05	3,54	3,64	3,78	4,43	2,84	1,39	4,83	4,44	1,39	3,48
14,05	Siak	4,45	3,67	3,95	4,00	3,92	4,06	1,33	2,94	2,02	4,72	3,32	1,43	3,32
14,06	Kampar	4,72	3,65	4,30	3,72	3,89	3,99	1,19	3,44	1,06	4,90	4,05	1,01	3,33
14,07	Rokan Hulu	4,50	3,71	4,29	3,57	3,87	4,09	1,66	2,97	1,54	4,89	3,19	1,89	3,35
14,08	Bengkalis	4,48	3,65	4,40	3,28	3,82	4,03	2,48	2,79	1,79	4,58	3,96	1,79	3,42
14,09	Rokan Hilir	4,46	3,59	4,23	3,80	3,90	3,72	2,17	3,09	1,46	5,,00	3,28	1,95	3,39
14,10	Kepulauan Meranti	4,55	3,30	4,45	3,39	3,84	3,81	1,42	3,38	1,14	4,82	3,60	1,36	3,26
14,71	Pekanbaru	4,31	2,91	4,33	3,29	3,62	3,66	3,05	3,31	0,81	4,26	2,44	1,11	3,09
14,72	Dumai	4,27	3,11	4,93	4,51	4,01	4,02	5,00	4,47	3,93	5,00	3,53	3,79	4,21

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional

Keterangan:

Pilar 1: Institusi	Pilar 5: Kesehatan	Pilar 9: Sistem Keuangan
Pilar 2: Infrastruktur	Pilar 6: Keterampilan	Pilar 10: Ukuran Pasar
Pilar 3: Adopsi TIK	Pilar 7: Pasar Produk	Pilar 11: Dinamisme Bisnis
Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro	Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja	Pilar 12: Kapabilitas Inovasi

2.4.3.2 Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Riau

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya (Lemhanas RI, 2008), Sehingga dapat dikatakan bahwa Indeks Ketahanan Nasional suatu daerah dapat menjadi faktor penentu didalam menentukan daya saing investasi suatu daerah, Ketahanan nasional dapat digolongkan menjadi delapan gatra, meliputi gatra geografi, demografi dan sumber kekayaan alam sebagai gatra alamiah (*natural determinants*) serta gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan sebagai gatra sosial (*social determinants*),

Indeks ketahanan nasional (IKN) Provinsi Riau mengalami fluktuatif pada tahun 2020 hingga 2024, Status kondisi IKN pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023 tetapi peringkat ketahanan masih cukup tangguh dengan skor 3,05, Indeks ketahanan nasional (IKN) Provinsi Riau, pada tahun 2021 skor 2,26 dengan peringkat ketahanan kurang tangguh, Sementara IKN Provinsi Riau tahun 2023 merupakan skor tertinggi yakni sebesar 3,08 dengan peringkat ketahanan cukup tangguh, pada gatra pertahanan dan keamanan merupakan skor tertinggi yakni sebesar 3,36 dan skor terendah sebesar 2,35 pada gatra sumber kekayaan alam, Selanjutnya untuk tahun 2024 Indeks ketahanan nasional (IKN) Provinsi Riau, mengalami penurunan sebesar 0,03 poin dari 3,08 tahun 2023 menjadi 3,05 tahun 2024, dengan nilai gatra sebagai berikut gatra geografi sebesar 3,35, gatra demografi sebesar 3,05, gatra sumber kekayaan alam sebesar 2,30, gatra ideologi sebesar 3,06, gatra politik sebesar 3,31, gatra ekonomi sebesar 3,13, gatra sosial dan budaya sebesar 2,94 dan terakhir gatra pertahanan dan keamanan sebesar 3,09.

Tabel 2.192 Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Riau
Tahun 2020 - 2024

No	Gatra	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi
1	Geografi	3,15	Cukup Tangguh	3,48	Tangguh	3,35	Cukup Tangguh	3,35	Cukup Tangguh	3,35	Cukup Tangguh
2	Demografi	2,82	Cukup Tangguh	3,54	Tangguh	3,03	Cukup Tangguh	3,06	Cukup Tangguh	3,05	Cukup Tangguh
3	Sumber Kekayaan Alam	2,37	Kurang Tangguh	1,44	Rawan	2,36	Kurang Tangguh	2,35	Kurang Tangguh	2,30	Kurang Tangguh
4	Ideologi	3,09	Cukup Tangguh	2,21	Kurang Tangguh	2,93	Cukup Tangguh	3,00	Cukup Tangguh	3,06	Cukup Tangguh
5	Politik	3,20	Cukup Tangguh	1,54	Rawan	3,24	Cukup Tangguh	3,29	Cukup Tangguh	3,31	Cukup Tangguh
6	Ekonomi	3,06	Cukup Tangguh	2,67	Cukup Tangguh	3,11	Cukup Tangguh	3,16	Cukup Tangguh	3,13	Cukup Tangguh
7	Sosial dan Budaya	2,88	Cukup Tangguh	2,18	Kurang Tangguh	2,86	Cukup Tangguh	2,93	Cukup Tangguh	2,94	Cukup Tangguh
8	Pertahanan & Keamanan	3,36	Cukup Tangguh	1,78	Rawan	3,36	Cukup Tangguh	3,36	Cukup Tangguh	3,09	Cukup Tangguh
Skor IKN		3,03	Cukup Tangguh	2,26	Kurang Tangguh	3,05	Cukup Tangguh	3,08	Cukup Tangguh	3,05	Cukup Tangguh

Sumber: Lemhanas RI/ Kesbangpol Provinsi Riau Tahun 2025

2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, Kinerja urusan pemerintahan daerah berupa capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk 5 (lima) tahun terakhir, Capaian Indikator Kinerja Kunci Provinsi Riau tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.193 Capaian Indikator Kinerja Kunci Provinsi Riau Tahun 2021 – 2024

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TAHUN								INTERPRETASI (belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>))
				2021		2022		2023		2024		
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi											
1	Pertumbuhan Ekonomi		Persen	3,36**	3,36	2,69 - 3,04	4,55	2,82 – 3,49	4,21	3,10 - 3,75	3,52	Tercapai
2	Indek Gini Ratio			0,28	0,33	0,27	0,32	0,26	0,32	0,25	0,31	Belum Tercapai
3	Kemiskinan											
	b, Tingkat Kemiskinan		Persen	7,00**	7,00	6,52 - 6,83	6,84	6,31 - 6,65	6,68	5,97 - 6,05	6,36	Belum Tercapai
1.2	Kesejahteraan Sosial											
1	Indeks Pembangunan Manusia		Indeks	72,94**	73,89	73,21 - 73,44	74,45	73,43 - 73,69	74,95	73,74 - 73,91	75,67	Melampaui
	a, Angka Harapan Hidup		Tahun	71,67**	73,72	71,73 - 71,75	73,95	71,77 - 71,83	74,18	71,81 - 71,89	74,41	Melampaui
	b, Harapan Lama Sekolah		Tahun	13,28**	13,28	13,37 - 13,47	13,29	13,44 - 13,53	13,30	13,44 - 13,60	13,42	Belum Tercapai
	c, Rata-Rata Lama Sekolah		Tahun	9,19**	9,19	9,24 – 9,30	9,22	9,29 – 9,35	9,32	9,35 – 9,40	9,43	Melampaui
	d, Pengeluaran Per Kapita Riil		Rp0	11,146	10,738	11,264	11,158	11,381	11,448	11,498	11,857	Melampaui
II	ASPEK PELAYANAN UMUM											
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU											
	Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur > 25 tahun		Tahun	9,19	9,19	9,24 – 9,30	9,22	9,29 – 9,35	9,32	9,35 - 9,40	9,43	Melampaui
	Harapan Lama Sekolah		Tahun	13,28	13,28	13,37 - 13,47	13,29	13,44 - 13,53	13,3	13,44 - 13,60	13,42	Belum Tercapai
		Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi	Persen	93,71	85,84	94,12	82,16	94,52	78,68	94,92	93,47	Belum Tercapai
		Angka Partisipasi Sekolah	Persen	77,81	77,81	79,90	77,32	80,03	78,15	80,10	78,15	Belum Tercapai
		Persentase anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan	Persen	23,98	23,98	24,00	20,35	24,02	20,35	24,04	56,75	Melampaui
		Persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan	Persen	85,84	85,84	86,38	82,16	86,88	78,68	87,38	93,47	Melampaui

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	TAHUN								INTERPRETASI (belum tercapai ($<$), sesuai (=), melampaui ($>$))
					2021		2022		2023		2024		
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
			khusus yang terakreditasi minimal B										
			Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	75,00	-	80,00	100,00	85,00	85,00	90,00	90,00	Sesuai
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
	DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU												
	Angka Harapan Hidup			Tahun	71,67	73,72	71,79	73,95	71,91	74,18	72,03	74,41	Melampaui
			Persentase capaian SPM Kabupaten/Kota se Provinsi Riau	Persen	40	42,95	55	52,55	70	78,03	85	83,37	Belum Tercapai
			Jumlah Penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai melalui Budget Sharing	Orang	698,611	698,611	750,000	700,000	800,000	750,000	850,000	797,071	Belum Tercapai
			Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Poin	1,25	1,13	1,26	1,27	1,27	1,24	1,28	0,75	Belum Tercapai
			Persentase Fasilitas kesehatan pemerintah memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	73	55,50	75	66,24	78	71,09	80	80	Sesuai
			Persentase sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, alkes dan makan minuman yang memenuhi standar	Persen	90	100,00	91	84,78	92	81,34	93	100,00	Melampaui
			Persentase kab/kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Persen	33	67,00	42	100,00	58	100,00	83	100,00	Melampaui
			Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) aktif	Persen	60	53,30	65	61,36	70	0,69	75	100,00	Melampaui
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU												
		Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap		Persen	63,14	62,97	63,46	64,94	64,2	66,64	66,23	68,35	Melampaui
		Persentase perencanaan SPALD Regional		Persen	25	100	50	100	75	100	100	100	Sesuai
			Kapasitas produksi SPAM Regional	Liter/detik	440	440	440	440	440	440	440	440	Sesuai
			Persentase bangunan strategis yang dibangun dan dipelihara	Persen	49	100	64	91	75	74	100	100	Sesuai
			Persentase kawasan strategis yang ditata	Persen	11	20	22	58	83	75	100	100	Sesuai

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	TAHUN								INTERPRETASI (belum tercapai ($<$), sesuai (=), melampaui ($>$))
					2021		2022		2023		2024		
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU												
			Luas kawasan kumuh yang sudah ditangani	Hektar	20	20	82,98	196,95	103	104	123	108	Belum Tercapai
			Jumlah kawasan permukiman yang ditangani	Kawasan	2	2	28	28,00	25	25	25	100	Melampaui
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
	DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU												
			Persentase Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS yang di tingkatkan kapasitasnya	Persen	19	19	18	18	18	18	18	12	Belum Tercapai
			Persentase PSKS perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	25	25	18	18	18	18	18	14	Belum Tercapai
			Persentase PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	18,40	18	25	25	25	25	25	20	Belum Tercapai
			Persentase PPKS yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai
			Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai
			Persentase PPKS yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai
			Persentase Kabupaten/Kota yang aktif melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU												
	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			Persen	65,43	65,03	65,63	63,86	65,81	64,45	66	66,33	Melampaui
		Persentase Tingkat Kesempatan Kerja		Persen	93,86		94,05		94,23		94,58		
			Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan klaster berbasis kompetensi	Persen	-	-	-	100,00	20	100	30	77	Melampaui
			Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	100	95,24	100	100,00	80	100	70	20	Belum Tercapai

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	TAHUN								INTERPRETASI (belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>))
					2021		2022		2023		2024		
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
			Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	20	-	25	-	40	40	45	40	Belum Tercapai
			Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan Industrial	Persen	5	5,00	10	5,00	15	15	20	15	Belum Tercapai
			Persentase perusahaan yang menerapkan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan	Persen	17	17,00	20	17,00	30	30	50	30	Belum Tercapai
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU												
			Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	7	17,30	15	6,20	20	8,50	25	9,85	Belum Tercapai
			Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	75	118	80	100	90	90	90	90	Sesuai
			Persentase kabupaten/kota dengan peringkat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Persen	75	83	83,33	91,66	83,33	91,67	91,60	91,60	Sesuai
			Persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	75	118	78	100	80	80	85	85	Sesuai
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU												
	Indeks Ketahanan Pangan			Poin	65,87	66,84	67,62	67,59	69,37	68,68	71,12	70,43	Belum Tercapai
		Skor PPH Ketersediaan		Poin	87,03	84,10	89,80	89,40	92,50	88,90	96,00		Belum Tercapai
		Persentase wilayah rentan pangan		Persen	26,62	12,43	25,44	36,11	23,07	36,11	21,30	25,00	Melampaui
		Persentase peningkatan keamanan pangan segar		Persen	5	(1,86)	5	4,34	5	4,35	5	4,65	Belum Tercapai
			Skor PPH Konsumsi	Poin	87,00	84,10	89,70	89,40	92,30	88,90	95,00	88,14	Belum Tercapai
			Penurunan wilayah rawan pangan	Kecamatan	45,00	21,00	42,00	13,00	39,00	13,00	36,00	9,00	Belum Tercapai
			Persentase pengawasan dan keamanan pangan segar	Persen	70,00	92,64	75,00	96,74	80,00	79,65	85,00	93,00	Melampaui
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU												
			Persentase kasus sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota yang termediasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	TAHUN								INTERPRETASI (belum tercapai ($<$), sesuai (=), melampaui ($>$))
					2021		2022		2023		2024		
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU												
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Poin	69,80	70,72	70,10	72,10	70,41	70,42	70,72	70,77	Melampaui
		Indeks Kualitas Air (IKA)		Poin	56,15	52,25	56,25	53,88	56,35	50,84	56,45	52,69	Belum Tercapai
		Indeks Kualitas Air laut (IKAL)		Poin	73,84	77,73	74,46	83,95	75,09	74,39	75,72	77,47	Melampaui
		Indeks Kualitas Udara (IKU)		Poin	88,18	90,13	88,28	90,69	88,38	90,92	88,49	89,66	Melampaui
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)		Poin	42,51	50,22	43,77	50,00	45,04	51,69	46,30	51,25	Melampaui
			Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai
			Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Air	Persen	0,17	3,44	0,17	3,11	0,17	(5,64)	0,17	3,63	Melampaui
			Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lahan	Persen	2,00	21,77	2,00	(0,43)	2,00	3,38	2,00	(0,85)	Belum Tercapai
			Persentase Peningkatan Limbah B3 yang dikelola	Persen	0,05	0,06	0,06	0,11	0,06	0,21	0,06	0,07	Melampaui
			Persentase Peningkatan Pengawasan usaha dan /atau kegiatan	Persen	25,00	27,00	25,00	28,50	25,00	26,00	28,00	30,00	Melampaui
			Persentase Peningkatan Masyarakat/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan LH	Persen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Sesuai
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan acara penyuluhan/ Peringatan Hari LH/ Pameran LH	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai
			Persentase Peningkatan Kualitas Udara	Persen	0,11	2,40	0,11	0,62	0,11	0,25	0,12	1,32	Melampaui
			Persentase Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup dan kehutanan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai
			Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Persen	26,00	18,31	26,00	12,00	27,00	9,88	28,00	6,53	Belum Tercapai
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU												
	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT			Nilai	80	86,1	81	89,93	82	88,43	83	86,32	Melampaui
2.13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU												
	Indeks Desa Membangun (Persentase Desa Mandiri)			Persen	6,3	6,34	8,9	9,99	11,3	37,71	13,8	53,61	Melampaui
	Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Dan Akuntabel			Persen	20		25		30		35		
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persen	20	35	45	100	50	100	55	55	Sesuai

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	TAHUN								INTERPRETASI (belum tercapai ($<$), sesuai (=), melampaui ($>$))
					2021		2022		2023		2024		
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
			(RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan karang taruna) aktif										
			Persentase BUMDES maju	Persen	20	13	35	16	45	20	55	30	Belum Tercapai
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU												
	Total Fertility Rate (TFR)			Rasio	2,23		2,21	2,28	2,19	2,26	2,1	2,19	Melampaui
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)		Persen	60,63		61,21	55,9	61,58	55,8	62,07	64,3	Melampaui
			Persentase kabupaten/kota yang menyusun (Grand Design Pembangunan Kependudukan) GDPK 5 Pilar	Persen	52,67	127,08	58,33	41,67	75	58	100	75	Belum Tercapai
			Jumlah peserta KB Aktif	Orang	851,663	127	844,942	454,558	850,012	633,257	855,112	705,269	Belum Tercapai
			Indeks pembangunan keluarga	Indeks	57	53,01	57	56,74	59	63,70	61	64,53	Melampaui
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU												
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen	26,69	26,69	27,08	27,08	27,53	28,31	27,94	27,94	Sesuai
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana pelayaran	Persen	39,99	39,99	41,11	41,11	46,19	45,89	53,02	53,74	Melampaui
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU												
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			Indeks	2,55	2,55	2,99	3,00	3,37	3,01	3,56	3,75	Melampaui
			Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah	Persen	80	80	81,50	81,50	83,40	84,00	84,70	84,00	Belum Tercapai
			Persentase pemenuhan indikator SPBE	Persen	87,50	87,50	88,50	88,50	89	89	89,50	89,00	Belum Tercapai
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU												
			Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	Sesuai
			Persentase Koperasi yang Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	TAHUN								INTERPRETASI (belum tercapai ($<$), sesuai (=), melampaui ($>$))
					2021		2022		2023		2024		
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
			Persentase peningkatan rata-rata hasil penilaian koperasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai
			Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai
			Persentase Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM) yang diberdayakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai
			Persentase peningkatan skala usaha	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU												
			Jumlah Event yang dilaksanakan	Event	4	4	4	4	4	3	4	2	Belum Tercapai
			Peningkatan pertumbuhan IKM	Nilai	0,02	92,00	0,03	0,03	0,02	0,09	0,02	0,02	Sesuai
			Nilai realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan	Triliun Rupiah	49	53	50	83	51	78	52	70	Melampaui
			Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	Persen	50	50	50	50	55	55	65	65	Sesuai
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU												
			Jumlah atlet potensial yang dibina	Orang	219	35	293	304	364	364	212	701	Melampaui
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU												
			Persentase ketersediaan data sektoral	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU												
			Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	72	Belum Tercapai
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU												
	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau			Persen	18,18	18,18	27,27	27,27	36,36	36,36	45,45	45,45	Sesuai
		Persentase Budaya Melayu Riau yang Dilindungi		Persen	74,10	71,08	76,20	72,02	78,30	79,74	80,40	81,29	Melampaui
		Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan		Persen	4	4,96	6	5,22	8	6,35	10	10,03	Melampaui
		Persentase Budaya Melayu Riau yang Dimanfaatkan		Persen	3	2,05	4	2,15	5	25,59	6	6,59	Melampaui
			Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi dan dikembangkan	OPK	56	56	66	66	76	76	86	86	Sesuai

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	TAHUN								INTERPRETASI (belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>))
					2021		2022		2023		2024		
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
			Persentase Kesenian tradisional yang dikembangkan	Persen	2,12	2	2,15	2,15	2,18	2,18	2,21	2,21	Sesuai
			Jumlah cagar budaya yang dilindungi	Cagar Budaya	101	101	116	116	131	131	146	146	Sesuai
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap Museum	Persen	55	55	65	65	75	75	85	85	Sesuai
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU												
	NTN			Persen	110	103,90	111	104,54	112	105,18	113	104,44	Belum Tercapai
	NTPi			Persen	110	96,74	111	98,65	112	101,37	113	100,35	Belum Tercapai
		Jumlah Produksi Perikanan		Ton	276,536,31	244,789,84	284,974,86	259,629,13	296,394,57	262,029,12	288,589,39	253,246,20	Melampaui
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan Perturan Perundang-undangan		Persen	84	75,92	79,04	89,91	82,20	87,59	85,48	59,05	Belum Tercapai
		Persentase pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan		Persen	16	15,00	18	15,00	20	23,00	22	11,66	Belum Tercapai
			Luas kawasan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Hektar	2,00	2,00	5,00	5,00	81,554,00	292,802,49	141,508,00	147,127,70	Melampaui
			Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	146,744,31	138,224,15	147,176,78	139,309,64	152,105,79	139,671,17	157,199,87	125,775,57	Belum Tercapai
			Jumlah Produksi perikanan budidaya	Ton	129,792	107,077,77	121,485,31	120,319,50	126,344,73	124,733,54	131,389,52	127,470,63	Belum Tercapai
			Persentase pelanggaran yang ditangani	Persen	22,00	75,92	20,00	20,00	18,00	12,50	16,00	16,00	Sesuai
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
	DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU												
	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara			Milyar	877,33	1.950,47	1.052,80	4.992,52	1.315,98	8.866,91	1.811,08	10.790,21	Melampaui
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara		Jiwa	52.816	44.346	63.379	232.963	79.223	402.863	109.028	428.755	Melampaui
		Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara		Hari	2,25	4,34	2,32	3,63	2,35	3,04	2,42	2,45	Melampaui
			Jumlah daya tarik wisata unggulan yang dikembangkan	Destinasi	3	3	5	5	3	3	3	2	Belum Tercapai
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU												
	NTUP Sub Sektor Peternakan			Persen	101,75	99,76	102,35	99,50	103,35	95,39	104,20	94,94	Belum Tercapai
		Produksi Daging		Ton	59.912	65.408	61.096	77.730	62.303	77.838	63.535	84.615	Belum Tercapai
		Persentase Status Kesehatan Hewan		Persen	95,9	94,10	96,6	94,90	97,3	97,20	98,00	98,70	Melampaui
		Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)		Persen	5,00	-	5,00	4,32	5,00	4,48	5,00	5,71	Melampaui
			Persentase Peningkatan Populasi	Persen	1,85	3,94	1,85	1,79	1,85	0,71	1,85	2,55	Melampaui

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	TAHUN								INTERPRETASI (belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>))
					2021		2022		2023		2024		
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
			Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	Persen	-	-	5,00	5,00	27,00	31,25	27,00	9,22	Belum Tercapai
			Persentase angka kematian ternak	Persen	3,10	2,10	2,80	3,10	2,50	2,34	2,20	1,00	Belum Tercapai
			Persentase peningkatan unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan penjaminan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk	Persen	-	-	10,00	30,00	10,00	17,24	10,00	17,65	Melampaui
			Persentase kelompok yang membentuk korporasi	Persen	-	-	3,00	2,00	5,00	4,00	9,00	4,00	Belum Tercapai
	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU												
	NTUP Hortikultura			Poin	103,5	104,09	103,60	98,00	103,7	99,32	103,8	104,26	Melampaui
		Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Durian)	Ton	17.154	30.114,0	19.257	30.039,0	21.477	22.659,72	23.814	25.663,16		Melampaui
		Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Cabe)	Ton	17.796	20.791,0	19.236	20.534,0	20.775	13.213,54	22.419	15.332,35		Belum Tercapai
	NTUP Tanaman Pangan			Poin	101,50	96,33	101,60	88,99	101,70	92,34	101,80	94,86	Belum Tercapai
		Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Jagung)	Ton	36,934	22,987,3	38,049	9,845,00	39,199	8,984,60	40,382	9,369,14		Belum Tercapai
		Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Padi)	Ton	255.630	217.458,9	313.213	213.557,0	373.404	205.973,0	436.203	222.056,0		Belum Tercapai
			Persentase peningkatan produktivitas tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	0,97	(0,15)	2,85	1,45	2,75	14,37	2,64	7,13	Melampaui
			Persentase peningkatan luas tanam Tanaman pangan dan hortikultura	Persen	3,26	(8,69)	8,25	(11,79)	7,47	(20,68)	6,81	14,72	Melampaui
			Persentase peningkatan luas panen tanaman pangan dan hortikultura	Persen	2,96	(20,38)	8,39	(2,92)	7,48	(7,02)	6,80	4,59	Belum Tercapai
			Persentase penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	3,00	4,16	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Sesuai
	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU												
			Jumlah Produksi komoditas utama perkebunan	Ton	8.536,241	8.914,17	8.630,387	8.940,511	8.715,738	10.221,669	11.262,153	10.426,928	Belum Tercapai
			Jumlah Produktivitas komoditas utama perkebunan	Kg/ Ha/Th	12,55	12,50	12,61	12,95	12,67	12,42	12,73	12,79	Melampaui
			Persentase luas penanganan lahan perkebunan yang terdampak bencana	Persen	0,10	0,10	0,10	0,15	0,20	0,17	0,30	0,54	Melampaui
			Persentase usaha perkebunan yang memiliki izin	Persen	63,76	100,00	66,95	64,53	70,73	90,04	73,81	100,00	Melampaui
			Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	0,01	0,30	1,78	1,81	1,96	1,90	2,15	10,53	Melampaui

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	TAHUN								INTERPRETASI (belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>))
					2021		2022		2023		2024		
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN												
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU												
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Poin	69,80	70,72	70,10	72,10	70,41	70,42	70,72	70,77	Belum Tercapai
	Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca			Persen	1,50	50,35	1,52	1,48	1,10	11,04	1,10	-	Belum Tercapai
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)		Poin	42,51	50,22	43,77	50,00	45,04	51,69	46,30	51,25	Belum Tercapai
		Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan		Persen	1,50	50,35	1,52	1,48	1,10	11,04	1,10	-	Belum Tercapai
			Persentase penambahan luas tutupan hutan	Persen	20,00	21,00	20,00	25,04	20,00	18,00	20,00	16,20	Belum Tercapai
			Persentase peningkatan pelaksanaan pelatihan masyarakat di bidang kehutanan	Persen	20,00	20,00	20,00	60,00	33,00	37,50	20,00	22,22	Melampaui
			Persentase penurunan luasan lahan kritis	Persen	1,00	15,26	1,00	1,83	1,00	3,37	1,00	5,31	Melampaui
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL												
	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU												
	Rasio Elektrifikasi			Persen	92,53	92,54	92,63	92,89	92,72	94,98	92,81	95,19	Melampaui
			Bauran Energi	Persen	26,13	8,50	27,83	29,34	28,80	28,80	29,59	28,14	Belum Tercapai
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU												
			Persentase peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	100	100	-	-	100	100	100	100	Sesuai
			Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai
			Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang terakreditasi	Lembaga	10	10	10	10	10	10	10	100	Melampaui
			Jumlah kerjasama UMKM	UMKM	-	-	24	24	24	24	24	24	Sesuai
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU												
			Persentase Pencapaian target pembangunan industri pada dokuemen perencanaan industri (RIPIN)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	TAHUN								INTERPRETASI (belum tercapai ($<$), sesuai (=), melampaui ($>$))
					2021		2022		2023		2024		
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4.01	SEKRETARIAT DAERAH												
	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU												
	Indeks Reformasi Birokrasi			Nilai	68	67,45	70,2	67,63	72,02	74,63	74,04	83,97	Melampaui
			Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai nilai RB Baik	Persen	60	60	80	80	90	100	100	100	Sesuai
			Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat di bidang pelayanan dasar yang dikendalikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai
			Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat di bidang bina mental spiritual yang dikendalikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai
			Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian yang dikendalikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai
			Persentase BLUD yang berkinerja baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai
			Persentase BUMD yang berkinerja baik	Persen	67	67	67	67	83	100	100	85,71	Belum Tercapai
			Persentase rumusan kebijakan di bidang pemanfaatan potensi SDA yang dikendalikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sesuai
			Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5.01	PERENCANAAN												
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU												
			Persentase keselarasan program OPD di Dokumen Perencanaan Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	92,14	100,00	100,00	Sesuai
			Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai
5.02	KEUANGAN												
	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU												
		Indeks Kepuasan Masyarakat		Nilai	85	86,1	80	89,93	85	88,43	85	86,32	Belum Tercapai
			Persentase tingkat kepatuhan laporan keuangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Belum Tercapai
			Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola	Persen	100	100	100	20	-	-	-	-	Sesuai

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	TAHUN								INTERPRETASI (belum tercapai ($<$), sesuai (=), melampaui ($>$))
					2021		2022		2023		2024		
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU												
	Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau (WTP)			Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Belum Tercapai
			Persentase Keuangan Daerah yang dikelola	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai
			Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola	Persen	100	100	100	20	100	96	100	91	Belum Tercapai
5.03	KEPEGAWAIAN												
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU												
			Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	Persen	100	106	100	100	100	89,05	100	90,73	Belum Tercapai
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PROVINSI RIAU												
			Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan	Persen	95	95	96	88,33	97	92,14	98	98	Sesuai
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU												
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
6.01	INSPEKTORAT DAERAH												
	INSPEKTORAT PROVINSI RIAU												
			Persentase laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yang terselesaikan	Persen	100	99,18	100	100,00	100	100	100	100	Sesuai
			Persentase laporan hasil evaluasi	Persen	100	83,04	100	96,07	100	100	100	100	Sesuai
			Persentase OPD yang difasilitasi	Persen	100	78,02	100	92,84	100	100	100	100	Sesuai
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU												
	Indeks Kerukunan Umat Beragama			Nilai	73,79	66,67	75,11	74,32	76,01	71,6	76,92	81,77	Belum Tercapai
		Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Persen	74,50	100	75,00	75,0	75,50	75,1	76,00	70,05	Belum Tercapai
			Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai	3,13	100,00	3,13	2,93	3,15	2,93	3,17	3,06	Belum Tercapai
			Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai	3,10	2,67	3,10	3,11	3,12	3,18	3,14	3,13	Melampaui

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	TAHUN								INTERPRETASI (belum tercapai ($<$), sesuai ($=$), melampaui ($>$))
					2021		2022		2023		2024		
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
			Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai	2,92	2,18	2,92	2,86	2,94	2,98	2,96	2,94	Melampaui
			Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persen	75,00	100,00	75,00	75,00	75,05	75,10	75,10	75,10	Sesuai

Sumber: BPS Provinsi Riau, Perangkat Daerah Provinsi Riau.

2.5 Kondisi Keuangan Daerah

Kinerja keuangan masa lalu pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta neraca daerah berdasarkan pelaksanaan APBD 5 (lima) tahun sebelumnya.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah serta neraca daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan terhadap Neraca difokuskan pada perkembangan asset dan hutang daerah serta ekuitas dana.

Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Riau, dijabarkan sebagai berikut.

2.5.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah, menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah dan disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

Secara umum kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020-2024 menunjukkan peran APBD sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan daerah Pemerintah Provinsi

Riau sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tepat menjadi kunci kinerja pelaksanaan APBD yang optimal.

Tabel 2.194 Realisasi APBD Provinsi Riau Tahun 2020-2024 (dalam rupiah)

NO	URAIAN	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
4.	PENDAPATAN DAERAH	8.622.824.848.906,57	9.383.001.507.905,44	8.818.669.764.115,17	10.009.979.591.478,20	9.499.559.746.229,15	2,80%
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.333.176.032.497,57	4.050.468.561.143,44	4.696.769.079.910,17	5.891.605.742.972,21	5.432.109.238.736,15	13,78%
4.1.01	Pajak Daerah	2.783.421.363.943,00	3.327.500.336.694,85	4.054.918.904.730,36	4.412.361.453.766,84	4.238.741.780.749,86	11,57%
4.1.02	Retribusi Daerah	12.480.391.250,00	13.790.515.597,00	16.684.961.995,00	17.145.487.538,50	17.601.944.999,50	9,23%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	88.442.501.751,00	117.417.430.069,00	101.607.146.246,00	948.660.382.439,65	736.467.905.570,00	207,65%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	448.831.775.553,57	591.760.278.782,59	523.558.066.938,81	513.438.419.227,22	439.297.607.416,79	0,99%
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	5.286.397.816.405,00	5.324.745.236.758,00	4.113.106.484.205,00	4.109.295.808.506,00	4.058.624.325.493,00	-5,84%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat						
4.2.01.01	Dana Perimbangan	5.266.154.198.405,00	5.292.276.537.758,00	4.073.105.355.205,00	4.087.748.162.506,00	4.052.762.030.493,00	-5,76%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.832.898.379.231,00	1.841.136.598.312,00	1.664.531.062.715,00	1.536.866.672.146,00	1.416.715.286.890,00	-6,16%
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.432.349.278.000,00	1.455.383.959.000,00	1.452.245.879.000,00	1.506.286.541.167,00	1.584.766.821.838,00	2,58%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	2.000.906.541.174,00	1.995.755.980.446,00	956.328.413.490,00	295.138.574.452,00	235.324.752.210,00	-35,44%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	749.456.374.741,00	815.955.169.555,00	#DIV/0!
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	20.243.618.000,00	32.468.699.000,00	40.001.129.000,00	21.547.646.000,00	5.862.295.000,00	-8,83%
4.2.01.02.01	DID	20.243.618.000,00	32.468.699.000,00	40.001.129.000,00	21.547.646.000,00	0,00	12,49%
	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862.295.000,00	100,00%
4.3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	3.251.000.004,00	7.787.710.004,00	8.794.200.000,00	9.078.040.000,00	8.826.182.000,00	38,23%
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.251.000.004,00	7.787.710.004,00	8.794.200.000,00	9.078.040.000,00	8.826.182.000,00	38,23%
5	BELANJA	8.172.706.474.595,31	8.931.704.166.450,55	9.102.467.422.821,38	10.515.609.539.104,00	9.586.628.436.630,25	4,47%
5.1	Belanja Operasi	5.530.031.193.127,87	6.062.992.053.173,52	5.501.708.100.712,17	5.786.780.208.975,00	5.994.945.418.819,14	2,29%
5.1.01	Belanja Pegawai	2.153.065.317.382,00	2.213.182.776.667,00	2.318.631.227.769,00	2.549.829.683.419,00	3.038.615.203.475,94	9,17%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.077.147.295.142,17	2.448.186.175.191,09	2.826.881.501.749,42	2.811.156.492.698,00	2.455.937.474.181,47	5,03%
5.1.05	Belanja Hibah	1.270.812.795.429,70	1.349.812.571.315,43	314.456.061.193,75	390.363.362.858,00	482.738.316.161,73	-5,67%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	29.005.785.174,00	51.810.530.000,00	41.739.310.000,00	35.430.670.000,00	17.654.425.000,00	-1,53%

NO	URAIAN	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
5.2	Belanja Modal	919.245.593.570,52	1.018.455.078.253,37	1.508.534.414.100,59	2.082.967.692.540,00	1.887.693.923.021,92	21,90%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.060.769.600,00	801.221.880,00	0,00	16.531.477.000,00	1.944.988.800,00	-93,42%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	281.774.431.712,00	259.296.406.464,29	364.092.775.625,82	421.123.195.861,00	320.769.582.300,88	6,07%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	172.213.274.099,21	239.980.341.418,23	289.084.106.026,11	391.132.240.152,00	293.010.280.131,80	17,51%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	403.654.823.625,31	470.432.878.695,85	807.750.958.592,66	1.195.568.098.007,00	1.204.557.819.275,24	34,25%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	51.395.454.534,00	47.944.229.795,00	45.348.812.861,00	57.537.651.640,00	67.171.524.915,00	7,87%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	146.840.000,00	0,00	2.257.760.995,00	1.075.029.880,00	239.727.599,00	-76,70%
5.3	Belanja Tidak Terduga	99.091.636.754,00	245.808.686,00	9.830.848.980,00	249.778.000,00	0,00	900,54%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	99.091.636.754,00	245.808.686,00	9.830.848.980,00	249.778.000,00	0,00	900,54%
5.4	Belanja Transfer	1.624.338.051.142,92	1.850.011.226.337,66	2.082.394.059.028,62	2.645.611.859.589,00	1.703.989.094.789,19	4,48%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.194.074.600.669,92	1.498.191.320.346,70	1.665.840.182.459,62	2.083.597.551.764,00	1.327.458.027.860,00	6,36%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	430.263.450.473,00	351.819.905.990,96	416.553.876.569,00	562.014.307.825,00	376.531.066.929,19	0,52%
6	PEMBIAYAAN	81.565.615.137,47	532.669.756.266,73	1.109.056.599.471,62	574.741.312.692,41	69.270.482.101,62	131,28%
6.1	Penerimaan Pembiayaan	81.565.615.137,47	532.669.756.266,73	984.056.599.471,62	574.741.312.692,41	69.270.482.101,62	127,06%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	81.216.115.137,47	531.683.989.445,73	983.965.015.721,62	574.705.203.139,41	69.111.365.066,62	127,54%
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	349.500.000,00	985.766.821,00	91.583.750,00	36.109.553,00	159.117.035,00	92,85%
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	81.565.615.137,47	532.669.756.266,73	984.056.599.471,62	574.741.312.692,41	69.270.482.101,62	127,06%
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	125.000.000.000,00	0,00	0,00	-
6.1.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	125.000.000.000,00	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	125.000.000.000,00	-	-	-
	PEMBIAYAAN BERSIH	81.565.615.137,47	532.669.756.266,73	984.056.599.471,62	574.741.312.692,41	69.270.482.101,62	127,06%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	531.683.989.448,73	983.967.097.721,62	575.258.940.765,41	69.111.365.066,62	-17.798.208.299,48	-42,55%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Riau, Tahun 2020-2024

2.5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Akun pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, komponennya dijelaskan sebagai berikut.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sementara itu, Pendapatan Transfer merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari:

1. Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
2. Dana Intensif Daerah (DID).

Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, bersumber dari:

1. Pendapatan Hibah;
2. Dana Darurat;
3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah berfluktuatif dari tahun 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,80% atau naik dari Rp. 8,622 triliun tahun 2020 menjadi Rp. 9,499 triliun tahun 2024.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan naik dari Rp. 3,333 triliun tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp. 5,432 triliun tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,78%. PAD berperan penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah, dan pengelolaan PAD yang baik dapat membantu daerah untuk lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Sejak tahun 2022-2024 Pemerintah Provinsi Riau sudah pada posisi kemandirian fiskal karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah sudah

lebih dari 50,00% atau masing-masing 53,26% tahun 2022, 58,86% tahun 2023 dan 57,18% tahun 2024 pada Pendapatan Daerah.

Pendapatan Transfer mengalami penurunan dari senilai Rp. 5.286 triliun tahun 2020 turun menjadi Rp. 4,058 triliun tahun 2024 dengan persentase penurunan sebesar 5,84%. Penurunan nilai dan kontribusinya terjadi sejak tahun 2022-2024 masing-masing sebesar 46,64% tahun 2022, sebesar 41,05% tahun 2023 dan sebesar 42,72% tahun 2024. Sementara tahun 2020-2021 kontribusi pendapatan transfer yang lebih besar dari 50,00% atau sebesar 61,31% tahun 2020 dan sebesar 56,75% tahun 2021.

Selain itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan, pada tahun 2020 senilai Rp. 3,251 miliar atau sebesar 0,04% naik menjadi senilai Rp. 8,826 miliar atau sebesar 0,09% pada tahun 2024.

2.5.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Struktur Belanja Daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun klasifikasi belanja daerah adalah sebagai berikut:

a) Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

- 1) Belanja Pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 2) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
 - 3) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
 - 4) Belanja subsidi sebagaimana digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - 5) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- b) Belanja Modal**, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, meliputi:
- 1) Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- 2) Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
 - 3) Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 4) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 5) Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap
 - 6) Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c) Belanja Tidak Terduga**, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- d) Belanja Transfer**, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- 1) Belanja bagi hasil.
 - 2) Belanja bantuan keuangan.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja terhadap anggaran, semakin

besarrealisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi anggaran belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian.

Berdasarkan Tabel di atas diperoleh Gambaran belanja daerah periode tahun 2020-2024 bahwa realisasi Belanja Daerah mengalami peningkatan dari Rp. 8,172 triliun tahun 2020 menjadi Rp. 9,586 triliun tahun 2024 atau naik sebesar 4,47% per tahun. Dari belanja daerah tersebut, jenis belanja operasi, modal, tak terduga dan transfer secara keseluruhan mengalami peningkatan. Belanja operasi naik dari Rp. 5,530 triliun tahun 2020 menjadi Rp. 5,994 triliun tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 2,29% per tahun. Belanja modal naik dari Rp. 919 milyar tahun 2020 menjadi Rp. 1,887 triliun tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 21,90% per tahun. Belanja Tidak Terduga berfluktuatif dengan rata-rata kenaikan sebesar 900,54% namun pada tahun 2024 tidak terdapat belanja tidak terduga dan Belanja Transfer mengalami kenaikan dari Rp. 1,624 triliun tahun 2020 menjadi Rp. 1,703 triliun tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 4,48% per tahun.

2.5.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Provinsi Riau terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Pada Tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan mengalami kenaikan yang signifikan mulai tahun 2021 dengan rata rata pertumbuhan sebesar 158,09 persen, Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 153,89 persen. Sedangkan untuk realisasi Pengeluaran pembiayaan hanya ada pada tahun 2022 yang diperuntukkan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah.

2.5.2 Neraca Daerah

Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan, pelaporan mengenai aset, utang dan *ekuitas* dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Provinsi Riau serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah, serta analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah. Gambaran posisi keuangan Provinsi Riau tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.195 Neraca Daerah Provinsi Riau Tahun 2020-2024 (dalam juta)

U r a i a n	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan Setara Kas	531.684.029.445,73	984.209.313.357,62	576.869.935.514,41	69.947.263.934,62	19.679.265.809,11	-29,00%
Kas di Kas Daerah	453.718.643.193,59	845.931.634.123,86	542.005.456.827,45	33.776.157.086,06	102.512.712,98	-35,74%
Kas di Bendahara Penerimaan	45.853.700,00	21.908.350,00	24.846.650,00	54.006.400,00	56.642.500,00	20,86%
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.714.553.639,00	4.380.017.105,72	697.761.329,00	355.636.683,00	1.408.622.177,00	32,05%
Kas di BLUD	63.085.040.912,14	126.913.362.491,04	29.152.614.049,96	32.860.563.842,56	12.369.278.069,54	-6,37%
Kas Dana BOS	-	6.537.356.480,00	3.972.976.528,00	2.515.095.821,00	-	-68,35%
Kas Lainnya	8.119.938.001,00	425.034.807,00	1.016.280.130,00	385.804.102,00	1.583.327.496,59	73,17%
Kas Dana BOSP	-	-	-	-	4.158.882.853,00	#DIV/0!
Piutang	290.463.916.298,54	80.435.955.344,17	67.131.994.037,89	68.983.038.991,54	45.069.962.087,54	-30,19%
Piutang Pendapatan	289.121.266.368,54	79.112.441.414,17	63.633.507.197,89	67.815.540.136,54	43.902.463.232,54	-30,22%
Piutang Pajak Daerah	-		-	-	-	-
Piutang Retribusi	537.578.376,00	533.592.074,63	671.542.074,63	788.928.376,00	680.970.076,00	7,23%
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	904.555.063,00	-				-100,00%
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	27.766.018.021,54	78.578.849.339,54	62.961.965.123,26	67.026.611.760,54	43.221.493.156,54	33,52%
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	259.913.114.908,00	-	-	-	-	#DIV/0!
Piutang Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
Piutang BLUD	-	-	-	-	-	-
Piutang Lain-lain	1.342.649.930,00	1.323.513.930,00	3.498.486.840,00	1.167.498.855,00	1.167.498.855,00	24,07%
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	156.015.075,00	156.015.075,00	156.015.075,00	-	-	NA
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-	-
Uang Muka	-	-	2.174.972.910,00	-	-	NA
Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah	895.757.858,00	895.757.858,00	895.757.858,00	895.757.858,00	895.757.858,00	0,00%
Piutang Lainnya	290.876.997,00	271.740.997,00	271.740.997,00	271.740.997,00	271.740.997,00	0,00%
Penyisihan Piutang	- 15.416.398.081,88	- 24.509.578.316,39	- 23.430.428.428,98	-18.276.200.397,75	-27.182.615.358,35	20,33%
Beban Dibayar Dimuka	396.788.169,33	546.080.068,50	530.691.780,82	636.905.807,41	611.336.458,29	12,70%
Persediaan	342.036.028.088,32	363.643.287.774,52	451.528.373.430,89	592.553.320.856,13	562.040.679.493,99	14,14%
Jumlah Aset Lancar	1.149.164.363.920,04	1.404.325.058.228,42	1.072.630.566.335,03	713.844.329.191,95	600.218.628.490,58	-12,70%

U r a i a n	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
Investasi Dana Bergulir Bersih	1.840.154.755,42	1.216.924.177,09	1.158.760.977,05	1.158.760.977,05	1.141.709.199,05	-10,03%
Dana Bergulir	157.195.619.235,89	156.228.752.414,89	156.138.368.664,89	156.106.159.111,89	155.937.288.076,89	-0,20%
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	- 155.355.464.480,47	- 155.011.828.237,80	- 154.979.607.687,84	- 154.947.398.134,84	- 154.795.578.877,84	-0,09%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	
Investasi Non Permanen Lainnya	74.511.483.845,00	74.412.583.845,00	74.411.383.845,00	74.407.483.845,00	74.405.683.845,00	-0,04%
Investasi Non Permanen Lainnya Diragukan Tertagih	- 74.511.483.845,00	- 74.412.583.845,00	- 74.411.383.845,00	- 74.407.483.845,00	- 74.405.683.845,00	-0,04%
Jumlah Investasi Nonpermanen	1.840.154.755,42	1.216.924.177,09	1.158.760.977,05	1.158.760.977,05	1.141.709.199,05	-10,03%
Investasi Jangka Panjang Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.610.680.882.164,25	1.659.548.120.129,17	1.844.269.445.625,46	2.656.603.248.142,47	2.340.609.171.199,72	11,58%
Investasi Permanen Lainnya	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00%
Jumlah Investasi Permanen	1.612.680.882.164,25	1.661.548.120.129,17	1.846.269.445.625,46	2.658.603.248.142,47	2.342.609.171.199,72	11,57%
Jumlah Investasi Jangka Panjang	1.614.521.036.919,67	1.662.765.044.306,26	1.847.428.206.602,51	2.659.762.09.119,52	2.343.750.880.398,77	11,55%
ASET TETAP						
Tanah	14.042.346.132.867,90	13.907.969.391.228,50	13.868.563.984.795,40	13.898.002.327.572,40	13.801.566.715.008,90	-0,43%
Peralatan dan Mesin	3.488.528.275.241,71	3.666.511.243.747,88	3.997.116.378.569,18	4.376.790.907.976,17	4.692.867.850.383,42	7,71%
Gedung dan Bangunan	7.114.390.228.169,41	7.346.628.308.348,99	7.416.263.135.606,07	7.720.367.720.475,54	8.025.133.926.401,19	3,07%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.073.280.773.279,80	15.529.373.041.072,00	15.957.664.373.196,90	16.742.225.004.034,90	19.062.634.519.402,70	6,14%
Aset Tetap Lainnya	1.989.351.293.169,82	2.151.630.808.075,87	2.418.237.409.302,51	2.978.126.600.452,22	3.635.661.196.369,68	16,44%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	706.485.015.479,62	654.604.202.304,93	855.930.286.262,66	838.491.553.494,38	809.344.341.122,48	4,47%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	- 12.378.696.133.979,80	- 13.918.749.101.682,60	- 14.965.232.633.847,90	- 16.233.483.328.699,10	- 17.910.249.831.054,60	9,69%
Jumlah Aset Tetap	30.035.685.584.228,50	29.337.967.893.095,60	29.548.542.933.884,80	30.320.520.785.306,50	32.116.958.717.633,80	1,73%
ASET LAINNYA						
Tagihan Jangka Panjang	9.368.264.906,49	9.368.264.906,49	8.131.614.906,49	8.287.629.981,49	11.176.946.671,24	5,90%
Tagihan Penjualan Angsuran	2.991.473.775,49	2.991.473.775,49	2.991.473.775,49	3.147.488.850,49	2.703.253.290,24	-2,22%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	6.376.791.131,00	6.376.791.131,00	5.140.141.131,00	5.140.141.131,00	8.473.693.381,00	11,37%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	165.545.500.003,00	170.538.813.105,06	181.298.813.105,06	188.206.313.105,06	179.988.891.403,40	2,19%
Aset Tidak Berwujud	76.008.995.462,61	77.413.890.609,61	78.682.544.669,61	75.814.699.859,27	79.067.970.890,27	1,03%
Goodwill	-	-	-	-	-	-
Lisensi dan frenchise	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	- 47.085.003.431,49	- 52.865.465.330,73	- 54.056.620.458,14	- 56.212.403.219,24	- 57.141.245.786,71	5,04%

U r a i a n	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
Aset Lain-lain	191.027.412.828,23	241.448.893.286,04	310.802.460.222,04	335.450.040.139,35	377.685.533.169,40	18,91%
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	- 148.175.982.789,82	- 189.603.032.627,31	- 247.072.246.333,18	- 268.979.452.598,86	- 312.890.372.473,44	18,50%
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	184.846.380.916,00	232.429.802.000,00	18.777.892.000,00	-91,92%
Jumlah Aset Lainnya	246.689.186.979,02	256.301.363.949,16	462.632.947.027,88	514.996.629.267,07	296.665.615.874,16	13,33%
PROPERTI INVESTASI						
Properti Investasi Tanah	-	-	-	-	17.703.500.000,00	
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	4.993.313.102,06	
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-	-	
Jumlah Properti Investasi	-	-	-	-	22.696.813.102,06	
JUMLAH ASET	33.046.060.172.047,20	32.661.359.359.579,40	32.931.234.653.850,20	34.209.123.752.885,00	35.380.290.655.499,20	1,74%
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	40.000,00	242.215.636,00	1.610.994.749,00	835.898.868,00	40.811.026.358,59	152685%
Pendapatan Diterima Dimuka	13.394.628.808,55	583.219.147,84	293.241.122,76	2.242.282.939,85	1.730.673.482,24	124,12%
Utang Belanja	220.733.582.879,88	313.405.097.064,82	471.327.485.766,80	413.484.306.948,55	1.765.826.973.930,05	101,79%
Utang Jangka Pendek Lainnya	144.632.655,00	61.480.455,00	61.480.455,00	61.480.455,00	61.480.455,00	-14,37%
Utang Pemotongan Pajak Pusat dan Titipan Lainnya	-	-	-	-	-	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)/Utang Belanja	-	-	-	-	-	-
Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	234.272.884.343,43	314.292.012.303,66	473.293.202.093,56	416.623.969.211,40	1.808.430.154.225,88	101,71%
JUMLAH KEWAJIBAN	234.272.884.343,43	314.292.012.303,66	473.293.202.093,56	416.623.969.211,40	1.808.430.154.225,88	101,71%
EKUITAS						
EKUITAS	32.811.787.287.703,80	32.347.067.347.275,70	32.457.941.451.756,70	33.792.499.783.673,70	33.571.860.501.273,40	0,60%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	33.046.060.172.047,20	32.661.359.359.579,40	32.931.234.653.850,30	34.209.123.752.885,10	35.380.290.655.499,20	1,74%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

2.5.2.1 Aset Daerah

Aset pemerintah daerah Provinsi Riau selama periode tahun 2020- 2024 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun dari 2020 s/d 2024 sebesar 1,74% atau dan dari Rp. 33,04 triliun tahun 2020 menjadi Rp. 35,38 triliun tahun 2024. Peningkatan aset tersebut berasal dari Investasi Jangka Panjang dengan pertumbuhan dengan sebesar 11,55% per tahun atau naik dari Rp. 1,61 triliun tahun 2020 menjadi Rp. 2,34 triliun tahun 2024.

Sementara Aset lancar terjadi sebaliknya mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -12,70% atau turun dari Rp. 1,14 triliun tahun 2020 menjadi 600,21 milyar tahun 2024. Penyebab turunnya asset lancar karena turunnya Piutang pendapatan dan piutang lainnya. Total Aset Tetap pada tahun 2020 adalah Rp 30,03 triliun dan meningkat menjadi Rp. 32,11 triliun pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,73% selama tahun 2020-2024. Aset Lainnya juga mengalami peningkatan dari Rp. 246,68 milyar tahun 2020 naik menjadi Rp. 296,66 milyar tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 13,33%. Secara keseluruhan peningkatan aset pemerintah provinsi Riau terjadi pada peningkatan kewajiban/Hutang dan Ekuitas.

2.5.2.2 Kewajiban

Kewajiban pemerintah daerah Provinsi Riau selama periode tahun 2020-2024 terutama kewajiban jangka pendek mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 101,71% atau dari Rp. 243,27 miliar di tahun 2020 menjadi Rp 1.808,43 triliun di tahun 2024. Kewajiban jangka pendek yang mengalami peningkatan yang signifikan adalah utang perhitungan pihak ketiga, Pendapatan Diterima Dimuka dan utang belanja masing-masing naik sebesar 152.685%, 124,12% dan 101,79% per tahun.

2.5.2.3 Ekuitas

Perkembangan ekuitas Pemerintah Provinsi Riau selama tahun 2020- 2024 tumbuh rata-rata sebesar 0,60%, dimana pada tahun 2020 sebesar Rp. 33,046 triliun dan pada tahun

2024 sebesar Rp. 35,380 triliun atau bertambah senilai Rp. 2,334 triliun. Ekuitas pemerintah daerah, atau yang sering disebut sebagai ekuitas daerah, mengacu pada kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah daerah setelah memperhitungkan seluruh aset dan kewajiban. Ekuitas ini mencerminkan sumber daya bersih yang tersedia bagi pemerintah daerah untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsinya. Bentuk-bentuk ekuitas pemerintah daerah antara lain, Modal Disetor, Dana Cadangan, Surplus atau Defisit Anggaran, Dana Pembangunan, Dana Hibah dan Sumbangan, Revaluasi Aset dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.5.3 Rasio Keuangan Pemerintah

Kondisi rasio keuangan Pemerintah Provinsi Riau diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2020-2024 dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio likuiditas diukur dengan rasio lancar dan rasio cepat

Rasio lancar (*current ratio*) merupakan rasio likuiditas yang kemampuan perusahaan Pemerintah Provinsi Riau dalam membayar utang jangka pendeknya, atau utang yang wajib dibayar dalam waktu 1 tahun. Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan perbaikan atas kesehatan keuangannya untuk membayar utang dengan menurunnya rasio lancar hingga mencapai 0,332 pada tahun 2024. Rasio lancar yang baik antara 1.5 hingga 3 adalah rasio lancar yang baik. Jika rasio lancar < 1 , Pemerintah Daerah tidak dapat membayar utangnya. Namun, jika rasio lancar yang terlalu tinggi, hal tersebut dapat menjadi tanda bahwa Pemerintah Provinsi Riau tidak dapat mengelola asetnya dengan baik

Tabel 2.196 Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Aktivitas

RASIO	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan (%)
Rasio Likuiditas						
Rasio Lancar	4,905	4,468	2,266	1,713	0,332	-40,80
Rasio Cepat	3,445	3,311	1,312	0,291	0,021	-58,71
Rasio Solvabilitas						
Rasio Total Hutang Terhadap Total Asset	0,007	0,010	0,014	0,012	0,051	97,38
Rasio Hutang Terhadap Modal	0,007	0,010	0,014	0,012	0,054	101,91

Sumber: Hasil Analisis

Rasio cepat merupakan metode untuk mengukur kemampuan Pemerintah Provinsi Riau dalam memenuhi segala utang dan kewajiban jangka pendek. Beda dengan rasio lancar, rasio cepat menghilangkan semua unsur yang berkaitan dengan persediaan dalam perhitungan yang ada. Selama 2020 – 2022 rasio cepat Pemerintah Provinsi Riau dalam keadaan baik, namun pada 2023 dan 2024 menurun di bawah 1. Pemerintah Provinsi Riau pada 2024 kurang memiliki likuiditas yang memadai dan dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar utang jangka pendek.

2. Rasio solvabilitas diukur dengan rasio total hutang terhadap total asset dan rasio hutang terhadap modal

Rasio total hutang terhadap total aset, menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Riau. Nilai rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2024 sebesar 0,051, hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil. Semakin rendah rasio hutang Pemerintah Provinsi Riau, semakin kecil pula leverage yang dimiliki perusahaan, yang berarti semakin kecil risiko keuangannya.

Rasio hutang terhadap modal adalah bagian dari rasio solvabilitas, di mana ini dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah atas modal yang dimiliki. Nilai rasio hutang terhadap modal Pemerintah Provinsi Riau tahun 2020 – 2024 relatif sama dengan

rasio hutang terhadap total asset, memiliki risiko keuangan yang rendah. Rasio ini bermanfaat untuk pihak Pemerintah Provinsi Riau agar dapat melakukan upaya untuk mengoptimalkan kondisi keuangannya dan bagi pemberi pinjaman lebih besar kepercayaannya.

2.5.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan merupakan untuk mengetahui gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya, untuk mengetahui kebijakan pengelolaan keuangan pada periode sebelumnya digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana pembangunan daerah. Analisis kebijakan pengelolaan keuangan kemudian dilakukan dengan analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, analisis sumber penutup defisit riil, analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

2.5.4.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

a. Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah adalah perbandingan anggaran dengan realisasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 secara serial serta menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Provinsi Riau, yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.197 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Riau Tahun 2020-2024

(dalam milyar rupiah)

KODE REK	URAIAN	TAHUN															RATA-RATA
		2020			2021			2022			2023			2024			
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	BELANJA DAERAH																
5.1	BELANJA OPERASI	5.970,71	5.530,03	92,62	6.526,46	6.062,99	92,90	5.877,89	5.501,71	93,60	5.972,85	5.786,84	96,89	6.513,65	5.994,95	92,04	93,61
5.1.1	Belanja Pegawai	2.357,54	2.153,07	91,33	2.318,66	2.213,18	95,45	2.405,24	2.318,63	96,40	2.609,36	2.549,82	97,72	2.945,58	3.038,62	103,16	96,81
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.263,89	2.077,15	91,75		2.448,19	89,03	3.081,22	2.826,88	91,75	2.930,93	2.811,23	95,92	2.956,05	2.455,94	83,08	90,31
			2.749,75														
5.1.5	Belanja Hibah	1.314,40	1.270,81	96,68	1.396,52	1.349,81	96,66	346,64	314,46	90,72	396,75	390,36	98,39	567,89	482,74	85,01	93,49
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	34,88	29,01	83,16	61,53	51,81	84,20	44,80	41,74	93,17	35,82	35,43	98,91	44,13	17,65	40,01	79,89
5.2	BELANJA MODAL	1.066,97		86.15	1.249,56	1018.46	86.15	1.816,29	1.508,53	86.15	2.167,53	2.082,95	86.15	2.211,68	1.887,69	85,35	85,35
			919,25														
5.2.1	Belanja Modal Tanah	10,89	10,06	92,39		0,80	100,00	-	-	-	17,74	16,53	93,18	20,70	1,94	9,40	58,99
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	367,58	281,77	76,66	340,43	259,30	76,17	397,77	364,09	91,53	439,99	421,12	95,71	310,38	320,77	103,35	88,68
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	188,31	172,21	91,45	280,53	239,98	85,55	347,98	289,08	83,07	407,38	391,13	96,01	383,33	293,01	76,44	86,50
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	447,92	403,65	90,12		470,43	81,43	1.022,69	807,75	78,98	1.240,05	1.195,57	96,41	1.460,40	1.204,56	82,48	85,89
			577,70														
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	52,12	51,40	98,61		47,94	95,69	45,28	45,35	100,15	57,85	57,53	99,45		67,17	183,46	115,47
			50,10											36,61			
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,15	0,15	97,89	-	-	-	2,56	2,26	88,28	4,52	1,08	23,89	0,27	0,24	89,79	59,97
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	121,47	99,09	81,58	46,37	0,25	0,54	19,73	9,83	49,82	18,06	0,25	1,38	40,08	0	-	26,66
5.3.1	Belanja Tak Terduga	121,47	99,09	81,58	46,37	0,25	0,54	19,73	9,83	49,82	18,06	0,25	1,38	40,08	0		26,66
5.4	BELANJA TRANSFER	1.659,01	1.624,34	97,91	1.892,98	1.850,01	97,73	2.093,26	2.082,39	99,48	2.652,13	2.645,61	99,75	2.254,97	1.703,99	75,57	94,09
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.194,07	1.194,07	100,00	1.512,63	1.498,19	99,05	1.665,84	1.665,84	100,00	2.083,60	2.083,60	100,00	1.794,97	1.327,46	73,95	94,60
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	464,93	430,26	92,54	380,35	351,82	92,50	427,42	416,55	97,46	568,53	562,01	98,85	460,00	376,53	81,85	92,64
	JUMLAH BELANJA	8.818,16	8.172,71	92,68	9.715,37	8.931,70	91,93	9.807,17	9.102,47	92,81	10.810,57	10.515,65	97,27	11.020,37	9.586,63	86,99	92,34

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Berdasarkan Tabel di atas rata-rata Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2020-2024 sebesar 92,34 persen atau dengan predikat sangat tinggi yaitu terdiri dari rata-rata Realisasi Belanja Operasi sebesar 93,61 persen kategori sangat tinggi, realisasi Belanja Modal sebesar 85,35 persen, realisasi Belanja Tak Terduga sebesar 26,66 persen kategori sangat rendah dan realisasi Belanja Transfer sebesar 94,09 persen kategori sangat tinggi.

b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur adalah gambaran tentang belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja kebutuhan aparatur, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Riau ditampilkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.198 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Riau Tahun 2019-2024**

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	2	3	4	5
1	Tahun Anggaran 2024	3.038.615.203.475,94	9.586.628.436.630,25	31,70%
2	Tahun Anggaran 2023	2.549.829.683.419,00	10.515.609.539.104,00	24,25%
3	Tahun Anggaran 2022	2.318.631.227.769,00	9.102.467.422.821,38	25,47%
4	Tahun Anggaran 2021	2.213.182.776.667,00	8.931.704.166.450,55	24,78%
5	Tahun Anggaran 2020	2.153.065.317.382,00	8.172.706.474.595,31	26,34%

Sumber: diolah dari Laporan Keuangan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan persentase rata-rata 27,44 persen. Pada tahun 2020, persentase belanja kebutuhan aparatur adalah sebesar 26,34 persen dan di tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 31,70 persen.

2.5.4.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi dalam rangka menutup defisit data menyalurkan surplus. Analisis pembiayaan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah, analsis ini sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembiayaan di tahun

yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

A. Analisis Penutup Defisit Riil

Analisis sumber penutup defisit riil merupakan gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah, dan untuk mencari nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Analisis penutupan defisit riil pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan proses yang penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara efisien dan efektif.

Defisit riil terjadi pada tahun 2022-2024 yakni masing-masing senilai Rp. 408,79 milyar tahun 2022, 505,63 milyar tahun 2023 dan 87,06 milyar tahun 2024. Defisit riil ditutupi dengan penerimaan pembiayaan tahun 2022 senilai Rp. 984,05 milyar, tahun 2023 senilai Rp. 574,74 milyar dan tahun 2024 senilai Rp. 69,27 milyar jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.199 Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Riau Tahun 2020-2024

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan (%)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	8.622.824,85	9.383.001,51	8.818.669,76	10.009.979,59	9.499.559,75	2,80
	Dikurangi realisasi:						
2	Belanja Daerah	8.172.706,47	8.931.704,17	9.102.467,42	10.515.609,54	9.586.628,44	4,47
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-
A	Defisit riil	450.118,37	451.297,34	-408.797,66	-505.629,95	-87.068,69	-62,35
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	81.216,12	531.683,99	983.965,02	574.705,20	69.111,37	127,54
5	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	349,50	985,77	91,58	36,11	159,12	92,85
9	Penerimaan Piutang Daerah						
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	81.565,62	532.669,76	984.056,60	574.741,31	69.270,48	127,06
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	531.683,99	983.967,10	575.258,94	69.111,37	-17.798,21	-42,55

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Komposisi penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit riil anggaran adalah seperti pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.200 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Provinsi Riau Tahun 2020-2024**

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	81.216	531.684	983.965	574.705	69.111	127,54
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	350	986	92	36	159	92,85
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	531.684	983.967	575.259	69.111	-17.798	-42,55

Sumber: Laporan Keuangan Prov.Riau Tahun 2020-2024

B. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis sisa lebih perhitungan anggaran merupakan gambaran tentang pembentukan komposisi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Dengan mengetahui SiLPA periode sebelumnya, dapat diketahui dari mana sumber perolehan SiLPA serta seberapa besar kontribusi komponen pembentuk SiLPA tersebut.

Tabel 2.201 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Riau Tahun 2020-2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024		Rata-rata Petumbuhan
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
	Jumlah SiLPA	531.683,99	100,00	-583.374,38	100,00	-834.142,73	100,00	-1.164.163,69	100,00	-2.241.952,94	100,00	-8,65%
1	Pelampauan penerimaan PAD	16.509,70	3,11	35.790,53	-6,14	-157.734,15	18,91	-552.828,31	47,49	90.521,41	-4,04	-72,46%
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-130.618,38	-24,57	158.467,35	-27,16	28.455,66	-3,41	-315.663,96	27,12	-10.556,89	0,47	-402,33%
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,00	0,00	5.052,71	-0,87	-252,92	0,03	85,36	-0,01	1.046,14	-0,05	296,10%
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	645.443,16	121,40	-783.670,74	134,33	-704.700,84	84,48	-294.962,17	25,34	-1.433.752,22	63,95	24,11%
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Pembiayaan	349,5	0,07	985,77	-0,17	89,50	-0,01	- 794,61	0,15	- 889.211,38	39,66	27.727,00%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

C. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran. Analisis ini merupakan penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.202 Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan (%)
1.	Saldo kas neraca daerah	531.684,03	984.209,31	576.869,94	69.947,26	19.679,27	-29,00
	Dikurangi:						
2.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	
3.	Kegiatan lanjutan	0,04	242,22	1.610,99	835,90	40.811,03	152.684,59
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	531.683,99	983.967,10	575.258,94	69.111,37	-21.131,76	-43,76

Sumber: Laporan Keuangan Prov.Riau Tahun 2020-2024

2.6 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

Analisis kerangka pendanaan dilakukan guna untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

2.6.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

2.6.1.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Pada Proyeksi Pendapatan daerah menggunakan asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah meningkat dan terjadi peningkatan efektifitas penggunaan belanja daerah. Berdasarkan pada analisa kinerja pendapatan periode tahun 2020-2021 bahwa pendapatan Provinsi Riau terbesar berasal dari dana perimbangan yang bersumber dari dana alokasi umum dan pendapatan terbesar periode tahun 2022-2024 yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan transfer merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN. Proyeksi pendapatan Provinsi Riau dari tahun 2026 hingga tahun 2030 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,76 persen atau naik dari Rp. 8,811 triliun tahun 2026 naik menjadi Rp. 9,823 triliun tahun 2030. Proporsi kenaikan pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dari Rp. 4,719 triliun tahun 2026 menjadi 5,506 triliun tahun 2030 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,93 persen per tahun. Selanjutnya, proyeksi pendapatan transfer naik dari Rp. 4,088 triliun tahun 2026 menjadi 4,307 triliun tahun 2030 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,31 persen per tahun. Selanjutnya, proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah naik dari Rp. 2,939 miliar tahun 2026 menjadi 9,159 miliar tahun 2030 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 52,92 persen per tahun. Proyeksi pendapatan ini diperoleh dari asumsi penerimaan pendapatan daerah untuk mendanai target pembangunan 5 (lima) tahun kedepan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau. Namun demikian, bila dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan program prioritas pembangunan daerah belum sepenuhnya memadai untuk menjamin keberlanjutan pendanaan untuk mencapai target pembangunan secara optimal. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah ini diperlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk keberlangsungan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau. Kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui upaya sebagai berikut:

1. Memperluas basis penerimaan, antara lain dengan mengidentifikasi wajib pajak/retribusi baru dan potensial, memperbaiki basis data objek pajak/retribusi, memperbaiki penilaian dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pajak/retribusi daerah.
2. Memperkuat proses pemungutan, dengan melakukan review dan revisi serta mempercepat penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan serta memperkuat kapasitas SDM pemungut pajak dan retribusi.
3. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil maupun berkala, memperbaiki proses

pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak/retribusi.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi pemungutan pajak/retribusi melalui penyederhanaan prosedur administrasi pemungutan pajak/retribusi.
5. Kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak serta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi.
6. Optimalisasi Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Daerah melalui:
 - Mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset potensial dengan pihak swasta seperti gedung, lahan tidur, dan fasilitas daerah melalui berbagai skema seperti sewa, kerjasama dengan pihak swasta dan sebagainya.
 - Melakukan audit aset secara berkala untuk mengidentifikasi potensi aset yang dapat dikelola lebih produktif dan menguntungkan.
 - Peningkatan Kontribusi BUMD dengan memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Daerah agar lebih produktif.
7. Pengembangan Sumber Pendapatan Baru melalui:
 - Optimalisasi Dana CSR dan Kemitraan Swasta melalui peningkatan sinergi dengan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur dan layanan publik.
 - Pemanfaatan skema kredit Karbon Daerah dengan menjalin kemitraan dengan lembaga internasional yang memiliki platform untuk perdagangan kredit karbon dan perusahaan yang tertarik untuk berkontribusi pada pengurangan emisi melalui proyek lokal.

2.6.1.2 Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk dapat meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban akan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.

Sementara itu, belanja daerah diproyeksi hanya akan mengalami peningkatan sebesar 2,63 persen per tahun atau naik 8,881 triliun tahun 2026 menjadi Rp. 9,851 triliun tahun 2030. Proporsi belanja terbesar masih berada pada belanja operasi dengan komposisi sebesar 69,04% tahun 2026 dan menaik sebesar 69,81% tahun 2030. Komposisi kenaikan tertinggi pada belanja operasi adalah belanja pegawai dengan proporsi tahun 2026 sebesar 36,77% turun menjadi 36,38% tahun 2030. Proporsi belanja modal naik dari 9,28% tahun 2026 naik menjadi 9,96% tahun 2030.

2.6.1.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah diproyeksi mengalami penurunan sebesar 15,13 persen per tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.203 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2026-2030

Uraian	Proyeksi					Rata - Rata Pertumbuhan
	2026	2027	2028	2029	2030	
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.719.867.665.177,19	4.855.292.527.048,00	5.082.821.921.266,00	5.316.446.249.329,00	5.506.581.512.376,00	3,93
Pendapatan Pajak Daerah	3.867.633.160.617,00	4.014.799.841.137,00	4.171.166.678.037,00	4.333.592.390.495,00	4.502.313.880.550,00	3,87
Pendapatan Retribusi Daerah	14.364.293.200,00	13.354.639.200,00	13.906.785.100,00	14.496.476.010,00	15.010.869.911,00	1,22
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	275.220.000.000,00	192.369.098.245,00	210.405.948.885,00	228.252.579.249,00	242.568.819.194,00	- 1,49
Lain-lain PAD yang Sah	562.650.211.360,19	634.768.948.466,00	687.342.509.244,00	740.104.803.575,00	746.687.942.721,00	7,42
PENDAPATAN TRANSFER	4.088.685.707.000,00	4.134.465.886.640,00	4.190.008.135.626,00	4.247.772.074.570,00	4.307.846.571.073,00	1,31
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.088.685.707.000,00	4.134.465.886.640,00	4.190.008.135.626,00	4.247.772.074.570,00	4.307.846.571.073,00	1,31
Dana Perimbangan	4.088.685.707.000,00	4.134.465.886.640,00	4.190.008.135.626,00	4.247.772.074.570,00	4.307.846.571.073,00	1,31
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	-	-	-	-	-	-
Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.939.052.000,00	9.159.952.000,00	9.159.952.000,00	9.159.952.000,00	9.159.952.000,00	52,92
Pendapatan Hibah	2.939.052.000,00	9.159.952.000,00	9.159.952.000,00	9.159.952.000,00	9.159.952.000,00	52,92
JUMLAH PENDAPATAN	8.811.492.424.177,19	8.998.918.365.688,00	9.281.990.008.892,00	9.573.378.275.899,00	9.823.588.035.449,00	2,76
BELANJA DAERAH						
BELANJA OPERASI	6.131.523.771.317,78	6.332.686.865.849,54	6.521.653.631.447,25	6.715.624.923.407,01	6.876.777.648.321,66	2,91
Belanja Pegawai	3.260.364.157.786,57	3.376.766.553.130,37	3.444.301.884.192,98	3.513.187.921.876,83	3.583.451.680.314,37	2,39
Belanja Barang dan Jasa	2.646.746.866.691,21	2.731.507.565.879,17	2.852.939.000.414,28	2.978.024.254.690,18	3.068.913.221.167,29	3,77
Belanja Hibah	204.839.012.000,00	204.839.012.000,00	204.839.012.000,00	204.839.012.000,00	204.839.012.000,00	-
Belanja Bantuan Sosial	19.573.734.840,00	19.573.734.840,00	19.573.734.840,00	19.573.734.840,00	19.573.734.840,00	-
BELANJA MODAL	823.819.813.964,41	875.972.666.221,16	913.692.222.377,65	952.546.743.787,79	980.779.066.729,24	4,46

Uraian	Proyeksi					Rata - Rata Pertumbuhan
	2026	2027	2028	2029	2030	
BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	37,50
Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	37,50
BELANJA TRANSFER	1.906.148.838.895,00	1.767.758.833.617,30	1.824.144.155.067,10	1.882.706.608.704,20	1.943.531.320.398,10	- 0,29
Belanja Bagi Hasil	1.696.293.838.895,00	1.557.903.833.617,30	1.614.289.155.067,10	1.672.851.608.704,20	1.733.676.320.398,10	0,68
Belanja Bantuan Keuangan	209.855.000.000,00	209.855.000.000,00	209.855.000.000,00	209.855.000.000,00	209.855.000.000,00	-
JUMLAH BELANJA	8.881.492.424.177,19	9.026.418.365.688,00	9.309.490.008.892,00	9.600.878.275.899,00	9.851.088.035.449,00	2,63
Total Surplus/(Defisit)	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN DAERAH	70.000.000.000,00	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.000.000.000,00	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	- 15,18
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.000.000.000,00	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	- 15,18
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	70.000.000.000,00	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	- 15,18
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-	-	-

Sumber: Bapenda Provinsi Riau, BPKAD Provinsi Riau Tahun 2025 dan Hasil Analisis

2.6.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2026-2030 menggunakan hasil dari perhitungan kinerja rata-rata pertumbuhan belanja kurun waktu 2020-2024. Berdasarkan analisis tersebut sehingga diketahui nilai dan tingkat pertumbuhan Belanja Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dari periode tahun 2026-2030 ditunjukkan pada Tabel di bawah.

2.6.2.2 Peta Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk:

- a. Pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah;
- b. Penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan;
- c. Pertimbangan dalam pembentukan dana abadi daerah;
- d. Pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah; dan/ atau
- e. Penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Proyeksi kapasitas fiskal Provinsi Riau Tahun 2026 sebesar 0,928. Untuk proyeksi tahun 2026 - 2030 mengalami kenaikan. Rasio kapasitas fiskal tahun 2026 hingga 2030 dikelompokkan pada kategori sedang yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.204 Proyeksi Kapasitas Fiskal Provinsi Riau 2026 – 2030

No	Uraian	Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4.719.867.665.177,19	4.855.292.527.048,00	5.082.821.921.266,00	5.316.446.249.329,00	5.506.581.512.376,00
2	Pendapatan Transfer	4.088.685.707.000,00	4.134.465.886.640,00	4.190.008.135.626,00	4.247.772.074.570,00	4.307.846.571.073,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.939.052.000,00	9.159.952.000,00	9.159.952.000,00	9.159.952.000,00	9.159.952.000,00
4	Belanja Pegawai	3.260.364.157.786,57	3.376.766.553.130,37	3.444.301.884.192,98	3.513.187.921.876,83	3.583.451.680.314,37
5	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
6	Belanja Bagi Hasil	1.906.148.838.895,00	1.767.758.833.617,30	1.824.144.155.067,10	1.882.706.608.704,20	1.943.531.320.398,10
7	Penerimaan Pembiayaan	70.000.000.000,00	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00
8	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
KAPASITAS FISKAL = (1+2+3+7) - (4+5+6+8)		3.775.374.632.495,39	3.714.979.427.495,62	3.881.892.978.940,33	4.041.043.969.631,92	4.204.983.745.317,97
RASIO KAPASITAS FISKAL		1,158	1,139	1,150	1,173	1,197

Sumber: Hasil Analisis

2.7 Kebijakan Keuangan Daerah

2.7.1 Alternatif Pembiayaan Pembangunan

A. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Pemerintah Provinsi Riau menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Pemerintah Provinsi Riau dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. PP Nomor 1 Tahun 2024 mengatur mengenai Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Harmonisasi kebijakan fiskal nasional dalam rangka penyelarasan hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi penyelenggaraan: a) sinergi kebijakan fiskal nasional; b) Pembiayaan Utang Daerah; c) Dana Abadi Daerah; dan d) Sinergi Pendanaan.

Pinjaman Daerah merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Riau untuk menutup defisit untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Pinjaman ini menjadi alternatif pembiayaan guna menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan dan menutup kekurangan arus kas. Pemerintah Provinsi Riau dapat meneruskannya kepada BUMD sebagai pinjaman, hibah dan/atau penyertaan modal dalam kerangka hubungan Pemerintah Provinsi Riau dengan BUMD nya. Pemerintah Pusat menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah Provinsi Riau dengan memperhatikan keadaan dan prakiraan perkembangan perekonomian. Pengelolaan pinjaman daerah harus memenuhi prinsip taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dan kehati-hatian. Pinjaman Daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Lembaga Keuangan Bank, Pemerintah Daerah Lain dan dari Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Syarat Pinjaman Daerah antara lain adalah:

1. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD Pemerintah Provinsi Riau tahun sebelumnya
2. Memenuhi rasio kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Riau untuk mengembalikan pinjaman (DCSR) yang ditetapkan pemerintah pusat
3. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh calo pemberi pinjaman
4. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada pemerintah pusat, apabila pinjaman daerah yang akan diajukan bersumber dari Pemerintah Pusat.
5. Mendapat persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan panjang.

B. KPBU (Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha)

Alternatif pembiayaan lainnya adalah melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU). KPBU merupakan salah satu bentuk pembiayaan public private partnership yaitu bentuk kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam pengadaan infrastruktur publik dengan menciptakan keuntungan diantara mitra kerjasama. Di Indonesia *Public-Private Partnership* (PPP) dikenal dengan nama KPBU yaitu untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial dan mendukung aktivitas *Project Development Facility* (PDF), *Vialibiliy Gap Fund* (VGF) yaitu dengan pemberian dukungan fiskal oleh pemerintah, *Availability Payment* (AP) melalui pembayaran berkala oleh pemerintah kepada badan usaha dan Penjaminan Infrastruktur.

Tujuan utama dalam pelaksanaan KPBU adalah:

1. Menjawab permintaan pembiayaan secara berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur dengan melibatkan modal swasta.
2. Mengimplementasikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan target dan waktu yang diberikan dan infrastruktur tersebut harus berkualitas dan berdampak secara umum.
3. Menciptakan ruang yang mendukung keterlibatan swasta dalam investasi pembangunan infrastruktur dengan mengikuti prinsip persaingan usaha yang sehat.

4. Mendorong penggunaan prinsip penggu membayar fasilitas yang digunakan dengan memastikan kemampuan pengguna dalam membayar fasilitas terkait.
5. Pengembalian modal badan usaha dijamin oleh pemerintah melalui pembayar ketersediaan layanan yang disediakan badan usaha.

C. Obligasi Daerah

Obligasi merupakan Pinjaman Jangka Panjang yang berasal dari masyarakat untuk membiayai proyek infrastruktur publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Obligasi Daerah untuk membiayai proyek/kegiatan prasarana dan/atau sarana publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Pinjaman yang bersumber dari masyarakat berupa surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Riau dapat menerbitkan Obligasi Daerah sepanjang memenuhi persyaratan pinjaman dan hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah.

Jenis obligasi yang dapat diterbitkan Pemerintah Provinsi Riau adalah:

1. *General Bond*: Obligasi yang dijamin oleh Keuangan Pemerintah Provinsi Riau.
2. *Revenue Bond*: Obligasi yang dijamin pengembaliannya dari hasil pengelolaan proyek.
3. *Double Barreled Bond*: Selain di jamin oleh hasil dari proyek juga di jamin pembayarannya dari Keuangan Daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, disebutkan bahwa obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah:

1. Harus digunakan untuk membiayai Proyek yang menghasilkan pendapatan dan untuk kepentingan publik.
2. Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah masuk ke dalam Kas Daerah (APBD).

3. Jika proyek yang dibiayai oleh Obligasi Daerah belum menghasilkan, maka Pemerintah Daerah wajib untuk menutupi kebutuhan pembiayaan untuk pembayaran bunga obligasi tersebut.

D. PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran)

PINA merupakan mekanisme pembiayaan proyek investasi prioritas yang dananya bersumber selain dari Anggaran Pemerintah yang didorong dan difasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas. Tujuannya adalah untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional, memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi dalam negeri, melakukan konsolidasi dana jangka Panjang, meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional, menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik, mengoptimalkan kontribusi Penerima Modal dan Penanam Modal terhadap proyek-proyek pembangunan Indonesia, dan untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan investasi melalui optimalisasi aset untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang mempunyai nilai komersial.

Prioritas proyek yang dipilih untuk didanai dengan skema PINA yaitu mendukung pencapaian target prioritas pembangunan, memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia, memiliki kelayakan komersial dan memenuhi kriteria kesiapan (*readlines criteria*). Sumber pembiayaan PINA yaitu penanaman modal, dana kelolaan, perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lain; dan pembiayaan lain yang sah.

E. Hibah

Hibah adalah penerimaan daerah berupa bantuan yang berasal dari pemerintah/lembaga asing, pemerintah/lembaga dalam negeri dan perorangan yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah.

F. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) adalah kegiatan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat kepada ekonomi, sosial, lingkungan

serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang terintergrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan. (Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012).

G. Mitra Pembangunan

Mitra pembangunan berperan penting memperluas jaringan dengan lembaga pembangunan dunia yang dapat dimanfaatkan untuk pendanaan publik di Provinsi Riau melalui skema bilateral maupun multilateral. Mitra Pembangunan saat ini memberikan alokasi yang cukup besar untuk pembiayaan perubahan iklim, pertanian dan infrastruktur. Dana ini dikelola oleh Badan yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

H. Filantropi

Pemerintah dapat mengidentifikasi lembaga filantropi baik yayasan pribadi, keluarga maupun kelompok masyarakat yang selama ini sudah memberikan kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan terutama dalam pencapaian target SDG's. Contoh Filantropi yang sudah berkontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Riau antara lain: Tanoto Foundation, LAZISMU, dan sebagainya.

2.7.2 Kebijakan Belanja Pegawai

Pentingnya kebijakan penganggaran untuk tunjangan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mendorong Pemerintah Provinsi Riau untuk menganggarkan tunjangan PPPK yang bekerja pada instansi daerah. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja mengatur tunjangan PPPK terdiri atas: tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan structural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya. Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Formasi pengangkatan PPPK akan meningkatkan defisit anggaran dari gaji dan tunjangan yang telah diproyeksikan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau telah mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan nilai relatif kecil. Dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) saja yang mendapatkan TPP setiap bulannya, dari anggaran dan disesuaikan besarnya dengan APBD Provinsi Riau.

Perlu adanya perubahan alokasi agar anggaran disesuaikan dengan pengeluaran pembayaran tunjangan PPPK. Pasalnya, kebijakan ini termasuk dalam kriteria mendesak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Riau dalam hal penganggaran belanja gaji dan tunjangan bagi PPPK yang belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam APBD, maka Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan pergeseran anggaran untuk menambahkan alokasi anggaran dimaksud dikarenakan memenuhi kriteria mendesak sebagaimana amanat Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

2.7.3 Analisis Bantuan Keuangan

a. Bantuan Keuangan Desa

Tujuan diberikannya Bantuan Keuangan Desa adalah untuk mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka akses hasil produksi dan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan, meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau selama kurun waktu tahun 2019-2024 telah menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa. Total jumlah bantuan yang diserahkan selama lima tahun tersebut berjumlah Rp. 1,447 Triliun. Total desa yang mendapatkan BKK di Riau sebanyak 1.591 yang tersebar di 10 kabupaten di Riau dengan rincian desa di Kabupaten Kampar sebanyak 242 desa, Indragiri Hulu sebanyak 178 desa, Bengkalis sebanyak 136, Indragiri Hilir sebanyak 197 desa, Pelalawan sebanyak 104 desa, Rokan Hulu sebanyak 139 desa, Rokan Hilir sebanyak 159 desa, Siak sebanyak 122 desa,

Kuantan Singingi sebanyak 218 desa dan Kepulauan Meranti sebanyak 96 desa.

Alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa per tahunnya yakni Tahun 2019 sebesar Rp. 318,20 Milyar, Tahun 2020 sebesar Rp. 135,23 Milyar, Tahun 2021 sebesar Rp. 159,10 Milyar, Tahun 2022 sebesar Rp. 238,65 Milyar dan Tahun 2023 sebesar Rp. 278,42 Milyar. BKK dari Pemerintah Provinsi Riau dengan lingkup kegiatan, meliputi pembangunan/ peningkatan jalan desa, pembangunan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi serta pengairan desa dan pembangunan sarana dan prasarana desa lainnya yang mendesak dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa akan memberikan dampak secara langsung bagi pembangunan kualitas hidup masyarakat Desa dalam menjalankan perekonomian, pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan Bantuan Keuangan Desa (BKK) merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa melalui pemberian dana atau bantuan keuangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Tujuan dari kebijakan ini mencakup beberapa aspek penting, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kemandirian Desa

- Penguatan Kapasitas Keuangan Desa: Dengan bantuan keuangan, desa dapat memiliki dana yang cukup untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas setempat, sehingga mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat atau daerah.
- Mendorong Pengelolaan Keuangan yang Efektif: BKK bertujuan untuk mengembangkan kemampuan desa dalam mengelola keuangan secara mandiri, transparan, dan akuntabel.

2. Mendukung Pembangunan Infrastruktur Desa

- Pembangunan Fasilitas Publik: BKK digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya

yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

- Meningkatkan Aksesibilitas: Bantuan keuangan membantu desa dalam memperbaiki infrastruktur transportasi dan komunikasi, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas dengan daerah lain.

3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

- Pemberdayaan Ekonomi: BKK digunakan untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- Pengentasan Kemiskinan: Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di desa dengan menyediakan bantuan yang langsung dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat.

4. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

- Penguatan Partisipasi Warga: BKK mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Dengan demikian, program dan proyek yang dilaksanakan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
- Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa: Bantuan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan secara partisipatif.

5. Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Tingkat Desa

- Penyelarasan dengan SDGs Desa: Kebijakan BKK dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pelestarian lingkungan.
- Pembangunan Desa Berbasis Lingkungan: Bantuan keuangan juga dapat digunakan untuk mendanai program-

program yang mendukung kelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

6. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa

- **Transparansi dan Akuntabilitas:** BKK mendorong penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, yang merupakan kunci untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana.
- **Pelaporan dan Pengawasan:** Tujuan lain dari BKK adalah untuk meningkatkan sistem pelaporan dan pengawasan penggunaan dana, baik oleh pemerintah desa maupun oleh masyarakat, sehingga program-program yang dibiayai dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal.

7. Memitigasi Dampak Krisis atau Bencana di Tingkat Desa

- **Respon Terhadap Krisis:** BKK dapat digunakan untuk merespons kondisi darurat seperti bencana alam atau krisis ekonomi dengan cepat, melalui penyediaan dana darurat atau dukungan langsung kepada masyarakat yang terdampak.
- **Pemulihan dan Rehabilitasi:** Bantuan keuangan juga dapat dialokasikan untuk kegiatan pemulihan dan rehabilitasi pasca- bencana, sehingga desa dapat kembali berfungsi normal dan masyarakat dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik.

Dengan kebijakan Bantuan Keuangan Desa, diharapkan desa-desa di Provinsi Riau dapat berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mencapai kesejahteraan yang merata.

b. Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni

Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau merupakan dukungan Pemerintah Provinsi kepada masyarakat melalui Program Pengembangan Perumahan dan/atau Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada Dinas teknis terkait. Program ini berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat miskin/poor sejahtera akibat Resiko Sosial yang dapat menimbulkan potensi terjadinya

kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sendiri merupakan program berbasis pemberdayaan yang dilaksanakan dengan pola swakelola oleh kelompok masyarakat (POKMAS) untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan.

Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau dilaksanakan di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Usulan dalam bentuk Proposal dari masyarakat disampaikan kepada Kabupaten/Kota dan akan dilakukan Evaluasi dan Verifikasi oleh Dinas yang menangani Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten/Kota sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan terhadap calon penerima bantuan Rumah Layak Huni. Penetapan lokasi Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dilakukan oleh Bupati/Walikota se-Provinsi Riau.

2.8 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan Provinsi Riau 5 (lima) tahun terakhir dan Evaluasi indikator program, dapat disimpulkan sebagai berikut:

2.8.1. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul dan Sejahtera

1. Rendahnya Kualitas Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Provinsi Riau masih rendah dimana pada tahun 2024 masyarakat Riau baru menamatkan pendidikan pada angka 9,43 tahun, hal ini menunjukkan ketidaktuntasan pendidikan dasar dan menengah 13 tahun atau masih pada jenjang SMA kelas 1. Disamping itu masih terdapat ketimpangan pada Kabupaten/Kota, yaitu Kab. Indragiri Hilir, Kab. Kepulauan Meranti, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu, Kab. Pelalawan masih berada pada Pendidikan dasar. Pada tahun 2024, Angka partisipasi sekolah pada umur 16-18 tahun sebesar 78,49 lebih rendah dari APS pada umur 13-15 sebesar 95,94 , sehingga terdapat anak yang tidak melanjutkan atau putus sekolah di jenjang SMA/SMK/MA. Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 tahun berdasarkan status kesejahteraan penduduk khususnya di Kuintil 1 terdapat 19,36% yang tidak bersekolah. Namun hal ini juga terjadi pada penduduk dengan status kesejahteraan tertinggi yaitu di Kuntil 5 sebesar 19,60%. Sedangkan

berdasarkan Angka Partisipasi Murni terdapat 35,49% lebih penduduk miskin yang tidak bersekolah di SMA/ sederajat sedangkan kelompok penduduk kaya di kuintil 5 terdapat 31,15% penduduk kaya yang tidak bersekolah di SMA/ sederajat. Berdasarkan data tersebut diatas perlu dilakukan peningkatan kualitas pendataan anak yang tidak sekolah dan penguatan pola asuh pendidikan keluarga.

Terkait mutu Pendidikan di Provinsi Riau belum optimal, hal ini dilihat dari kemampuan angka literasi dan numerasi Provinsi Riau tahun 2024 dengan nilai 60-70 %, ,dan juga literasi Masyarakat dilihat dari Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dengan nilai 69,25 (kategori sedang), selanjutnya belum tingginya mutu pendidikan di provinsi riau juga dicerminkan oleh masih rendahnya mutu tenaga pendidik yang disebabkan oleh masih rendah guru yang belum memenuhi kualifikasi dan sertifikasi (<40 persen), dan masih terbatasnya guru yang memiliki kompetensi didik berbasis gender. Untuk sekolah kejuruan, mutu pendidikan juga masih bermasalah dimana belum terpenuhinya standar kualitas lulusan akibat belum optimal *link and match* nya kurikulum pendidikan dengan dunia usaha dan lulusan yang dihasilkan belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar dunia kerja.

2. Akses Layanan Kesehatan yang Belum Merata

Provinsi Riau masih mengalami kendala dalam hal fasilitas dan tenaga kesehatan khususnya pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas, serta penerapan dalam hal sistem jaminan kesehatan nasional dimana kepesertaan belum mencapai target yang diharapkan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terdapat beberapa daerah yang secara geografis terutama daerah pesisir dimana jarak fasilitas layanan kesehatan rujukan yang jauh dari pemukiman seperti di Kecamatan Mendol Kabupaten Pelalawan dan Kecamatan Kateman kabupaten Indragiri Hilir memperoleh layanan rujukan di Provinsi Kepulauan Riau. Permasalahan ini menjadi

kendala bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan rujukan terstandar, cepat dan responsif, begitu juga layanan bagi penyandang disabilitas.

3. Belum tingginya Mutu Layanan Kesehatan

Belum tingginya mutu layanan Kesehatan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : belum optimalnya penguatan layanan primer dan rujukan layanan Kesehatan, terbatasnya pemenuhan SDM Kesehatan baik dari sisi jumlah, kompetensi, dan sebaran yang belum merata, pemenuhan sarana prasarana dan alat Kesehatan yang terbatas dan peran para pihak yang belum berkontribusi sebagaimana mestinya, disamping itu belum optimalnya tata kelola sistem rujukan.

4. Belum Optimalnya Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKM-UKP)

Belum Optimalnya Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKM-UKP) di Provinsi Riau terlihat dari masih rendahnya peran keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat dalam upaya penerapan pola hidup bersih (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), disamping itu pendekatan siklus hidup belum sepenuhnya diterapkan dalam penanganan kesehatan baik di masyarakat maupun kesehatan perorangan. Hal ini juga dipengaruhi oleh masih lemahnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan masih terdapatnya gizi buruk dan stunting.

5. Belum Optimalnya Layanan Perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebanyak 2.016.080 jiwa dengan PPKS yang terbanyak adalah 1). Fakir Miskin sebanyak 1.907.359 jiwa, 2). Lanjut Usia Terlantar sebanyak 32.253 jiwa, 3). Anak terlantar sebanyak 35.047 jiwa dan 4). Penyandang Disabilitas sebanyak 7.659 jiwa. Adapun kabupaten yang tertinggi jumlah PPKS nya adalah kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 349.169 jiwa dan kabupaten yang terendah

jumlah PPKS nya adalah kabupaten Pelalawan sebanyak 9.945 jiwa. Oleh karena itu dalam rangka melakukan pelayanan dan untuk memperkecil angka PPKS yang maka perlu dilakukan peningkatan layanan dan perlindungan terhadap PPKS yang angka masih tinggi serta menyiapkan sarana prasarana layanan yang sesuai standar dengan kriteria PPKS yang ada. Dari jumlah PPKS yang ada belum semuanya bisa terlayani dengan baik ini dapat dilihat penurunan angka PPKS yang ada dari tahun 2023 sebanyak 2.155.167 jiwa menjadi 2.016.080 jiwa pada tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 139.087 jiwa. Ini menunjukkan baru 139.097 jiwa PPKS yang ada keluar dari status PPKS dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya.

Masih belum optimalnya layanan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Provinsi Riau dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya masih belum optimalnya upaya peningkatan kualitas layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama didalam panti, termasuk belum terpenuhi sarana dan prasarana yang memadai dan belum optimalnya upaya peningkatan kelembagaan PSKS. Upaya Peningkatan keLembagaan Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dilakukan belum optimal baik dari segi pemberdayaan manajemen Layanan LKS maupun upaya meningkatkan kemandirian LKS secara ekonomi agar memiliki sumber pendapatan sendiri sehingga tidak terlalu bergantung dari subsidi pemerintah dan donatur.

Disisi lain belum optimalnya layanan ini juga dipengaruhi oleh belum sempurnanya manajemen DTKS yang berkeadilan dan ketersediaan data sosial yang tidak update. Berdasarkan data Kepemilikan Jaminan sosial setidaknya memiliki satu jaminan sosial untuk masyarakat di kelompok kesejahteraan terdapat kuintil 1 terdapat 72,85% atau sebanyak 214.020 jiwa tidak punya jaminan sosial. Program bantuan sosial daerah sebenarnya sudah

mensasar 12,75% penduduk miskin. Namun, masih terdapat tumpang tindih penerima bantuan yaitu dari pusat dengan daerah yang tidak komplementer. Sementara itu masih banyak penduduk di Desil 1-4 yang belum mendapatkan bantuan sosial.

6. Masih rendahnya Produktifitas Tenaga kerja pada beberapa Lapangan Usaha

Masih rendahnya produktivitas tenagakerja pada beberapa Lapangan Usaha di Provinsi Riau dimana tingkat Produktivitas tenagakerja Provinsi Riau mengalami penurunan pada tahun 2023 ke 2024 sebesar 1,65 %. Sektor yang mengalami penurunan adalah pertambangan dan penggalian, Industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa Pendidikan, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2024, penduduk bekerja di Provinsi Riau masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 29,53 persen dan Sekolah Menengah Atas sebesar 29,09 persen.

Kurangnya produktivitas tenagakerja dipengaruhi oleh tingkat pendidikan maupun skill yang dimiliki oleh tenagakerja terutama kompetensi yang masih belum memadai dan tingkat pendidikan tenaga kerja yang kebanyakan tamatan SD ke bawah.

7. Terbatasnya Akses Kesempatan Kerja Responsif Gender

Terbatasnya akses perluasan kesempatan kerja yang responsif gender di provinsi Riau dipengaruhi oleh investasi yang masuk padat modal, tidak beragamnya usaha atau sub usaha yang masuk, belum sinkronnya rencana tenagakerja yang terintegrasi antara rencana tenaga kerja pemerintah dengan rencana tenaga kerja dunia usaha sebagai dasar informasi kesempatan kerja, serta masih

lemahnya pengawasan dan penegakkan aturan hukum ketenagakerjaan termasuk kesempatan kerja yang inklusif gender terutama penyandang disabilitas yang belum termanfaatkan oleh pasar kerja serta masih minimnya angkatan kerja yang berwirausaha, hal ini karena terbatasnya kompetensi dan rendahnya akses permodalan dan masih banyaknya penyandang disabilitas

8. Masih tingginya angka ketergantungan

Terkait kondisi demografi, juga memiliki keterkaitan dengan angka ketergantungan penduduk pada daya saing SDM. Rasio ketergantungan Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 45,58% ini berarti bahwa untuk setiap 100 orang usia produktif, ada sekitar 45 orang yang berada dalam kelompok usia bergantung (baik usia muda maupun usia tua). Rasio ini sebagai gambaran tentang beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja untuk mendukung mereka yang tidak aktif secara ekonomi. Ketika terjadi penurunan rasio ketergantungan penduduk hingga dibawah 50, pada saat itu situasi kependudukan memasuki Bonus Demografi yang harus dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan. Hal yang menjadi persoalan yang perlu dituntaskan oleh Pemerintah Provinsi Riau adalah kesiapan tenaga kerja usia produktif yang terampil dan produktif, memperluas kesempatan kerja produktif serta meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia di era globalisasi saat ini.

2.8.2. Belum Optimalnya Nilai Tambah Komoditi Unggulan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi

1. Belum Optimalnya Hilirisasi Produk Komoditi Unggulan

Masih kurangnya investasi yang mendorong hilirisasi produk komoditi unggulan Provinsi Riau, sehingga produk komoditi unggulan tersebut diekspor keluar dalam bentuk bahan baku atau setengah jadi. Hal ini mengakibatkan rendahnya nilai tambah yang didapatkan daerah dan sedikitnya penyerapan tenaga kerja lokal akibat belum tersedia tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan

ekonomi produktif di Provinsi Riau. Beberapa hal yang menyebabkan permasalahan ini antara lain belum optimalnya penyiapan dan pengelolaan kawasan industri yang ada, sehingga saat ini investasi di Provinsi Riau masih terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu seperti Kabupaten Pelalawan, Siak dan Kota Dumai.

2. Kurangnya Daya Tarik Wisata

Kurangnya daya tarik wisata menjadi permasalahan yang dihadapi Provinsi Riau dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata. Hal ini disebabkan belum optimalnya prasarana wilayah dan amenitas pariwisata pada beberapa destinasi wisata yang ada di Provinsi Riau, sehingga mempengaruhi lama menginap wisatawan baik asing maupun domestik.

Potensi desa wisata di Provinsi Riau cukup banyak yang dapat dijadikan sebagai potensi desa yang dapat dikelola oleh BUMDes sebagai unit usaha, namun sampai saat ini belum di kelola secara optimal, Kawasan desa wisata tersebut dapat di kelola secara bersama oleh desa menjadi BUMDes Bersama dengan membangun Kawasan Perdesaan wisata. Dalam upaya pemberdayaan Desa hal tersebut belum dilakukan secara optimal dan terintegrasi sehingga upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan Desa wisata belum mampu meningkatkan PADes maupun PAD serta belum dapat mengembangkan wisata dan mengundang lebih banyak datangnya wisatawan ke Provinsi Riau.

2. Lemahnya daya saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dipasar lokal dan global

Lemahnya daya saing koperasi menyebabkan rata-rata pertumbuhan jumlah koperasi non aktif (6%) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan koperasi aktif (1,84%) selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Begitu juga disektor UKM, belum mampu bersaing di pasar lokal dan global dikarenakan masih terbatasnya skala usaha. Hal ini mengakibatkan UKM yang ada belum mampu membangun

kemitraan dengan perusahaan menengah dan besar. Akses terhadap permodalan usaha menjadi permasalahan utama yang dihadapi pelaku UKM dalam meningkatkan skala usahanya. Disamping itu, informasi terhadap pelayanan izin usaha dan kurangnya inovasi pemasaran produk UKM juga menjadi permasalahan yang dihadapi pelaku UKM.

3. Belum Tergalinya Objek Pajak Potensial yang Mendukung Pendapatan Daerah

Beberapa objek pajak potensi yang mendukung pendapatan asli daerah belum tergali secara optimal, sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah, seperti Pajak Alat Berat (PAB) dan Pajak Air Permukaan (PAP). Padahal dua jenis pajak ini memiliki potensi pendapatan yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Masalah pendataan dan pemungutan pajak di lapangan menjadi permasalahan krusial yang dihadapi saat ini, akibat belum optimalnya penerapan regulasi dan kebijakan dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah.

3. Masih Terdapat Wilayah Rentan Pangan

Kapasitas produksi pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk yang disebabkan belum optimalnya pengelolaan lahan pertanian, tingginya konversi lahan pertanian ke peruntukan lain, serta tingginya angka pertumbuhan penduduk. Terbatasnya akses terhadap pangan yang disebabkan rendahnya daya beli karena kemiskinan serta infrastruktur dasar kurang memadai khususnya wilayah pulau dan terpencil. Rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang disebabkan karena Masih kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap produk pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman akan mempengaruhi pola pangan yang dikonsumsi.

4. Belum Optimalnya Infrastruktur Pertanian (Irigasi)

Produksi pertanian belum meningkat akibat infrastruktur

sawah belum optimal seperti penanganan saluran irigasi yang menjadi kewenangan provinsi dalam kondisi belum baik rata-rata dibawah 50 persen baik Daerah Irigasi Permukaan (DI) maupun Daerah Irigasi Rawa (DIR).

2.8.3. Belum Optimalnya Tatakelola Pemerintahan Yang Berintegritas dan Adaptif

1. Belum Optimalnya tatakelola Pemerintah dan ASN yang berintegritas dan adaptif

Belum optimalnya tatakelola pemerintah yang berintegritas dan adaptif dipengaruhi oleh faktor belum optimalnya sinkronisasi tatakelola perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan umpan balik perbaikan selama proses tatakelola pemerintahan yang dimaksud. Disamping itu, masih lemahnya penegakkan hukum dalam tatakelola pemerintahan. Selanjutnya belum optimalnya manajemen ASN, penerapan merit sistem, peningkatan kompetensi ASN dan penerapan Reward and Punishment serta penegakan disiplin ASN.

2. Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Desa

Belum optimalnya pengelolaan potensi desa di Provinsi Riau dapat dilihat dari masih terdapat Bumdes dengan klasifikasi dasar/perintis. Kabupaten dengan jumlah klasifikasi Bumdes dasar/perintis terbanyak yaitu kabupaten Kuantansingingi 104 Bumdes, Kampar 74 Bumdes, Indragiri Hulu 65 Bumdes, dan Indragiri Hilir 50 Bumdes. Selain itu terdapat Bumdes yang sudah tidak aktif lagi di beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu 43 Bumdes, Indragiri Hilir 97 Bumdes, Pelalawan 16 Bumdes, Rokan Hulu 27 Bumdes, Rokan Hilir 111 Bumdes, Siak 10 Bumdes, Kuansing 69 Bumdes dan Kep Meranti 40 Bumdes. Dari keseluruhan Bumdes tersebut, unit usaha yang dijalankan juga belum optimal berbasis kepada potensi dan keunggulan desa yang ada. Hal ini dipengaruhi oleh masih lemahnya kelembagaan yang mengelola potensi desa yang diakibatkan sumber daya manusia mengelola

belum memiliki kapasitas yang memadai, terbatasnya infrastruktur pelayanan dasar di pedesaan, tingkat kesulitan geografis di beberapa desa, belum sinkronnya kebijakan pembangunan desa dengan potensi yang dimiliki desa.

Potensi yang dimiliki desa diharapkan menjadi dasar dalam pendirian Badan Usaha milik Desa (BUMDes), unit – unit usaha yang dijalankan BUMDes diharapkan dapat menciptakan *Branding* Desa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat desa dengan keterlibatannya dan kerjasama masyarakat dan BUMDes dalam pengelolaan Potensi Desa. Desa belum sepenuhnya dapat mengambil peluang yang ada dari keunggulan kompetitif yang ada dan keunggulan komperatif yang membutuhkan kreatifitas. Peran Pemerintah dalam hal ini masih belum optimal.

Pembangunan kawasan pedesaan, menjadi penting perannya dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa yang berada dalam satu kawasan yang memiliki potensi yang sama. Namun sampai saat ini Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Riau belum memberikan kemajuan yang berarti, hal ini dapat dilihat dari progres pembangunan dalam lima tahun yang telah dilalui masih pada tahap Surat Keputusan penetapan Kawasan Pedesaan oleh Kepala Daerah. Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan Daerah (RPKPD) belum tersusun sebagaimana yang diharapkan. Hal ini sangat diperlukan dalam upaya memasukkan Provinsi Riau dalam Target Nasional dalam Kawasan Pedesaan Prioritas Nasinal dalam APBN.

Pemberdayaan masyarakat desa di era global ini juga sangat membutuhkan mordenisasi dalam pengelolaan manajemen Desa dan ekonomi desa secara digital, namun masih banyak desa yang masih dalam zona Blankspot dan low signal, hal ini akan mempengaruhi kualitas layanan

masyarakat Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Menurunnya capaian Kinerja integritas Provinsi Riau

Hal yang perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Provinsi Riau, kinerja integritas Provinsi Riau melalui pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) organisasi yang dikenal sebagai Indeks Integritas Nasional yang dilakukan penilaian oleh KPK untuk meningkatkan integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan, untuk nilai Tahun 2024 adalah sebesar 62,83 mengalami penurunan sebanyak 5,98 dibanding tahun 2023 sebesar 68,81 yang digunakan sebagai bahan rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi, Sebagaimana dipahami tujuan dari pelaksanaan survei penilaian integritas ini adalah meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem anti-korupsi yang mana hasil survey tersebut akan menjadi rekomendasi perbaikan sistem pencegahan korupsi.

2.8.4. Masih Tingginya Pengaruh Ekonomi Global Dan Regional

1. Produksi pangan strategis di Provinsi Riau masih rendah

Provinsi Riau masih banyak mendatangkan pangan dari daerah dan negara lain. Hal ini menyebabkan kerentanan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pangan di pasar.

2. Fluktuasi harga minyak di pasar dunia

Fluktuasi harga minyak di pasar dunia memberikan pengaruh terhadap perekonomian Indonesia, khususnya harga minyak di Indonesia. Harga minyak dapat mempengaruhi naik/turunnya pertumbuhan ekonomi, baik itu ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, jumlah uang beredar, nilai tukar riil rupiah terhadap dolar amerika dan suku bunga.

2.8.5. Masih Tinggi Ketimpangan Pembangunan Wilayah

1. Masih Tinggi Ketimpangan Pembangunan Wilayah Serta Belum Optimalnya Penyediaan dan Konektivitas Transportasi

Ketimpangan ini terjadi karena dukungan infrastruktur belum optimal dalam membangun konektivitas antar wilayah yang memiliki potensi investasi dengan dukungan sarana dan prasarana perhubungan publik. Perlunya penguatan sistem transportasi darat maupun laut yang menjadi tulang punggung konektivitas antara wilayah.

2. Rendahnya Tingkat Layanan Air Minum Khususnya di Wilayah Pesisir

Masih rendahnya pelayanan air minum khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan daerah afirmasi 3TP. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya pengelolaan air minum dan jauhnya jarak Lokasi permukiman dengan sumber air baku yang berkualitas sehingga berdampak pada terbatasnya sumber air baku yang berkualitas terutama di wilayah pesisir. Selain itu, terdapat tingginya idle capacity dari SPAM Perpipaan yang ada, rendahnya jumlah Sambungan Rumah Tangga (SRT) yang terpasang, belum optimalnya pelayanan terhadap sambungan rumah tangga yang telah terpasang, tingginya tingkat kehilangan air, dan rendahnya daya beli masyarakat terhadap air minum perpipaan disebabkan oleh belum optimalnya layanan SPAM Perpipaan di wilayah perkotaan yang sudah terbangun. Permasalahan lainnya adalah sulitnya mendapatkan air baku untuk SPAM Perdesaan dalam jangka panjang, tingginya biaya infrastruktur SPAM Perdesaan, dan rendahnya partisipasi masyarakat untuk pemanfaatan SPAM Perdesaan disebabkan oleh belum optimalnya layanan SPAM Non Perpipaan di wilayah perdesaan/non perkotaan.

Kondisi akses penduduk terhadap sumber air berkualitas atau layak atau yang aman diminum bagi masyarakat juga harus dilihat berdasarkan pengelompokan kesejahteraan,

terutama pada kuintil 1 (masyarakat miskin dan rentan atau 20% orang dengan status kesejahteraan terendah). Dimana masih terdapat 9,12 % atau sebanyak 26.780 rumah tangga masyarakat miskin rentan pada kuintil 1 yang belum memiliki akses air minum layak.

3. Masih terdapatnya Kesenjangan Kemiskinan antar Daerah

Provinsi Riau masih terdapat kesenjangan kemiskinan antar daerah yang dilihat dari oleh jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan, garis kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan yang berbeda antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Beberapa Faktor Determinan yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya adalah infrastruktur layanan dasar yang belum dapat diatasi secara optimal karena upaya yang dilakukan selama ini belum mampu memperkuat Pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan terutama pada wilayah pesisir dan 3T dan masih rendahnya pemanfaatan data kemiskinan oleh para pihak sebagai data intervensi, serta adanya perbedaan potensi sumber daya baik sumber alam maupun kualitas sumber daya manusia, serta perbedaan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Berdasarkan data kemiskinan bila dilihat dari tempat tinggal, wilayah pedesaan menjadi paling banyak dihuni penduduk miskin. Pada tahun 2024, penduduk miskin di pedesaan mencapai 6,52 % atau sekitar 289,76 ribu penduduk lebih besar dari penduduk miskin di perkotaan 6,11% atau sekitar 183,28 ribu penduduk. Persentase penduduk miskin di pedesaan menurun sekitar 0,13 % tapi jumlah penduduk miskin pedesaan meningkat sekitar 600 penduduk bila dibandingkan dengan tahun 2023. Pada Indeks Keparahannya P2 mengalami kenaikan sebesar 0,02 % yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin desa.

Upaya penanggulangan kemiskinan belum menerapkan

konsep pentahelix secara Optimal terutama dalam upaya Pemberdayaan masyarakat dimana Dengan melibatkan berbagai unsur, konsep pentahelix dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melalui program-program pemberdayaan berbasis potensi Desa.

4. Belum Optimalnya Pembangunan Di desa

Berdasarkan Indeks Desa Tahun 2025 masih terdapat status desa sangat tertinggal sebanyak 4 desa di Kabupaten Rokan Hilir dan desa tertinggal sebanyak 50 desa yaitu di Kabupaten Indragiri Hulu 7desa, Kabupaten Rokan Hilir 27 desa dan Kabupaten Kep Meranti 16 desa. Dari kondisi status desa di 2024 masih banyak terdapat desa belum terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, permukiman, sosial, keterbukaan wilayah dan juga desa yang tidak memiliki pusat perdagangan dan lembaga ekonomi serta kesiapan dalam menghadapi bencana. Dari akses ketersediaan sarana Pendidikan masih terdapat desa yang jarak sarana Pendidikannya jauh, masih terdapat anak putus sekolah, anak penyandang disabilitas yang tidak bersekolah, belum mempunyai PAUD, belum mempunyai PKBM, belum mempunyai Taman Bacaan, dan belum mempunyai SLB. Dari akses kesehatan masih terdapat desa yang jarak kesarana kesehatanya jauh, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang belum mecukupi, dan posyandu yang tidak aktif. Dari aspek sosial masih banyak terdapat PPKS (anak terlantar, lanjut usia, gelandangan dan disabilitas) yang belum terlayani di desa. Dari aspek infrastruktur masih terdapat desa yang tidak bisa dilalui akses roda 4, status jalan yang rusak, masyarakat desa yang mempunyai rumah dalam kondisi tidak baik, desa yang tidak ada akses air ledeng, desa yang masyarakatnya tidak mempunyai jamban, desa yang listirk non PLN dan desa yang tidak ada akses sinyal. Dari aspek ekonomi masih terdapat desa yang tidak ada Lembaga ekonomi, desa yang tidak mempunyai pasar, dan desa yang tidak ada industri. Dari aspek bencana masih terdapat desa

yang tidak mempunyai mitigasi bencana dan fasilitas dalam menghadapi bencana. Hal ini tentunya mempengaruhi terhadap status desa yang ada. Indeks Desa Membangun di tahun 2024 seluruh kabupaten sudah berstatus maju dan mandiri. Namun terdapat 3 kabupaten dengan nilai Indeks Ketahanan Ekonomi masih berstatus berkembang yaitu kabupaten Indragiri Hilir 0,6003 poin, Kampar 0,6919 poin dan Kepulauan Meranti 0,5948 poin.

2.8.6. Belum Optimalnya Penyediaan, Konektivitas Transportasi dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

1. Masih Rendahnya Kondisi Jalan Mantap

Kondisi jalan yang rusak sangat mempengaruhi kinerja ekonomi, dimana pada tahun 2024 persentase jalan provinsi dengan kondisi tidak mantap masih mencapai angka 31,65% (kerusakan ringan sampai rusak berat). Masih belum optimalnya tingkat kemantapan jalan disebabkan oleh rusaknya jalan akibat banyaknya kendaraan yang melebihi muatan atau Over Dimension Over Load (ODOL).

2. Tingginya Frekuensi Kejadian Banjir

Resiko banjir ini disebabkan tidak berfungsinya drainase dan sungai di perkotaan serta kondisi daerah aliran sungai di sepanjang aliran empat sungai utama di Provinsi Riau yang masih rentan meluap. Ditandai dengan meningkatnya kejadian banjir dari 406 kejadian tahun 2023 menjadi 735 kejadian tahun 2024.

3. Terbatasnya infrastruktur pengelolaan sampah

Belum optimalnya pengelolaan persampahan, sarana prasarana tidak memadai, manajemen dan kurangnya kesadaran masyarakat dampak sampah yang dibuang sembarangan dan upaya pengelolaan sampah rumah tangga agar memiliki nilai manfaat secara ekonomi dan lingkungan.

4. Masih Rendahnya Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sanitasi Layak

Persentase rumah tangga yang mempunyai akses sanitasi layak, terutama di wilayah pesisir, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Rokan Hilir, masih terbatas hal ini disebabkan luasnya badan air yang dijadikan mudah untuk dijadikan tempat pembuangan air besar sembarangan (BABS), serta tingginya biaya pembuatan tanki septik di wilayah pesisir Provinsi Riau. Sebagian besar lahan di wilayah pesisir yang merupakan lahan gambut dan wilayah dengan permukaan air tanah yang tinggi menjadi penyebab mahalnya biaya pembuatan tanki septik. Selain itu masih terbatasnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berfungsi memberikan pelayanan untuk mengangkut dan mengolah lumpur tinja dari rumah tangga yang mempunyai tanki septik. Hal ini menyebabkan akses sanitasi aman di Provinsi Riau belum menunjukkan capaian yang signifikan. Beberapa IPLT yang telah terbangun di kabupaten/kota belum berfungsi karena belum terbentuknya kelembagaan dan belum tersedianya regulasi terkait retribusi terhadap layanan yang akan diberikan.

Kondisi akses penduduk terhadap sanitasi layak bagi masyarakat juga harus dilihat berdasarkan pengelompokan kesejahteraan, sebagaimana pengelompokan pada kuintil 1 (masyarakat miskin dan rentan atau 20% orang dengan status kesejahteraan terendah). Dimana masih terdapat 26,73% atau 78.517 rumah tangga masyarakat miskin rentan pada kuintil 1 yang tidak memiliki sanitasi layak.

5. Masih Tingginya Persentase Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

Pada Tahun 2024 terdapat 25,20% rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) di Provinsi Riau masih tinggi.

Berdasarkan data P3KE (pertanggal 10 Juni 2024) terdapat 59.554 unit RTLH, sedangkan menurut data E-RTLH (10 Juni 2024) terdapat 76.464 unit RLTH. Masih tingginya angka RTLH ini disebabkan oleh beberapa indikator diantaranya yaitu : Rendahnya akses sanitasi layak; Rendahnya akses air minum layak; serta Rendahnya status penguasaan bangunan tempat tinggal milik sendiri. Kondisi infrastruktur rumah layak huni juga mesti diperhatikan bagi masyarakat berdasarkan pengelompokan kesejahteraan, sebagaimana pengelompokan pada kuintil 1 (masyarakat miskin dan rentan atau 20% orang dengan status kesejahteraan terendah). Dimana masih terdapat 43,96% atau 129.131 rumah tangga masyarakat miskin rentan pada kuintil 1 setidaknya salah satu kondisi tidak terpenuhi rumah hunian layak.

6. Belum Optimalnya Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

terdapat 3 Kabupaten yang tidak diintervensi penanganan kawasan kumuhnya oleh Pemerintah Provinsi Riau pada periode RPJMD Tahun 2019-2024 dikarenakan pada Kabupaten tersebut tidak terdapat Kawasan Kumuh dengan Luasan 10-15 Ha. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hilir. Provinsi Riau memiliki kawasan kumuh yang menjadi Kewenangan Provinsi seluas 249,27 Ha berdasarkan SK Kumuh Kabupaten/Kota (SK tersebut belum menampilkan Kondisi kekumuhan tiap kawasan dan pola penanganan berdasarkan 7 aspek). Dari tahun 2017 s/d 2024 telah dilakukan penanganan seluas 108,37 Ha, sehingga sisa luasan kumuh yang belum ditangani sebesar 140,90 Ha.

7. Belum Optimalnya Pelayanan Kelistrikan Di Wilayah Terpencil

Wilayah Provinsi Riau dengan geografis yang merupakan daerah kepulauan dan pesisir sangat berpengaruh terhadap pembangunan Infrastruktur kelistrikan sehingga

kelistrikan di Provinsi Riau belum handal dan belum merata pembangunannya sampai ke pelosok daerah, disamping itu pembangunan infrastruktur kelistrikan juga membutuhkan biaya yang cukup mahal. Masih terdapat 4,81% atau sebesar 102.648 Rumah Tangga belum berlistrik yang bersumber dari PLN.

8. Terbatasnya Komunikasi Dan Informasi Khususnya Daerah Terpencil

Masih terbatasnya jaringan komunikasi dan informasi yang sampai ke pelosok desa yang disebabkan karena lokasi pemukiman masyarakat yang jauh dan berpencar dan mahalnya pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi sehingga masih terdapat desa yang mengalami low signal dan blank spot sebesar 382 desa dari 1.862 Desa yang ada tahun 2024. Dampak dari terbatasnya komunikasi dan informasi mempengaruhi terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat dan upaya mewujudkan desa digital.

2.8.7. Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup

1. Masih Tingginya Abrasi

Terjadinya abrasi yang ada di Provinsi Riau saat ini sudah cukup memprihatinkan, mengingat panjangnya garis pantai Provinsi Riau serta abrasi di wilayah pesisir dengan panjang abrasi pantai di 3 pulau terluar (Rupat, Bengkalis, dan Rangsang) dengan tingkat kekritisannya tinggi sepanjang 167,22 km. Meskipun demikian, penanganan abrasi secara struktural melalui pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya masih sangat terbatas.

2. Degradasi Lingkungan Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan degradasi lingkungan hidup dapat dilihat dari masih tingginya emisi gas rumah kaca. Tingginya emisi gas rumah kaca salah satunya disumbangkan dari sektor energi, dimana pembangunan infrastruktur energi masih didominasi penggunaan energi fosil sebesar 71,86% dan masih

rendahnya pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan sehingga capaian energi baru terbarukan baru mencapai 28,14% pada tahun 2024. Disamping itu Provinsi Riau yang kaya sumber pertambangan logam dan batuan menyebabkan banyak terjadinya pertambangan tanpa ijin khususnya pertambangan emas (PETI) tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan. Selain itu, degradasi kualitas lingkungan hidup merupakan masalah yang semakin mendesak ditengah lajunya Pembangunan yang pesat seiring dengan meningkatnya dampak negatif dari kegiatan manusia terhadap ekosistem. Dalam konteks pemanfaatan ruang dan perencanaan pembangunan degradasi ini seringkali disebabkan oleh tingginya kebakaran hutan dan lahan, akibat alih fungsi lahan gambut sebagai penyimpan air mengalami kerusakan karena aktivitas manusia seperti pembukaan lahan baru untuk pertanian dan perkebunan. Keringnya kadar gambut tersebut dengan lapisan organik yang kaya karbon menjadi mudah terbakar.

Pada saat cuaca ekstrem dan musim kemarau panjang, kondisi ini akan menyebabkan kebakaran yang meluas. Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang merusak tidak hanya pada lingkungan tetapi juga pada kesehatan manusia. Asap yang dihasilkan dari kebakaran ini mengandung partikel berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan, mengurangi kualitas udara, dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain itu, kebakaran ini juga mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, merusak habitat alami, dan mengurangi kemampuan ekosistem untuk berfungsi secara optimal.

Pengelolaan sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang belum tertata dengan baik merupakan salah satu penyebab utama tingginya resiko banjir yang meningkat yang merupakan hasil dari degradasi lingkungan hidup, banyaknya sungai yang mengalami pendangkalan dan

penyempitan akibat sedimentasi, polusi, dan aktivitas manusia lainnya, sehingga sungai tidak dapat menampung volume air yang besar, terutama selama musim hujan, maka bencana banjir menjadi tak terhindarkan.

Alih fungsi lahan yang tidak terkendali juga berkontribusi signifikan terhadap risiko banjir terutama pada konversi lahan alami pada area perkotaan atau pertanian mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan. Tanah yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air kini ditutupi oleh beton dan aspal, sehingga air hujan langsung mengalir ke sungai tanpa terserap ke dalam tanah. Hasilnya adalah peningkatan volume air yang harus ditampung oleh sungai, yang sering kali melebihi kapasitasnya dan menyebabkan banjir.

Banyaknya pemukiman yang berada di sempadan Sungai juga menjadi salah satu permasalahan penyebab banjir, banyaknya penduduk yang memilih tinggal di daerah rawan banjir karena keterbatasan lahan dan akses ekonomi. Ketika banjir terjadi, mereka menjadi yang pertama terdampak, mengalami kerugian harta benda, kehilangan tempat tinggal, dan bahkan nyawa. Kondisi ini juga menimbulkan masalah kesehatan, seperti penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air, kurangnya akses terhadap air bersih, dan kondisi sanitasi yang buruk.

2.8.8. Kurang Pengamalan Budaya Dalam Kehidupan Bermasyarakat

1. Kurang Pengamalan Budaya Melayu dalam Kehidupan Bermasyarakat

Pengamalan Budaya Melayu dalam kehidupan bermasyarakat di provinsi riau belum Optimal sebagaimana mestinya, hal ini dipengaruhi oleh belum optimalnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang terdiri atas pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan budaya melayu itu sendiri dalam berkehidupan dimasyarakat, dimana budaya yang ditinggalkan oleh leluhur belum semuanya

terdokumentasi dengan baik sehingga pelestarian budaya itu sendiri belum dapat diinternalisasi secara utuh dalam kehidupan masyarakat dan baik sebagai upaya untuk mengekspresikan budaya itu sendiri maupun sebagai upaya pemanfaatan budaya dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

2. Persatuan dan stabilitas Daerah yang belum Optimal

Persatuan dan stabilitas Daerah di Provinsi Riau belum optimal dipengaruhi oleh beragamnya suku dan etnis, yang berdampak pola dan cara pandang sosial yang rawan terjadi pergesekan, disamping itu masih minimnya media penyaluran pendapat, politik, dan masih lemahnya kapasitas lembaga demokrasi baik formal maupun non formal.

2.8.9. Belum optimalnya Demokrasi Substansial dan Penanganan Konflik di Masyarakat

1. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) masih belum optimal

Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut Provinsi Riau dari tahun 2019 hingga 2023 berkisar dengan kategori sedang memiliki nilai berkisar antara 60-80. Capaian IDI Riau berfluktuatif secara nasional. Demokrasi saat ini masih terbatas pada hal-hal prosedural, seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan. Hal ini berakibat pada terjadinya politik uang, kurangnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi, kurangnya transparansi penggunaan dana publik, belum optimalnya sistem pemilu dan kemerdekaan pers, kurangnya kebebasan sipil, merebaknya diskriminasi dan intoleransi, serta belum optimalnya komunikasi publik dan partisipasi Masyarakat.

Demokrasi saat ini juga masih bercirikan : (1) kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; (2) belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi dan politik; (3) informasi dan komunikasi publik belum merata; (4) permasalahan politik electoral seperti politik uang, politisasi

isu SARA; (5) fungsi – fungsi asasi parlemen belum terlaksana secara optimal; (6) nilai – nilai Pancasila dan konstitusi yang belum terinternasiasi. Hal-hal diatas menjadi tantangan dan permasalahan yang dihadapi baik secara nasional maupun kewilayahan.

2. Masih Terdapat Daerah dengan Kerawanan Konflik

Berdasarkan data jumlah konflik yang ada dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 kejadian konflik di Provinsi Riau menurun dari 145 kejadian konflik menjadi 19 kejadian konflik. Namun jenis konflik Sosial Budaya dan Wilayah masih mendominasi dan mengalami penurunan. Dalam rangka menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat terhadap penyakit masyarakat, potensi konflik dan kriminalitas yang mungkin terjadi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyuluhan atau sosialisasi mengenai premanisme, minuman keras, penyebaran HIV/AIDS, Narkoba dan pencegahan perselisihan antar kelompok masyarakat. Untuk deteksi dini konflik selalu dilaksanakan rapat-rapat koordinasi melalui forum komunitas intelijen daerah yang hasil rekomendasi dari forum komunitas intelijen daerah menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan untuk mengantisipasi konflik yang mungkin terjadi. Meskipun secara jumlah mengalami penurunan, persoalan konflik yang terjadi perlu menjadi atensi dan didukung bersama seluruh stakeholder disamping mengingat upaya pengurangan konflik sosial di masyarakat menjadi salah satu prioritas Kepala Daerah guna terciptanya kondusifitas dan keamanan daerah.

2.9 Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah

akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintah Daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan Daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang dengan terjalinnya koordinasi yang baik antar wilayah dan antar sektor. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

2.9.1 Isu Strategis Global

1. Geopolitik dan geoekonomi. Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini sedang berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur dan Laut Cina Selatan – Indo Pasifik serta eskalasi perang Iran dan Israel dapat mempengaruhi stabilitas regional. Riau perlu waspada terhadap dampak potensial, termasuk gangguan perdagangan yang berpotensi memberikan tekanan pada harga komoditas yang berdampak pada inflasi dan keamanan.
2. Demografi global. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing- masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Dinamika penduduk Provinsi Riau yang cenderung bertambah dan dalam rangka menangkap peluang bonus demografi maka perlu perubahan paradigma tentang bonus

demografi yang tidak hanya menekankan perubahan struktur penduduk tetapi lebih menekankan konfigurasi tingkat pendidikan penduduk. Karena itu, perhatian yang sangat besar pada keterampilan manusia sangat diperlukan.

3. Disrupsi teknologi. Negara-negara maju berlomba di bidang teknologi dan Artificial Intelligence akan mengubah cara kerja industri global. Ke depan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh pemanfaatan teknologi. Hal ini merupakan peluang besar bagi Riau untuk menarik investasi di bidang teknologi pertanian (smart farming), logistik digital, dan pendidikan vokasi.
4. Krisis Energi dan Transisi ke Energi Terbarukan, ketergantungan pada energi fosil menghadapi tantangan akibat krisis energi global. Riau, sebagai produsen energi, perlu mempertimbangkan transisi menuju sumber energi terbarukan untuk mendukung keberlanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim.
5. Penurunan emisi dari Sektor AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use) menuju Indonesia's Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Masih tingginya kerusakan dan pencemaran di Provinsi Riau menjadi tantangan penurunan emisi. Hal ini mengingat potensi sumber daya alam Provinsi Riau seperti kawasan hutan, ekosistem gambut dan ekosistem mangrove yang memiliki sensitivitas terhadap berbagai aktifitas yang merusak kelestariannya, sehingga dibutuhkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
6. Perubahan iklim. Tantangan pemanasan global akibat perubahan iklim berdampak pada peningkatan suhu global yang terus meningkat hingga 3,5°C pada skenario intermediate, jika tidak ada penurunan emisi GRK yang tinggi pada durasi Tahun 2020-2050. Dampak perubahan iklim ini yang kemudian melahirkan kesepakatan kebijakan global dalam pembangunan rendah karbon untuk menurunkan intensitas emisi pada sektor-sektor tertentu.

2.9.2. Isu Strategis Nasional

1. **Ekonomi Indonesia tahun 2025 tetap solid berada di atas 5 persen.**

Ekonomi Indonesia masuk ke jajaran 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Dengan kondisi di tengah ketidakpastian global yang terus terjadi, perekonomian nasional tetap terjaga, salah satunya karena permintaan domestik yang tetap kuat dan juga berlanjutnya pertumbuhan dan peningkatan investasi tumbuh sebesar 4,4 persen yang ditopang oleh Pembangunan infrastruktur dan meningkatnya aktivitas penanaman modal.

2. **Sebagian besar subsektor industri pengolahan mampu tumbuh positif.**

Subsektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Lima besar kontributor PDB adalah industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik, industri alat angkutan, serta industri tekstil dan pakaian. Hal ini menunjukkan bahwa industri industri pengolahan punya peran penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

3. **Industri mampu bertahan di zona ekspansi.**

Industri Pengolahan masih terus bertahan di tengah tekanan ketidakpastian ekonomi global. Hal ini tampak pada Indeks Kepercayaan Industri terus mengalami peningkatan hingga Juni 2024. Adapun ekspansi yang tinggi pada industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki didorong oleh peningkatan pesanan baru yang cukup signifikan yaitu 3,21 poin dan penyerapan persediaan yang meningkat.

4. **Investasi pemerintah dan swasta meningkat.**

Upaya peningkatan pemerintah dan swasta di daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengembangan potensi investasi daerah (regional champions) sesuai dengan sektor unggulan dan mendorong daerah untuk meningkatkan kesiapan dalam

menarik investasi.

- b. Promosi investasi di daerah, untuk mendorong investor awareness and willingness, yang antara lain melalui gelar promosi investasi daerah.
- c. Pemberian insentif investasi di daerah, sesuai dengan kewenangan daerah terutama untuk UKM.
- d. Pengembangan mekanisme konsultasi pemerintah dan pelaku bisnis (terutama UKM).

5. **Kinerja Produk Domestik Bruto (PDB) didukung peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.**

Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara mencerminkan pulihnya sektor pariwisata, sementara devisa pariwisata yang meningkat menandakan kontribusi ekonomi yang signifikan. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan dampak positif, didukung oleh peningkatan tenaga kerja yang semakin kuat. Kinerja investasi pariwisata dan ekspor ekonomi kreatif menunjukkan kepercayaan dan potensi pertumbuhan yang berkelanjutan,

6. **Penyaluran kredit tumbuh positif**

Hasil survei menunjukkan responden tetap optimis terhadap pertumbuhan kredit ke depan. Responden memprakirakan outstanding kredit sampai dengan akhir tahun 2024 terus tumbuh. Optimisme tersebut antara lain didorong oleh prospek kondisi moneter dan ekonomi serta relatif terjaganya risiko dalam penyaluran kredit.

7. **Penguatan pembangunan infrastruktur**

Kebijakan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur semakin menguat termasuk dengan ketersediaan pembiayaan melalui lembaga Danantara.

8. **Ekonomi Syariah**

Berdasarkan laporan terbaru ***The State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024–2025*** yang diterbitkan oleh Dinar Standard, **Indonesia menempati peringkat ketiga dunia** dalam ***Global Islamic Economy***

Indicator (GIEI)—di bawah **Malaysia** dan **Arab Saudi**. **Hal ini tentu menjadi tantangan besar, karena** Ekonomi Islam bukan hanya sekedar ceruk pasar, namun bagian dari arus utama ekonomi global yang berkelanjutan. Oleh karena itu Indonesia harus agresif mengembangkan ekonomi syariah untuk menjadi pemain utama ekonomi syariah global. Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia harus menjadi perhatian serius pemerintah dan mendapat dukungan dari seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu arah kebijakan ekonomi syariah yang telah termuat dalam RPJPN dan RPJMN, perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan di daerah.

2.9.3 Isu Strategis Regional

1. **Provinsi Riau menjadi salah satu kawasan pengembangan wisata halal di Sumatera.**

Pengembangan pariwisata halal di Provinsi Riau telah menjadi perhatian dari Pemerintah, hal ini dilakukan melalui penguatan kebijakan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 18 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal, yang bertujuan memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan layanan bagi wisatawan muslim serta meningkatkan iklim pelayanan pariwisata halal di Riau. Selain itu juga sebagai komitmen terhadap kesepakatan bersama Forum Gubernur se Sumatera untuk mewujudkan kawasan pariwisata Halal di Sumatera.

2. **Provinsi Riau menjadi salah satu indikasi PSN pengembangan hilirisasi kelapa sawit dan kelapa di Sumatera.**

Percepatan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan difokuskan pada komoditi yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto serta memiliki nilai tambah tinggi, dengan memperhatikan potensi penyerapan tenaga kerja lokal, kesiapan industri, peluang investasi dan ketersediaan bahan baku dengan mempertimbangkan dampak longkungan.

3. Provinsi Riau berada pada jalur perdagangan internasional (selat Malaka) dapat berkontribusi terhadap penyuplai kebutuhan pelayaran.

Keberadaan Selat Malaka sebagai salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia tidak bisa dilepaskan dari berbagai kepentingan. Dari segi kepentingan ekonomi dan militer, Selat Malaka merupakan choke points yang sangat strategis bagi proyeksi armada angkatan laut negara-negara yang memiliki kepentingan di Kawasan Asia Pasifik, sehingga Riau mempunyai potensi terhadap penyuplai berbagai kebutuhan pelayaran.

4. Perlunya kerjasama antar provinsi untuk menjaga kelestarian hutan di wilayah perbatasan provinsi (Koridor RIMBA).

5. Konektivitas dan infrastruktur

Peningkatan konektivitas dan perdagangan antar provinsi melalui jalur logistik darat, laut, dan digital (e-commerce) diharapkan mempercepat distribusi dan memperluas jangkauan pasar.

6. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas

Keterbatasan akses transportasi antarprovinsi dan antarnegara (Sumatera berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan dekat dengan negara tetangga). konektivitas sangat penting untuk mendukung integrasi ekonomi regional dan perdagangan, termasuk peran Sumatera dalam Tol Laut dan Poros Maritim Dunia.

7. Deforestasi, Kebakaran Hutan, dan Perubahan Iklim

Pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan (Hutan Tanaman Industri (HTI) sering menyebabkan kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas. Hal ini Berdampak pada kesehatan, lingkungan, serta hubungan diplomatik dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

8. Ketimpangan Ekonomi dan Kesejahteraan

Ketimpangan antara wilayah barat (misalnya Sumatera bagian utara dan pesisir timur) dan daerah terpencil atau perbatasan. Hal ini dapat menimbulkan potensi konflik

sosial dan hambatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

9. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

Sumatera memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti batubara, minyak dan gas, kelapa sawit, dan mineral, namun eksploitasi sering tidak berkelanjutan dan minim nilai tambah lokal. Hal ini menyangkut kedaulatan energi dan kontribusi terhadap pertumbuhan nasional, serta penguatan industri hilirisasi.

10. Urbanisasi dan Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Pertumbuhan kota-kota besar seperti Medan, Palembang, dan Pekanbaru yang pesat menyebabkan masalah tata ruang, banjir, dan kemiskinan perkotaan. Hal ini berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah.

11. Isu Geopolitik dan Keamanan Laut

Posisi Sumatera bagian barat dan utara yang berbatasan dengan Selat Malaka rawan terhadap penyelundupan, perompakan, dan konflik perbatasan. Hal ini menyangkut stabilitas nasional dan peran Indonesia di kawasan regional ASEAN.

12. Transisi Energi dan Ketahanan Energi

Ketergantungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) pada batubara, sementara potensi energi terbarukan (seperti panas bumi di Sumatera Barat dan Selatan) belum maksimal dimanfaatkan. Transisi energi hijau adalah komitmen nasional dalam menghadapi krisis iklim global.

13. Migrasi, Demografi, dan Tenaga Kerja

Terdapat arus migrasi antarpulau, urbanisasi cepat, serta ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja. Hal ini berkaitan dengan bonus demografi dan stabilitas pasar kerja regional.

2.9.4 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan (Isu KLHS)

Isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan (PB) dihasilkan dari rangkaian tahapan dan proses dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029, yang di dalamnya mengkaji juga ketercapaian TPB/SDGs Riau. Dari hasil KLHS, telah disepakati 5 (lima) isu strategis pembangunan berkelanjutan yang memiliki keterkaitan (*interlinkages*) antara berbagai tujuan dan sasaran TPB/SDGs dan perlu dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Isu Strategis TPB 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
Permasalahan utama isu terkait Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan yaitu timbulan sampah di Provinsi Riau semakin meningkat sehingga maka perlu peningkatan proporsi sampah yang didaur ulang (pengolahan & penanganan), armada pengangkut, dan sebaran TPS serta pengembangan wilayah menjadi urban belum menuju resilient city. Permasalahan limbah merupakan salah satu masalah yang harus dikelola untuk mewujudkan kota yang bersih dan berkelanjutan. Timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat harus dikelola melalui penanganan sampah dan pengurangan sampah. Isu Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan yaitu:
 - Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.
 - Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.
 - Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.
 - Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara

substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

- Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
- Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.

2. Isu Strategis TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Permasalahan utama isu terkait Air Bersih dan Sanitasi Layak yaitu DDDTLH Air sebesar 93% belum terlampaui, JLH penyedia air 90% dalam kondisi buruk, JLH pemurnian air 82% dalam kondisi buruk, JLH penguraian limbah 66% dalam kondisi buruk, IKA 2018-2022 kurang dari 60 yang artinya terkondisi sangat buruk, Selat Rupat (Kota Dumai dan Kab Bengkalis) tercemar berat, dan Kualitas air danau teridentifikasi cemar ringan dan cemar berat. Isu Air Bersih dan Sanitasi Layak yaitu:

- Pada tahun mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
- Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
- Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman

secara global.

- Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.
- Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.
- Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

3. Isu Strategis TPB 13: Penanggulangan Perubahan Iklim

Permasalahan utama isu terkait Penanggulangan Perubahan Iklim yaitu JLH pengaturan iklim 53% buruk, JLH pemeliharaan kualitas udara 49% buruk, JLH tata aliran air dan banjir 65% buruk, JLH bencana 68% buruk, 49% risiko KARHUTLA tinggi, 67% risiko kekeringan tinggi, 33% risiko banjir sedang dan Pengembangan wilayah menjadi urban belum menuju resilient city. Isu Penanggulangan Perubahan Iklim yaitu memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara dan mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.

4. Isu Strategis TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Permasalahan utama isu terkait Kehidupan Sehat dan Sejahtera yaitu ngginya AKBa dan AKN yang berkaitan dengan tingginya angka kelahiran remaja dan tingkat kejadian diare pada balita (khususnya neonatal) tinggi, hal ini berimplikasi pada jasa lingkungan hidup penyedia air dan penguraian limbah. Merujuk pada target penurunan angka kematian bayi dan balita, maka capaian saat ini masih bertolak belakang dengan harapan tersebut. Jika kondisi ini berlanjut tanpa perbaikan, dikhawatirkan angka kematian bayi dan balita akan melonjak hingga lebih dari tiga kali lipatnya pada tahun 2045. Isu Kehidupan Sehat dan Sejahtera yaitu:

- Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12

per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.

- Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
- Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
- Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.
- Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
- Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.
- Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.
- Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.

5. Isu Strategis TPB 1: Tanpa Kemiskinan

Permasalahan utama isu terkait Tanpa Kemiskinan yaitu pada

bulan Maret 2023 jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau tercatat mencapai 485.660 orang dan di daerah perkotaan angka kemiskinan mencapai 6,73% dan untuk daerah perdesaannya mencapai 6,65%, terbanyak terdapat di Kabupaten Rokan Hulu & Kabupaten Kepulauan Meranti, Upaya penanggulangannya harus dilakukan secara terus menerus melalui kebijakan yang bersifat peduli pada kemiskinan (pro poor policy). Isu Tanpa Kemiskinan yaitu:

- Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
- Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
- Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
- Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.

2.9.5. Rumusan Isu Strategis Provinsi Riau

Isu strategis Daerah disimpulkan melalui perumusan isu-isu strategis berdasarkan kontekstual (lingkungan dinamis), isu KLHS, serta pertimbangan potensi dan permasalahan yang ada. Setiap komponen dilihat benang merah keterkaitannya antara potensi – permasalahan – isu strategis, hingga diperoleh kelompok aspek pembentuk komponen pembangunan daerah. Aspek-aspek tersebut

dirumuskan sebagai isu strategis daerah.

Berikut adalah sintesa hasil perumusan permasalahan serta rumusan isu sesuai konteks pembangunan daerah di Provinsi Riau yang mencakup sejumlah isu utama yang menjadi isu strategis untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan Provinsi Riau.

Tabel 2.205 Kesimpulan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Jumlah penduduk produktif dan bonus demografi	Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia sehat, cerdas, kreatif, unggul dan sejahtera	Kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia belum merata	Bonus Demografi	Bonus Demografi	Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Potensi Sumber Daya Alam dan Nilai Tambah Ekonomi	- Belum optimalnya nilai tambah komoditi unggulan disebabkan oleh belum berkembangnya hilirisasi komoditi unggulan dan masih rendahnya daya saing koperasi dan UKM - Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi disebabkan oleh : keterbatasan prasarana wilayah dan amenities pariwisata pada beberapa destinasi wisata, kapasitas produksi pangan belum mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk serta belum optimalnya penerapan regulasi	-	- Geopolitik dan geoekonomi global yang berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian negara-negara di dunia - Disrupsi teknologi global yang mendorong berkembangnya hilirisasi produk - Kesepakatan kebijakan global dalam pembangunan rendah karbon	- Stabilitas permintaan domestik yang mendorong pertumbuhan investasi - Tingginya kontribusi industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional - Kebijakan pemerintah mendorong pengembangan investasi	- Provinsi Riau menjadi salah satu kawasan pengembangan wisata halal di Sumatera. - Provinsi Riau menjadi salah satu indikasi PSN pengembangan hilirisasi kelapa sawit dan kelapa di Sumatera. - Provinsi Riau berada pada jalur perdagangan internasional (selat Malaka) dapat berkontribusi terhadap kebutuhan pelayaran.	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	dan kebijakan dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah					
Inovasi pemerintahan dan pelayanan publik termasuk yang terbaik	Belum optimalnya pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih	Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang belum optimal	Perkembangan teknologi dan <i>Artificial Intelligence</i> akan mengubah cara kerja industri global yang memberikan peluang besar bagi Riau untuk menarik investasi	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dalam menghadapi anacaman dimasa depan	Tatakelola Pemerintahan yang baik dan berkualitas	Tatakelola Pemerintahan yang baik
- Pemanfaatan Sungai untuk Jalur Transportasi - Memiliki pantai yang bisa dijadikan pelabuhan untuk transportasi laut	- Belum Optimalnya Penyediaan, Konektivitas Transportasi dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan - Masih Tinggi Ketimpangan Pembangunan Wilayah - Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup	- Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan - Air Bersih dan Sanitasi Layak - Penanggulangan Perubahan Iklim - Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup belum optimal serta krisis lingkungan dan sumber daya alam terkait air dan kehidupan	- Krisis Energi dan Transisi ke Energi Terbarukan - Perubahan Iklim	- Kebijakan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur semakin menguat - Pengembangan Wilayah - Penguatan Infrastruktur berkelanjutan	- kerjasama antar provinsi untuk menjaga kelestarian hutan - Peningkatan konektivitas dan perdagangan antar provinsi - Ketimpangan pembangunan antar wilayah	Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan serta pengawasan pemanfaatannya
Warisan Kebudayaan Melayu	Kurangnya pengamalan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	-	-	-	Pelestarian dan kearifan budaya	Pusat Kebudayaan Melayu

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Kondisi lingkungan alami yang masih terjaga	Kerawanan bencana, pengelolaan lingkungan pesisir, pencemaran, penyediaan RTH perkotaan	Ahli fungsi dan konflik lahan	Krisis Energi dan Transisi ke Energi Terbarukan, ketergantungan pada energi fosil menghadapi tantangan akibat krisis energi global	Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kebencanaan	Perubahan iklim dan Bencana	Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		Penanganan bencana alam yang disebabkan perubahan iklim	Penurunan emisi dari Sektor AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use) menuju Indonesia's Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030			
			Masih tingginya kerusakan dan pencemaran di Provinsi Riau menjadi tantangan penurunan emisi.			

Sumber: Hasil Analisis



**Riau Rumah Rumpun Melayu,
Merawat Buah Menjaga Marwah,
Takkan Melayu Hilang di Bumi**

3.1 Visi dan Misi

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan Provinsi Riau sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

3.1.1 Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Provinsi Riau. Perumusan visi pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 mempedomani visi RPJPD Provinsi Riau tahun 2025-2045, isu strategis pembangunan Provinsi Riau dan juga memperhatikan visi RPJMN tahun 2025-2029.



Gambar 3.1
Visi Provinsi Riau

Visi Riau untuk pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029 memiliki makna berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, agamis dan maju dengan penjelasan sebagai berikut:

Berbudaya Melayu	Bermakna terwujudnya masyarakat Provinsi Riau yang selalu menjunjung tinggi nilai kebudayaan Melayu dan

	pola pikir masyarakat Melayu di dalam kehidupan bermasyarakat dengan memahami dan mempedomani nilai-nilai budaya Melayu dan kearifan lokal serta bersikap dan berperilaku sesuai nilai dan norma budaya Melayu.
Dinamis	Bermakna pembangunan yang dilakukan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mutakhir dan mudah melakukan perubahan untuk akselerasi pembangunan serta cepat beradaptasi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.
Ekologis	Bermakna terwujudnya pembangunan dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi yang kuat untuk menjamin kesejahteraan kehidupan generasi mendatang melalui lingkungan terjaga dan lestari, pembangunan seimbang dan berkelanjutan serta menerapkan kaedah <i>green economic</i> dan <i>blue economic</i> .
Agamis	Bermakna peran dan fungsi agama secara mendalam dan inklusif dapat mewujudkan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini melalui menjadikan agama sebagai pondasi berkehidupan dan arah kebijakan pembangunan serta saling menghargai, menghormati dan menjaga toleransi antar umat beragama untuk persatuan.
Maju	Bermakna pembangunan yang dilakukan memberikan manfaat serta nilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Hal ini melalui mandiri dan berdaya saing tinggi, infrastruktur dan industri yang kuat dan handal, ekonomi yang terus bertumbuh dalam lingkungan lestari, pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean government</i>) serta pelayanan masyarakat yang prima, adaptasi teknologi, inovasi dan modernisasi, pembangunan yang adil dan merata, kemiskinan dan pengangguran yang terus berkurang serta masyarakat aman, cerdas, sehat dan sejahtera untuk semua.

Pemerintah Provinsi Riau dalam komitmennya menjaga dan mengembangkan kebudayaan Melayu sebagai bagian dari identitas serta fondasi masa depan dan oleh sebab budaya yang bersifat kekal dan dapat menjadi kekuatan baru dalam pembangunan daerah, maka terdapat tagline baru Riau yaitu **“Riau Rumah Rumpun Melayu, Merawat Tuah Menjaga Marwah, Takkan Melayu Hilang di Bumi”**. Makna dari tagline dengan penjelasan sebagai berikut:

Riau	Bermakna Provinsi Riau diposisikan sebagai pusat budaya
Rumah	dan peradaban Melayu — tempat bersemainya nilai,
Rumpun	bahasa, sastra, dan adat Melayu yang kaya dan luhur.
Melayu	- "Rumah" mencerminkan Riau sebagai wadah yang mempersatukan berbagai suku dalam bingkai budaya Melayu. - Riau bukan hanya tempat secara geografis, tapi juga pusat nilai dan identitas Melayu yang terbuka dan membumi. Makna strategis: Riau punya tanggung jawab moral dan historis dalam menjaga warisan kebudayaan Melayu untuk generasi kini dan mendatang.
Merawat	Bermakna sebagai berikut:
Tuah,	- "Tuah" bermakna keberuntungan, karunia, atau berkah dari leluhur dan alam — termasuk sumber daya, sejarah, dan nilai luhur.
Menjaga	- "Marwah" berarti harga diri, kehormatan, dan martabat. Ungkapan ini menekankan pentingnya merawat segala karunia (tuah) yang telah dititipkan kepada Riau dan menjaga kehormatan (marwah) bangsa dan adat Melayu. Nilai luhur: Ini seruan agar pembangunan Riau tidak melupakan jati diri dan tetap menjunjung tinggi etika, adat, dan keseimbangan dengan alam.
Takkan	Bermakna berasal dari kutipan terkenal Hang Tuah,
Melayu	pahlawan legendaris Melayu, yang menyiratkan bahwa:
Hilang	- Budaya dan jati diri Melayu akan terus hidup, selama nilai, bahasa, dan adatnya dijaga dan diwariskan.
di Bumi	- Hal ini bukan sekadar pernyataan kultural, tapi tekad

dan semangat perlawanan terhadap arus globalisasi, penjajahan budaya, dan degradasi nilai.

Makna inspiratif: Sebuah janji dan pengingat bahwa bangsa Melayu punya daya tahan, kelenturan, dan martabat yang akan tetap lestari selama dijaga oleh generasinya.

Keseluruhan Makna Semboyan Ini:

Ungkapan "**Riau Rumah Rumpun Melayu, Merawat Tuah Menjaga Marwah, Takkan Melayu Hilang di Bumi**" adalah bentuk identitas kolektif sekaligus komitmen peradaban. Semboyan ini menyatukan:

- Kebanggaan historis;
- Kearifan budaya;
- Tanggung jawab generasi kini;
- Harapan untuk masa depan.

3.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan Visi Provinsi Riau tahun 2025-2029 maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 meliputi:

Misi 1	Membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan serta keberpihakan pada disabilitas dan kelompok marginal

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan derajat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat dan kesetaraan gender.

Misi 2	Meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan perekonomian yang berdaya saing dan inklusif melalui peningkatan kemandirian ekonomi, peningkatan investasi daerah, peningkatan ketahanan pangan daerah,

peningkatan daya saing daerah serta peningkatan nilai tambah pariwisata.

Misi 3	Memperkuat infrastruktur yang handal, guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat dan perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang handal, melalui peningkatan pelayanan transportasi, aksesibilitas, cakupan dan kualitas layanan infrastruktur dasar.

Misi 4	Memerangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah serta menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui meningkatnya pembangunan masyarakat desa, meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya produktivitas masyarakat.

Misi 5	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan berintegritas serta pelayanan publik yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang kompeten dan profesional menuju pemerintahan yang berkelas dunia (<i>world class government</i>)

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional serta meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel.

Misi 6	Memperkuat riset dan inovasi serta kerjasama pembangunan guna akselerasi capaian pembangunan melalui <i>multi helix partnership</i> , kerjasama antar daerah maupun kerjasama global

Misi ini diarahkan untuk akselerasi pembangunan dan Penguatan Ekonomi berbasis Unggulan Daerah dengan memperkuat ekosistem riset yang berbasis teknologi dan inovasi serta pengembangan kerjasama pembangunan.

Misi 7	Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai alat pemersatu dan perwujudan nilai-nilai kearifan lokal serta mendorong kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman, nyaman dan adil untuk semua

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan Melayu melalui penguatan nilai budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat Riau dalam rangka pemajuan kebudayaan Melayu.

Penetapan RPJMN 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan RPJMD Provinsi Riau 2025-2029. Perencanaan yang komprehensif menjadi kunci dalam mencapai sasaran pembangunan dan harus menciptakan integrasi, sinkronisasi, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Visi dan misi Presiden terpilih diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Delapan misi Presiden terpilih yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita menjadi prioritas pembangunan nasional. Tabel berikut ini merupakan perbandingan yang dilakukan untuk menilai integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan misi.

Tabel 3.1. Penyelarasan Asta Cita dengan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2025-2029

No.	Asta Cita sebagai Prioritas Nasional	Misi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai alat pemersatu dan perwujudan nilai-nilai kearifan lokal serta mendorong kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman, nyaman dan adil untuk semua
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan Memperkuat infrastruktur yang handal guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat dan perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah Memperkuat riset dan inovasi serta kerjasama pembangunan guna akselerasi capaian pembangunan melalui <i>multi helix partnership</i> , kerjasama antara daerah maupun kerja sama global
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan

No.	Asta Cita sebagai Prioritas Nasional	Misi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029
	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan serta keberpihakan pada disabilitas dan kelompok marginal
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan Memperkuat infrastruktur yang handal guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat dan perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah Memerangi Kemiskinan, Pengangguran dan Kesenjangan Antar Masyarakat dan Antar Wilayah serta Menjaga Keseimbangan dan Pemerataan Pembangunan
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan serta keberpihakan pada disabilitas dan kelompok marginal Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan berintegritas serta pelayanan publik yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang kompeten dan profesional menuju pemerintahan yang berkelas dunia (<i>world class government</i>)
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai alat pemersatu dan perwujudan nilai-nilai kearifan lokal serta mendorong kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman, nyaman dan adil untuk semua

3.2 Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Riau merupakan cita-cita masyarakat Riau yang akan dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu 2025-2029. Setiap misi memiliki makna dan pesan yang luhur untuk mewujudkan Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul. Dalam mewujudkan kondisi

ini, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Sasaran RPJMD Provinsi Riau selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih juga berisi sasaran pokok RPJPD Provinsi Riau periode pertama. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan antara pembangunan jangka panjang dengan pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, amanat pembangunan jangka panjang Provinsi Riau akan dilaksanakan secara bertahap oleh sasaran pembangunan jangka menengah.

Tujuan dan sasaran RPJMD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Provinsi Riau. Untuk itu, setiap tujuan dan sasaran RPJMD dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran (*impact*) yang terukur, relevan dengan apa yang akan diubah, dan ditetapkan untuk setiap tahun mulai tahun 2025 sampai dengan 2030. Tujuan pada RPJMD telah dilakukan perumusan kaidah dan arsitektur kinerja terhadap pencapaian tujuan.

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

		Misi 1
Tujuan 1	Meningkatkan sumber daya manusia sehat, cerdas, kreatif, unggul, sejahtera dan inklusi	
Riau Cerdas - Riau Mantap - Riau Sehat		
Sasaran	a) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat. b) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang sehat dan produktif. c) Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas keluarga, dan masyarakat inklusif.	

Misi 2

Tujuan 2
Tujuan 3

Meningkatkan ekonomi yang berdaya saing
Mewujudkan pembangunan ekonomi yang
berwawasan lingkungan dan lestari

Riau Berdaya Saing - Riau Mantap -
Riau Membangun Desa Majukan Kota

Sasaran

a) Meningkatnya kemandirian ekonomi dan daya saing daerah.

b) Meningkatnya ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan petani.

c) Peningkatan daya saing investasi.

d) Meningkatnya nilai tambah pariwisata.

e) Peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah.

f) Mengurangi risiko bencana daerah.

Misi 3

Tujuan 4

Mewujudkan infrastruktur yang handal

Riau Membangun Desa Majukan Kota - Riau Mantap

Sasaran

a) Meningkatnya layanan transportasi.

b) Meningkatnya aksesibilitas.

c) Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur

Misi 4

Tujuan 5

Menurunkan angka kemiskinan

Riau Membangun Desa Majukan Kota - Riau Sejahtera - Riau
Berdaya Saing

Sasaran

a) Berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah.

b) Meningkatkan pemberdayaan, produktivitas, dan pendapatan masyarakat.

c) Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.

		Misi 5
Tujuan 6	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	
Riau Berdaya Saing		
Sasaran	a) Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional. b) Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel.	

		Misi 6
Tujuan 7	Penguatan ekosistem riset dan inovasi serta kerjasama pembangunan daerah	
Riau Mantap - Riau Berdaya Saing		
Sasaran	a) Meningkatnya hasil riset dan inovasi untuk pembangunan daerah. b) Meningkatnya kerjasama pembangunan.	

		Misi 7
Tujuan 8	Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat berlandaskan pada kebudayaan Melayu yang agamis	
Riau Cerdas - Riau Sejahtera		
Sasaran	a) Menguatnya nilai-nilai budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat Riau dalam rangka pemajuan kebudayaan Melayu Riau. b) Meningkatnya kerukunan sosial antar masyarakat dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman, dan nyaman.	

Untuk lebih jelas kerangka penjabaran visi dan misi ke level tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta indikator dan target pencapaiannya hingga akhir periode RPJMD pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2. Perumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2030

VISI RIAU BERBUDAYA MELAYU, DINAMIS, EKOLOGIS, AGAMIS DAN MAJU

No.	Misi/Tujuan/Sasaran dan Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 1	Membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan serta keberpihakan pada disabilitas dan kelompok marjinal							
	1.1 Meningkatkan sumber daya manusia sehat, cerdas, kreatif, unggul, sejahtera dan inklusi							
1	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,57	0,58	0,58	0,59	0,60	0,61
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,21 - 89,28	89,29 - 89,40	89,40 - 89,54	89,48 - 89,65	89,59 - 89,78	89,70 - 89,92
	1.1.1 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat							
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,94 - 9,94	10,06 - 10,06	10,18 - 10,18	10,30 - 10,31	10,42 - 10,43	10,55 - 10,56
4	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,56 - 13,57	13,63 - 13,64	13,70 - 13,71	13,77 - 13,79	13,84 - 13,86	13,91 - 13,93
	1.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang sehat dan produktif							
5	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,30	74,58	74,87	75,16	75,44	75,73
	1.1.3 Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas keluarga, dan masyarakat inklusif							
6	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40
7	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	80,60	81,32	81,90	82,39	82,81	83,16
MISI 2	Meningkatkan Perekonomian, Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemanfaatan Sumberdaya secara Optimal dalam Kerangka Pembangunan yang Berkelanjutan							
	2.1 Meningkatkan ekonomi yang berdaya saing							
8	PDRB per kapita	Juta Rp per tahun	165,17 - 174,80	179,62 - 191,10	195,33 - 208,92	212,41 - 228,40	230,99 - 249,70	251,19 - 272,98
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,90 - 4,23	4,18 - 4,60	4,49 - 5,00	4,81 - 5,43	5,16 - 5,90	5,53 - 6,11

No.	Misi/Tujuan/Sasaran dan Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.1.1 Meningkatnya kemandirian ekonomi dan daya saing daerah								
10	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	3,40	3,44	3,47	3,51	3,54	3,58
2.1.2 Meningkatnya ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan petani								
11	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	71,93	73,46	75,04	76,64	78,28	79,95
12	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	168,96	175,67	182,65	189,91	197,45	205,3
2.1.3 Peningkatan daya saing investasi								
13	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	33,00	32,92-33,09	32,84-33,18	32,76-33,28	32,68-33,37	32,60-33,46
2.1.4 Meningkatnya nilai tambah pariwisata								
14	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara	Juta Rp	5.033,93	5.535,32	7.178,86	8.112,11	9.247,80	10.634,97
2.2 Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan lestari								
15	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	58,02	59,35	61,36	63,55	64,82	66,79
2.2.1 Peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah								
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	Indeks	71,85	72,06	72,27	72,48	72,69	72,90
17	Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca	Indeks	46,88	50,57	54,07	57,56	61,06	88,82
2.2.2 Mengurangi Risiko Bencana Daerah								
18	Indeks Risiko Bencana Daerah (IRBD)	Indeks	137,69	137,68	137,67	137,66	137,65	137,64
Misi 3	Memperkuat Infrastruktur yang Handal Guna Kemudahan Akses, Pelayanan Masyarakat dan Perekonomian serta Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah							
3.1 Mewujudkan infrastruktur yang handal								
19	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	75,11	76,19	77,27	78,35	79,43	80,51

No.	Misi/Tujuan/Sasaran dan Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	3.1.1 Meningkatnya layanan transportasi							
20	Rasio konektivitas transportasi	Poin	0,43	0,50	0,57	0,64	0,72	0,78
	3.1.2 Meningkatnya aksesibilitas							
21	Tingkat kemantapan jalan	Persen	69,81	71,61	73,41	75,31	77,21	80,01
	3.1.3 Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur dasar							
22	Indeks layanan infrastruktur dasar	Indeks	75,11	76,19	77,27	78,35	79,43	80,51
Misi 4	Memerangi Kemiskinan, Pengangguran dan Kesenjangan Antar Masyarakat dan Antar Wilayah serta Menjaga Keseimbangan dan Pemerataan Pembangunan							
	4.1 Menurunkan angka kemiskinan							
23	Tingkat kemiskinan	Persen	5,19 - 6,19	4,62 - 5,63	4,11 - 5,13	3,65 - 4,67	3,25 - 4,25	2,89 - 3,87
24	Rasio Gini	Poin	0,302 - 0,304	0,296 - 0,299	0,290 - 0,293	0,285 - 0,288	0,279 - 0,283	0,274 - 0,278
	4.1.1 Berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah							
25	Persentase Penduduk miskin desa	Persen	6,32	6,10	5,89	5,67	5,45	5,24
	4.1.2. Meningkatkan pemberdayaan, produktivitas, dan pendapatan masyarakat							
26	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	Indeks	0,93	0,89	0,85	0,81	0,77	0,73
27	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,55 - 3,66	3,39 - 3,60	3,23 - 3,54	3,08 - 3,48	2,94 - 3,42	2,80 - 3,36
	4.1.3 Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif							
28	Presentase Penduduk yang memiliki setidaknya satu jaminan sosial (Q1)	Persen	24,39	25,74	27,10	28,46	29,82	31,18
Misi 5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dengan Dukungan Aparatur yang Kompeten dan Profesional Menuju Pemerintahan yang Berkelas Dunia (World Class Government)							
	5.1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik							
29	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	84,65	84,74	84,83	84,91	85,00	85,09

No.	Misi/Tujuan/Sasaran dan Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1 Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional								
30	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	77,60	78,70	79,70	80,80	81,80	82,90
31	Nilai survey indeks berakhlak	Poin	71,52	73,64	75,00	76,00	77,00	78,00
32	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefenisi	Terdefenisi	Terdefenisi	Terdefenisi	Terdefenisi	Terkelola dan Terukur
5.1.2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel								
33	Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN)	Indeks	51,50	52,55	53,60	54,65	55,70	56,75
34	Nilai survey kepuasan masyarakat	Poin	72,14	73,04	73,94	74,84	75,74	76,64
35	Nilai SAKIP	Poin	74,52	75,30	76,08	77,86	77,96	78,27
36	Kategori hasil pengukuran Indeks Pengelola Keuangan Daerah (IPKD)	Kategori	B	A	A	A	A	A
Misi 6	Memperkuat Riset dan Inovasi serta Kerjasama Pembangunan Guna Akselerasi Capaian Pembangunan melalui Multi Helix Partnership, Kerjasama Antara Daerah maupun Kerja Sama Global							
6.1 Penguatan ekosistem riset dan inovasi serta kerjasama pembangunan daerah								
37	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Indeks	54,97	56,35	57,75	59,20	60,68	62,80
6.1.1 Meningkatnya hasil riset dan inovasi untuk pembangunan daerah								
38	Indeks kapabilitas inovasi	Indeks	2,67	2,75	2,83	2,92	3,00	3,09
6.1.2 Meningkatnya kerjasama pembangunan								
39	Persentase Kerjasama pembangunan yang sudah dilaksanakan	Persen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Misi 7	Mewujudkan Kebudayaan Melayu sebagai Alat Pemersatu dan Perwujudan Nilai Nilai Kearifan Lokal serta Mendorong Kehidupan Bermasyarakat yang Kondusif, Aman, Nyaman dan Adil untuk Semua							
7.1 Meningkatkan ketahanan sosial budaya mayarakat berlandaskan pada kebudayaan Melayu yang agamis								
40	Indeks harmoni	Indeks	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0

No.	Misi/Tujuan/Sasaran dan Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.1.1 Menguatnya nilai-nilai budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat Riau dalam rangka pemajuan kebudayaan Melayu Riau								
41	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	60,30 - 60,37	60,77 - 60,86	61,24 - 61,36	61,71 - 61,86	62,19 - 62,36	62,67 - 62,87
7.1.2 Meningkatnya kerukunan sosial antar masyarakat dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman, nyaman								
42	Indeks harmoni sosial	Indeks	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0
43	Indeks harmoni religius	Indeks	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0

Sumber: Hasil Analisis

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran dan target pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun cara atau upaya untuk mencapai targetnya. Dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan dimaksud, maka ditetapkan sejumlah strategi dan arah kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Provinsi Riau mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak hanya mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga mencakup seluruh program yang mendukung serta menciptakan layanan masyarakat yang dapat dilaksanakan secara optimal. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas birokrasi, memperbaiki sistem manajemen, serta memanfaatkan teknologi informasi secara efektif.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan daerah agar lebih bersinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi

agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam hal ini, masing-masing arah kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan sebagai cara untuk memenuhi target yang telah ditetapkan di dalam tujuan/sasaran. Dengan demikian, alur perencanaan yang dimulai dari penetapan visi dan misi, sampai kepada tujuan, sasaran, penetapan indikator tujuan/sasaran, penetapan arah kebijakan, penetapan strategi hingga ke level program menjadi jelas arahnya dan merupakan satu kesatuan yang utuh.

Penentuan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Setelah dirumuskan, setiap tahap pembangunan RPJMD dipetakan secara komprehensif terhadap horizon waktu yang telah ditetapkan. Dengan penetapan horizon waktu dalam jangka maksimum lima tahun, tahapan pembangunan RPJMD dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Pentahapan pembangunan RPJMD yang disusun dapat dijalankan dalam satu tahun, namun juga dapat memerlukan waktu yang lebih lama. Pentahapan pembangunan RPJMD ini dapat dijadikan tema atau fokus pembangunan untuk tahun yang bersangkutan. Lebih jelas dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.2 Pentahapan Pembangunan Tahun 2026-2030

A. Fokus Pembangunan Tahun Pertama (2026)

Perkuatan Fondasi Transformasi dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan

Fokus pembangunan Provinsi Riau pada tahun 2026 diarahkan pada Fokus Utama: Perkuatan Transformasi Sosial yaitu Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan (kemiskinan dan jaminan sosial), Agama dan Budaya dalam rangka meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat, menurunkan kesenjangan pendapatan, meningkatkan pemberdayaan, produktivitas masyarakat dan kesejahteraan tenaga kerja serta meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. Selain itu transformasi ekonomi diarahkan juga pada peningkatan produktifitas pertanian dan perkebunan, peningkatan nilai tambah IKM, UMKM, hilirisasi serta koperasi dan menajdikan inovasi sebagai pendorong sektor ekonomi. Transformasi Tata Kelola dengan memperkuat peningkatan kapasitas ASN, implementasi tata kelola pemerintah dan pelayanan publik berbasis IT untuk menajdi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Infrastruktur difokuskan pada infrastruktur dasar, kawasan ekonomi, kawasan strategis yang mendukung daya saing daerah di Provinsi Riau.

B. Fokus Pembangunan Tahun Kedua (2027)

Pemantapan Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing dan Ekonomi Inklusif

Fokus pembangunan Provinsi Riau pada tahun 2027 diarahkan pada Fokus Utama pengembangan kapasitas sumber daya manusia dibidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu perlu mendorong pertumbuhan sektor ekonomi dengan pertanian, pembangunan kawasan industri, hilirisasi produk unggulan, bantuan permodalan UMKM dan koperasi serta fasilitasi dan dukungan kenyamanan serta kemudahan berinvestasi. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, terutama jalan dan fasilitas pendukung lainnya, menjadi prioritas utama agar konektivitas antarwilayah semakin lancar dan efisien Hal ini diharapkan dapat mempercepat distribusi barang dan jasa, membuka akses pasar yang lebih luas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan adaptif diperlukan untuk mendukung keberhasilan pada tahun ini.

C. Fokus Pembangunan Tahun Ketiga (2028)

Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Daerah yang Kompetitif

Fokus pembangunan Provinsi Riau pada tahun 2028 diarahkan pada peningkatan kemandirian ekonomi, pangan, dan energi daerah sebagai langkah strategis menuju masyarakat yang sejahtera. Upaya ini meliputi penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada pasokan dari luar daerah. Tahun 2028 juga menitikberatkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik dan aparatur yang professional dan kompeten. Fokus penting lainnya yaitu mewujudkan lingkungan yang lestari dengan melakukan pengendalian dan pemantauan lingkungan yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mengurangi resiko bencana serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan.

D. Fokus Pembangunan Tahun Keempat (2029)

Memantapkan Kesejahteraan Masyarakat, Pembangunan yang Seimbang dan Mandiri serta Berdaya Saing Tinggi

Fokus pembangunan Provinsi Riau pada tahun 2029 diarahkan pada pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah, sehingga keseimbangan pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Tetap memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Provinsi Riau. Sinergi ini penting untuk memastikan program-program pembangunan tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

E. Fokus Pembangunan Tahun Kelima (2030)

Mewujudkan Riau yang Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju (Riau Bedelau)

Fokus pembangunan Provinsi Riau pada tahun 2030 diarahkan pada pencapaian Visi Riau sebagai Riau yang Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju (Riau Bedelau). Tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau melalui penguatan infrastruktur terintegrasi, pengembangan kawasan strategis dan perdagangan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penguatan daya saing industri berbasis potensi daerah dan ekonomi kreatif mencapai tahap optimal dengan terbentuknya ekosistem inovasi dan jaringan pasar yang luas. Kemudahan layanan publik, revitalisasi nilai-nilai religius dan budaya lokal diperkuat melalui pendidikan karakter, pelestarian warisan budaya, dan harmonisasi hubungan antar umat beragama dan etnis. Kesejahteraan sosial telah mencapai sasaran yang luas dengan berkurangnya angka kemiskinan, meningkatnya usia harapan hidup, dan tercapainya indeks pembangunan manusia yang tinggi.

Secara rinci, tahapan pembangunan Provinsi Riau diuraikan melalui misi Kepala Daerah yang sejalan dengan fokus pembangunan setiap tahunnya, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Penjabaran Pentahapan Pembangunan Tahun 2025-2029 Berdasarkan Misi

Misi	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Misi untuk Mewujudkan Riau Bedelau	Perkuatan Fondasi Tranformasi dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan	Pemantapan Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing dan Ekonomi Inklusif	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Daerah yang Kompetitif	Memantapkan Kesejahteraan Masyarakat, Pembangunan yang Seimbang dan Mandiri serta Berdaya Saing Tinggi	Mewujudkan Riau yang Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju (Riau Bedelau)
Misi 1. Membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan serta keberpihakan pada disabilitas dan kelompok marginal	Pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar pendidikan dan percepatan wajib belajar 13 tahun, kesempatan anak bersekolah, guru, tenaga kependidikan, PAUD dan inisiasi program 1 rumah 1 sarjana	Perluasan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar pendidikan dan percepatan wajib belajar 13 tahun, kesempatan anak bersekolah, guru, tenaga kependidikan, PAUD hingga ke pelosok (terutama di wilayah afirmasi) Pemantapan program 1 rumah 1 sarjana	Percepatan wajib belajar 13 tahun dengan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas dan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yagn berkualitas	Pemerataan dan perluasan wajib belajar 13 tahun dengan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas dan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas	Pengembangan masyarakat Riau yang berkualitas tinggi dengan layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan termasuk kelompok disabilitas dan marginal
	Pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar kesehatan, tenaga kesehatan, jaminan	Perluasan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar kesehatan, tenaga kesehatan, jaminan	Perluasan upaya promotif-preventif melalui pembudayaan perilaku hidup sehat dan	Pemantapan upaya promotif-preventif melalui pembudayaan perilaku hidup sehat dan	Pengembangan masyarakat Riau yang sehat dengan layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan

Misi	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	kesehatan, dan penanganan stunting/wasting	kesehatan hingga ke pelosok (terutama di wilayah afirmasi) Intensifikasi penanganan dan pencegahan stunting/ wasting	pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat	pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat	termasuk kelompok disabilitas dan marginal
	Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan kelompok marjinal (termasuk beasiswa)	Pemerataan peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Intensifikasi beasiswa disabilitas dan kelompok marginal	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan serta peningkatan ketangguhan keluarga	Perluasan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan serta peningkatan ketangguhan keluarga	Pembangunan masyarakat Riau yang setara dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan kelompok marginal
Misi 2. Meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan	Pengembangan industri pengolahan ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan wilayah	Perluasan hasil pengembangan industri pengolahan ekonomi kerakyatan	Penerapan hasil riset dan pemanfaatan teknologi untuk mendorong peningkatan produktifitas ekonomi kerakyatan	Pengembangan hilirisasi komoditas produk unggulan daerah dengan memanfaatkan teknologi produksi	Pemasaran hasil produksi daerah dan peningkatan kerjasama luar daerah dalam pengembangan dan pemasaran hasil produksi daerah
	Pengembangan potensi ekonomi lokal dan inklusif, dengan peningkatan nilai tambah IKM,	Penguatan proses bisnis IKM, UMKM, koperasi, BUMD, BLUD melalui perluasan ekosistem digital disertai	Peningkatan ekosistem digital dan ruang inovasi bagi IKM, UMKM, koperasi, BUMD, dan BLUD	Peningkatan industrialisasi IKM, UMKM, koperasi, BUMD, BLUD melalui hilirisasi komoditas unggulan	Pemantapan nilai tambah IKM, UMKM, koperasi, BUMD, dan BLUD secara berkelanjutan

Misi	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	UMKM, koperasi, BUMD, BLUD	perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis		daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan	
	Peningkatan produktifitas pertanian dan perkebunan	Perluasan peningkatan produktifitas pertanian dan perkebunan melalui pemanfaatan teknologi pertanian dan digital	Pemantapan produktifitas pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan daerah dan akses pangan	Diversifikasi produk dan kerjasama peningkatan produktifitas berkelanjutan dengan sektor industri dan ekosistem internasional	Promosi dan pemasaran produk ke pasar luar daerah dan luar negeri
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, penanganan sampah dan kerjasama bidang lingkungan hidup	Perluasan penanganan permasalahan lingkungan dan peningkatan realisasi kerjasama bidang lingkungan hidup	Percepatan pengurangan gas emisi rumah kaca dan pencapaian Riau Hijau	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste dan circular ekonomi kawasan perkotaan	Pengembangan pengelolaan lingkungan dan pencapaian standar untuk ketahanan perubahan iklim dan kebencanaan

Misi	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Misi 3. Memperkuat infrastruktur yang handal, guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat dan perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah	Pemerataan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik (jalan, jembatan, keretaapi, pelabuhan, penyeberangan, transportasi publik perkotaan) terutama di daerah afirmasi.	Pengembangan lanjut untuk penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik (jalan, jembatan, keretaapi, pelabuhan, penyeberangan, transportasi publik perkotaan) dan pemerliharaan infrasruktur yang sudah dibangun	Pengembangan dan peningkatan infrastruktur ke kawasan strategis serta pengembangan kota tematik sesuai potensi daerah	Penguatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan PKN, PKSN, PKW dan PKL di Provinsi Riau	Perkuatan infrastruktur daerah yang handal, kemudahan akses dan konektivitas untuk peningkatan perekonomian daerah
	Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar (air minum perpipaan, pengolahan air limbah domestik, sanitasi aman), penanganan banjir, rumah layak huni, dan penurunan luasan kawasan kumuh	Pengembangan lanjut pembangunan infrastruktur dasar (air minum perpipaan, pengolahan air limbah domestik, sanitasi aman), penanganan banjir, rumah layak huni, dan penurunan luasan kawasan kumuh	Perluasan dukungan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dasar, penanganan banjir, dan kawasan kumuh	Percepatan penyelesaian masalah banjir, kawasan kumuh, dan pengolahan limbah	Pemantapan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dasar daerah secara merata dan berkelanjutan
	Penyediaan infrastruktur untuk konektivitas kawasan ekonomi, kawasan strategis,	Pemerataan penyediaan infrastruktur untuk konektivitas kawasan ekonomi, kawasan	Peningkatan penyediaan infrastruktur untuk konektivitas kawasan srategis	Pemantapan penyediaan infrastruktur untuk konektivitas kawasan srategis	Perluasan coverage untuk konektivitas dan integrasi antara kawasan pusat

Misi	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	pertanian/ perkebunan	strategis, pertanian/ perkebunan dan jalur logistik khusus	dan percepatan persiapan untuk jalur logistik khusus	dan percepatan pelaksanaan untuk jalur logistik khusus	perkembangan ekonomi, kawasan ekonomi, pusat wisata, dan kawasan perkotaan
Misi 4. Memerangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah serta menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan.	Pemerataan layanan untuk masyarakat miskin, pemberdayaan, jaminan sosial, serta perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif (terutama di daerah afirmasi Kepulauan Meranti) serta penguatan dan keterpaduan data pensasaran	Pengembangan lanjut layanan untuk masyarakat miskin, pemberdayaan, jaminan sosial, serta perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif (terutama di daerah afirmasi Kepulauan Meranti) Pemberdayaan masyarakat miskin melalui pelatihan keterampilan, fasilitas usaha, pendampingan, serta optimalisasi perlindungan sosial	Perluasan perlindungan sosial yang integratif, adaptif, dan inklusif Pemberdayaan masyarakat miskin melalui pelatihan keterampilan, fasilitas usaha, pendampingan, serta optimalisasi perlindungan sosial Perluasan perlindungan terhadap resiko dan guncangan yang akan mempengaruhi kestabilan kehidupan masyarakat rentan Penguatan ekonomi keluarga miskin dengan penciptaan pendapatan baru,	Penguatan jiwa usaha/ entrepreneur, pelatihan dan pelingkatan peluang usaha masyarakat miskin Penguatan ekonomi keluarga miskin dengan penciptaan pendapatan baru, penguatan aset produktif dan pengembangan tabungan keluarga untuk kemandirian dan produktivitas Penguatan kelembagaan pengelolaan ekonomi masyarakat desa dalam pengelolaan potensi dan pemasaran produk	Pemantapan pengentasan kemiskinan, pengangguran dan pengurangan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah Pemantapan sumberdaya manusia ,Permodalan, pengembangan usaha produktif dan pemanfaatan teknologi , dan kehidupan sosial dan budaya masyarakat dalam pembangunan yang inklusif.

Misi	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			penguatan aset produktif dan pengembangan tabungan keluarga untuk kemandirian dan produktivitas	unggulan desa.	
	Pemerataan pembangunan dan pengurangan pengangguran	Peningkatan pemerataan pembangunan dan pengurangan pengangguran Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan publik dan infrastruktur dasar dan lapangan usaha Identifikasi potensi dan keunggulan desa berorientasi kepada sektor basis desa yang mencerminkan keunggulan komperatif desa dan kawasan perdesaan.	Peningkatan pembangunan desa dan kawasan pedesaan yang inklusif untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi Peningkatan pengembangan sektor basis dan keunggulan komperatif dalam satu kawasan perdesaan	Perluasan pembangunan desa dan kawasan pedesaan yang inklusif untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi Perluasan pasar dan informasi promosi sektor basis dengan memanfaatkan Teknologi digital dalam upaya pendukung pertumbuhan ekonomi dan kemandirian ekonomi, sosial budaya berbasis kawasan.	Pemantapan pemerataan pembagunan hingga ke pelosok dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin Pemantapan ekonomi desa yang inklusif an global.

Misi	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Misi 5 Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan berintegritas serta pelayanan publik yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang kompeten dan profesional menuju pemerintahan yang berkelas dunia (<i>world</i> <i>class</i> <i>government</i>).	Peningkatan kapabilitas dan kapasitas ASN serta peningkatan sarana prasarana pendukung pelayanan publik	Pelatihan dan pengembangan dasar-dasar pelaksanaan pelayanan publik dan manajemen pemerintahan	Penerapan TIK dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan komunikasi penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan pemerintahan	Peningkatan penataan dan reformasi birokrasi kelembagaan	Pemantapan aparatur pemerintahan daerah yang kompeten dan profesional
	Penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Pengembangan sistem meritokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik	Pengembangan sistem birokrasi dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel berbasis kinerja dan target pelayanan publik	Pemantapan sistem birokrasi dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan profesional	Pemantapan tata kelola pemerintah yang baik, berintegritas serta pelayanan publik yang berkualitas menuju world class government
Misi 6 Memperkuat riset dan inovasi serta kerjasama pembangunan guna akselerasi capaian pembangunan melalui <i>multi</i>	Peningkatan riset, inovasi dan teknologi digital sebagai pendorong sektor ekonomi	Pengembangan ekosistem riset dan inovasi Iptek dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang dunia usaha dan dunia industri	Pemanfaatan riset dan inovasi daerah di dalam proses perencanaan pembangunan, penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan akselerasi capaian pembangunan	Perluasan atmosfer riset dan inovasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Peningkatan kerjasama entitas riset, perguruan tinggi, SDM unggulan, perangkat daerah untuk akselerasi pembangunan

Misi	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
helix partnership, kerjasama antar daerah maupun kerjasama global.	Peningkatan kerjasama dalam pembangunan daerah, public private partnership	Pengembangan realisasi kerjasama dalam pembangunan daerah, public private partnership	Peningkatan mutihelix partnership dan realisasi kerjasama yang telah dilakukan	Pemantapan kerjasama dan realisasi	Perluasan kerjasama dan percepatan realisasi kerjasama
Misi 7 Mewujudkan kebudayaan melayu sebagai alat pemersatu dan perwujudan nilai nilai kearifan lokal serta mendorong kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman, nyaman dan adil untuk semua.	Peningkatan penyediaan sarana/ prasarana kegiatan kebudayaan Melayu Riau dan Islamic Center Provinsi Riau	Perluasan penyediaan sarana/ prasarana kegiatan kebudayaan Melayu Riau dan Islamic Center Provinsi Riau	Pemberdayaan kelembagaan kebudayaan Melayu Riau dan kelembagaan keagamaan dalam menunjang pembangunan daerah	Pemantauan kelembagaan kebudayaan Melayu, kelembagaan keagamaan serta berfungsinya Islamic Center Provinsi Riau	Perluasan fungsi kelembagaan kebudayaan, keagamaan untuk masyarakat yang kondusif, aman, nyaman, dan adil untuk semua
	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Pemantapan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Pembinaan kepemudaan dan keluarga untuk pengurangan penyakit masyarakat	Perluasan pembinaan masyarakat keluarga untuk pemberantasan penyakit masyarakat	Pemantapan pembinaan masyarakat dan kerukunan antar kelompok serta pengentasan penyakit masyarakat

Sumber: Hasil Analisis

Dengan berlandaskan pada tahapan pencapaian misi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 Tahap Pertama (2025-2029) serta merujuk pada visi dan misi Kepala Daerah periode 2025-2030, berikut dipaparkan arah kebijakan dan strategi, serta langkah-langkah atau upaya yang akan dilaksanakan melalui program strategis dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan tersebut dilakukan dengan rencana tindakan yang komprehensif, berisi langkah-langkah dan upaya yang dilaksanakan melalui strategi dan program prioritas. Program prioritas Kepala Daerah digambarkan melalui:

A. Riau Cerdas

Program prioritas Riau Cerdas menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan yang inklusif, merata, berkualitas dan berbasis karakter guna menunjang daya saing daerah di masa depan. Program prioritas ini dilaksanakan melalui kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Pendidikan gratis: SMA/SMK dan Madrasah, serta dukungan penguatan pendidikan dasar di kabupaten/kota.
2. Beasiswa pendidikan sarjana S1, S2, S3 bagi mahasiswa berprestasi & tenaga pendidik (1 rumah 1 sarjana).
3. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik yang merata dan berkeadilan.
4. Dukungan dan kerjasama universitas/perguruan tinggi.
5. Beasiswa pendidikan bagi penyandang disabilitas dan kelompok marjinal.
6. Penguatan pendidikan moralitas dan keagamaan.
7. Dukungan penguatan pendidikan anak usia dini.
8. Penguatan sarana dan prasarana kependidikan, melalui pembangunan gedung sekolah, ruang kelas baru, jalan akses, sarana prasarana mengajar dan sarpras lainnya secara merata.
9. Mendorong peningkatan program pertukaran mahasiswa/pelajar, magang kerja dan kerjasama pendidikan lintas negara.

B. Riau Sehat

Program prioritas Riau Sehat menitikberatkan pada perwujudan masyarakat Riau yang sehat secara menyeluruh baik fisik, mental maupun sosial melalui layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan.

Program ini tidak hanya menekankan pada penyembuhan penyakit, tetapi juga pada pencegahan, promotif, dan pembangunan sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan. Program prioritas ini dilaksanakan melalui kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Dukungan penguatan *Universal Health Coverage* (UHC) dan peningkatan jaminan kesehatan nasional di Provinsi Riau.
2. Percepatan penanganan stunting dan pencegahan wasting (gizi buruk).
3. Penguatan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan posyandu dan rumah sakit.
4. Pencegahan dan antisipasi dini penyebaran wabah dan penyakit menular.
5. Peningkatan jumlah dan kompetensi dokter dan tenaga medis, serta distribusi yang merata.
6. Penguatan dan dukungan dokter spesialis serta fasilitasi puskesmas mandiri.
7. Penguatan kerjasama kesehatan lingkup regional dan global.
8. Gerakan hidup sehat melalui pola makan bergizi dan gemar olahraga.

C. Riau Mantap

Program prioritas Riau Mantap mencerminkan komitmen pemerintah Provinsi Riau untuk membangun fondasi fisik dan tata ruang wilayah yang kuat, merata, berwawasan lingkungan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui konektivitas dan kerjasama antarwilayah. Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur tetapi juga mencakup perencanaan strategis lintas sektor, penguatan konektivitas antarwilayah, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat guna mewujudkan keadilan dan kemajuan daerah secara menyeluruh. Program prioritas ini dilaksanakan melalui kegiatan prioritas sebagai

berikut:

1. Kajian pemerataan pembangunan daerah.
2. Mendorong ketahanan energi serta pemanfaatan energi berkelanjutan.
3. Pembangunan TPST Regional untuk pengelolaan limbah yang berkelanjutan.
4. Dukungan penyelesaian banjir kabupaten/kota.
5. Peningkatan penyediaan air bersih.
6. Pembangunan rumah layak huni dan sanitasi.
7. Peningkatan infrastruktur wilayah pesisir dan sentra-sentra produksi.
8. Penguatan kerjasama daerah Pekansikawan, Siap Bedelau dan kerjasama strategis lainnya.
9. Pembangunan jalan dan jembatan provinsi.
10. Pembangunan *Islamic Centre* Provinsi Riau.
11. Dukungan relokasi bandara Sultan Syarif Qasim (SSQ) II Pekanbaru.
12. Penataan aset daerah Provinsi Riau.
13. Penyiapan jalur kereta barang penunjang industri dan perekonomian masyarakat.

D. Riau Berdaya Saing

Program prioritas Riau Berdaya Saing menjadikan Provinsi Riau sebagai kawasan ekonomi yang unggul, kompetitif, dan adaptif terhadap tantangan global melalui penguatan struktur ekonomi, inovasi, dan tata kelola pemerintahan yang mendukung ekosistem bisnis yang sehat.

Program ini mencakup upaya komprehensif dari hulu ke hilir melalui perkuatan produksi, menciptakan nilai tambah, meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan, serta menarik investasi dalam ekosistem yang kondusif dan kolaboratif. Program prioritas ini dilaksanakan melalui kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Hilirisasi produk pada sektor - sektor unggulan.
2. Penguatan dan pengembangan kawasan industri di Provinsi Riau.
3. Dukungan pembangunan pusat - pusat pertumbuhan ekonomi.

4. Peningkatan ketahanan pangan daerah.
5. Bantuan permodalan UMKM dan koperasi.
6. Penguatan riset dan inovasi serta pemanfaatan teknologi digital.
7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
8. Penguatan dan pengembangan BUMD dan BLUD.
9. Fasilitasi dan dukungan kenyamanan serta kemudahan berinvestasi.
10. Pembangunan melalui pola *Public Private Partnership* dan kerjasama antar daerah.

E. Riau Membangun Desa Majukan Kota

Program prioritas Riau Membangun Desa Memajukan Kota menitikberatkan pada pemerataan pembangunan wilayah, mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, serta mewujudkan keterpaduan pembangunan berbasis potensi lokal dan kebutuhan riil masyarakat. Selain itu juga mewujudkan pembangunan Riau yang berbasis keadilan wilayah, dengan desa yang berdaya, mandiri dan produktif serta kota yang nyaman, tertata, dan layak huni. Program prioritas ini dilaksanakan melalui kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Fasilitasi dan dukungan penyelesaian persoalan sampah, banjir dan air bersih.
2. Peningkatan transportasi publik di perkotaan.
3. Mendorong pengembangan kota tematik sesuai potensi daerah.
4. Bantuan keuangan desa.
5. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga desa.

F. Riau Sejahtera

Riau Sejahtera mencerminkan komitmen pemerintah Provinsi Riau untuk mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri secara ekonomi, terlindungi secara sosial, dan hidup dalam lingkungan yang aman, inklusif, dan toleran melalui pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pembangunan sosial yang harmonis. Program prioritas ini dilaksanakan melalui kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Penuntasan kemiskinan ekstrim dan penurunan angka kemiskinan daerah.

2. Peningkatan peluang kerja dan penurunan angka pengangguran.
3. Penguatan jiwa usaha/entrepreneur dan peningkatan peluang usaha di masyarakat.
4. Dukungan peningkatan kenyamanan, keamanan, toleransi dan kesejahteraan rakyat.

Perencanaan dan pelaksanaan program-program prioritas tersebut dilaksanakan pada tahun rencana sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan dan kesiapan program, termasuk ketersediaan pendanaan, serta berdasarkan persetujuan Kepala Daerah Provinsi Riau. Penetapan program prioritas dilakukan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta kinerja pelaksanaan yang menerapkan manajemen risiko pembangunan daerah.

Asta cita memuat 17 program prioritas Presiden diselaraskan dengan 6 program prioritas Kepala Daerah Provinsi Riau melalui rencana kegiatan strategis pembangunan diberbagai sektor. Berikut dijabarkan penyelarasan yang dimaksud.

Tabel 3.4. Penyelarasan 17 Program Prioritas Presiden dengan 6 Program Prioritas Provinsi Riau Tahun 2025-2029

No.	RPJMN 2025-2029	RPJMD Provinsi Riau 2025-2029	
	Program Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Strategis
1	Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.	Riau Mantap	1. Mendorong ketahanan energi serta pemanfaatan energi berkelanjutan. 2. Peningkatan penyediaan air bersih.
		Riau Berdaya Saing	3. Peningkatan ketahanan pangan daerah
		Riau Membangun Desa Majukan Kota	4. Fasilitasi dan dukungan penyelesaian persoalan sampah, banjir dan air bersih.
2	Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	Riau Berdaya Saing	1. Penguatan dan pengembangan BUMD dan BLUD
3	Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	Riau Berdaya Saing	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas
		Riau Membangun Desa Majukan Kota	2. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga desa
		Riau Sejahtera	3. Dukungan peningkatan kenyamanan, keamanan, toleransi dan kesejahteraan rakyat.

RPJMN 2025-2029		RPJMD Provinsi Riau 2025-2029	
No.	Program Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Strategis
4	Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	Riau Berdaya Saing	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas
5	Pemberantasan kemiskinan.	Riau Sejahtera	1. Penuntasan kemiskinan ekstrim dan penurunan angka kemiskinan daerah
			2. Peningkatan peluang kerja dan penurunan angka pengangguran
			3. Penguatan jiwa usaha/entrepreneur dan peningkatan peluang usaha di masyarakat
			4. Dukungan peningkatan kenyamanan, keamanan, toleransi dan kesejahteraan rakyat.
		Riau Membangun Desa Majukan Kota	5. Bantuan keuangan desa.
		Riau Berdaya Saing	6. Peningkatan ketahanan pangan daerah
			7. Bantuan permodalan UMKM dan koperasi.
		Riau Mantap	8. Peningkatan penyediaan air bersih
			9. Pembangunan rumah layak huni dan sanitasi
			10. Peningkatan infrastruktur wilayah pesisir dan sentra-sentra produksi.
Riau Sehat	11. Dukungan penguatan Universal Health Coverage (UHC) dan peningkatan jaminan kesehatan nasional di Provinsi Riau		
	Riau Cerdas	12. Pendidikan gratis: SMA/SMK dan Madrasah, serta dukungan penguatan pendidikan dasar di kabupaten/kota	
13. Beasiswa pendidikan sarjana S1, S2, S3 bagi mahasiswa berprestasi & tenaga pendidik (1 rumah 1 sarjana)			
14. Beasiswa pendidikan bagi penyandang disabilitas dan kelompok marjinal.			
6	Pencegahan dan pemberantasan narkoba.	Riau Cerdas	1. Penguatan pendidikan moralitas dan keagamaan
		Riau Sehat	2. Gerakan hidup sehat melalui pola makan bergizi dan gemar olahraga
7	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat	Riau Sehat	1. Dukungan penguatan Universal Health Coverage (UHC) dan peningkatan jaminan kesehatan

No.	RPJMN 2025-2029	RPJMD Provinsi Riau 2025-2029	
	Program Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Strategis
	Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.		nasional di Provinsi Riau. 2. Percepatan penanganan stunting dan pencegahan wasting (gizi buruk). 3. Penguatan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan posyandu dan rumah sakit. 4. Pencegahan dan antisipasi dini penyebaran wabah dan penyakit menular. 5. Peningkatan jumlah dan kompetensi dokter dan tenaga medis, serta distribusi yang merata. 6. Penguatan dan dukungan dokter spesialis serta fasilitasi puskesmas mandiri. 7. Penguatan kerjasama kesehatan lingkup regional dan global.
8	Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.	Riau Cerdas	1. Pendidikan gratis: SMA/SMK dan Madrasah, serta dukungan penguatan pendidikan dasar di kabupaten/kota. 2. Beasiswa pendidikan sarjana S1, S2, S3 bagi mahasiswa berprestasi & tenaga pendidik (1 rumah 1 sarjana). 3. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik yang merata dan berkeadilan. 4. Dukungan dan kerjasama universitas/ perguruan tinggi. 5. Beasiswa pendidikan bagi penyandang disabilitas dan kelompok marjinal. 6. Penguatan pendidikan moralitas dan keagamaan. 7. Dukungan penguatan pendidikan anak usia dini. 8. Penguatan sarana dan prasarana kependidikan, melalui pembangunan gedung sekolah, ruang kelas baru, jalan akses, sarana prasarana mengajar dan sarpras lainnya secara merata. 9. Mendorong peningkatan program pertukaran mahasiswa/pelajar, magang kerja dan kerjasama pendidikan

No.	RPJMN 2025-2029	RPJMD Provinsi Riau 2025-2029	
	Program Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Strategis
			lintas negara.
		Riau Berdaya Saing	10. Penguatan riset dan inovasi serta pemanfaatan teknologi digital.
9	Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.	Riau Cerdas	1. Mendorong peningkatan program pertukaran mahasiswa/pelajar, magang kerja dan kerjasama pendidikan lintas negara
		Riau Sehat	2. Penguatan kerjasama kesehatan lingkup regional dan global.
		Riau Mantap	3. Penguatan kerjasama daerah Pekansikawan, Siap Bedelau dan kerjasama strategis lainnya.
10	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.	Riau Cerdas	1. Beasiswa pendidikan bagi penyandang disabilitas dan kelompok marjinal.
11	Menjamin pelestarian lingkungan hidup.	Riau Mantap	1. Mendorong ketahanan energi serta pemanfaatan energi berkelanjutan 2. Pembangunan TPST Regional untuk pengelolaan limbah yang berkelanjutan. 3. Dukungan penyelesaian banjir kabupaten/kota. 4. Pembangunan rumah layak huni dan sanitasi 5. Peningkatan infrastruktur wilayah pesisir dan sentra-sentra produksi
		Riau Membangun Desa Majukan Kota	6. Fasilitasi dan dukungan penyelesaian persoalan sampah, banjir dan air bersih
12	Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.	Riau Berdaya Saing	1. Peningkatan ketahanan pangan daerah
13	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.	Riau Membangun Desa Majukan Kota	1. Fasilitasi dan dukungan penyelesaian persoalan sampah, banjir dan air bersih
		Riau Mantap	2. Peningkatan penyediaan air bersih. 3. Pembangunan rumah layak huni dan sanitasi.
14	Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan	Riau Berdaya Saing	1. Bantuan permodalan UMKM dan koperasi.
		Riau Mantap	2. Kajian pemerataan

No.	RPJMN 2025-2029	RPJMD Provinsi Riau 2025-2029	
	Program Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Strategis
	UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri, lainnya.	Riau Membangun Desa Majukan Kota	3. Peningkatan infrastruktur wilayah pesisir dan sentra-sentra produksi. 4. Mendorong pengembangan kota tematik sesuai potensi daerah
15	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.	Riau Mantap	1. Peningkatan infrastruktur wilayah pesisir dan sentra-sentra produksi. 2. Fasilitasi dan dukungan kenyamanan serta kemudahan berinvestasi 3. Penyiapan jalur kereta barang penunjang industri dan perekonomian masyarakat
		Riau Berdaya Saing	4. Hilirisasi produk pada sektor - sektor unggulan. 5. Dukungan pembangunan pusat - pusat pertumbuhan ekonomi.
		Riau Sejahtera	6. Peningkatan peluang kerja dan penurunan angka pengangguran 7. Penguatan jiwa usaha/entrepreneur dan peningkatan peluang usaha di masyarakat.
16	Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.	Riau Cerdas	1. Penguatan pendidikan moralitas dan keagamaan.
		Riau Mantap	2. Pembangunan <i>Islamic Centre</i> Provinsi Riau
17	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.	Riau Sejahtera	1. Penguatan jiwa usaha/entrepreneur dan peningkatan peluang usaha di masyarakat.
		Riau Berdaya Saing	2. Bantuan permodalan UMKM dan koperasi
		Riau Sehat	3. Gerakan hidup sehat melalui pola makan bergizi dan gemar olahraga.

Sumber: RPJMN 2025-2029 dan Hasil Analisis

Program prioritas Kepala Daerah Provinsi Riau diintegrasikan dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya yang dianggarkan dalam dokumen perencanaan tahunan Provinsi Riau agar memudahkan dalam pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Penjabaran arah kebijakan berdasarkan sasaran misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Misi 1	
Sasaran 1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
Arah Kebijakan	
a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah; b) Peningkatan akses pelayanan dasar pendidikan untuk masyarakat miskin (semua siswa miskin harus bersekolah sampai jenjang tertinggi); c) Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; d) Dukungan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan STEAM; e) Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas; f) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; g) Pengembangan budaya gemar membaca.	

Upaya dalam mendukung arah kebijakan pada sasaran Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat dilaksanakan melalui program strategis **Riau Cerdas** (bidang pendidikan) dan **Riau Mantap** (sarana dan prasarana). Berikut ini dijabarkan strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kegiatan strategis.

Tabel 3.5 Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
1	Pendidikan gratis jenjang pendidikan SMA/SMK dan Madrasah serta penguatan pendidikan dasar di kabupaten/kota	• Pendidikan gratis melalui pembiayaan operasional sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
2	Beasiswa pendidikan sarjana S1, S2, S3 bagi mahasiswa berprestasi & tenaga pendidik (1 rumah 1 sarjana)	• Beasiswa pendidikan Sarjana S1, S2, S3 bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu berbasis <i>science, technology, engineering, arts, mathematics (STEAM)</i>	Program Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
3	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik yang merata dan berkeadilan	• Peningkatan pembelajaran yang inovatif dan interaktif melalui pelatihan guru secara berkelanjutan • Peningkatan kuantitas, kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik yang merata dan berkeadilan	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan
4	Dukungan dan kerjasama universitas/ perguruan tinggi	• Identifikasi universitas/ perguruan tinggi yang telah melakukan kerjasama. • Melakukan penguatan dan pengembangan kerja sama dengan universitas/ perguruan tinggi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah	Program Kesejahteraan Rakyat Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah
5	Beasiswa pendidikan bagi penyandang disabilitas dan kelompok marjinal	• Peningkatan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas dan kelompok marginal • Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan siswa Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
6	Penguatan pendidikan moralitas dan keagamaan	• Dukungan peningkatan kualitas layanan pendidikan pesantren serta pendidikan keagamaan	Program Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
7	Dukungan penguatan pendidikan anak usia dini	• Dukungan penguatan kualitas layanan PAUD dan pendidikan dasar	Program Pengelolaan Keuangan	Keuangan
8	Penguatan sarana dan prasarana kependidikan, melalui pembangunan gedung sekolah, ruang kelas baru, jalan akses, sarana prasarana mengajar dan sarpras lainnya secara merata	• Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas • Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, dan kaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) • Peningkatan kualitas perpustakaan	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pembinaan Perpustakaan	Pendidikan Perpustakaan

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
9	Mendorong peningkatan program pertukaran mahasiswa/pelajar, magang kerja dan kerjasama pendidikan	Dukungan peningkatan program pertukaran mahasiswa/pelajar, magang kerja dan kerjasama pendidikan lintas negara	Program Pengelolaan Pendidikan Program Kesejahteraan Rakyat	Pendidikan Sekretariat Daerah
10	Pembangunan <i>Islamic Center</i> Provinsi Riau	Pembangunan <i>Islamic Center</i> dan Institut Quran Riau	Program Penataan Bangunan Gedung	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber: Hasil Analisis

Misi 1

Sasaran 2

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Sehat dan Produktif

Arah Kebijakan

- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
- Pemenuhan hak dasar pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin
- Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
- Peningkatan kualitas, kesejahteraan, dan pemerataan tenaga kesehatan
- Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting
- Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
- Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis
- Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat
- Peningkatan pembangunan keolahragaan
- Pemenuhan hak dasar pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin

Upaya dalam mendukung arah kebijakan pada sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Sehat dan Produktif dilaksanakan melalui program strategis **Riau Sehat**. Berikut ini dijabarkan strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kegiatan strategis.

Tabel 3.6 Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Sehat dan Produktif

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
1	Dukungan penguatan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) dan peningkatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Riau	• Peningkatan dan penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
2	Percepatan penanganan stunting dan pencegahan wasting (gizi buruk)	• Peningkatan promosi kesehatan dan perubahan perilaku pola pengasuhan • Peningkatan kualitas intervensi pada kelompok sasaran • Penguatan tata kelola dan pemantauan status gizi dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kesehatan
3	Penguatan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan posyandu dan rumah sakit	• Peningkatan sarana prasarana RS sesuai standar layanan • Dukungan peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan • Peningkatan akses pelayanan dasar kesehatan untuk masyarakat miskin (semua masyarakat miskin terjaga gizinya, terlindungi dari penyakit dan mendapat layanan kesehatan dan penyandang disabilitas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
4	Pencegahan dan antisipasi dini penyebaran wabah dan penyakit menular	• Mitigasi sumber dan resiko penyakit menular dan penyakit tropis • Pengendalian potensi wabah dan KLB	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
5	Peningkatan jumlah dan kompetensi dokter dan tenaga medis, serta distribusi yang merata	• Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan
6	Penguatan dan dukungan dokter spesialis serta fasilitasi puskesmas mandiri	• Distribusi dan penempatan dokter spesialis • Peningkatan kapasitas pelayanan puskesmas • Kemandirian puskesmas dalam manajemen dan keuangan • Kolaborasi dan jejaring layanan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
7	Penguatan kerjasama kesehatan lingkup regional dan global	- Kolaborasi penanggulangan penyakit lintas wilayah - Penguatan jejaring rumah sakit berdasarkan kompetensi - Partisipasi dalam jaringan kesehatan global	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
8	Gerakan hidup sehat melalui pola makan bergizi dan gemar olahraga	- Peningkatan akses pangan bergizi - Pembudayaan perilaku hidup sehat dari usia dini dalam lingkungan keluarga dan dunia pendidikan - Peningkatan daya saing keolahragaan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Kesehatan Kepemudaan dan Olahraga

Sumber: Hasil Analisis

Misi 1

Sasaran 3

Meningkatnya Kesetaraan Gender, Kualitas Keluarga, dan Masyarakat Inklusif

Arah Kebijakan

a) Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan

b) Peningkatan kualitas perlindungan anak

c) Peningkatan ketangguhan keluarga

d) Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia

e) Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan

f) Pengaturan fertilitas melalui program KB dengan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan advokasi

Upaya dalam mendukung arah kebijakan pada sasaran Meningkatkan Kesetaraan Gender, Kualitas Keluarga, dan Masyarakat Inklusif. Berikut ini dijabarkan strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kegiatan strategis.

Tabel 3.7 Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatkan Kesetaraan Gender, Kualitas Keluarga, dan Masyarakat Inklusif

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
1	Pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah	- Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan - Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan - Peningkatan partisipasi	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
		aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan • Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Penguasaan tata kelola dan pelebagaan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan		
2	Perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh	• Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak • Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak dan perlakuan salah lainnya	Program Perlindungan Khusus Anak Program Pemenuhan Hak Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Peningkatan kuantitas dan kualitas penduduk	• Integrasi program KB ke dalam pembangunan sosial, budaya dan ekonomi • Desentralisasi kewenangan dan komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	Program Pengendalian Penduduk	Pengendalian Penduduk
4	Penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	• Penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter dan pengembangan psikosial anak • Penyediaan fasilitas pendukung keluarga dalam melaksanakan fungsi utama keluarga • Pemenuhan hak sipil dan hukum serta afirmasi bagi keluarga rentan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Pemberdayaan dan perlindungan penyandang disabilitas dan lanjut usia	• Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia • Penguatan prinsip dan pendekatan kesetaraan, partisipasi dan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Penguatan kemandirian dan kewirausahaan pemuda	• Penguatan kemandirian dan kepoloporan pemuda • Penguatan jiwa usaha/ entrepreneur dan wirausaha	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga

Sumber: Hasil Analisis

Misi 2	
Sasaran 1	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Daerah
Arah Kebijakan	
a) Pengembangan industri pengolahan yang ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah b) Peningkatan pendapatan daerah c) Penguatan ekosistem ekonomi syariah	

Upaya dalam mendukung arah kebijakan pada sasaran Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Daerah dilaksanakan melalui program strategis **Riau Berdaya Saing**. Berikut ini dijabarkan strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kegiatan strategis.

Tabel 3.8 Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Daerah

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
1	Hilirisasi produk pada sektor - sektor unggulan	Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi unggulan yang ramah lingkungan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian	Pertanian
2	Penguatan dan pengembangan kawasan industri di Provinsi Riau	Pengembangan kawasan industri	Program Pengembangan Ekspor Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Perdagangan Perindustrian
3	Penguatan dan pengembangan BUMD dan BLUD	- Meningkatkan pendapatan daerah - Meningkatnya kinerja BUMD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Perekonomian dan Pembangunan	Keuangan Sekretariat Daerah
4	Pengembangan kelembagaan dan industri halal serta sinergi kebijakan ekonomi syariah	- Meningkatkan Industri Halal, UMKM Halal dan Ekspor Halal - Menguatkan Keuangan Syariah - Menguatkan Dana Sosial Syariah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengembangan UMKM Program Perekonomian dan Pembangunan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sekretariat Daerah

Sumber: Hasil Analisis

	Misi 2
Sasaran 2	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani
Arah Kebijakan	
a) Peningkatan ketahanan pangan daerah dan akses pangan untuk masyarakat b) Peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat petani miskin	

Upaya dalam mendukung arah kebijakan pada sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani dilaksanakan melalui program strategis **Riau Berdaya Saing**. Berikut ini dijabarkan strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kegiatan strategis.

Tabel 3.9 Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
1	Peningkatan ketahanan pangan daerah	• Meningkatkan ketersediaan pangan dari produksi lokal (padi, daging, telur, dan ikan) • Meningkatkan layanan irigasi • Pemberdayaan masyarakat, pengembangan dan perluasan unit usaha ekonomi desa, branding desa sebagai upaya peningkatan pedapatan dan daya saing daerah • Meningkatkan keterjangkauan pangan • Pemanfaatan pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pertanian Kelautan dan Perikanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pangan Perdagangan

Sumber: Hasil Analisis

		Misi 2
Sasaran 3	Peningkatan Daya Saing Daerah	
Arah Kebijakan		
a) Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses permodalan di tingkat pusat dan daerah		

Upaya dalam mendukung arah kebijakan pada sasaran Peningkatan Daya Saing Daerah dilaksanakan melalui program strategis **Riau Berdaya Saing**. Berikut ini dijabarkan strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kegiatan strategis.

Tabel 3.10 Kegiatan Strategis Pada Sasaran Peningkatan Daya Saing Daerah

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
1	Fasilitasi dan Dukungan Kenyamanan serta Kemudahan Berinvestasi	Fasilitasi dan Dukungan Kemudahan Berinvestasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penanaman Modal

Sumber: Hasil Analisis

		Misi 2
Sasaran 4	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata	
Arah Kebijakan		
a) Penataan amenitas, peningkatan SDM pariwisata dan manajemen pengelolaan destinasi wisata		

Upaya dalam mendukung arah kebijakan pada sasaran Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dilaksanakan melalui program strategis **Riau Berdaya Saing**. Berikut ini dijabarkan strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kegiatan strategis.

Tabel 3.11 Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
1	Dukungan pembangunan pusat - pusat pertumbuhan ekonomi	Pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, religi, kesehatan dengan pelibatan masyarakat	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata	Pariwisata

Sumber: Hasil Analisis

Misi 2

Sasaran 5

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Arah Kebijakan

- a) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- b) Mendorong ketahanan dan transisi energi

Upaya dalam mendukung arah kebijakan pada sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah dilaksanakan melalui program strategis **Riau Mantap dan Riau Membangun Desa Majukan Kota**. Berikut ini dijabarkan strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kegiatan strategis.

Tabel 3.12 Kegiatan Strategis Pada Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
1	Pembangunan TPST Regional untuk pengelolaan limbah yang berkelanjutan	Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengelolaan Hutan Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kehutanan
2	Fasilitasi dan Dukungan Penyelesaian Persoalan Sampah, Banjir dan Air Bersih		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kelautan dan Perikanan

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
3	Mendorong Ketahanan Energi serta Pemanfaatan Energi Berkelanjutan	Membangun infrastruktur EBT	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumber: Hasil Analisis

	Misi 2
Sasaran 6	Mengurangi Risiko Bencana Daerah
Arah Kebijakan	
a) Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan bencana	

Upaya dalam mendukung arah kebijakan pada sasaran Mengurangi Risiko Bencana Daerah dilaksanakan melalui program strategis **Riau Mantap**. Berikut ini dijabarkan strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kegiatan strategis.

Tabel 3.13 Kegiatan Strategis Pada Sasaran Mengurangi Risiko Bencana Daerah

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
1	Dukungan penyelesaian banjir kabupaten/ kota	Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Drainase Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber: Hasil Analisis

Upaya dalam mendukung arah kebijakan pada sasaran Meningkatkan Layanan Transportasi dilaksanakan melalui program strategis **Riau Membangun Desa Majukan Kota** dan **Riau Mantap**.

		Misi 3
Sasaran 1	Meningkatnya Layanan Transportasi	
Arah Kebijakan		
a) Peningkatan infrastruktur untuk konektivitas wilayah		

Berikut ini dijabarkan strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kegiatan strategis.

Tabel 3.14 Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Layanan Transportasi

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
1	Peningkatan transportasi publik di perkotaan	Penguatan kerjasama antar wilayah untuk penerapan angkutan aglomerasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Pengelolaan Pelayaran	Perhubungan
2	Penyiapan jalur kereta barang penunjang industri dan perekonomian masyarakat	Mendorong terwujudnya pembangunan jalur kereta api	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Perhubungan

Sumber: Hasil Analisis

		Misi 3
Sasaran 2	Meningkatnya Aksesibilitas	
Arah Kebijakan		
a) Peningkatan infrastruktur untuk konektivitas wilayah		

Upaya dalam mendukung arah kebijakan pada sasaran Meningkatkan Aksesibilitas dilaksanakan melalui program strategis **Riau Mantap**. Berikut ini dijabarkan strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kegiatan strategis.

Tabel 3.15 Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
1	Pembangunan jalan dan jembatan provinsi	Pemantapan jalan dan peningkatan aksesibilitas	Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber: Hasil Analisis

	Misi 3
Sasaran 3	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar
Arah Kebijakan a) Peningkatan infrastruktur dasar b) Peningkatan akses pelayanan dasar infrastruktur masyarakat miskin c) Pengembangan kota tematik sesuai potensi daerah d) Mendorong pembangunan, pengembangan dan peningkatan infrastruktur ke kawasan strategis Provinsi Riau	

Upaya dalam mendukung arah kebijakan pada sasaran Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dilaksanakan melalui program strategis **Riau Membangun Desa Majukan Kota** dan **Riau Mantap**. Berikut ini dijabarkan strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kegiatan strategis.

Tabel 3.16 Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
1	Mendorong pengembangan kota tematik sesuai potensi daerah	Penguatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan (PKN, PKSN, PKW, PKL)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Peningkatan penyediaan air bersih	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan	Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Pembangunan rumah layak huni dan sanitasi	- Dukungan pengelolaan dan pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik - Dukungan percepatan pembangunan rumah layak huni yang bersanitasi aman - Percepatan penurunan luasan kawasan kumuh kewenangan provinsi	Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengembangan Perumahan Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Keuangan

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
4	Peningkatan infrastruktur wilayah pesisir dan sentra-sentra produksi	Membangun infrastruktur ketenagalistrikan	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Penguatan kerjasama daerah Pekansikawan, Siap Bedelau dan kerjasama strategis lainnya	Penguatan kelembagaan kerjasama dan pengembangan antar wilayah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Dukungan relokasi bandara SSQ II Pekanbaru	Penguatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan (PKN, PKSN, PKW, PKL)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber: Hasil Analisis

	Misi 4
Sasaran 1	Berkurangnya Kesenjangan Antar Masyarakat dan Antar Wilayah
Arah Kebijakan	
	a) Pemerataan pembangunan dan pengurangan wilayah kantong kemiskinan

Upaya dalam mendukung arah kebijakan pada sasaran Berkurangnya Kesenjangan Antar Masyarakat dan Antar Wilayah dilaksanakan melalui program strategis **Riau Membangun Desa Majukan Kota** dan **Riau Mantap**. Berikut ini dijabarkan strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kegiatan strategis.

Tabel 3.17 Kegiatan Strategis Pada Sasaran Berkurangnya Kesenjangan Antar Masyarakat dan Antar Wilayah

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
1	Bantuan keuangan desa	Peningkatan pembangunan desa dan kawasan pedesaan yang inklusif untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru	Program Pengelolaan Keuangan	Keuangan
2	Pembinaan dan pemberdayaan lembaga desa		Program Peningkatan Kerjasama Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber: Hasil Analisis

	Misi 4
Sasaran 2	Meningkatkan Pemberdayaan, Produktivitas, dan Pendapatan Masyarakat
Arah Kebijakan	a) Peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat b) Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM

Upaya dalam mendukung arah kebijakan pada sasaran Meningkatkan Pemberdayaan, Produktivitas, dan Pendapatan Masyarakat dilaksanakan melalui program strategis **Riau Berdaya Saing** dan **Riau Sejahtera**. Berikut ini dijabarkan strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kegiatan strategis.

Tabel 3.18 Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan, Produktivitas, dan Pendapatan Masyarakat

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
1	Peningkatan peluang kerja dan penurunan angka pengangguran	• Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja • Sertifikasi dan skill tenaga kerja pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja • Peningkatan kualitas BLK • Peningkatan akses dan peluang kerja	Program Hubungan Industrial Program Pelatihan Kerja & Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
2	Penguatan jiwa usaha/ entrepreneur dan peningkatan peluang usaha di masyarakat	• Penguatan jiwa usaha/entrepreneur, wirausaha, pelatihan UMKM dan peningkatan peluang usaha di masyarakat • Peningkatan keahlian SDM dan kualitas produk	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, & Usaha Mikro (UMKM) Program Pemberdayaan & Perlindungan Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	Bantuan Permodalan UMKM dan Koperasi	• Penguatan kelembagaan dan akses permodalan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, & Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sumber: Hasil Analisis

		Misi 4
Sasaran 3	Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif	
Arah Kebijakan		
a) Pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin		

Upaya dalam mendukung arah kebijakan pada sasaran Meningkatkan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif dilaksanakan melalui program strategis **Riau Sejahtera**. Berikut ini dijabarkan strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kegiatan strategis.

Tabel 3.19 Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatkan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
1	Penuntasan kemiskinan ekstrim dan penurunan angka kemiskinan daerah	• Perlindungan sosial yang integratif, adaptif dan inklusif • Peningkatan layanan kepemilikan dokumen kependudukan dan tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat miskin, rentan dan marginal • Dukungan asesmen pembaruan, pengelolaan dan pemanfaatan data terpadu sosial ekonomi untuk pensasaran dalam perencanaan pembangunan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat Program Hubungan Industrial Program Perlindungan & Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Kesehatan Tenaga Kerja Sosial Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber: Hasil Analisis

		Misi 5
Sasaran 1	Meningkatnya Budaya Birokrasi Berakhlak dengan ASN yang Profesional	
Arah Kebijakan		
a) Peningkatan profesionalitas ASN dan budaya kerja ASN		

Upaya dalam mendukung arah kebijakan pada sasaran Meningkatkan Budaya Birokrasi Berakhlak dengan ASN yang Profesional. Berikut ini dijabarkan strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kegiatan strategis.

Tabel 3.20 Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Budaya Birokrasi Berakhlak dengan ASN yang Profesional

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
1	Penguatan tata kelola dan integritas aparatur	• Peningkatan kapasitas ASN • Peningkatan implementasi Merit Sistem • Peningkatan budaya kerja dan pelayanan prima • Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada unit kerja • Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Penataan Organisasi Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Daerah Inspektorat Daerah

Sumber: Hasil Analisis

		Misi 5
Sasaran 2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	
Arah Kebijakan		
a) Penguatan tata kelola pemerintahan yang professional dan berintegritas		

Upaya dalam mendukung arah kebijakan pada sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel dilaksanakan melalui program strategis **Riau Berdaya Saing**. Berikut ini dijabarkan strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kegiatan strategis.

Tabel 3.21 Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
1	Penguatan tata kelola pemerintahan yang professional dan berintegritas	• Peningkatan penataan dan reformasi birokrasi kelembagaan • Meningkatkan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Program Penataan Organisasi Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum Program Pelayanan Penanaman Modal Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Penanaman Modal Perencanaan Statistik Keuangan

Sumber: Hasil Analisis

		Misi 6
Sasaran 1	Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi untuk Pembangunan Daerah	
Arah Kebijakan		
a) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK serta pemanfaatan teknologi digital		

Upaya dalam mendukung arah kebijakan pada sasaran Meningkatkan Hasil Riset dan Inovasi untuk Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui program strategis **Riau Berdaya Saing**. Berikut ini dijabarkan strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kegiatan strategis.

Tabel 3.22 Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi untuk Pembangunan Daerah

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
1	Kajian pemerataan pembangunan daerah	• Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan berbasis riset dan inovasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan
2	Penguatan riset dan inovasi serta pemanfaatan teknologi digital	• Kemitraan riset dan inovasi • Penguatan kapasitas kelembagaan riset dan inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan

Sumber: Hasil Analisis

	Misi 6
Sasaran 2	Meningkatnya Kerjasama Pembangunan
Arah Kebijakan	
	a) Penguatan kerjasama dalam pembangunan daerah

Upaya dalam mendukung arah kebijakan pada sasaran Meningkatkan Kerjasama Pembangunan dilaksanakan melalui program strategis **Riau Berdaya Saing** dan **Riau Mantap**. Berikut ini dijabarkan strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kegiatan strategis.

Tabel 3.23 Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Kerjasama Pembangunan

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
1	Pembangunan melalui pola <i>public private partnership</i> dan kerjasama antar daerah	• Mendorong kerjasama secara lebih intens dalam percepatan pembangunan daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah

Sumber: Hasil Analisis

Upaya dalam mendukung arah kebijakan pada sasaran Meningkatkan Hasil Riset dan Inovasi untuk Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui program strategis **Riau Cerdas**. Berikut ini

dijabarkan strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kegiatan strategis.

Misi 7

Sasaran 1

Menguatnya Nilai-Nilai Budaya Melayu Sebagai Jati Diri Masyarakat Riau dalam Rangka Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau

Arah Kebijakan

a) Penguatan nilai luhur kebudayaan Melayu Riau dalam lingkungan masyarakat yang Agamis

Tabel 3.24 Kegiatan Strategis Pada Sasaran Menguatnya Nilai-Nilai Budaya Melayu Sebagai Jati Diri Masyarakat Riau dalam Rangka Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
1	Penguatan pendidikan moralitas dan keagamaan	• Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau • Peningkatan pelestarian budaya Melayu Riau • Peningkatan pengamalan nilai nilai Agama dan budaya Melayu	Program Pengembangan Kebudayaan Program Pelestarian & Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengelolaan Permuseuman Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pengembangan Kurikulum	Kebudayaan Pendidikan

Sumber: Hasil Analisis

Misi 7

Sasaran 2

Meningkatnya Kerukunan Sosial Antar Masyarakat dan Kehidupan Bermasyarakat yang Kondusif, Aman, Nyaman

Arah Kebijakan

a) Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan

b) Dukungan peningkatan kenyamanan, keamanan, toleransi dan kesejahteraan rakyat

Upaya dalam mendukung arah kebijakan pada sasaran Meningkatkan Kerukunan Sosial Antar Masyarakat dan Kehidupan Bermasyarakat yang Kondusif, Aman, Nyaman dilaksanakan melalui program strategis **Riau Sejahtera**. Berikut ini dijabarkan strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kegiatan strategis.

Tabel 3.25 Kegiatan Strategis Pada Sasaran Meningkatnya Kerukunan Sosial Antar Masyarakat dan Kehidupan Bermasyarakat yang Kondusif, Aman, Nyaman

No.	Kegiatan Strategis	Strategi / Upaya yang Dilakukan	Program (Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019)	Urusan
1	Dukungan peningkatan kenyamanan, keamanan, toleransi dan kesejahteraan rakyat	• Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Penggiat Dakwah • Memperkuat kerjasama toleransi • Mengoptimalkan pemberdayaan lembaga keagamaan dalam menunjang pembangunan daerah • Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan, rumah ibadah , lembaga pendidikan Agama • Pembinaan kepemudaan dan keluarga sejahtera dalam pengurangan penyakit masyarakat (narkoba, LGBT, perzinahan, hidup hedons, game online, pinjaman online dan penyakit masyarakat lainnya) • Pencegahan konflik • Penguatan SDM Satpol PP dan Personil LINMAS • Optimalisasi penyelenggaraan trantibum dan penegakan Perda	Program Kesejahteraan Rakyat Program Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, & Budaya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sekretariat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Sumber: Hasil Analisis

Tabel 3.26 Perumusan Program Prioritas RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
VISI: Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju MISI: 1. Membangun Manusia Yang Sehat Dan Berkualitas Melalui Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata Dan Berkeadilan Serta Keberpihakan Pada Disabilitas Dan Kelompok Marginal 2. Meningkatkan Perekonomian, Daya Saing Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Secara Optimal Dalam Kerangka Pembangunan Yang Berkelanjutan 3. Memperkuat Infrastruktur Yang Handal, Guna Kemudahan Akses, Pelayanan Masyarakat Dan Perekonomian	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul, Sejahtera dan Inklusi	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat		Indeks Pembangunan Gender (Indeks)		
				Indeks Modal Manusia (Indeks)		
				Rata - rata Lama Sekolah (Tahun)		
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
			Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal Budaya Melayu Riau (%)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Serta Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah 4. Memerangi Kemiskinan, Pengangguran Dan Kesenjangan Antar Masyarakat Dan Antar Wilayah Serta Menjaga Keseimbangan Dan Pemerataan Pembangunan 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Berintegritas Serta Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dengan Dukungan Aparatur Yang Kompeten Dan Profesional Menuju Pemerintahan yang Berkelas Dunia (World Class Government) 6. Memperkuat Riset Dan Inovasi Serta Kerjasama Pembangunan Guna Akselerasi Capaian Pembangunan Melalui Multi Helix Partnership, Kerjasama Antar Daerah Maupun Kerjasama Antar Global 7. Mewujudkan Kebudayaan Melayu				Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Keagamaan (%)	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Sehat dan Produktif		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Sebagai Alat Pemersatu Dan Perwujudan Nilai - Nilai Kearifan Lokal Serta Mendorong Kehidupan Bermasyarakat Yang Kondusif, Aman, Nyaman Dan Adil Untuk Semua				Kabupaten/Kota dengan Eliminasi Kusta (Kabupaten/Kota)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Depresi yang mendapatkan pelayanan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Kabupaten/Kota)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Skrining Obesitas pada Populasi target (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan Pelayanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) (Kabupaten/Kota)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Kabupaten/Kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Kabupaten/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) aktif (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Kampanye	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Pembudayaan Hidup Sehat/Germas (%)		
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
		Meningkatnya Kesetaraan Gender, Kualitas Keluarga dan Masyarakat Inklusif		Indeks Ketimpangan Gender (Indeks)		
				Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) (Indeks)		
			Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Berdaya Saing (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah lainnya Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	Meningkatkan Ekonomi yang Berdayasaing		Terjaminnya pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komperhensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
			Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				PDRB Per Kapita (Rp. Juta Per Tahun)		
				Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)		
		Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Daerah		Indeks Daya Saing Daerah (Angka)		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas Prasarana Pertanian	Jumlah Produktivitas Komoditas Utama Perkebunan (Kg/Ha/Tahun)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Usaha Perkebunan yang memiliki Izin (Persentase)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase Keuangan Daerah yang dikelola (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Angka Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		
				Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)		
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian LP2B yang dikelola (Hektar)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Jumlah Produksi Hortikultura (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kawasan Pertanian Produktif dan Berkelanjutan	Persentase Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dimanfaatkan untuk sistem integrasi sapi sawit (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya Populasi Komoditas Ternak	Jumlah Populasi Sapi (Ekor)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
		Peningkatan Daya Saing Investasi		Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)		
			Meningkatnya kemudahan dan kenyamanan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
		Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata		Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara (Juta Rupiah)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya daya saing destinasi pariwisata	Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan dan Lestari	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Indeks)		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)		
				Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)		
			Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Persentase Laut, Pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat efektivitas pengelolaannya (%)	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
			Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Jumlah Dukungan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (Dokumen)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
				Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan potensi sumber daya ikan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Bauran Energi Terbarukan ((%))	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air Laut (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Mengurangi Risiko Bencana Daerah		Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya penanggulangan kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir	Persentase peningkatan kawasan bebas banjir (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Persentase peningkatan panjang pantai yang terlindungi dari abrasi (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
	Mewujudkan Infrastruktur yang Handal	Meningkatnya Layanan Transportasi		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)(Indeks)		
				Rasio Konektivitas Transportasi (Rasio)		
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio Konektivitas Transportasi Darat (Rasio)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi laut	Rasio Konektivitas Transportasi Laut (Rasio)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perkeretaapian (Dokumen)	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar		Indeks Layanan Infrastruktur Dasar (Indeks)		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Aman (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya cakupan pelayananan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	
			Meningkatnya Kualitas Kawasan Pemukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian legalisasi RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Persentase Keuangan Daerah yang dikelola (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program Pemerintah	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				yang Layak Huni (Persentase)		
				Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
		Meningkatnya Aksesibilitas		Persentase Tingkat Kemantapan Jalan (%)		
				Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
	Menurunkan Angka Kemiskinan	Berkurangnya Kesenjangan Antar Masyarakat dan Antar Wilayah		Tingkat Kemiskinan(%)		
				Rasio Gini(Poin)		
				Persentase Penduduk Miskin Desa (%)		
				Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Persentase Desa dengan Kemandirian Ekonomi (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Produktivitas dan Pendapatan Masyarakat		Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks)		
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya Produktivitas tenagakerja	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja yang Kompeten (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
		Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif		Presentase Penduduk yang memiliki setidaknya satu jaminan sosial (Q1) (%)		
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Kabupaten/Kota dengan Eliminasi Kusta (Kabupaten/Kota)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus Tuberkolosis (Treatment Coverage) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Depresi yang mendapatkan pelayanan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Kabupaten/Kota)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Skrining Obesitas pada Populasi target (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan Pelayanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) (Kabupaten/Kota)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Kabupaten/Kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Kabupaten/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka (Persentase)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)		
				Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi, panti rehabilitasi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data Fakir Miskin (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)		
				tanggap darurat bencana (%)				
				Persentase Korban Bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
				Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia, Gelandang Pengemis, PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
				Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Nilai)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
				Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Nilai)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
				Indeks Peranan Sosial (Nilai)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Budaya Birokrasi Berakhlak dengan ASN yang Profesional		Indeks Reformasi Birokrasi(Indeks)		
						Nilai Survey Indeks Berakhlak (poin)		
						Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Intern Pemerintah (SPIP) (Level)		
				Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Indeks)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi, dasar, kader, manajerial, fungsional dan teknis	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya pengembangan kompetensi, tata kelola pengembangan karir ASN dan kualitas kinerja ASN	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1 (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel		Kategori Hasil Pengukuran Indeks Pengelola Keuangan Daerah (Kategori)		
				Nilai SAKIP (Nilai)		
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)		
				Indeks Transformasi Digital Nasional (Indeks)		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Nilai)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Pemenuhan Indikator SPBE (Persentase)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Program OPD di Dokumen Perencanaan Daerah (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah pada Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Infrastruktur dan kewilayahan, perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Persentase Keuangan Daerah yang dikelola (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
	Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi serta			Indeks Inovasi Daerah(Angka)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	Kerjasama Pembangunan Daerah	Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi untuk Pembangunan Daerah		Indeks Kapabilitas Inovasi (Indeks)		
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk inovasi daerah yang dimanfaatkan (%)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
		Meningkatnya Kerjasama Pembangunan		Persentase Kerjasama Pembangunan yang sudah dilaksanakan (%)		
			Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
				Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
	Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandaskan pada Kebudayaan Melayu yang Agamis	Menguatnya Nilai - Nilai Budaya Melayu Sebagai Jati Diri Masyarakat Riau Dalam Rangka Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau		Indeks Harmoni (Indeks)		
				Indeks Pembangunan Kebudayaan (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan (Persentase)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
				Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Kebudayaan (Persentase)		
				Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi (Persentase)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
			Meningkatnya Tata kelola Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan terhadap Total Pencatatan (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang telah diterapkan terhadap total pendaftaran (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
		Meningkatnya Kerukunan Sosial Antar Masyarakat dan Kehidupan		Indeks Harmoni Sosial (Indeks)		
				Indeks Harmoni Religius (Indeks)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Bermasyarakat yang Kondusif, Aman, Nyaman	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi (Indeks)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
				Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (Indeks)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Meningkatnya perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Keagamaan (%)	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	

Sumber: Hasil Analisis

3.4 Arah Pembangunan Wilayah

3.4.1 Arah Pengembangan Provinsi Riau dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Arah Pengembangan Provinsi Riau dalam RPJMN Tahun 2025-2029 diarahkan untuk menjadi 5 kawasan sebagai berikut:

A. Kawasan Pertumbuhan

1. Kawasan perkotaan Pekanbaru.
2. Kawasan perkotaan Dumai dan kawasan pengembangan industri Dumai.
3. Kawasan perkotaan Rengat.

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Sawit, Karet, Kelapa

1. Rokan-Siak - Kampar - Indragiri

Ekonomi Biru

2. Rokan Hilir
3. Indragiri Hilir

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi

Swasembada Energi

1. Riau

Swasembada Pangan dan Air

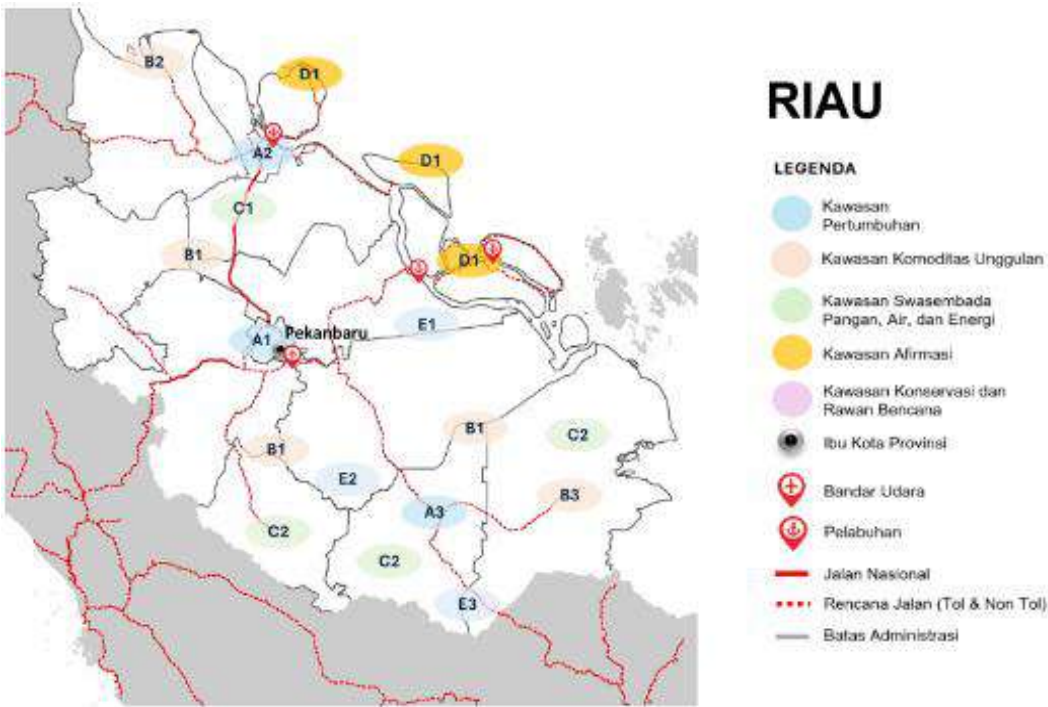
2. Indragiri (Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi)

D. Kawasan Afirmasi

1. Kepulauan Meranti-Bengkalis (Daerah terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan)

E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

1. TN Zamrud
2. TN Tesso Nilo
3. TN Bukit Tigapuluh



Gambar 3.3. Arah-an Pengembangan Provinsi Riau dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Selanjutnya, Sasaran Pembangunan Provinsi Riau yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	5,2 (Rata-rata 2025-2029)	174,8	5,0	5,19 – 6,19	0,318 – 0,324	0,57	46,88	71,85	3,55 – 3,66
2029	5,9 (2029)	249,7	4,9	3,25 – 4,25	0,279 – 0,283	0,60	83,68	72,69	2,94 – 3,42

Keterangan:
 LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tabel 3.27 Penyelarasan Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Riau dalam RPJMN dan RPJMD

No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Pembangunan Kewilayahan
A	Kawasan Pertumbuhan		
A1	Kawasan Perkotaan Pekanbaru • Kota Pekanbaru • Kab. Kampar • Kab. Pelalawan • Kab. Siak	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Pekanbaru, antara lain melalui: ◦ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ◦ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ◦ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ◦ Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan	• Pengembangan Kota Tematik Sesuai Potensi Daerah • Pemenuhan kebutuhan air bersih melalui: Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pekanbaru – Kampar. • Pengelolaan lingkungan dilakukan melalui: Persiapan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Pekanbaru-Kampar- Pelalawan. • Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat • Peningkatan Infrastruktur Dasar melalui Percepatan penurunan luasan kawasan kumuh Kewenangan Provinsi
		• Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Kawasan Perkotaan Pekanbaru melalui pembangunan BRT	• Pengembangan Kawasan Perkotaan Pekanbaru yaitu: Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Kawasan Perkotaan Pekanbaru melalui pembangunan Bus Rapid Transit (BRT).
		• Pengembangan koridor industri Pekanbaru-Dumai	• Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur meliputi: Pembangunan Jalan Lingkar Barat Dumai (Bukit Timah-Parit Kitang-Lubuk Gaung). • Pengembangan industri hilir sawit dan migas pada skala besar. • Pengembangan industri pengolahan yang ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah melalui Pengembangan Kawasan Industri
		• Pengembangan SPAM Regional Pekanbaru-Kampar	• Pemenuhan kebutuhan air bersih melalui: Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pekanbaru –Kampar.

No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Pembangunan Kewilayahan
		• Pengelolaan lingkungan dilakukan melalui: Pembangunan TPST Regional Pekanbaru-Kampar-Pelalawan	• Persiapan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Pekanbaru-Kampar-Pelalawan.
		• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Pekanbaru (PHTC)	• Peningkatan Infrastruktur Dasar melalui Dukungan Percepatan pembangunan Rumah Layak Huni yang bersanitasi aman
		• Peningkatan ketangguhan terhadap banjir di Kawasan Perkotaan Pekanbaru	• Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur melalui Pengendalian banjir Kota Pekanbaru.
		• Pembangunan Jembatan Siak V dan Pekanbaru East Outer Ring Road Trase IV	• Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur melalui Pembangunan Jembatan Siak V dan Pekanbaru East Outer Ring Road Trase IV.
		• Pembangunan Jalan Tol Lingkar Barat Pekanbaru (Menghubungkan Tol Pekanbaru-Dumai, Tol Pekanbaru-Padang, dan Tol Pekanbaru-Rengat)	• Peningkatan infrastruktur untuk konektivitas wilayah melalui Pemantapan jalan dan peningkatan aksesibilitas
		• Peningkatan 6A pada koridor pariwisata Muaratakus-Pekanbaru-Siak (Revitalisasi dan Penataan Waterfront Sungai Siak di Pekanbaru dan Siak Sri Indrapura, Revitalisasi Kawasan Purbakala Situs Percandian Muaratakus, serta Urban Renewal Kota Tua Pekanbaru dan Kawasan Istana Siak)	• Pengembangan pariwisata terintegrasi pada koridor pariwisata Muaratakus –Pekanbaru - Siak (Revitalisasi Kawasan Purbakala Situs Percandian Muaratakus).
		• Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang dan Jalan Tol Pekanbaru–Rengat–Jambi	• Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur melalui Pemantapan jalan dan peningkatan • Aksesibilitas dan Penguatan kelembagaan kerjasama dan pengembangan antar wilayah
		• Preservasi jalan ruas Pekanbaru –Teluk Kuantan	• Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur melalui Preservasi jalan ruas Rengat – Teluk Kuantan dan Rengat – Tembilahan

No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Pembangunan Kewilayahan
	Kawasan Perkotaan Dumai dan Kawasan Pengembangan Industri Dumai • Kota Dumai	○ Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Dumai, antara lain melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan	○ Mendorong Pengembangan Kota Tematik Sesuai Potensi Daerah. ○ Pemenuhan kebutuhan air bersih melalui: Penyediaan dan pengelolaan unit produksi dan unit air baku SPAM Regional Dumai-Rokan Hilir-Bengkalis. ○ Peningkatan Infrastruktur Dasar melalui Dukungan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik ○ Pengembangan Kota Tematik Sesuai Potensi Daerah ○ Kesejahteraan Masyarakat diarahkan untuk pengentasan kemiskinan ○ Peningkatan Infrastruktur Dasar melalui Percepatan penurunan luasan kawasan kumuh Kewenangan Provinsi
		○ Pengembangan koridor industri Pekanbaru-Dumai (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa, industri makanan dan minuman, industri kimia, industri energi, dan industri kosmetik dan farmasi)	○ Pembangunan Kawasan perkotaan Dumai sebagai PKN dan Kawasan pengembangan perdagangan, industri dan jasa. ○ Penyiapan jalur kereta api penunjang industri dan perekonomian masyarakat. ○ Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub sektor perkebunan, tanaman pangan, dan perikanan tangkap. ○ Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Perindustrian Selinsing di Dumai.
		○ Hilirisasi karet, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar karet, yaitu a.l. compound rubber, lateks dasar, dan karet padat, serta produk hilirisasi lanjutan karet a.l. ban performa tinggi, material tahan gempa ○ Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi	○ Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi. ○ Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub sektor perkebunan, tanaman pangan, dan

No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Pembangunan Kewilayahan
		dasar kelapa, yaitu a.l. VCO, tepung kelapa, dan arang tempurung, serta produk hilirisasi lanjutan kelapa a.l. krimer nabati, santan instan, dan karbon aktif	perikanan tangkap. ○ Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Perindustrian Selinsing di Dumai. ○ Pengembangan industri pengolahan yang ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah melalui Pengembangan Kawasan Industri dan Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi unggulan yang ramah lingkungan - perkebunan (Kelapa, Karet, Sagu, Kopi)
		○ Pengembangan dan pembangunan Kilang Minyak Bumi Dumai	○ Mendorong Ketahanan dan Transisi Energi melalui Membangun infrastruktur EBT
		○ Pengembangan Pelabuhan Dumai	○ Peningkatan infrastruktur untuk konektivitas wilayah
		○ Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Dumai (PHTC)	○ Peningkatan Infrastruktur Dasar melalui Dukungan Percepatan pembangunan Rumah Layak Huni yang bersanitasi aman
		○ Pengembangan SPAM Perkotaan Dumai	○ Pemenuhan kebutuhan air bersih melalui: Penyediaan dan pengelolaan unit produksi dan unit air baku SPAM Regional Dumai-Rokan Hilir-Bengkalis.
		○ Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Kota Dumai (PHTC)	○ Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan melalui Peningkatan sarana prasarana RS sesuai standar layanan dan Dukungan Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
		○ Pembangunan Jalan Tol Dumai-Kotapinang-Rantauprapat-Kisaran	○ Konektivitas lintas provinsi yaitu Lanjutan pembangunan jalan tol ○ Duri - Rantau Prapat
		○ Pembangunan Jalan Lingkar Barat Dumai (Bukit Timah-	○ Konektivitas lintas provinsi yaitu Pembangunan

No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Pembangunan Kewilayahan
		Parit Kitang-Lubukgaung)	Jalan Lingkar Barat Dumai (Bukit Timah-Parit Kitang-Lubuk Gaung).
		o Preservasi jalan ruas Dumai-Bagansiapiapi dan Dumai-Sungai Pakning	o Peningkatan infrastruktur untuk o konektivitas wilayah Pemantapan jalan dan peningkatan aksesibilitas
		o Pembangunan pipa transmisi gas bumi Sumatera Utara-Riau	o Mendorong Ketahanan dan Transisi Energi melalui Membangun infrastruktur EBT
		o Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Dumai	o Pengelolaan lingkungan dilakukan melalui: Dukungan penyelesaian masalah banjir dan rob.
		o Pengembangan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai	o Dukungan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM melalui Beasiswa Pendidikan Sarjana S1, S2, S3 bagi Mahasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu berbasis science, technology, engineering, arts, mathematics (STEAM)
		o Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah	o Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Sertifikasi dan Skill Tenaga Kerja Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
	Kawasan Perkotaan Rengat • Kab. Indragiri Hulu	- o Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Rengat, antara lain melalui: - o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu - o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau - o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan - o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan	- o Pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu: Kawasan Japura – Pematang Reba - o Pemenuhan kebutuhan air bersih melalui: Persiapan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indragiri. - o Peningkatan Infrastruktur Dasar melalui Dukungan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik - o Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Sertifikasi dan Skill Tenaga

No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Pembangunan Kewilayahan
			Kerja Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan peningkatan Kualitas BLK o Peningkatan Infrastruktur Dasar melalui Percepatan penurunan luasan kawasan kumuh Kewenangan Provinsi
		o Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Rengat (PHTC)	o Peningkatan Infrastruktur Dasar melalui Dukungan Percepatan pembangunan Rumah Layak Huni yang bersanitasi aman
		o Pengembangan SPAM Perkotaan Rengat	o Pemenuhan kebutuhan air bersih melalui: Persiapan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indragiri.
		o Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Indrasari Rengat (PHTC)	o Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan melalui Peningkatan sarana prasarana RS sesuai standar layanan dan Dukungan Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
		o Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Rengat-Jambi	- o Peningkatan infrastruktur untuk konektivitas wilayah melalui Pemantapan jalan dan peningkatan aksesibilitas - o Mendorong pembangunan, pengembangan dan peningkatan infrastruktur ke kawasan strategis Provinsi Riau melalui Penguatan kelembagaan kerjasama dan pengembangan antar wilayah
		o Preservasi jalan ruas Rengat-Teluk Kuantan dan Rengat-Tembilahan	o Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur meliputi: Preservasi jalan ruas Rengat – Teluk Kuantan dan Rengat – Tembilahan.
		o Pengembangan kota agropolitan Rengat	- o Mendorong Pengembangan Kota Tematik Sesuai Potensi Daerah. - o Penyediaan sarana dan prasarana pendukung

No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Pembangunan Kewilayahan
	Kawasan Swasembada Energi Riau • Kab. Rokan		produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa). ○ Pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) ini diarahkan melalui: Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub-sektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan perikanan budidaya. ○ Pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu: Kawasan Japura - Pematang Reba
		○ Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada Central Sumatera Basin	○ Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
		○ Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Sumatera-Kep. Meranti-Karimun-Batam-Bintan	○ Peningkatan Infrastruktur Dasar melalui Membangun Infrastruktur Ketenagalistrikan
		○ Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Perawang-Dumai-Malaysia (Interkoneksi 500 kV Sumatera-Malaysia)	
		○ Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Perawang-Rantauprapat	
		○ Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Perawang-Peranap-Aurduri	
	Kawasan Swasembada Pangan dan Air Indragiri • Kab. Indragiri Hulu • Kab. Indragiri	○ Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Kelayang, D. I. R. Kuala Keritang, D. I. R. Kuala Sebatu, D. I. R. Pengalihan Keritang, dan D. I. Simandolak- Pangean	Pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) ini diarahkan melalui: - Penanganan intrusi air laut di Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan produktivitas pertanian. - Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah provinsi
		○ Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan	Pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP)

No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Pembangunan Kewilayahan
	Hilir Kab. Kuantan Singingi	pemerintah daerah	ini diarahkan melalui: Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah provinsi
		o Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)	- o Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur meliputi: Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa). - o Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura. - o Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur meliputi: Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa). - o Pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) ini diarahkan melalui: - Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub-sektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan perikanan budidaya. - Penanganan intrusi air laut di Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan produktivitas pertanian. - Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah provinsi
		o Pengembangan dan Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)	o Pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) ini diarahkan melalui: Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub-sektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan perikanan budidaya.
		o Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura	o Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur meliputi: Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit,

No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Pembangunan Kewilayahan
			karet, dan kelapa). o Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura. o Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur meliputi: Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa). o Pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) ini diarahkan melalui: - Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub-sektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan perikanan budidaya. - Penanganan intrusi air laut di Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan produktivitas pertanian. - Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah provinsi
		o Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura	Pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) ini diarahkan melalui: - Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub-sektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan perikanan budidaya. - Penanganan intrusi air laut di Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan produktivitas pertanian. - Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah provinsi
		o Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi	o Pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) ini diarahkan melalui: Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub-sektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan

No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Pembangunan Kewilayahan
		dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik	perikanan budidaya. ○ Pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu: Kawasan Japura - Pematang Reba
		○ Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen	○ Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah dan akses pangan untuk masyarakat ○ Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin - Melalui Pemberdayaan Masyarakat , Pengembangan dan Perluasan Unit usaha Ekonomi Desa, branding Desa sebagai upaya peningkatan Pedapatan dan daya saing daerah - Pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) - Meningkatkan ketersediaan pangan dari produksi lokal (padi, daging, telur, dan ikan)
		○ Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama	○ Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah dan akses pangan untuk masyarakat ○ Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin - Melalui Pemberdayaan Masyarakat , Pengembangan dan Perluasan Unit usaha Ekonomi Desa, branding Desa sebagai upaya peningkatan Pedapatan dan daya saing daerah - Pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) - Meningkatkan ketersediaan pangan dari produksi lokal (padi, daging, telur, dan ikan)
		○ Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan	○ Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK serta pemanfaatan teknologi digital melalui Perumusan

No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Pembangunan Kewilayahan
	Kawasan Afirmasi Kepulauan Meranti-Bengkalis (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) • Kab. Kep. Meranti • Kab. Bengkalis	budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian	kebijakan Perencanaan Pembangunan berbasis Riset dan Inovasi, Kemitraan Riset dan Inovasi, Penguatan Kapasitas Kelembagaan Riset dan Inovasi
		Perindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan, rehabilitasi lahan gambut dan mangrove, dan lahan pada catchment area WS Indragiri, terutama pada DAS Indragiri dan DAS Gaung	Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan, rehabilitasi lahan gambut dan mangrove, dan lahan pada catchment area WS Indragiri, terutama pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Gaung melalui kegiatan rehabilitasi dilaksanakan BPDAS Indragiri Rokan
		Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Indragiri dan DAS Gaung	Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan, rehabilitasi lahan gambut dan mangrove, dan lahan pada catchment area WS Indragiri, terutama pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Gaung melalui kegiatan rehabilitasi dilaksanakan BPDAS Indragiri Rokan
		Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan	- Peningkatan Infrastruktur Dasar melalui - Dukungan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik - Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan - Dukungan Percepatan pembangunan Rumah Layak Huni yang bersanitasi aman - Percepatan penurunan luasan kawasan kumuh Kewenangan Provinsi - Membangun Infrastruktur Ketenagalistrikan
		Pengembangan SPAM Perkotaan Selatpanjang	Pemenuhan kebutuhan air bersih melalui Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan Selatpanjang.

No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Pembangunan Kewilayahan
		o Peningkatan ketahanan bencana	o Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
		o Preservasi jalan Trans Meranti	o Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur meliputi: Pembangunan dan peningkatan jalan lintas Trans Meranti: ruas Tanjung Padang – Teluk Belitung - Meranti Bunting; ruas Teluk Ketapang - Semukut; ruas Selatpanjang –Alai - Kampung Balak
		o Pembangunan Jembatan Tebingtinggi-Merbau	o Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur meliputi: Pembangunan Jembatan Tebing Tinggi-Merbau.
		o Penguatan Pulau Rangsang sebagai kawasan pertahanan dan keamanan lintas matra dalam rangka peningkatan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar	o Mendorong pembangunan, pengembangan dan peningkatan infrastruktur ke kawasan strategis Provinsi Riau melalui Penguatan kelembagaan kerjasama dan pengembangan antar wilayah
		o Pengembangan bandara perintis Kep. Meranti	o Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur meliputi: Persiapan pembangunan Bandara Udara baru.
		o Pembangunan Pelabuhan Dorak	o Peningkatan infrastruktur untuk konektivitas wilayah melalui Penguatan kerjasama antar wilayah untuk penerapan angkutan aglomerasi
		o Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah	o Dukungan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM melalui Dukungan Peningkatan Program Pertukaran Mahasiswa, Magang Kerja dan Kerjasama Pendidikan Lintas Negara dan Beasiswa Pendidikan Sarjana S1, S2, S3 bagi Mahasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu berbasis science, technology, engineering, arts, mathematics (STEAM)
		o Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan:	o Peningkatan konektivitas dan pengembangan

No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Pembangunan Kewilayahan
		perkebunan (sagu dan kelapa) dan perikanan	infrastruktur meliputi: Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa). ○ Pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) ini diarahkan melalui Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub-sektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan perikanan budidaya.
		○ Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah	○ Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah dan akses pangan untuk masyarakat melalui Meningkatkan layanan irigasi
		○ Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Selatpanjang (PHTC)	○ Peningkatan Infrastruktur Dasar melalui Dukungan Percepatan pembangunan Rumah Layak Huni yang bersanitasi aman dan Percepatan penurunan luasan kawasan kumuh Kewenangan Provinsi
		○ Preservasi Jalan Trans Bengkalis	○ Konektivitas lintas provinsi yaitu: Preservasi jalan Trans Bengkalis.
		○ Penguatan Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis sebagai kawasan pertahanan dan keamanan lintas matra dalam rangka peningkatan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar	○ Mendorong pembangunan, pengembangan dan peningkatan infrastruktur ke kawasan strategis Provinsi Riau melalui Penguatan kelembagaan kerjasama dan pengembangan antar wilayah
		○ Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi Masyarakat dan perluasan layanan penyiaran digital	○ Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional dan Berintegritas melalui Meningkatkan Sarana Prasarana pendukung pelayanan Publik
		○ Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan	○ Kesejahteraan Masyarakat diarahkan untuk: Pengentasan kemiskinan
		○ Penguatan PKSN Perbatasan Prioritas Bengkalis	○ Mendorong Pengembangan Kota Tematik Sesuai Potensi Daerah
		○ Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan	○ Peningkatan Infrastruktur Dasar melalui

No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Pembangunan Kewilayahan
	Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Karet, dan Kelapa Rokan-Siak-Kampar-Indragiri ○ Kab. Rokan Hilir ○ Kab. Rokan Hulu ○ Kab. Bengkalis ○ Kab. Kampar ○ Kab. Pelalawan ○ Kab. Siak ○ Kab. Indragiri Hulu ○ Kab. Indragiri Hilir ○ Kab. Kuantan Singingi	Prioritas, yaitu: Kab. Kep. Meranti: Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, Rangsang	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan, Dukungan Percepatan pembangunan Rumah Layak Huni yang bersanitasi aman, Membangun Infrastruktur Ketenagalistrikan
		○ Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, dan kelapa)	○ Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur meliputi: Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa). ○ Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura. ○ Pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) ini diarahkan melalui: Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub-sektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan perikanan budidaya.
		○ Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, dan kelapa)	○ Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur meliputi: Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa). ○ Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura. ○ Pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) ini diarahkan melalui: Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub-sektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan perikanan budidaya.

No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Pembangunan Kewilayahan
		Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa)	- Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur meliputi: Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa). - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura. - Pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) ini diarahkan melalui: Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub-sektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan perikanan budidaya. - Pengembangan industri pengolahan yang ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah melalui Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi unggulan yang ramah lingkungan
		Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, dan kelapa)	- Pengembangan industri pengolahan yang ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah melalui Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi unggulan yang ramah lingkungan - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
		Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa	Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
		Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
		Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu: Kab. Rokan Hilir: Pasir Limau Kapas,	- Peningkatan Infrastruktur Dasar melalui - Percepatan pemerataan dan peningkatan akses

No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Pembangunan Kewilayahan
		Bangko, Sinaboi	layanan air minum perpipaan, Dukungan Percepatan pembangunan Rumah Layak Huni yang bersanitasi aman, Membangun Infrastruktur Ketenagalistrikan
	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Rokan Hilir (B2) dan Indragiri Hilir (B3) - Kab. Rokan Hilir - Kab. Indragiri Hilir	Pengembangan pelabuhan perikanan Pelabuhan Perikanan Bagansiapiapi dan Pelabuhan Perikanan Tembilahan	Kegiatan pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) ini diarahkan untuk: Pengembangan pelabuhan perikanan Bagansiapiapi.
		Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan Kawasan pesisir di Rokan Hilir dan Indragiri Hilir	Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur meliputi: Penanganan intrusi air laut di Indragiri Hilir.
		Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap	Kegiatan pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) ini diarahkan untuk: Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap.
		Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya	- Pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) ini diarahkan melalui: Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub-sektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan perikanan budidaya. - Kegiatan pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) ini diarahkan untuk: Pengembangan input produksi, sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat.
		Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat	- Pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) ini diarahkan melalui: Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub-sektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan perikanan budidaya. - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Pembangunan Kewilayahan
		o Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan	- o Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan - o Pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) ini diarahkan melalui: Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub-sektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan perikanan budidaya. - o Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
		o Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan	- o Pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) ini diarahkan melalui: Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub-sektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan perikanan budidaya. - o Peningkatan infrastruktur untuk konektivitas wilayah melalui Penguatan kerjasama antar wilayah untuk penerapan angkutan aglomerasi
		o Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan	- o Pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) ini diarahkan melalui: Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub-sektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan perikanan budidaya. - o Peningkatan infrastruktur untuk konektivitas wilayah melalui Penguatan kerjasama antar wilayah untuk penerapan angkutan aglomerasi
	Kawasan Konservasi dan E2 Rawan Bencana Zamrud E3 (E1), Tesso Nilo (E2), dan Bukit Tigapuluh (E3) o Zamrud: Kab. Siak	- o Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi - o Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan - o Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi - o Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati,	- o Pengelolaan lingkungan dilakukan melalui: Perlindungan dan pengelolaan Kawasan Sekitar Koridor Rimba (Riau, Jambi, Sumatera Barat) - o Pengelolaan lingkungan dilakukan melalui: Perlindungan dan pengelolaan Kawasan Konservasi: Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling; Taman Wisata Alam Buluh Cina;

No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Pembangunan Kewilayahan
	- o Tesso Nilo: Kab. Pelalawan - o Bukit Tigapuluh: Kab. Indragiri Hulu dan dan Kab. Indragiri Hilir	- serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik - o Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri - o Penguatan pengelolaan hutan lestari - o Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi - o Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana	Cagar Alam Bukit Bungkuk; Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim; Tesso Nilo; Zamrud; Cagar Biosfer Giam-Siak Kecil. - o Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana - o Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
	- o Kab. Kep. Meranti - o Kab. Rokan Hulu - o Kab. Kampar - o Kab. Indragiri Hulu - o Kab. Bengkalis • Kab. Indragiri Hilir	o Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)	- o Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah dan akses pangan untuk masyarakat - o Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin - Melalui Meningkatkan ketersediaan pangan dari produksi lokal (padi, daging, telur, dan ikan) - Meningkatkan keterjangkauan pangan - Pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) - o Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Peningkatan akses pangan bergizi
	Provinsi Riau	o Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	- o Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah dan akses pangan untuk masyarakat - o Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin - Melalui Meningkatkan ketersediaan pangan dari produksi lokal (padi, daging, telur, dan ikan) - o Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Peningkatan akses pangan bergizi

No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Pembangunan Kewilayahan
		- Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: - Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini - Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas - Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran - Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah - Revitalisasi pendidikan nonformal - Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas	- Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah) melalui Pendidikan gratis melalui pembiayaan operasional sekolah, Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas, Peningkatan Akses Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan Kelompok Marginal, Dukungan penguatan kualitas layanan PAUD dan pendidikan dasar - Peningkatan Akses Pelayanan Dasar Pendidikan untuk Masyarakat Miskin (Semua Siswa Miskin Harus bersekolah sampai jenjang tertinggi – Riau Cerdas) melalui Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah (ATS), Bantuan Siswa Miskin/BSM dan Siswa Daerah Terpececil (KAT) - Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas melalui Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik yang merata dan berkeadilan
		- Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: - Penurunan kematian ibu dan anak - Pencegahan dan Penurunan stunting - Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro - Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	- Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Peningkatan akses pangan bergizi dan Pembudayaan perilaku hidup sehat dari usia dini dalam lingkungan keluarga dan dunia pendidikan - Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting melalui Peningkatan promosi kesehatan dan perubahan perilaku pola pengasuhan, Peningkatan akses pangan bergizi, Penguatan tata kelola dan Pemantauan status gizi dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup

No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Pembangunan Kewilayahan
		○ Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: ○ Penuntasan TBC ○ Pengendalian penyakit menular lainnya ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan ○ pengendalian faktor risiko PTM	○ Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis melalui Mitigasi sumber dan resiko penyakit menular dan penyakit tropis ○ Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat melalui Pengendalian potensi wabah dan KLB
		○ Perlindungan sosial adaptif dan inklusif, antara lain melalui: ○ Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif melalui Kartu Kesejahteraan ○ Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional	Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja
		○ Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: ○ Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ○ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	○ Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
		○ Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: ○ Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan ○ Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi ○ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik ○ Penerapan Internet of Things (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-time ○ Perluasan penggunaan kendaraan listrik	○ Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan ○ Peningkatan Infrastruktur Dasar melalui Membangun Infrastruktur Ketenagalistrikan

No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Pembangunan Kewilayahan
		- Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: - Perluasan infrastruktur digital - Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital - Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional dan Berintegritas melalui Meningkatkan Sarana Prasarana pendukung pelayanan Publik
		- Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: - Penguatan tata kelola pemerintahan digital - Penguatan infrastruktur pemerintahan digital - Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN - Digitalisasi layanan publik prioritas - Pengembangan ekosistem layanan publik digital	- Peningkatan Profesionalitas ASN dan Budaya Kerja ASN melalui Peningkatan Kapasitas ASN (Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi, Kinerja, dan Kedisiplinan Pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya); Peningkatan Implementasi Merit Sistem; Peningkatan Budaya Kerja dan Pelayanan Prima; - Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional dan Berintegritas melalui Peningkatan penataan dan reformasi birokrasi kelembagaan; Meningkatkan Sarana Prasarana pendukung pelayanan Publik; Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi
		- Pelestarian dan pemajuan kebudayaan Melayu Riau, antara lain melalui: - Perlindungan dan pelestarian warisan budaya - Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan - Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	- Penguatan nilai luhur kebudayaan Melayu Riau dalam lingkungan masyarakat yang agamis melalui - Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau - Peningkatan pelestarian budaya Melayu Riau - Peningkatan Pengamalan Nilai Nilai Agama dan Budaya Melayu
		- Penguatan ekonomi syariah, antara lain melalui: - Pengembangan Industri Halal - Peningkatan Ekspor Halal dan Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional - Penciptaan Ekosistem UMKM Halal - Penguatan Keuangan Syariah	Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Meningkatkan Pendapatan Daerah

No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Lokasi	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Arah Pembangunan Kewilayahan
		- o Penguatan Dana Sosial Syariah - o Memperkuat reformasi hukum, terutama di Riau, antara lain melalui: - o Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana - o Pencucian Uang (TPPU) - o Penanggulangan judi dan penyelundupan, Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)	o Peningkatan Profesionalitas ASN dan Budaya Kerja ASN melalui Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada unit kerja dan Penguatan implementasi system pengendalian intern pemerintah (SPIP)

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 dan Analisis

3.4.2 Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Riau Pendekatan Wilayah Pengembangan

Pencapaian pembangunan Provinsi Riau merupakan akumulasi dari keberhasilan pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Arah pembangunan kewilayahan dirumuskan berdasarkan wilayah pengembangan Provinsi Riau yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah, serta mencerminkan keberagaman yang ada. Pengelompokan kewilayahan dikembangkan menjadi tiga wilayah pengembangan utama, dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi lokal secara maksimal, mempertahankan keberagaman hasil produk, serta menciptakan pemerataan pembangunan yang memiliki ciri khas produk unggulan yang kuat. Tiga Wilayah Pengembangan (WP) tersebut terdiri dari:

- a. WP Pilar Meranti, meliputi:
 1. Kabupaten Kampar;
 2. Kabupaten Pelalawan;
 3. Kabupaten Siak;
 4. Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
 5. Kota Pekanbaru.
- b. WP Bernilai, meliputi:
 1. Kabupaten Bengkalis;
 2. Kabupaten Rokan Hulu;
 3. Kabupaten Rokan Hilir; dan
 4. Kota Dumai.
- c. WP Gasing, meliputi:
 1. Kabupaten Indragiri Hulu;
 2. Kabupaten Indragiri Hilir; dan
 3. Kabupaten Kuantan Singingi.



Gambar 3.4. Wilayah Pengembangan (WP) Provinsi Riau

Pembangunan wilayah memiliki peran sebagai wadah pelaksanaan visi dan misi serta berbagai program prioritas yang difokuskan untuk mendukung target pembangunan tahun 2029 dalam mewujudkan Riau Cerdas, Riau Sehat, Riau Mantap, Riau Berdaya Saing, Riau Sejahtera, dan Riau Membangun Desa Majukan Kota.

Dalam mendorong pencapaian sasaran pembangunan, perlu perkuatan perencanaan sinergi pusat dan daerah. Pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, pemerintah pusat telah menargetkan sasaran pembangunan daerah untuk Provinsi Riau. Berikut ini tabel penyelarasan sasaran pembangunan Provinsi Riau yang termuat dalam RPJMN dan sasaran pembangunan Provinsi Riau berdasarkan kondisi dan potensi daerah.

Tabel 3.28 Penyelarasan Sasaran Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dalam RPJMN dan RPJMD

Indikator	Periode	Sasaran Riau Dalam RPJMN 2025-2029	RPJMD Provinsi Riau 2025-2029
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2025	5,2	3,90 - 4,23
	2029	5,9	5,16 - 5,90
PDRB per Kapita (Rp. Juta)	2025	174,8	165,17 - 174,80
	2029	249,7	230,99 - 249,70
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	2025	5,0	5,0
	2029	4,9	4,9
Tingkat Kemiskinan (%)	2025	5,19 - 6,19	5,19 - 6,19
	2029	3,25 - 4,25	3,25 - 4,25
Rasio Gini	2025	0,318 - 0,324	0,302 - 0,304
	2029	0,279 - 0,283	0,279 - 0,283
Indeks Modal Manusia	2025	0,57	0,57
	2029	0,60	0,60
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	2025	46,88	46,88
	2029	83,68	61,06
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	2025	71,85	71,85
	2029	72,69	72,69
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2025	3,55 - 3,66	3,55 - 3,66
	2029	2,94 - 3,42	2,94 - 3,42

Sumber: RPJMN 2025-2029 dan Hasil Analisis

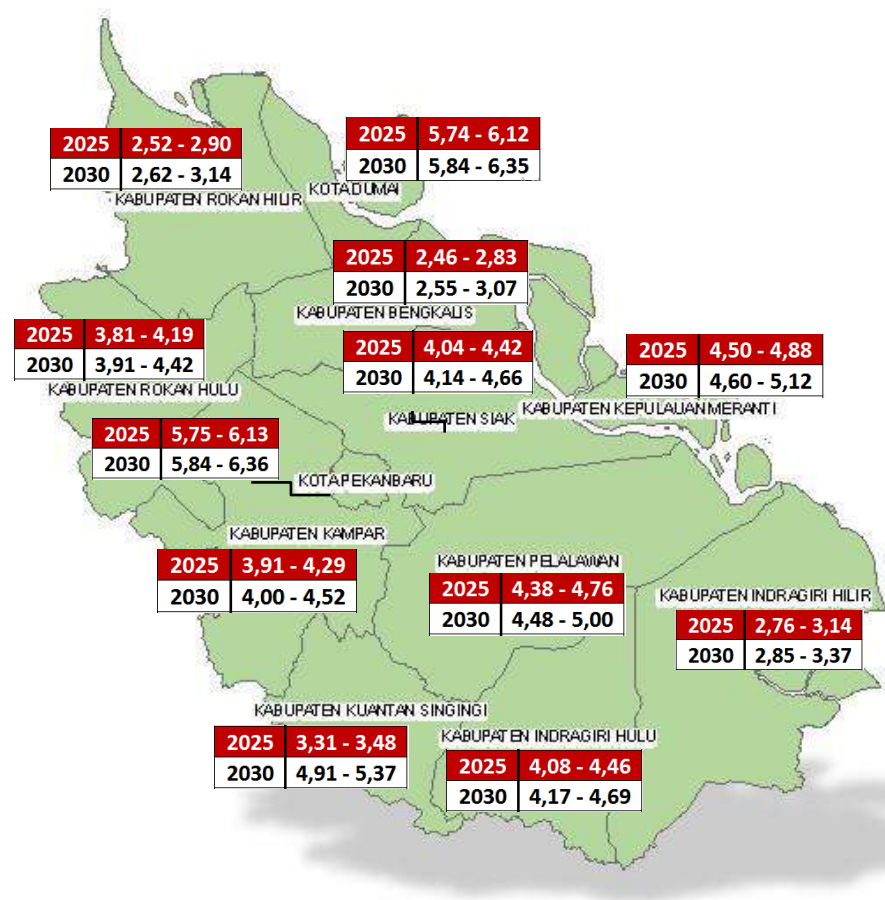
Lebih dari satu dekade, perekonomian Provinsi Riau telah mencatat pertumbuhan rata-rata sebesar 3 persen. Tahun 2029, perekonomian Riau ditargetkan mencapai 5,16-5,90 persen. Target ekonomi tersebut seiring dengan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan, yang menekankan pada stabilitas, pembangunan inklusif, dan pengurangan ketimpangan.

Target pertumbuhan ekonomi Riau dalam RPJMN sebesar 5,9 persen pada tahun 2029 merupakan target yang sangat ambisius. Target tersebut dapat dicapai melalui strategi percepatan peningkatan efisiensi investasi 1,5 - 2 kali lebih tinggi dari tren, dorongan besar pada sektor industri pengolahan, hilirisasi migas dan CPO, serta pengembangan pariwisata. Untuk infrastruktur utama, termasuk jalan, pelabuhan, dan energi baru terbarukan, diperlukan penyelesaian tepat waktu yang didukung oleh masuknya investor asing secara masif melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan investasi.

Implikasi dari target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9 persen pada sektor-sektor utama Provinsi Riau, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan, memerlukan strategi ekspansi dan hilirisasi untuk minyak

sawit mentah (CPO), serta perbaikan dalam aspek logistik dan pengembangan industri berbasis agro. Sektor manufaktur harus berfungsi sebagai pendorong utama dengan pertumbuhan yang ditargetkan sebesar 8 persen per tahun. Dalam bidang pertambangan dan migas, diperlukan peningkatan lifting, investasi pada sektor hilir, serta diversifikasi energi baru terbarukan. Sementara itu, sektor jasa harus didorong melalui pengembangan pariwisata, layanan keuangan, dan perdagangan antarprovinsi.

Target perekonomian 5,9 persen tersebut membutuhkan lompatan besar yang sangat signifikan. Riau harus menembus potensial output (kapasitas maksimal pertumbuhan tanpa memicu inflasi berlebihan). Untuk menggerakkan pertumbuhan jauh diatas tren, harus ada *shock* positif besar seperti lonjakan investasi asing, ekspansi industri hilir besar-besaran, dan kenaikan tajam harga komoditas utama yang diekspor.



Gambar 3.5. Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2025 - 2030

Dalam mendorong pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Riau, perlu dukungan dan sinergi wilayah kabupaten/kota. Oleh karena itu,

pencapaian sasaran pembangunan wilayah kabupaten/kota diarahkan untuk memenuhi capaian sasaran pembangunan Provinsi Riau.

Sasaran pembangunan wilayah kabupaten/kota difokuskan pada peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dengan pengembangan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan air baku, pengelolaan lingkungan, pengembangan ekonomi, dan pengembangan kawasan strategi provinsi.

Sasaran pembangunan wilayah kabupaten/kota dibagi menjadi 3 Wilayah Pengembangan (WP) berikut.

I. **Wilayah Pengembangan Bernilai**

WP Bernilai merupakan kawasan yang berbasis sumberdaya alam, minyak/gas bumi dan kawasan industri terpadu. WP Bernilai meliputi **Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kota Dumai**, yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di wilayah Riau bagian utara.

PKN meliputi Kota Dumai dan sekitarnya; sedangkan PKW meliputi Pasir Pangaraian, Bagansiapiapi, dan Bengkalis; serta PKL meliputi Ujung Batu, Kepenuhan Tengah, Tambusai Utara, Bagan Batu, Ujung Tanjung, Duri, Sinaboi, dan Sei Pakning.

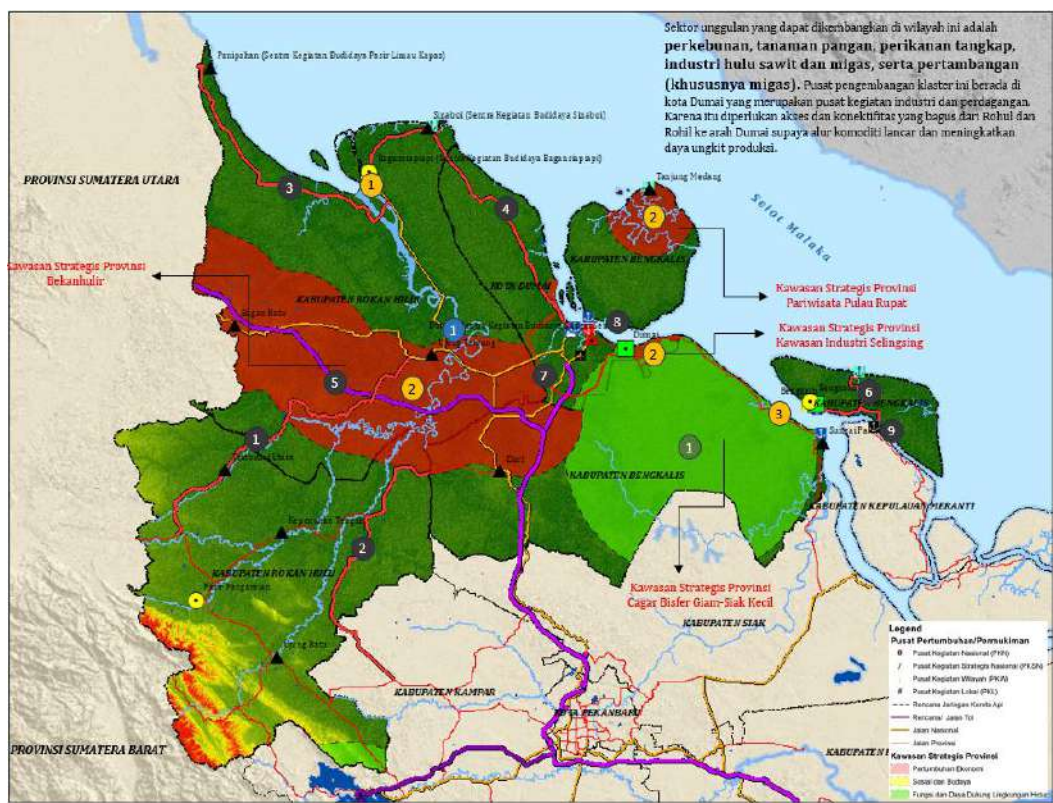
Tabel 3.29 Sasaran Pembangunan WP Bernilai

Indikator	Periode	Bengkalis	Rokan Hulu	Rokan Hilir	Dumai
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2025	2,46 - 2,83	3,81 - 4,19	2,52 - 2,90	5,74 - 6,12
	2030	2,55 - 3,07	3,91 - 4,42	2,62 - 3,14	5,84 - 6,35
Tingkat Kemiskinan (%)	2025	6,27 - 6,33	9,20 - 9,51	6,77 - 6,91	2,88 - 2,92
	2030	5,92 - 5,99	7,87 - 8,25	6,35 - 6,48	2,31 - 2,54
Rasio Gini	2025	0,203 - 0,269	0,258 - 0,270	0,181 - 0,259	0,295 - 0,323
	2030	0,140 - 0,215	0,247 - 0,260	0,105 - 0,195	0,271 - 0,300
Indeks Pembangunan Manusia	2025	76,65 - 76,73	73,35 - 73,43	72,74 - 72,82	77,31 - 77,39
	2030	78,94 - 79,55	75,64 - 76,25	75,03 - 75,64	79,60 - 80,21
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2025	5,54 - 5,72	2,54 - 2,65	4,15 - 4,23	3,83 - 3,94
	2030	4,23 - 4,93	1,15 - 1,97	3,07 - 3,50	2,69 - 2,95

Sumber: Hasil Analisis

Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP Bernilai adalah perkebunan, tanaman pangan, perikanan tangkap, industri hulu sawit dan migas, serta pertambangan (khususnya migas). Pusat pengembangan klaster

ini berada di Kota Dumai yang merupakan pusat kegiatan industri dan perdagangan. Oleh karena itu diperlukan akses dan konektivitas yang optimal dari Rokan Hulu dan Rokan Hilir ke arah Dumai supaya alur komoditi lancar dan meningkatkan daya ungkit produksi. Berikut ini peta wilayah pengembangan Bernilai.



Gambar 3.6. Peta Wilayah Pengembangan Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Dumai (WP BERNILAI)

Kebijakan pembangunan kewilayahan pada WP Bernilai adalah:

1. Kebijakan untuk Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur meliputi:
 - Pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan kawasan produksi perkebunan
 - ✓ Peningkatan ruas jalan dan jembatan Daludalu-Mahato-Spg Menggala
 - ✓ Peningkatan ruas jalan dan jembatan Simpang Suram-Simpang Bagan7-Sontang
 - Konektivitas lintas provinsi
 - ✓ Peningkatan ruas jalan dan jembatan Panipahan-Tlk Piyai-Bagansiapiapi (infrastruktur pesisir)
 - ✓ Peningkatan ruas jalan dan jembatan Sinaboi-Lubuk Gaung (infrastruktur pesisir)

- Lanjutan pembangunan jalan tol Duri-Rantau Prapat (RPJMN)
 - Preservasi jalan Trans Bengkalis (RPJMN)
 - Pembangunan Jalan Lingkar Barat Dumai (Bukit Timah-Parit Kitang-Lubukgaung) (RPJMN)
 - Peningkatan fasilitas penyeberangan Ro-Ro Dumai-Rupat
 - Peningkatan fasilitas penyeberangan Ro-Ro Bengkalis-Sei Pakning
 - Penyiapan jalur kereta barang penunjang industri dan perekonomian masyarakat
 - Mendorong Pengembangan Kota Tematik Sesuai Potensi Daerah
2. Kebijakan untuk Pemenuhan kebutuhan air baku melalui:
- penyediaan dan pengelolaan unit produksi dan unit air baku SPAM Regional Dumai-Rokan-Bengkalis
 - penyediaan dan pengelolaan unit produksi dan unit air baku SPAM Pulau Rupat
 - Pengembangan SPAM Perkotaan Dumai
3. Kebijakan untuk Pengelolaan lingkungan dilakukan melalui:
- Pengelolaan dan perlindungan kawasan sekitar Cagar Biosfir Giam Siak Kecil-Bukit Batu
 - Pengelolaan dan perlindungan Cagar Alam Pulau Berkey dan Cagar Alam Pulau Serusa
 - Sistem Pengelolaan Limbah B3 di Dumai
 - Sistem Pengendalian banjir WS Rokan
 - Pembangunan TPST Regional
 - Dukungan penyelesaian masalah banjir dan rob
4. Kebijakan untuk Kegiatan pengembangan ekonomi di WP ini diarahkan untuk:
- Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub sektor perkebunan, tanaman pangan, dan perikanan tangkap.
 - Pelaksanaan kegiatan eksplorasi potensi tambang yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
 - Pengembangan industri hilir sawit dan migas pada skala besar.
 - Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap.
 - Pengembangan input produksi, sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat.
 - Pengembangan pelabuhan perikanan Bagansiapiapi.

- Pengembangan Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi:
 - ✓ Pengembangan Kawasan Bekanhilir (Bengkalis, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir)
 - ✓ Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Perindustrian Selinsing di Dumai
 - ✓ Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Wisata Pulau Rupat
 - ✓ Pengembangan Kawasan Industri Bukit Bandar
- Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi.
- Pengembangan Kawasan strategis pariwisata Dumai – Rupat dan Pengembangan Kawasan pariwisata religi dan budaya di Rokan Hulu dan Rokan Hilir
- Pembangunan Kawasan perkotaan Dumai sebagai PKN dan Kawasan pengembangan perdagangan, industri dan jasa.

5. Kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat

- Pengentasan kemiskinan, tahun 2024, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu sebesar 9,62 persen dan Kabupaten Rokan Hilir sebesar 7,01 persen. Upaya pengentasan kemiskinan. Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah yang diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- Peningkatan Angka Partisipasi Murni SMA tahun 2024 Kabupaten Rokan Hulu sebesar 52,6 persen dan Kota Dumai sebesar 67,6 persen.
- Penurunan prevalensi stunting, tahun 2023, kabupaten bengkalis sebesar 17,90 persen, Kabupaten Rokan Hilir sebesar 16,60 persen, Kabupaten Rokan Hulu sebesar 15,90 dan Kota Dumai sebesar 14,90 persen.

Peningkatan Desa berkembang menjadi maju atau mandiri, tahun 2023, kabupaten Rokan Hilir sebanyak 62 desa dan kabupaten Rokan Hulu sebanyak 59 desa. Pembangunan Kawasan pedesaan di Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir serta pengembangan kawasan pedesaan di Kabupaten Bengkalis kawasan pedesaan Agrominapolitan di Kecamatan Bengkalis dan kawasan Agrosilvopastura Bumi Terpadu di Kecamatan Siak Kecil.

II. Wilayah Pengembangan Pilar Meranti

WP Pilar Meranti merupakan kawasan yang berbasis pada pengembangan pusat perdagangan/jasa, agrobisnis, agroindustri berbasis inovasi, teknologi dan berkelanjutan. Kawasan perkotaannya difungsikan sebagai kawasan metropolitan di Provinsi Riau. WP Pilar Meranti meliputi **Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti** yang diarahkan sebagai PKN, PKW, dan PKL di wilayah Riau bagian tengah.

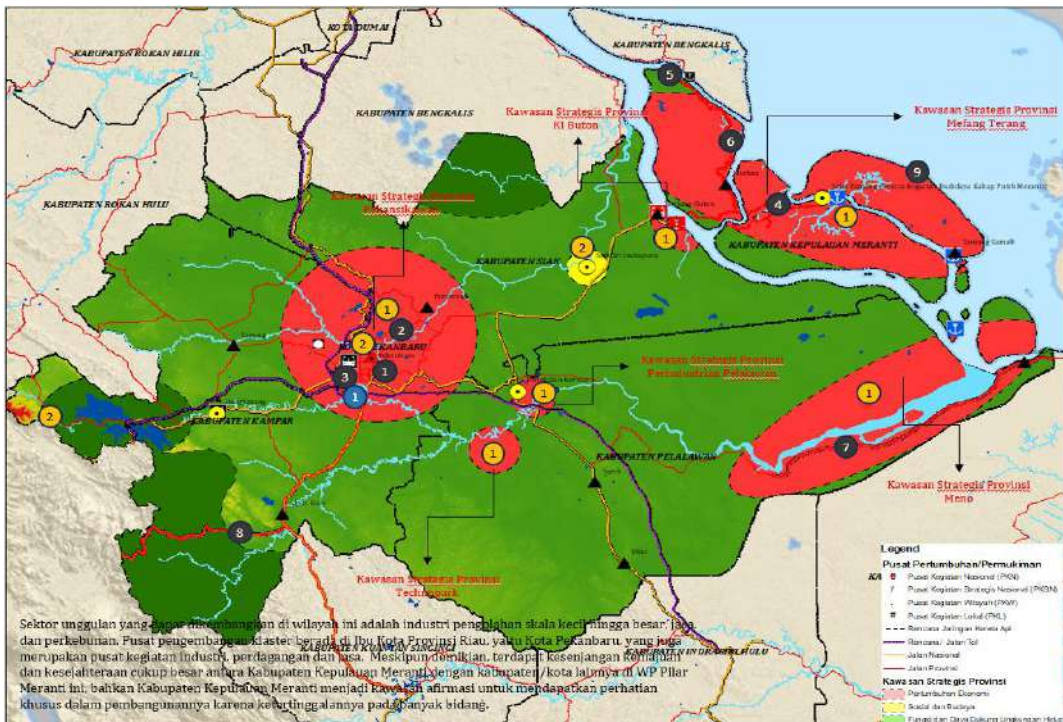
PKN meliputi Kota Pekanbaru dan sekitarnya; sedangkan PKW meliputi Bangkinang, Pangkalan Kerinci, Siak Sriindrapura, dan Selatpanjang; serta PKL meliputi Tapung, Lipat Kain, Perawang, Tanjung Buton, Sorek, Ukui, Sokoi, Merbau dan Tanjung Samak.

Tabel 3.30 Sasaran Pembangunan WP Pilar Meranti

Indikator	Periode	Kampar	Pekanbaru	Pelalawan	Siak	Kep. Meranti
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2025	3,91 - 4,29	5,75 - 6,13	4,38 - 4,76	4,04 - 4,42	4,50 - 4,88
	2030	4,00 - 4,52	5,84 - 6,36	4,48 - 5,00	4,14 - 4,66	4,60 - 5,12
Tingkat Kemiskinan (%)	2025	6,76 - 6,67	2,78 - 3,00	8,18 - 8,35	4,88 - 4,94	21,58 - 22,33
	2030	6,33 - 6,24	1,75 - 2,03	7,08 - 7,29	4,29 - 4,37	16,41- 17,54
Rasio Gini	2025	0,210 - 0,248	0,333 - 0,350	0,173 - 0,265	0,168 - 0,257	0,195 - 0,260
	2030	0,175 - 0,217	0,317 - 0,336	0,089 - 0,189	0,087 - 0,184	0,137 - 0,206
Indeks Pembangunan Manusia	2025	76,57 - 76,65	84,54 - 84,62	75,53 - 75,61	76,80 - 76,88	69,92 - 70,00
	2030	78,86 - 79,47	86,83 - 87,44	77,82 - 78,43	79,09 - 79,70	72,21 - 72,82
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2025	3,65 - 3,95	4,45 - 4,52	1,85 - 1,91	4,30 - 4,46	4,10 - 4,20
	2030	2,33 - 2,45	2,56 - 2,98	1,33 - 1,40	3,07 - 3,83	3,26 - 3,84

Sumber: Hasil Analisis

Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah Pilar Meranti adalah industri pengolahan skala kecil hingga besar, jasa, dan perkebunan. Pusat pengembangan klaster berada di Ibu Kota Provinsi Riau, yaitu Kota Pekanbaru, yang juga merupakan pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan kemajuan dan kesejahteraan cukup besar antara Kabupaten Kepulauan Meranti dengan kabupaten/kota lainnya di WP Pilar Meranti ini, bahkan Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi kawasan afirmasi untuk mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunannya karena ketertinggalannya pada banyak bidang. Berikut ini peta wilayah pengembangan Pilar Meranti.



Gambar 3.7. Peta Wilayah Pengembangan Kampar, Pekanbaru, Pelalawan, Siak, dan Kepulauan Meranti (WP Pilar MERANTI)

Kebijakan pembangunan kewilayahan pada WP Pilar Meranti adalah:

1. Kebijakan untuk Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur meliputi:
 - Pengembangan Kawasan Perkotaan Pekanbaru
 - ✓ Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Kawasan Perkotaan Pekanbaru melalui pembangunan BRT
 - ✓ Pembangunan Jembatan Siak V dan Pekanbaru East Outer Ring Road Trase IV
 - ✓ Pembangunan Jalan Tol Lingkar Barat Pekanbaru (Menghubungkan Tol Pekanbaru-Dumai, Tol Pekanbaru-Padang, dan Tol Pekanbaru-Rengat)
 - ✓ Pembangunan fly over Simpang Garuda Sakti – Panam dan Peningkatan pelebaran Jalan Kubang-Garuda Sakti Pekanbaru
 - Pengendalian banjir kota Pekanbaru Pembangunan Jembatan Tebingtinggi-Merbau
 - Peningkatan fasilitas penyebrangan Ro-ro Dakal – Ketam Putih
 - Pembangunan dan peningkatan jalan lintas Trans Meranti: ruas Tanjung Padang-Teluk Belitung-Meranti Bunting; ruas Teluk Ketapang-Semukut; ruas Selatpanjang-Alai-Kampung Balak
 - Pembangunan dan peningkatan jalan lintas Bono: Teluk Meranti-

Sebekek-Guntung

- Pembangunan dan peningkatan jalan lintas Lipat Kain-Lubuk Agung-Batu Sasak-Batas Sumbar
 - Persiapan pembangunan Bandara Udara baru
 - Pembangunan Pelabuhan Logistik di Pulau Rangsang
 - Penyiapan jalur kereta barang penunjang industri dan perekonomian masyarakat
 - Mendorong Pengembangan Kota Tematik Sesuai Potensi Daerah
2. Kebijakan untuk Pemenuhan kebutuhan air baku melalui:
- Pengembangan SPAM Regional Pekanbaru-Kampar
 - Pengembangan SPAM Perkotaan Selatpanjang
3. Kebijakan Pengelolaan lingkungan dilakukan melalui:
- Pembangunan TPST Regional Pekanbaru-Kampar-Pelalawan
 - Perlindungan dan pengelolaan Kawasan Konservasi: Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling; Taman Wisata Alam Buluh Cina; Cagar Alam Bukit Bungkuk; Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim; Tesso Nilo; Cagar Biosfer Giam-Siak Kecil
 - Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
4. Kebijakan untuk pengembangan ekonomi di wilayah ini diarahkan untuk:
- Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub-sektor perkebunan
 - Pengembangan industri hilir pertanian pada skala kecil hingga besar yang berbasis inovasi dan teknologi berkelanjutan
 - Peningkatan kapasitas kewirausahaan dan daya saing pelaku usaha lokal
 - Pengembangan pariwisata terintegrasi pada koridor pariwisata Muaratakus-Pekanbaru-Siak (Revitalisasi Kawasan Purbakala Situs Percandian Muaratakus)
 - Pengembangan Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi:
 - ✓ Kawasan Medang Terang (Merbau, Padang, Tebing Tinggi, dan Rangsang)
 - ✓ Kawasan Industri Tanjung Buton
 - ✓ Kawasan Technopark Pelalawan;
 - ✓ Kawasan Perindustrian Pangkalan Kerinci

- ✓ Kawasan PLTA Koto Panjang
- ✓ Kawasan Candi Muara Takus
- ✓ Kawasan Perkotaan Pekansikawan
- ✓ Kawasan Istana Siak

5. Kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat

- Pengentasan kemiskinan, tahun 2024, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 23,15 persen, Kabupaten Pelalawan sebesar 8,49 persen dan Kabupaten Kampar sebesar 6,92 persen. Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah yang diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- Peningkatan Angka Partisipasi Murni SMA, tahun 2024, dimana Angka Partisipasi Murni SMA di Kabupaten Kampar sebesar 67,4 persen dan Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 69,0 persen.
- Penurunan prevalensi stunting, tahun 2023, dimana prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 19,60 persen.
- Peningkatan Desa berkembang menjadi maju atau mandiri, tahun 2023, dimana desa berkembang di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 63 desa, Kabupaten Kampar sebanyak 60 desa, Kabupaten Pelalawan sebanyak 7 desa dan Kabupaten Siak sebanyak 4 desa. Pembangunan Kawasan pedesaan di Kabupaten Pelalawan serta pengembangan kawasan pedesaan di Kabupaten Kampar kawasan pedesaan pariwisata di kecamatan XIII Koto Kampar. Kabupaten Kepulauan Meranti kawasan pedesaan Agrominapolitan Berbasis Gambut dan Mangrove di kecamatan Merbau. Kabupaten Siak kawasan pedesaan Perkampungan Agrowisata Berbasis Ekosistem Gambut di kecamatan Bunga Raya.

III. Wilayah Pengembangan Gasing

WP Gasing merupakan kawasan yang berbasis pada pengembangan pertanian dan industri hilir berkelanjutan. WP Gasing meliputi **Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Indragiri Hilir** yang diarahkan sebagai PKW, dan PKL di wilayah Riau bagian selatan.

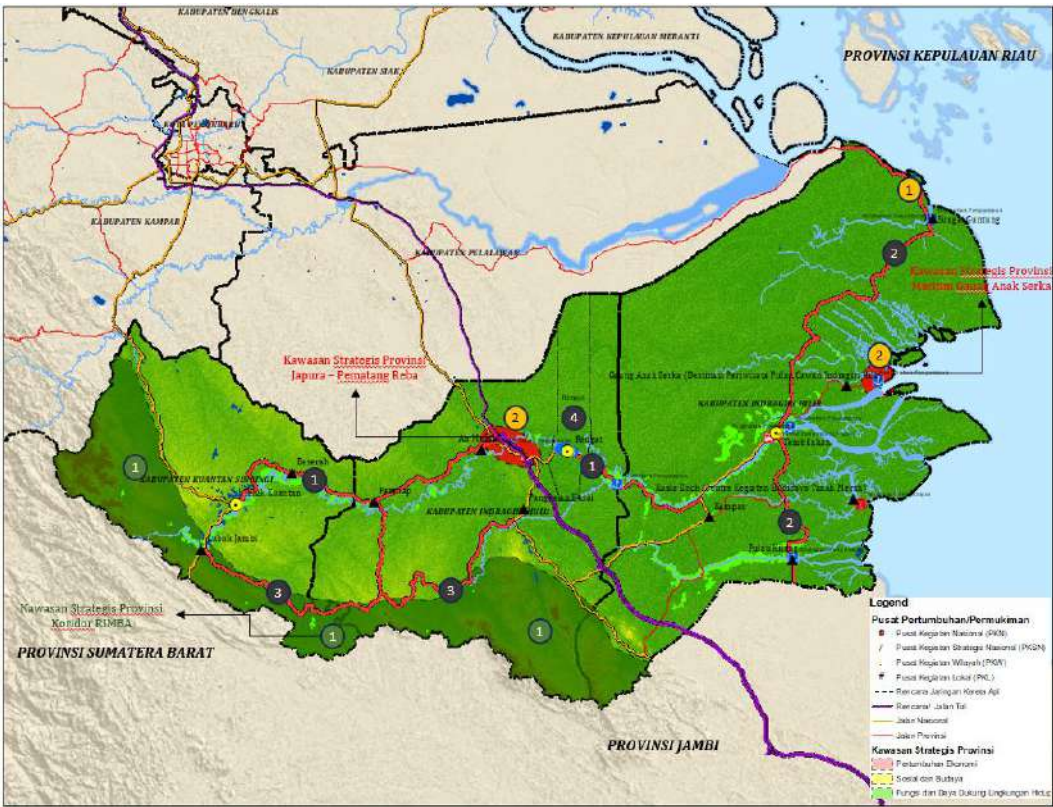
PKW di WP Gasing meliputi Taluk Kuantan, Rengat dan Tembilahan; serta PKL meliputi Lubuk Jambi, Baserah, Peranap, Air Molek, Pangkalan Kasai, Kempas, Pulau Kijang, Kuala Enok, Sungai Guntung, dan Gaung Anak Serka.

Tabel 3.31 Sasaran Pembangunan WP Gasing

Indikator	Periode	Indragiri Hulu	Kuantan Singingi	Indragiri Hilir
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2025	4,08 - 4,46	3,31 - 3,48	2,76 - 3,14
	2030	4,17 - 4,69	4,91 - 5,37	2,85 - 3,37
Tingkat Kemiskinan (%)	2025	5,59 - 5,72	7,08 - 7,25	5,56 - 5,63
	2030	4,76 - 4,97	6,58 - 6,95	5,09 - 5,28
Rasio Gini	2025	0,250 - 0,289	0,199 - 0,255	0,221 - 0,293
	2030	0,215 - 0,257	0,147 - 0,207	0,152 - 0,234
Indeks Pembangunan Manusia	2025	73,03 - 73,11	74,28 - 74,36	70,35 - 70,43
	2030	75,32 - 75,93	76,57 - 77,18	72,64 - 73,25
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2025	2,20 - 2,24	2,29 - 2,42	1,66 - 1,84
	2030	1,68 - 1,93	1,39 - 1,93	0,39 - 1,66

Sumber: Hasil Analisis

Sektor ekonomi unggulan yang dapat dikembangkan di WP Gasing ini adalah perkebunan, pertanian hortikultura dan tanaman pangan, perikanan budidaya, industri hilir pertanian, serta pertambangan batubara. Pusat pengembangan klaster berada di Kabupaten Indragiri Hilir yang nantinya akan dikembangkan sebagai pusat industri dan perdagangan. Di samping itu juga perlu Pengembangan dan Penataan Kawasan Perkotaan Rengat dan sekitarnya untuk mulai menata kawasan perkotaan di WP Gasing ini. Berikut peta wilayah pengembangan Gasing.



Gambar 3.8. Peta Wilayah Pengembangan Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kuantan Singingi (WP GASING)

Kebijakan pembangunan kewilayahan pada WP Gasing adalah:

1. Kebijakan untuk peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur meliputi:
 - Peningkatan fasilitas pelabuhan: Kuala Gaung, Kuala Enok, Tembilahan, Pulau Kijang
 - Peningkatan dan pembangunan jalan lintas provinsi di Indragiri Hilir: Sokoi-Sungai Guntung-Tembilahan; Tembilahan-Enok-Batas Jambi;
 - Peningkatan dan pembangunan jalan lintas provinsi Peranap-Simpang Ifa; Pangkalan Kasai-Lubuk Kandis-Simpang Ifa; Lubuk Jambi-Simpang Ibul-Simpang Ifa
 - Preservasi jalan ruas Rengat-Teluk Kuantan dan Rengat-Tembilahan
 - Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa)
 - Penyiapan jalur kereta barang penunjang industri dan perekonomian masyarakat
 - Penanganan intrusi air laut di Indragiri Hilir
 - Mendorong Pengembangan Kota Tematik Sesuai Potensi Daerah
 - Penataan dan pembangunan fasilitas kawasan perkotaan Rengat dan sekitarnya.
2. Kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan air baku melalui:
 - Pengembangan SPAM Indragiri Hilir
 - Pengembangan SPAM Perkotaan Rengat
 - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
3. Kebijakan untuk pengelolaan lingkungan dilakukan melalui:
 - Perlindungan dan pengelolaan Kawasan Sekitar Koridor Rimba (Riau, Jambi, Sumatera Barat)
 - Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan, rehabilitasi lahan gambut dan mangrove, dan lahan pada catchment area WS Indragiri, terutama pada DAS Indragiri dan DAS Gaung
4. Kebijakan untuk pengembangan ekonomi di wilayah ini diarahkan melalui:
 - Pengembangan Kawasan Industri Pulau Burung

- Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub-sektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan perikanan budidaya
- Pelaksanaan kegiatan eksploitasi tambang yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan
- Pengembangan industri hilir pertanian pada skala kecil-besar
- Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, dan kelapa)
- Penanganan intrusi air laut di Inhil untuk meningkatkan produktifitas pertanian
- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah provinsi
- Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
- Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen
- Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik
- Pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi:
 - ✓ Kawasan Japura-Pematang Reba

✓ Kawasan Maritim Gaung Anak Serka

5. Kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat

- Pengentasan kemiskinan, tahun 2024, Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 7,89 persen Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah yang diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- Peningkatan Angka Partisipasi Murni SMA, tahun 2024 Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 57,9 persen, Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 63,5 persen dan Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 65,8 persen
- Penurunan prevalensi stunting, tahun 2023, kabupaten Kuantan Singing sebesar 23,0 persen, dan Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 18,80
- Peningkatan Desa berkembang menjadi maju atau mandiri, tahun 2023, kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 89 desa, Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 41 desa dan kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 21 desa. Pembagunan kawasan pedesaan di Kabupaten Kuansing, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir.

3.4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya di Provinsi Riau

Secara spasial, kebijakan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya diatur dalam Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Riau. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, seperti mencakup zona pertanian, perkebunan, kehutanan produksi, industri, dan permukiman.

Pemanfaatan ruang tidak boleh terlepas dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan tata ruang tersebut harus dijalankan sejalan dengan arah pembangunan sektoral dan lintas sektor yang tercantum dalam rencana pembangunan daerah.

3.4.3.1 Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan berkelanjutan di daerah. Wilayah ini ditetapkan untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencakup perlindungan terhadap sumber daya alam, sumber daya buatan, serta warisan sejarah dan budaya bangsa. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung menjadi instrumen penting dalam mendukung ketahanan lingkungan, mitigasi bencana, serta penguatan identitas budaya dan ekologis daerah.

Secara umum, kawasan lindung terdiri dari kawasan lindung hutan dan non hutan. Kawasan lindung hutan meliputi kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi, sedangkan kawasan lindung non hutan meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (kawasan yang sesuai untuk hutan lindung/fungsi penyangga, kawasan resapan air), kawasan rawan bencana alam (kawasan rawan letusan gunung api, kawasan rawan gerakan tanah, kawasan rawan tsunami), dan kawasan perlindungan geologi (cagar geologi dan karst).

Strategi penataan ruang Wilayah Provinsi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi:

- a. menetapkan Kawasan Lindung di ruang darat dan ruang laut;
- b. mempertahankan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
- c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
- d. mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi lingkungan hidup;
- e. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar Kawasan Lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya; dan
- f. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar Kawasan Lindung.

Strategi penataan ruang Wilayah Provinsi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi:

- a. Mewujudkan keterpaduan pembangunan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;

- b. Mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. Mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
- d. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
- g. Mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana;
- h. Menata kelola kawasan yang berfungsi Ekosistem Gambut sebagai penyangga kehidupan; dan
- i. Mengembangkan prosedur penyelesaian konflik penggunaan lahan dan pemanfaatan lingkungan hidup di kawasan konflik melalui keterlibatan dan kesepakatan berbagai stakeholder dan masyarakat adat.

Perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:

- Perwujudan Badan Air
- Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Perwujudan Kawasan Konservasi
- Perwujudan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut
- Perwujudan Kawasan Hutan Adat
- Perwujudan Kawasan Cagar Budaya
- Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove.

Indikasi arahan zonasi disusun secara detail guna memberikan kepastian hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang serta sebagai dasar pelaksanaan program-program pelestarian lingkungan, terdiri atas:

- a. Indikasi arahan zonasi Badan Air
- b. Indikasi arahan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

- c. Indikasi arahan zonasi kawasan konservasi
- d. Indikasi arahan zonasi kawasan pencadangan konservasi di laut
- e. Indikasi arahan zonasi kawasan hutan adat
- f. Indikasi arahan zonasi kawasan cagar budaya
- g. Indikasi arahan zonasi kawasan ekosistem mangrove.

3.4.3.2 Kawasan Budi Daya

Kawasan budidaya merupakan wilayah yang diarahkan untuk mendukung kegiatan pemanfaatan ruang secara produktif dan berkelanjutan, baik di ruang darat, laut, maupun udara. Pengembangan kawasan budidaya memiliki peran strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam aspek ekonomi, sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Strategi penataan ruang Wilayah Provinsi untuk perwujudan dan peningkatan keterkaitan serta keterpaduan antar kegiatan budi daya meliputi:

- a. menetapkan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis wilayah untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, termasuk ruang di dalam bumi dan di atas bumi yang terintegrasi untuk mewujudkan keselarasan pemanfaatan ruang wilayah;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya strategis di dalam kawasan beserta prasarana pendukung secara berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya yang berorientasi pada masyarakat;
- c. mengintegrasikan kegiatan budi daya antara sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan untuk mengoptimalkan pengembangan potensi sumber daya lokal;
- d. mengoptimalkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. mengembangkan peran strategis wilayah perbatasan negara dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi wilayah; dan
- f. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan/atau landas kontinen untuk meningkatkan perekonomian wilayah.

Strategi penataan ruang Wilayah Provinsi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:

- a. Mendorong penyesuaian perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan risiko bencana;
- b. Menata kelola pemanfaatan ruang terbangun pada kawasan sempadan pantai, sungai, dan danau/waduk;
- c. Mendorong pengembangan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak;
- d. Mengembangkan dan mempertahankan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Kawasan Perkotaan; dan
- e. Mengoptimalkan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar dan metropolitan yang berkelanjutan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mendorong pelayanan fungsi desa-kota di sekitarnya.

Perwujudan Kawasan Budi Daya, meliputi:

- Perwujudan Kawasan Hutan Produksi
- Perwujudan Kawasan Pertanian
- Perwujudan Kawasan Perikanan
- Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi
- Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri
- Perwujudan Kawasan Pariwisata
- Perwujudan Kawasan Permukiman
- Perwujudan Kawasan Transportasi
- Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Indikasi arahan zonasi kawasan budidaya berfungsi sebagai acuan utama dalam penyusunan rencana aksi pembangunan, investasi daerah, serta pelaksanaan program prioritas, terdiri atas :

- a. Indikasi arahan zonasi kawasan hutan produksi
- b. Indikasi arahan zonasi kawasan pertanian
- c. Indikasi arahan zonasi kawasan perikanan
- d. Indikasi arahan zonasi kawasan pertambangan dan energi
- e. Indikasi arahan zonasi kawasan peruntukan industri
- f. Indikasi arahan zonasi kawasan pariwisata
- g. Indikasi arahan zonasi kawasan permukiman
- h. Indikasi arahan zonasi kawasan transportasi
- i. Indikasi arahan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya secara sinergis menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan wilayah yang berdaya saing, berkelanjutan, dan inklusif, dengan memperhatikan

keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pemanfaatan ruang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.5 Pembangunan Rendah Karbon

Provinsi Riau memiliki luas hutan sebesar 5,4 juta ha dan gambut seluas 4,9 juta ha, yang berperan penting dalam agenda mitigasi perubahan iklim nasional. Namun demikian, Provinsi Riau juga menghadapi tantangan besar akibat laju deforestasi dan degradasi lahan gambut yang tinggi. Hal ini dipicu oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit, pembangunan hutan tanaman industri, pembalakan liar, serta kebakaran hutan yang berulang. Dampak lingkungan tersebut telah menyebabkan tingginya emisi gas rumah kaca (GRK) sekaligus mengancam kelestarian keanekaragaman hayati, penghidupan masyarakat lokal dan komitmen terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca. Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023, terdapat sekitar 2,8 juta hektare hutan di Riau hilang antara tahun 1990 hingga 2020 dan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap emisi karbon nasional.

Selanjutnya berdasarkan platform Signsmart KLHK, tren penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Provinsi Riau tahun 2020-2022 adalah sebesar dua persen. Namun pada tahun 2023 (perhitungan n-2), terjadi perubahan formulasi perhitungan emisi gas rumah kaca di tingkat nasional sehingga emisi GRK meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 285 ribu Gigagram CO₂ ekuivalen. Sektor kehutanan masih menjadi emitter terbesar GRK di Provinsi Riau, yaitu sebesar 83,25 persen, diikuti sektor energi sebesar 13,98 persen, sektor limbah sebesar 2,08 persen dan pertanian sebesar 0,68 persen. Pada sektor pertanian, emisi GRK terbesar disumbangkan oleh perkebunan kelapa sawit, yaitu sebesar lebih dari 90% dari total emisi GRK pertanian Provinsi Riau. Dengan luas perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia yaitu 3,3 juta hektar, di satu sisi memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian namun di sisi lain juga memberikan tantangan dalam hal pengelolaan penggunaan lahan di Provinsi Riau.

Pemerintah Provinsi Riau telah menginisiasi berbagai kebijakan pembangunan berkelanjutan. Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) telah

memuat peta jalan penurunan emisi GRK Provinsi Riau Tahun 2060 sebesar 13% untuk skenario fair dengan kemampuan pendanaan pemerintah dan 33% untuk skenario ambisius dengan dukungan pendanaan dari stakeholder. Implementasi aksi pembangunan rendah karbon di Provinsi Riau melibatkan pentahelix yaitu Pemerintah, perguruan tinggi, swasta, CSO dan media. Beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon adalah sebagai berikut: (1). Perbaikan tata kelola hutan, lahan gambut dan pesisir untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat; (2) Peningkatan bauran energi dengan pemanfaatan potensi sumber daya alam terbarukan; (3) Peningkatan produktivitas dan produksi pertanian berkelanjutan; (4). Optimalisasi pembinaan, pengawasan dan pengelolaan limbah; 5. Peningkatan nilai tambah sumberdaya alam melalui hilirisasi produk pada sentra dan kawasan industri.

Capaian Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Riau tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut: (1) Penurunan luas lahan terbakar: 6513,25 ha, (2) Terbangunnya Pusat Pengelolaan Limbah B3 Terpadu sebesar 1 unit yang merupakan kewenangan swasta, (3) Luas lahan yang ditingkatkan vegetasinya sebesar 887.548 ha dari target 755.086 ha, (4) Panjang pelindung pantai yang dibangun sepanjang 186 meter dari target 12.100 meter, (5) Luas lahan mangrove yang ditanam dan direhabilitasi sebesar 356.55 ha dari target 3500 ha, (6) Jumlah Perhutanan Sosial yang di bina ke arah Restorasi Ekosistem sebanyak 31 unit dari target 20 unit, (7) Jumlah perusahaan kelapa sawit yang menerapkan ISPO sebanyak 121 perusahaan dan 37 Pekebun dari target 50 perusahaan, (8) Luas areal persawahan yang sudah menerapkan sebesar 28.589 Ha dari target 27.790 ha, (9) Jumlah Sarana dan Prasana biogas sebanyak 10 unit dari target 12 unit, (10) Jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum mata pelajaran yang terintegrasi dengan peningkatan kesadaran terhadap lingkungan tingkat SMA/SMK di Provinsi Riau sebanyak 667 sekolah dari target 200 sekolah, (11) Data potensi energi terbarukan: Energi Terbarukan pada Program Pemberdayaan Masyarakat yaitu Pertanian Lahan Gambut dan Pengolahan Air Gambut oleh PT. KPI RU II Sungai Pakning: 7300WP, Pengembangan energi terbarukan dari Tenaga Surya oleh PT. RAPP: 24.137 MW, Pengembangan energi dari penggunaan Biomass oleh PT. RAPP: 7.544.136 Giga Joule. Selanjutnya, beberapa aksi yang belum mencapai target antara

lain: Terbangunnya 1 unit TPA Regional saat ini terkendala moratorium Bappenas untuk pembangunan TPA dan Pembangunan pelindung Pantai yang memerlukan anggaran sangat besar.

Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci utama implementasi pembangunan rendah karbon sebagai bagian penting dalam implementasi ekonomi hijau. Pemerintah Provinsi Riau dengan dukungan UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK-FCDO) telah meluncurkan inisiatif The Green for Riau pada tanggal 8 Mei 2025. Inisiatif ini fokus pada pengembangan solusi hijau dan kemitraan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau. Program ini dirancang untuk mempercepat kesiapan Riau dalam REDD+ dan memastikan implementasi perdagangan karbon melalui keterlibatan pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas, dan kerangka pemantauan yang kuat. Dengan kolaborasi para pelaku di tingkat lokal, nasional, dan internasional, program ini bertujuan untuk menetapkan peta jalan yang jelas bagi tata kelola hutan berkelanjutan di Riau. The Green for Riau pada dasarnya melanjutkan inisiatif REDD+ sebelumnya dengan fokus pada mobilisasi sektor swasta. Program ini akan sepenuhnya memungkinkan pengembangan program karbon hutan berbasis proyek untuk menarik pembelian kredit karbon dari pembeli swasta, termasuk penggunaan metodologi yang akuntabel dengan tingkat pengakuan pasar yang baik dan selaras dengan Prinsip Karbon Inti. Peluncuran resmi Inisiatif Provinsi Riau ini akan menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi dan misi dalam menyusun arah kebijakan dalam mendorong rencana aksi iklim dan tata kelola hutan yang berkelanjutan.

Di samping program The Green for Riau, Pemerintah Provinsi Riau akan mengaktifkan kembali Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu dan perpanjangan Kerjasama Pembangunan Rendah Karbon dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. Komitmen Pembangunan berkelanjutan menjadi suatu hal yang sangat penting, sehingga Pemerintah Provinsi Riau akan terus memperluas jaringan kerjasama baik dengan Lembaga di Tingkat Global, Regional maupun lokal. Cakupan Kerjasama diharapkan tidak sebatas pada sektor lahan (kehutanan, gambut, pertanian dan bluecarbon) akan tetapi juga non lahan (energi, transportasi dan limbah).

3.6 Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan dan ketimpangan terus menjadi isu prioritas dalam agenda pembangunan pemerintah. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas kemampuan ekonomi semata, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Salah satu tantangan utama kemiskinan saat ini adalah cukup banyaknya jumlah penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan yang menjadikannya sangat rentan jatuh miskin. Semangat upaya pengentasan kemiskinan adalah bagaimana masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dapat terangkat derajat kesejahteraannya melewati garis kemiskinan, dan masyarakat yang berada pada kondisi rentan miskin dapat setidaknya bertahan untuk tidak jatuh miskin serta memberdayakannya agar memiliki kehidupan yang lebih baik.

Penanganan masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan menjadi tanggungjawab semua pihak. Karena sifatnya yang tematik dan multidimensi tersebut maka agar penanganan masalah kemiskinan menjadi efektif, perlu dilakukan koordinasi dan sinergi semua pihak serta integrasi program-program lintas sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dalam proses implementasinya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal yang perlu diperhatikan lebih jauh adalah upaya dan rencana apa yang harus dilakukan untuk mengeluarkan masyarakat miskin dari garis kemiskinan agar mereka memiliki ketahanan ekonomi rumah tangga yang tangguh dalam menghadapi gejolak ekonomi serta alam di Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, target capaian tingkat kemiskinan secara nasional pada tahun 2029 adalah 4,5 – 5,0 persen dan target capaian angka kemiskinan ekstrem adalah 0% pada tahun 2026. Di dalam RPJMN tersebut juga disebutkan bahwa penduduk sangat miskin atau miskin ekstrem yang menurut Bank Dunia merupakan orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari 1,9 dolar AS per kapita/hari, diamanatkan untuk dilakukan penyesuaian ambang batas terbaru sesuai amanat RPJMN menjadi 2,15 USD PPP. Memastikan target 2026, angka kemiskinan ekstrem dapat mencapai titik 0% atau sama sekali habis, harus diakui bukan pekerjaan mudah meski

capaian Provinsi Riau pada tahun 2024 telah mencapai 0,43%. Dibutuhkan pemutakhiran data yang terinci dan berperingkat untuk mencegah intervensi program menjadi salah sasaran. Berikutnya Pemerintah Daerah harus mampu melaksanakan program secara lebih terarah dengan memastikan tepat caranya, tepat lokasinya, dan tepat fokusnya. Disamping itu, dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem maka Pemerintah harus mampu mengidentifikasi program inovatif untuk upaya tersebut.

Komitmen Pemerintah menangani kemiskinan, selain tertuang di dalam RPJMN tersebut di atas juga Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE). Instruksi Presiden tersebut juga sebagai lanjutan dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Upaya optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dilaksanakan secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi :

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Sebagai upaya membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kegiatan intervensi guna optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri kemudian memetakan program yang disesuaikan dengan program-program nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berdasarkan tiga strategi tersebut di atas yaitu penurunan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemetaan program kegiatan tersebut akan menjadi *open menu* bagi Pemerintah Daerah terutama dalam melakukan sinkronisasi program prioritas daerah. Selain program yang telah dipetakan, tidak menutup kemungkinan program Pemerintah Provinsi Riau lainnya yang mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui program yang bersifat tematik. Pemetaan Program Kegiatan sebagai upaya Optimalisasi Pelaksanaan

Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dapat dilihat melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.4.2/9839/Bangda tentang Program, Kegiatan, Sub-kegiatan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya dituangkan ke dalam rencana aksi daerah dalam bentuk dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem selain menggunakan analisa dan dilakukan melalui pelaksanaan program kegiatan yang telah dipetakan di atas dan program lainnya yang mendukung upaya tersebut, penanganan fakir miskin juga dilakukan melalui pendekatan wilayah. Guna memastikan upaya pengentasan kemiskinan berjalan dengan efektif, dalam pelaksanaan program terutama yang dipetakan sebagai pendukung upaya pengentasan kemiskinan yang diampu perangkat daerah terkait diharapkan dapat memperhatikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah yang diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal. Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan diidentifikasi dan dilakukan melalui strategi pendekatan wilayah sebagai berikut:

- a. Wilayah **Perdesaan**. Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah perdesaan dilakukan diantaranya melalui:
 - Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan
 - Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan
 - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
 - Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 - Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya
- b. Wilayah **Perkotaan**. Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah perkotaan dilakukan melalui:
 - Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal
 - Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Usaha
 - Pengembangan Lingkungan Permukiman Yang Sehat

- Peningkatan Rasa Aman dari Tindak Kekerasan dan Kejahatan
- c. Wilayah **Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**. Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui:
 - Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut
 - Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Usaha
 - Penguatan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pesisir dan Nelayan
 - Pemeliharaan Daya Dukung Serta Mutu Lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Peningkatan Keamanan Berusaha dan Pengamanan Sumber Daya Kelautan dan Pesisir
- d. Wilayah **Tertinggal/Terpencil**. Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah tertinggal/terpencil dilakukan melalui:
 - Pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan
 - Penyediaan Sumber Mata Pencaharian di Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kerajinan
 - Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kerajinan
 - Peningkatan Pembangunan Terhadap Sarana dan Prasarana
 - Penguatan Kelembagaan dan Pemerintahan
 - Pemeliharaan, Perlindungan, dan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal
- e. Wilayah **Perbatasan Antar Negara**. Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah perbatasan antarnegara dilakukan melalui:
 - Penyediaan Sumber Mata Pencaharian di Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kerajinan
 - Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kerajinan
 - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
 - Penguatan Kelembagaan dan Pemerintahan
 - Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya
 - Menjamin Keamanan Wilayah Perbatasan Serta Pengamanan Sumber Daya Lokal
 - Peningkatan Daya Tahan Budaya Lokal dari Pengaruh Negatif Budaya Asing.

3.7 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah perjanjian hak asasi manusia komprehensif pertama dalam abad ke-21. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) berisi tentang undang-undang yang memastikan semua penyandang disabilitas dapat menikmati semua hak dasar manusia dan kebebasan yang fundamental. Sejalan dengan hal tersebut Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkomitmen terhadap penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Pasal-pasal tersebut bermakna bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia oleh pemerintah harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Termasuk perlakuan dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan, anak, pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja migran. Tanggung jawab pemerintah di bidang Hak Asasi Manusia dilaksanakan tanpa memandang perbedaan.

Manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, Status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik tertentu dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Amanat tersebut dijabarkan di dalam pasal 71 dan 72 Undang – undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia, Pasal 71 menyatakan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diterima oleh

Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 72 mengatur bahwa kewajiban dan tanggung jawab Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan Negara, dan bidang lain.

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menjunjung konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) adalah dengan meratifikasinya melalui penyusunan UU No.8 tahun 2016 sebagai pengganti UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai implementasi di lapangan, telah tersusunnya Rencana Aksi Nasional (RAN) oleh pemerintah, dimana penyusunan RAN ini berdasarkan kepada Rencana Induk Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menandai perubahan paradigma Penyandang Disabilitas, tidak lagi dipandang sebagai objek yang perlu diberikan bantuan (charity-based) namun sebagai subjek yang diberikan jaminan terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia (human rights-based). Disabilitas saat ini juga dipandang sebagai isu multisektor, tidak hanya terkait sektor sosial saja namun juga berkaitan dengan sektor lainnya, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, tenaga kerja, peradilan, dan komunikasi. Dengan demikian maka pengarusutamaan Penyandang Disabilitas mendukung upaya penghormatan, pemenuhan dan pemajuan hak penyandang Disabilitas dalam kebijakan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah telah menuangkan kebijakan terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Pergub Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Riau. RAD Disabilitas yang ada juga untuk mendukung pencapaian

Misi Membangun Manusia yang Sehat dan Berkualitas Melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Merata dan Berkeadilan serta Keberpihakan pada Kelompok Marjinal.

BAB
IV

**PROGRAM PERANGKAT DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH**

**Riau Rumah Rumpun Melayu,
Merawat Tuah Menjaga Marwah,
Takkan Melayu Hilang di Bumi**

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah untuk mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD ini. Penyusunan dan kerangka pendanaan pembangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah Provinsi Riau telah menerapkan *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi saat ini serta isu strategis pada masa datang sampai akhir periode masa jabatan kepala daerah. Hal ini berarti program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah menjadi prioritas yang akan dilaksanakan dan mendapatkan anggaran.

4.1 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen untuk mencapai sasaran RPJMD. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi, misi dan prioritas pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
2. Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
4. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's).
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.
6. Penerapan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Program perangkat daerah merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau serta unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan urusan pemerintahan daerah dan unsur pemerintahan umum serta termuat pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					2.745.574.350.653		2.752.518.431.797		2.806.478.641.148		2.861.756.665.548		2.910.991.639.260	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.779.597.886.418		1.787.369.893.083		1.818.946.687.251		1.851.167.764.640		1.883.649.196.935	
Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	1.779.597.886.418	100	1.787.369.893.083	100	1.818.946.687.251	100	1.851.167.764.640	100	1.883.649.196.935	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					951.087.408.993		948.625.544.205		970.258.964.452		992.543.348.681		1.008.735.533.795	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (%)	78,49	79,13	79,77	951.087.408.993	80,41	948.625.544.205	81,06	970.258.964.452	81,70	992.543.348.681	82,34	1.008.735.533.795	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (%)	56,75	65,40	74,05		75,14		76,23		77,32		78,41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					149.999.757		148.677.215		155.425.820		162.377.495		167.428.691	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau (%)	90,00	90,10	90,50	149.999.757	91,00	148.677.215	91,50	155.425.820	92,00	162.377.495	92,50	167.428.691	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					14.739.055.485		16.294.317.294		17.032.563.625		17.793.174.732		18.344.479.839	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	-	-	0,45 - 0,46	14.739.055.485	0,46 - 0,47	16.294.317.294	0,47 - 0,48	17.032.563.625	0,48 - 0,49	17.793.174.732	0,49 - 0,50	18.344.479.839	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	52,96	55,96	58,96		61,96		64,96		67,96		70,96		Dinas /Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal Budaya Melayu Riau (%)	66,05	66,55	67,05		67,55		68,05		68,55		69,05		Dinas /Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					-		80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/ diperbarui	100	100	-	-	100	80.000.000	100	85.000.000	100	90.000.000	100	95.000.000	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.190.999.859.334		1.231.958.839.201		1.280.360.811.272		1.330.144.509.005		1.368.533.544.072	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					942.419.512.779		968.327.978.746		1.005.085.763.313		1.042.874.892.209		1.072.548.484.347	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan	100	100	100	942.419.512.779	100	968.327.978.746	100	1.005.085.763.313	100	1.042.874.892.209	100	1.072.548.484.347	Dinas /Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
administrasi perkantoran	Administrasi Perkantoran (%)													Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					233.881.260.515		245.461.310.713		256.603.040.490		268.080.032.315		276.419.395.622	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Cakupan penemuan kasus Tuberkolosis (Treatment Coverage) (%)	75,2	91	92	233.881.260.515	93	245.461.310.713	94	256.603.040.490	95	268.080.032.315	95	276.419.395.622	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Depresi yang mendapatkan pelayanan (%)	0,6	5	10		15		20		25		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Kabupaten/ Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Kabupaten/ Kota)	NA	3	5		7		9		12		12		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Skrining Obesitas pada Populasi target (%)	17,10	20	30		40		50		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Kabupaten/ Kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	NA	8,3	8,3		16,7		16,7		25		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Kabupaten/ Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan (%)	NA	25	41,67		58,33		75		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	21	25	35		45		55		65		75		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	74,3	75	80		81		82		83		83		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan Pelayanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) (Kabupaten/ Kota)	5	8	10		11		12		12		12		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Kabupaten/ Kota dengan Eliminasi Kusta (Kabupaten/ Kota)	0	0	0		1		1		2		2		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Kabupaten/ Kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/ Kelurahan sesuai standar (%)	0	8,3	8,3		16,7		16,7		25		25		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada	100	100	100		100		100		100		100		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				2026		2027		2028		2029		2030						
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	situasi KLB provinsi (%)													Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan				
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-	83	86				89				92				95		95
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	43,73	43,84	45,33				45,38				61,22				66,30		66,30
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					6.815.135.040		10.053.588.772		10.509.931.033		10.980.004.935		11.321.568.047					
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (%)	4,19	4,19	4,21	6.815.135.040	4,22	10.053.588.772	4,23	10.509.931.033	4,24	10.980.004.935	4,25	11.321.568.047	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan				
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	82	82	83				84				85			86		87	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	68	68	69				69				70			71		72	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					274.534.000		223.015.823		233.138.730		243.566.242		251.143.037					
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, alkes dan makan minuman yang memenuhi standar (Persentase)	80	81	81,50	274.534.000	82	223.015.823	83	233.138.730	84	243.566.242	85	251.143.037	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					7.609.417.000		7.892.945.147		7.928.937.706		7.966.013.304		7.992.953.019	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Kampanye Pembudayaan Hidup Sehat/Germas (%)	16	33	41	7.609.417.000	50	7.892.945.147	58	7.928.937.706	66	7.966.013.304	75	7.992.953.019	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) aktif (Persentase)	62,7	65	66,10		67,90		69,70		70,50		73,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					1.099.980.444.172		1.097.592.232.633		1.145.144.348.465		1.194.103.780.202		1.230.376.967.847	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					151.990.147.546		158.899.936.275		158.852.825.945		161.034.201.580		160.997.563.070	
Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	151.990.147.546	100	158.899.936.275	100	158.852.825.945	100	161.034.201.580	100	160.997.563.070	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					68.245.053.371		64.735.579.123		67.673.990.587		70.700.820.804		72.900.163.388	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi (%)	17,84	17,84	20,43	37.990.016.225	23,44	37.414.062.177	26,72	40.352.473.641	30,28	43.379.303.858	33,99	45.578.646.442	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Penataan Ruang
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir	Persentase peningkatan kawasan bebas banjir (%)	0,57	0,57	0,59	30.255.037.146	0,63	27.321.516.946	0,67	27.321.516.946	0,72	27.321.516.946	0,78	27.321.516.946	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase peningkatan panjang pantai yang terlindungi dari abrasi (%)	1,41	1,41	1,45		1,49		154		1,60		1,67		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					9.050.353.000		7.543.438.838		7.885.842.930		8.238.550.188		8.494.832.846	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota (Persentase)	8,58	8,58	19,94	9.050.353.000	34,14	7.543.438.838	48,35	7.885.842.930	59,71	8.238.550.188	65,39	8.494.832.846	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					-		1.189.417.409		1.243.406.232		1.299.019.615		1.339.429.177	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Jumlah Dukungan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (Dokumen)	NA	NA	NA	-	1	1.189.417.409	1	1.243.406.232	0	1.299.019.615	0	1.339.429.177	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	NA	NA	NA		0		0		20		40		Dinas /Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					150.000.000		1.174.710.571		1.228.031.837		1.282.957.575		1.322.867.482	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Aman (%)	86,32	86,74	87,16	150.000.000	87,58	1.174.710.571	88	1.228.031.837	88,42	1.282.957.575	88,84	1.322.867.482	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					5.200.000.000		2.400.000.000		7.500.000.000		10.500.000.000		15.000.000.000	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	NA	NA	100	5.200.000.000	100	2.400.000.000	100	7.500.000.000	100	10.500.000.000	100	15.000.000.000	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					210.229.557.686		206.507.097.250		215.880.657.050		225.536.273.490		232.552.196.710	
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	100	100	100	210.229.557.686	100	206.507.097.250	100	215.880.657.050	100	225.536.273.490	100	232.552.196.710	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					14.090.530.000		15.353.925.743		16.050.855.500		16.768.756.336		17.290.394.409	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	100	100	100	14.090.530.000	100	15.353.925.743	100	16.050.855.500	100	16.768.756.336	100	17.290.394.409	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN					636.799.105.462		634.589.380.801		663.394.015.550		693.065.400.888		714.625.097.535	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	68,35	69,81	71,61	636.799.105.462	73,41	634.589.380.801	75,31	663.394.015.550	77,21	693.065.400.888	80,01	714.625.097.535	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGA N JASA KONSTRUKSI					1.381.937.322		2.720.793.037		2.844.292.503		2.971.508.150		3.063.945.046	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	37,25	45,21	49,32	1.381.937.322	51,78	2.720.793.037	54,25	2.844.292.503	56,71	2.971.508.150	59,18	3.063.945.046	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG					2.843.759.785		2.477.953.586		2.590.430.331		2.706.291.576		2.790.478.184	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian legalisasi RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/ Kota (%)	91,67	91,67	91,67	2.843.759.785	100	2.477.953.586	100	2.590.430.331	100	2.706.291.576	100	2.790.478.184	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					23.242.619.475		23.037.653.225		24.083.354.913		25.160.522.458		25.943.209.389	
1.04.02 - PROGRAM					5.606.839.475		5.557.395.510		5.809.651.146		6.069.497.321		6.258.305.651	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGEMBANGAN PERUMAHAN														
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program Pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	5.606.839.475	100	5.557.395.510	100	5.809.651.146	100	6.069.497.321	100	6.258.305.651	Dinas /Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	100	100	100				100				100		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					9.635.780.000		9.550.806.241		9.984.326.709		10.430.892.095		10.755.373.550	
Meningkatnya Kualitas Kawasan Pemukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	NA	0,64	3,88	9.635.780.000	3,62	9.550.806.241	3,62	9.984.326.709	3,62	10.430.892.095	3,62	10.755.373.550	Dinas /Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					8.000.000.000		7.929.451.474		8.289.377.058		8.660.133.042		8.929.530.188	
Meningkatnya Penyediaan PSU pemukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	100	100	100	8.000.000.000	100	7.929.451.474	100	8.289.377.058	100	8.660.133.042	100	8.929.530.188	Dinas /Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					69.147.955.082		71.586.831.001		73.568.340.215		75.596.308.085		77.460.226.082	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					62.044.907.475		64.039.709.653		65.678.647.622		67.353.736.052		68.961.246.282	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	47.387.062.893	100	48.658.508.140	100	49.878.551.572	100	51.125.040.741	100	52.335.139.693	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	14.657.844.582	100	15.381.201.513	100	15.800.096.050	100	16.228.695.311	100	16.626.106.589	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					4.643.106.988		5.049.344.134		5.278.538.819		5.514.630.125		5.686.177.791	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (Persentase)	100	100	100	1.440.000.000	100	1.740.000.000	100	1.800.000.000	100	1.861.080.000	100	1.924.283.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	100	3.203.106.988	100	3.309.344.134	100	3.478.538.819	100	3.653.550.125	100	3.761.894.591	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA					2.134.645.419		2.140.951.898		2.238.131.806		2.338.235.921		2.410.973.151	
Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana (%)	87,5	100	100	2.134.645.419	100	2.140.951.898	100	2.238.131.806	100	2.338.235.921	100	2.410.973.151	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					325.295.200		356.825.316		373.021.968		389.705.987		401.828.858	
Meningkatnya penanggulangan kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	NA	100	100	325.295.200	100	356.825.316	100	373.021.968	100	389.705.987	100	401.828.858	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					52.575.440.059		54.507.985.158		56.244.638.489		58.025.937.319		59.545.930.855	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					36.958.887.762		38.699.703.769		39.723.342.793		40.770.172.241		41.756.488.738	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	36.958.887.762	100	38.699.703.769	100	39.723.342.793	100	40.770.172.241	100	41.756.488.738	Dinas /Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					324.498.000		323.015.823		333.138.730		343.566.242		351.143.037	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	100	100	100	324.498.000	100	323.015.823	100	333.138.730	100	343.566.242	100	351.143.037	Dinas /Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas /Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi, panti rehabilitasi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas /Badan yang menangani Bidang Sosial		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	84,62	85	86		87		88		89		90		Dinas /Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					499.998.934		495.590.717		518.086.066		541.258.315		558.095.637	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Penanganan Pemulangan Warga Negara Imigran, Orang Terlantar, Korban Tindak Kekerasan (Persentase)	100	100	100	499.998.934	100	495.590.717	100	518.086.066	100	541.258.315	100	558.095.637	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					12.122.916.707		12.184.780.067		12.737.859.192		13.307.580.835		13.721.549.568	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Nilai)	75	76	77	12.122.916.707	78	12.184.780.067	79	12.737.859.192	80	13.307.580.835	81	13.721.549.568	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Nilai)	75	76	77		78		79		80		81		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Indeks Peranan Sosial (Nilai)	70	71	72		73		74		75		76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia, Gelandang Pengemis, PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					690.096.578		684.162.985		715.217.814		747.207.104		770.451.027	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (%)	80	81	82	690.096.578	83	684.162.985	84	715.217.814	85	747.207.104	86	770.451.027	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data Fakir Miskin (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	40	45	50		55		60		65		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.874.410.658		1.858.068.717		1.942.408.279		2.029.285.675		2.092.412.161	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%)	100	100	100	1.874.410.658	100	1.858.068.717	100	1.942.408.279	100	2.029.285.675	100	2.092.412.161	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaann ya (%)	65	67	69		71		73		75		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					104.631.420		262.663.080		274.585.615		286.866.907		295.790.687	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase)	100	100	100	104.631.420	100	262.663.080	100	274.585.615	100	286.866.907	100	295.790.687	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					45.792.782.183		47.605.159.558		49.085.551.797		50.603.423.917		51.915.835.490	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					34.981.693.305		36.579.491.456		37.559.417.799		38.561.764.672		39.499.587.468	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	34.981.693.305	100	36.579.491.456	100	37.559.417.799	100	38.561.764.672	100	39.499.587.468	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					144.999.694		128.853.586		134.702.377		140.727.162		145.104.866	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja (Persentase)	94	96	96	144.999.694	96	128.853.586	96	134.702.377	96	140.727.162	96	145.104.866	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase kabupaten/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	41,67	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.657.786.509		1.749.435.231		1.828.843.813		1.910.641.852		1.970.077.598	
Meningkatnya Produktivitas tenagakerja	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja yang Kompeten (%)	20	24	28	1.657.786.509	35	1.749.435.231	40	1.828.843.813	45	1.910.641.852	50	1.970.077.598	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	160,15	161,3 2	208,30		220,22		220,22		246,20		260,29		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					1.642.808.582		1.707.552.385		1.785.059.864		1.864.899.594		1.922.912.401	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	40	45	40	1.642.808.582	45	1.707.552.385	50	1.785.059.864	55	1.864.899.594	60	1.922.912.401	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					6.323.174.808		6.374.306.858		6.663.642.902		6.961.685.259		7.178.247.538	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan	3,45	12	4	6.323.174.808	5,5	6.374.306.858	6	6.663.642.902	6,5	6.961.685.259	7,5	7.178.247.538	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dialog sosial (Orang)													
2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJ AAN					1.042.319.285		1.065.520.042		1.113.885.042		1.163.705.378		1.199.905.619	
Terlindunginya hak-hak pekerja	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya (Orang)	30	40	40	1.042.319.285	42	1.065.520.042	44	1.113.885.042	45	1.163.705.378	45	1.199.905.619	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					22.006.786.225		23.198.976.856		23.808.588.655		24.432.047.977		25.018.367.533	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					20.417.541.606		21.566.818.090		22.112.790.881		22.670.696.254		23.209.383.278	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	20.417.541.606	100	21.566.818.090	100	22.112.790.881	100	22.670.696.254	100	23.209.383.278	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					302.225.610		312.222.152		326.394.222		340.992.739		351.600.251	
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	9,85	10	12	302.225.610	14	312.222.152	16	326.394.222	18	340.992.739	20	351.600.251	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	47,05	48,18	49,31		50,43		51,56		52,69		53,82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					481.401.075		512.445.975		535.706.401		559.666.749		577.076.715	
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	481.401.075	100	512.445.975	100	535.706.401	100	559.666.749	100	577.076.715	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					80.369.354		84.250.422		88.074.631		92.013.914		94.876.258	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (Lembaga)	1	3	5	80.369.354	7	84.250.422	9	88.074.631	12	92.013.914	15	94.876.258	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					34.057.594		34.691.350		36.266.025		37.888.082		39.066.695	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan (Persentase)	40	44	48	34.057.594	52	34.691.350	56	36.266.025	60	37.888.082	64	39.066.695	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM					270.189.986		269.230.987		281.451.646		294.040.032		303.186.953	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)														
Terjaminnya pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komperhensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	NA	62,06	63,29	270.189.986	64,52	269.230.987	65,57	281.451.646	66,98	294.040.032	68,21	303.186.953	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					421.001.000		419.317.880		427.904.849		436.750.207		443.177.383	
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksplotasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah lainnya Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	81,36	82,63	83,90	421.001.000	85,17	419.317.880	86,44	427.904.849	87,71	436.750.207	88,98	443.177.383	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					2.755.373.475		2.917.661.543		3.050.097.065		3.186.517.658		3.285.643.013	
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					2.261.071.572		2.290.471.617		2.394.438.372		2.501.533.555		2.579.350.604	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	88,14	91,1	93,15	2.261.071.572	94,8	2.290.471.617	96,6	2.394.438.372	98,75	2.501.533.555	100	2.579.350.604	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					64.439.760		80.865.537		84.536.103		88.317.119		91.064.465	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	5,23	4,65	4,07	64.439.760	3,49	80.865.537	2,91	84.536.103	2,33	88.317.119	1,74	91.064.465	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					429.862.143		546.324.389		571.122.590		596.666.984		615.227.944	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	93,0	93,3	93,7	429.862.143	94,0	546.324.389	94,6	571.122.590	95,0	596.666.984	96,0	615.227.944	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					835.314.500		925.662.875		967.679.621		1.010.960.679		1.042.409.378	
2.10.03 - PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					199.999.600		198.236.079		207.234.209		216.503.099		223.238.020	
Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu (Persentase)	100	100	100	199.999.600	100	198.236.079	100	207.234.209	100	216.503.099	100	223.238.020	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					-		198.236.079		207.234.209		216.503.099		223.238.020	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikann ya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	100	100	100	-	100	198.236.079	100	207.234.209	100	216.503.099	100	223.238.020	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN					635.314.900		529.190.717		553.211.203		577.954.481		595.933.338	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE														
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase)	100	100	100	635.314.900	100	529.190.717	100	553.211.203	100	577.954.481	100	595.933.338	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					126.612.600.354		132.971.030.454		136.332.107.967		139.766.548.294		143.085.540.770	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					121.739.417.204		130.044.424.466		133.272.660.462		136.570.261.979		139.789.825.220	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	121.739.417.204	100	130.044.424.466	100	133.272.660.462	100	136.570.261.979	100	139.789.825.220	Dinas /Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					98.265.000		148.677.215		155.425.820		162.377.495		167.428.691	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	98.265.000	100	148.677.215	100	155.425.820	100	162.377.495	100	167.428.691	Dinas /Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN					2.877.580.109		1.573.643.330		1.645.072.545		1.718.651.113		1.772.114.461	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
LINGKUNGAN HIDUP														
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	52,69	63,21	63,41	2.877.580.109	63,61	1.573.643.330	63,81	1.645.072.545	64,01	1.718.651.113	64,21	1.772.114.461	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	89,66	77,43	77,73		78,03		78,33		78,63		78,93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Air Laut (Indeks)	77,47	74,50	74,55		74,60		74,65		74,70		74,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA MAN HAYATI (KEHATI)					136.732.000		148.677.215		155.425.820		162.377.495		167.428.691	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Pembangunan Tanaman Kehati Provinsi (%)	10	10	10	136.732.000	10	148.677.215	10	155.425.820	10	162.377.495	10	167.428.691	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					48.390.000		49.559.072		51.808.607		54.125.832		55.809.564	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100	100	100	48.390.000	100	49.559.072	100	51.808.607	100	54.125.832	100	55.809.564	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					84.435.000		99.118.143		103.617.213		108.251.663		111.619.127	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	51,52	51,62	51,72	84.435.000	51,82	99.118.143	51,92	103.617.213	52,02	108.251.663	52,12	111.619.127	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					63.207.035		74.338.608		77.712.910		81.188.747		83.714.346	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	100	100	63.207.035	100	74.338.608	100	77.712.910	100	81.188.747	100	83.714.346	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					1.002.283.305		188.324.473		196.872.705		205.678.160		212.076.342	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Acara Penyuluhan/ Peringatan Hari LH/ Pameran LH (Persentase)	100	100	100	1.002.283.305	100	188.324.473	100	196.872.705	100	205.678.160	100	212.076.342	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					348.895.701		346.913.502		362.660.246		378.880.821		390.666.946	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	348.895.701	100	346.913.502	100	362.660.246	100	378.880.821	100	390.666.946	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					78.465.000		198.236.287		207.234.426		216.503.326		223.238.255	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Persentase)	100	100	100	78.465.000	100	198.236.287	100	207.234.426	100	216.503.326	100	223.238.255	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					134.930.000		99.118.143		103.617.213		108.251.663		111.619.127	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	26	30	34	134.930.000	38	99.118.143	42	103.617.213	46	108.251.663	50	111.619.127	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					450.932.312		534.067.643		558.309.498		583.280.806		601.425.352	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					258.927.258		294.125.663		307.476.315		321.228.698		331.221.396	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	25	27,5	30	258.927.258	32,5	294.125.663	35	307.476.315	37,5	321.228.698	40	331.221.396	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	47,7	50	53		55		57,5		60		62,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					59.381.524		74.338.608		77.712.910		81.188.747		83.714.346	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	59.381.524	100	74.338.608	100	77.712.910	100	81.188.747	100	83.714.346	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKA N					93.919.280		125.384.451		131.075.775		136.938.354		141.198.196	
Meningkatnya pemanfaatan pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	100	100	100	93.919.280	100	125.384.451	100	131.075.775	100	136.938.354	100	141.198.196	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKA N					38.704.250		40.218.921		42.044.498		43.925.007		45.291.414	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka (Persentase)	100	100	100	38.704.250	100	40.218.921	100	42.044.498	100	43.925.007	100	45.291.414	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					23.730.236.773		24.779.554.322		25.492.392.285		26.222.402.361		26.879.666.713	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					20.642.471.822		21.571.882.315		22.139.120.898		22.719.150.411		23.267.436.521	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	20.642.471.822	100	21.571.882.315	100	22.139.120.898	100	22.719.150.411	100	23.267.436.521	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					26.245.280		49.559.072		51.808.607		54.125.832		55.809.564	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	100	100	100	26.245.280	100	49.559.072	100	51.808.607	100	54.125.832	100	55.809.564	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					39.999.940		39.647.257		41.446.885		43.300.665		44.647.651	
Meningkatnya efektivitas kerjasama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	100	100	100	39.999.940	100	39.647.257	100	41.446.885	100	43.300.665	100	44.647.651	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					1.853.458.061		1.932.803.797		2.020.535.658		2.110.907.429		2.176.572.983	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100	100	1.853.458.061	100	1.932.803.797	100	2.020.535.658	100	2.110.907.429	100	2.176.572.983	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT AN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.168.061.670		1.185.661.881		1.239.480.237		1.294.918.024		1.335.199.994	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	100	100	100	1.168.061.670	100	1.185.661.881	100	1.239.480.237	100	1.294.918.024	100	1.335.199.994	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Desa dengan Kemandirian Ekonomi (%)	21,9	15	22		24		28		30		35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					455.343.685		481.304.073		503.150.937		525.655.188		542.007.132	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					70.475.530		85.052.697		88.913.322		92.890.117		95.779.718	
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	66,76	68,76	70,76	70.475.530	72,76	85.052.697	74,76	88.913.322	76,76	92.890.117	78,76	95.779.718	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					27.464.210		34.691.350		36.266.025		37.888.082		39.066.695	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	86,03	86,60	87,10	27.464.210	87,60	34.691.350	88,20	36.266.025	88,70	37.888.082	89,20	39.066.695	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					357.403.945		361.560.026		377.971.590		394.876.989		407.160.719	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	31,61	32,36	33,13	357.403.945	33,84	361.560.026	34,52	377.971.590	35,18	394.876.989	35,80	407.160.719	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	60,12	61,63	62,11		62,59		63,07		63,55		64,03		Dinas /Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					46.813.552.173		48.252.980.204		49.878.311.479		51.546.683.698		52.932.879.789	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					31.245.596.538		34.054.300.211		35.035.139.467		36.039.626.475		36.943.433.098	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	31.245.596.538	100	34.054.300.211	100	35.035.139.467	100	36.039.626.475	100	36.943.433.098	Dinas /Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					10.503.578.700		9.104.007.421		9.517.247.252		9.942.921.744		10.252.223.545	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio Konektivitas Transportasi Darat (Rasio)	0,21	0,23	0,32	10.503.578.700	0,41	9.104.007.421	0,49	9.517.247.252	0,58	9.942.921.744	0,68	10.252.223.545	Dinas /Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					4.967.720.935		4.995.554.429		5.222.307.547		5.455.883.816		5.625.604.019	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi laut	Rasio Konektivitas Transportasi Laut (Rasio)	0,62	0,62	0,69	4.967.720.935	0,73	4.995.554.429	0,79	5.222.307.547	0,86	5.455.883.816	0,88	5.625.604.019	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					96.656.000		99.118.143		103.617.213		108.251.663		111.619.127	
Tersedianya Dokumen Perencanaan Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Perencanaan	NA	NA	1	96.656.000	1	99.118.143	1	103.617.213	1	108.251.663	1	111.619.127	Dinas /Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perkeretaapian (Dokumen)													Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					39.804.597.755		41.356.997.296		42.679.856.570		44.036.764.692		45.193.399.883	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					27.387.177.483		27.764.926.288		28.470.828.120		29.192.214.142		29.887.068.949	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	27.387.177.483	100	27.764.926.288	100	28.470.828.120	100	29.192.214.142	100	29.887.068.949	Dinas /Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					6.909.425.272		7.486.393.373		7.826.208.115		8.176.248.108		8.430.592.689	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Nilai)	89,57	90,00	91,00	6.909.425.272	92,00	7.486.393.373	93,00	7.826.208.115	94,00	8.176.248.108	95,00	8.430.592.689	Dinas /Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					5.507.995.000		6.105.677.635		6.382.820.335		6.668.302.442		6.875.738.245	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Pemenuhan Indikator SPBE (Persentase)	100	100	100	5.507.995.000	100	6.105.677.635	100	6.382.820.335	100	6.668.302.442	100	6.875.738.245	Dinas /Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					1.144.569.296		1.330.957.187		1.391.370.640		1.453.601.974		1.498.820.242	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					72.800.000		78.482.877		82.045.292		85.714.902		88.381.299	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	7,89	8,28	8,69	72.800.000	9,13	78.482.877	9,59	82.045.292	10,06	85.714.902	10,56	88.381.299	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					55.460.000		82.323.803		86.060.561		89.909.761		92.706.650	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	28,00	35,00	42,00	55.460.000	49,00	82.323.803	56,00	86.060.561	63,00	89.909.761	70,00	92.706.650	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					29.440.000		36.042.052		37.678.036		39.363.248		40.587.750	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	15	20	40	29.440.000	60	36.042.052	80	37.678.036	90	39.363.248	100	40.587.750	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIA N					216.250.240		248.184.295		259.449.624		271.053.934		279.485.808	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Peningkatan SDM Koperasi (%)	26,00	34,00	44,00	216.250.240	54,00	248.184.295	64,00	259.449.624	74,00	271.053.934	84,00	279.485.808	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN					226.418.000		244.762.667		255.872.684		267.317.010		275.632.637	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PERLINDUNGAN KOPERASI														
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	27,00	30,00	33,00	226.418.000	36,00	244.762.667	39,00	255.872.684	42,00	267.317.010	45,00	275.632.637	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					313.035.056		392.894.496		410.728.363		429.098.862		442.447.157	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	7,01	7,08	7,17	313.035.056	7,25	392.894.496	7,33	410.728.363	7,50	429.098.862	7,58	442.447.157	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					231.166.000		248.266.997		259.536.080		271.144.257		279.578.941	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	100	100	100	231.166.000	100	248.266.997	100	259.536.080	100	271.144.257	100	279.578.941	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					24.383.640.205		25.692.876.660		26.392.415.375		27.108.157.410		27.771.912.927	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					21.736.538.205		23.180.231.724		23.765.719.019		24.363.977.752		24.942.368.050	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	21.736.538.205	100	23.180.231.724	100	23.765.719.019	100	24.363.977.752	100	24.942.368.050	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGA N IKLIM PENANAMAN MODAL					463.389.000		396.472.574		414.468.853		433.006.652		446.476.509	
Meningkatnya kemudahan dan kenyamanan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100	100	100	463.389.000	100	396.472.574	100	414.468.853	100	433.006.652	100	446.476.509	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					402.315.000		396.472.574		414.468.853		433.006.652		446.476.509	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	NA	10	12	402.315.000	15	396.472.574	18	414.468.853	20	433.006.652	23	446.476.509	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					1.136.343.000		1.075.431.856		1.124.246.764		1.174.530.544		1.211.067.532	
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	1.136.343.000	100	1.075.431.856	100	1.124.246.764	100	1.174.530.544	100	1.211.067.532	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					545.975.000		545.149.789		569.894.673		595.384.147		613.905.200	
Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	85	85	88	545.975.000	91	545.149.789	94	569.894.673	97	595.384.147	100	613.905.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN					99.080.000		99.118.143		103.617.213		108.251.663		111.619.127	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	99.080.000	100	99.118.143	100	103.617.213	100	108.251.663	100	111.619.127	Dinas /Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					63.867.927.031		65.071.805.667		66.933.846.850		68.846.662.657		70.392.362.212	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					29.031.396.337		29.558.999.932		30.394.623.671		31.250.136.453		32.027.582.951	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	29.031.396.337	100	29.558.999.932	100	30.394.623.671	100	31.250.136.453	100	32.027.582.951	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					3.208.296.076		2.729.550.557		2.853.447.536		2.981.072.656		3.073.807.082	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Berdaya Saing (%)	NA	0,027	0,022	3.208.296.076	0,016	2.729.550.557	0,016	2.853.447.536	0,018	2.981.072.656	0,019	3.073.807.082	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGA N DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					31.278.245.100		31.935.900.748		32.824.924.003		33.740.698.559		34.406.114.797	
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	3,28	3,28	2,7	31.278.245.100	2,7	31.935.900.748	2,6	32.824.924.003	2,5	33.740.698.559	2,5	34.406.114.797	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS KEPRAMUKAAN					349.989.518		847.354.430		860.851.640		874.754.989		884.857.382	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	3,45	3,45	3,45	349.989.518	3,45	847.354.430	3,45	860.851.640	3,45	874.754.989	3,45	884.857.382	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					499.914.000		495.590.717		518.086.066		541.258.315		558.095.637	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL					499.914.000		495.590.717		518.086.066		541.258.315		558.095.637	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,73	2,90	3,07	499.914.000	3,24	495.590.717	3,40	518.086.066	3,55	541.258.315	3,70	558.095.637	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					1.093.615.000		991.181.434		1.036.172.132		1.082.516.630		1.116.191.274	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					1.093.615.000		991.181.434		1.036.172.132		1.082.516.630		1.116.191.274	
Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (%)	79,69	63,00	68,00	1.093.615.000	72,00	991.181.434	75,00	1.036.172.132	78,00	1.082.516.630	81,00	1.116.191.274	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					28.564.265.579		29.673.691.139		30.518.426.140		31.384.307.620		32.140.135.305	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					21.138.277.037		21.825.720.677		22.405.010.560		22.997.459.501		23.554.606.791	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	21.138.277.037	100	21.825.720.677	100	22.405.010.560	100	22.997.459.501	100	23.554.606.791	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					3.542.453.982		4.676.189.873		4.797.664.757		4.922.794.902		5.013.716.439	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	NA	NA	100	3.542.453.982	100	4.676.189.873	100	4.797.664.757	100	4.922.794.902	100	5.013.716.439	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi (Persentase)	NA	NA	52		54		56		57		60		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan (Persentase)	NA	NA	9		11		13		15		17		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGA N KESENIAN TRADISIONAL					1.150.000.000		743.386.076		777.129.099		811.887.473		837.143.455	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangan (%)	NA	NA	2,21	1.150.000.000	2,24	743.386.076	2,26	777.129.099	2,28	811.887.473	2,3	837.143.455	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					90.724.560		148.677.215		155.425.820		162.377.495		167.428.691	
Meningkatnya akses masyarakat	Jumlah Sejarah yang dibina (Objek)	NA	50	50	90.724.560	50	148.677.215	50	155.425.820	50	162.377.495	50	167.428.691	Dinas /Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
terhadap informasi sejarah														Bidang Kebudayaan
	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	NA	NA	20		40		60		80		100		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					1.082.810.000		792.945.147		828.937.706		866.013.304		892.953.019	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	NA	NA	3,25	1.082.810.000	3,41	792.945.147	3,57	828.937.706	3,74	866.013.304	3,90	892.953.019	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	NA	NA	2,25		2,39		2,53		2,67		2,81		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan terhadap Total Pencatatan (%)	NA	NA	5,25		5,52		5,79		6,05		6,32		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang telah diterapkan terhadap total pendaftaran (%)	NA	NA	3,23		3,43		3,63		3,83		4,02		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					1.560.000.000		1.486.772.151		1.554.258.198		1.623.774.945		1.674.286.910	
Meningkatnya Tata kelola Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	NA	NA	100	1.560.000.000	100	1.486.772.151	100	1.554.258.198	100	1.623.774.945	100	1.674.286.910	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					28.599.499.907		29.850.325.808		30.670.489.522		31.509.779.215		32.284.269.032	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					27.814.575.362		28.978.305.715		29.758.887.582		30.557.404.383		31.302.267.974	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	27.814.575.362	100	28.978.305.715	100	29.758.887.582	100	30.557.404.383	100	31.302.267.974	Dinas /Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					735.077.818		812.549.207		849.431.612		887.423.834		915.029.582	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	70,26	68,00	70,00	735.077.818	71,00	812.549.207	72,00	849.431.612	73,00	887.423.834	74,00	915.029.582	Dinas /Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					49.846.727		59.470.886		62.170.328		64.950.998		66.971.476	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	NA	100	100	49.846.727	100	59.470.886	100	62.170.328	100	64.950.998	100	66.971.476	Dinas /Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					422.068.880		676.316.473		707.015.141		738.637.553		761.614.896	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					422.068.880		676.316.473		707.015.141		738.637.553		761.614.896	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	78,95	79,05	79,15	422.068.880	79,25	676.316.473	79,35	707.015.141	79,45	738.637.553	80,05	761.614.896	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kearsipan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					39.754.194.685		41.505.062.304		42.749.959.310		44.025.679.845		45.149.395.577	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					32.373.069.494		35.232.270.084		36.192.438.896		37.174.863.576		38.085.465.913	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	32.373.069.494	100	35.232.270.084	100	36.192.438.896	100	37.174.863.576	100	38.085.465.913	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					1.024.201.427		246.556.382		257.747.818		269.276.012		277.652.579	
Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Persentase Laut, Pesisir dan pulau kecil yang meningkat efektivitas pengelolaannya (%)	11,66	11,7	11,7	1.024.201.427	14,7	246.556.382	14,7	257.747.818	15,8	269.276.012	15,8	277.652.579	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					2.602.433.357		1.972.451.054		2.061.982.543		2.154.208.094		2.221.220.634	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan potensi sumber daya ikan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	125.775,57	127.800	128.100	2.602.433.357	128.400	1.972.451.054	128.700	2.061.982.543	129.000	2.154.208.094	129.200	2.221.220.634	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					2.473.570.675		2.738.935.300		2.863.258.261		2.991.322.183		3.084.375.448	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	127.470,63	128.115,02	128.755,6	2.473.570.675	129.399,38	2.738.935.300	130.046,37	2.863.258.261	130.696,6	2.991.322.183	131.350,09	3.084.375.448	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					782.467.820		787.818.579		823.578.437		860.414.333		887.179.877	
Meningkatnya produksi kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)	59,05	69,50	70	782.467.820	70,1	787.818.579	70,2	823.578.437	70,5	860.414.333	70,7	887.179.877	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					498.451.912		527.030.905		550.953.355		575.595.647		593.501.126	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan (Ton)	15.514,08	16.802,33	17.306,21	498.451.912	17.825,40	527.030.905	18.360,16	550.953.355	18.910,97	575.595.647	19.478,29	593.501.126	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					35.470.507.303		36.940.496.332		38.071.418.627		39.230.702.863		40.241.114.439	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					29.507.936.546		30.392.062.986		30.847.965.406		31.274.249.188		31.626.232.394	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	29.507.936.546	100	30.392.062.986	100	30.847.965.406	100	31.274.249.188	100	31.626.232.394	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN					1.119.858.277		981.359.745		1.150.000.000		1.320.000.000		1.418.738.699	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														
Meningkatnya daya saing destinasi pariwisata	Presentase Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi (%)	0	0	22	1.119.858.277	22	981.359.745	44	1.150.000.000	67	1.320.000.000	89	1.418.738.699	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					2.497.528.880		3.156.191.677		3.476.758.824		3.753.414.268		4.050.196.039	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	0	0	10	2.497.528.880	15	3.156.191.677	20	3.476.758.824	25	3.753.414.268	30	4.050.196.039	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGA N EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					430.000.000		826.208.017		895.554.017		965.482.151		1.040.962.248	
Meningkatnya Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Fasilitasi Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam Proses HAKI (%)	0	0	30	430.000.000	40	826.208.017	50	895.554.017	60	965.482.151	70	1.040.962.248	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1.915.183.600		1.584.673.907		1.701.140.380		1.917.557.256		2.104.985.059	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekraf yang memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)	0	0	7,40	1.915.183.600	6,06	1.584.673.907	15,21	1.701.140.380	19,86	1.917.557.256	25,02	2.104.985.059	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					188.045.057.227		193.931.635.345		200.367.267.080		206.971.970.134		212.499.852.919	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					121.616.960.999		131.161.141.405		134.747.558.818		138.417.312.801		141.812.615.294	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	60.069.724.431	100	63.426.259.831	100	65.120.609.528	100	66.853.641.637	100	68.477.621.062	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	26.058.870.395	100	27.983.518.376	100	28.751.925.280	100	29.538.243.237	100	30.264.089.063	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	98,23	100	100	35.488.366.173	100	39.751.363.198	100	40.875.024.010	100	42.025.427.927	100	43.070.905.169	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N SARANA PERTANIAN					38.683.699.701		41.544.865.476		43.430.627.690		45.373.133.742		46.784.589.282	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	222.055	236.9 19	252.497	26.957.001.006	269.098	30.033.472.623	286.791	31.396.721.419	305.648	32.800.991.276	325.744	33.821.355.907	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Jumlah Produksi Hortikultura (Ton)	7.907	8.066	8.228		8.394		8.562		8.734		8.910		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan (Ton)	10.426.928	10.79 1.870	10.845.8 30	3.736.147.635	10.900.0 59	3.978.413.953	10.954.5 59	4.158.998.066	11.009.3 32	4.345.016.076	11.064.3 79	4.480.179.696	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya Populasi Komoditas Ternak	Jumlah Populasi Sapi (Ekor)	186.502	194.7 92	203.250	7.990.551.060	211.886	7.532.978.900	220.705	7.874.908.205	229.708	8.227.126.390	238.893	8.483.053.679	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N PRASARANA PERTANIAN					17.218.425.286		11.617.839.960		12.145.185.117		12.688.398.439		13.083.105.809	
Meningkatnya distribusi dan kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian LP2B yang dikelola (Hektar)	10.300	10.35 0	10.400	11.120.256.472	10.500	7.107.964.434	10.700	7.430.601.915	10.800	7.762.947.772	11.000	8.004.435.514	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya distribusi dan kualitas Prasarana Pertanian	Jumlah Produktivitas Komoditas Utama Perkebunan (Kg/Ha/Tahun)	12.789	13.24 9	13.316	3.517.806.104	13.382	2.626.630.801	13.449	2.745.856.151	13.516	2.868.669.070	13.584	2.957.906.875	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya Kawasan Pertanian Produktif dan Berkelanjutan	Persentase Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dimanfaatkan untuk sistem integrasi sapi sawit (%)	0,32	0,39	0,78	2.580.362.710	1,17	1.883.244.725	1,56	1.968.727.051	1,94	2.056.781.597	2,33	2.120.763.420	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					6.386.995.302		4.311.639.239		4.507.348.775		4.708.947.342		4.855.432.040	
Meningkatnya Luas Wilayah yang terkendali dari penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	83	84	85	5.449.111.126	86	3.135.184.239	87	3.243.354.525	88	3.416.344.117	89	3.560.789.901	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya Keamanan dan Mutu Produk Hewan	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	11,76	10	10	937.884.176	10	1.176.455.000	10	1.263.994.250	10	1.292.603.225	10	1.294.642.139	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN					1.266.733.399		1.861.240.407		1.945.723.936		2.032.749.630		2.095.983.872	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	100	100	1.151.554.159	100	1.737.342.728	100	1.816.202.419	100	1.897.435.051	100	1.956.459.963	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas /Badan yang menangani Bidang Pertanian		
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Luas Penanganan Lahan Perkebunan yang terdampak Bencana (Persentase)	0,5	0,54	0,6	115.179.240	0,65	123.897.679	0,7	129.521.517	0,75	135.314.579	0,8	139.523.909	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					150.000.000		148.677.215		155.425.820		162.377.495		167.428.691	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Usaha Perkebunan yang memiliki Izin (Persentase)	5	13	25	150.000.000	38	148.677.215	50	155.425.820	63	162.377.495	75	167.428.691	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					2.722.242.540		3.286.231.643		3.435.396.924		3.589.050.685		3.700.697.931	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	10,83	12,80	18,70	2.356.862.893	24,61	2.136.461.180	30,51	2.233.437.250	36,42	2.333.331.394	42,32	2.405.916.054	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi (Persentase)	68	68	72		76		84		92		100		Dinas /Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM yang ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	10,53	11	12	299.799.667	13	356.825.316	14	373.021.968	15	389.705.987	16	401.828.858	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani	Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi (Persentase)	4	0,94	0,94	65.579.980	0,95	792.945.147	0,96	828.937.706	1	866.013.304	1,2	892.953.019	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					5.856.490.699		7.065.459.228		7.386.167.355		7.716.525.804		7.956.569.464	
3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					3.608.841.047		4.525.329.220		4.730.738.354		4.942.328.386		5.096.073.040	
Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	51,25	74,00	74,07	3.608.841.047	74,14	4.525.329.220	74,21	4.730.738.354	74,28	4.942.328.386	74,35	5.096.073.040	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kehutanan
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					236.246.378		278.257.346		290.887.719		303.898.150		313.351.734	
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kawasan Hutan (Persentase)	1,5	1,6	1,6	236.246.378	1,6	278.257.346	1,6	290.887.719	1,6	303.898.150	1,6	313.351.734	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kehutanan
3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					1.793.301.274		2.028.945.025		2.121.040.831		2.215.907.860		2.284.839.741	
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	Presentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (Persentase)	1,2	1,3	1,3	1.793.301.274	1,3	2.028.945.025	1,3	2.121.040.831	1,3	2.215.907.860	1,3	2.284.839.741	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kehutanan
	Presentase Peningkatan Kelas Kelompok	1	1,3	1,3		1,3		1,3		1,3		Dinas /Badan yang menangani		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (Persentase)													Bidang Kehutanan
3.28.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					218.102.000		232.927.637		243.500.451		254.391.408		262.304.949	
Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Penurunan Luasan Lahan Kritis (Persentase)	1	1	1	218.102.000	1	232.927.637	1	243.500.451	1	254.391.408	1	262.304.949	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kehutanan
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					45.178.488.529		46.941.614.446		48.410.549.254		49.916.812.975		51.215.044.079	
3.29.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					32.506.327.951		33.566.086.541		34.427.893.013		35.308.759.500		36.152.567.108	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	32.506.327.951	100	33.566.086.541	100	34.427.893.013	100	35.308.759.500	100	36.152.567.108	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					261.441.190		259.136.113		270.898.555		283.014.937		291.818.892	
Meningkatnya tata kelola kegeologian	Persentase Pengelolaan Kegeologian (Persentase)	91,4	92	92,5	261.441.190	93	259.136.113	93,5	270.898.555	94	283.014.937	94,5	291.818.892	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					363.878.420		372.310.286		389.209.815		406.617.863		419.266.825	
Meningkatnya tata kelola mineral dan Batubara	Persentase Pelaku Usaha yang dibina (Persentase)	74,26	75	89	363.878.420	90	372.310.286	91	389.209.815	92	406.617.863	93	419.266.825	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Dava Mineral

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					5.055.362.368		3.317.288.433		3.467.863.410		3.622.969.289		3.735.671.667	
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Bauran Energi Terbarukan (%)	28,14	31,22	32,99	5.055.362.368	33,91	3.317.288.433	34,33	3.467.863.410	34,76	3.622.969.289	34,63	3.735.671.667	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTR IKAN					6.991.478.600		9.426.793.073		9.854.684.461		10.295.451.386		10.615.719.587	
Meningkatnya cakupan pelayananan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	95,19	95,26	96,60	6.991.478.600	100	9.426.793.073	100	9.854.684.461	100	10.295.451.386	100	10.615.719.587	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.808.636.845		1.820.192.587		1.902.812.915		1.987.919.342		2.049.759.016	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					47.766.449		47.701.885		49.867.121		52.097.509		53.718.145	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	20	25	30	47.766.449	35	47.701.885	40	49.867.121	45	52.097.509	50	53.718.145	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					47.359.680		48.570.706		50.775.378		53.046.390		54.696.544	
Meningkatnya Kualitas Sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	13,3	14,4	16,8	47.359.680	18,2	48.570.706	22,2	50.775.378	24,8	53.046.390	25,7	54.696.544	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan					559.222.113		574.775.764		600.865.400		627.740.090		647.267.664	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
POKOK DAN BARANG PENTING														
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	4	3	3	559.222.113	3	574.775.764	3	600.865.400	3	627.740.090	3	647.267.664	Dinas /Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGA N EKSPOR					102.044.000		101.281.067		105.878.314		110.613.895		114.054.843	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	18,115	18,29 6	18,479	102.044.000	18,664	101.281.067	18,850	105.878.314	19,039	110.613.895	19,229	114.054.843	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					946.965.053		941.225.108		983.948.239		1.027.956.938		1.059.934.353	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	20	30	40	946.965.053	50	941.225.108	60	983.948.239	70	1.027.956.938	80	1.059.934.353	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					105.279.550		106.638.057		111.478.463		116.464.520		120.087.467	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Presentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/dila ksanakan (%)	17	20	23	105.279.550	26	106.638.057	29	111.478.463	32	116.464.520	35	120.087.467	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					51.015.785.040		53.448.919.665		54.923.734.160		56.433.048.269		57.822.626.718	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					49.428.659.599		51.818.421.962		53.219.226.566		54.652.303.778		55.986.487.294	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH PROVINSI														
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	49.428.659.599	100	51.818.421.962	100	53.219.226.566	100	54.652.303.778	100	55.986.487.294	Dinas /Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.444.825.201		1.487.931.673		1.555.470.352		1.625.041.314		1.675.592.673	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	66,67	75,00	83,30	1.444.825.201	91,67	1.487.931.673	100,00	1.555.470.352	100,00	1.625.041.314	100,00	1.675.592.673	Dinas /Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					102.332.240		102.918.773		107.590.357		112.402.512		115.899.100	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	102.332.240	100	102.918.773	100	107.590.357	100	112.402.512	100	115.899.100	Dinas /Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					39.968.000		39.647.257		41.446.885		43.300.665		44.647.651	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (Dokumen)	1	1	1	39.968.000	1	39.647.257	1	41.446.885	1	43.300.665	1	44.647.651	Dinas /Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					186.447.000		198.236.287		207.234.426		216.503.326		223.238.255	
3.32.02 - PROGRAM Perencanaan					186.447.000		100.000.000		108.998.139		118.267.039		108.267.039	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KAWASAN TRANSMIGRASI														
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan trasnmigrasi	Jumlah Kawasan yang direncanakan (Kawasan)	2	3	2	186.447.000	1	100.000.000	1	108.998.139	1	118.267.039	1	108.267.039	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					-		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Jumlah Kawasan yang dikembangkan (Kawasan)	NA	NA	NA	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGA N KAWASAN TRANSMIGRASI					-		48.236.287		48.236.287		48.236.287		64.971.216	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	NA	NA	NA	-	1	48.236.287	1	48.236.287	1	48.236.287	1	64.971.216	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					245.828.628.154		386.275.006.794		400.824.581.169		415.786.590.461		427.410.456.013	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					155.903.616.681		211.476.752.936		218.632.667.938		225.978.537.737		232.068.396.189	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	155.903.616.681	100	211.476.752.936	100	218.632.667.938	100	225.978.537.737	100	232.068.396.189	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					714.959.740		2.335.442.492		2.441.450.519		2.550.648.398		2.629.993.299	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	40,91	42,00	43,00	714.959.740	44,00	2.335.442.492	45,00	2.441.450.519	46,00	2.550.648.398	47,00	2.629.993.299	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					2.519.029.150		4.491.047.559		4.694.900.615		4.904.887.745		5.057.467.706	
Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	NA	100	100	2.519.029.150	100	4.491.047.559	100	4.694.900.615	100	4.904.887.745	100	5.057.467.706	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Kinerja Penyelenggara n Pemerintahan (Persentase)	NA	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah		
4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAA N RAKYAT					81.559.520.967		157.247.954.518		163.844.988.581		170.640.531.779		175.578.280.666	
Meningkatnya perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	NA	100	100	81.559.520.967	100	157.247.954.518	100	163.844.988.581	100	170.640.531.779	100	175.578.280.666	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Keagamaan (%)	NA	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah		
4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					1.376.474.540		2.359.684.397		2.466.792.787		2.577.124.140		2.657.292.642	
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	NA	90,00	91,00	1.376.474.540	92,00	2.359.684.397	93,00	2.466.792.787	94,00	2.577.124.140	95,00	2.657.292.642	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.220.016.074		2.998.323.839		3.134.420.700		3.274.612.806		3.376.478.602	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	NA	100	100	1.220.016.074	100	2.998.323.839	100	3.134.420.700	100	3.274.612.806	100	3.376.478.602	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					1.128.681.982		2.150.863.712		2.248.493.527		2.349.061.088		2.422.135.064	
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Level)	NA	Level 3	Level 3	1.128.681.982	Level 3	2.150.863.712	Level 3	2.248.493.527	Level 3	2.349.061.088	Level 4	2.422.135.064	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					1.406.329.020		3.214.937.341		3.360.866.502		3.511.186.768		3.620.411.845	
Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	NA	100	100	1.406.329.020	100	3.214.937.341	100	3.360.866.502	100	3.511.186.768	100	3.620.411.845	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					258.786.940.876		267.227.264.823		276.068.245.894		285.154.068.819		292.384.204.371	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					191.739.776.615		200.478.078.703		206.289.248.712		212.254.091.548		217.216.473.734	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	191.739.776.615	100	200.478.078.703	100	206.289.248.712	100	212.254.091.548	100	217.216.473.734	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					67.047.164.261		66.749.186.120		69.778.997.182		72.899.977.271		75.167.730.637	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N (%)	100	100	100	29.623.297.613	100	29.325.319.472	100	32.355.130.534	100	33.780.885.623	100	36.048.638.989	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	684.375.000	100	684.375.000	100	684.375.000	100	684.375.000	100	684.375.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya Kualitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan Aspirasi Masyarakat (%)	100	100	100	36.739.491.648	100	36.739.491.648	100	36.739.491.648	100	38.434.716.648	100	38.434.716.648	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					45.184.078.854		47.358.874.344		48.721.151.428		50.116.243.763		51.372.365.694	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					41.987.052.355		43.006.923.202		44.171.660.953		45.363.269.865		46.471.537.531	
Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	41.987.052.355	100	43.006.923.202	100	44.171.660.953	100	45.363.269.865	100	46.471.537.531	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.190.535.817		1.530.115.461		1.599.568.903		1.671.112.246		1.723.096.767	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Program OPD di Dokumen Perencanaan Daerah (Persentase)	100	100	100	1.190.535.817	100	1.530.115.461	100	1.599.568.903	100	1.671.112.246	100	1.723.096.767	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					2.006.490.682		2.821.835.681		2.949.921.572		3.081.861.652		3.177.731.396	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah pada Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Infrastruktur dan kewilayahan, perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan (Persentase)	100	100	100	2.006.490.682	100	2.821.835.681	100	2.949.921.572	100	3.081.861.652	100	3.177.731.396	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					2.165.454.603.918		2.068.218.300.636		2.141.046.805.791		2.216.501.009.024		2.290.969.914.376	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					228.560.310.894		242.839.095.398		249.410.858.568		256.134.150.026		262.389.781.596	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	199.195.772.814	100	211.288.971.440	100	217.032.483.056	100	222.908.870.842	100	228.363.215.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	29.364.538.080	100	31.550.123.958	100	32.378.375.512	100	33.225.279.184	100	34.026.566.396	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					1.929.491.586.484		1.819.481.265.320		1.885.470.294.025		1.953.925.436.849		2.021.938.332.560	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Keuangan Daerah yang dikelola (Persentase)	100	100	100	165.539.000	100	362.772.405	100	379.239.000	100	396.201.087	100	408.526.006	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Persentase Keuangan Daerah yang dikelola (Persentase)	100%	100%	100%	1.929.326.047.484	100%	1.819.118.492.915	100%	1.885.091.055.025	100%	1.953.529.235.762	100%	2.021.529.806.554	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.253.191.200		1.267.785.754		1.325.331.793		1.384.609.431		1.427.681.498	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	100%	100%	100%	1.253.191.200	100%	1.267.785.754	100%	1.325.331.793	100%	1.384.609.431	100%	1.427.681.498	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					6.149.515.340		4.630.154.164		4.840.321.405		5.056.812.718		5.214.118.722	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Angka Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	5.432.109. 238.736,15	5.183. 950.4 61.06 7	4.726.71 9.728.64 7	6.149.515.340	4.855.29 2.527.04 8	4.630.154.164	5.082.82 1.921.26 5	4.840.321.405	5.316.44 6.249.33 0	5.056.812.718	5.506.58 1.512.37 7	5.214.118.722	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					29.286.795.932		30.874.473.680		31.785.926.778		32.719.718.058		33.549.080.224	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					25.636.955.142		25.659.187.093		26.333.913.215		27.023.854.246		27.676.030.975	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	25.636.955.142	100	25.659.187.093	100	26.333.913.215	100	27.023.854.246	100	27.676.030.975	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					3.649.840.790		5.215.286.587		5.452.013.563		5.695.863.812		5.873.049.249	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan (Persentase)	100	100	100	747.324.461	100	1.068.673.983	100	1.117.832.989	100	1.162.310.935	100	1.194.422.677	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengembangan kompetensi, tata kelola pengembangan karir ASN dan kualitas kinerja ASN	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan (Persentase)	100	100	100	2.902.516.329	100	4.146.612.604	100	4.334.180.574	100	4.533.552.877	100	4.678.626.572	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					31.704.663.888		33.185.926.278		34.154.046.364		35.145.708.707		36.031.977.045	
5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					28.881.755.472		29.343.763.722		30.137.484.279		30.949.499.296		31.705.233.052	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	28.881.755.472	100	29.343.763.722	100	30.137.484.279	100	30.949.499.296	100	31.705.233.052	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					2.822.908.416		3.842.162.556		4.016.562.085		4.196.209.411		4.326.743.993	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi, dasar, kader, manajerial, fungsional dan teknis	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan (Persentase)	100	100	100	1.882.259.166	100	2.943.134.219	100	3.012.912.835	100	3.095.560.161	100	3.192.134.253	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan (Persentase)	100	100	100	680.883.606	100	639.262.693	100	713.883.606	100	785.883.606	100	870.883.606	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan (Persentase)	100	100	100	259.765.644	100	259.765.644	100	289.765.644	100	314.765.644	100	263.726.134	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN					15.793.531.221		16.413.741.676		16.883.688.761		17.365.391.589		17.786.125.156	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGEMBANGA N														
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					13.319.469.817		13.877.410.453		14.277.621.956		14.687.490.812		15.056.028.682	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	13.319.469.817	100	13.877.410.453	100	14.277.621.956	100	14.687.490.812	100	15.056.028.682	Dinas /Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH					1.474.061.404		1.536.331.223		1.606.066.805		1.677.900.777		1.730.096.474	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan (Persentase)	100	100	100	1.474.061.404	100	1.536.331.223	100	1.606.066.805	100	1.677.900.777	100	1.730.096.474	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk inovasi daerah yang dimanfaatkan (%)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Dinas /Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN					86.848.100		662.109.198		692.162.984		723.121.109		745.615.771	
5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					86.848.100		662.109.198		692.162.984		723.121.109		745.615.771	
Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase Kawasan Perbatasan yang dikelola (%)	0	100	100	86.848.100	100	662.109.198	100	692.162.984	100	723.121.109	100	745.615.771	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Perbatasan
5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG					19.615.631.989		20.335.855.292		20.985.462.501		21.651.777.129		22.220.125.456	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					18.688.473.807		19.416.878.445		20.024.772.393		20.648.118.580		21.185.245.360	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	18.688.473.807	100	19.416.878.445	100	20.024.772.393	100	20.648.118.580	100	21.185.245.360	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Penghubung
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					927.158.182		918.976.847		960.690.108		1.003.658.549		1.034.880.096	
Meningkatnya Layanan Terhadap Stakeholder	Persentase Layanan Terhadap Stakeholder (Persentase)	100	100	100	927.158.182	100	918.976.847	100	960.690.108	100	1.003.658.549	100	1.034.880.096	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Penghubung
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					42.844.928.169		45.006.453.010		46.272.010.971		47.567.578.303		48.748.286.592	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					37.419.834.169		39.629.004.211		40.650.474.494		41.694.609.387		42.692.622.900	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	37.419.834.169	100	39.629.004.211	100	40.650.474.494	100	41.694.609.387	100	42.692.622.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN					4.229.392.000		4.192.291.176		4.382.583.386		4.578.601.616		4.721.031.554	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindakanlajut rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1 (%)	81,22	85,00	87,00	4.229.392.000	87,50	4.192.291.176	89,00	4.382.583.386	90,00	4.578.601.616	92,00	4.721.031.554	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.195.702.000		1.185.157.623		1.238.953.091		1.294.367.300		1.334.632.138	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	3,590	3,598	3,674	1.195.702.000	3,718	1.185.157.623	3,762	1.238.953.091	3,806	1.294.367.300	4,069	1.334.632.138	Dinas /Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Indeks)	3,394	3,395	3,450		3,500		3,600		3,650		3,750		Dinas /Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					20.236.477.641		21.000.630.839		21.632.780.879		22.280.977.122		22.840.190.204	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					15.452.596.976		15.957.272.370		16.395.042.593		16.843.010.000		17.256.733.651	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	15.452.596.976	100	15.957.272.370	100	16.395.042.593	100	16.843.010.000	100	17.256.733.651	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					2.499.731.795		2.561.858.064		2.673.604.217		2.788.712.887		2.872.352.662	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (%)	75,00	75,00	75,00	2.499.731.795	80,00	2.561.858.064	85,00	2.673.604.217	90,00	2.788.712.887	95,00	2.872.352.662	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					290.809.385		393.499.029		411.360.337		429.759.102		443.127.936	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	100	290.809.385	100	393.499.029	100	411.360.337	100	429.759.102	100	443.127.936	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik (Indeks)	3,31	3,31	3,34		3,37		3,40		3,43		3,46		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT AN					317.553.124		338.984.051		354.370.869		370.220.688		381.737.416	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	75,00	75,00	75,00	317.553.124	80,00	338.984.051	85,00	354.370.869	90,00	370.220.688	95,00	381.737.416	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGA N KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					415.282.286		482.156.920		491.559.976		501.245.976		508.283.976	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masvarakat	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi (Indeks)	3,13	3,13	3,20	415.282.286	3,23	482.156.920	3,26	491.559.976	3,29	501.245.976	3,32	508.283.976	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bangsa Dan Politik
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (Indeks)	2,94	3,25	3,25				3,28				3,31		
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.260.504.075		1.266.860.405		1.306.842.887		1.348.028.469		1.377.954.563	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	75,00	75,00	75,00	1.260.504.075	80,00	1.266.860.405	85,00	1.306.842.887	90,00	1.348.028.469	95,00	1.377.954.563	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					8.881.492.424.178		9.026.418.365.688		9.309.490.008.889		9.600.878.275.903		9.851.088.035.452	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Riau Tahun 2025–2029 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah, merupakan kontribusi dari satu atau beberapa indikator tujuan dan indikator sasaran perangkat daerah, sedangkan pencapaian Indikator Kinerja Daerah merupakan akumulasi dari pencapaian indikator *outcome* setiap tahun baik bersifat tunggal maupun komposit. Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KET.
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
1.	Tingkat Kemiskinan	%	4.62-5.63	4.11-5.13	3.65-4.67	3.25-4.25	2.89-3.87	
2.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	59,35	61,36	63,55	64,82	66,79	
3.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	76,19	77,27	78,35	79,43	80,51	
4.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	56,35	57,75	59,20	60,68	62,80	
5.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84,74	84,83	84,91	85	85,09	
6.	Indeks Harmoni	Indeks	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
7.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.18-4.60	4.49-5.00	4.81-5.43	5.16-5.90	5.53-6.11	
8.	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,58	0,58	0,59	0,60	0,61	
9.	PDRB Per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	179.62-191.10	195.33-208.92	212.41-228.40	230.99-249.70	251.19-272.98	
10.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89,29-89,4	89,4-89,54	89,48-89,65	89,59-89,78	89,70-89,92	
11.	Rasio Gini	Poin	0.296-0.299	0.290-0.293	0.285-0.288	0.279-0.283	0.274-0.278	
12.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,89	0,85	0,81	0,77	0,73	
13.	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40	
14.	Rasio Konektivitas Transportasi	Rasio	0,50	0,57	0,64	0,72	0,78	
15.	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	2,75	2,83	2,92	3,00	3,09	
16.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	32.92 -33.09	32.84-33.18	32.76 -33.28	32.68-33.37	32.6 -33.46	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KET.
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
17.	Persentase Penduduk Miskin Desa	%	6,1	5,89	5,67	5,45	5,24	
18.	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	%	71,61	73,41	75,31	77,21	80,01	
19.	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara	Juta Rupiah	5.535,32	7.178,86	8.112,11	9.247,80	10.634,97	
20.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,44	3,47	3,51	3,54	3,58	
21.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,58	74,87	75,16	75,44	75,73	
22.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	72,06	72,27	72,48	72,69	72,90	
23.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	73,46	75,04	76,64	78,28	79,95	
24.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	137,68	137,67	137,66	137,65	137,64	
25.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78,7	79,7	80,8	81,8	82,9	
26.	Rata - rata Lama Sekolah	Tahun	10.06-10.06	10.18-10.18	10.30-10.31	10.42-10.43	10.55-10.56	
27.	Indeks Harmoni Sosial	Indeks	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
28.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	60.77-60.86	61.24-61.36	61.71-61.86	62.19-62.36	62.67-62.87	
29.	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	Indeks	76,19	77,27	78,35	79,43	80,51	
30.	Persentase Kerjasama Pembangunan yang sudah dilaksanakan	%	70	70	70	70	70	
31.	Presentase Penduduk yang memiliki setidaknya satu jaminan sosial (Q1)	%	25,74	27,10	28,46	29,82	31,18	
32.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	175,67	182,65	189,91	197,45	205,3	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KET.
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
33.	Indeks Transformasi Digital Nasional	Indeks	52,55	53,60	54,65	55,70	56,75	
34.	Nilai Survey Indeks Berakhlak	poin	73,64	75,00	76,00	77,00	78,00	
35.	Indeks Harmoni Religius	Indeks	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
36.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	81,32	81,9	82,39	82,81	83,16	
37.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.63-13.64	13.70-13.71	13.77-13.79	13.84-13.86	13.91-13.93	
38.	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	%	50,57	54,07	57,56	61,06	88,82	
39.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.39-3.60	3.23-3.54	3.08-3.48	2.94-3.42	2.80-3.36	
40.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	poin	73,04	73,94	74,84	75,74	76,64	
41.	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terkelola dan Terukur	
42.	Nilai SAKIP	Nilai	75,30	76,08	77,86	77,96	78,27	
43.	Kategori Hasil Pengukuran Indeks Pengelola Keuangan Daerah	Kategori	A	A	A	A	A	

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi Riau

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	(%)	<i>indikator baru</i>	0,394	0,398	0,403	0,407	0,411	0,414	
2	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	1.310,26	1.375,8	1.444,59	1.516,83	1.592,67	1.672,29	1.755,51	
3	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	(%)	<i>indikator baru</i>	45	51	55	60	64	69,1	
4	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	(%)	10,93	10,73	10,53	10,00	9,46	8,92	8,38	
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	<i>indikator baru</i>	17	21	25	28	32	35,7	
6	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	%	<i>indikator baru</i>	25,21	26,89	28,57	30,25	31,94	33,62	
7	Intensitas energi primer provinsi	SBM/Milyar Rupiah	<i>indikator baru</i>	56	59,33	59,36	59,40	59,43	59,47	
8	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	11,22	11,18	14,84	18,51	20,90	23,30	25,63	
9	Kapasitas Air Baku	mÂ³/detik	<i>indikator baru</i>	0,24	0,79	1,34	1,88	2,43	2,87	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	(%)	<i>indikator baru</i>	11,74	11,86	11,97	12,09	12,20	12,29	
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	84,23	72.30-72.36	72.32-72.93	72.33-73.50	72.35-74.07	72.36-74.64	72.82-75.10	
3	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	(%)	<i>indikator baru</i>	67,86	68,42	68,99	69,56	70,13	70,71	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	0,104	0,476	0,526	0,916	1,295	1,670	1,656	
5	Proporsi Penciptaan lapangan kerja Formal	%	indikator baru	52	54,15	56,3	58,45	60,6	62,75	
6	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	44,83	46.66 -49.16	48.03-50.53	49.44-51.95	50.89-53.40	52.39-54.89	53.93-56.42	
7	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca	%	indikator baru	16.67-16.67	17.97-18.07	19.38-19.58	20.89-21.22	22.52-23	24.28-24.93	
8	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi membaca	%	36,91	38.12-40.62	39.24-41.76	40.39-42.92	41.58-44.12	41.92-44.42	43.15-45.66	
9	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi membaca	%	indikator baru	0.00-8.33	0-9.24	0-10.26	0.01-11.38	0.01-12.63	0.02-14.01	
10	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	(%)	74	74,2	74,5	75	75,5	76	77	
11	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	(%)	64,80 (2020)	64,80	66,14	67,47	68,81	70,14	70,81	
12	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	indikator baru	29	30,5	32	33,5	35	36	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
13	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	20,1	19	17	16	14	13	12	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	indikator baru	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	
2	Return on Asset (ROA) BUMD	%	indikator baru	4,10	4,18	4,26	4,34	4,42	4,5	
3	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Nilai	indikator baru	8,27	8,11	7,96	7,80	7,64	7,49	
4	Kontribusi PDRB Provinsi	(%)	5,05	5,0	4,97	4,95	4,92	4,90	4,88	
5	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,49	0,54	0,54	0,55	0,55	0,56	0,57	
6	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	26,49	39,1	39,51	39,92	40,34	40,76	41,19	
7	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	28,12	27,59	26,99	26,40	25,83	25,27	24,72	
8	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	29.166	30.041	30.916	31.791	32.666	33.541	34.416	
9	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	28,14	31,22	32,99	33,91	34,33	34,76	34,63	
10	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	indikator baru	1,04	1,11	1,19	1,27	1,25	1,45	
11	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	indikator baru	0.15-0.16	0.15-0.16	0.15-0.16	0.15-0.16	0.14-0.16	0.14-0.16	
12	Total Kredit/PDRB	%	indikator baru	9	9,80	10,68	11,63	12,67	13,80	
13	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	Indeks	6,07 (2023)	6,10	6,16	6,22	6,27	6,33	6,39	
14	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	11,66 (2023)	11,52	12,43	13,41	14,48	15,62	16,86	
15	Aset Perbankan Syariah/PDRB	Persentase	6,11	5,99	6,34	7,04	7,37	7,90	8,38	
16	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	indikator baru	0,52	0,71	0,90	1,09	1,28	1,48	
17	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	Rp	indikator baru	5.273.463,68	6.202.208,22	7.294.520,10	8.579.206,25	10.090.146,96	11.867.189,43	
18	Inklusi Keuangan	%	indikator baru	91,35	91,94	92,53	93,12	93,72	94,32	
19	Proporsi Jumlah Usaha Kecil Menengah	%	5,12	5,25	5,34	5,43	5,53	5,63	5,65	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
20	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	NA	16	18,64	21,28	23,92	26,56	29,58	
21	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	7,01	7,08	7,18	7,29	7,39	7,50	7,61	
22	Tingkat Inflasi	%	1,25	2.00-3.00	1.86-3.14	1.73-3.29	1.61-3.44	1.50-3.60	1.40-3.77	
23	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Integritas Nasional	Persentase	<i>indikator baru</i>	74,52	75,30	76,08	76,86	77,64	78,27	
2	Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah	%	<i>indikator baru</i>	70	71,5	73	74,5	76	77,5	
3	Indeks Ketahanan Nasional Wilayah Provinsi Riau	Indeks	<i>indikator baru</i>	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30	3,34	
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,75	3,75	-	-	-	-	-	
5	Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM	%	71,91	65	65,88	66,77	67,67	68,58	69,51	
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/ diperbarui	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau	%	90,00	90,10	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50	
3	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	%	78,49	79,13	79,77	80,41	81,06	81,70	82,34	
4	Indeks Pemerataan Guru	Poin	NA	NA	0,45 - 0,46	0,46 - 0,47	0,47 - 0,48	0,48 - 0,49	0,49 - 0,50	
5	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%	56,75	65,40	74,05	75,14	76,23	77,32	78,41	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	52,96	55,96	58,96	61,96	64,96	67,96	70,96	
7	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal Budaya Melayu Riau	%	66,05	66,55	67,05	67,55	68,05	68,55	69,05	
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Cakupan penemuan kasus Tuberkolosis (Treatment Coverage)	%	75,2	91	92	93	94	95	95	
2	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) aktif	Persentase	62,7	65	66,10	67,90	69,70	70,50	73,00	
3	Persentase sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, alkes dan makan minuman yang memenuhi standar	Persentase	80	81	81,50	82	83	84	85	
4	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	4,19	4,19	4,21	4,22	4,23	4,24	4,25	
5	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Kampanye Pembudayaan Hidup Sehat/Germas	%	16	33	41	50	58	66	75	
6	Persentase Depresi yang mendapatkan pelayanan	%	0,6	5	10	15	20	25	25	
7	Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai standar	%	82	82	83	84	85	86	87	
8	Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Kabupaten/ Kota	<i>indikator baru</i>	3	5	7	9	12	12	
9	Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	68	68	69	69	70	71	72	
10	Persentase Skrining Obesitas pada Populasi target	%	17,10	20	30	40	50	60	60	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
11	Persentase Kabupaten/Kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	indikator baru	8,3	8,3	16,7	16,7	25	25	
12	Persentase Kabupaten/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	%	indikator baru	25	41,67	58,33	75	100	100	
13	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	21	25	35	45	55	65	75	
14	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	74,3	75	80	81	82	83	83	
15	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan Pelayanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Kabupaten/ Kota	5	8	10	11	12	12	12	
16	Kabupaten/Kota dengan Eliminasi Kusta	Kabupaten/ Kota	indikator baru	-	-	1	1	2	2	
17	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	%	indikator baru	8,3	8,3	16,7	16,7	25	25	
18	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
19	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	
20	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	indikator baru	83	86	89	92	95	95	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
21	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	43,73	43,84	45,33	45,38	61,22	66,30	66,30	
AC 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	8,58	8,58	19,94	34,14	48,35	59,71	65,39	
2	Persentase peningkatan panjang pantai yang terlindungi dari abrasi	Persentase	1,38	1,41	1,45	1,49	1,54	1,60	1,67	
3	Persentase Peningkatan Kawasan Bebas Banjir	%	0,55	0,57	0,59	0,63	0,67	0,72	0,78	
4	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Luas Layanan Irigasi	Persentase	17,84	17,84	20,43	23,44	26,72	30,29	33,99	
6	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Aman	Persentase	86,32	86,74	87,16	87,58	88	88,42	88,84	
8	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	%	NA	-	-	-	-	20	40	
9	Jumlah Dukungan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dokumen	NA	-	1	1	1	-	-	
10	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase	37,25	45,21	49,32	51,78	54,25	56,71	59,18	
11	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	NA	-	100	100	100	100	100	
12	Persentase penyelesaian legalisasi RTRW Provinsi	Persentase	91,67	91,67	91,67	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	dan RTRW Kabupaten/ Kota									
13	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	68,35	69,81	71,61	73,41	75,31	77,21	80,01	
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Persentase	NA	0,64	3,88	3,62	3,62	3,62	3,62	
2	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persentase	88,18	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	100	100	100	100	100	100	100	
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana	%	87,5	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penanganan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	<i>indikator baru</i>	100	100	100	100	100	100	
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	84,62	85	86	87	88	89	90	
6	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi, panti rehabilitasi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia, Gelandang Pengemis, PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
9	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	40	45	50	55	60	65	70	
10	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	65	67	69	71	73	75	77	
11	Indeks Peranan Sosial	Nilai	70	71	72	73	74	75	76	
12	Persentase Penanganan Pemulangan Warga Negara Imigran, Orang Terlantar, Korban Tindak Kekerasan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Nilai	75	76	77	78	79	80	81	
15	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Nilai	75	76	77	78	79	80	81	
16	Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data Fakir Miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
18	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	%	80	81	82	83	84	85	86	
AG	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
1	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Orang	30	40	40	42	44	45	45	
2	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja yang Kompeten	%	20	24	28	35	40	45	50	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	3,45	12	4	5,5	6	6,5	7,5	
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	160,15	161,32	208,30	220,22	220,22	246,20	260,29	
5	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri		40	45	40	45	50	55	60	
6	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	41,67	100	100	100	100	100	100	
9	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	180,88	197,05	208,3	220,22	232,85	246,2	260,29	
10	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	20,78	25,00	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00	
11	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	%	89,58	73,83	79,13	83,43	90,15	91,35	92,00	
AH	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	9,85	10	12	14	16	18	20	
2	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	81,36	82,63	83,90	85,17	86,44	87,71	88,98	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	indikator baru	62,06	63,29	64,52	65,57	66,98	68,21	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	47,05	48,18	49,31	50,43	51,56	52,69	53,82	
5	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	Persentase	40	44	48	52	56	60	64	
AI	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	5,23	4,65	4,07	3,49	2,91	2,33	1,74	
2	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	93,0	93,3	93,7	94,0	94,6	95,0	96,0	
3	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	88,14	91,1	93,15	94,8	96,6	98,75	100	
AJ	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Terelesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee									
AK	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi	%	51,52	51,62	51,72	51,82	51,92	52,02	52,12	
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,66	77,43	77,73	78,03	78,33	78,63	78,93	
4	Indeks Kualitas Air	Indeks	52,69	63,21	63,41	63,61	63,81	64,01	64,21	
5	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	26	30	34	38	42	46	50	
6	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Acara Penyuluhan/Peringatan Hari LH/ Pameran LH	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Pembangunan Taman Kehati Provinsi	%	10	10	10	10	10	10	10	
11	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
12	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	77,47	74,50	74,55	74,60	74,65	74,70	74,75	
AL	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	
4	Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	47,7	50	53	55	57,5	60	62,5	
7	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AM	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Desa dengan Kemandirian Ekonomi	%	21,9	15	22	24	28	30	35	
AN	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	Persentase	31,61	32,36	33,13	33,84	34,52	35,18	35,80	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	86,03	86,60	87,10	87,60	88,20	88,70	89,20	
3	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	60,12	61,63	62,11	62,59	63,07	63,55	64,03	
4	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	66,76	68,76	70,76	72,76	74,76	76,76	78,76	
5	Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Lembaga	1	3	5	7	9	12	15	
AO	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
1	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	Rasio	0,21	0,23	0,32	0,41	0,49	0,58	0,68	
2	Rasio Konektivitas Transportasi Laut	Rasio	0,62	0,62	0,69	0,73	0,79	0,86	0,88	
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Perkeretaapian	Dokumen	<i>indikator baru</i>	-	1	1	1	1	1	
AP	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai	89,57	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	
2	Persentase Pemenuhan Indikator SPBE	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AQ	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	7,01	7,08	7,17	7,25	7,33	7,50	7,58	
2	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	15	20	40	60	80	90	100	
3	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	45,00	
4	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	7,89	8,28	8,69	9,13	9,59	10,06	10,56	
5	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	28,00	35,00	42,00	49,00	56,00	63,00	70,00	
6	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Peningkatan SDM Koperasi	%	26,00	34,00	44,00	54,00	64,00	74,00	84,00	
AR	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	85	85	88	91	94	97	100	
3	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	indikator baru	10	12	15	18	20	23	
AS	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	
2	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	%	3,28	3,28	2,7	2,7	2,6	2,5	2,5	
3	Persentase Pemuda yang Berdaya Saing	%	indikator baru	0,027	0,022	0,016	0,016	0,018	0,019	
AT	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,73	2,90	3,07	3,24	3,40	3,55	3,70	
AU	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
1	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	79,69	63,00	68,00	72,00	75,00	78,00	81,00	
AV	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
1	Jumlah Sejarah yang dibina	Objek	indikator baru	50	50	50	50	50	50	
2	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	indikator baru	NA	2,25	2,39	2,53	2,67	2,81	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	indikator baru	NA	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	indikator baru	NA	3,25	3,41	3,57	3,74	3,90	
5	Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi	Persentase	indikator baru	NA	52	54	56	57	60	
6	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persentase	indikator baru	NA	20	40	60	80	100	
7	Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan	Persentase	indikator baru	NA	9	11	13	15	17	
8	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan terhadap Total Pencatatan	%	indikator baru	NA	5,25	5,52	5,79	6,05	6,32	
9	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	indikator baru	NA	2,21	2,24	2,26	2,28	2,3	
10	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Persentase	indikator baru	NA	100	100	100	100	100	
11	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang telah diterapkan terhadap total pendaftaran	%	indikator baru	NA	3,23	3,43	3,63	3,83	4,02	
AW	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	70,26	68,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	
2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persentase	NA	100	100	100	100	100	100	
AX	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase	78,95	79,05	79,15	79,25	79,35	79,45	80,05	
AY	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	127.470,63	128.115,02	128.755,6	129.399,38	130.046,37	130.696,6	131.350,09	
2	Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan	Ton	15.514,08	16.802,33	17.306,21	17.825,40	18.360,16	18.910,97	19.478,29	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Persentase Laut, Pesisir dan pulau â€“ pulau kecil yang meningkat efektivitas pengelolaannya	%	11,66	11,7	11,7	14,7	14,7	15,8	15,8	
4	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	59,05	69,50	70	70,1	70,2	70,5	70,7	
5	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	125.775,57	127.800	128.100	128.400	128.700	129.000	129.200	
6	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	253.246,20	255.915,02	256.855,60	257.799,38	258.746,37	259.696,60	260.550,09	
AZ	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
1	Persentase Fasilitas Terhafap Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam Proses HAKI	%	indikator baru	indikator baru	30	40	50	60	70	
2	Persentase SDM Pariwisata dan Ekraf yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	%	indikator baru	indikator baru	7,40	6,06	15,21	19,86	25,02	
3	Presentase Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	%	indikator baru	indikator baru	22	22	44	67	89	
4	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	indikator baru	indikator baru	10	15	20	25	30	
BA	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Persentase SDM yang ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	10,53	11	12	13	14	15	16	
2	Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan	Ton	10.426.928	10.791.870	10.845.830	10.900.059	10.954.559	11.009.332	11.064.379	
3	Jumlah Produktivitas Komoditas Utama Perkebunan	Kg/Ha/Tahun	12.789	13.249	13.316	13.382	13.449	13.516	13.584	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Persentase Usaha Perkebunan yang memiliki Izin	Persentase	5	13	25	38	50	63	75	
5	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	222.055	236.919	252.497	269.098	286.791	305.648	325.744	
6	Jumlah Populasi Sapi	Ekor	186.502	194.792	203.250	211.886	220.705	229.708	238.893	
7	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase	10,83	12,80	18,70	24,61	30,51	36,42	42,32	
8	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
9	Cakupan Luas Lahan Pertanian LP2B yang dikelola	Hektar	10.300	10.350	10.400	10.500	10.700	10.800	11.000	
10	Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi	Persentase	4	0,94	0,94	0,95	0,96	1	1,2	
11	Persentase Luas Penanganan Lahan Perkebunan yang terdampak Bencana	Persentase	0,5	0,54	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	
12	Jumlah Produksi Hortikultura	Ton	7.907	8.066	8.228	8.394	8.562	8.734	8.910	
13	Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi	Persentase	68	68	72	76	84	92	100	
14	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	83	84	85	86	87	88	89	
16	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persentase	11,76	10	10	10	10	10	10	
17	Persentase Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dimanfaatkan untuk sistem integrasi sapi sawit	%	0,32	0,39	0,78	1,17	1,56	1,94	2,33	
BB	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Presentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)		1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
2	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	51,25	74,00	74,07	74,14	74,21	74,28	74,35	
3	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kawasan Hutan	Persentase	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
4	Persentase Penurunan Luasan Lahan Kritis	Persentase	1	1	1	1	1	1	1	
5	Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Persentase	1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
BC	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
1	Persentase Pengelolaan Kegeologian	Persentase	91,4	92	92,5	93	93,5	94	94,5	
2	Bauran Energi Terbarukan	(%)	28,14	31,22	32,99	33,91	34,33	34,76	34,63	
3	Rasio Elektrifikasi	%	95,19	95,26	96,60	100	100	100	100	
4	Persentase Pelaku Usaha yang dibina	Persentase	74,26	75	89	90	91	92	93	
5	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar	%	74,26	75	89	90	91	92	93	
BD	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
1	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	20	30	40	50	60	70	80	
2	Presentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	%	17	20	23	26	29	32	35	
3	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase	4	3	3	3	3	3	3	
4	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	20	25	30	35	40	45	50	
5	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	13,3	14,4	16,8	18,2	22,2	24,8	25,7	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6	Nilai Ekspor Barang	Nilai	18,115	18,296	18,479	18,664	18,850	19,039	19,229	
BE	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
3	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persentase	66,67	75,00	83,30	91,67	100,00	100,00	100,00	
BF	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
1	Jumlah Kawasan yang direncanakan	Kawasan	2	3	2	1	1	1	1	
2	Jumlah Kawasan yang dikembangkan	Kawasan	NA	NA	NA	1	1	1	1	
3	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Persentase	NA	NA	NA	1	1	1	1	
BG	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH									
1	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase	<i>indikator baru</i>	100	100	100	100	100	100	
2	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase	<i>indikator baru</i>	100	100	100	100	100	100	
3	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	<i>indikator baru</i>	100	100	100	100	100	100	
4	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Keagamaan	Persentase	<i>indikator baru</i>	100	100	100	100	100	100	
5	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	<i>indikator baru</i>	100	100	100	100	100	100	
6	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	40,91	42,00	43,00	44,00	45,00	46,00	47,00	
7	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persentase	<i>indikator baru</i>	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	
BH	4.02 - SEKRETARIAT DPRD									
1	Persentase Penyerapan Aspirasi Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	
BI	5.01 - PERENCANAAN									
1	Persentase Keselarasan Program OPD di Dokumen Perencanaan Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
BJ	5.02 - KEUANGAN									
1	Persentase Keuangan Daerah yang dikelola	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Keuangan Daerah yang dikelola	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Angka Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	5.432.109.238.73 6,15	5.183.950.461. 067	4.726.719.728. 647	4.855.292.527. 048	5.082.821.921. 265	5.316.446.249. 330	5.506.581.512. 377	
BK	5.03 - KEPEGAWAIAN									
1	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
BL	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
BM	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Persentase produk inovasi daerah yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
BN	5.05 - PENGELOLAAN PERBATASAN									
1	Persentase Kawasan Perbatasan yang dikelola	%	0	100	100	100	100	100	100	
BO	5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG									
1	IKM terhadap pelayanan Badan Penghubung	Nilai	85	85	85,5	86	86,5	87	87,5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung terhadap Stakeholder	Nilai	85	85	85,5	86	86,5	87	87,5	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	67,1	67,5	68	69	70	71	72	
4	Persentase Layanan Terhadap Stakeholder	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
BP	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks	3,394	3,395	3,450	3,500	3,600	3,650	3,750	
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,590	3,598	3,674	3,718	3,762	3,806	4,069	
3	Tindaklanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1	%	81,22	85,00	87,00	87,50	89,00	90,00	92,00	
BQ	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	%	75	75	75	80	85	90	95	
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	Indeks	3,31	3,31	3,34	3,37	3,4	3,43	3,46	
4	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	75	75	75	80	85	90	95	
5	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Indeks	3,13	3,13	3,2	3,23	3,26	3,29	3,32	
6	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Indeks	2,94	3,25	3,25	3,28	3,31	3,34	3,37	
7	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	75	75	75	80	85	90	95	

Tabel 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
2	Skor Literasi Jenjang SMA	Skor	73,3	73,9	74,5	75,1	75,7	76,3	76,9	
3	Skor Literasi Jenjang SMK	Skor	68,45	69,75	71,05	72,35	73,65	74,95	76,25	
4	Skor Literasi SDLB	Skor	72,09	73,69	75,29	76,89	78,49	80,09	81,69	
5	Skor Literasi Jenjang SMPLB	Skor	76,62	77,12	77,62	78,12	78,62	79,12	79,62	
6	Skor Literasi Jenjang SMALB	Skor	71,71	72,21	72,71	73,21	73,71	74,21	74,71	
7	Skor Numerasi Jenjang SMA	Skor	61,66	63,26	64,86	66,46	68,06	69,66	71,26	
8	Skor Numerasi Jenjang SMK	Skor	57,88	60,08	62,28	64,48	66,68	68,88	71,08	
9	Skor Numerasi Jenjang SDLB	Skor	66,49	67,09	67,69	68,29	68,89	69,49	70,09	
10	Skor Numerasi Jenjang SMPLB	Skor	73,61	73,86	74,11	74,36	74,61	74,86	75,11	
11	Skor Numerasi Jenjang SMALB	Skor	64,31	64,81	65,31	65,81	66,31	66,81	67,31	
12	Rata - rata Lama Sekolah	Tahun	9,43	9.94-9.94	10.06- 10.06	10.18- 10.18	10.30- 10.31	10.42- 10.43	10.55- 10.56	
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,42	13.56- 13.57	13.63- 13.64	13.70- 13.71	13.77- 13.79	13.84- 13.86	13.91- 13.93	
14	Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Indeks	69,96	72	72,96	75,96	78,96	81,96	84,96	
15	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	74,6	74,8	75	75,18	75,36	75,52	75,66	
16	APK SM Sederajat	Persentase	92,09	92,59	93,09	93,59	94,09	94,59	95,09	
17	APM SM Sederajat	Persentase	68,17	68,47	68,77	69,07	69,37	69,67	69,97	
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
19	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,41	74,3	74,58	74,87	75,16	75,44	75,73	
20	Prevalensi Stunting	%	20,1	19	17	16	14	13	12	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
21	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	97,86	95	90	87	85	83	80	
22	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup	Per 1.000 Kelahiran	7,48	7,2	7	6,8	6,6	6,4	6,2	
23	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	indikator baru	36	44,5	53	61,5	70	78,5	
24	Persentase Kabupaten/Kota memiliki kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	%	indikator baru	50	58,33	58,33	75	83,33	83,33	
25	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	98,57	98,6	98,7	98,8	98,9	99	99	
26	Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 Kelahiran Hidup	Per 1.000 Kelahiran	7,87	7,5	7,3	7,1	6,9	6,7	6,5	
27	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase	82,5	90	93	94	95	95	100	
28	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	90,5	90,6	90,7	90,8	90,9	91	91,2	
29	Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	%	2,9	10	20	35	50	60	65	
30	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	80,06	80	81	81,5	82	83,5	84	
31	Tingkat kepuasan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan	%	86,86	87,26	87,66	88,06	88,46	88,86	89,26	
32	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) terhadap pelayanan kesehatan Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan	Poin	83,5	83,5	84	84,5	85	85,5	86	
33	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	73,8	75	75,5	76	76,5	77	77,5	
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
35	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai	-	75,11	76,19	77,27	78,35	79,43	80,51	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
36	Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	8,58	8,58	19,94	34,14	48,35	59,71	65,39	
37	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	Persentase	1,38	1,41	1,45	1,49	1,54	1,6	1,67	
38	Persentase penyelenggaraan bangunan dan kawasan strategis Provinsi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
39	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persentase	88,18	100	100	100	100	100	100	
40	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	%	0,55	0,57	0,59	0,63	0,67	0,72	0,78	
41	Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani	Persentase	41,25	0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
42	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	100	100	100	100	100	100	100	
43	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase	17	17,84	20,43	23,44	26,72	30,29	33,99	
44	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	71,8	72,5	73,2	73,9	74,6	75,3	76	
45	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Persentase	86,32	86,74	87,16	87,58	88	88,42	88,84	
46	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	%	0	0	0	0	0	20	40	
47	Rasio pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi	Persentase	37,25	45,21	49,32	51,78	54,25	56,71	59,18	
48	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	0	0	100	100	100	100	100	
49	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah Provinsi Riau	Persentase	91,67	91,67	91,67	100	100	100	100	
50	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase	68,35	69,81	71,61	73,41	75,31	77,21	80,01	
51	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN									
52	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
53	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	69	70,5	71,6	72,7	73,8	74,5	75	
54	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	
55	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN									
56	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,57	0,57	0,58	0,59	0,6	0,61	0,62	
57	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	<i>indikator baru</i>	100	100	100	100	100	100	
58	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	%	87,5	100	100	100	100	100	100	
59	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	66,75	66,78	66,8	66,82	66,85	66,87	66,9	
60	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
61	Indeks Kesejahteraan Sosial	poin	56,9	56,95	56,99	57,05	57,15	57,2	57,25	
62	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
63	Persentase PSKS Profesional (PPKS profesional yang terdiri dari PPKS perorangan, lembaga dan keluarga yang mempunyai sertifikasi ataupun akreditasi)	%	82	84,62	86	87	88	89	90	
64	Persentase PPKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
65	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	71,15	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	
66	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
67	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,7	3.55-3.66	3.39-3.60	3.23-3.54	3.08-3.48	2.94-3.42	2.80-3.36	
68	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persentase	20,78	25	35	45	55	65	75	
69	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	71,4	72	72,25	72,5	72,75	73	73,35	
70	Persentase Penduduk Miskin yang Bekerja atau Bersekolah	%	65,62	66,28	66,94	67,61	68,28	68,97	69,66	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
71	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	66,33	66,6	66,87	67,14	67,42	67,69	67,96	
72	Persentase Penduduk Miskin dan Rentan (Kuintil 1) yang Bekerja Formal dan Purna Waktu	%	30,11	30,41	30,72	31,02	31,33	31,65	31,96	
73	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	37,4	55	62,62	70,24	77,86	85,48	93,1	
74	Persentase Tenaga Kerja Rentan yang Terlindungi	%	46,53	49	52	55	58	61	64	
75	Persentase Penduduk Miskin dan Rentan (Kuintil 1) usia produktif tidak sedang dalam pendidikan/bekerja	%	32,37	33,99	35,69	37,47	39,35	41,31	43,38	
76	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	Persentase	96,3	96,34	96,38	96,41	96,44	96,48	96,52	
77	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
78	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,47	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,4	
79	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	79,69	80,66	81,32	81,9	82,39	82,81	83,16	
80	Persentase Pelembagaan PUG sesuai standar	%	42,89	46,35	52,93	59,86	66,57	72,14	74,57	
81	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	71,5	73,42	74,96	76,18	77,17	77,95	78,58	
82	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	64,53	66,23	67,93	69,63	71,33	73,03	74,73	
83	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO	Rasio	10,53	10,07	10,05	9,8	9,6	9,4	9,2	
84	Total Fertility Rate (TFR)	Rata-rata Anak per Wanita	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	
85	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	72,05	73,55	75	76,3	77,5	78,6	79,5	
86	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
87	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	70,42	71,93	73,46	75,04	76,64	78,28	79,95	
88	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan	Poin	95,84	96,05	96,32	97,12	98,26	99,26	100,02	
89	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Hortikultura	Poin	103,83	105,78	107,24	109,15	111,25	113,87	115,34	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
90	NTUP Sub Sektor Tanaman Pangan	Poin	94,86	97,07	97,56	98,01	98,78	99,02	100,01	
91	Indeks Ketersediaan Pangan	Indeks	37,73	39,24	40,77	42,35	43,95	45,59	47,26	
92	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	72,15	72,85	73,42	74,02	74,05	74,09	74,12	
93	NTUP Sub Sektor Hortikultura	Poin	104,26	104,86	105,33	106,23	106,76	107,45	107,89	
92	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
93	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	70,77	71,85	72,06	72,27	72,48	72,69	72,9	
94	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	66,9	46,88	50,57	54,07	57,56	61,06	88,82	
95	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	74,8	74,82	74,83	74,85	74,86	74,88	74,89	
96	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persentase	25,39	25,21	25,4	27,32	29,49	31,36	33,52	
97	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
98	Indeks Desa	Nilai	0,8102	0,6935	0,7192	0,7449	0,7706	0,7963	0,822	
99	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	86,97	87,2	87,5	87,9	88,2	88,5	90	
100	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	74,95	75	75,2	75,4	75,6	75,8	76	
101	Persentase Desa Mandiri	%	53,61	44	47,14	50,28	53,43	56,57	59,71	
102	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	21,21	24,24	27,27	30,3	33,33	36,36	39,39	
103	Persentase Penduduk Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	100	100	100	100	100	100	
104	Persentase BUMDesa Bersama Maju	%	7,4	11,11	14,81	18,52	22,22	25,93	27,78	
105	Persentase BUM Desa Maju	Persentase	21,9	15	22	24	28	30	35	
106	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
107	Rasio Konektivitas Transportasi	Rasio	0,42	0,43	0,5	0,57	0,64	0,72	0,78	
108	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	69,95	70	70,05	70,1	70,15	70,2	70,25	
109	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	Rasio	0,21	0,23	0,32	0,41	0,49	0,58	0,68	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
110	Rasio Konektivitas Transportasi Laut	Rasio	0,62	0,62	0,69	0,73	0,79	0,86	0,88	
111	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
111	Indeks Transformasi Digital Nasional	poin	50,61	51,50	52,55	53,60	54,65	55,70	56,75	
112	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	poin	81,25	82,25	84,25	85,75	87,25	88,75	90,25	
113	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	3,75	3,75	(tidak digunakan)	(tidak digunakan)	(tidak digunakan)	(tidak digunakan)	(tidak digunakan)	
114	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	<i>indikator baru</i>	NA	1,8	1,9	2	2,1	2,2	
115	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	74,8	75	76	77	78	79	80	
116	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
117	Persentase Peningkatan Investasi	%	<i>indikator baru</i>	0,24	0,9	1,34	1,55	1,63	1,71	
118	Nilai Realisasi Investasi	triliun rupiah	88,29	88,5	89,3	90,5	91,9	93,4	95	
119	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,14	90,5	91	91,5	92	92,5	93	
120	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	79,9	80	81	81,5	82	82,5	83	
121	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA									
122	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	55,17	55,17	55,17	55,17	55,65	55,58	56	
			2023							
123	Jumlah Atlit yang Berprestasi Ditingkat Wilayah dan Nasional	Orang	298	63	93	264	298	78	102	
124	Jumlah Atlet yang kompetitif di even tingkat wilayah dan nasional	Orang	620	243	180	581	710	407	217	
125	Jumlah pemuda yang berperan aktif di masyarakat	Orang	391	460	420	320	320	350	370	
126	Jumlah organisasi pemuda yang aktif dalam pembangunan	Organisasi	10	10	10	10	10	10	10	
127	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	68,05	68,05	69,55	70,46	70,86	71,48	71,5	
128	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
129	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau	Persentase	45,45	54,54	63,63	74,74	83,83	94,94	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
130	Nilai Warisan Budaya	Nilai	53,02 (2023)	57,4	58,9	60,4	61,9	62,4	63,9	
131	Nilai Ekspresi Budaya	Nilai	26,54 (2023)	47,69	49,18	50,67	52,16	53,65	55,14	
132	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	68,05	69,05	70	70,7	71,3	71,8	72,1	
133	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
134	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	69,24	71	72	72,5	73	73,5	74	
135	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	86,97	90,05	90,25	91,1	91,15	91,2	91,25	
136	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	70,65	70,95	71,25	71,55	71,85	72,15	72,45	
137	Jumlah Perpustakaan tingkat Provinsi yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Perpustakaan	24	20	20	24	24	24	24	
138	Hasil Audit Kearsipan Internal	Nilai	95,53	97,05	98,05	98,1	98,15	98,2	98,25	
139	Hasil Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	86,97	90,05	90,25	91,1	91,15	91,2	91,25	
140	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
141	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	104,44	105,34	105,95	105,97	106	106,03	106,05	
142	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Indeks	100,35	101,56	102,98	103	103,02	103,03	103,04	
143	Konsumsi Ikan Masyarakat	Kg/KAP/TH	32,55	34,06	34,75	35,44	36,13	36,81	37,5	
144	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	253.246,20	255.915,02	256.855,60	257.799,38	258.746,37	259.696,60	260.550,09	
145	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	68,2	70	72	74	76	78	80	
146	Tingkat Pengelolaan Konservasi	Nilai	56,1	56,5	56,6	57	57,5	57,52	57,55	
147	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
148	Jumlah Pengeluaran Wisatawan	Juta Rupiah	10.790,21	26.947,14	27.629,36	27.735,91	29.902,58	32.779,33	36.519,65	
149	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jiwa	11.546.634	8.985.243	9.059.393	9.421.769	9.987.074	10.785.039	11.863.543	
150	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Jiwa	428.755	244.611	269.072	301.361	340.538	388.213	446.445	

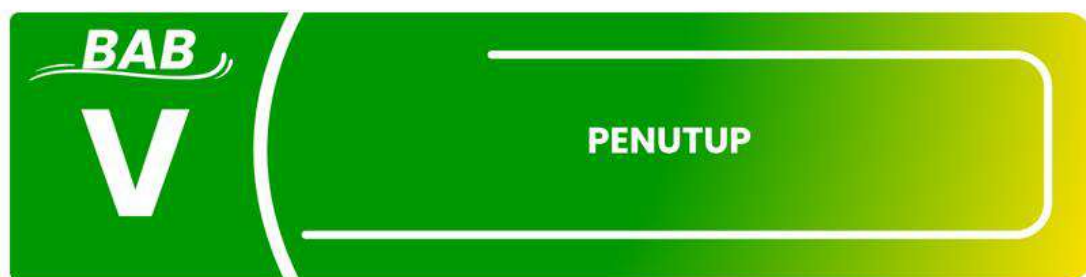
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
151	Nilai Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Rp	5,5	5,55	5,61	5,66	5,72	5,77	5,83	
152	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	1,27	1	1,1	1,17	1,22	1,27	1,32	
153	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	2,49	2,58	2,75	2,76	2,77	2,78	2,79	
154	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	74,55	74,55	74,56	74,57	74,58	74,59	74,6	
155	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
156	Produksi komoditas utama perkebunan	Ton	10.426.928	10.791.870	10.845.830	10.900.059	10.954.559	11.009.332	11.064.379	
157	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	70,7	71	71,4	71,8	72,2	72,6	73	
158	Luas areal tanaman komoditi utama yang dioptimalisasi	Hektar	4.348.042	4.487.179	4.576.923	4.668.461	4.761.830	4.857.067	4.954.208	
159	Produktivitas Komoditi Utama Perkebunan	Kg/Ha/Tahun	12.789	13.249	13.316	13.382	13.449	13.516	13.584	
160	Persentase peningkatan harga komoditi Utama Perkebunan (Kelapa Sawit)	%	20,4	10	10	10	10	10	10	
161	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
162	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Daging	%	64	66	68	70	72	74	76	
163	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	Nilai	94,94	98	100	101	102	102,5	103	
164	Persentase Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Lokal	%	0,57	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
165	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	75,2	75,85	76,5	77	78	79	80	
166	Persentase penurunan kasus penyakit hewan	%	30,1	10	10	10	10	10	10	
167	Persentase Peningkatan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	%	5,71	5	5	5	5	5	5	
168	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
169	Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	TonCO2e	46.743	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000	
170	Rasio Elektrifikasi	Persentase	95,19	95,26	96,6	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
171	Persentase Tata Kelola Sektor Pertambangan dan Air Tanah yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Persentase	83,04	84	85	86	87	88	89	
172	Jumlah Rumah Tangga yang Teraliri Listrik	KK	2.032.898	2.099.385	2.165.872	2.232.359	2.298.846	2.365.333	2.431.820	
173	Intensitas Energi	TOE/Milyar Rupiah	7,66	7,56	7,46	7,36	7,26	7,16	7,06	
174	Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Usaha Pertambangan yang Tertib	Persentase	74,26	75	76	77	78	79	80	
175	Persentase Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah yang Melakukan Upaya Konservasi	Persentase	91,4	92	92,5	93	93,5	94	94,5	
176	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	76,05	76,74	77,22	77,64	78,01	78,34	78,63	
177	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
178	Rata-rata Capaian Kinerja Produksi Industri dan Perdagangan	%	NA	11,49	11,65	11,81	11,9	12,01	12,11	
179	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	28,12	27,59	26,99	26,4	25,83	25,27	24,72	
180	Kontribusi PDRB sektor perdagangan	%	11,37	11,47	11,57	11,9	12	12,11	12,31	
181	Proporsi Jumlah Usaha Kecil Menengah	%	5,12	5,25	5,34	5,43	5,53	5,63	5,65	
182	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	68,65	68,85	68,9	68,95	70	70,05	70,1	
183	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	<i>indikator baru</i>	0,52	0,71	0,9	1,09	1,28	1,48	
184	SEKRETARIAT DAERAH									
	PENGELOLAAN PERBATASAN									
185	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	83,97	84,65	84,74	84,83	84,91	85	85,09	
186	Persentase BLUD yang berkinerja baik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
187	Indeks Kualitas Kebijakan	Skor	NA	65	68	70	73	75	78	
188	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	75,66	74	74,3	74,5	74,6	74,8	75	
189	Persentase Kawasan Perbatasan yang Dikelola	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
190	Persentase Kerjasama Pembangunan yang sudah dilaksanakan	%	NA	70	70	70	70	70	70	
191	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	87,5	84	84,3	84,8	85	85,5	86	
192	Persentase BUMD yang berkinerja baik	Persentase	100	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	
193	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,1	60,75	61,4	62,05	62,7	63,35	64	
194	Indeks Pelayanan Publik	poin	4,12	4,13	4,14	4,15	4,16	4,17	4,18	
195	Nilai Survey Indeks Berakhlak	poin	69,4	71,52	73,64	75	76	77	78	
196	Nilai LPPD	Nilai	3,25	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	
197	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	96,47	95,5	96,6	96,7	96,8	96,9	97	
198	SEKRETARIAT DPRD									
199	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	76	77	78	78,5	79	79,5	80	
200	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD Provinsi Riau	Indeks	76	77	78	78,5	79	79,5	80	
201	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	63,75	64	64,25	64,5	64,75	65	65,25	
202	PERENCANAAN									
203	IPPN Pemda	Indeks	83,04	83,91	85	86	87	88	89	
204	Persentase kesesuaian perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	%	82,93	86,72	87,59	88,36	89,66	90,52	91,38	
205	Persentase keterhubungan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	%	99	100	100	100	100	100	100	
206	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan nasional dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	71,48	73,78	75,63	77,34	78,13	79,69	81,25	
207	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	80,7	80,8	80,9	81	81,1	81,2	81,3	
208	KEUANGAN									
209	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	50	50	52	54	55	56	56	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
210	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
211	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	78,9	80	81	81,5	82	82,5	83	
212	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	91	91	92	92	92	92	92	
213	KEUANGAN									
214	Kategori Hasil Pengukuran Indeks Pengelola Keuangan Daerah	Kategori	B	B	A	A	A	A	A	
215	Kategori Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Kategori	B	B	B	B	B	B	B	
216	Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau (WTP)	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
217	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	80,1	80,13	80,14	80,16	80,17	80,19	80,2	
218	KEPEGAWAIAN									
219	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76,62	77,6	78,7	79,7	80,8	81,8	82,9	
220	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	79,1	79,1	79,26	79,3	79,4	79,5	79,6	
221	Indeks Sistem Merit	Indeks	325	328	330	333	336	339	343	
222	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
223	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Nilai	17,06	19,67	20,54	20,89	21,42	21,87	22,32	
224	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	76,75	77,9	78	78,5	79	79,5	80	
225	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN 20 JP/Orang Tahun	%	13,5	18	19	20	21	22	23	
226	Nilai kepuasan layanan Pelatihan	Nilai	86	90	91	92	93	94	95	
227	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
228	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	-	2,67	2,75	2,83	2,92	3,00	3,09	
229	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset	%	75	75	76	77	78	79	80	
230	Persentase Pemanfaatan Hasil Inovasi	%	53,63	58,68	61,26	63,84	66,42	69	70,59	
231	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	71,08	72,1	74,3	75,2	77,8	79,05	80	
232	PENGLOLAAN PENGHUBUNG									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
233	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung terhadap Stakeholder	Nilai	85	85	85,5	86	86,5	87	87,5	
234	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	67,1	67,5	68	69	70	71	72	
235	INSPEKTORAT DAERAH									
236	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terkelola dan Terukur	
237	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	81,8	82	82,3	82,6	82,8	83	83,5	
238	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Indeks	3,234	3,241	3,277	3,313	3,349	3,386	3,422	
239	Nilai Kapabilitas APIP	Poin	3,59	3,598	3,674	3,718	3,762	3,806	4,069	
240	Indeks Manajemen Resiko (MRI)	Skor	3,472	3,502	3,594	3,685	3,777	3,869	3,961	
241	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
242	Indeks Harmoni Sosial	Indeks	<i>indikator baru</i>	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7	
243	Indeks Harmoni Religius	Indeks	<i>indikator baru</i>	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7	
244	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	77,06	77,36	77,66	77,96	78,26	78,56	78,86	
245	Indeks Kewarganegaraan	Indeks	<i>indikator baru</i>	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7	
246	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	69,45	70,25	70,75	71,25	71,75	72,25	72,75	
247	Indeks Toleransi	Indeks	<i>indikator baru</i>	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7	
248	Indeks Pluralisme	Indeks	<i>indikator baru</i>	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7	
249	Indeks Kerjasama	Indeks	<i>indikator baru</i>	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7	
250	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase	70,05	70,05	70,1	70,15	70,2	70,25	70,3	
251	Indeks Kebebasan	Indeks	82,71	83,01	83,31	83,61	83,91	84,21	84,51	
252	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	74,17	74,47	74,77	75,07	75,37	75,67	75,97	



**Riau Rumah Rumpun Melayu,
Merawat Tuah Menjaga Marwah,
Takkan Melayu Hilang di Bumi**

BAB **V** **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045, RTRW, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJPN Tahun 2025-2045.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan lainnya oleh pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah untuk masa 5 tahun ke depan.
2. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Perangkat Daerah Provinsi Riau berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
4. Gubernur dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau 2025-2029 dengan

mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah, sekaligus berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
6. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029.
7. Penyusunan RKPD Provinsi Riau pada Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Riau Tahun 2026 sampai dengan 2030.
8. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau 2025-2029 sehingga terwujud sinergi dan integrasi pembangunan di Provinsi Riau.

5.1 Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman pembangunan di Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun sampai dengan Tahun 2030 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagai dasar hukum dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Oleh karena itu, dokumen RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam:

1. Kepala Daerah dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
2. DPRD Provinsi Riau berkewajiban menetapkan dan melaksanakan peraturan daerah ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam penjabarannya pada RKPD maupun dokumen perencanaan lainnya. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi

terhadap konsistensi penjabaran dalam dokumen perencanaan selanjutnya.

3. Tokoh masyarakat, pimpinan organisasi keagamaan, lembaga budaya, komunitas adat, organisasi sosial, organisasi kepemudaan dan lembaga kemasyarakatan lainnya, diharapkan berperan dalam penyusunan program dan kegiatan serta mengawasi pelaksanaannya;
4. Pimpinan perguruan tinggi di Provinsi Riau berperan serta dalam pengawasan pada penjabaran lebih lanjut dalam dokumen perencanaan daerah maupun pelaksanaannya oleh pemerintah daerah serta semua pemangku kepentingan (*stakeholder*).
5. Dalam melaksanakan RPJMD Provinsi Riau tahun 2025- 2029, Pemerintah Provinsi Riau wajib menerapkan 3 pilar dari *Good Governance* yang meliputi **Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi** untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2029 ini yaitu **Transparansi** : berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (*reliable*). Transportasi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau. **Akuntabilitas** : atau *accountability* adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implelementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi. **Partisipasi** : pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu dinas dan antar dinas, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat

pada pemerintah Provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Perangkat Daerah Provinsi Riau dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada diwilayah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya.
7. Dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Provinsi Riau agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.
8. Evaluasi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dilakukan paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) tahun.
9. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, sinergi baik antar daerah, dan menjamin pelaksanaan transformasi pada setiap tahapan RPJMD hingga tahun 2030 antar fungsi Pemerintah Daerah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menjawab tantangan, permasalahan dan isu strategis pembangunan Provinsi Riau maka dilakukan penyusunan Visi dan Misi Provinsi Riau Tahun 2025-2029. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah ” **Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju**”. Upaya pemerintah Provinsi Riau dalam mengatasi pengendalian terhadap resiko-resiko perencanaan pembangunan jangka menengah yaitu:

1. Melakukan mitigasi yang cermat terhadap perubahan kebijakan.
2. Menjalinkan kerjasama lintas sektor untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana.
3. Meningkatkan capaian pembangunan dan kualitas tata kelola pemerintah.
4. Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah.
5. Meningkatkan perkembangan inovasi dan pelayanan publik pemerintah daerah.

5.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan dilaksanakan secara sistematis untuk memastikan kualitas dokumen perencanaan yang baik. Hal ini dilakukan melalui:

1. Pengendalian Perencanaan, yaitu:
 - a. Dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari proses penyusunan hingga penetapan dokumen perencanaan.
 - b. Memastikan integrasi program dan kegiatan antar Perangkat Daerah.
 - c. Menjamin keterkaitan antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan.
2. Evaluasi Perencanaan, yaitu:
 - a. Menilai kualitas dokumen perencanaan yang telah disusun.
 - b. Mengidentifikasi kesenjangan antara rencana dengan kebutuhan pembangunan.
 - c. Menyediakan umpan balik untuk perbaikan proses dan substansi perencanaan.
3. Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan, yaitu:
 - a. Rapat koordinasi perencanaan pembangunan secara berkala.
 - b. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
 - c. Konsultasi publik dengan melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, dan sektor swasta.

5.3 Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Riau. Hal ini dilakukan melalui:

1. Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan, yaitu:
 - a. Pemantauan triwulanan terhadap capaian kinerja pembangunan.
 - b. Rapat koordinasi tingkat pimpinan secara berkala untuk membahas kemajuan dan hambatan pelaksanaan program.
 - c. Pengawasan melekat oleh masing-masing Perangkat Daerah.
 - d. Pengendalian berbasis sistem informasi yang terintegrasi.
2. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan:
 - a. Evaluasi akhir periode RPJMD pada tahun 2029.

- b. Evaluasi tahunan melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur.
 - c. Evaluasi kinerja berbasis indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
3. Pelaporan:
- a. Penyusunan laporan triwulanan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - b. Laporan kinerja tahunan yang mencakup capaian indikator kinerja.

5.4 Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di Provinsi Riau, perlu ditetapkan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan:

1. Keberlanjutan Program dan Kegiatan:
 - a. Program dan kegiatan yang sedang berjalan akan tetap dilaksanakan hingga selesai meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.
 - b. Adaptasi program dan kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan dinamika perkembangan dan tantangan baru yang dihadapi.
2. Transisi Kepemimpinan:
 - a. Penyusunan dokumen transisi kepemimpinan yang memuat capaian kinerja pembangunan.
 - b. Inventarisasi isu-isu strategis dan prioritas pembangunan yang belum terselesaikan.
 - c. Penyampaian informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan kepada kepemimpinan baru.
3. Penyesuaian Kebijakan:
 - a. RPJMD dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dalam hal terjadi perubahan kepemimpinan sebagai hasil dari pemilihan kepala daerah.
 - b. Perubahan RPJMD tetap mengacu pada RPJPD Provinsi Riau dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.5 Pengarusutamaan Pembangunan

RPJMD Tahun 2025–2029 menggunakan lima pengarusutamaan pembangunan. Esensi dari pengarusutamaan pembangunan adalah memperluas kemanfaatan dari hasil pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan,

sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pengarusutamaan dilakukan melalui pengintegrasian secara konsisten pendekatan ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah, serta inisiatif pembangunan lainnya yang dilakukan oleh *non state actors* sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial

Upaya peningkatan kesetaraan gender serta penguatan peran Perempuan, Pemuda dan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (PUG dan Inklusi Sosial) dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarkan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.

2. Pengarusutamaan SDGs

Pengarusutamaan Sustainable Development Goals (SDGs) adalah mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan nasional dan daerah melalui (a) setiap kebijakan Pemerintah Daerah harus mendukung percepatan pencapaian SDGs 2030 (b) mengintegrasikan target SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), (c) menyusun Rencana Aksi Daerah, Penguatan kolaborasi multipihak, pemantauan dan evaluasi pencapaian target SDGs dan (e) Inklusi Sosial dan Keberlanjutan, semua program pembangunan harus mengintegrasikan prinsip inklusi sosial dengan fokus pada kelompok rentan dan marginal, serta prinsip keberlanjutan lingkungan.

3. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital dilakukan melalui (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital, (2) mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya, (3) meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia digital serta kegiatan dan pemanfaatan riset, pengembangan, serta inovasi (4) mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital (termasuk aplikasi dan superapps), serta literasi digital secara luas, (5) membangun kedaulatan digital dengan

meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang kondusif, (6) mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri, dan (7) membangun dan mengembangkan tata kelola yang dapat menciptakan dan mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi masyarakat dunia usaha dan pemerintah.

4. Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

Pembangunan Rendah Karbon memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan daya dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Pada RPJMD Tahun 2025-2029, strategi pembangunan rendah karbon dan dan berketahanan iklim dilaksanakan melalui inisiatif Green for Riau yang fokus pada praktik pengelolaan hutan dan tata guna lahan yang berkelanjutan dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan berbasis yurisdiksi. Selanjutnya aksi iklim yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor penggunaan lahan adalah pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi. Serta aksi iklim lainnya seperti implementasi praktik pertanian organik dan pengelolaan limbah.

Pembangunan Berketahanan Iklim merupakan kombinasi upaya adaptasi, penanggulangan risiko bencana, dan peningkatan ketahanan untuk memperkuat sistem pembangunan agar tahan terhadap guncangan atau dampak negatif akibat bahaya iklim dan aspek sosial ekonomi dan ekologi. Hal ini difokuskan pada 4 (empat) sektor prioritas yaitu sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan sektor Kesehatan. Pembangunan berketahanan iklim diarahkan untuk mencapai persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDRB dengan peningkatan ketahanan iklim pada 4 (empat) sektor prioritas melalui (1) peningkatan ikatan ketahanan iklim pesisir dan laut, (2) pengelolaan sumber daya adaptif iklim, (3) pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim, (4) pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim dan (5) tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target pembangunan.

5.6 Manajemen Resiko

1. Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca dan Emisi Gas Rumah Kaca

Berdasarkan proyeksi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, target persentase penurunan intensitas emisi GRK tahun 2030 sebesar 88,82 persen, dengan baseline tahun 2024 sebesar 66,90 persen. Namun pada tahun 2025 angka ini menurun menjadi sebesar 46,88%. Peningkatan cukup drastis terjadi pada akhir periode RPJMD, yaitu dari yaitu angka 61,06% menjadi 88,82%. Target tahun 2030 ini cukup ambisius mengingat Pemerintah Provinsi Riau telah menghitung proyeksi intensitas emisi GRK secara mandiri, dimana proyeksi tahun 2030 sebesar 59,45 persen dengan baseline tahun 2024 sebesar 44,73 persen. Kondisi eksisting saat ini, capaian persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Provinsi Riau Tahun 2022 baru mencapai 17,90 persen. Mempertimbangkan kondisi lahan gambut di Provinsi Riau sebesar 4,9 juta ha dan sekitar 55 persen sudah terkonversi sebagai fungsi budidaya, maka dekomposisi gambut tersebut akan meningkatkan emisi GRK, di samping kegiatan industri dan kebakaran lahan gambut yang masih terjadi hingga saat ini. Selain itu, parameter perhitungan intensitas emisi GRK lebih fokus pada sektor energi (pembangkit) dimana hal ini merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa intensitas emisi GRK dan status emisi GRK dikeluarkan oleh dua entitas dengan pendekatan perhitungan yang berbeda. Selanjutnya, pada tahun 2025 terjadi defisit anggaran Pemerintah Provinsi Riau yang cukup signifikan. sehingga menyebabkan terhentinya hampir seluruh kegiatan termasuk aksi Pembangunan rendah karbon. Oleh sebab itu, ke depannya perlu kajian komprehensif berbasis data dalam hal proyeksi target imperatif penurunan intensitas emisi GRK khusus provinsi dengan spesifik gambut. Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Riau menerima angka target imperatif untuk proyeksi Emisi GRK dan Persentase penurunan intensitas emisi GRK, namun dengan catatan bahwa sekitar 30% target ini *merupakan kapasitas nasional* untuk aksi Pembangunan rendah karbon di Provinsi Riau.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sangat tergantung pada komitmen antara penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat di Provinsi Riau. Untuk itu perlu sinergi dan kerjasama guna mewujudkan visi pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

GUBERNUR RIAU,

ttd

ABDUL WAHID